



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

# PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2023

Tentang  
**Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024**

**“Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Wilayah  
yang Andal untuk Percepatan Transformasi Ekonomi  
yang Inklusif dan Berkelanjutan”**

Pemerintah  
Provinsi Kalimantan Timur  
**Tahun 2023**



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Gubernur sebagai Kepala Daerah mempunyai tugas untuk menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1540);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Badan Daerah dalam lingkup Pemerintah Provinsi.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

#### Pasal 2

- (1) RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 terdiri atas:
- BAB I. Pendahuluan;
  - BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah;
  - BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
  - BAB V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/ Kota;
  - BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
  - BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - BAB VIII. Penutup.
- (2) RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 3

- (1) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pembangunan paling utama dari RKPD yang harus dicapai pada tahun 2024 yang diambil dari indikator tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah.
- (2) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada angka 78,32;
  - b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,10-4,90 persen;
  - c. Tingkat Kemiskinan sebesar 5,78 persen;
  - d. Indeks Gini pada angka 0,316;
  - e. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada angka 75,00;
  - f. Persentase Penurunan Emisi dari Business As Usual (BAU) sebesar 31,05 persen;
  - g. Indeks Reformasi Birokrasi pada angka 69,00 (B);
  - h. Prevalensi Stunting sebesar 12,83 persen;

- i. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,46 persen;
- j. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada angka 67,31;
- k. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) pada angka 7,74; dan
- l. Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 10,39 persen.

#### Pasal 4

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 selanjutnya digunakan sebagai:

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- b. pedoman penyesuaian prioritas pembangunan Provinsi dengan Kabupaten/Kota Tahun 2024 Tahun 2024, dan;
- c. pedoman penyusunan Rancangan KUA serta Rancangan PPAS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi penambahan sub kegiatan baru pada KUA serta Rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD.
- (2) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

#### Pasal 6

- (1) Perubahan RKPD hanya dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah atau keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan.

Pasal 7

Pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Juni 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 20.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



3

SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

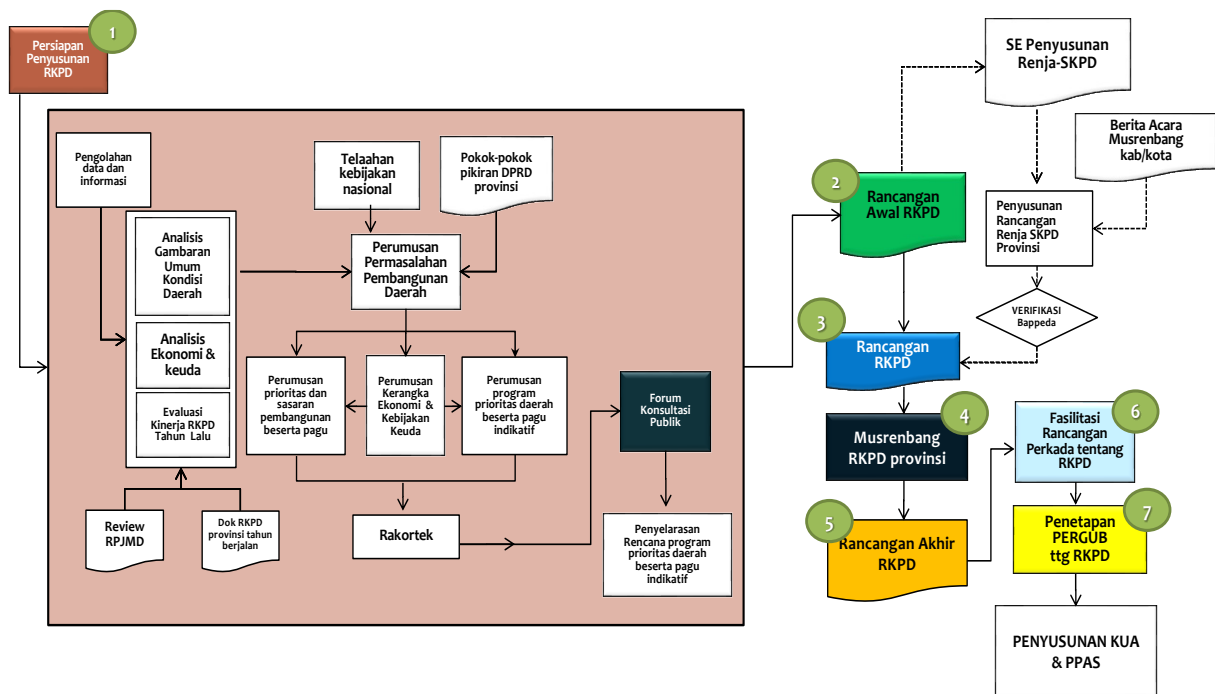
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah periode 2024-2026, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD 2024 ini selanjutnya dijadikan sebagai pedoman kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD). Penyusunan RKPD 2024 juga mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024, RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendukung pada pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), Road Map Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2020-2024, serta menerapkan peraturan perundangan yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya.

Dokumen RKPD Tahun 2024 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);

3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD 2024 akan difokuskan pada upaya penguatan resiliensi perekonomian daerah melalui diversifikasi ekonomi yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan diiringi penguatan daya saing sumber daya manusia, aksesibilitas dan konektivitas layanan infrastruktur yang andal, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel.



Gambar I.1  
Bagan Alur Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2024

Penyusunan RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS) melalui 8 (delapan) tahapan yang dapat dilihat pada Gambar I.1, yakni sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan RKPD;
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;

3. Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD;
4. Penyusunan Rancangan RKPD;
5. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
6. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD;
7. Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD oleh Kementerian Dalam Negeri; dan
8. Penetapan RKPD.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

### 1.2.1 Undang-Undang

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4).

### 1.2.2 Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah

Landasan hukum yang digunakan dalam bentuk Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur

Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 1); dan

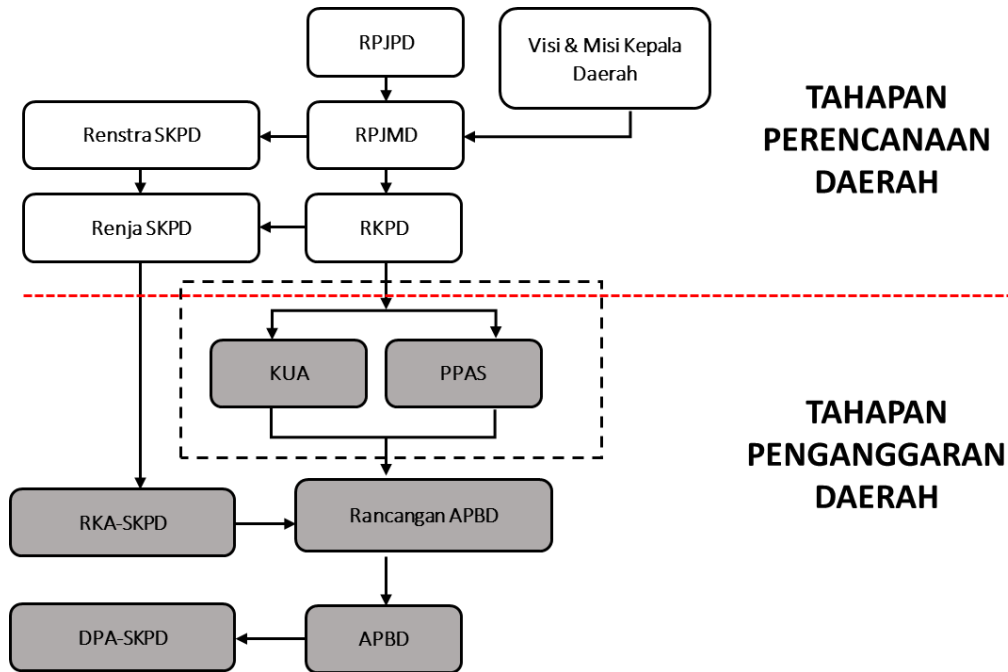
20. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sistem perencanaan pembangunan merupakan rangkaian dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, dimulai dari perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, yang sinergis antara nasional dan daerah. Oleh karena itu, penyusunan RKPD 2024 berpedoman pada :

- a. Kebijakan tahapan pelaksanaan RPD 2024-2026 tahun pertama, yaitu penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, serta penyelarasan prioritas pembangunan, program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota;
- b. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, yaitu penyelarasan prioritas pembangunan, program dan kegiatan tahunan daerah dengan Tema, agenda pembangunan, sasaran pengembangan wilayah dan program strategis nasional dalam RKP Tahun 2024.

Selanjutnya RKPD 2024 dijabarkan kedalam Rencana Kerja Perangkat daerah (Renja –PD), KUA/PPAS dan Rancangan APBD. Adapun hubungan keterkaitan antar dokumen pembangunan tersebut dapat terlihat pada Gambar 1.2. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri. Sistem ini dimulai dari tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Selanjutnya hasil perencanaan ini dijadikan sebagai acuan pada tahap penganggaran dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.



Gambar I.2  
Hubungan Antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

#### 1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam menjabarkan perencanaan pembangunan tahun 2024.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, yaitu:

- Menyelaraskan dan mensinergikan program pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- Menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024.

#### 1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat gambaran umum kondisi daerah (kondisi geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing), evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun berjalan dan realisasi RPJMD, serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memuat kondisi ekonomi daerah tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta penyajian aspirasi dan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

BAB V. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi yang nantinya akan menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota.

BAB VI. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Mengemukakan rencana kerja yang berisi tentang seluruh rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan

tahun perencanaan pembangunan RKPD, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD.

**BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Mengemukakan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

**BAB VIII. Penutup**

Mengemukakan kaidah pelaksanaan RKPD yang diantaranya meliputi peran dokumen RKPD dalam pelaksanaan pembangunan serta mekanisme pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Proses pengembangan hilirisasi industri di Provinsi Kalimantan Timur sebagai upaya transformasi ekonomi dari basis sektor ekonomi yang semula bersifat *unrenewable resources* menjadi *renewable resources* perlu mendapatkan perhatian besar. Sektor industri pengolahan dapat menjadi penopang ekonomi yang *sustainable* bagi daerah untuk menggeser dominasi sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur perekonomian. Besarnya potensi keanekaragaman SDA, baik yang terbarukan maupun tak terbarukan dapat dioptimalkan sebagai sumber bahan baku industri. SDA yang tidak terbarukan diantaranya berupa tambang batubara dan minyak bumi. Sedangkan SDA terbarukan yang dapat memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi hijau seperti kelapa sawit, karet, padi, perikanan, peternakan dan pariwisata. Oleh karena itu, untuk meningkatkan nilai tambah produk, diperlukan hilirisasi industri yang dapat menyentuh ekonomi kerakyatan hingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi kawasan.

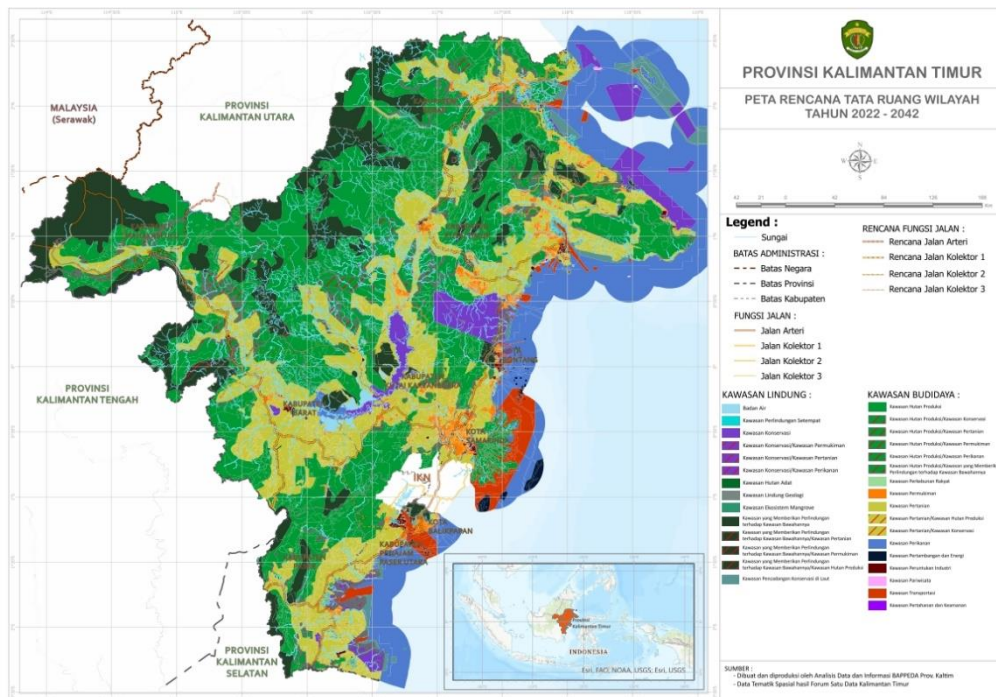
RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagai dokumen perencanaan tahunan, dalam proses penyusunannya perlu mempertimbangkan isu strategis yang berkembang dengan memperhatikan berbagai aspek pembangunan baik sosial, ekonomi dan lingkungan. Proses perumusan kebijakan pembangunan daerah harus dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan tahapan analisa terhadap potensi, kelemahan dan tantangan pembangunan daerah. Pada bagian ini akan dijabarkan kinerja pembangunan daerah yang mencakup gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi dan misi kepala daerah serta kebutuhan perumusan strategi.

##### 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, Provinsi Kalimantan Timur terletak antara 2° 37' 12.99" Lintang Utara (LU) dan -2° 28' 19.31" Lintang Selatan (LS), 113° 50' 3.61-119° 14' 13.06" Bujur Timur (BT). Secara administratif, batas wilayah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Negara Malaysia bagian Timur;
2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Selat Makassar; dan
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Selat Makassar dan Laut Sulawesi.

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan cakupan wilayah yang cukup luas, yaitu mencapai 15.344.552 ha. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Timur berupa daratan dengan luasnya mencapai 12.446.112 ha dan wilayah laut yang mencapai 2.898.439 ha. Bentangan alam yang luas ini menjadikan Provinsi Kalimantan Timur memiliki



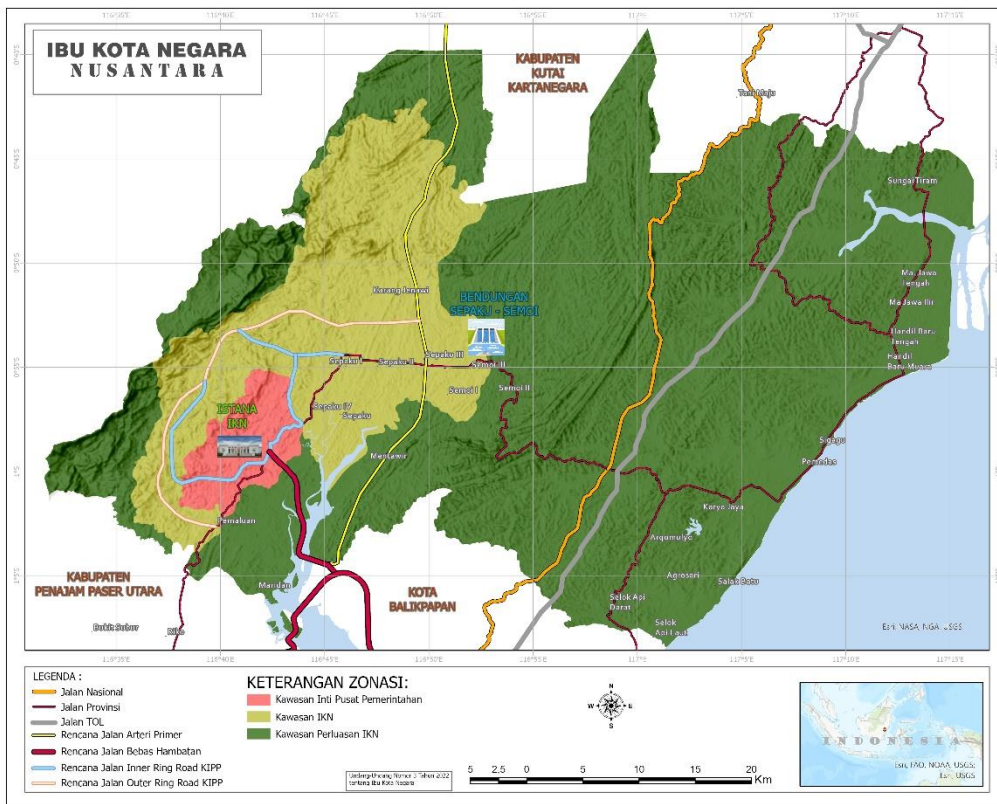
peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya alam yang ada di dalamnya.

Gambar II.1  
Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur  
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Jika dilihat dari peruntukan kawasannya, Kalimantan Timur terdiri dari Kawasan Lindung seluas 2.974.766 Ha dan Kawasan Budidaya seluas 12.369.786 Ha. Kawasan Lindung terdiri dari Badan Air, Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya, Kawasan

perlindungan setempat, Kawasan Konservasi, Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut, Kawasan Hutan Adat, Kawasan Lindung Geologi dan Kawasan Ekosistem Mangrove sedangkan Kawasan Budidaya terdiri dari Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Pertanian, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Permukiman, Kawasan Transportasi dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

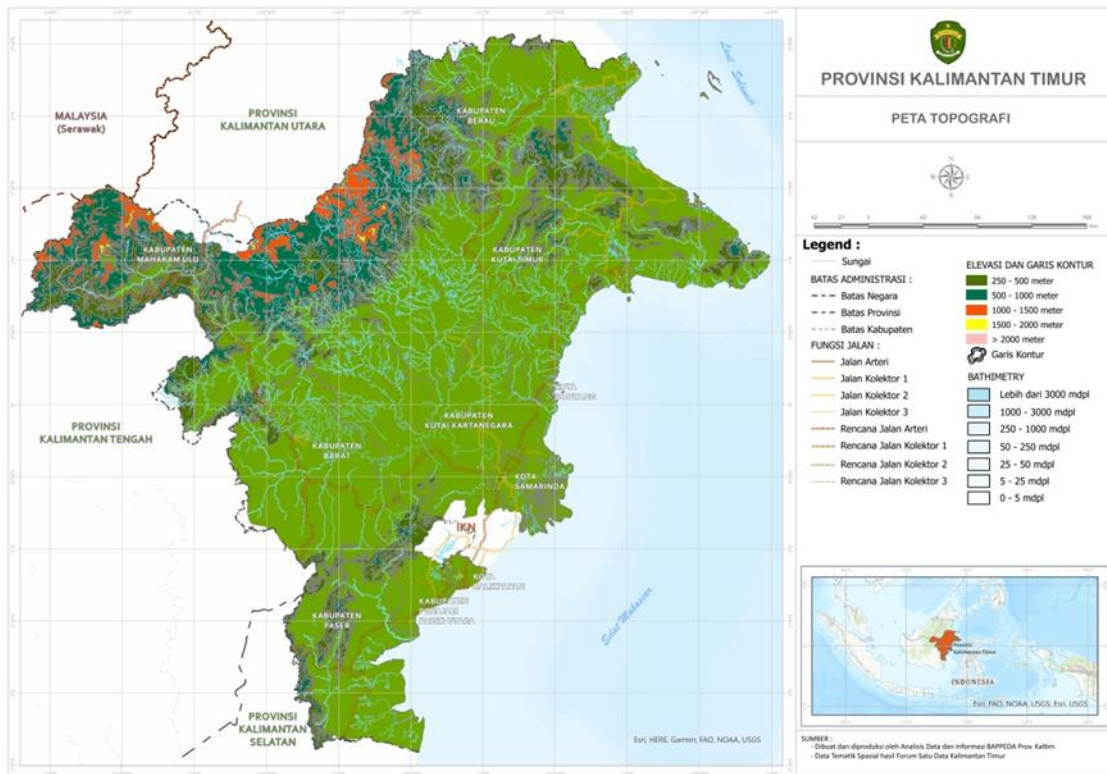
Setelah ditetapkannya Provinsi Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melalui undang – undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur menjadi berkurang. Luas wilayah IKN Nusantara mencapai 324.331 Ha yang terdiri dari luas wilayah daratan mencapai 256.142 ha dan wilayah laut mencapai 68.189 ha. Sehingga luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur setelah ditetapkannya IKN Nusantara mencapai 16.407.734 ha dengan luasan wilayah daratan mencapai 12.478.550 ha dan wilayah laut mencapai 3.929.184 ha.



Gambar II.2  
Peta Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

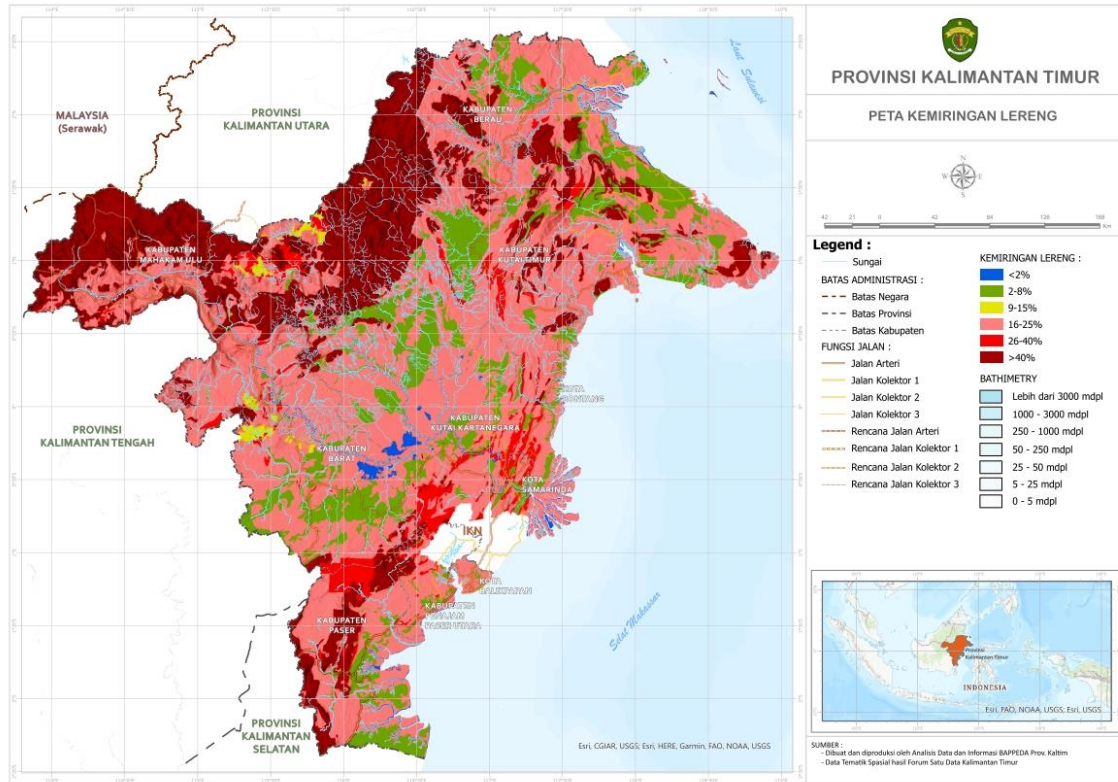
Topografi Provinsi Kalimantan Timur bergelombang dari kemiringan landai sampai curam, dengan ketinggian berkisar antara 0-1500 meter diatas permukaan laut dengan kemiringan antara 0-60 persen. Daerah dataran rendah pada umumnya dijumpai pada Kawasan sepanjang sungai. Sedangkan daerah

perbukitan dan pegunungan memiliki ketinggian rata-rata lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat di bagian barat laut dengan kemiringan 300 persen, terdapat di bagian barat laut yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Kondisi topografi tersebut sangat berpengaruh terhadap peluang budidaya suatu jenis komoditi, potensi dan persediaan air, dinamika hidrologi dan kerentanan terhadap erosi.



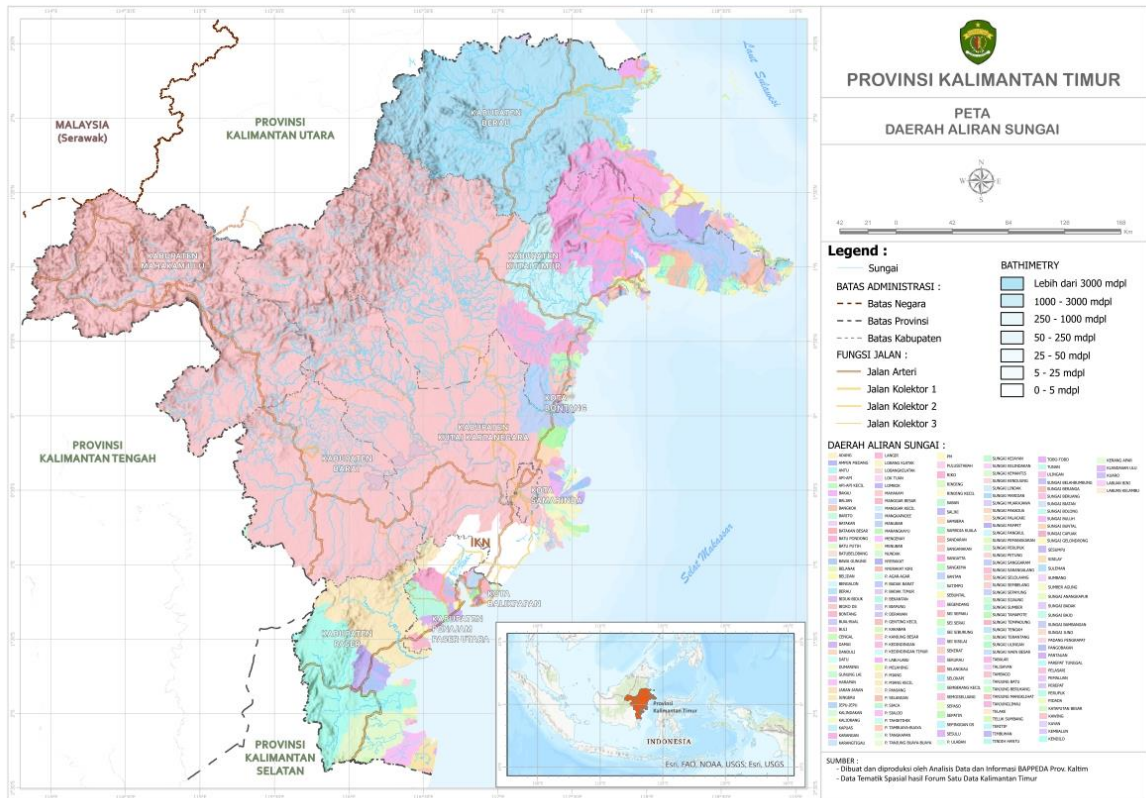
Gambar II.3  
Peta Topografi Provinsi Kalimantan Timur  
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Berdasarkan ketinggian lahan di Provinsi Kalimantan Timur, tertinggi adalah wilayah pada ketinggian 100-500 M sebesar 4,23 juta Ha (terutama di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau), disusul wilayah pada ketinggian 25-100 M sebesar 4,12 Ha, dan wilayah pada ketinggian 0-25 M sebesar 2,08 Ha. Artinya wilayah di Kalimantan Timur cenderung didominasi oleh dataran rendah yang subur karena merupakan wilayah pengendapan. Sementara itu yang termasuk daerah dataran tinggi di Provinsi Kalimantan Timur (pada ketinggian 1000-15000 M) sebesar 2,02 juta Ha terutama pada Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.



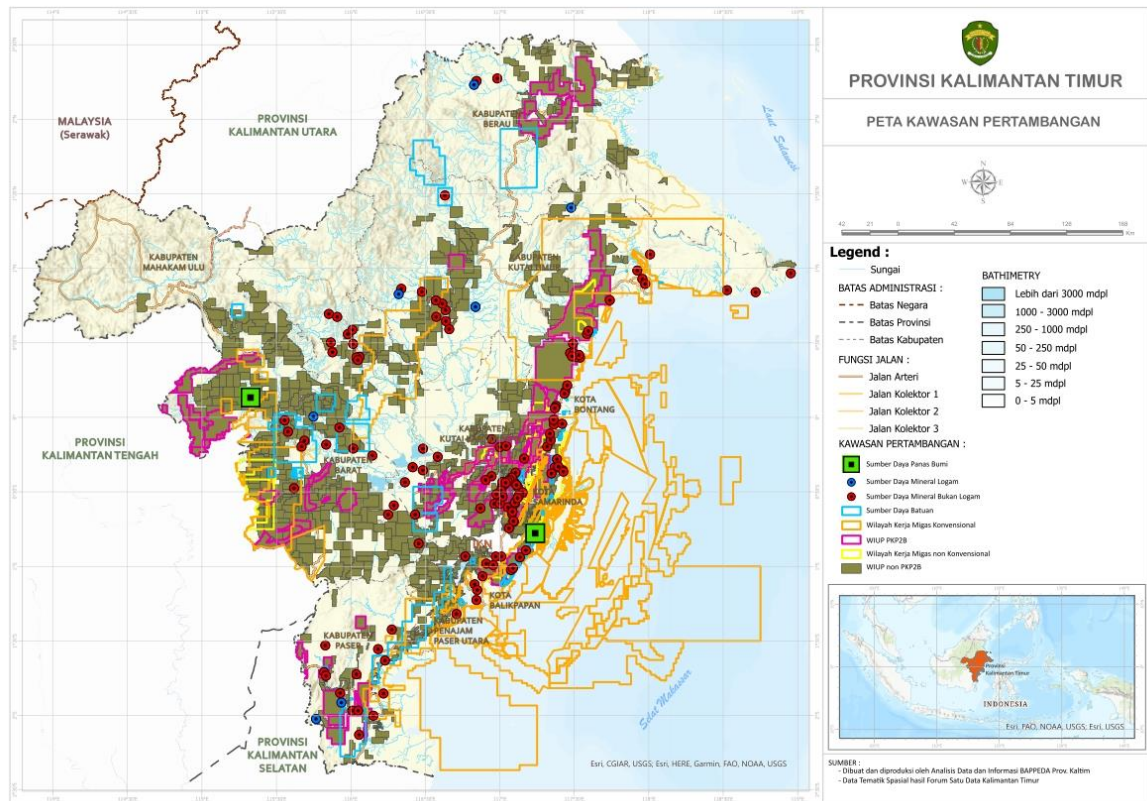
Gambar II.4  
Peta Kemiringan Lereng Provinsi Kalimantan Timur  
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Jika dilihat dari kemiringan lahan di Provinsi Kalimantan Timur, wilayahnya didominasi dataran dengan kelas kemiringan 15-25 persen seluas 7,23 juta Ha termasuk kategori agak curam, terutama pada Kabupaten Kutai Timur, Kutai Barat dan Berau. Selanjutnya, luas wilayah pada kemiringan diatas 40 persen (curam) sebesar 2,91 juta Ha dan kemiringan 2-15 persen sebesar 1,82 juta Ha (datar dan landai). Beberapa sungai yang ada di wilayah Kalimantan Timur adalah Sungai Berau, Sungai Kelai, Sungai Dondang, Sungai Mahakam, Sungai Belayan, Sungai Jembayan, Sungai Karang Mumus, Sungai Kaso, Sungai Kedang Pahu, Sungai Lawa, Sungai Loa Haur, Sungai Telen.



Gambar II.5  
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Provinsi Kalimantan Timur  
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Aktivitas geologi yang telah berlangsung di wilayah Kalimantan Timur menghasilkan berbagai jenis batuan. Jenis batuan yang terbentuk berupa sedimen, batuan beku (ekstrusif dan intrusif) dan batuan metamorfik ditemukan berbagai kandungan mineral baik logam (mineral logam) dan non-logam (*mineral industry*) serta bahan konstruksi yang memiliki nilai ekonomis sebagai potensi bahan galian tambang yang tersebar di kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Pada praktiknya keberadaan bahan galian tambang yang berlimpah, menarik orang untuk mengeksploitasi secara berlebihan sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan. Perlu dilakukan pertambangan berkelanjutan sesuai kaidah “*Good Mining Practice*” yang berwawasan lingkungan. Potensi kawasan tambang Provinsi Kalimantan Timur tersebar di berbagai daerah yang disajikan pada gambar dibawah ini.



Gambar II.6  
Peta Kawasan Tambang Provinsi Kalimantan Timur  
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

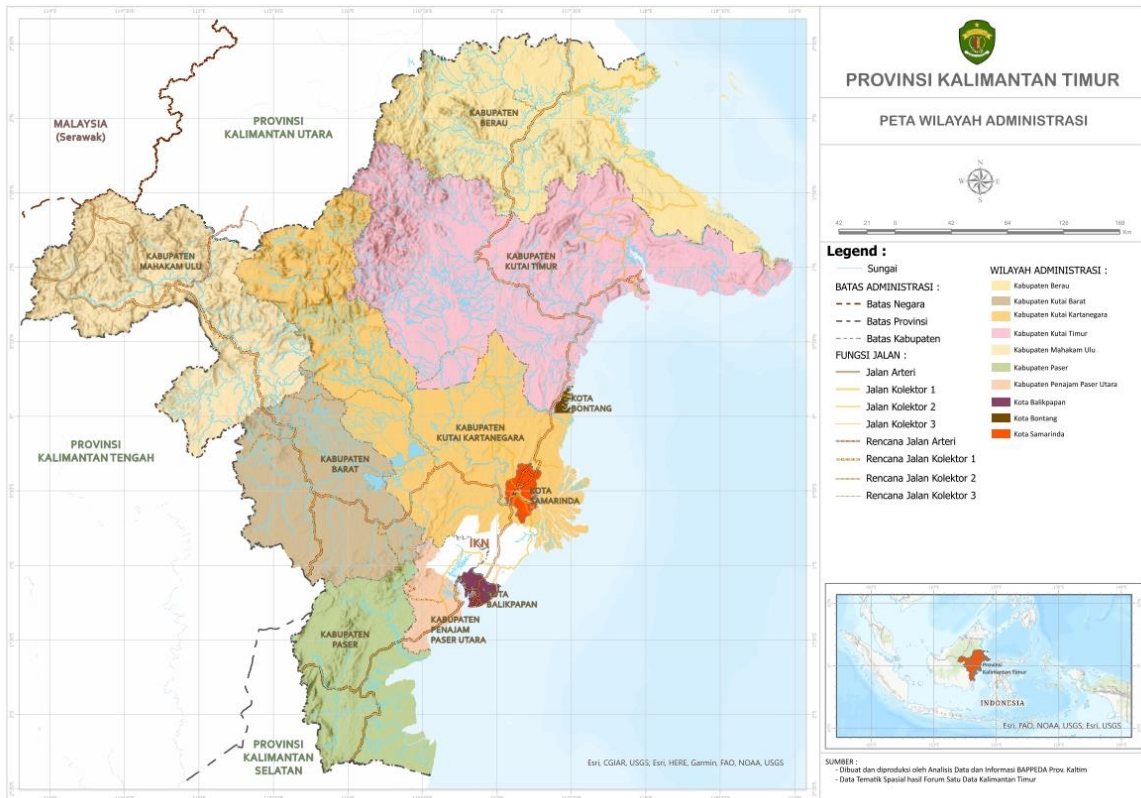
Ditinjau dari segi administrasi pemerintahan, Provinsi Kalimantan Timur terbagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, yaitu: Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Mahakam Ulu, serta memiliki 3 (tiga) wilayah administrasi kota, yaitu: Balikpapan, Bontang, dan Samarinda. Adapun pembagian wilayah administratif Provinsi Kalimantan Timur menurut kabupaten/kota dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel II.1  
Data Wilayah Administratif Provinsi Kalimantan Timur

No	Kabupaten/Kota	Luas wilayah (Ha)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa dan Kelurahan
1	Paser	1.104.644	10	144
2	KUBAR	1.361.117	16	194
3	KUKAR	2.529.239	20	237
4	KUTIM	3.122.720	18	141
5	Berau	2.137.135	13	110
6	PPU	203.254	4	54
7	MAHULU	1.849.224	5	50
8	Balikpapan	51.023	6	34
9	Samarinda	71.678	10	59
10	Bontang	16.077	3	15
Luas Wilayah Laut 12 Mil		2.898.439	-	-
<b>Kalimantan Timur</b>		<b>15.344.552</b>	<b>105</b>	<b>1.038</b>

Sumber: RTRW Provinsi KALTIM 2023-2042

Gambaran mengenai wilayah administratif disajikan dalam bentuk Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur seperti gambar II.7.



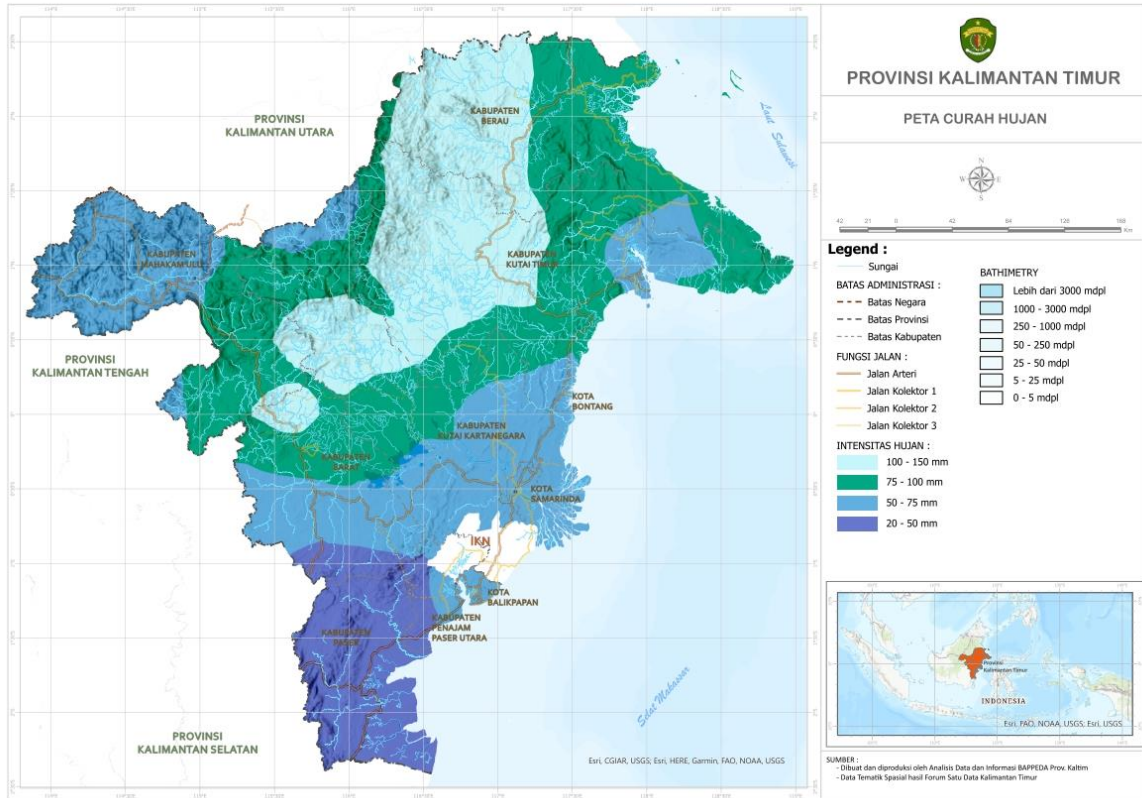
Gambar II.7  
 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Timur  
 (Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Dari sisi klimatologi, pengukuran iklim Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui tiga stasiun bandara, yaitu: di wilayah Samarinda, Balikpapan, dan Tanjung Redeb. Diketahui bahwa kondisi curah hujan Provinsi Kalimantan Timur yang dilihat dari tiga stasiun ini berada dalam kategori sedang. Tabel II.2 berikut ini menunjukkan statistik klimatologi Provinsi Kalimantan Timur di tiga stasiun bandara.

Tabel II.2  
 Statistik Klimatologi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

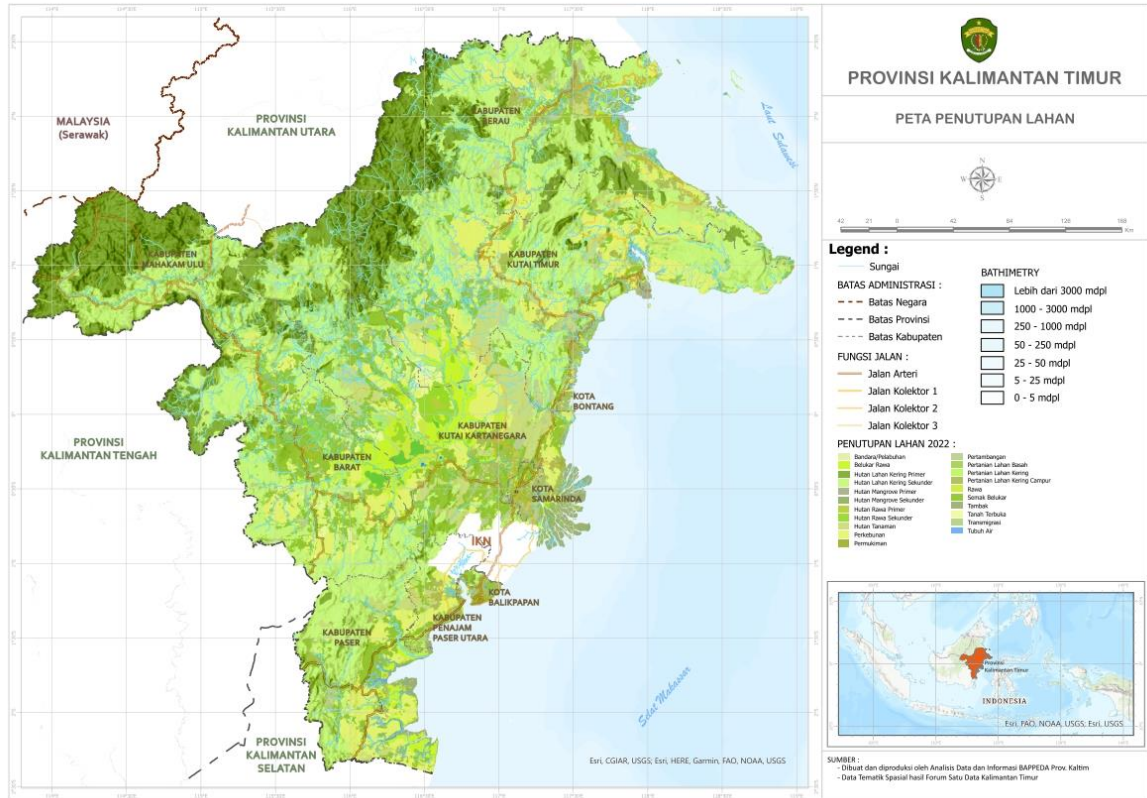
No	Uraian	Stasiun		
		Samarinda	Balikpapan	Tanjung Redeb
1	Suhu Udara (°C)			
	- Minimum	24,50	24,20	23,50
	- Maksimum	32,30	31,10	32,70
2	Kelembaban (%)	82	83,30	87
3	Tekanan Udara (Mbs)	1.011,60	1.010,10	1.011,50
4	Kecepatan Angin (Knot)	4,00	3,00	3,50
5	Curah Hujan (mm)	2.599	2.947	2.312
6	Penyinaran Matahari (%)	42	46	49

Sumber: BMKG Wilayah KALTIM, 2023



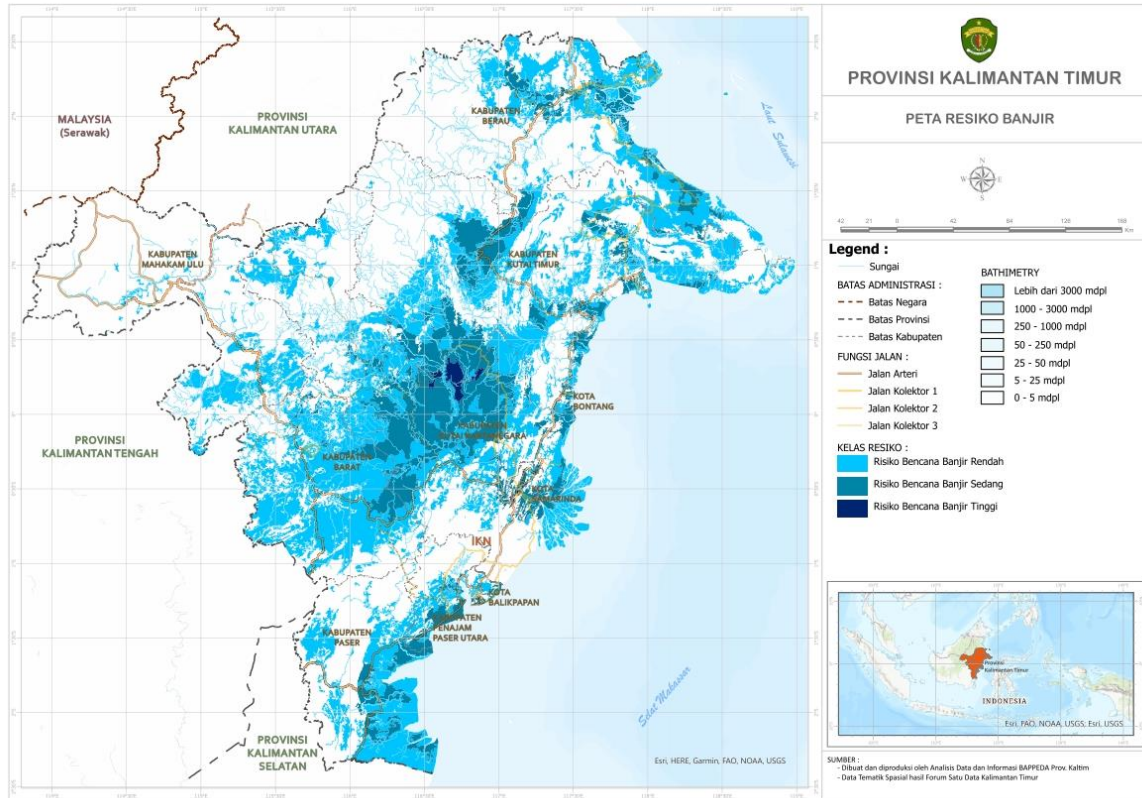
Gambar II.8  
Peta Curah Hujan Provinsi Kalimantan Timur  
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur berisi lahan yang diidentifikasi melalui interpretasi Peta Citra Satelit yang dibedakan dalam klasifikasi tutupan lahan. Hasil akhir tutupan lahan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar II.9  
Peta Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Timur  
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Dalam perencanaan Pengurangan Risiko Bencana, perlu ada informasi awal berupa suatu indeks dalam rangka penentuan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan. Indeks Risiko Bencana bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut serta menjadi dasar untuk memahami ancaman bencana, kerentanan dan kapasitas daerah. Kalimantan Timur merupakan wilayah yang relatif aman dari bencana gempa bumi tektonik dan vulkanik. Kejadian bencana yang paling berpotensi di Provinsi Kalimantan Timur adalah banjir, kebakaran permukiman, kekeringan, cuaca ekstrem, longsor, abrasi, kebakaran lahan dan hutan.



Gambar II.10

Peta Risiko Bencana Banjir Provinsi Kalimantan Timur

(Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Kaltim, diolah Bappeda Prov Kaltim 2022)

Aktivitas Manusia yang meningkatkan bahaya dan risiko bencana Banjir yakni: pembudidayaan daerah dataran Banjir; peruntukan tata ruang di dataran Banjir yang tidak sesuai; belum adanya pola pengelolaan dan pengembangan dataran Banjir; permukiman di bantaran sungai; sistem drainase yang tidak memadai; terbatasnya tindakan mitigasi Banjir; kurangnya kesadaran masyarakat di sepanjang alur sungai; penggundulan hutan di daerah hulu; terbatasnya upaya pemeliharaan bangunan pengendali Banjir; dan elevasi bangunan tidak memperhatikan peil Banjir.

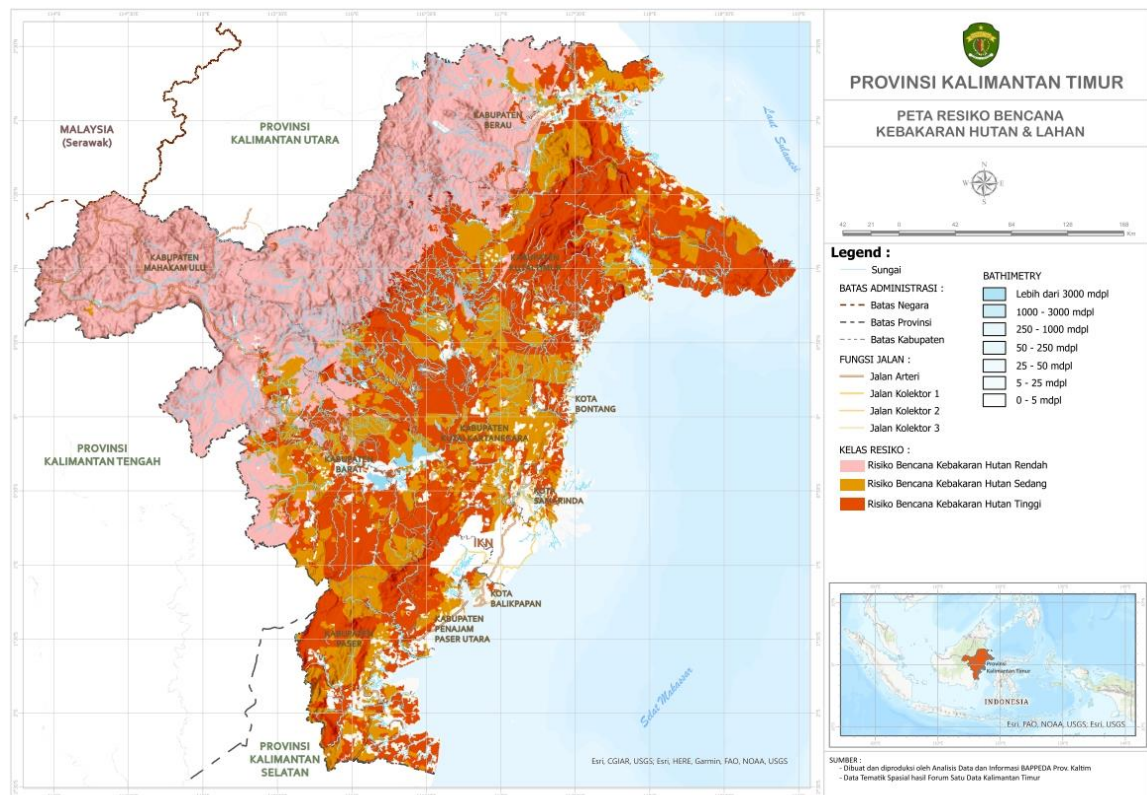
Terjadinya bencana Banjir tidak terlepas dari kondisi tata ruang dan lingkungan. Kondisi tata ruang dan lingkungan yang mendukung terjadinya bencana Banjir, antara lain:

- Buruknya saluran air/drainase. Kota-kota besar hampir setiap tahun mengalami Banjir karena tidak terawatnya saluran air. Kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah pada saluran air sangat rendah sehingga saluran air dipenuhi sampah dan akhirnya jalan untuk lalu lintas air menjadi kecil. Selain sampah, juga banyaknya bangunan-bangunan yang menyebabkan saluran air tertutup beton bangunan sehingga saluran dalam

arti air tidak mampu berjalan sebagaimana mestinya, air menggenang di jalan dan lama-lama menyebabkan Banjir.

- Daerah resapan air yang kurang. Daerah resapan air merupakan suatu daerah yang ditanami pohon atau mempunyai danau yang berfungsi sebagai tampungan atau menyerap air ke dalam lapisan tanah kemudian disimpan sebagai cadangan air tanah. Masalah yang terjadi pada dewasa ini adalah semakin banyaknya bangunan yang didirikan terutama di kota-kota besar sehingga fungsi lahan hijau sebagai tempat resapan air mulai tergeser oleh adanya beton-beton bangunan yang berakibat terhambatnya air meresap ke dalam tanah, sehingga membentuk genangan dan akhirnya terjadi Banjir.
- Penebangan pohon secara liar. Selain memiliki fungsi untuk mencegah longsor dengan mempertahankan kontur tanah tetap pada posisinya, pohon juga berfungsi untuk menyerap air di dalam tanah melalui akar-akarnya. Dewasa ini, penebangan pohon secara liar kerap kali dilakukan sehingga ketika terjadi hujan deras air tidak mampu terserap ke tanah namun mengalir ke daerah-daerah yang lebih rendah seperti daerah pada hilir, perkotaan atau pedesaan yang menyebabkan Banjir.

Sungai yang tidak terawat. Sungai memiliki peranan yang sangat besar ketika berbicara tentang Banjir karena semestinya menjadi tempat untuk mengalirnya air dari air hujan menuju ke laut. Ketika sungai tidak terawat, rusak atau menjadi tercemar maka keberlangsungan fungsi sungai juga kan terganggu. Dewasa ini, kerusakan sungai pada umumnya disebabkan karena pembuangan sampah sembarangan, atau tercemar karena adanya limbah pabrik yang menyebabkan terjadinya pendangkalan, bahkan ekosistem sungai itu sendiri menjadi rusak. Selain itu, warga sering menyalahgunakan sempadan atau bantaran sungai untuk dijadikan pemukiman.



Gambar II.11  
Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan  
Provinsi Kalimantan Timur

(Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi KALTIM, Diolah Bappeda Prov Kaltim 2022)

Faktor utama penyebab Kebakaran Hutan dan Lahan adalah akibat ulah manusia, baik yang sengaja melakukan pembakaran ataupun akibat kelalaian dalam menggunakan api. Hal ini didukung oleh kondisi-kondisi tertentu yang membuat rawan terjadinya kebakaran, seperti El Nino yang didukung oleh kondisi lingkungan yang terdegradasi dan rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kerawanan terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan tertinggi terjadi pada musim kemarau dimana curah hujan sangat rendah dan intensitas panas matahari tinggi. Kondisi ini pada umumnya terjadi antara bulan Juni hingga Oktober dan kadang pula terjadi pada bulan Mei sampai November. Kerawanan kebakaran semakin tinggi jika ditemukan adanya gejala El Nino.

Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan berpengaruh terhadap terdegradasinya kondisi lingkungan, kesehatan manusia dan aspek sosial ekonomi bagi masyarakat, sebagai berikut:

- Rusaknya siklus hidrologi (menurunkan kemampuan intersepsi air hujan ke dalam tanah, mengurangi transpirasi vegetasi, menurunkan kelembaban tanah, dan meningkatkan jumlah air yang mengalir di permukaan (*surface run*

off). Kondisi demikian menyebabkan gambut menjadi kering dan mudah terbakar, terjadinya sedimentasi dan perubahan kualitas air serta turunnya populasi dan keanekaragaman ikan di perairan. Selain itu kerusakan hidrologi di lahan gambut akan menyebabkan jangkauan intrusi air laut semakin jauh ke darat.

- Hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat yang masih menggantungkan hidupnya pada hutan (berladang, beternak, berburu/menangkap ikan)
- Penurunan produksi kayu, terganggunya kegiatan transportasi, dan meningkatnya pengeluaran akibat biaya untuk pemadaman.

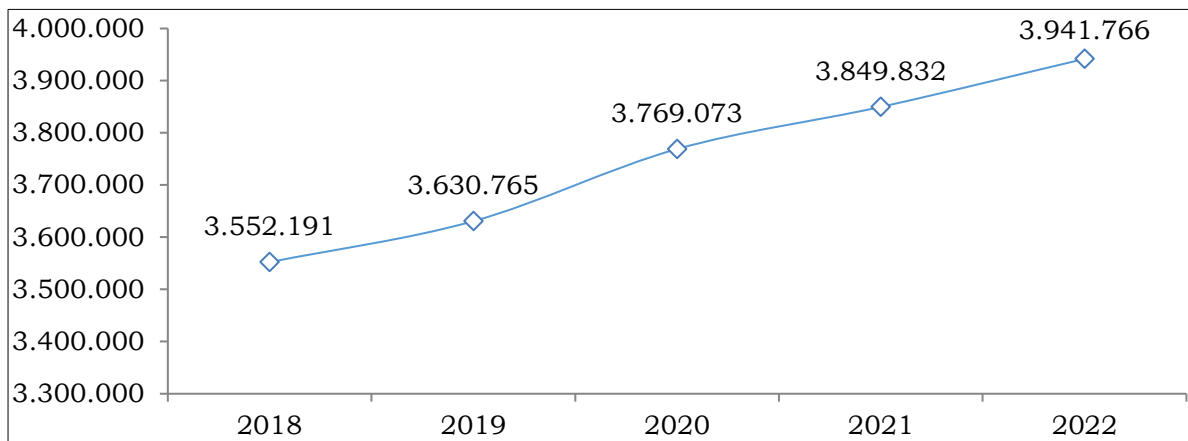
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas untuk melakukan penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai dokumen informasi kebencanaan dan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) sebagai dokumen rencana aksi penanggulangan bencana yang menjadi salah satu parameter dalam penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB).

Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Penilaian secara berkala terhadap indeks risiko ini dapat menjadi perangkat pemantauan dan evaluasi terhadap capaian program penanggulangan bencana pada periode tertentu.

Di Tahun 2021 Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), memiliki indeks 153,28 dan ditahun 2022, Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan risiko bencana menjadi 146,47, atau penurunan sebesar 6.81 poin dari tahun 2021, tetapi Provinsi Kalimantan Timur masih berada dalam zona yang memiliki risiko yang tinggi. Capaian penurunan Indeks Risiko Bencana provinsi Kalimantan Timur merupakan sebuah keberhasilan pemerintah daerah dalam peningkatan Ketahanan Daerah. Ketahanan Daerah merupakan sebuah ukuran keberhasilan, yang

ditandai dengan meningkatnya sebuah kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan menjadi salah satu parameter penting untuk menentukan tingkat risiko bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana harus mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta turunan aturannya. Kapasitas dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; Penanganan tematik kawasan rawan bencana; Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan Pengembangan sistem pemulihan bencana.

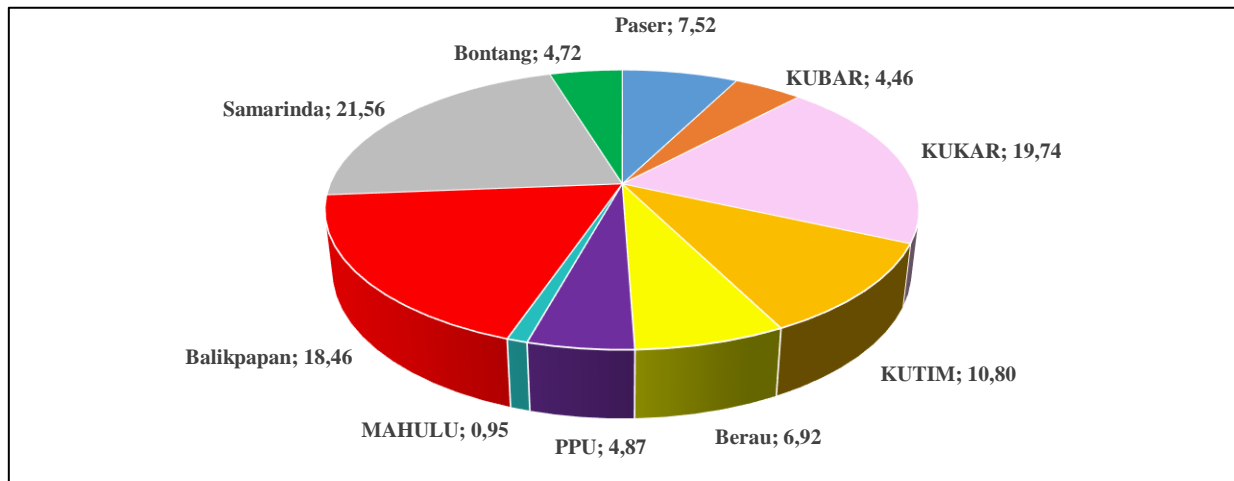
Dari segi demografi, penduduk Provinsi Kalimantan Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi. Jumlah penduduk Kalimantan Timur pada tahun 2018 sebesar 3.552.191 jiwa dan terus meningkat menjadi 3.941.766 jiwa pada tahun 2022.



Gambar II.12  
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022  
(Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023)

Persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Timur tidak merata sehingga terjadi ketimpangan antar kabupaten/kota, baik itu dari jumlah penduduk maupun kepadatannya. Penduduk Provinsi Kalimantan Timur paling banyak berdomisili di Kota Samarinda, yaitu sebesar 21,56 persen. Tidak dipungkiri bahwa Kota Samarinda menjadi daerah dengan kepadatan penduduk tertinggi mengingat Kota Samarinda merupakan pusat pemerintahan sekaligus

perdagangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian, jumlah sebaran penduduk Provinsi Kalimantan Timur yang distribusinya kurang dari lima persen terdapat di Kota Bontang (4,72%), Kabupaten Penajam Paser Utara (4,87%), Kabupaten Kutai Barat (4,46%), dan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kabupaten Mahakam Ulu dengan distribusi tidak mencapai satu persen (0,95%).



Gambar II.13  
Distribusi Penduduk menurut Kabupaten/Kota  
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022  
(Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023)

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Kalimantan Timur tumbuh sebesar 1,98 persen selama lima tahun sejak tahun 2018–2022. Kabupaten Mahakam Ulu menjadi kabupaten yang paling tinggi laju pertumbuhannya hingga mencapai 4,39 persen dalam lima tahun. Sedangkan pertumbuhan penduduk paling rendah yaitu Kabupaten Kutai Timur dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,20 persen.

Tabel II.3  
Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota  
Tahun 2018-2022

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	Laju Pertumbuhan Penduduk (2018-2022) (%)
1	Paser	259.417	265.148	277.401	288.225	296.582	2,26
2	KUBAR	162.200	164.048	165.938	170.871	175.610	1,33
3	KUKAR	677.755	696.784	734.485	753.862	778.096	2,33
4	KUTIM	420.760	422.905	424.334	424.743	425.787	0,20
5	Berau	224.654	232.189	251.439	263.150	272.887	3,29
6	PPU	170.475	173.671	181.349	186.801	191.967	2,00
7	MAHULU	28.833	30.321	35.010	35.274	37.318	4,39
8	Balikpapan	649.806	670.505	697.079	710.293	727.665	1,90

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022	Laju Pertumbuhan Penduduk (2018-2022) (%)
9	Samarinda	778.883	793.576	817.254	831.220	849.717	1,46
10	Bontang	179.408	181.618	184.784	185.393	186.137	0,62
Kalimantan Timur		3.552.191	3.630.765	3.769.073	3.849.832	3.941.766	1,98

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023

Kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur terdapat di Kota Balikpapan mencapai 1.428,08 per km<sup>2</sup>. Sedangkan kepadatan terendah terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 2,02 per km<sup>2</sup>. Dimana total kepadatan penduduk di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 31,68 per km<sup>2</sup>.

Berdasarkan *Sex Ratio*, jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan atau tepatnya 100-110 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan.

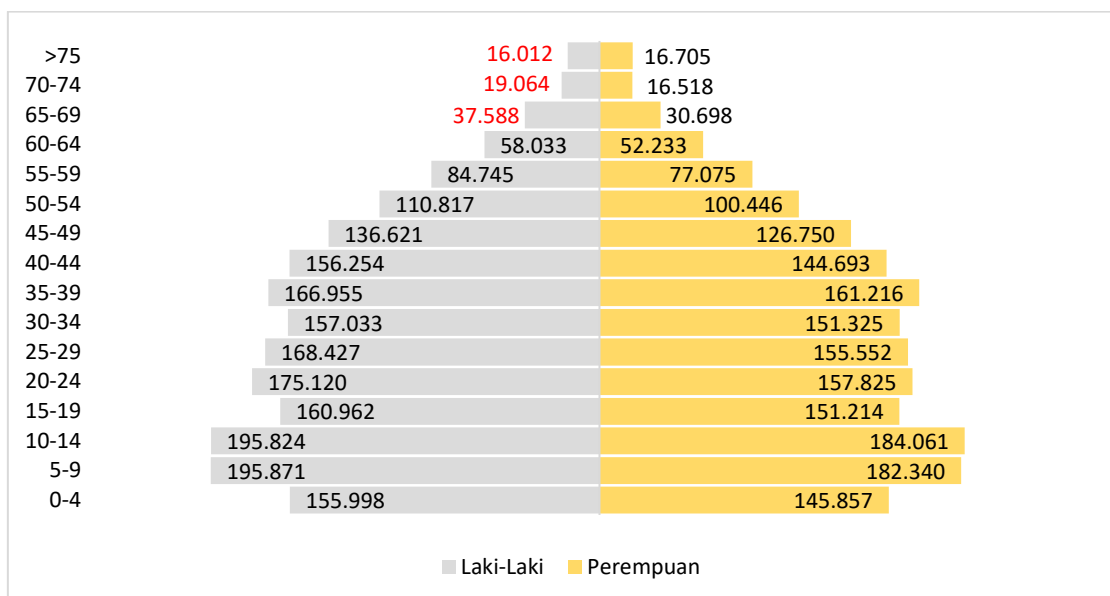
Tabel II.4  
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No	Kab/Kota	Penduduk			Sex Ratio	Kepadatan Penduduk (Per Km <sup>2</sup> )
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1	Paser	153.455	143.127	296.582	107,22	26,85
2	KUBAR	92.207	83.403	175.610	110,56	12,90
3	KUKAR	405.154	372.942	778.096	108,64	30,76
4	KUTIM	227.438	198.349	425.787	114,67	13,64
5	Berau	144.720	128.167	272.887	112,92	12,77
6	PPU	99.423	92.544	191.967	107,43	94,45
7	MAHULU	19.920	17.398	37.318	114,50	2,02
8	Balikpapan	371.777	355.888	727.665	104,46	1.426,15
9	Samarinda	432.306	417.411	849.717	103,57	1.185,46
10	Bontang	96.433	89.704	186.137	107,50	1.157,78
Kalimantan Timur		2.042.833	1.898.933	3.941.766	107,58	31,67

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023

Dari sisi struktur usia penduduk, sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur berada pada usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun) yang mencapai 68,92 persen dari total penduduk Kalimantan Timur, sebagaimana tampak pada piramida penduduk. Sehingga rasio ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 tercatat sebesar 45,16 persen. Artinya

setiap 100 orang yang berusia kerja (produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang tidak dan belum produktif.



Gambar II.14

Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

(Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2022)

Rata-rata usia penduduk pada usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah lagi di Kalimantan Timur pada tahun 2022 pada laki-laki dan perempuan mengalami penurunan menjadi sebesar 0,42 persen jika dibanding dengan tahun 2021 yaitu sebesar 0,36 persen. Sedangkan untuk usia anak 13-15 tahun 2022 mengalami penurunan menjadi sebesar 0,05 persen jika dibanding dengan tahun 2021 sebesar 0,58 persen. Untuk usia 16-18 tahun, pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi sebesar 0,35 persen jika dibanding dengan tahun 2021 sebesar 0,06 persen, dan pada kategori penduduk usia 19-24 tahun sebesar 0,38 persen pada tahun 2022 yang berarti meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 0,02 persen. Dengan demikian secara umum, hanya pada kategori 13-15 tahun yang mengalami penurunan pada tahun 2022.

Tabel II.5

Persentase Penduduk Usia 7 – 24 Tahun Menurut Kelompok Usia Sekolah dan Jenis Kelamin (Laki-Laki+Perempuan) di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022

Kelompok Usia Sekolah	Tidak / Belum Pernah Bersekolah				
	2018	2019	2020	2021	2022
7-12	0,24	0,16	0,12	0,36	0,42
13-15	0,25	0,19	0,05	0,58	0,05
16-18	0,38	0,09	0,17	0,06	0,35
19-24	0,38	0,35	0,12	0,02	0,38
7-24	0,31	0,21	0,12	0,23	0,33
Masih Bersekolah					

Kelompok Usia Sekolah	2018	2019	2020	2021	2022
7-12	99,67	99,68	99,73	99,60	99,57
13-15	98,89	98,83	99,07	98,90	28,74
16-18	81,55	81,81	81,88	82,01	81,43
19-24	29,84	29,89	29,71	29,86	29,33
7-24	74,46	74,34	73,63	73,88	74,02
Kelompok Usia Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi				
	2018	2019	2020	2021	2022
7-12	0,00	0,16	0,14	0,04	0,01
13-15	0,86	0,98	0,88	0,52	1,21
16-18	18,07	18,10	17,95	17,93	18,22
19-24	69,78	69,76	70,17	70,12	70,29
7-24	25,23	25,45	26,25	25,88	25,65

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Jika dilihat dari jumlah penduduk menurut agama, maka mayoritas penduduk Kalimantan Timur memeluk agama Islam sebesar 87,4 persen dari jumlah penduduk Kalimantan Timur.

Tabel II.6  
Jumlah Penduduk Menurut Agama  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No	Kab/Kota	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Kong Huchu	Lainnya	Jumlah
1	Paser	272.788	9.769	9.299	488	530	0	5	292.879
2	KUBAR	82.408	54.238	36.078	141	36	1	99	173.001
3	KUKAR	706.546	41.426	14.400	2.569	254	6	83	765.284
4	KUTIM	345.969	41.996	34.964	2.522	133	6	23	425.613
5	Berau	224.748	24.263	15.961	224	649	22	8	265.875
6	PPU	179.143	7.046	2.603	91	39	0	1	188.923
7	MAHULU	8.528	5.422	22.137	60	3	0	3	36.153
8	Balikpapan	648.261	49.750	13.041	1.390	5.935	31	15	718.423
9	Samarinda	766.265	42.477	21.141	825	7.880	284	63	838.935
10	Bontang	167.023	15.248	3.221	298	138	0	0	185.928
Kalimantan Timur		3.401.679	291.635	172.845	8.608	15.597	350	300	3.891.014

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2023

### 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indikator-indikator utama yang digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi, laju inflasi, dan angka kemiskinan. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar bagi perencanaan pembangunan, terutama untuk monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam mensukseskan program-program prioritas pembangunan nasional.

#### A. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Secara umum, nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan tren yang meningkat dari komposisi sektor non migas dan batubara sedangkan dari sektor dengan migas dan non migas mengalami sedikit penurunan di tahun 2020. Nilai PDRB dengan migas Tahun 2020 tercatat sebesar Rp 607,59 triliun, sedangkan nilai PDRB non migas sebesar Rp 505,55 triliun dan nilai PDRB non migas dan batubara sebesar Rp 314,89 triliun. Penurunan Nilai PDRB pada tahun 2020 dikarenakan terjadi anomali dimana karena dampak Pandemi COVID-19 yang sangat signifikan khususnya dalam hal ekspor. Akan tetapi pada tahun 2022 nilai PDRB kembali meningkat seiring dengan mulai pulihnya perekonomian Kalimantan Timur dengan berkurangnya dampak Pandemi COVID-19, nilai PDRB migas mencapai Rp 921,33 triliun, nilai PDRB non migas sebesar Rp 792,53 triliun dan nilai PDRB non migas dan batubara sebesar Rp 381,97 triliun.

Tabel II.7

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

Tahun	Migas	Non Migas	Non Migas dan Batubara
2018	636.454.483	518.074.570	291.567.584
2019	652.158.057	539.448.590	310.699.091
2020	607.744.486	505.786.456	315.126.677
2021	696.584.498	584.205.939	338.613.743
2022	921.332.980	792.531.260	381.969.993

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Mayoritas lapangan usaha utama Tahun 2022 mengalami perbaikan ekonomi. Dilihat dari PDRB atas dasar harga berlaku, kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian mencapai 53,24 persen dengan nilai PDRB sebesar Rp 490,50 triliun pada tahun 2022 dimana nilai ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan nilai PDRB mencapai Rp 314,20 triliun dan kontribusi sebesar 45,11 persen.

Tabel II.8  
 Nilai dan Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur  
 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	50.147.994 (7,89)	51.567.377 (7,91)	53.455.323 (8,80)	59.089.937 (8,48)	64.891.735 (7,04)
B	Pertambangan dan Penggalian	296.725.329 (46,69)	297.371.390 (45,60)	250.845.967 (41,27)	314.198.045 (45,11)	490.501.116 (53,24)
C	Industri Pengolahan	115.272.211 (18,14)	116.204.903 (17,82)	115.564.453 (19,02)	123.816.183 (17,77)	138.636.144 (15,05)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	315.059 (0,05)	344.961 (0,05)	385.062 (0,06)	395.471 (0,06)	422.609 (0,05)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	288.891 (0,05)	307.667 (0,05)	326.534 (0,05)	348.377 (0,05)	379.899 (0,04)
F	Konstruksi	53.500.578 (8,42)	58.472.319 (8,97)	58.308.248 (9,59)	62.313.147 (8,95)	70.945.215 (7,70)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	35.227.602 (5,54)	38.245.238 (5,86)	39.053.042 (6,43)	41.474.909 (5,95)	47.547.015 (5,16)
H	Transportasi dan Pergudangan	22.990.716 (3,62)	24.172.248 (3,71)	22.067.334 (3,63)	23.218.927 (3,33)	28.980.671 (3,15)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.106.132 (0,96)	6.691.563 (1,03)	6.479.402 (1,07)	6.707.636 (0,96)	7.520.922 (0,82)
J	Informasi dan Komunikasi	7.988.163 (1,26)	8.708.382 (1,34)	9.390.805 (1,55)	10.206.752 (1,47)	11.087.181 (1,20)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	9.717.119 (1,53)	10.216.630 (1,57)	10.490.249 (1,73)	11.244.159 (1,61)	13.379.873 (1,45)
L	Real Estate	5.574.934 (0,88)	5.768.853 (0,88)	5.868.848 (0,97)	5.891.471 (0,85)	6.152.947 (0,67)
M,N	Jasa Perusahaan	1.299.480 (0,20)	1.346.710 (0,21)	1.334.744 (0,22)	1.384.556 (0,20)	1.516.507 (0,16)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12.337.921 (1,94)	13.019.826 (2,00)	12.750.605 (2,10)	13.198.181 (1,89)	14.448.961 (1,57)
P	Jasa Pendidikan	10.107.377 (1,59)	10.995.564 (1,69)	11.724.048 (1,93)	12.340.328 (1,77)	13.132.703 (1,43)

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.905.167 (0,61)	4.289.673 (0,66)	5.331.020 (0,88)	6.205.096 (0,89)	6.692.400 (0,73)
R,S,T,U	Jasa lainnya	3.994.008 (0,63)	4.434.754 (0,68)	4.368.801 (0,72)	4.551.864 (0,65)	5.097.080 (0,55)
PDRB		635.498.680 (100,00)	652.158.057 (100,00)	607.744.486 (100,00)	696.584.498 (100,00)	921.332.980 (100,00)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

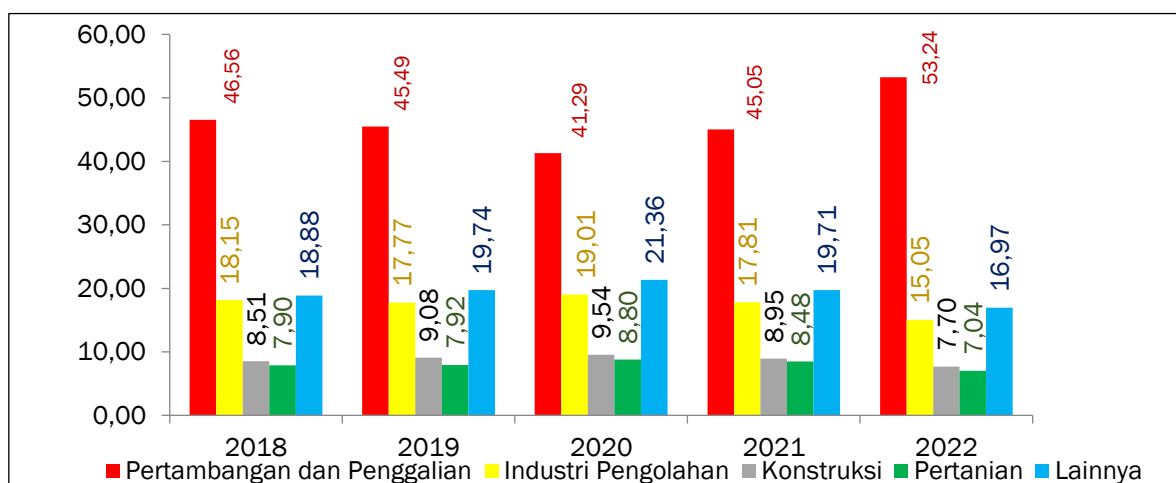
Tabel II.9  
 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kalimantan Timur  
 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32.140.165 (6,92)	33.396.194 (6,86)	33.026.690 (6,99)	33.001.680 (6,81)	33.649.338 (6,75)
B	Pertambangan dan Penggalian	218.686.722 (47,06)	233.762.253 (48,03)	222.909.197 (47,17)	227.991.366 (47,07)	235.949.043 (46,72)
C	Industri Pengolahan	96.797.539 (20,83)	96.824.494 (19,89)	93.909.767 (19,90)	96.208.521 (19,86)	99.651.978 (19,70)
D	Pengadaan Listrik dan Gas	261.834 (0,06)	284.529 (0,06)	317.368 (0,07)	324.789 (0,07)	337.250 (0,06)
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	224.574 (0,05)	235.440 (0,05)	247.995 (0,05)	258.504 (0,05)	278.099 (0,06)
F	Konstruksi	33.754.000 (7,26)	35.682.996 (7,33)	35.601.166 (7,49)	37.005.238 (7,63)	39.887.735 (7,68)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25.678.998 (5,53)	27.025.570 (5,55)	27.069.910 (5,76)	28.216.889 (5,83)	30.137.130 (5,94)
H	Transportasi dan Pergudangan	13.937.815 (3,00)	14.264.273 (2,93)	13.281.104 (2,83)	13.667.051 (2,83)	15.301.391 (3,00)
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.080.239 (0,88)	4.340.118 (0,89)	4.108.417 (0,87)	4.193.399 (0,86)	4.577.468 (0,90)
J	Informasi dan Komunikasi	7.295.360 (1,57)	7.795.537 (1,60)	8.338.485 (1,76)	8.994.261 (1,86)	9.712.239 (1,92)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.751.780 (1,45)	6.966.068 (1,43)	7.137.891 (1,51)	7.320.021 (1,51)	8.012.391 (1,58)
L	Real Estate	4.227.269 (0,91)	4.316.690 (0,89)	4.321.113 (0,91)	4.290.183 (0,89)	4.397.865 (0,88)
M,N	Jasa Perusahaan	896.170 (0,19)	914.126 (0,19)	889.600 (0,19)	911.510 (0,19)	960.338 (0,19)
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.941.460 (1,71)	8.252.791 (1,70)	7.951.124 (1,68)	8.108.290 (1,67)	8.727.045 (1,71)

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
P	Jasa Pendidikan	6.780.283 (1,46)	7.036.310 (1,45)	7.244.720 (1,53)	7.420.372 (1,53)	7.679.667 (1,53)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.691.435 (0,58)	2.864.486 (0,59)	3.404.048 (0,72)	3.861.218 (0,80)	4.048.704 (0,80)
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.548.786 (0,55)	2.750.363 (0,57)	2.634.733 (0,56)	2.665.592 (0,55)	2.851.225 (0,56)
PDRB		464.694.427 (100,00)	486.712.237 (100,00)	472.393.329 (100,00)	484.438.884 (100,00)	506.158.907 (100,00)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Jika dilihat menurut kontribusinya, struktur perekonomian Kalimantan Timur masih didominasi oleh Kategori Pertambangan dan Penggalian. Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian secara konsisten menyumbang di atas 40 persen dari total PDRB Kaltim. Namun dalam beberapa tahun terakhir kontribusi Lapangan Usaha ini cenderung menurun tipis meski masih fluktuatif. Mulai tahun 2018, kontribusi Lapangan Usaha utama yakni Pertambangan dan Penggalian serta industri pengolahan mengalami penurunan, demikian pula kontribusi Lapangan Usaha pertanian yang sempat turun tipis pada tahun yang sama. Namun semenjak 2020, khususnya karena masa Pandemi COVID-19, maka terlihat penurunan kontribusi Kategori Pertambangan dan Penggalian hingga menjadi 41,29 persen dan terjadi peningkatan cukup signifikan pada Kategori Industri Pengolahan dan Kategori Pertanian. Sedangkan pada tahun 2021 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian mengalami peningkatan mencapai 45,05 persen sedangkan sektor yang lain mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2022, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian kembali meningkat tajam hingga mencapai 53,24 persen akan tetapi sektor yang lain mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.



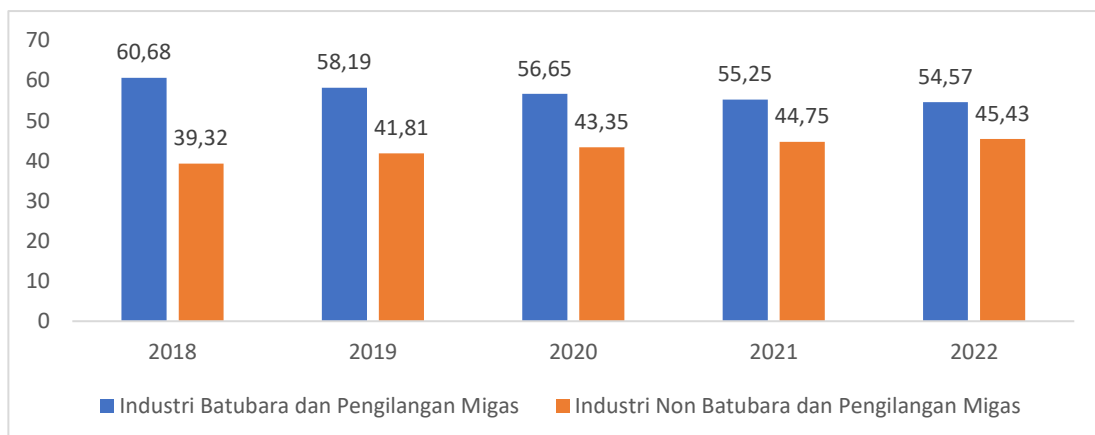
Gambar II.15  
Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2018-2022 (persen)  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Menyadari bahwa Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian bergantung pada sumber daya alam yang tak terbarukan, maka transformasi ekonomi baik secara horizontal yaitu menumbuhkan dan mendorong lapangan usaha ekonomi baru maupun transformasi vertikal

melalui upaya hilirisasi/industrialisasi sangat tepat untuk dilakukan. Lapangan Usaha yang dapat didorong diantaranya Lapangan Usaha Pertanian (dalam arti luas). Jika dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB Kaltim secara rata-rata dari tahun 2018-2022 sebesar 8,05 persen. Capaian ini tentunya masih sangat kecil. Maka diperlukan dorongan besar untuk melakukan perubahan yang besar pula, terutama diarahkan pada inovasi pengembangan komoditas. Dimana sektor yang dominan menggerakkan lapangan usaha ini adalah sektor pertanian, peternakan, dan jasa pertanian terutama pada sub tanaman perkebunan.

Sub sektor perkebunan tahunan menunjukkan nilai PDRB yang meningkat dari tahun ke tahun. Komoditas perkebunan tahunan yang dimiliki Provinsi Kaltim diantaranya kelapa sawit, karet, kelapa dalam, dan lada. Potensi ini perlu mendapatkan perhatian besar untuk memperkuat struktur ekonomi Kaltim di luar migas dan batubara. Komoditas dalam sektor perikanan dan sektor kehutanan dan penebangan kayu juga berpotensi dalam mendongkrak geliat ekonomi di lapangan usaha pertanian, namun untuk melihat komoditas apa yang perlu dikembangkan, dibutuhkan *supporting* data yang lengkap, akurat dan valid.

Sektor perindustrian merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar kedua di Kalimantan Timur setelah sektor pertambangan dan penggalian. Berdasarkan sub sektornya, Sub sektor industri batubara dan pengilangan migas memiliki peranan terbesar dalam sektor industri pengolahan. Selama periode 2018 – 2020 kontribusi industri pengolahan terus meningkat hingga mencapai 19,02 persen, namun pada periode 2020 – 2022 terjadi penurunan setiap tahunnya yakni menjadi 15,05 persen pada tahun 2022.



Gambar II.16  
Kontribusi Industri Migas dan Industri Non Migas  
Tahun 2018-2022 (persen)

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Struktur yang menyusun lapangan usaha industri pengolahan migas berasal dari Industri Batubara dan Pengilangan Migas, sedangkan industri pengolahan non migas berasal dari Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional, Industri Makanan dan Minuman serta Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya. Selama periode 2018 – 2022 kontribusi industri pengolahan migas maupun non migas mengalami fluktuasi, dimana Kinerja Industri Batubara dan Pengilangan Migas selama kurun waktu 5 tahun terakhir perlahan mengalami penurunan dan Kinerja industri non batubara dan pengilangan migas mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi yang dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2009 mulai terlihat hasilnya.

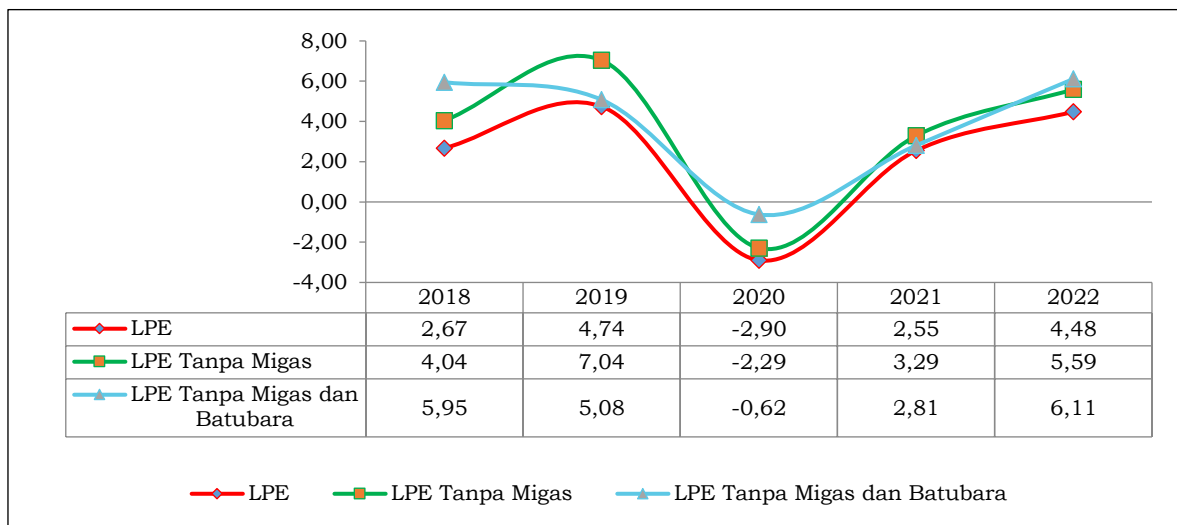
Perlu diketahui bahwa *share* Lapangan Usaha Perdagangan terhadap PDRB Kaltim juga menunjukkan pergerakan yang positif, serta cenderung dipengaruhi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran bukan mobil dan sepeda motor dimana di dalamnya tercatat omzet dari UMKM. Nilai PDRB pada sub sektor ini terus meningkat ditengah-tengah menurunnya aktivitas pertambangan dan penggalian, namun kontribusinya masih relatif kecil, pada tahun 2022 kontribusinya hanya sebesar 4,71 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami peningkatan sebesar 2,67 persen pada tahun 2018, dimana laju pertumbuhan ekonomi non migas tercatat sebesar 4,04 persen serta laju pertumbuhan ekonomi non migas dan batubara sebesar 5,95 persen. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami penurunan menjadi negatif 2,90 persen. Hal ini disebabkan terjadi pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan kinerja ekonomi sebagian besar lapangan usaha, sehingga laju pertumbuhan ekonomi non migas mengalami kontraksi sebesar 2,29 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi non migas dan non batubara juga mengalami kontraksi sebesar 0,62 persen.

Pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 4,48 persen dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 5,55 persen. Pertumbuhan bersumber dari peningkatan permintaan global maupun domestik serta juga turut ditopang oleh peningkatan aktivitas masyarakat, sehingga laju pertumbuhan ekonomi non migas mencapai 5,59 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi

non migas dan non batubara juga mengalami pertumbuhan sebesar 6,11 persen.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kaltim tersebut utamanya bersumber dari hampir seluruh lapangan usaha, utamanya pertambangan sejalan dengan tingginya pengiriman ekspor ke negara tujuan, disertai momen harga komoditas batu bara yang berada pada level tinggi. Di samping itu, berlanjutnya pembangunan proyek-proyek strategis nasional di wilayah Kaltim, mobilitas masyarakat yang terus membaik, dan masa panen produk pangan dan pertanian menjadi penopang pertumbuhan.



Gambar II.17  
Laju Pertumbuhan Ekonomi  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Dengan keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan banyak proyek pembangunan fisik di Provinsi Kalimantan Timur yang mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang positif mendatang didukung oleh peningkatan kinerja di industri pengolahan minyak yang diperkirakan akan lebih tinggi, seiring aktivitas masyarakat yang makin menggeliat. Tenaga kerja Kaltim akan terserap, kebutuhan ribuan pekerja di IKN pasti akan berhubungan dengan petani dan pedagang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk akomodasi baik hotel maupun penginapan juga akan laku karena banyak tamu untuk berbisnis maupun dinas, bahkan pelaku UMKM juga terkena dampak dalam penjualan produk.

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur jika dilihat menurut Lapangan Usaha cukup berfluktuatif. Pada tahun 2020 dimana terlihat

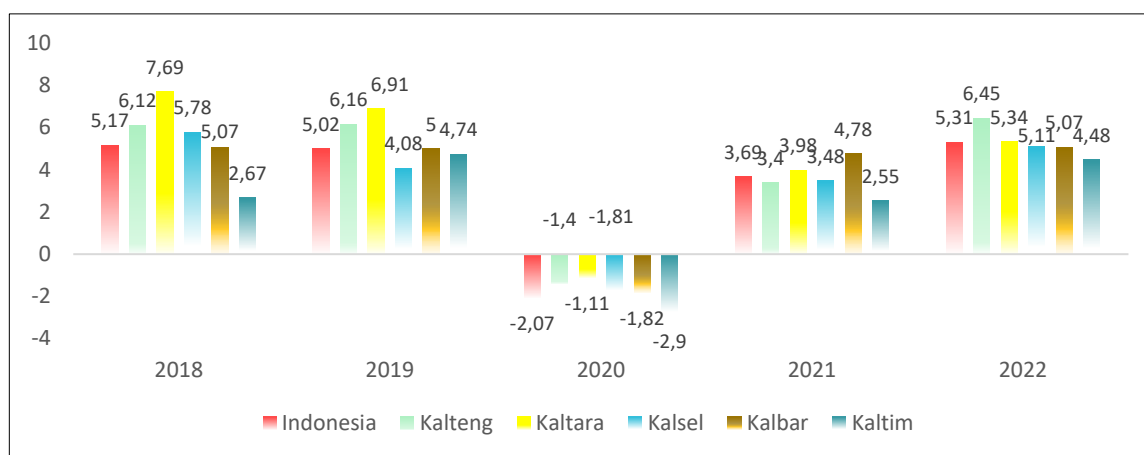
pertumbuhan negatif di beberapa lapangan usaha karena pandemi COVID-19 dan ditahun 2022 seiring dengan pulihnya perekonomian, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur mengalami peningkatan diikuti dengan pertumbuhan seluruh sektor lapangan usaha.

Tabel II.10  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (persen)

Kategori	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,14	3,91	(0,98)	-0,08	1,96
B	Pertambangan dan Penggalian	1,07	6,89	(4,61)	2,28	3,49
C	Industri Pengolahan	0,69	0,03	(2,99)	2,45	3,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,76	8,67	11,47	2,34	3,84
E	Pengadaan Air	3,22	4,84	5,33	4,24	7,58
F	Konstruksi	7,91	5,71	(0,87)	3,94	7,79
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,16	5,24	0,57	4,24	6,81
H	Transportasi dan Pergudangan	5,80	2,34	(6,58)	2,91	11,96
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,70	6,37	(5,34)	2,07	9,16
J	Informasi dan Komunikasi	4,38	6,86	7,56	7,86	7,98
K	Jasa Keuangan	4,05	3,17	2,47	2,55	9,46
L	<i>Real Estate</i>	4,83	2,12	0,69	(0,72)	2,51
M,N	Jasa Perusahaan	4,96	2,00	(3,14)	2,46	5,36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,11	3,92	(3,83)	1,98	7,63
P	Jasa Pendidikan	7,73	3,78	2,96	2,42	3,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,05	6,43	20,22	13,43	4,86
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9,02	7,91	(3,01)	1,17	6,96
Laju Pertumbuhan Ekonomi		2,67	4,74	(2,90)	2,55	4,48

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Secara regional, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mulai membaik. Provinsi Kalimantan Tengah dengan pertumbuhan tertinggi dibanding wilayah lainnya di Pulau Kalimantan yaitu sebesar 6,45 persen, lalu diikuti Kalimantan Utara sebesar 5,34 persen, Kalimantan Selatan sebesar 5,11 persen, Kalimantan Barat sebesar 5,07 persen dan Kalimantan Timur sebesar 4,48 persen. Selanjutnya jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional, dengan pertumbuhan sebesar 5,31 persen, laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur juga masih tertinggal.



Gambar II.18

Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Regional Kalimantan (%)

(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

Tabel II.11

Produk Domestik Regional Bruto Kalimantan Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2018-2022 (miliar rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	102.584,20	109.767,66	110.821,28	115.053,40	125.598,38
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.958,20	3.239,36	3.248,32	3.419,27	3.689,59
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	23.760,62	26.360,55	27.129,17	28.315,36	31.283,12
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	173.474,79	188.079,94	188.258,10	209.951,00	232.491,11
5	Perubahan Inventori	1.613,95	768,36	1.228,65	383,61	401,29
6	Net Ekspor Barang & Jasa	331.106,93	324.264,39	277.058,96	339.461,86	527.869,49
	<b>PDRB</b>	<b>635.498,68</b>	<b>652.480,26</b>	<b>607.744,49</b>	<b>696.584,50</b>	<b>921.332,98</b>

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Nilai PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku dari sisi pengeluaran pada tahun 2018-2022 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan karena Pandemi COVID-19, dimana PDRB Provinsi Kalimantan Timur atas dasar harga berlaku menurut kelompok pengeluaran mengalami

penurunan menjadi sebesar Rp 607,32 triliun. Pada tahun 2022 Ekonomi Kalimantan Timur mulai mengalami perbaikan ekonomi yang mencapai Rp 921,33 triliun meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Tabel II.12  
Distribusi PDRB Menurut Kelompok Pengeluaran  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

No	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	16,14	16,82	18,23	16,52	13,63
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,47	0,50	0,53	0,49	0,40
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3,74	4,04	4,46	4,06	3,40
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	27,30	28,83	30,98	30,14	25,23
5	Perubahan Inventori	0,25	0,12	0,20	0,06	0,04
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	52,10	49,70	45,59	48,73	57,29

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Distribusi komponen pengeluaran PDRB Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018-2022 masih didominasi oleh Komponen Net ekspor barang dan jasa. Hal ini tentu saja tidak dapat dipungkiri dimana ekspor barang tambang dan penggalian sangat mendominasi dalam ekspor barang dan jasa. Fenomena tersebut merupakan aktivitas perdagangan luar negeri yang tercermin dari besarnya kontribusi Komponen ekspor barang dan jasa, dimana komoditas ekspor Kalimantan Timur sebagian besar didominasi komoditas bahan bakar mineral (batubara, minyak bumi dan gas alam).

Tabel II.13  
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran ADHK  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

No	Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,14	3,15	(0,43)	1,23	3,41
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,57	6,77	(0,99)	0,66	3,03
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,91	8,11	(1,95)	3,03	8,48
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	7,54	4,81	(1,06)	7,74	5,47
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Net Ekspor Barang & Jasa	0,17	5,05	(4,61)	0,64	4,05
PDRB		2,64	4,70	-2,90	2,55	4,48

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kelompok pengeluaran pada tahun 2022 mencapai 4,48 persen. Dimana pertumbuhan terendah dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 3,03 persen. Sedangkan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi yakni sebesar 8,48 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai PDRB Kalimantan Timur dari sisi pertumbuhannya meningkat dikarenakan kegiatan Pemerintah.

Tabel II.14  
 Nilai PDRB (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten/Kota di  
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Miliar Rp)

No	KAB/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	34.362,05	35.734,75	34.712,07	36.581,32	36.980,15
2	KUBAR	20.108,76	21.253,83	20.644,38	21.509,56	22.535,73
3	KUKAR	121.509,48	126.272,37	120.953,68	124.197,10	128.805,43
4	KUTIM	88.582,49	95.815,41	92.868,68	92.039,29	97.174,42
5	Berau	26.769,40	28.275,57	27.337,09	28.802,65	29.940,78
6	PPU	6.590,45	6.762,58	6.604,62	6.492,78	7.433,74
7	MAHULU	1.675,32	1.767,80	1.763,93	1.786,29	1.802,46
8	Balikpapan	79.807,11	83.793,41	83.034,71	86.817,89	91.104,44
9	Samarinda	43.323,57	45.491,36	45.041,33	46.294,41	49.342,39
10	Bontang	41.316,22	40.427,70	39.320,23	39.949,08	40.931,39

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Dominasi struktur ekonomi kewilayahan didominasi oleh PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dimana Nilai PDRB (ADHK) pada tahun 2022 mencapai Rp 128,81 triliun disusul perekonomian Kutai Timur dan Kota Balikpapan yang masing-masing dengan nilai PDRB (ADHK) sebesar Rp 97,17 triliun dan Rp 91,10 triliun. Ketiga daerah ini memang layak memiliki kontribusi dominan karena memiliki aktivitas pertambangan dan penggalian yang cukup menjanjikan dalam memberikan sumbangsih nilai PDRB.

Pada tahun 2022 terjadi peningkatan kinerja yang cukup signifikan, salah satu faktor penyebab meningkatnya kinerja ekonomi adalah mulai menurunnya pandemi COVID-19 dan meningkatnya aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Selain itu, dari sisi eksternal ekonomi wilayah Kalimantan Timur, khususnya pasar global, meningkatnya rata-rata harga komoditas pangan (tandan buah segar/TBS kelapa sawi dan minyak kelapa sawit/CPO), Harga Batu Bara Acuan (HBA) serta harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sehingga terdapat peningkatan *demand* terhadap komoditas energi, yang dihasilkan di wilayah Kalimantan Timur seperti migas dan

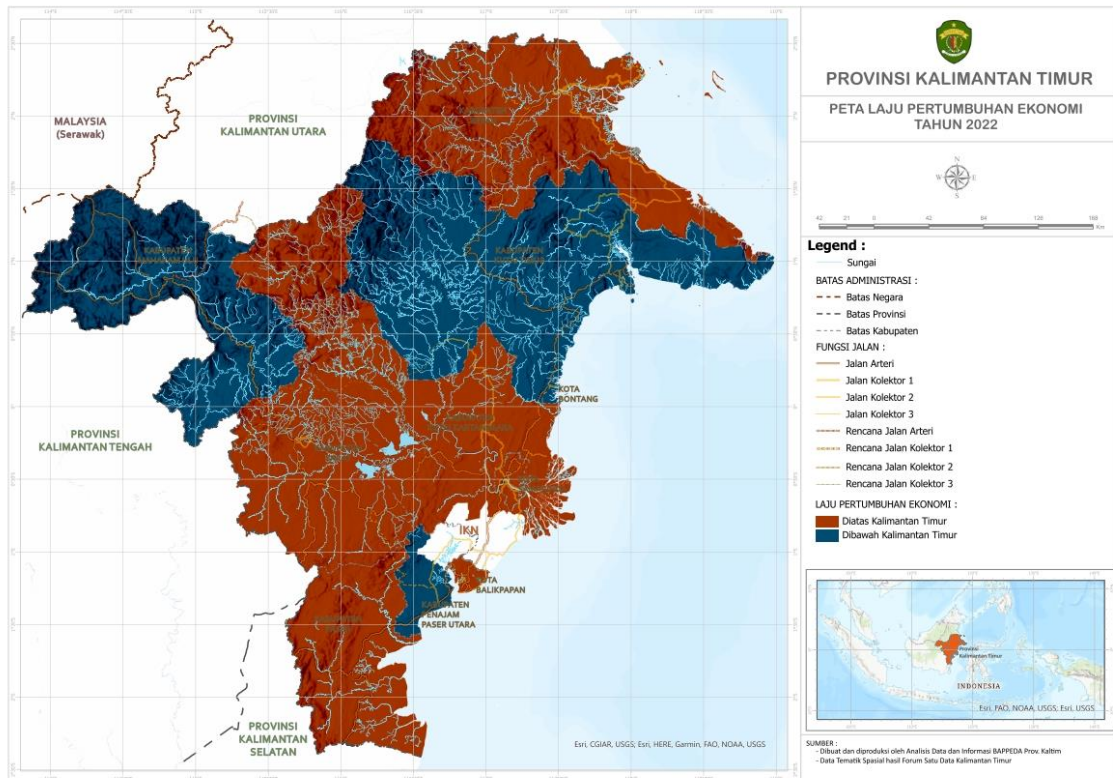
batubara dan kemudian diikuti peningkatan harga komoditas energi tersebut di pasar internasional.

Tabel II.15  
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)

No	KAB/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	3,69	3,99	-2,86	5,39	1,09
2	KUBAR	5,06	5,69	-2,87	4,19	4,77
3	KUKAR	2,16	3,92	-4,21	2,68	3,71
4	KUTIM	2,38	8,17	-3,08	-0,89	5,58
5	Berau	2,07	5,63	-3,32	5,36	3,95
6	PPU	1,28	2,61	-2,34	-1,69	14,49
7	MAHULU	5,40	5,52	-0,22	1,27	0,91
8	Balikpapan	4,97	4,99	-0,91	4,56	4,94
9	Samarinda	4,96	5,00	-0,99	2,78	6,58
10	Bontang	-4,08	-2,15	-2,74	1,60	2,46

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Kondisi tersebut berdampak pada perkembangan ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Timur yang secara umum mengalami peningkatan. Kabupaten yang masih mengalami pertumbuhan yang melambat adalah Kabupaten Paser yaitu 1,09 persen dan Kabupaten Mahakam Ulu 0,91 persen. Sementara itu, wilayah kabupaten/kota lainnya mengalami pertumbuhan yang cepat dengan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan capaian 14,49 persen.

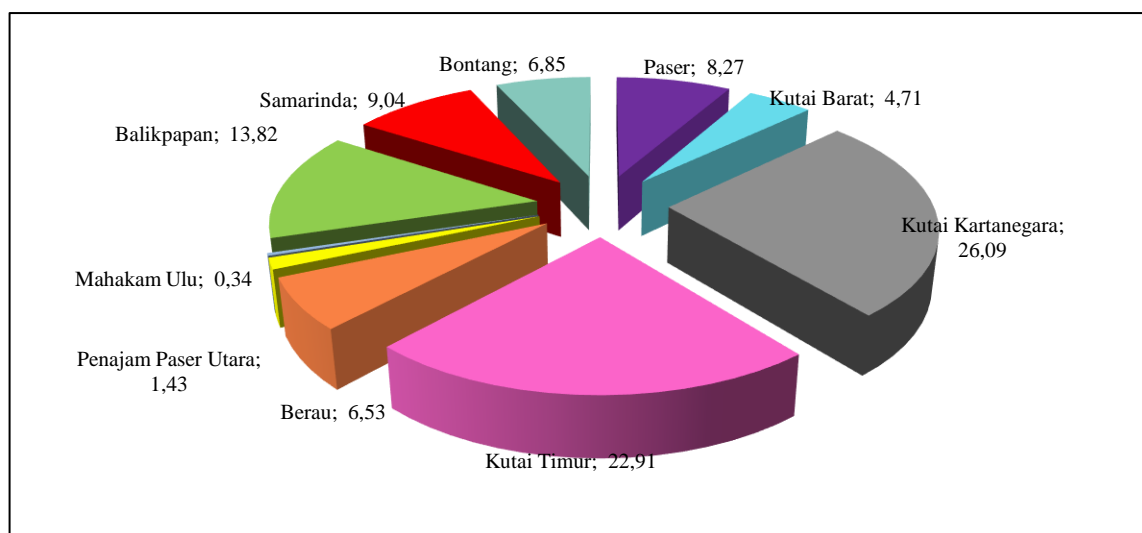


Gambar II.19

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten/Kota Tahun 2022

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Berdasarkan peranan kabupaten/kota dalam pembentukan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022, maka terlihat bahwa peranan Kabupaten Kutai Kartanegara paling besar diantara kabupaten/kota lainnya yang mencapai 26,09 persen, selanjutnya disusul Kabupaten Kutai Timur 22,91 persen. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur merupakan sentra pertambangan di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan memberikan peran sebesar 13,82 persen sebagai pusat jasa dan niaga serta industri kilang minyak. Selebihnya Kabupaten/Kota lainnya berkontribusi pada PDRB Kalimantan Timur dibawah 10 persen.



Gambar II.20  
Distribusi PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2022 (%)  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Pada tahun 2022, terdapat 5 (lima) kabupaten yang menjadikan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebagai sektor ekonomi utama. Jika dilihat dari besaran kontribusi yang diberikan, maka terlihat bahwa sektor Pertambangan dan Penggalian sangat mendominasi terutama pada perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Besaran yang diberikan sangat signifikan, hingga mencapai 85,09 persen, dan kegiatan tersebut ditopang oleh aktivitas pertambangan batubara.

Tabel II.16  
Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Sektoral  
Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku  
Tahun 2022

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)	Lap. Usaha	Share (%)
Paser	Pertambangan	76,37	Pertanian	10,05	Industri	4,17
KUBAR	Pertambangan	57,88	Pertanian	12,27	Konstruksi	9,22
KUKAR	Pertambangan	70,77	Pertanian	10,72	Konstruksi	6,35
KUTIM	Pertambangan	85,09	Pertanian	5,90	Industri	2,55
Berau	Pertambangan	66,98	Pertanian	9,33	Perdagangan	4,99
PPU	Konstruksi	24,11	Pertambangan	22,62	Pertanian	19,41
MAHULU	Pertanian	74,53	Konstruksi	6,73	Pertambangan	6,29
Balikpapan	Industri	47,20	Konstruksi	15,81	Transportasi	10,75
Samarinda	Konstruksi	20,51	Perdagangan	16,07	Pertambangan	15,66
Bontang	Industri	78,72	Konstruksi	7,04	Perdagangan	3,32

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Peranan aktivitas Pertambangan dan Penggalian juga cukup dominan di wilayah Kabupaten Paser, mencapai 76,37 persen. Sama halnya dengan

wilayah Kutai Timur, wilayah Kabupaten Paser juga didominasi oleh kegiatan pertambangan batubara. Wilayah lainnya yang juga memiliki kemiripan karakteristik dengan Kutai Timur dan Paser adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana Lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian memberikan peranan yang cukup besar mencapai 70,77 persen terhadap total PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun aktivitas pertambangan yang dimaksud adalah pertambangan migas, pertambangan batubara dan pertambangan lainnya. Kabupaten lain dengan sektor utama pertambangan juga tercatat di Berau. Adapun daerah yang menggantungkan sektor utamanya pada sektor industri adalah Kota Bontang dan Kota Balikpapan, sedangkan daerah yang sektor utamanya Pertanian yaitu Kabupaten Mahakam Ulu.

Tabel II.17  
Tiga Kategori Dominan Dalam Struktur Ekonomi Pengeluaran  
Kabupaten/Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku  
Tahun 2022

Kab/Kota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)
Paser	Net Ekspor	74,38	PMTB	13,57	K. Ruta	9,53
KUBAR	Net Ekspor	54,77	PMTB	27,13	K. Ruta	11,94
KUKAR	Net Ekspor	58,34	PMTB	30,48	K. Ruta	8,79
KUTIM	Net Ekspor	80,07	PMTB	13,92	K. Ruta	4,45
Berau	Net Ekspor	73,45	PMTB	14,41	K. Ruta	8,79
PPU	PMTB	55,19	K. Ruta	34,20	K. Pemerintah	10,18
MAHULU	Net Ekspor	32,87	PMTB	28,89	K. Ruta	24,43
Balikpapan	PMTB	37,72	Net Ekspor	35,07	K. Ruta	23,53
Samarinda	K. Ruta	43,94	PMTB	42,20	K. Pemerintah	12,75
Bontang	Net Ekspor	73,21	PMTB	13,99	K. Ruta	10,35

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

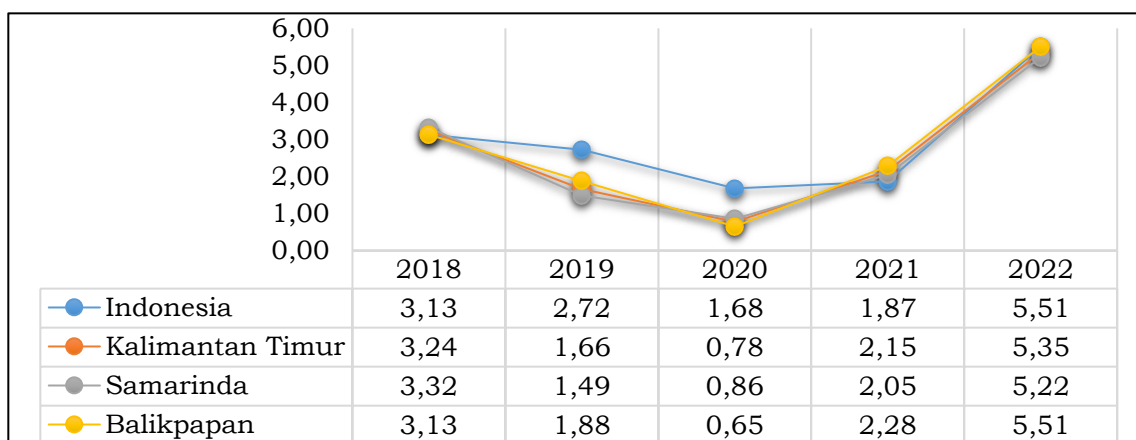
Pada tahun 2022, dari sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur sebanyak tujuh kabupaten/kota memiliki perekonomian yang didominasi oleh komponen Net Ekspor, sedangkan beberapa kabupaten/kota lainnya didominasi oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT). Kabupaten/kota yang perekonomiannya didominasi oleh komponen selain Net ekspor adalah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda. Perekonomian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan didominasi oleh komponen PMTB (investasi) yang masing-masing memberi *share* sebesar 55,19 persen dan 37,72 persen. Sementara itu,

perekonomian wilayah Kota Samarinda didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga dengan *share* 43,94.

Kabupaten/kota yang porsi terbarnya merupakan Net Ekspor merupakan wilayah dengan ekonomi yang berbasis sumber daya alam, seperti batubara, minyak dan gas bumi. Jika dibandingkan porsi komponen Net Ekspor antar wilayah tersebut, yang memiliki nilai *share* Net Ekspor terbesar adalah Kabupaten Kutai Timur, yaitu sebesar 80,07 persen. Kabupaten Paser dan Kabupaten Berau juga memiliki *share* Net Ekspor yang signifikan, yaitu masing-masing sebesar 74,38 persen dan 73,45 persen. Sementara itu, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki nilai *share* Net Ekspor masing-masing sebesar 73,21 persen, 54,77 persen, 58,34 persen dan 32,87 persen.

### B. Laju Inflasi

Laju inflasi Provinsi Kalimantan Timur cenderung menurun dari tahun ke tahun, akan tetapi mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 hingga mencapai 5,35 persen. Hal ini karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok transportasi, kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.



Gambar II.1  
Laju Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Tingkat Inflasi di Provinsi Kalimantan Timur masih disumbang secara dominan oleh bahan makanan menjadi penyumbang terbesar inflasi umum yang berpotensi meningkatkan kemiskinan mengingat alokasi makanan

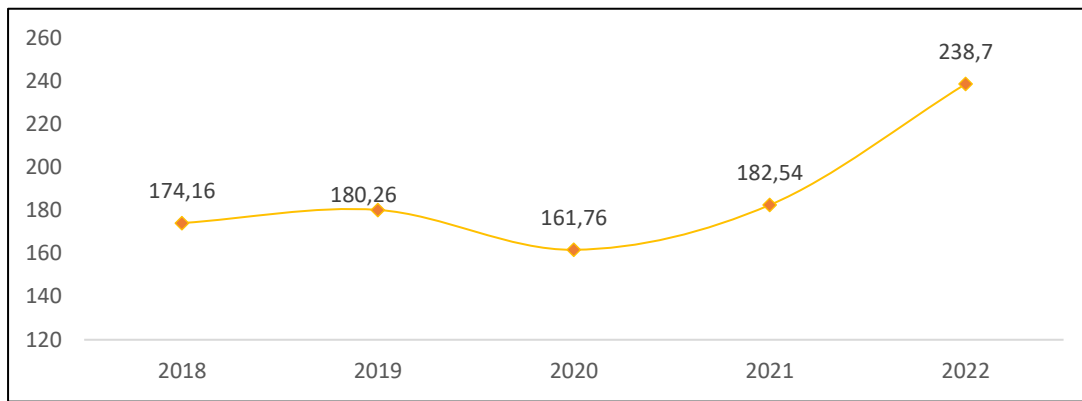
dalam *budget* rumah tangga miskin cenderung lebih besar ketimbang alokasi makanan dalam *budget* rumah tangga non miskin karena harga barang dan jasa menjadi salah satu penentu tolok ukur garis kemiskinan. Kenaikan inflasi pasti akan menaikkan garis kemiskinan yang mengakibatkan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur Meningkat. Peningkatan inflasi pada tahun 2022 terjadi seiring dengan membaiknya optimisme masyarakat terhadap prospek perekonomian seiring semakin terkendalinya kasus COVID-19 yang mendorong normalisasi permintaan masyarakat.

Kota Balikpapan pada tahun 2022 mengalami inflasi lebih tinggi dari tahun sebelumnya menjadi 5,51 persen, dan lebih tinggi dibandingkan inflasi Kota Samarinda sebesar 5,22 persen. Sehingga secara keseluruhan tingkat inflasi Kalimantan Timur berada di bawah inflasi nasional yang mencapai 5,35 persen.

### C. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menggambarkan rata-rata produktivitas yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah dan dapat digunakan sebagai indikator dalam menentukan pencapaian tingkat kemakmuran di suatu daerah. Apabila nilai PDRB-nya besar dengan jumlah penduduk sedikit maka dapat dipastikan PDRB per kapita daerah tersebut akan besar, demikian pula sebaliknya.

Nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2018-2022 cenderung meningkat. Namun nilai PDRB per Kapita tersebut mengalami penurunan pada tahun 2020 dari sebesar Rp 180,26 juta menjadi Rp 160,11 juta. Hal ini tentu saja disebabkan adanya pengaruh dari Pandemi COVID-19 yang memberikan dampak negatif bagi perekonomian daerah, khususnya ekonomi makro. Namun di tahun 2022 nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku kembali meningkat mencapai Rp 238,70 juta.



Gambar II.21

PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Dilihat dari nilai PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku menurut kabupaten/Kota di Kalimantan Timur, jika diurutkan maka nilai PDRB per kapita tertinggi tahun 2022 yakni di Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp 450,27 juta, Kota Bontang sebesar Rp 344,56 juta, dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar Rp 325,67 juta. Sedangkan kabupaten/kota dengan PDRB per Kapita paling rendah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar Rp 72,05 juta dan Kabupaten Mahakam Ulu sebesar Rp 94,51 juta.

Tabel II.18

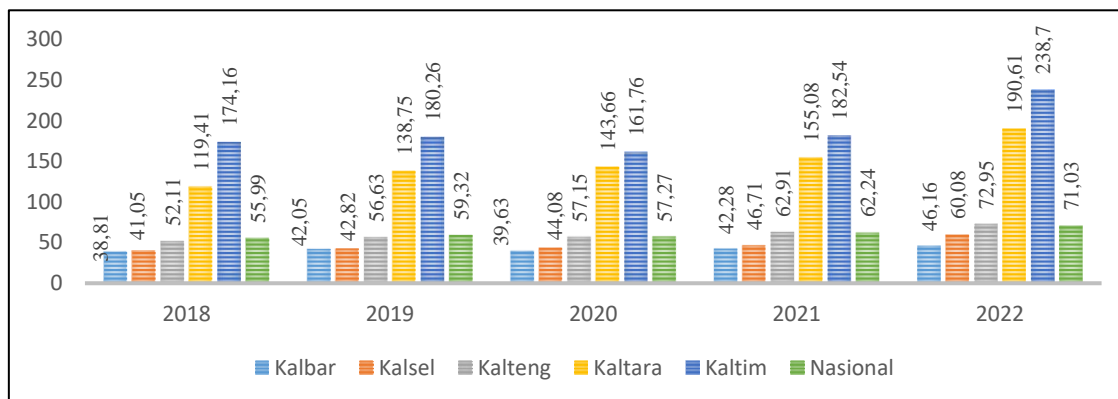
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	171,64	173,34	157,18	194,12	272,09
2	KUBAR	192,10	195,40	158,03	184,46	246,65
3	KUKAR	210,47	212,76	204,50	241,84	325,67
4	KUTIM	353,74	367,11	268,80	304,16	450,27
5	Berau	166,27	173,83	143,67	170,34	232,68
6	PPU	55,70	57,76	50,78	55,85	72,05
7	MAHULU	95,32	102,46	85,38	90,17	94,51
8	Balikpapan	151,30	165,69	151,31	160,20	180,96
9	Samarinda	74,08	79,95	80,36	85,60	99,82
10	Bontang	337,45	327,06	311,88	320,44	344,56

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Jika dilihat secara nasional, nilai PDRB per Kapita Kalimantan Timur pada tahun 2022 berada di atas PDRB per Kapita Nasional sebesar Rp 238,70 juta. Dengan demikian, PDRB per Kapita Kalimantan Timur tahun 2022 merupakan yang tertinggi kedua di tingkat nasional setelah DKI Jakarta. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh nilai PDRB yang tinggi dan

jumlah penduduk Kalimantan Timur yang besarnya tidak sebanyak jumlah penduduk di luar Pulau Kalimantan.



Gambar II.22  
PDRB per Kapita Nasional dan Regional Kalimantan  
Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)  
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

#### D. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi 6,31 persen. Secara absolut, jumlah penduduk miskin juga menurun menjadi sebanyak 236,25 ribu jiwa dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 241,77 ribu jiwa. Dimana garis kemiskinan di Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp 728.208 yang didominasi untuk memenuhi kecukupan pangan/makanan. Penurunan angka kemiskinan terjadi karena mulai pulihnya perekonomian sehingga memberikan pengaruh positif pada beberapa lapangan usaha.

Tabel II.19  
Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

Periode	Garis Kemiskinan			Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
	Makanan	Non Makanan	Total		
Maret 2018	405.108	169.596	574.704	218,90	6,03
Maret 2019	429.165	179.991	609.155	219,92	5,94
Maret 2020	463.823	198.479	662.302	230,26	6,10
Maret 2021	485.445	203.590	689.035	241,77	6,54
Maret 2022	513.874	214.334	728.208	236,25	6,31

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Tingkat kemiskinan masyarakat di Kaltim juga tercermin dari peningkatan Garis Kemiskinan (GK) Kaltim dengan peningkatan GK di perdesaan yang lebih besar dibandingkan di perkotaan. GK meningkat dari

Rp689.035/kapita/bulan pada bulan Maret 2021 menjadi Rp728.208/kapita/bulan pada Maret 2022. Peningkatan garis kemiskinan Kaltim bersumber dari peningkatan garis kemiskinan baik dari perkotaan maupun perdesaan. Dari sisi lokasi, peningkatan garis kemiskinan di wilayah perdesaan sebesar 6,67% atau lebih besar dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang meningkat sebesar 5,23%. Komoditas terbesar penyumbang peningkatan GKM di perkotaan dan perdesaan utamanya disebabkan oleh komoditas beras, rokok kretek filter dan telur ayam ras, sedangkan komoditas terbesar penyumbang peningkatan GKNM di perkotaan dan perdesaan adalah komoditas perumahan. Komoditas beras merupakan penyumbang terhadap GKM di perkotaan dan perdesaan dengan masing-masing tercatat sebesar 14,88% dan 17,41%. Selanjutnya, rokok kretek filter merupakan komoditas yang menyumbang GKM terbesar kedua yang tercatat sebesar 11,14% di perkotaan dan 14,24% di perdesaan. Selanjutnya, diikuti oleh komoditas telur ayam ras yang tercatat sebesar 4,66% di perkotaan dan 4,35% di perdesaan. Komoditas lainnya yang memberi sumbangan GKM adalah daging ayam ras, mie instan, gula pasir, ikan tongkol, bawang merah, ikan kembung, dan cabai rawit.

Tabel II.20  
Persentase Komoditi Makanan terhadap Garis Kemiskinan Makanan  
Menurut Daerah Tahun 2022

No	Perkotaan		Perdesaan	
	Komoditi	%	Komoditi	%
1	Beras	69,33	Beras	73,30
2	Rokok Kretek Filter	11,14	Rokok Kretek Filter	14,24
3	Daging ayam ras	5,01	Telur ayam ras	4,35
4	Telur ayam ras	4,66	Tongkol/Tuna/Cakalang	3,30
5	Mie Instan	3,50	Mie Instan	3,19
6	Tongkol/Tuna/Cakalang	2,94	Daging Ayam Ras	2,99
7	Gula Pasir	2,18	Gula Pasir	2,61
8	Bawang Merah	1,92	Bawang merah	2,29
9	Cabe Rawit	1,84	Kembung	1,92
10	Tempe	1,65	Cabe Rawit	1,85

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Bila ditinjau berdasarkan kabupaten/kota, tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2022 masih berada di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu mencapai 11,55 persen, sementara tingkat kemiskinan terendah adalah Kota Balikpapan hanya sebesar 2,45 persen. Sebagai daerah baru dan memiliki wilayah yang sulit diakses, menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan Mahakam Ulu. Namun dalam perjalanannya, perkembangan

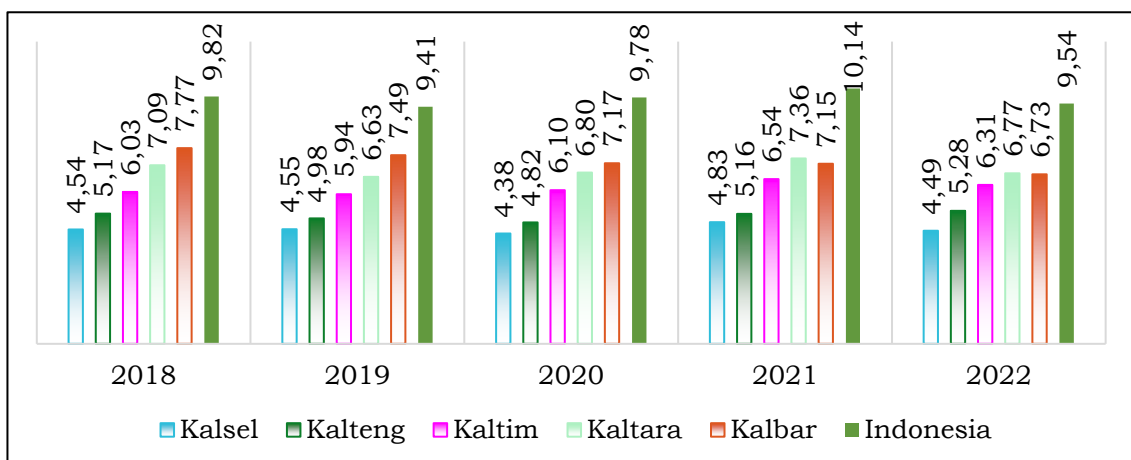
positif selalu ditunjukkan dari hasil pembangunan daerah hingga Pandemi COVID-19 melanda Indonesia.

Tabel II.21  
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (persen)

No	KAB/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	9,03	8,95	9,23	9,73	9,43
2	KUBAR	9,15	9,09	9,29	10,24	10,20
3	KUKAR	7,41	7,20	7,31	7,99	7,96
4	KUTIM	9,22	9,48	9,55	9,81	9,28
5	Berau	5,04	5,04	5,19	5,88	5,65
6	PPU	7,40	7,18	7,36	7,61	7,25
7	MAHULU	11,62	11,25	11,44	11,90	11,55
8	Balikpapan	2,64	2,42	2,57	2,89	2,45
9	Samarinda	4,59	4,59	4,76	4,99	4,85
10	Bontang	4,67	4,22	4,38	4,62	4,54

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur adalah yang tertinggi ketiga di Regional Kalimantan, setelah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Tingkat kemiskinan terendah dicatat oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Disamping itu, pada tahun 2022 terjadi penurunan tingkat kemiskinan di provinsi Regional Kalimantan, kecuali Provinsi Kalimantan tengah meningkat sebanyak 0,12 poin, sementara Kalimantan Timur menurun sebanyak 0,23 poin. Meski demikian, tingkat kemiskinan Kalimantan Timur masih berada di bawah tingkat kemiskinan nasional yang sebesar 9,54 persen.



Gambar II.23  
Tingkat Kemiskinan Regional Kalimantan dan Nasional  
Tahun 2018-2022

(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2022)

Secara absolut, jumlah penduduk miskin terbesar terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 62.870 jiwa, Kota Samarinda

sebanyak 41.950 jiwa, Kabupaten Kutai Timur sebanyak 36.840 jiwa. Disisi lain, yang perlu menjadi perhatian adalah *share* PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur merupakan dua terbesar terhadap total PDRB Kalimantan Timur namun ternyata memiliki jumlah penduduk miskin yang terbesar di daerah tersebut. Besarnya nilai PDRB daerahnya belum mampu memberikan dampak maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel II.22  
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (jiwa)

No	KAB/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	25.140	25.450	26.770	27.560	27.020
2	KUBAR	13.490	13.450	13.780	15.380	15.380
3	KUKAR	56.560	56.340	58.420	62.360	62.870
4	KUTIM	33.020	35.310	36.980	37.780	36.840
5	Berau	11.330	11.620	12.300	13.620	13.310
6	PPU	11.760	11.520	11.930	12.130	11.590
7	MAHULU	3.250	3.190	3.260	3.180	3.100
8	Balikpapan	17.010	15.780	17.020	18.530	15.830
9	Samarinda	39.230	39.800	41.920	42.840	41.950
10	Bontang	8.100	7.470	7.910	8.410	8.390

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Tabel II.23  
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan  
(P2) di Kalimantan Timur Menurut Daerah  
Tahun 2018-2022

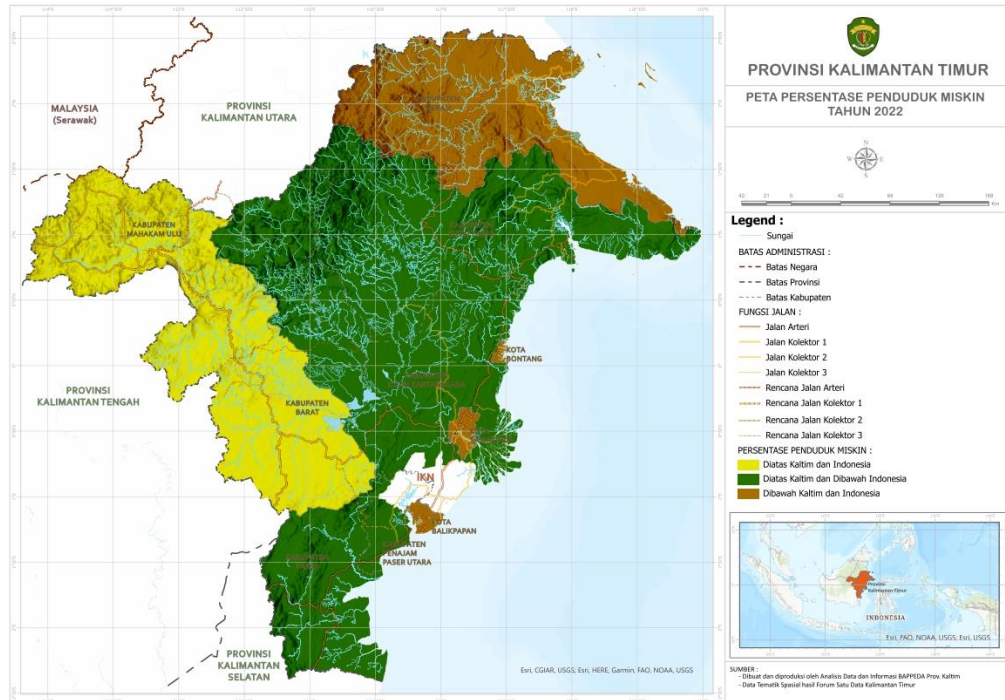
Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)			
Maret 2018	0,656	1,229	0,846
Maret 2019	0,610	1,530	0,910
Maret 2020	0,664	1,743	1,015
Maret 2021	1,017	1,673	1,223
Maret 2022	0,672	1,687	0,989
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)			
Maret 2018	0,161	0,270	0,197

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
Maret 2019	0,130	0,380	0,210
Maret 2020	0,157	0,412	0,240
Maret 2021	0,303	0,413	0,337
Maret 2022	0,149	0,395	0,226

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

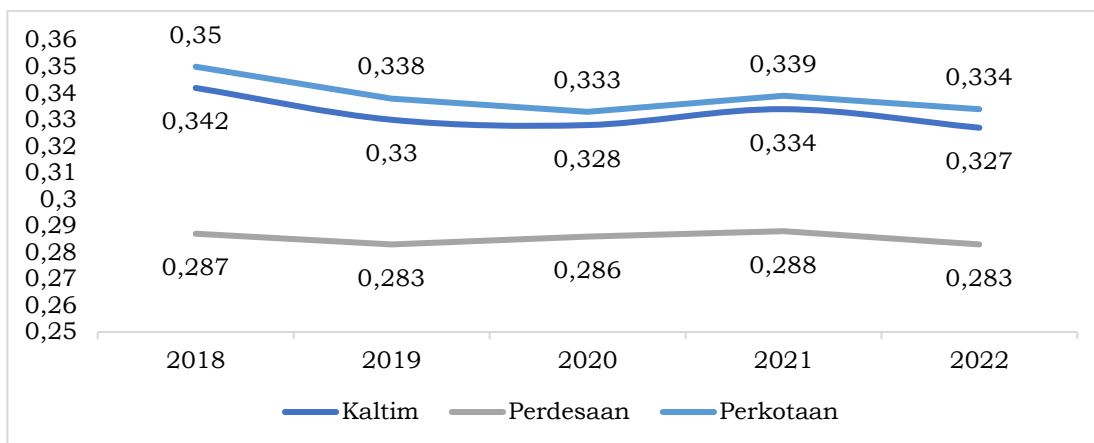
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan begitu juga Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada periode Maret 2022. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun menjadi 0,989. Indeks Keparahan Kemiskinan turun dari 0,337 menjadi 0,226 pada periode yang sama. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Pada bulan Maret 2022, Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan hanya 0,672 sementara di daerah perdesaan mencapai 1,687. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan hanya 0,149 sementara di daerah perdesaan mencapai 0,395. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kemiskinan di daerah perdesaan lebih parah daripada daerah perkotaan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan terus meningkat dari tahun 2019-2021 dalam 3 tahun ini (2019, dengan nilai 0,910 di tahun 2021 tercatat berada pada nilai 1,223. Sempat menyentuh nilai 1,015 (2020) dan 1,223 (2021) yaitu pada masa Pandemi COVID-19. Serupa dengan Tingkat Keparahan kemiskinan yang menggambarkan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kalimantan Timur. Sejak tahun 2019 dengan nilai 0,197 meningkat menjadi 0,337 di tahun 2021. Bahkan pada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan pernah berada di nilai 0,303 di tahun 2021, yaitu pada masa Pandemi COVID-2019. Kondisi yang tidak baik tersebut akan dipadukan dengan Program Pemerintah Pusat yaitu Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) pada tahun 2023 dalam upaya penanganan pengentasan kemiskinan di wilayah Perkotaan dan wilayah perdesaan pada Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2022 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kalimantan Timur menurun 0,989 dan 0,226. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati batas garis kemiskinan serta ketimpangan pengeluaran penduduk miskin menjadi semakin kecil.



Gambar II.24  
Peta Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2022  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Timur yang diukur dengan Indeks Gini, selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pengalaman performa baik pada tahun 2018 ke 2020 yaitu kondisi penurunan pernah ditunjukkan pada nilai 0,342 menjadi 0,328. Pada tahun 2021 Indeks Gini mengalami peningkatan menjadi 0,334. Rasio gini di Kalimantan Timur tahun 2022 menunjukkan penurunan sebesar 0,327 hal ini menunjukkan geliat usaha yang semakin adaptif pasca Pandemi COVID-19. Hal tersebut yang menjadi faktor utama membaiknya kinerja aktivitas ekonomi di berbagai lapangan usaha yang memberikan kesempatan kepada masyarakat berpendapatan rendah untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari perputaran roda perekonomian, sehingga terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Kalimantan Timur. Akan tetapi capaian indeks gini tahun 2022 masih dibawah target sebesar 0,308. Sehingga perlu perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelesaikan ketimpangan pendapatan penduduk.



Gambar II.25

Indeks Gini Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Indeks gini kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 yang masuk dalam kategori sedang adalah Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Berau, Kota Balikpapan, Kota Samarinda dan Kota Bontang. Sedangkan kabupaten/kota yang indeks ginya termasuk dalam kategori rendah yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Mahakam Ulu. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki indeks gini paling rendah dengan capaian 0,269. Kabupaten Berau memiliki Indeks Gini tertinggi dengan capaian 0,352.

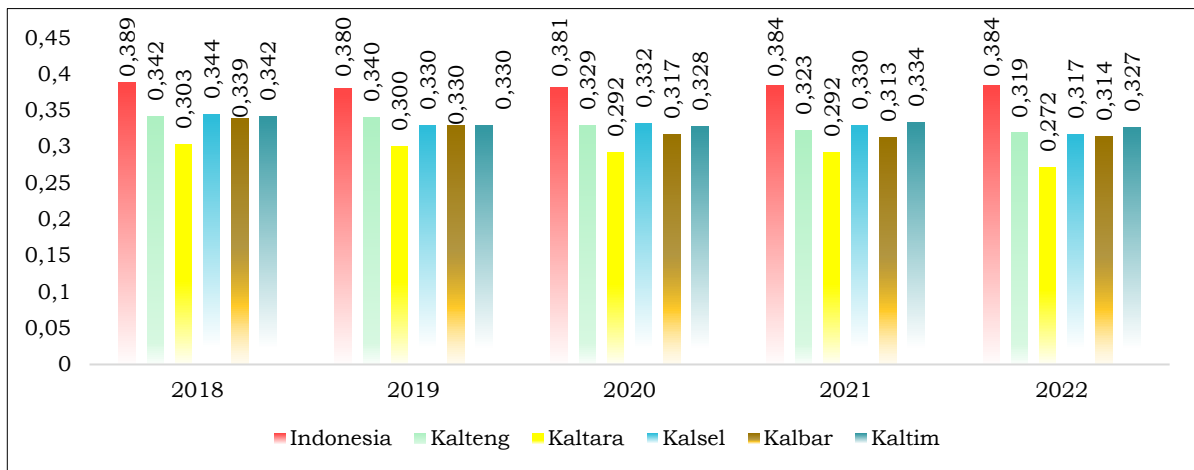
Tabel II.24

Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (jiwa)

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	0,299	0,262	0,290	0,288	0,282
2	KUBAR	0,311	0,334	0,338	0,317	0,300
3	KUKAR	0,302	0,278	0,294	0,283	0,269
4	KUTIM	0,326	0,346	0,325	0,328	0,304
5	Berau	0,303	0,345	0,300	0,377	0,352
6	PPU	0,313	0,322	0,292	0,263	0,274
7	MAHULU	0,334	0,302	0,259	0,270	0,288
8	Balikpapan	0,356	0,302	0,311	0,325	0,334
9	Samarinda	0,317	0,341	0,324	0,322	0,346
10	Bontang	0,376	0,338	0,405	0,340	0,324

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Jika dibandingkan dengan regional Kalimantan, pada tahun 2022 ketimpangan pendapatan terendah di Kalimantan Utara sebesar 0,272. Sedangkan sisanya menunjukkan level ketimpangan yang serupa pada posisi 0,31-0,32. Dengan capaian indeks gini Kalimantan Timur tersebut, masih berada di bawah tingkat ketimpangan Indonesia yang mencapai 0,384 pada tahun 2022. Cukup tingginya ketimpangan Kalimantan Timur ini dikarenakan sulitnya aksesibilitas yang menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur, khususnya daerah terpelosok dan terdalam.

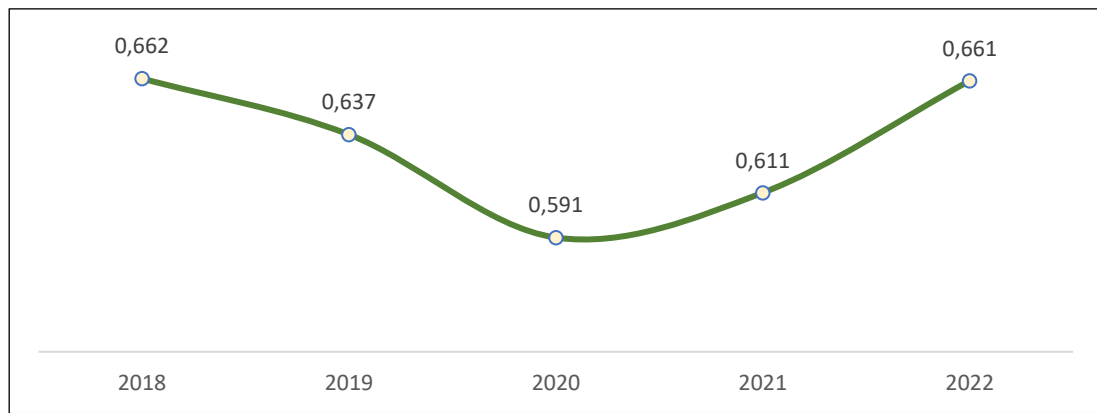


Gambar II.26

Indeks Gini Regional Kalimantan dan Indonesia Tahun 2018-2022  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022)

#### E. Ketimpangan Antar Wilayah

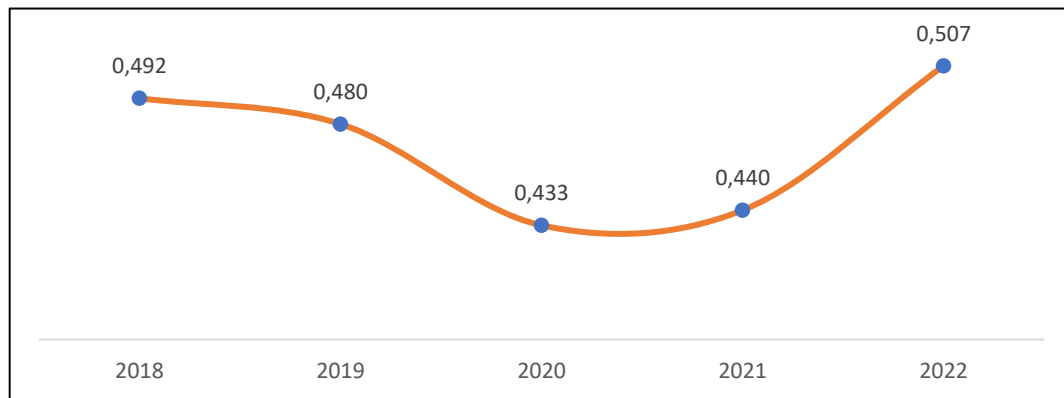
Ketimpangan wilayah terjadi akibat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti pemerataan ekonomi sehingga kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu wilayah. Terlihat dengan adanya wilayah yang maju dan terbelakang atau kurang maju. Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Berdasarkan penghitungan Indeks Williamson, kesenjangan antar wilayah dalam regional Kalimantan juga tercatat masih cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh besaran angka Indeks Williamson yang selalu berada di atas angka 0,60, walaupun terdapat kecenderungan semakin menurun sampai dengan tahun 2020 sebesar 0,594. Namun di tahun 2022 angka Indeks Williamson mengalami sedikit peningkatan yang mencapai 0,661.



Gambar II.27  
Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson)  
Regional Kalimantan Tahun 2018-2022  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Secara umum, struktur perekonomian di pulau Kalimantan masih mengandalkan kekayaan sumber daya alam atau sektor primer. Sektor Pertanian menjadi *leading sector* bagi perekonomian di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sedangkan sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi *leading sector* bagi perekonomian di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara. Ketimpangan yang cukup tinggi pada regional Kalimantan ini disebabkan perbedaan potensi dan produktivitas hasil sumber daya alam pada masing-masing provinsi.

Dalam konteks wilayah Kalimantan Timur, kondisi ketimpangan di wilayah ini relatif moderat, bahkan termasuk rendah. Hal ini ditunjukkan oleh besaran nilai Indeks Williamson di dalam wilayah Kalimantan Timur yang berada pada kisaran 0,40-0,50. Nilai tersebut menunjukkan bahwa antar kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki kondisi ekonomi yang relatif homogen. Namun, disisi lain besaran yang relatif sama tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengindikasikan bahwa masih diperlukan berbagai kebijakan yang lebih tepat yang dapat lebih menurunkan ketimpangan antara kabupaten/kota yang terjadi.



Gambar II.28

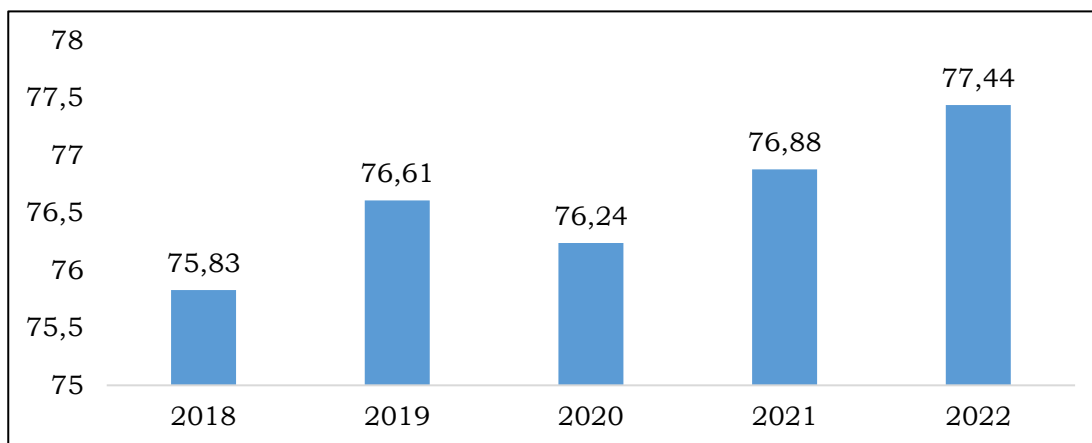
Ketimpangan Antar Wilayah (Indeks Williamson) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Kondisi perekonomian kabupaten/kota yang hampir homogen tersebut disebabkan karena wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur memiliki struktur ekonomi yang hampir sama. Sebagian besar perekonomian di kabupaten/kota di Kalimantan Timur mengandalkan sumber daya alam atau memiliki karakteristik ekonomi yang berbasis sektor primer. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi penyumbang perekonomian terbesar di Kalimantan Timur, disusul oleh Kabupaten Kutai Timur dan Kota Balikpapan. Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur sangat mengandalkan perekonomiannya pada sektor Pertambangan dan Penggalian, sedangkan Kota Balikpapan mengandalkan industri pengolahan, khususnya industri pengilangan migas sebagai sumber perekonomian.

#### F. Indeks Pembangunan Manusia

Selama periode 2018-2022, angka IPM Kalimantan Timur mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 angka IPM mengalami penurunan. Angka IPM tahun 2020 turun 0,37 poin menjadi 76,24 dari yang sebelumnya sebesar 76,61 di tahun 2019. Penurunan ini disebabkan karena adanya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan pengeluaran per kapita masyarakat mengalami penurunan sehingga berdampak pada rumusan IPM Kalimantan Timur. Pada tahun 2021-2022 IPM Kalimantan Timur kembali mengalami peningkatan mencapai 76,88 dan 77,44. Capaian pembangunan manusia Kalimantan Timur masih sama seperti pada tahun sebelumnya, yaitu berstatus “tinggi” dan berada pada posisi ketiga di Nasional setelah DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.



Gambar II.29  
 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur  
 Tahun 2018-2022  
 (Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022)

Peningkatan angka IPM di tingkat Provinsi juga tercermin pada tingkat kabupaten/kota. Pada tahun 2022, angka IPM seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur terkoreksi naik. Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan terbesar adalah Kabupaten Kutai Barat sebesar 1,18 persen dari 72,07 di tahun 2021 menjadi 72,92 di tahun 2022. Selain Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu juga mengalami peningkatan angka IPM yang signifikan yaitu sebesar 1,18 persen dari 67,95 di tahun 2021 menjadi 68,75 di tahun 2022.

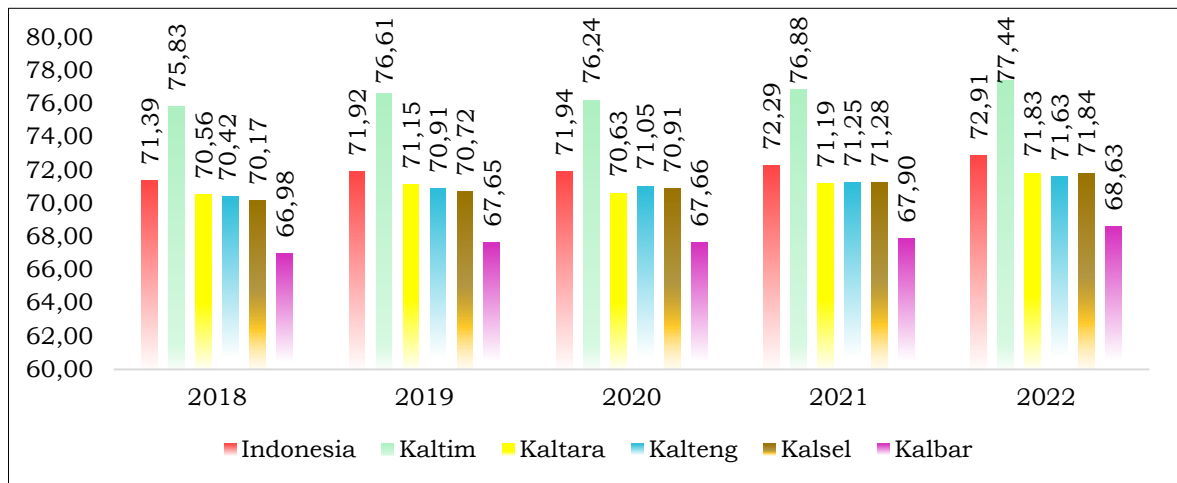
Tabel II.25  
 Indeks Pembangunan Manusia Berdasar Kabupaten/Kota  
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	71,61	72,29	72,04	72,93	73,44
2	KUBAR	70,69	71,63	71,19	72,07	72,92
3	KUKAR	73,15	73,78	73,59	74,06	74,67
4	KUTIM	72,56	73,49	73,00	73,81	74,35
5	Berau	74,01	74,88	74,71	75,20	75,74
6	PPU	71,13	71,64	71,41	72,01	72,55
7	MAHULU	66,67	67,58	67,09	67,95	68,75
8	Balikpapan	79,81	80,11	80,01	80,71	81,13
9	Samarinda	79,93	80,20	80,11	80,76	81,43
10	Bontang	79,86	80,09	80,02	80,59	80,94

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Jika dilihat dari perbandingan dengan regional Kalimantan, maka IPM Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 merupakan IPM tertinggi dengan interval yang cukup jauh, dimana berkisar antara 68,63 – 71,84. Hal ini mengindikasikan bahwa pandemi telah berkurang di seluruh

wilayah Kalimantan sehingga seluruh provinsi terdampak positif, khususnya kualitas SDM dari sisi pengeluaran per kapita.



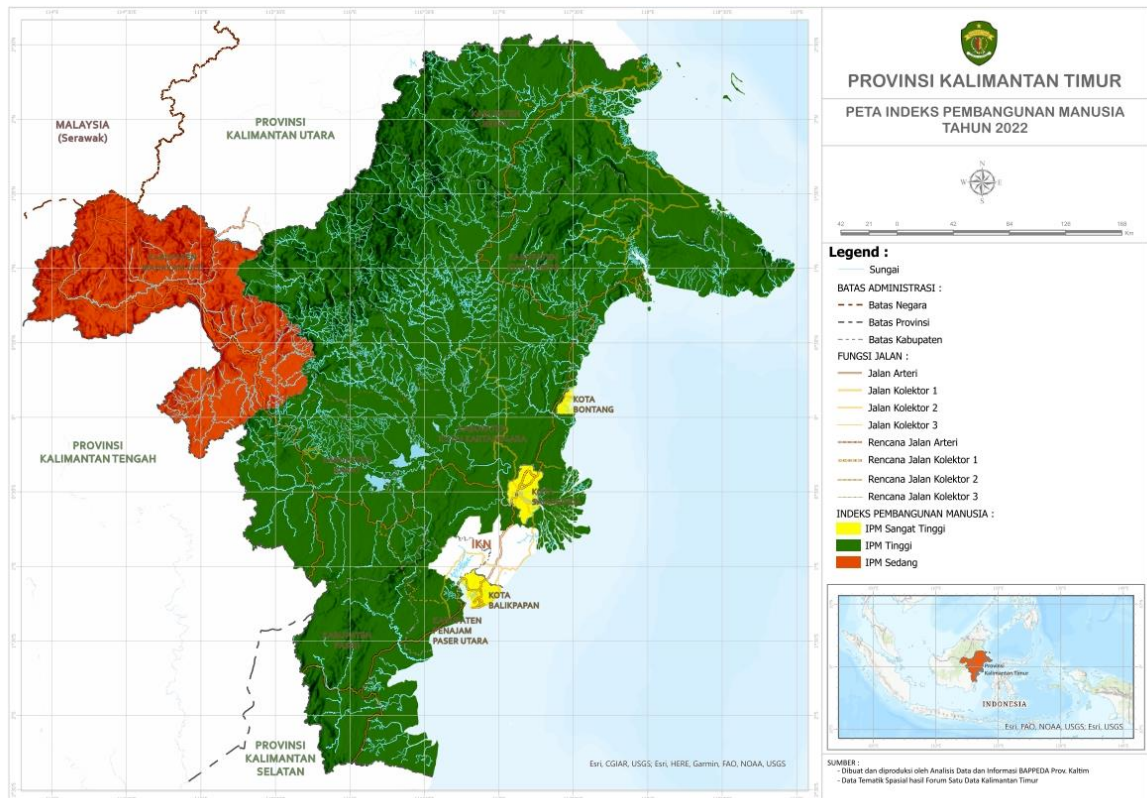
Gambar II.30

Indeks Pembangunan Manusia Regional Kalimantan dan Indonesia

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Hal yang penting untuk dimaknai dalam pencapaian IPM Kalimantan Timur yang tinggi bukanlah ranking secara nasional atau regional. Laju pertumbuhan IPM menjadi hal yang paling utama untuk diulas karena hal ini terkait perkembangan dimensi pembangunan manusia yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun di sisi lain, jika tidak didorong, maka capaian pembangunan manusia di Kalimantan Timur dapat tertinggal. Oleh karena itu, pembangunan yang terus menerus pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi harus terus dilakukan dalam rangka percepatan pembangunan manusia di Kalimantan Timur.

Pola spasial capaian IPM kabupaten/kota tahun 2022 menunjukkan kondisi adanya kesenjangan dalam pembangunan manusia di Kalimantan Timur. Penduduk kabupaten/kota dengan status pencapaian IPM yang sudah masuk dalam kategori “Sangat Tinggi” dan “Tinggi” memiliki kemudahan dan kesempatan yang lebih luas dalam mengakses hasil pembangunan terutama dalam hal memperoleh atau bahkan meningkatkan pendapatan serta memperoleh layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik dibanding penduduk di kabupaten dengan status pencapaian IPM kategori “sedang”, “rendah” dan “sangat rendah”.



Gambar II.31

Pola Spasial Status Pencapaian IPM Kabupaten/Kota Tahun 2022  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

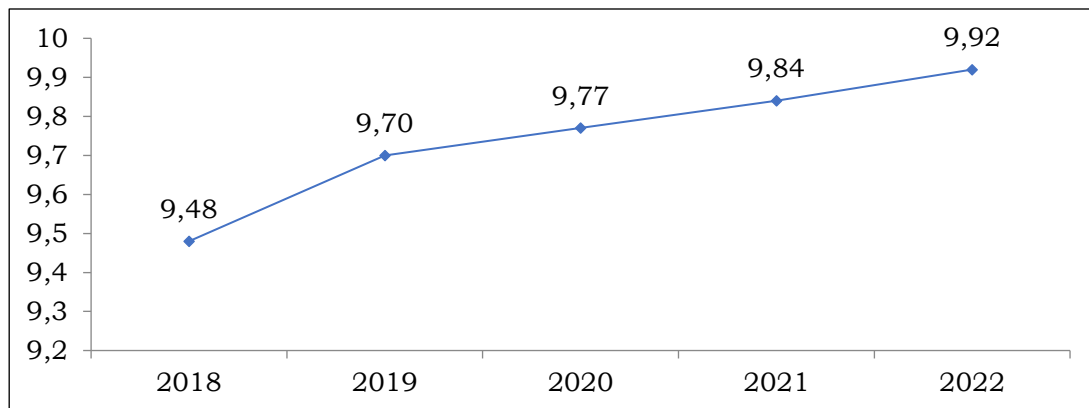
Pada tahun 2022 tidak ada perubahan status pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota. Kota Balikpapan, Kota Bontang dan Kota Samarinda memiliki status IPM “Sangat Tinggi”, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Timur Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki status IPM “Tinggi” sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki status “Sedang”.

Perkembangan capaian masing-masing komponen pembentuk IPM diuraikan sebagai berikut:

1) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan suatu indikator yang menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk di suatu wilayah dalam mengenyam jenjang pendidikan. Di Provinsi Kalimantan Timur, rata-rata lama sekolah penduduk terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2022 mencapai 9,92 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Provinsi Kalimantan Timur usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas X (SMA Kelas I). Capaian

Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur di tahun 2022 berada di atas target yang ditetapkan sebesar 9,40 tahun.



Gambar II.32

Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2018-2022 (Tahun)

(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

Sama halnya dengan Provinsi Kalimantan Timur, Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota juga selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2022, tiga kota di Kalimantan Timur mengalami rata-rata lama sekolah tertinggi diatas rata-rata lama sekolah Provinsi, yang dimana Kota Balikpapan memiliki rata-rata lama sekolah tertinggi mencapai 10,92 tahun. Sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu memiliki rata-rata lama sekolah paling rendah dibanding kabupaten/kota lainnya dengan capaian 8,36 tahun pada tahun 2022. Angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP Kelas III). Angka ini masih-belum mencapai target pemerintah dalam menuntaskan wajib belajar 12 tahun.

Tabel II.26

Rata-Rata Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (tahun)

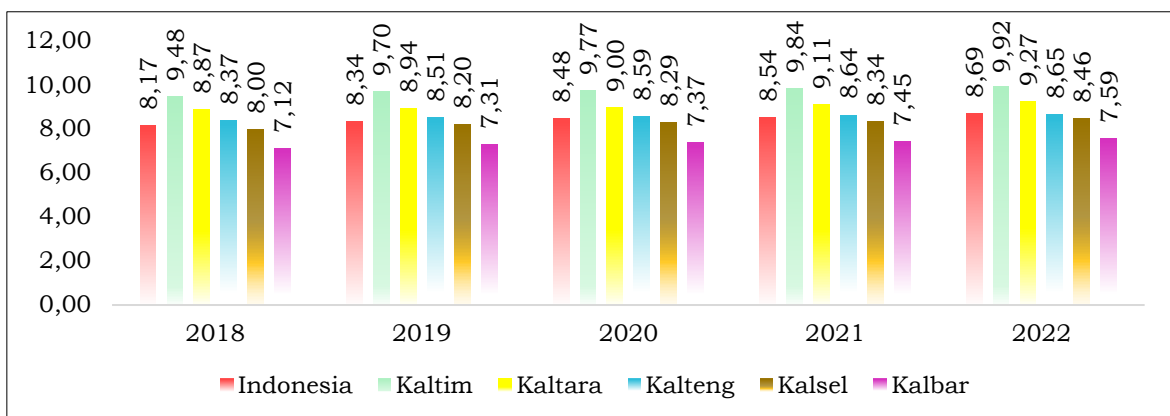
No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	8,22	8,54	8,55	8,79	8,80
2	KUBAR	8,07	8,34	8,47	8,70	8,78
3	KUKAR	8,84	9,10	9,22	9,23	9,24
4	KUTIM	9,08	9,18	9,19	9,43	9,44
5	Berau	8,98	9,25	9,52	9,53	9,54
6	PPU	8,03	8,16	8,28	8,36	8,51
7	MAHULU	7,69	7,89	7,97	8,18	8,36
8	Balikpapan	10,65	10,67	10,68	10,91	10,92
9	Samarinda	10,46	10,47	10,48	10,49	10,71
10	Bontang	10,72	10,73	10,79	10,80	10,81

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Seperti data yang tersaji pada tabel diatas, sampai dengan tahun 2022 masih terdapat empat Kabupaten yaitu Kabupaten Mahulu, PPU, Kubar dan Paser yang memiliki angka rata-rata lama sekolah dibawah angka rata-rata lama sekolah provinsi maupun kabupaten/kota lainnya. Namun demikian dalam rentang waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 terlihat adanya tren kenaikan angka rata-rata lama sekolah pada keempat Kabupaten tersebut walaupun tidak signifikan.

Jika dilihat berdasarkan capaian rata-rata lama sekolah yang tertinggi ditahun 2022, Kota Balikpapan menduduki peringkat pertama rata-rata lama sekolah tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini disebabkan antara lain karena sarana dan prasarana pendidikan yang sudah lengkap ataupun memadai di semua jenjang Pendidikan di Kota Balikpapan, sedangkan Kabupaten yang memiliki rata-rata lama sekolah terendah adalah Kab. Mahulu dengan capaian tahun 2022 sebesar 8,36 tahun, hal ini dimungkinkan antara lain karena infrastruktur pendidikan di Kab. Mahulu masih perlu mendapat perhatian khusus baik oleh Pemerintah Pusat maupun daerah.

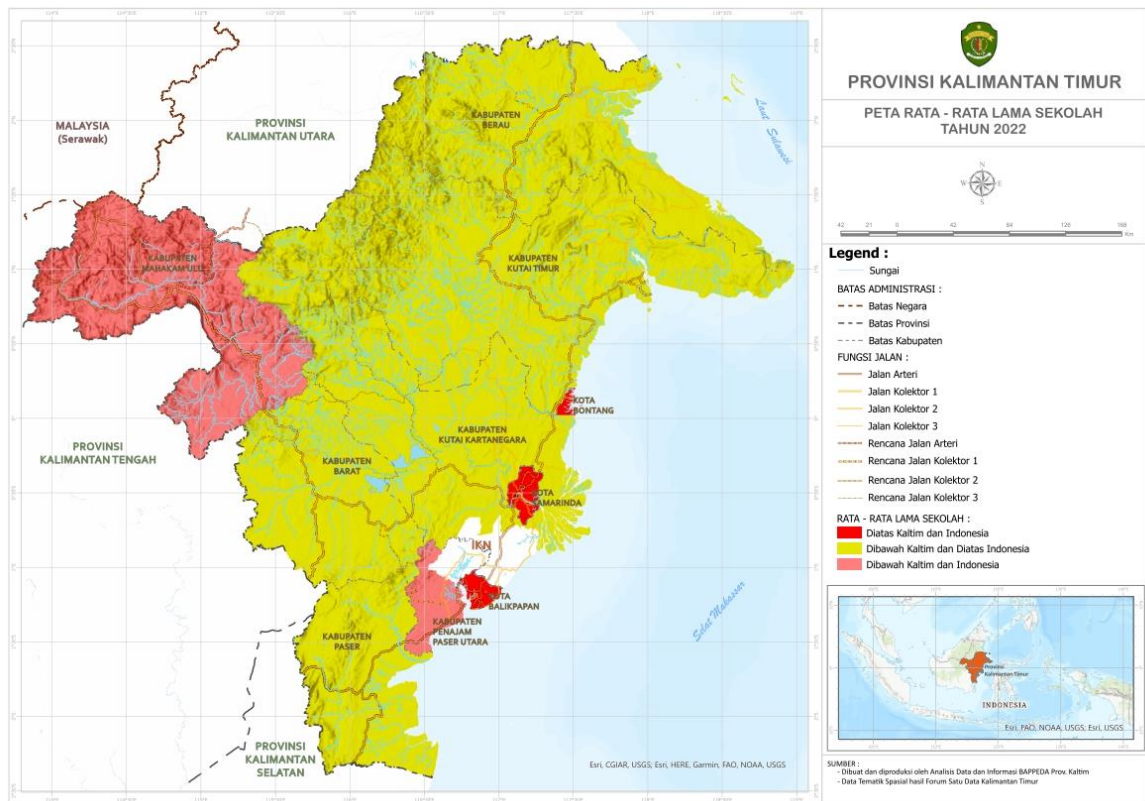
Capaian Rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Timur sebesar 9,92 tahun adalah yang tertinggi di Regional Kalimantan serta lebih tinggi dari Nasional sebesar 8,69 tahun. Disusul Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah masing-masing sebesar 9,27 tahun dan 8,65 tahun.



Gambar II.33  
Rata-Rata Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia  
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

Pola spasial capaian Rata-Rata Lama Sekolah kabupaten/kota tahun 2022 menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tingginya angka lamanya bersekolah semakin tinggi

jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.

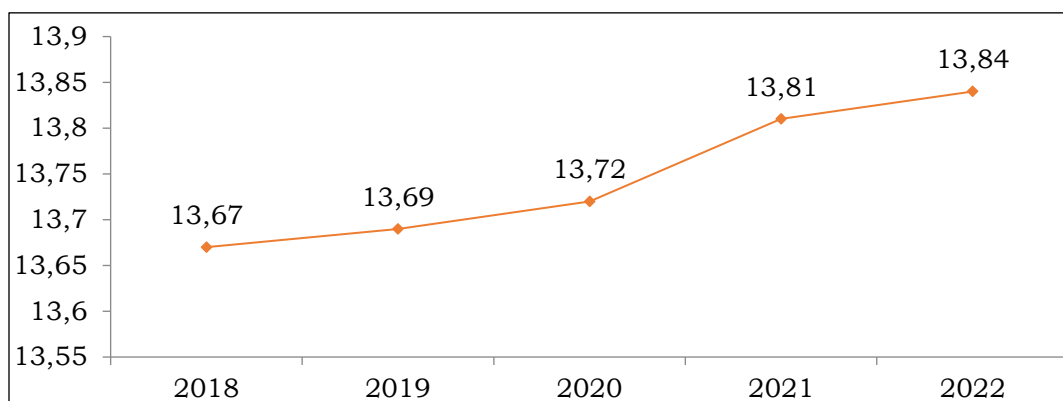


Gambar II.34

Pola Spasial Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2022  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

## 2) Harapan Lama Sekolah

Di tahun 2022, Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 13,84 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga SMA atau D1. Hal ini sangat baik karena menjadikan potensi sumber daya manusia pada generasi mendatang menjadi lebih baik. Angka ini menggambarkan makin tingginya perhatian pemerintah provinsi terhadap dunia pendidikan sehingga harapan lama sekolah setiap penduduk dapat mengikuti pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi.



Gambar II.35  
Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2018-2022 (Tahun)  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Kota Samarinda memiliki capaian harapan lama sekolah paling tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya yaitu 15,10 tahun sedangkan Kabupaten Mahakam Ulu mencapai 12,62 tahun pada tahun 2022 merupakan capaian harapan lama sekolah paling rendah dibanding kabupaten/kota lainnya.

Tabel II.27  
Harapan Lama Sekolah Berdasar Kabupaten/Kota  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022 (tahun)

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	12,99	13,00	13,10	13,25	13,27
2	KUBAR	12,88	12,89	12,90	13,02	13,09
3	KUKAR	13,57	13,58	13,59	13,60	13,63
4	KUTIM	12,65	12,78	12,89	12,90	13,00
5	Berau	13,3	13,31	13,32	13,33	13,35
6	PPU	12,54	12,55	12,56	12,57	12,70
7	MAHULU	12,48	12,50	12,51	12,61	12,62
8	Balikpapan	14,12	14,13	14,14	14,22	14,23
9	Samarinda	14,66	14,70	14,89	15,09	15,10
10	Bontang	12,89	12,90	13,03	13,17	13,18

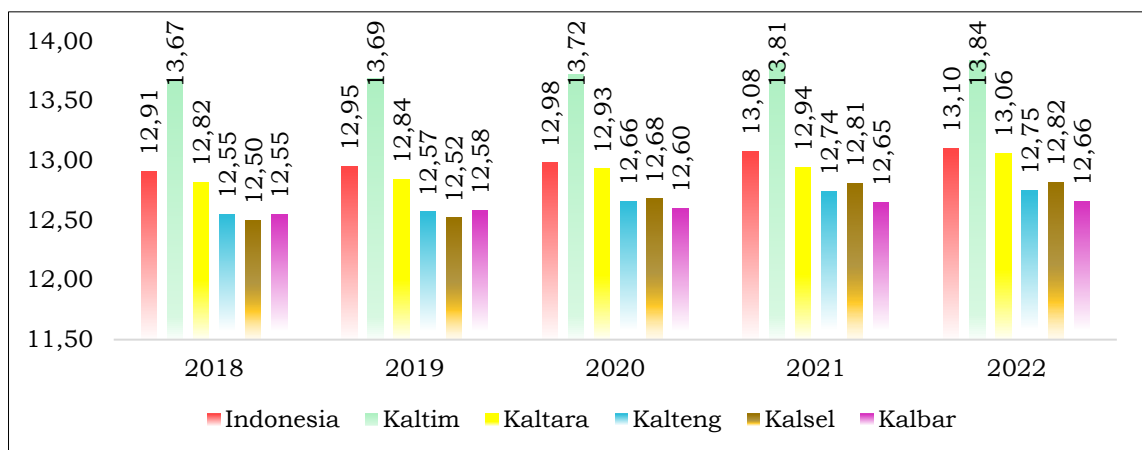
Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023

Secara umum Harapan Lama Sekolah pada kabupaten/kota mengalami tren kenaikan dari tahun 2017 sampai dengan 2022 meskipun kenaikan harapan lama sekolah di kabupaten/kota belum menunjukkan kenaikan secara signifikan. Sebagai upaya pemerintah terhadap peningkatan harapan lama sekolah di delapan kabupaten dengan angka harapan lama sekolah masih berada dibawah provinsi khususnya Kabupaten Mahulu dengan angka harapan lama sekolah yang paling rendah, maka diperlukan adanya langkah konkret sebagai upaya

pemerataan dan perluasan akses pendidikan baik pada peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan maupun pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikannya sehingga peningkatan angka harapan lama sekolah dapat segera diwujudkan.

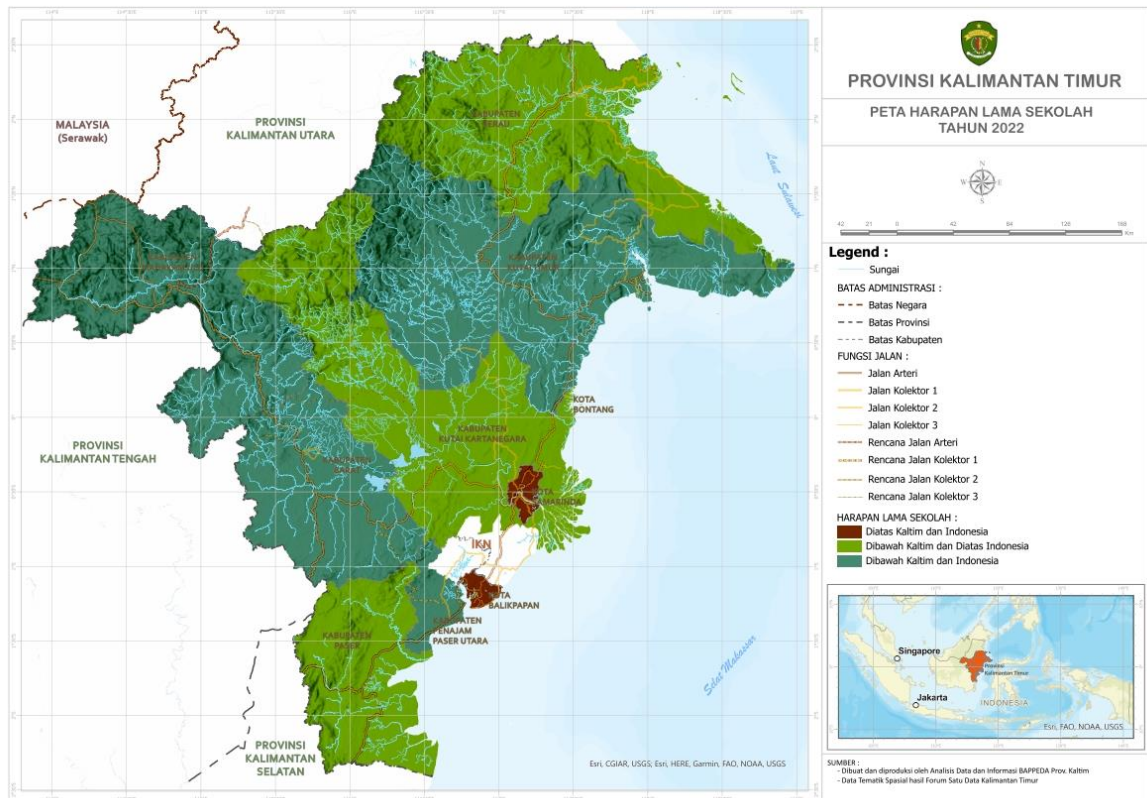
Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur selalu menjadi yang tertinggi di Regional Kalimantan. Namun tren laju pertumbuhan komponen ini (2018-2022) cenderung mengalami perlambatan. Berbeda dengan Provinsi lainnya di Regional Kalimantan yang meski berfluktuasi, namun cenderung meningkat. Laju pertumbuhan tertinggi ditunjukkan oleh Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

Harapan Lama Sekolah Kalimantan Timur juga lebih tinggi dari Harapan Lama Sekolah Indonesia. Namun sayangnya, rata-rata laju pertumbuhan Harapan Lama Sekolah Indonesia selama lima tahun terakhir lebih tinggi dari laju pertumbuhan Kalimantan Timur. Hal ini berarti pertumbuhan HLS wilayah lain di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan selama 5 tahun terakhir, sedangkan pertumbuhan HLS di Provinsi Kalimantan Timur cenderung melambat.



Gambar II.36  
Harapan Lama Sekolah Regional Kalimantan dan Indonesia  
(Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2022)

Pola spasial capaian Harapan Lama Sekolah kabupaten/kota tahun 2022 menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam Pendidikan formal pada waktu tertentu.



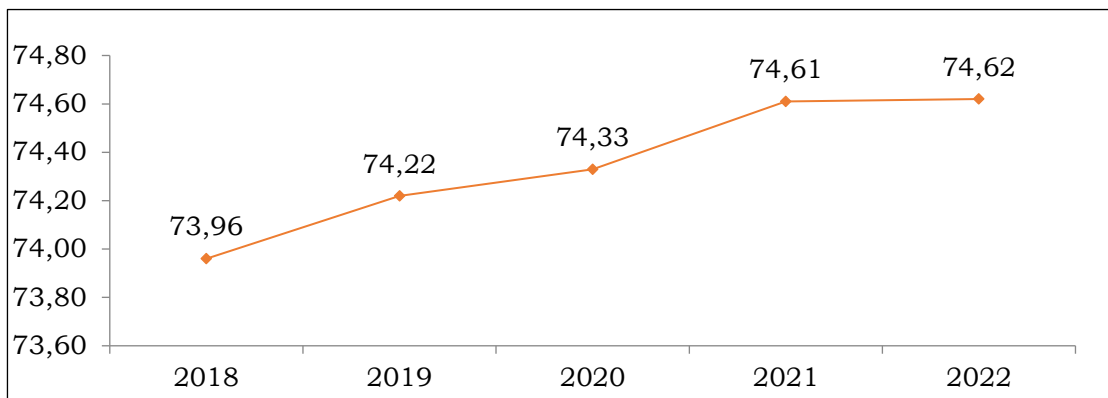
Gambar II.37

Pola Spasial Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2022

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

3) Umur Harapan Hidup

Di Provinsi Kalimantan Timur, Umur Harapan Hidup mengalami kenaikan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2018 mencapai 73,96 tahun dan pada tahun 2022 menjadi 74,62 tahun. Selama periode tersebut secara rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 0,2 persen per tahun atau secara kumulatif terdapat peningkatan 1,34 poin. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2022 akan memiliki harapan hidup hingga usia 74-75 tahun. Sehingga, angka ini bisa dikatakan memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 74,75 tahun. Dari sisi preventif Keberhasilan Pemerintah dalam menanggulangi penyakit menular, penyakit terkait kehamilan, neonatal dan penyakit-penyakit terkait gizi. Sedangkan dari sisi kuratif tergambar upaya pemerintah dan swasta di kabupaten/dalam menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.



Gambar II.38

Umur Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Sedangkan jika dirinci menurut Kabupaten/Kota, Kota Balikpapan memiliki usia harapan hidup tertinggi mencapai 74,78 tahun dan Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai usia harapan hidup 71,71 tahun merupakan usia harapan hidup terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Angka ini mengindikasikan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Penajam Paser Utara pada tahun 2022 akan memiliki harapan hidup hingga usia 71 tahun.

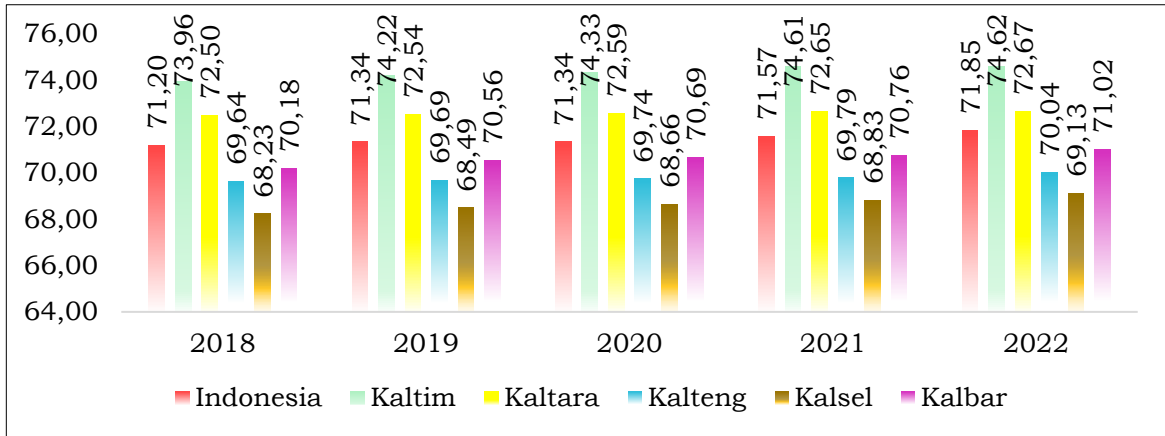
Tabel II.28

Usia Harapan Hidup Berdasar Kabupaten/Kota  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022 (tahun)

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	72,28	72,52	72,62	72,88	72,89
2	KUBAR	72,57	72,79	72,86	73,10	73,10
3	KUKAR	71,93	72,21	72,34	72,64	72,65
4	KUTIM	72,76	73,03	73,16	73,46	73,47
5	Berau	71,68	71,94	72,06	72,32	72,32
6	PPU	71,05	71,30	71,41	71,68	71,71
7	MAHULU	71,56	71,90	72,10	72,33	72,35
8	Balikpapan	74,18	74,41	74,49	74,76	74,78
9	Samarinda	73,93	74,17	74,27	74,54	74,56
10	Bontang	73,94	74,18	74,28	74,55	74,57

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Jika dibandingkan dengan provinsi di Regional Kalimantan, Umur Harapan Hidup Kalimantan Timur masih menjadi yang tertinggi dan masih berada di atas capaian nasional sebesar 71,85 tahun.



Gambar II.39  
 Umur Harapan Hidup Regional Kalimantan dan Indonesia  
 Tahun 2018-2022  
 (Sumber: BPS, Kalimantan Timur, 2023)

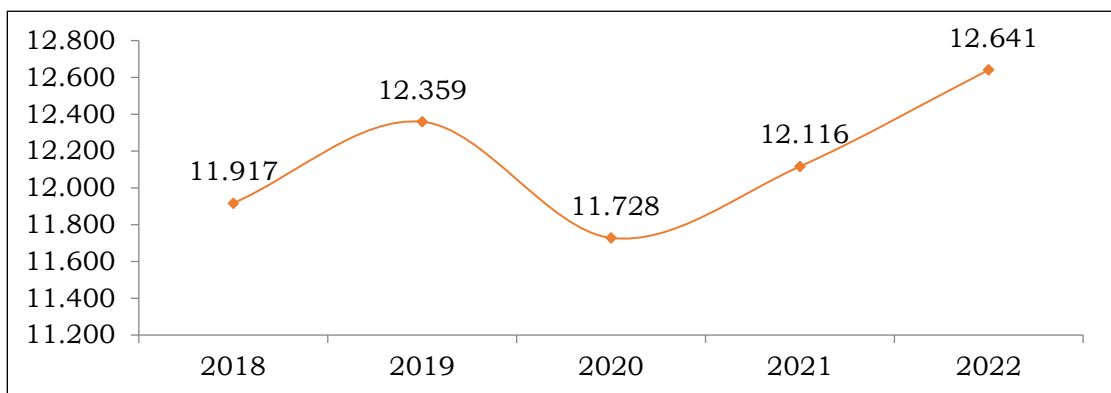
Pola spasial capaian Usia Harapan Hidup kabupaten/kota tahun 2022 menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah maupun negara, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat didalamnya.



Gambar II.40  
 Pola Spasial Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) Tahun 2022  
 (Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

#### 4) Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita Disesuaikan, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Pengeluaran per Kapita Disesuaikan selama periode lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 4,34 persen per tahun. Pada tahun 2022, Pengeluaran per Kapita disesuaikan masyarakat Kalimantan Timur mencapai Rp. 12,64 juta per tahun, atau naik Rp 525 ribu dibandingkan tahun 2021.



Gambar II.41

Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2018-2022 (Ribuan Rp)

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Peningkatan yang terjadi pada tahun 2021 dan 2022 merupakan dampak dari adanya pemulihan pandemi COVID-19 yang menyebar di seluruh wilayah Kalimantan Timur tanpa terkecuali yang menyebabkan daya beli masyarakat meningkat karena pulihnya aktivitas perekonomian masyarakat.

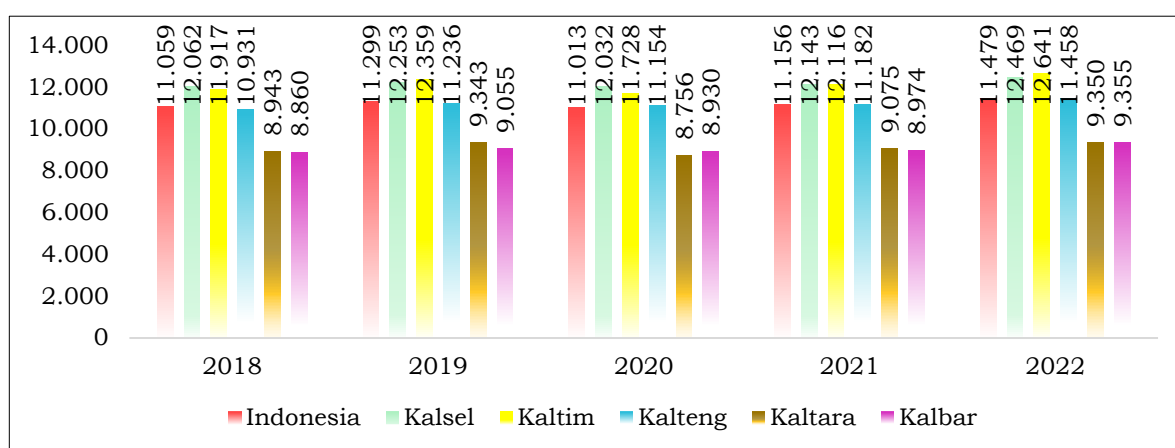
Sedangkan jika dirinci menurut kabupaten/kota, Kota Bontang memiliki pengeluaran per kapita disesuaikan paling besar diantara kabupaten/kota lainnya mencapai 17.327 ribu rupiah dan Kabupaten Mahakam Ulu sebesar 8.215 ribu rupiah merupakan pengeluaran per kapita terendah dibanding kabupaten/kota lainnya. Secara umum, peningkatan pengeluaran per kapita menggambarkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur yang diakibatkan pemulihan pandemi COVID-19 dengan banyaknya masyarakat yang telah vaksin di tahun 2022.

Tabel II.29  
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan Berdasar Kabupaten/Kota  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022 (Ribuan Rupiah)

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	10.605	10.767	10.344	10.673	11.181
2	KUBAR	9.849	10.338	9.712	10.062	10.740
3	KUKAR	10.959	11.152	10.720	11.048	11.677
4	KUTIM	10.614	11.196	10.485	10.868	11.322
5	Berau	12.207	12.726	12.018	12.435	13.095
6	PPU	11.492	11.750	11.231	11.651	11.890
7	MAHULU	7.653	8.008	7.524	7.802	8.215
8	Balikpapan	14.557	14.791	14.549	14.862	15.455
9	Samarinda	14.466	14.613	14.135	14.582	15.162
10	Bontang	16.698	16.843	16.278	16.765	17.327
Kalimantan Timur		11.917	12.359	11.728	12.116	12.641

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Pada komponen standar hidup layak di Regional Kalimantan tahun 2022, Kalimantan Timur menjadi yang tertinggi kedua setelah Kalimantan Selatan. Serta perolehan komponen pengeluaran per kapita Kalimantan Timur masih berada di atas nasional. Capaian ini harus dipertahankan agar kesejahteraan masyarakat dapat terus terlihat peningkatannya dari sisi pendapatan rumah tangga.

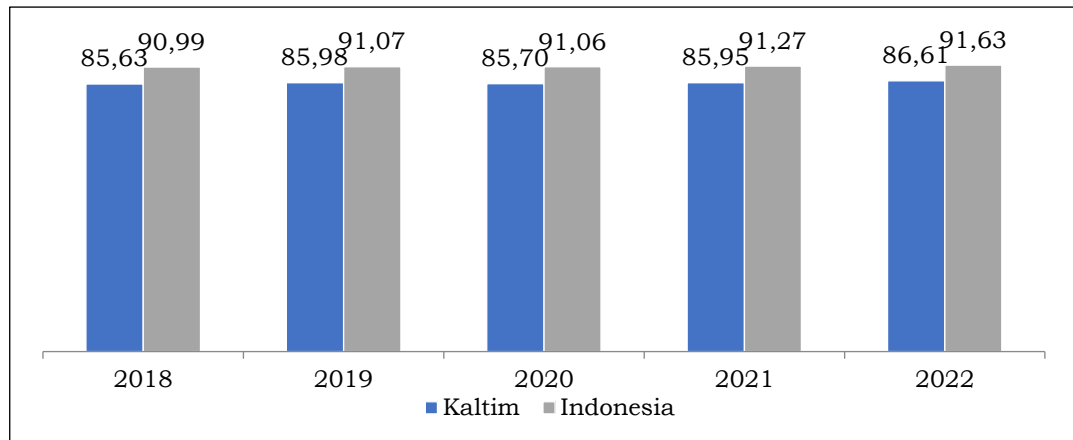


Gambar II.42  
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan  
Regional Kalimantan dan Indonesia (Ribuan Rupiah)  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

### G. Indeks Pembangunan Gender

Untuk dapat melihat pembangunan manusia yang dirinci menurut gender, *United Nations Development Programme* (UNDP) merumuskan sebuah metode penghitungan Indeks Pembangunan Gender. Seiring dengan penggunaan metode baru di penghitungan IPM pada tahun 2010. Saat ini,

IPG diformulasikan sebagai rasio antara IPM Perempuan dan IPM Laki-Laki. Semakin dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.



Gambar II.43  
Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2018-2022 (tahun)  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022)

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu lima tahun sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan dengan capaian tertinggi di tahun 2022 sebesar 86,61. Dalam rumusan IPG, dilakukan formulasi menggunakan komponen IPM yang dipisahkan sesuai jenis kelamin, sehingga penurunan IPM akibat dampak COVID-19 akan berpengaruh pada penurunan IPG. Seiring dengan pemulihan ekonomi dan mulai berkurangnya COVID-19 tahun 2021 Indeks Pembangunan Gender Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 86,61. Rendahnya Indeks Pembangunan Gender disebabkan oleh tingginya kesenjangan Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita Perempuan dibanding dengan laki-laki yaitu untuk Rata-Rata Lama Sekolah laki-laki tahun 2022 sebesar 10,24 tahun sedangkan perempuan 9,71 tahun, Adapun dari sisi pengeluaran per kapita untuk Laki-laki sebesar 19,22 juta rupiah sedangkan perempuan hanya 7,46 juta rupiah. Sehingga diperlukan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan sekaligus keberhasilan strategi pembangunan berbasis gender yang bersifat multi program dan lintas sektor.

Tabel II.30  
Komponen Penyusun Indeks Pembangunan Gender

No	Komponen	Laki-Laki	Perempuan
1	Umur Harapan Hidup (Tahun)	72,80	76,52
2	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,81	13,92
3	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,24	9,71
4	Pengeluaran Per Kapita (Juta Rp)	19,22	7,46

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Kota Balikpapan memiliki Indeks Pembangunan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 89,76 sedangkan Paser memiliki Indeks Pemberdayaan Gender terendah yaitu 70,64 yang artinya bahwa di Kabupaten Paser kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.

Tabel II.31  
Indeks Pembangunan Gender Berdasar Kabupaten/Kota  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022 (tahun)

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	70,64	71,41	71,15	71,19	71,98
2	KUBAR	83,52	83,84	83,87	84,28	84,62
3	KUKAR	78,83	79,14	78,90	79,12	79,80
4	KUTIM	76,03	76,51	76,26	76,40	77,11
5	Berau	87,92	87,93	87,61	87,76	87,76
6	PPU	86,34	86,22	86,39	86,57	86,83
7	MAHULU	80,18	80,89	80,98	81,65	82,32
8	Balikpapan	89,76	89,71	89,65	89,83	89,96
9	Samarinda	89,42	89,41	89,27	89,27	89,75
10	Bontang	86,61	86,72	86,87	87,12	87,52
Kalimantan Timur		85,63	85,98	85,70	85,95	86,61

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

#### H. Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Ukuran ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

Tabel II.32  
Indeks Pemberdayaan Gender Berdasar Kabupaten/Kota Provinsi  
Kalimantan Timur Tahun 2018 – 2022 (tahun)

No	KAB/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	62,76	66,20	65,66	65,67	64,94
2	KUBAR	63,68	61,14	60,60	65,34	66,01
3	KUKAR	56,44	63,74	61,43	62,76	63,40
4	KUTIM	55,72	56,35	53,77	53,78	51,55
5	Berau	50,55	57,66	57,91	56,48	58,17
6	PPU	50,02	50,36	49,75	49,85	50,58
7	MAHULU	76,04	80,61	80,41	80,43	81,11
8	Balikpapan	66,33	69,11	68,97	68,62	69,27
9	Samarinda	69,61	66,29	70,65	67,54	68,63
10	Bontang	46,36	51,99	51,97	45,67	46,12
Kalimantan Timur		57,53	65,65	65,54	66,64	66,89

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami fluktuasi dengan capaian 57,53 menjadi 65,65 di tahun 2019. Namun mengalami sedikit penurunan di tahun 2020 menjadi 65,54. Tahun 2022 Indeks Pemberdayaan Gender Kalimantan Timur mengalami peningkatan menjadi 66,89. Masih rendahnya indeks pemberdayaan gender di Kalimantan Timur disebabkan oleh keterlibatan perempuan di parlemen hanya 20,00 persen dan Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan sebesar 24,02 persen. Adapun persentase perempuan sebagai tenaga kerja profesional 49,78 persen.

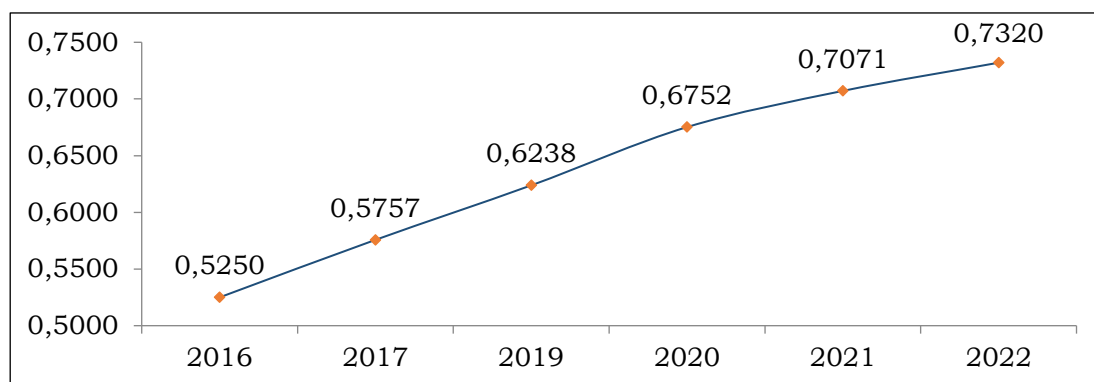
Jika dilihat berdasarkan wilayah, maka Kabupaten Mahulu memiliki Indeks Pemberdayaan Gender tertinggi dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 81,11 sedangkan Bontang memiliki Indeks Pemberdayaan Gender terendah yaitu 46,12 yang artinya bahwa di Kota Bontang memiliki kesenjangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki masih tinggi.

#### I. Indeks Desa Membangun

Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan desa didasarkan pada ruang dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi (lingkungan).

Capaian Indeks Desa Membangun merupakan cerminan status kemajuan dan kemandirian Desa, yang terbagi dalam Klasifikasi Status Desa yaitu Desa Mandiri ( $IDM > 0.8155$ ), Desa Maju ( $0.7072 < IDM \leq 0.8155$ ), Desa Berkembang ( $0.5989 < IDM \leq 0.7072$ ), Desa Tertinggal ( $0.4907 < IDM \leq 0.5989$ ) dan Desa Sangat Tertinggal ( $IDM \leq 0.4907$ ).

Pada kurun waktu 5 tahun terakhir IDM Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan dengan capaian terakhir pada tahun telah mencapai 0,7320. Capaian ini menempatkan Kalimantan Timur pada peringkat ke 8 diantara seluruh provinsi di Indonesia. Peningkatan ini tentu saja merupakan rapor positif bagi pemerataan dan pemberdayaan pembangunan hingga level administrasi terkecil di Kalimantan Timur.



Gambar II.44  
 Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur  
 Tahun 2016 - 2022  
 (Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2023)

Capaian IDM pada 7 Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan sejak 5 tahun terakhir seiring berhasilnya pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan dengan sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat melalui dana desa dan bantuan keuangan spesifik ke seluruh desa. Capaian IDM terendah pada tahun 2022 terdapat pada Kabupaten Mahakam Ulu mencapai 0,6646 dengan status Berkembang, dan capaian tertinggi pada Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nilai capaian sebesar 0,7769.

Tabel II.33  
 Indeks Desa Membangun Provinsi Kalimantan Timur  
 Tahun 2017 – 2022

No	Kab/Kota	2017	2019	2020	2021	2022
1	Paser	0,5856	0,6092	0,6664	0,7240	0,7500
2	KUBAR	0,5233	0,5900	0,6660	0,6953	0,7298
3	KUKAR	0,5815	0,6415	0,6846	0,7128	0,7465
4	KUTIM	0,6037	0,6378	0,6782	0,7119	0,7305
5	Berau	0,6097	0,6539	0,6999	0,7177	0,7261
6	PPU	0,6505	0,6905	0,7085	0,7340	0,7769
7	MAHULU	0,5352	0,5862	0,6181	0,6318	0,6646
Kalimantan Timur		0,5757	0,6238	0,6752	0,7071	0,7320

Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2023

Pada tahun 2022, dari 841 desa di Provinsi Kalimantan Timur yang tersebar di tujuh kabupaten tidak ada lagi desa dengan status sangat tertinggal dan hanya tersisa 17 desa tertinggal yang tersebar di Kabupaten Mahakam Ulu sebanyak 8 desa, Kabupaten Kutai Barat sebanyak 6 desa, Kabupaten Kutai Timur sebanyak 2 desa dan Kabupaten Berau sebanyak 1 desa. Untuk mengurangi jumlah desa tertinggal di Kalimantan Timur, perlu upaya pemerintah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan desa terutama dalam meningkatkan pencapaian indeks ketahanan ekonomi yang masih rendah daripada 2 komponen lainnya.

Tabel II.34  
Status Desa Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No	Kab/Kota	Desa Mandiri	Desa Maju	Desa Berkembang	Desa Tertinggal	Desa Sangat Tertinggal
1	Paser	17	76	46	0	0
2	KUBAR	32	75	77	6	0
3	KUKAR	46	73	74	0	0
4	KUTIM	18	61	58	2	0
5	Berau	11	41	47	1	0
6	PPU	12	15	3	0	0
7	MAHULU	0	8	34	8	0
Kalimantan Timur		136	349	339	17	0

Sumber: DPMPD Provinsi KALTIM, 2023

#### J. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Pengembangan budaya dan seni di Kalimantan Timur ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Nilai IPK Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 mencapai 52,49. Capaian IPK Kalimantan Timur berada diatas capaian IPK Nasional yaitu sebesar 51,90. Dari dimensi penilaian yang tercakup dalam IPK, Kalimantan Timur mendapatkan nilai di atas angka nasional, yaitu pada dimensi Ekonomi Budaya 29,65, Dimensi Pendidikan dengan nilai 72,20, dimensi Ketahanan Sosial Budaya dengan nilai 72,46 dan dimensi budaya literasi dengan nilai 60,09.

Tabel II.35  
Dimensi Indeks Pembangunan Kebudayaan  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Dimensi IPK	Provinsi	Nasional
Ekonomi Budaya	29,65	20,69
Pendidikan	72,20	68,71
Ketahanan Sosial Budaya	72,46	66,83
Warisan Budaya	37,44	46,63

Dimensi IPK	Provinsi	Nasional
Ekspresi Budaya	24,33	27,13
Budaya Literasi	60,09	54,29
Gender	55,88	58,55
IPK	52,49	51,90

Sumber: KEMENDIKBUD, 2022

Terhadap capaian IPK Provinsi Kalimantan Timur tersebut, peningkatan ini tentu saja merupakan rapor positif dikarenakan capaian berada diatas capaian IPK nasional. Capaian ini patut diapresiasi dalam pengembangan budaya dan seni serta pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah. Meskipun beberapa dimensi IPK terus mengalami peningkatan, namun masih diperlukan sinergi antar lembaga terkait di provinsi maupun kabupaten/kota dengan masyarakat sebagai pelaku seni budaya, masyarakat sebagai pemilik ataupun sebagai pengapresiasi seni budaya.

#### K. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menggambarkan kapasitas pemuda berdasarkan domain pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Pada Tahun 2017 IPP Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari 53,50 pada tahun 2017 menjadi 54,83 pada tahun 2020. Dengan capaian ini IPP Kalimantan Timur menduduki Peringkat 7 secara nasional meningkat dari tahun 2017. Semua capaian domain mengalami peningkatan, kecuali domain kesehatan dan kesejahteraan. Penurunan nilai indeks domain kesehatan dan kesejahteraan disebabkan oleh naiknya angka kehamilan remaja.

Tabel II.36  
Domain Penyusun Indeks Pembangunan Pemuda  
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Domain: Pendidikan	73,33	73,33	73,33	73,33	76,67
1. Rata-Rata Lama Sekolah	10,92	10,72	11,24	11,28	11,44
2. APK Sekolah Menengah	95,52	94,35	93,00	93,96	93,85
3. APK Perguruan Tinggi	35,58	35,64	37,78	39,16	40,21
Domain: Kesehatan dan Kesejahteraan	67,50	72,50	70,00	57,50	67,50
1. Angka Kesakitan Pemuda	6,15	5,37	6,52	4,07	6,31
2. Pemuda Menjadi Korban Kejahatan	1,37	0,93	1,37	1,67	0,23
3. Pemuda Merokok	20,80	20,80	20,82	20,39	19,14
4. Remaja Perempuan Sedang Hamil	7,99	7,99	2,52	25,55	26,88
Domain: Lapangan dan Kesempatan Kerja	40,00	35,00	45,00	50,00	35,00
1. Pemuda Berwirausaha Kerah Putih	0,40	0,24	0,48	0,70	0,38
2. Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda	15,78	15,21	12,80	13,94	16,01
Domain: Partisipasi dan Kepemimpinan	40,00	43,33	43,33	43,33	30,00

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
1. Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	77,25	70,55	70,55	70,55	50,56
2. Partisipasi Pemuda yang aktif dalam organisasi	3,63	4,87	4,87	4,87	4,15
3. Pemuda Berpendapat Dalam Rapat	6,21	5,12	5,12	5,12	2,62
Domain: Gender dan Diskriminasi	46,67	50,00	50,00	50,00	53,33
1. Angka Perkawinan Usia Anak	13,90	11,54	12,36	11,79	8,64
2. Pemuda Perempuan Sedang Bersekolah Menengah dan Perguruan Tinggi	44,83	44,39	46,10	45,88	46,76
3. Pemuda Perempuan Bekerja di Sektor Formal	24,21	25,29	27,96	24,48	25,17
Indeks Pembangunan Pemuda Kaltim	53,50	54,83	56,33	54,83	52,50
Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia	49,33	51,50	52,67	51,00	53,33

Sumber: BAPPENAS, 2022

### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.1. Urusan Wajib

##### A. Pendidikan

Angka partisipasi sekolah (APS) di beberapa Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur ternyata belum capai 100 persen, terbukti pada jenjang usia 16-18 tahun mengalami penurunan (81,43) tahun 2022, artinya Masih ada anak belum sepenuhnya mengenyam pendidikan formal bahkan pada tahun 2020 akibat pandemi Corona angkanya mengalami penurunan (81,88). Penyebab tersebut mungkin dipengaruhi oleh (1) faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki), (2) faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan), (3) faktor guru (rasio murid terhadap guru) dan (4) faktor jumlah sekolah (rasio murid terhadap sekolah). Untuk itu Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan berdasarkan kewenangannya lebih memfokuskan/melaksanakan program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan ruang kelas baru SD, pembangunan SD, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), rehabilitasi ruang kelas, bantuan untuk siswa.

Angka Partisipasi Kasar (APK) digunakan untuk menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 paling tinggi berada pada tingkat pendidikan Sekolah Dasar, yakni sebesar 105,21. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 5,21 persen penduduk yang bukan golongan umur 7-12 tahun masih bersekolah ditingkat SD, ini hal disebabkan adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. sebenarnya wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang

sesungguhnya namun tidak memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Angka Partisipasi Murni (APM) digunakan untuk mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu, serta dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas Pendidikan sesuai dengan usia pada jenjang Pendidikan. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan, sedangkan APM hanya sebatas usia pada jenjang yang bersesuaian. APM di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2022 mengalami peningkatan pada setiap jenjang Pendidikan terkecuali jenjang SLTA mengalami sedikit penurunan di tahun 2022. Peningkatan APM ini menunjukkan bahwa proporsi anak yang bersekolah sesuai dengan jenjang Pendidikan yang harus diikuti terus bertambah dan menjadi penanda dari meningkatnya akses penduduk kelompok usia tersebut terhadap layanan Pendidikan di Kalimantan Timur. Namun, meskipun APM terus mengalami kenaikan, pemerintah tetap mendorong peningkatan yang lebih baik lagi melalui beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur berupa pemberian bantuan operasional Pendidikan, bantuan bagi siswa miskin, pembangunan unit sekolah baru, pemerataan guru, dan sebagainya.

Tabel II.37  
Angka Partisipasi Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2018-2022

Usia Sekolah	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Partisipasi Sekolah					
7-12	99,76	99,68	99,73	99,60	99,57
13-15	98,89	98,21	99,07	98,90	98,75
16-18	81,55	82,07	81,88	82,10	81,43
Angka Partisipasi Kasar					
Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
SD	108,02	106,84	105,75	105,26	105,21
SLTP	92,57	91,03	92,17	92,03	91,47
SLTA	96,08	94,96	95,23	95,52	95,09
Angka Partisipasi Murni					
Jenjang Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
SD	98,40	98,41	98,44	98,36	98,45
SLTP	79,68	80,42	81,28	81,30	82,65
SLTA	68,43	68,55	69,00	69,29	69,10

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Rasio Murid-Guru yang menggambarkan tingkat perbandingan guru terhadap murid untuk melihat kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang harus diajar. Sedangkan Rasio Murid-Sekolah menggambarkan tingkat perbandingan fasilitas pendidikan yakni jumlah sekolah yang aktif terhadap jumlah murid di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun begitu, angka ini masih umum mengingat belum dilihat persebaran fasilitas pendidikan di wilayah Kalimantan Timur.

Tabel II.38  
Rasio Murid-Guru dan Murid-Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
Sekolah Dasar (SD)					
Negeri	1.652	347.886	22.323	15,58	210,84
Swasta	268	63.435	3.546	17,89	252,73
MI	133	30.179	2.194	13,76	226,91
Sekolah Menengah Pertama (SMP)					
Negeri	453	127.778	8.593	14,87	285,86
Swasta	233	32.664	2.247	14,54	147,80
MTs	170	31.829	3.027	10,52	187,23
Sekolah Menengah Atas (SMA)					
Negeri	143	65.859	3.941	16,71	463,80
Swasta	90	12.905	963	13,40	150,06
MA	80	10.890	1.565	6,96	136,13
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)					
Negeri	87	65.859	3.941	16,71	463,80
Swasta	131	12.905	963	13,40	150,06

Sumber: Disdikbud dan Kemenag Kaltim, 2023

Pada tahun 2022, rasio murid-guru paling tinggi pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar. Sedangkan rasio guru terendah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Sementara rasio murid-sekolah tertinggi adalah pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Tabel II.39  
Jumlah Satuan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur

KABUPATEN/KOTA	SATUAN PENDIDIKAN									
	SMA			SMK			SLB			TOTAL KESELURUHAN
	NEGERI	SWASTA	TOTAL	NEGERI	SWASTA	TOTAL	NEGERI	SWASTA	TOTAL	
Kab. Berau	15	4	19	8	6	14	1	0	1	34
Kab. Kutai Barat	17	5	22	7	7	14	1	0	1	37
Kab. Kutai Kartanegara	35	17	52	17	27	44	1	4	5	101
Kab. Kutai Timur	22	2	24	13	12	25	1	2	3	52
Kab. Mahakam Ulu	4	3	7	0	2	2	1	0	1	10
Kab. Paser	13	4	17	4	8	12	1	0	1	30
Kab. Penajam Paser Utara	7	3	10	6	4	10	1	0	1	21
Kota Balikpapan	9	19	28	6	27	33	1	3	4	65
Kota Bontang	3	8	11	4	9	13	1	5	6	30
Kota Samarinda	18	25	43	22	29	51	2	9	11	105
TOTAL	143	90	233	87	131	218	11	23	34	485

Tabel II.40  
Jumlah Peserta Pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur

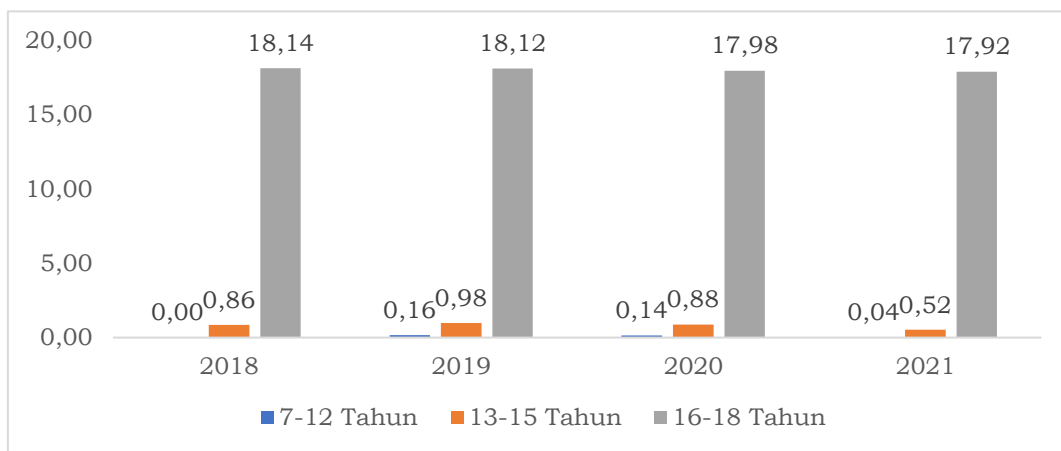
KABUPATEN/KOTA	PESERTA DIDIK									
	SMA			SMK			SLB			TOTAL KESELURUHAN
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
Kab. Berau	3445	3925	7370	2012	1468	3480	119	63	182	11032
Kab. Kutai Barat	2177	2366	4543	1784	1319	3103	76	35	111	7757
Kab. Kutai Kartanegara	7614	9194	16808	8594	5178	13772	227	106	333	30913
Kab. Kutai Timur	3269	4036	7305	4408	2880	7288	101	50	151	14744
Kab. Mahakam Ulu	654	611	1265	81	64	145	4	2	6	1416
Kab. Paser	2749	3072	5821	2697	1758	4455	41	25	66	10342
Kab. Penajam Paser Utara	1538	2243	3781	2542	1534	4076	73	39	112	7969
Kota Balikpapan	5023	7075	12098	10060	7333	17393	460	193	653	30144
Kota Bontang	1777	2744	4521	2748	1363	4111	172	58	230	8862
Kota Samarinda	7368	9524	16892	12538	10696	23234	459	268	727	40853
TOTAL	35614	44790	80404	47464	33593	81057	1732	839	2571	164032

Tabel II.41  
Jumlah Guru di Provinsi Kalimantan Timur

KABUPATEN/KOTA	GURU									
	SMA			SMK			SLB			TOTAL KESELURUHAN
	NEGERI	SWASTA	TOTAL	NEGERI	SWASTA	TOTAL	NEGERI	SWASTA	TOTAL	
Kab. Berau	392	61	453	205	84	289	17	0	17	759
Kab. Kutai Barat	357	25	382	184	78	262	15	0	15	659
Kab. Kutai Kartanegara	885	136	1021	479	375	854	31	19	50	1925
Kab. Kutai Timur	440	15	455	323	140	463	17	7	24	942
Kab. Mahakam Ulu	96	5	101	0	21	21	2	0	2	124
Kab. Paser	360	33	393	218	102	320	17	0	17	730
Kab. Penajam Paser Utara	192	26	218	220	64	284	11	0	11	513
Kota Balikpapan	467	221	688	492	392	884	44	35	79	1651
Kota Bontang	132	173	305	190	117	307	23	24	47	659
Kota Samarinda	682	279	961	1014	366	1380	66	62	128	2469
TOTAL	4003	974	4977	3325	1739	5064	243	147	390	10431

Selama beberapa tahun terakhir, Angka Putus Sekolah di Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya mengalami penurunan. Pada tahun 2021, Angka Putus Sekolah mengalami penurunan di seluruh kelompok usia sekolah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,10 poin untuk kelompok usia 7-12 tahun, kelompok usia 13,15 tahun turun 0,36 poin, dan untuk kelompok usia 16-18 tahun turun 0,06 poin.

Faktor penyebab putus sekolah antara lain karena masih kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak, keadaan geografis yang kurang menguntungkan atau kondisi ekonomi orang tua yang miskin. Kemiskinan sering kali menjadi alasan bagi siswa untuk tidak melanjutkan sekolah, karena mereka diharapkan membantu mencari nafkah untuk keluarganya. Selain itu, faktor ekonomi sering kali memunculkan anggapan bahwa lebih baik bekerja untuk mendapatkan uang, dibandingkan dengan melanjutkan pendidikan yang berimplikasi pada semakin besarnya pengeluaran yang harus dilakukan oleh rumah tangga.



Gambar II.45  
Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2018-2021 (persen)  
(Sumber: BPS Kaltim, 2022)

Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan tertinggi dalam peningkatan potensi sumber daya manusia sebagai bagian dari pendidikan formal. Di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 54 perguruan tinggi/akademi/lembaga pendidikan tinggi. Pada tahun 2022, jumlah mahasiswa mencapai 96.091 dengan jumlah dosen sebanyak 4.424 orang.

## B. Kesehatan

### 1) Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Stunting

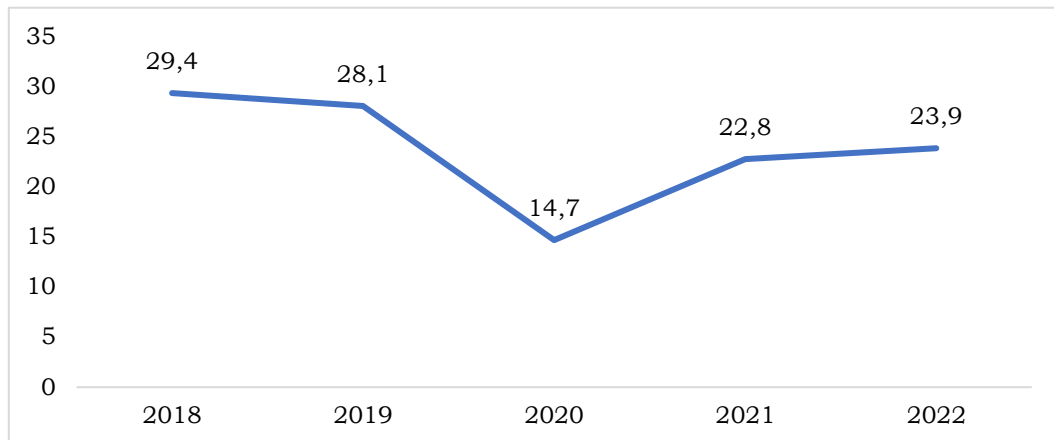
Kematian Ibu dan Bayi dan Stunting masih tetap menjadi tantangan utama di sektor Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Tren Jumlah Kematian Ibu dari tahun 2017–2018 sudah terjadi penurunan, namun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah kematian ibu. Sedangkan jumlah kematian bayi (0–11) bulan sudah mengalami penurunan.

Tabel II.42  
Tren Balita Pendek (Stunting) Menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Persen)

No	Kab/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	27,50	32,20	15,50	23,60	24,90
2	KUBAR	30,00	35,70	16,60	15,80	23,10
3	KUKAR	35,70	36,50	14,30	26,40	27,10
4	KUTIM	30,50	39,40	16,10	27,50	24,70
5	Berau	31,70	24,70	17,60	25,70	21,60
6	PPU	31,60	27,00	11,40	27,30	21,80
7	MAHULU	32,80	36,60	9,60	20,30	14,80
8	Balikpapan	23,80	14,00	13,30	17,60	19,60
9	Samarinda	26,30	24,70	11,90	21,60	25,30
10	Bontang	26,60	29,00	20,90	26,30	21,00

Sumber: DINKES Provinsi KALTIM, 2023

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dari 34 provinsi, hanya Provinsi Kalimantan Timur yang Prevalensi stunting pada anak balitanya meningkat, yaitu dari 27,6 persen pada tahun 2017 meningkat menjadi 29,40 persen pada tahun 2018, walaupun hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) pada tahun 2019 turun menjadi 28,10 persen, tapi masih diatas rata-rata nasional (27 persen) dan bila dibandingkan dengan *Cut of Point* menurut Rekomendasi WHO bahwa stunting tidak bermasalah apabila <20 persen. Walau sempat turun tajam pada tahun 2020 menjadi 14,7, namun prevalensi stunting di Kalimantan Timur tahun 2021 dan 2022 cenderung meningkat mencapai 23,9. Angka ini diatas prevalensi stunting nasional yang mencapai 21,6. Secara regional, prevalensi stunting Kalimantan Timur pada tahun 2022 berada urutan kedua terendah setelah Provinsi Kalimantan Utara. Rata-rata prevalensi stunting menurut kabupaten/kota pada tahun 2022 masih tinggi yaitu diatas 20 persen, kecuali Kabupaten Mahakam Hulu dan Kota Balikpapan yang masing-masing mencapai 14,8 persen dan 19,6 persen.



Gambar II.46

Prevalensi Balita Pendek (Stunting) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 berdasarkan Hasil Survei SSGI  
(Sumber: SSGI Kementerian Kesehatan, 2023)

Untuk wasting sendiri hasil SSGI Tahun 2022 menunjukkan Provinsi Kalimantan Timur mencapai 9,1. Angka ini lebih tinggi dibandingkan wasting nasional yang mencapai 7,7. Wasting di Kalimantan Timur dibandingkan daerah lain di Pulau Kalimantan berada pada posisi ketiga terendah setelah Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah. Hal ini merupakan tantangan bagi Provinsi Kalimantan Timur bagaimana agar semua balita yang ada dalam sasaran untuk dilakukan pengukuran setiap bulan agar terlihat data stunting dan wasting yang sebenarnya. Perlu adanya dukungan dan sinergitas antar Perangkat Daerah terkait dalam rangka percepatan penurunan jumlah kematian ibu dan bayi dan stunting serta wasting di Provinsi Kalimantan Timur.

## 2) Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, upaya penambahan jumlah fasilitas kesehatan diwujudkan untuk mengoptimalkan dukungan pelayanan Kesehatan masyarakat. Terdapat penambahan sebanyak 15 Rumah Sakit Umum, 6 Rumah Sakit Swasta, 28 Puskesmas, sampai dengan bertambahnya 221 terlihat persebaran fasilitas Kesehatan di kabupaten kota sudah merata. Dengan jumlah 59 Rumah Sakit Umum dan Swasta di Kalimantan Timur pada tahun 2022, terdata pada Mahulu dan Bontang sudah memiliki 2 RS. Persebaran fasilitas kabupaten kota lainnya memiliki lebih dari jumlah tersebut. Dengan jumlah Puskesmas sebanyak 188 unit, setiap kabupaten kota setidaknya memiliki minimal 6 puskesmas yaitu pada Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Bontang. Selanjutnya jumlah pedagang besar farmasi

dan apotek secara kuantitas tersebar merata, sebagai wujud peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di setiap kabupaten dan kota.

Tabel II.43  
Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021

No	Fasilitas Kesehatan	2018	2019	2020	2021
1	Rumah Sakit Umum	54	53	57	59
2	Rumah Sakit Swasta	19	19	22	22
3	RS Bersalin	15	9	7	10
4	Puskesmas	186	187	187	188
5	Puskesmas Pembantu	716	716	730	742
6	Pedagang Besar Farmasi	48	49	52	53
7	Apotek	637	704	759	745

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

Pada umumnya, jumlah fasilitas kesehatan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan atau tetap (puskesmas) jika dibandingkan dengan tahun 2021. Seluruh jenis fasilitas kesehatan mengalami penurunan, kecuali jumlah apotek meningkat dari 745 menjadi 826.

Tabel II.44  
Jumlah Fasilitas Kesehatan per Kabupaten Kota  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan					
		RS. Umum	RS. Swasta	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Pedagang Besar Farmasi	Apotek
1	Paser	2	0	19	123	0	38
2	Kutai Barat	2	1	19	84	0	36
3	Kutai Kartanegara	3	0	32	175	0	122
4	Kutai Timur	3	5	21	116	1	51
5	Berau	2	0	21	112	0	71
6	Panajam Paser Utara	2	0	11	43	0	34
7	Mahakam Ulu	2	0	6	30	0	6
8	Balikpapan	11	4	27	14	19	165
9	Samarinda	14	3	26	0	32	285
10	Bontang	1	4	6	2	0	18
JUMLAH		42	17	188	699	52	826

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

Terjaminnya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan setiap warga merupakan tanggung jawab Pemerintah. Fasilitas pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Kesehatan baik secara promotif, preventif, dan kuratif demi mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang baik. Pelaksanaan pelayanan di bidang Kesehatan harus mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.

Tabel II.45  
Jumlah Tenaga Kesehatan  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021

No	Fasilitas Kesehatan	2018	2019	2020	2021
1	Dokter Umum	1.010	1.024	1.106	2.097
2	Dokter Gigi	309	314	320	411
3	Dokter Spesialis	503	597	649	768
4	Perawat	7.823	6.524	7.510	10.789

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

Hal utama selanjutnya yaitu pemenuhan tenaga Kesehatan yang mencukupi secara kualitas dan kuantitas yang adil dan merata di setiap wilayah. Pertambahan jumlah penduduk diikuti juga dengan penambahan jumlah sumber daya manusia Kesehatan di Provinsi Kalimantan Timur. Sejak 2017 sampai dengan 2022 penambahan Dokter umum bertambah 983 orang, Dokter gigi 91 orang, Dokter spesialis 90 orang, dan perawat sejumlah 4.127 orang. Persebaran tenaga Kesehatan di Kabupaten Kota sudah merata walaupun perlu di akurasi sampai pada kebutuhan di tingkat kecamatan. Dengan jumlah 11.976 tenaga Kesehatan utama pada tahun 2022, yang terdiri dari Dokter umum, Dokter gigi, Dokter Spesialis dan Perawat menggambarkan persebaran tenaga kesehatan di kabupaten/kota upaya pemenuhan pelayanan pada masyarakat sudah terpenuhi.

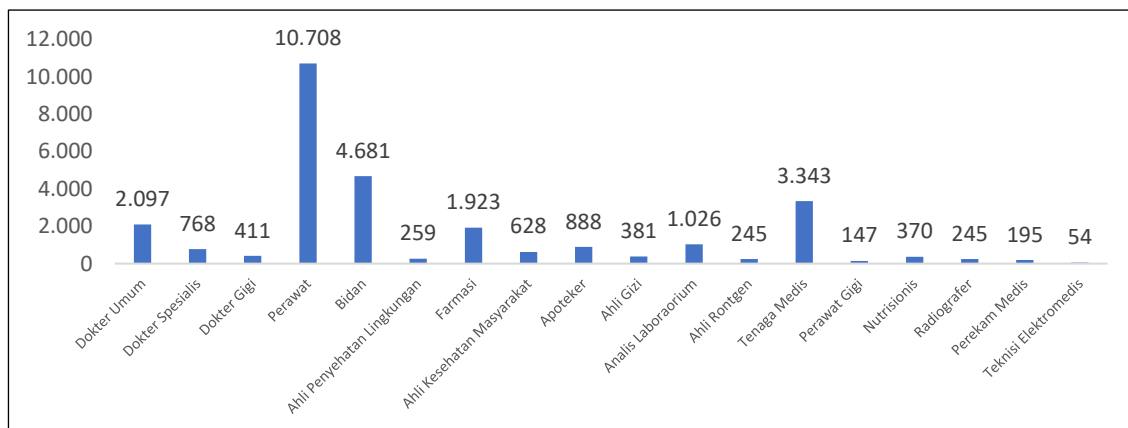
Tabel II.46  
Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan			
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Spesialis	Perawat
1	Paser	61	23	32	543
2	Kutai Barat	62	16	18	611
3	Kutai Kartanegara	111	33	68	1.096
4	Kutai Timur	113	34	50	858

No	Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan			
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Dokter Spesialis	Perawat
5	Berau	108	23	25	665
6	Penajam Paser Utara	39	13	23	287
7	Mahakam Ulu	24	2	1	211
8	Balikpapan	368	89	393	1.974
9	Samarinda	305	112	302	2.438
10	Bontang	163	35	104	763
JUMLAH		1.354	380	1.016	9.226

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

Dalam upaya percepatan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan mutlak diperlukan, sejumlah upaya telah dilakukan dalam upaya pemenuhan tenaga kesehatan di Puskesmas dan atau Rumah Sakit diantaranya pemenuhan tenaga kesehatan melalui Program Nusantara sehat, Program Intersip Dokter Indonesia (PIDI), Program Pemberdayaan Dokter Spesialis (Dokter Spesialis yang baru selesai tugas belajar) ataupun juga dengan Institusi Pendidikan kesehatan untuk penempatan tenaga residen.



Gambar II.47

Jumlah dan Jenis Tenaga Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

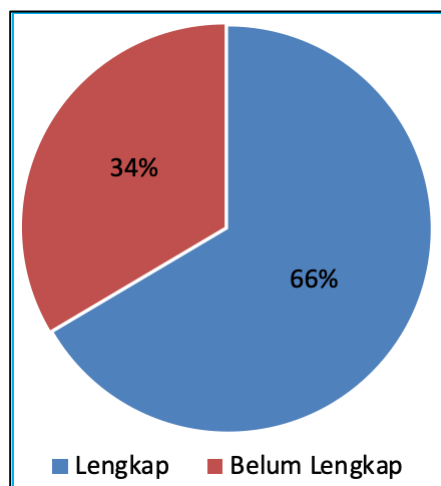
(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022)

Tabel II.47  
Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Lengkap	Belum Lengkap	% Pemenuhan
1	Paser	19	17	2	89.47
2	Kutai Barat	19	4	15	21.05
3	Kutai Kartanegara	32	22	10	68.75
4	Kutai Timur	21	7	14	33.33
5	Berau	21	15	6	71.43
6	Penajam Paser Utara	11	5	6	45.45
7	Mahakam Hulu	6	1	5	16.67
8	Kota Balikpapan	27	26	1	96.30
9	Kota Samarinda	26	22	4	84.62
10	Kota Bontang	6	6	0	100.00
Jumlah		188	125	63	

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

Kecukupan jumlah tenaga kesehatan jika dilihat berdasarkan rasio di tingkat provinsi untuk tenaga dokter khususnya Dokter Spesialis telah melampaui target rasio dengan rasio 18 per 100.000 penduduk dari target rasio 12 per 100.000 penduduk, namun rasio di tingkat kabupaten masih ada beberapa kabupaten yang belum mencapai target rasio dikarenakan dokter spesialis banyak berada di daerah perkotaan. Sedangkan Kecukupan jenis tenaga kesehatan juga sangat menentukan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya di puskesmas 9 jenis tenaga kesehatan harus ada (dokter, dokter gigi, bidan, perawat, farmasi, promkes, kesling, gizi dan tenaga laboratorium medik) saat ini 53 persen puskesmas telah terpenuhi 9 jenis tenaganya.



Gambar II.48  
Pemenuhan 9 Tenaga Kesehatan di Puskesmas  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022  
(Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022)

Pemenuhan Tenaga Kesehatan terus dilakukan dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Sebesar 55 persen RSUD di Provinsi Kalimantan Timur telah terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang dengan jumlah 9 RSUD yang belum terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang.

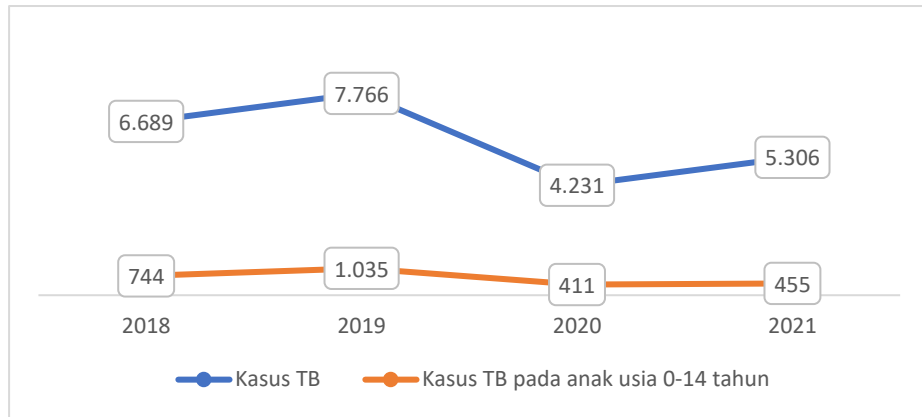
Tabel II.48  
Jumlah RSUD Belum Terpenuhi 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang Provinsi Kalimantan Timur

No.	Kab/Kota	Milik	Tipe	Nama Fasyankes	Medik SPES Dasar				Medik SPES Penunjang		
					Sp.A	Sp.B	Sp.OG	Sp.PD	Sp.An	SP.PK	Sp.Rad
1.	Kabupaten Berau	Kab/Kota	RSUD	RSUD Talisayan		1	1	1	1		
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Dr. Abd. Rival berau	3	2	3	3	1	1	2
2.	Kota Balikpapan	Kab/Kota	RSUD	RSUD Balikpapan	2	2	3	4	3	2	
3.	Kota Bontang	Kab/Kota	RSUD	RSUD Taman Husada	3	2	4	3	3	2	2
4.	Kota Samarinda	Kab/Kota	RSUD	RSUD Inche Abdoel Moeis	3	3	3	4	3	2	2
5.	Kabupaten Kutai Barat	Kab/Kota	RSUD	RSUD Harapan Insan Sendawar	2	3	2	3	1	3	1
6.	Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab/Kota	RSUD	RSUD AM Parikesit Tenggarong	4	3	5	6	4	2	2
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Dayaku Raja	1	1		1			
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	2	1	1	3	1	1	1
7.	Kabupaten Kutai Timur	Kab/Kota	RSUD	RSUD Sangkuliran g		1	1	1		1	
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Kudungga	1	3	3	4	3	2	1
8.	Kabupaten Paser	Kab/Kota	RSUD	RSUD Panglima Sebaya	3	4	4	3	3	2	2
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Kerang			1				
9.	Kabupaten Penajam Paser Utara	Kab/Kota	RSUD	RSUD Sepaku	1		1				
		Kab/Kota	RSUD	RSUD Ratu Aji Putri Botung	1	3	2	2	1	2	2

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

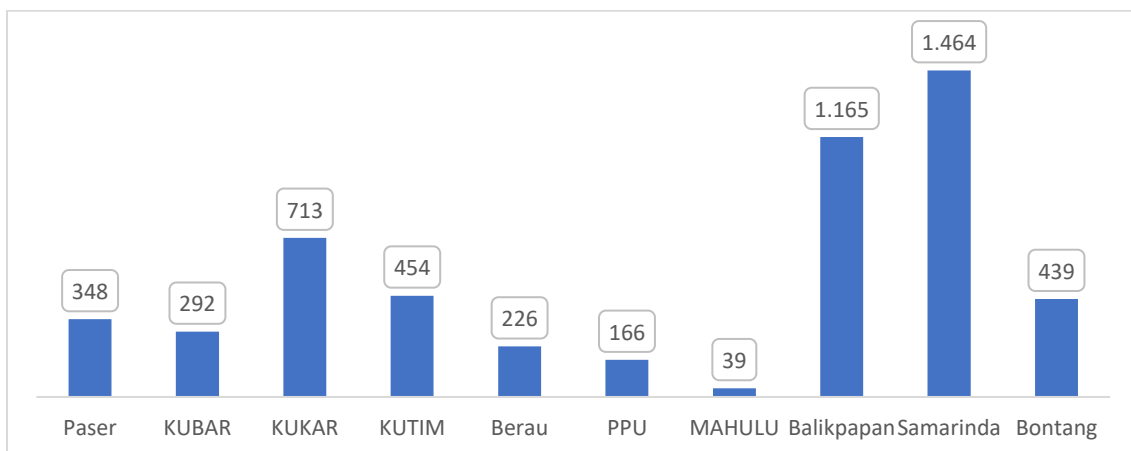
3) Penyakit menular

Salah satu penyakit menular yang saat ini menjadi perhatian dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah penyakit Tuberkulosis (TBC) atau TB, hal ini dikarenakan jumlah kasus TBC dan Jumlah kematian selama pengobatan Tuberkulosis tinggi dan meningkat di setiap tahunnya.



Gambar II.49  
Kasus TB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021  
(Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Kaltim, 2022)

Jumlah kasus TB mengalami peningkatan di tahun 2017 – 2019 dan mengalami penurunan di tahun 2020 akan tetapi pada tahun 2021 meningkat kembali hingga mencapai 5.306 kasus sama halnya juga dengan kasus TB pada anak usia 0-14 tahun sedikit mengalami peningkatan tahun 2021 mencapai 455 kasus.



Gambar II.50  
Jumlah Kasus TB menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021  
(Sumber: Seksi P2PM Dinkes Prov Kaltim, 2022)

Kota Samarinda, Balikpapan dan Kabupaten Kutai Kartanegara berada di urutan tertinggi untuk kasus TB, hal ini juga terkait dengan lebih

banyak fasilitas Kesehatan yang aktif melapor dan besarnya jumlah penduduk di ketiga wilayah tersebut.

Tabel II.49  
Jumlah Kasus Penyakit Menular Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2018 - 2021

No	Penyakit/Kasus	2018	2019	2020	2021
1.	CNR Seluruh Kasus TBC (Per 100.000 Penduduk Kalimantan Timur)	176	206	123	140
2.	Jumlah Kematian selama Pengobatan Tuberkulosis (Kab/Kota)	191	207	210	281
3.	Jumlah Kasus HIV (Kab/Kota)	1,512	1,355	1,023	1,143
4.	Jumlah Kasus Baru AIDS (Kab/Kota)	420	319	179	374
5.	Jumlah Kematian akibat AIDS (Kab/Kota)	154	32	24	46

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

TBC (Tuberkulosis) yang juga dikenal dengan TB adalah penyakit paru-paru akibat kuman *Mycobacterium tuberculosis*. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama (lebih dari 3 minggu), biasanya berdahak, dan terkadang mengeluarkan darah.

Tabel II.50  
Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 - 2021

No	Penyakit/Kasus	2018	2019	2020	2021
1.	Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Kab/Kota)	207.231	239.736	245.676	206.848
2.	Deteksi Dini Kanker (Puskesmas Melaksanakan Kegiatan Deteksi Dini Iva & Sadanis* )	122	151	110	130

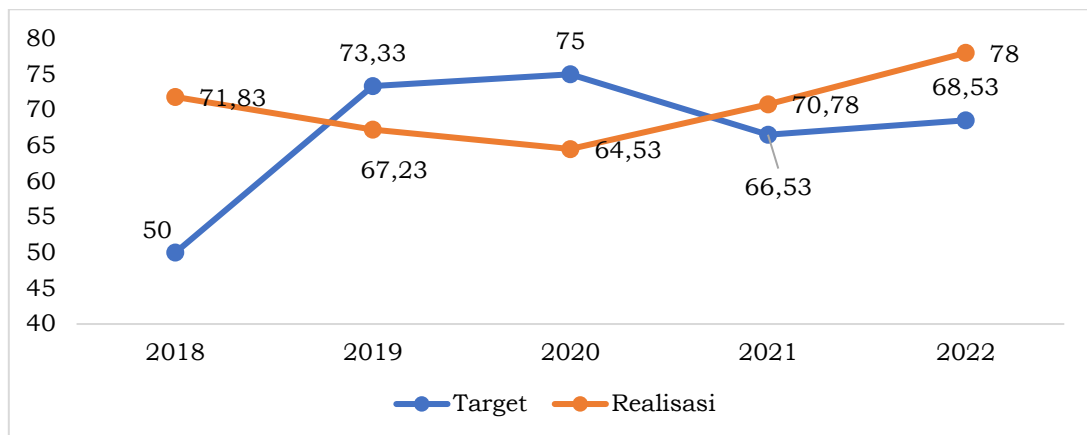
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi KALTIM, 2022

### C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### 1) Pemenuhan Kebutuhan Infrastruktur Air Minum

Selain upaya pencapaian target SPM air minum (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal), Kalimantan Timur memiliki target pemenuhan kebutuhan akses air minum layak. Akses air minum layak merupakan kemudahan/kemampuan penduduk memperoleh kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari dari

sumber terlindungi baik dari jaringan perpipaan maupun non perpipaan. Persentase akses air minum layak merupakan rasio antara jumlah penduduk yang telah memperoleh suplai air minum dengan total jumlah penduduk. Dalam 5 tahun terakhir, capaian akses air minum layak menunjukkan kinerja yang baik. Walaupun target tidak tercapai pada awal dan pertengahan tahun perencanaan (2019-2020), namun sejak tahun 2021, realisasi pemenuhan akses air minum layak telah melampaui target yang ditetapkan. Grafik target dan realisasi direpresentasikan pada gambar dibawah ini.



Gambar II.51

Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak 2018-2022 (%)

(Sumber: Dinas PUPRPERA Kaltim 2023 – Web SPM, 2022)

Angka capaian merupakan agregat dari pencapaian 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur (tabel II. 42). Seluruh Kabupaten/Kota telah memiliki capaian di atas 50% kecuali Kabupaten Penajam Paser Utara yang aksesnya baru mencapai 30.90%. Sementara capaian tertinggi berada di Kota Balikpapan. Walaupun secara cakupan Kalimantan Timur menunjukkan layanan yang baik, perhatian perlu diberikan pada aspek keandalan, kualitas, dan kontinuitas sumber air baku. Hampir seluruh area perkotaan, terutama tiga Pusat Kegiatan Nasional (PKN) utama, memiliki cakupan di atas 80%. Sayangnya, suplai air baku yang mendukung tingginya capaian ini masih berasal dari air tanah, terutama di Kota Bontang dan Balikpapan. Kondisi ini dapat dikatakan tidak ideal dan tidak berkelanjutan. Sehingga diperlukan upaya untuk menyediakan air baku yang memenuhi standar keandalan, yakni bersumber dari air permukaan.

Tabel II.51  
Capaian Akses Air Minum Layak Kabupaten/Kota 2022

No	Kabupaten/Kota	Air minum layak (%)
1	Balikpapan	99.25
2	Penajam Paser Utara	30.90
3	Paser	70.14
4	Bontang	83.55
5	Kutai Timur	51.73
6	Berau	82.16
7	Samarinda	87.27
8	Kutai Kartanegara	72.85
9	Kutai Barat	86.02
10	Mahakam Ulu	66.06
Provinsi		78.00

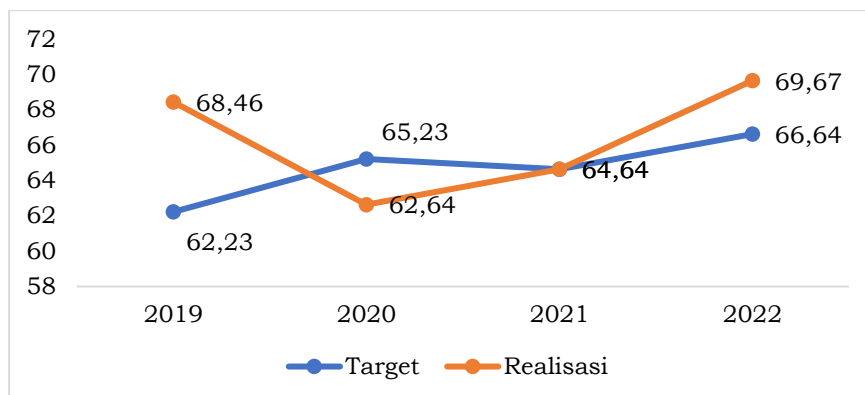
Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023

Dari sisi kualitas air yang digunakan oleh masyarakat, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Data Susenas Kor (Maret 2022) menunjukkan bahwa terdapat 17.118 Rumah Tangga di Kaltim (1,3%) yang sumber air minumnya berasal dari sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, dan mata air tak terlindung. Sumber tersebut memiliki jarak kurang dari 10-meter dari tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Sementara untuk keperluan domestik lainnya (memasak, mandi, mencuci, dll), terdapat sekitar 5.55% Rumah Tangga yang menggunakan air dari sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, dan mata air tak terlindung dan sumber tersebut memiliki jarak kurang dari 10-meter dari tempat penampungan limbah/kotoran/tinja terdekat. Hal ini mengartikan bahwa terdapat penduduk yang sumber air bersihnya memiliki potensi terkontaminasi dengan air buangan/limbah domestik (termasuk tangki septik). Kondisi ini dapat membawa risiko negatif bagi kesehatan karena masyarakat berpotensi terpapar bakteri dari buangan air limbah.

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, target akses air minum layak secara nasional adalah 100% pada tahun 2024. Hingga tahun 2022, capaian air minum layak di Kaltim baru mencapai 78% (tabel II. 52). Oleh karena itu, masih terdapat gap yang cukup besar antara capaian Kalimantan Timur dengan target nasional. Pemerintah Provinsi tidak dapat sepenuhnya mengejar target tersebut mengingat kewenangan pemerintah provinsi terbatas pada suplai air baku untuk air minum pada cakupan regional atau

lintas kabupaten/kota. Dari 841 desa & kelurahan yang ada di Kaltim, rencana SPAM regional diperkirakan hanya mampu menyuplai air minum curah untuk kurang lebih 260 desa/kelurahan. Oleh karena itu, untuk mencapai target 100% cakupan layanan, diperlukan strategi penanganan khusus, salah satunya melalui mekanisme bantuan keuangan. Selain itu, diperlukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terutama untuk kompilasi data capaian di setiap kabupaten/Kota yang akan diagregat menjadi capaian provinsi.

Capaian layanan air minum layak melalui sistem perpipaan telah diterima oleh 69.67% dari jumlah penduduk Kaltim (Gambar II. 52) . Nilai ini adalah angka layanan baik sistem perpipaan PDAM maupun non-PDAM. Dalam konteks capaian berdasarkan dokumen RPJMD Kaltim 2019 – 2023, capaian air minum layak perpipaan tahun 2022 telah melampaui target yang ditetapkan, yakni sebesar 66,64%. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, air minum layak perpipaan di Kaltim ditargetkan mencapai 71.75% pada tahun 2024, sehingga terdapat *gap* antara target nasional dengan kondisi saat ini, yakni berkisar 2.77%.



Gambar II.52

Target dan Realisasi Akses Air Minum Layak Perpipaan Kaltim

(Sumber: Dinas PUPRPERA Kaltim 2023 – Web SPM, 2022)

## 2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Penanganan atau upaya penyediaan infrastruktur air limbah oleh provinsi yang dilakukan hingga saat ini belum secara langsung memperlihatkan manfaat/dampak yang nyata terkait pencapaian SPM air limbah skala provinsi. Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan kabupaten/kota. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan bimbingan teknis sektor air limbah serta pemberian pendampingan untuk implementasi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Tahun 2022, pendampingan dilakukan untuk Kota

Samarinda dan Kabupaten Berau sementara tahun 2023, pendampingan akan dilakukan untuk Kabupaten Paser, Mahulu, dan Kota Bontang. Nilai capaian sektor sanitasi yang digunakan sebagai indikator merupakan nilai capaian agregat 10 Kabupaten/Kota. Pada dimensi layak, sudah 81,79% penduduk mendapat layanan sanitasi. Namun, capaian masih sangat minim pada dimensi aman, yakni baru mencapai kurang dari 5%.

Tabel II.52  
Capaian Sektor Air Limbah 2022

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Air Limbah	
		Layak (%)	Aman (%)
Balikpapan	718.423	91,40	9,18
Penajam Paser Utara	186.801	95,68	3,70
Paser	288.225	71,24	0,71
Bontang	185.928	94,93	7,63
Kutai Timur	424.743	89,10	2,70
Berau	263.150	88,45	3,35
Samarinda	838.935	78,02	7,95
Kutai Kartanegara	753.862	75,02	0,32
Kutai Barat	170.871	59,82	1,59
Mahakam Ulu	35.274	52,50	2,91
Kaltim 2022	3.866.212	81,79	4,71

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2022. Agregasi capaian Kabupaten/Kota

Walaupun belum mencapai kondisi ideal dan masih jauh dari kondisi aman, secara nasional Kaltim memperlihatkan kemajuan penanganan sanitasi yang baik, terutama dari sisi tempat pembuangan tinja. Pada tahun 2022 (Maret), hampir seluruh Rumah Tangga di Kaltim atau 92,83 persen terlayani oleh tangki septik. Kondisi ini sudah berada di atas rata-rata nasional yakni 82,56 persen. Walaupun secara persentase terlihat baik, angka absolut untuk Rumah Tangga yang membutuhkan perhatian dapat dikatakan cukup signifikan. Pada tahun 2021, terdapat 75.956 Rumah Tangga yang masih membuang tinja secara langsung ke berbagai obyek geografis lingkungan alam, seperti kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun/dan lainnya.

### 3) Jalan Dalam Kondisi Mantap

Gambaran umum penyediaan infrastruktur Kalimantan Timur belum sepenuhnya tercapai secara maksimal. Prasarana jaringan jalan provinsi sepanjang 895,09 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2022 mencapai 693,86 km atau 77,52 persen. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 284,86 km, kondisi sedang 409,00 km,

kondisi rusak ringan 104,81 km, dan kondisi rusak berat 96,42 km. Sedangkan jaringan jalan nasional sepanjang 1.710,96 Km dengan kondisi mantap sampai tahun 2021 mencapai 1.409,94 km atau 82,40 persen. Berdasarkan kondisi permukaan jalan yaitu kondisi baik mencapai 305,83 Km, kondisi sedang 1.104,11 Km, kondisi rusak ringan 223,89 Km, dan kondisi rusak berat 77,12 Km.

Tabel II.53  
Panjang Jalan Menurut Status dan Jenis Permukaan (km)  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No	Status	Panjang (Km)	Aspal	Kerikil	Tanah	Lainnya
1	Nasional	1.710,96	1.428,99	16,25	0	265,72
2	Provinsi	895,09	465,29	127,59	27,17	275,04

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023

Data jalan kewenangan provinsi pada Tahun 2022 menunjukkan cukup besarnya rasio jalan yang dalam kondisi rusak sedang dan berat. Kondisi ini membutuhkan perhatian untuk pemeliharaan, sehingga dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas dan keamanan bagi pengguna jalan.

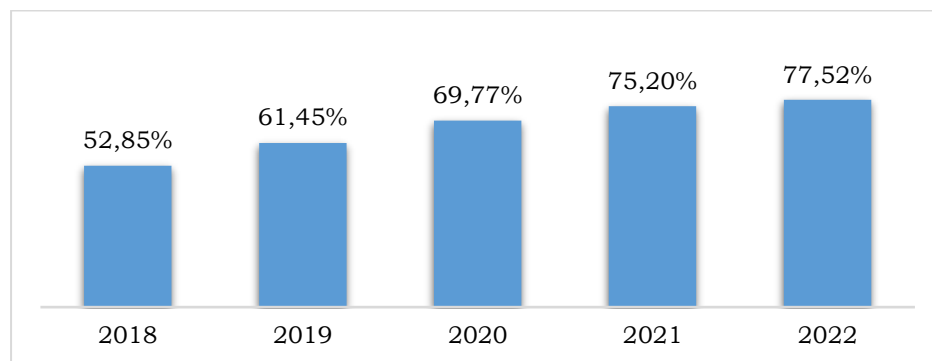
Tabel II.54  
Rasio Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No	Status	Baik	Sedang	Rusak Sedang	Rusak Berat
1	Nasional	305,83	1.104,11	223,89	77,12
2	Provinsi	284,86	409,00	104,81	96,42
3	Kabupaten/Kota	6.859,70	2.265,13	2.035,89	2.355,49
TOTAL		7.450,39	3.778,24	2.364,59	2.529,03

Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023

Capaian panjang jalan provinsi dalam kondisi mantap meningkat setiap tahunnya dari tahun 2019 yang hanya mencapai 473,05 km, meningkat 220,81 km sehingga pada tahun 2022 telah mencapai 693,86 km. faktor pendorong yang membuat capaian jalan mantap bertambah setiap tahunnya adalah pemeliharaan jalan provinsi oleh UPTD Pemeliharaan Dinas PUPR PERA untuk menjaga kemantapan jalan dan alokasi pendanaan untuk rekonstruksi jalan yang bertambah setiap tahunnya untuk menambah proporsi jalan mantap yang ada di Provinsi Kaltim. Lokus penanganan jalan untuk meningkatkan persentase jalan mantap adalah ruas-ruas jalan provinsi yang mendukung sektor perekonomian seperti ruas jalan Tanjung Redeb-Talisayan yang

mendukung Pariwisata dan ruas jalan Patung Lembuswana – Sebulu yang mendukung Pertanian.



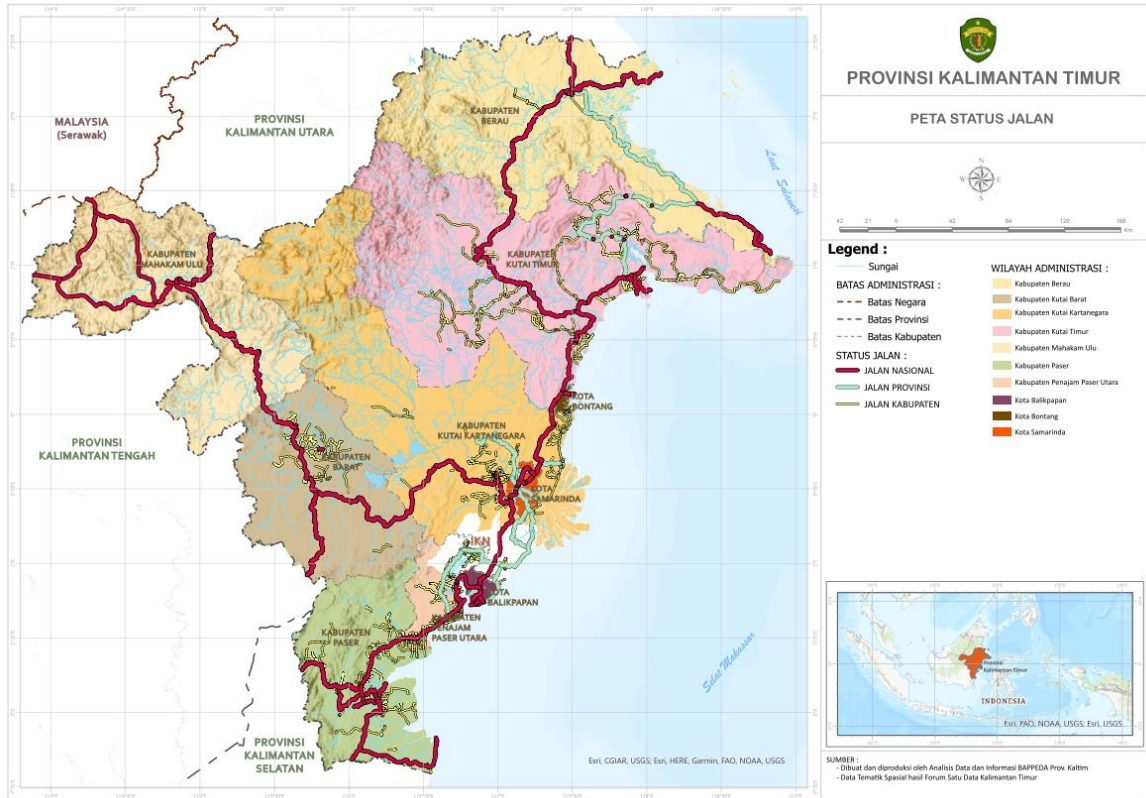
Gambar II.53

Persentase Kemantapan Jalan Tahun 2019-2022

(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2022)

Pembangunan infrastruktur dihadapkan pada salah satu permasalahan yaitu rasio panjang jalan terhadap luas wilayah mencapai 149,19 km/1.000 km<sup>2</sup> (terdapat jalan sepanjang 149,19 km di dalam wilayah seluas 1000 km<sup>2</sup>) masih di bawah rasio nasional, yaitu 265,47 km/1.000 km<sup>2</sup>. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- 1) Penyebaran penduduk yang tidak merata masih dalam satuan kecil dan terpencil serta kondisi topografi yang berbukit dan bergunung;
- 2) Permasalahan penyediaan lahan pembangunan yang belum sesuai dengan kebutuhan;
- 3) Keterbatasan alokasi pendanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan menyebabkan belum terpenuhinya target jalan mantap, baik nasional maupun provinsi, dan belum tuntasnya pembangunan jalan lintas Kalimantan;
- 4) Pembangunan jalan di perbatasan terkendala fungsi pemanfaatan ruang dan status kawasan lindung;
- 5) Dukungan pendanaan melalui swasta belum optimal;
- 6) Pengendalian batas maksimal muatan barang yang sesuai kelas jalan belum optimal; dan
- 7) Pembangunan jalan belum sesuai dengan spesifikasi teknis sebagai jalan arteri dan kolektor



Gambar II.54  
Peta Jalan Menurut Status Provinsi Kalimantan Timur  
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

#### 4) Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air memiliki 5 dimensi kebijakan dan strategi, yakni konservasi, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peran serta masyarakat, dan sistem informasi sumber daya air. Dimensi pendayagunaan air dan pengendalian daya rusak air masih perlu mendapatkan perhatian. Pada dimensi pendayagunaan air aspek yang perlu mendapatkan perhatian serius penyediaan kapasitas air baku.

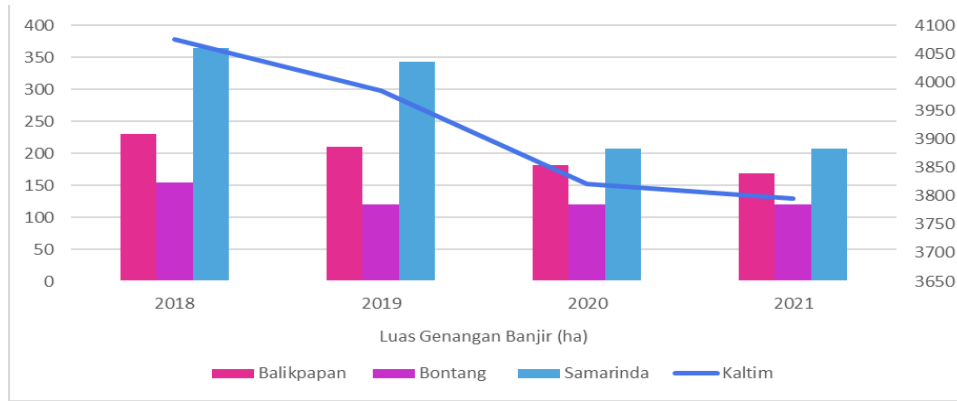
Kondisi eksisting penyediaan kapasitas air baku saat ini adalah sebesar 7.922 liter/detik. Hal ini masih jauh dari kebutuhan air baku yang diharapkan, kondisi ini terjadi dikarenakan kegiatan pembangunan Bendungan Marangkayu dan Sukarahmat yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air baku di Kota Bontang terkendala dalam pelaksanaannya yaitu pembebasan lahan, tumpang tindih dengan HGU, dan lokasi bendungan yang berada di kawasan lindung.

Pemenuhan kebutuhan air baku masih perlu untuk ditetapkan menjadi prioritas daerah, utamanya pada Kota Balikpapan dan Kota Bontang yang masih sangat bergantung pada penggunaan air tanah. Pemenuhan air baku dengan mengandalkan air permukaan sangat diperlukan untuk jangka

panjang, sementara untuk pemenuhan air baku untuk jangka pendek masih tetap mengandalkan penggunaan air tanah dengan pembangunan sumur dalam. Penambahan kapasitas air baku juga dianggap sangat penting, terutama dengan ditunjuknya Provinsi Kalimantan Timur menjadi lokasi Ibu Kota Negara (IKN). Dengan penetapan IKN di Kalimantan Timur maka diperkirakan akan terjadi peningkatan kebutuhan air baku sebagai konsekuensi dari pertambahan penduduk dan tumbuhnya kegiatan ekonomi baru dalam mendukung IKN.

Pada dimensi pengendalian daya rusak air, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah pengurangan luas genangan banjir dan penanganan pantai kritis. Permasalahan banjir di Kalimantan Timur terjadi secara simultan, baik karena faktor alam maupun manusia. Faktor alam terutama disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, kondisi topografi, pasang surut dan kondisi geografis DAS yang luas. Sedangkan faktor manusia disebabkan oleh daerah tangkapan air (DTA) yang berubah fungsi, pembukaan lahan dan penebangan hutan di daerah hulu sungai serta sistem drainase yang tidak tertata dan berfungsi dengan baik. Hampir semua kota di Kalimantan Timur mengalami permasalahan banjir.

Penanganan banjir diprioritaskan pada wilayah perkotaan, yakni Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang. 3 Kota tersebut ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kalimantan Timur yang merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Kalimantan Timur. Luas genangan banjir Kota Balikpapan, Samarinda dan Bontang dalam 4 tahun terakhir mengalami penurunan, hal tersebut dapat dilihat pada Gambar II.46, capaian kinerja pengurangan luas genangan banjir selalu melampaui target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Namun demikian kendala yang dihadapi dalam menyediakan infrastruktur pengendali banjir disebabkan oleh tidak tercapainya kesepakatan pembebasan lahan untuk pengelolaan dan pengembangan sistem pengendali luapan air sungai, adanya utilitas terbangun (jalur pipa PDAM, Listrik, Telekomunikasi dan kabel optik), lokasi penanganan banjir yang merupakan daerah padat penduduk, serta faktor cuaca yang tidak menentu. Selain permasalahan tersebut, banyaknya sedimentasi dan penyempitan sungai juga menjadi penyebab infrastruktur pengendali banjir belum optimal.



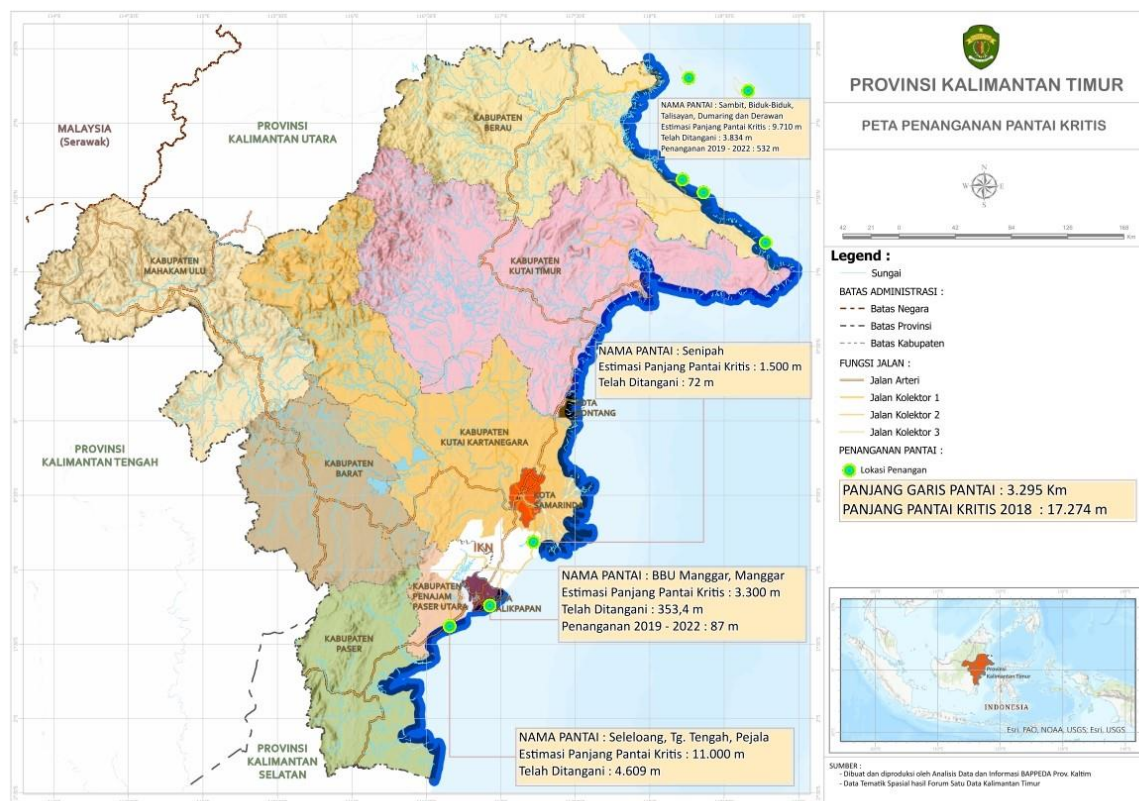
Gambar II.55  
Luas Genangan Banjir 3 Kota Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2018-2021 (Ha)  
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2022)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menurunkan luas genangan banjir seluas 279 Ha dalam kurun waktu 4 tahun. Meskipun capaian ini sudah melebihi target yang ditetapkan, namun penanganan banjir masih perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat pada awal periode RPJMD (Tahun 2018) Provinsi Kalimantan Timur, luas genangan banjir masih 4.075 Ha yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur.

Kalimantan Timur mempunyai garis pantai sepanjang 3.925 Km yang terbentang dari Kabupaten Berau di bagian Utara dan Kabupaten Paser di wilayah Selatan. Dengan garis pantai yang sangat panjang maka potensi terjadinya pengikisan akibat gelombang dan arus laut yang bersifat destruktif atau merusak menjadi cukup tinggi. Sementara pembangunan infrastruktur pengaman pantai masih rendah capaiannya, tidak berbanding lurus dengan panjang pantai kritis yang ada. Berdasarkan data perhitungan tahun 2019 terdapat 13.600 meter pantai kritis yang berada di dalam WS. Kewenangan Provinsi (Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau), sementara itu pembangunan infrastruktur pengaman pantai sampai dengan tahun 2022, baru mencapai 455 meter. Sehingga kedepannya penanganan pantai kritis harus dilanjutkan setiap tahunnya, agar dapat meminimalisir daya rusak air terhadap pantai. Namun penanganan ke depan perlu juga dipikirkan penanganan alternatif selain pembangunan fisik seperti konservasi/vegetasi.

Berdasarkan hasil laporan capaian terhadap Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abasi, erosi, dan akresi yang

terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Provinsi tahun 2021 sebesar 35,29% dan tahun 2022 sebesar 46,47%.



Gambar II.56  
Penanganan Pantai Kritis  
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2022)

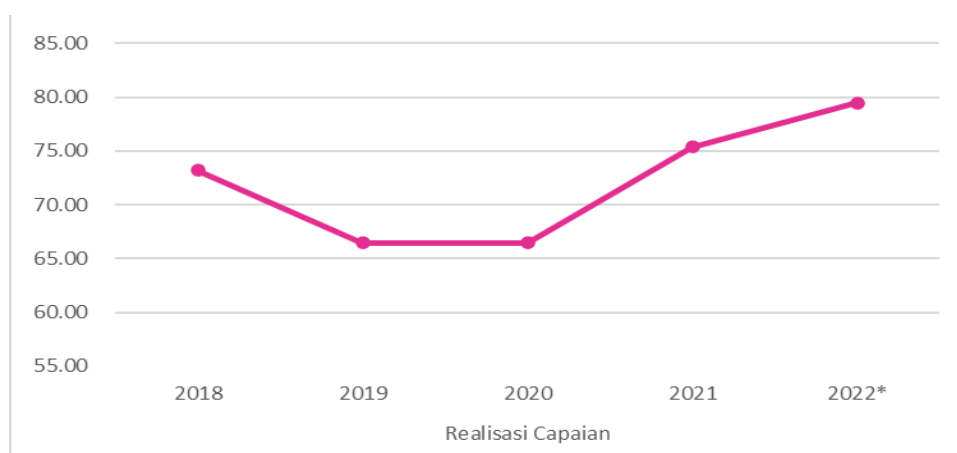
Pengelolaan pantai dan penanganan pantai kritis menjadi elemen yang sangat penting dalam pengelolaan daerah pesisir yang pada gilirannya diharapkan dapat mendukung kemandirian dan pertumbuhan perekonomian berbasis non migas. Pantai merupakan potensi pariwisata yang menjadi salah satu andalan Provinsi Kalimantan Timur, hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Kabupaten Berau menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), khususnya Pulau Derawan yang mengedepankan pembangunan di sektor pariwisata. Penanganan pantai juga dilaksanakan dalam rangka mendukung masyarakat pesisir dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, yang mayoritas bergantung pada pemanfaatan hasil laut.

### 5) Penataan Ruang

Dalam perwujudan penyelenggaraan penataan ruang, skoring penyelenggaraan penataan ruang menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan kinerja penataan ruang. Realisasi capaian kinerja skoring

penyelenggaraan penataan ruang pada tahun 2019 sebesar 66.46% dan capaian yang sama pada tahun 2020.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, maka Kawasan Strategis Provinsi tidak lagi ditetapkan dengan Perda RRTR melainkan menjadi bagian dari substansi Perda RTRW itu sendiri, sehingga hal ini mempengaruhi indikator pada aspek pelaksanaan penataan ruang. Sehingga, pada tahun 2021 dan 2022, terdapat peningkatan skoring menjadi 75,38 persen dan 78,57 persen dikarenakan progres revisi RTRWP telah berjalan sesuai dengan target.



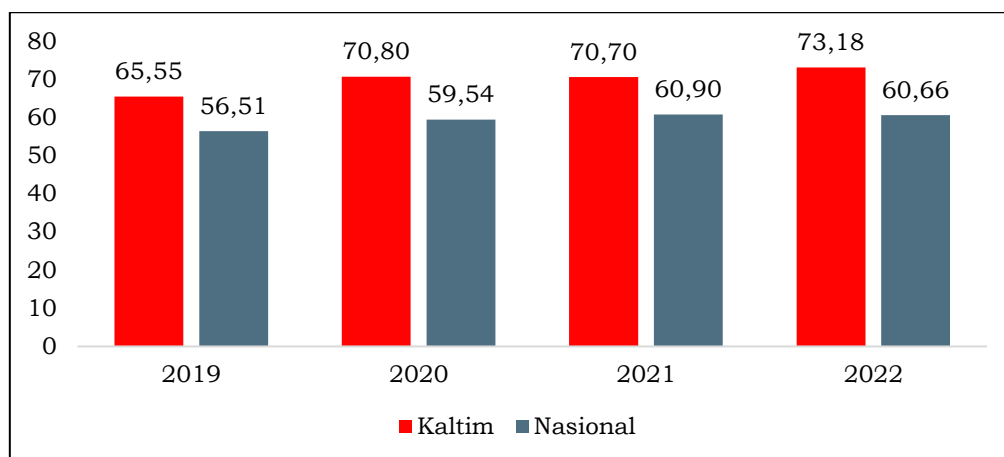
Gambar II.57  
Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang  
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023)

Pada tahun 2023 ditargetkan pencapaian Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang mencapai 83,10% dimana diperlukan peningkatan sebesar 4,53%. Adapun target ini didasarkan kepada peningkatan kinerja dari masing-masing aspek yaitu Aspek Pembinaan Penataan Ruang (38,30), Aspek Pengaturan Penataan Ruang (23,50) dan Aspek Pelaksanaan Penataan Ruang (23,10). Selain itu diharapkan pada awal tahun 2023, Revisi RTRWP sudah dapat ditetapkan menjadi Perda sehingga Kabupaten/Kota yang saat ini sedang melakukan peninjauan kembali dan proses revisi perda dapat mengacu perda RTRWP.

#### D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

##### 1) Rumah Tidak Layak Huni

Perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia yang dijamin konstitusi. Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan. Data SUSENAS KOR tahun 2022 (Maret) menunjukkan bahwa Rumah Tangga di Kalimantan Timur yang telah menempati rumah layak huni mencapai 73,18%. Kondisi ini naik sekitar 2,84% dari tahun sebelumnya (Gambar II. 53). Meskipun demikian, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar karena masih terdapat 345.031 Rumah Tangga (26,82%) yang belum bertempat tinggal di rumah yang layak huni.

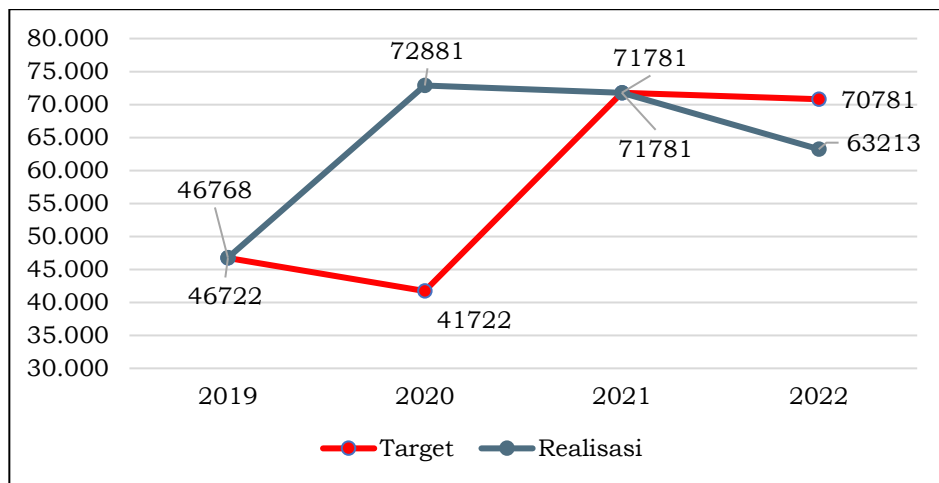


Gambar II.58

Jumlah dan Persentase Rumah Tangga yang menempati Rumah Layak Huni di Kaltim Tahun 2019 – 2022

(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023)

Pengurangan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan salah satu kegiatan prioritas pembangunan jangka menengah tahun 2019 – 2023. Dalam rentang waktu tersebut, pengurangan ditargetkan mencapai 25.000-unit melalui berbagai skema pendanaan, antara lain program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dana APBN, APBD Provinsi Kaltim, serta APBD kabupaten/kota. Berdasarkan hasil inventarisasi tahun 2022, terdapat setidaknya 63.213 RTLH di Kaltim yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota. Dari sisi pelaksanaan, penanganan melalui Dana APBD dilakukan dengan berpedoman pada kriteria penentuan kelayakan hunian bangunan. Kegiatan yang dilakukan adalah melalui perbaikan atap, lantai, serta dinding pada bangunan-bangunan yang telah terdata dan terverifikasi.



Gambar II.59

Target dan Realisasi Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni  
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023)

Gambar II.50 menunjukkan jumlah rumah layak huni tahun 2019 hingga 2022, yakni target dan capaian. Kinerja dikalkulasi melalui pengurangan RTLH setiap tahun, sehingga semakin kecil nilai RTLH maka kinerja dikatakan semakin baik. Kenampakan visual grafik memiliki sedikit anomali. Hal ini juga menunjukkan salah satu kendala atau kesulitan dalam perhitungan capaian kinerja penanganan RTLH, yakni inkonsistensi data *baseline* yang menyebabkan perubahan basis perhitungan. Kelemahan pada kondisi data *baseline* ini akan menjadi perhatian dalam proses perencanaan program penanganan RTLH tahun-tahun berikutnya.

## 2) Kawasan Kumuh

Kalimantan Timur memiliki 1,881.67 Ha area yang dikategorikan sebagai kawasan kumuh. Undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman mendefinisikan permukiman kumuh sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Secara lebih detail, Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2018 menjabarkan aspek yang menjadi penentu dalam penetapan kawasan kumuh, yakni meliputi tujuh aspek dan 16 variabel. Dari tujuh aspek yang ditetapkan, pengaruh kekumuhan di Kalimantan Timur utamanya disebabkan oleh aspek kondisi proteksi kebakaran, kondisi pengelolaan persampahan, aspek pengelolaan air limbah, aspek drainase lingkungan, serta kondisi jalan lingkungan.

Tabel II.55  
Target dan Realisasi Luas Kawasan Kumuh Tahun 2018-2022

Uraian	Luas kawasan kumuh (Ha)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Target	673.42	620.06	1.287,82	1.237,82	1.187,82
Realisasi		645.47	1.287,82	1,190.14	1.185,14

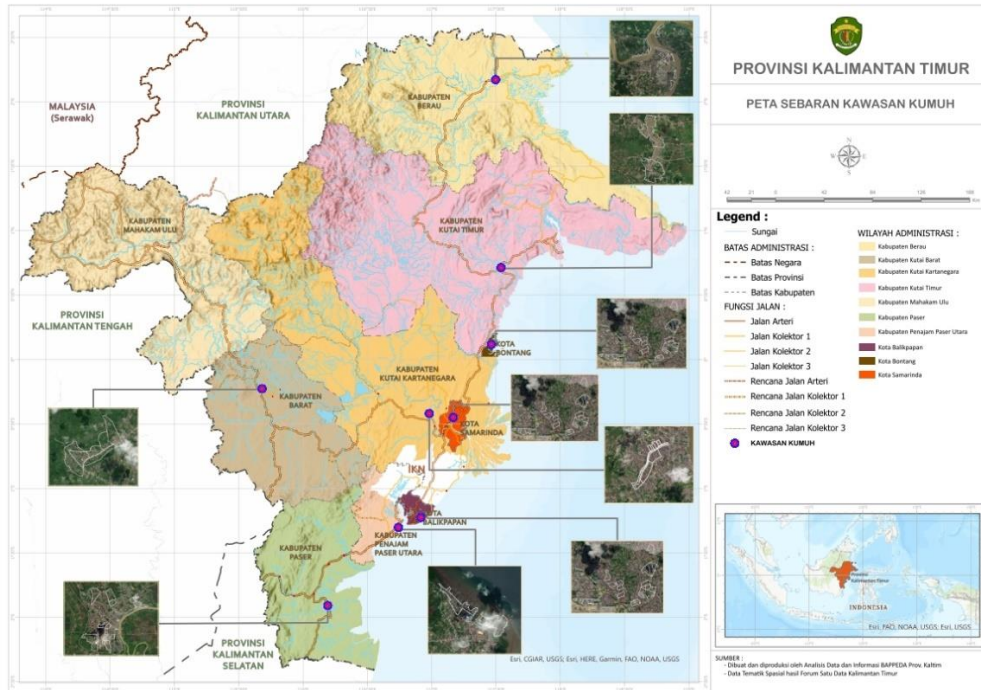
(Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2023)

Lokasi kawasan kumuh ditetapkan oleh bupati/wali kota. Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penanganan oleh tiga level pemerintahan dilakukan berdasarkan rentang luasan. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk penanganan areal kumuh dengan luasan 10-15 Ha, pemerintah pusat untuk luasan di atas 15 Hektar, sementara pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk menangani areal di bawah 10 Ha. Hingga tahun 2022, luas kawasan kumuh tersisa 1.185,14 Ha (Tabel II. 59). Capaian penurunan tersebut merupakan hasil kolaborasi penanganan antara berbagai sumber pendanaan.

Tabel II.56  
Luas Kawasan Kumuh Menurut Kewenangan

No.	Kab/Kota	Luas (Ha)			SK Bupati/Walikota
		Pusat	Provinsi	Kab/Kota	
1	Paser	180,74	35,06	8,72	No. 653/KEP-116/2021
2	KUBAR	969,43	37,5	38,69	No. 592/K.425/2021
3	KUKAR	122,99	37,51	7,61	No. 454/SK-BUP/HK/2019
4	KUTIM	783,73	0	0	No. 050/KK.268/2016
5	Berau	0	25,79	2,47	No. 30 Tahun 2020
6	PPU	49,07	0	0	No. 593.33/270/2017
7	MAHULU	37,15	0	2,45	No. 050.136.146/K.63/2020
8	Balikpapan	137,51	10,39	5,4	No. 188.45-326/2020
9	Samarinda	21,43	24,25	24,83	No. 663/404/HK-KS/XI/2020
10	Bontang	32,8	33,35	7,41	No. 188.45/509/DPKP2/2020
Kaltim		2.334,85	203,85	97,58	

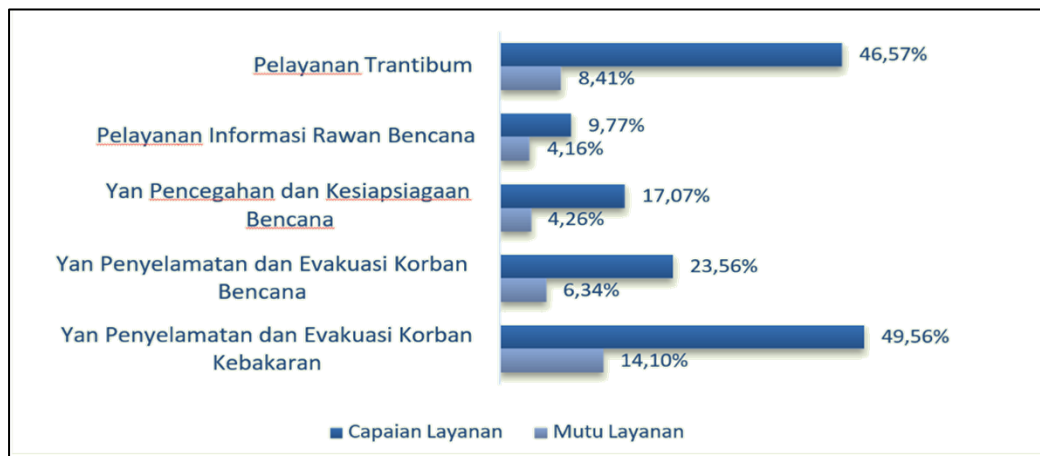
Sumber: Dinas PUPRPERA Provinsi KALTIM, 2022



Gambar II.60  
Peta Sebaran Kawasan Kumuh  
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

E. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan pelaporan Standar Pelayanan Minimal ada Sekretariat Bersama SPM Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada triwulan III (tiga) tahun 2022, bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat 46,57% pada pelayanan dasar trantibum dengan kualitas pelayanan 8,41%. Hal ini disebabkan belum dialokasikan anggaran terkait pencapaian Standar Pelayanan Minimal terkhusus bidang urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, serta belum terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Linmas Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar II.61  
Capaian SPM Trantibum Tahun 2022  
(Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangda Kemendagri)

Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang relatif aman dari konflik sosial. Walau demikian Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan). Secara umum kondisi ketertiban dan ketenteraman sampai dengan tahun 2020 relatif kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat maupun kegiatan investasi. Berbagai tindakan kejahatan kriminalitas, unjuk rasa dan mogok kerja yang merugikan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dapat ditanggulangi dengan sigap baik aparat pemerintah dan aparat keamanan. Situasi tersebut juga didorong oleh pembinaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungannya.

Upaya penurunan peristiwa kejahatan dan pelanggaran ini memang terus diupayakan. Berdasarkan data yang ada, penurunan angka kejahatan dan pelanggaran saat ini masih belum optimal. Pada tahun 2017, persentase penurunan angka kejahatan dan pelanggaran sebesar 31 persen. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 11 persen, hingga pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 16 persen dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 14 persen.

Tabel II.57  
Angka Pelanggaran K3 dan Perlindungan Masyarakat  
Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021

Elemen Data	Tahun				Satuan	Ket.
	2018	2019	2020	2021		
Jumlah Aparat Satpol PP dan Linmas	23.026	23.028	23.811	23.812	Orang	Jumlah Aparat Satpol PP dan Satlinmas
Jumlah Aparat Satpol PP	493	441	1.224	1.225	Orang	Jumlah PNS dan Non PNS
a. Provinsi	143	145	172	173	Orang	Jumlah PNS dan Non PNS
b. Kab/Kota	1.502	1.502	1.052	1.052	Orang	Jumlah PNS dan Non PNS
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	22.587	22.587	22.587	22.587	Orang	Linmas Cadangan umum
a. Provinsi	30	30	30	30	Orang	Jumlah Non PNS
b. Kab/Kota	22.557	22.557	22.557	22.557	Orang	Jumlah Linmas
Jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 dalam 24 jam	2.793	2.793	2.793	2.793	Kali	24 Jam (1 Tahun)
Jumlah Pos Siskamling	1.927	1.927	1.927	12.293	Unit	Pos Jaga
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa	2	2	2	0,49		
Jumlah Pelanggaran K3	138	138	138	5.157	Kasus	
Jumlah penyelesaian Pelanggaran K3	365	365	365	4.508	Kasus	

Elemen Data	Tahun					Ket.
	2018	2019	2020	2021	Satuan	
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	264	264	264	41	%	
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja	4	4	3	0,01		

Masih belum optimalnya penurunan angka kriminalitas disebabkan karena pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat juga kurang. Berdasarkan indikator persentase poskamling aktif, pada tahun 2016, jumlahnya hanya sebesar 2.242. Angka ini mengalami penurunan menjadi 1927 pada tahun 2020. Dalam pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum sebagai upaya penurunan angka kriminalitas untuk jumlah Patroli Petugas Satpol PP Pemantauan dan Penyelesaian Pelanggaran K3 mengalami peningkatan yang sebelumnya pada tahun 2016 sebanyak 63 kali, tahun 2017 sebanyak 211 kali, tahun 2018, 2019 dan 2020 sebanyak 2.793 kali.

Saat ini total jumlah petugas linmas adalah 30 orang. Idealnya setiap pos kamling dijaga minimal 2 orang dengan asumsi penjagaannya selama 24 jam bukan hanya pada malam hari saja. Hal ini sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020, karena keterbatasan tersebut, satlinmas diorientasikan untuk membantu pelaksanaan pengawasan Pilkada. Kurangnya jumlah petugas linmas ini karena aturan terdahulu belum memberikan insentif kepada petugas linmas yang berasal dari anggaran dinas. Mengikuti aturan terbaru dari Permendagri, program satlinmas ini nantinya berhak mendapatkan biaya operasional dari pemerintah. Diharapkan dengan adanya pemberian insentif tersebut dapat meningkatkan motivasi kerja bagi para petugas linmas.

Angka kriminalitas khususnya jumlah tindak pidana di Kalimantan Timur dalam dua tahun terakhir cenderung menurun. Ini terlihat dari jumlah tindak pidana yang tercatat pada Polda Kaltim, yang pada tahun 2018 terdapat 6.715 tindak pidana, yang turun menjadi 5.253 tindak pidana pada 2019, dan turun kembali pada 2020 menjadi 4.368 tindak pidana.

Persentase penyelesaian kasus terhadap peristiwa kejahatan dan pelanggaran yang dilaporkan mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 persentase kasus yang dapat diselesaikan sebesar 85,00 persen, yang berarti mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 87,00 persen.

Tabel II.58  
Angka Kriminalitas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021

Tahun	Dilaporkan	Tertunggak	Diselesaikan	% Tindak Kejahatan Diselesaikan	Angka Kriminalitas Per 10.000 Penduduk
2017	11.705	1.591	8.622	73,66	33,39
2018	6.715	1.228	5.487	81,71	18,90
2019	5.253	670	4.583	87,25	14,47
2020	4.368	506	1.696	87,00	6,01
2021	4.184	506	1.696	85,00	6,01

Sumber: POLDA KALTIM, 2022

Demonstrasi menunjukkan kebebasan aspirasi masyarakat dalam berpendapat jika dilakukan dengan damai dan tujuan yang jelas. Namun jika demonstrasi dilakukan dengan diiringi kekerasan maka sudah menyalahi konsep dasar sebuah demokrasi. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir yakni Tahun 2018 s/d Tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan yang mengindikasikan tingginya animo masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pendapatnya. Pada tahun 2022, jumlah demonstrasi secara keseluruhan berjumlah 115 dimana 20,00% (23 demonstrasi) terkait Ekonomi; 10,43% (12 demonstrasi) terkait Politik; 13,04% (15 demonstrasi) terkait Sosial; 46,09% (53 demonstrasi) terkait Hukum; 0,87% (1 demonstrasi) terkait Agama; 9,57% (11 demonstrasi) terkait Kamtibmas.

Tabel II.59  
Jumlah Demonstrasi Menurut Jenisnya  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

Jenis Demo	Tahun					Jumlah
	2018	2019	2020	2021	2022	
Ekonomi	9	9	1	8	23	65
Politik	2	0	6	5	12	36
Sosial	22	15	14	15	15	119
Budaya	4	0	0	0	0	5
Pendidikan	0	0	0	0	0	2
Hukum	33	18	32	34	53	202
Agama	6	0	1	1	1	13
Hankam	0	0	0	0	0	1
Tapal Batas	0	0	0	0	0	0
Sengketa Lahan	0	8	14	2	0	24
Kamtibmas	0	4	2	2	11	19
Lingkungan	0	0	0	3	0	3
Jumlah	76	54	70	70	115	489

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi KALTIM, 2023

F. Sosial

Perkembangan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 4 tahun terakhir fluktuatif dengan jumlah tertinggi pada tahun 2020. Kondisi ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang berdampak pada aktivitas kehidupan sosial masyarakat. Hal ini tergambarkan pada peningkatan jumlah PMKS yang harus menerima bantuan dengan puncak jumlah tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 108.434 orang.

Tabel II.60  
Jumlah PMKS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021

Jumlah PMKS	Satuan	2018	2019	2020	2021
Jumlah PMKS	Orang	243.459	251.234	251.234	247.465
PMKS yang ditangani	Jenis	26	26	26	26
Persentase Penanganan PMKS	%	1	1	1	1
PMKS yang Seharusnya Menerima Bantuan	Orang	78.387	78.387	81.247	108.434
PMKS yang diberikan Bantuan	Orang	1.200	1.052	1.134	2.708
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	1,53	1,34	1,40	2,50
Persentase Keluarga Miskin dan PMKS lainnya yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif	%	0,1	1,34	1,4	1,4
Jumlah Keluarga Miskin dan PMKS	KK	n/a	46.510	46.510	23.355
Jumlah Keluarga yang memiliki Usaha Ekonomi Produktif	KK	n/a	100	100	24

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2022

Penanganan dan pemberdayaan PPKA dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial perlu dilaksanakan secara simultan melalui Sistem Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*curative*), pemulihan (*rehabilitative*) dan pengembangan (*promotive*) seperti meningkatkan jumlah Keluarga miskin dan PPKS yang memiliki usaha ekonomi produktif dengan melibatkan multi program dan lintas sektor.

Berdasarkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kalimantan Timur terdapat kenaikan dari tahun 2018 sebanyak 243.459 orang menjadi 247.465 orang pada tahun 2021, atau bertambah sebanyak 4.006 orang. Jumlah PMKS yang terbesar pada kabupaten/kota

berada pada Kabupaten Kutai Barat dan Kota Samarinda yaitu sebesar 87.726 dan 34.899. Berdasarkan inventarisasi permasalahan penanganan PMKS hal utama yang perlu dilakukan selain peningkatan kemandirian ekonomi rumah tangga adalah belum tersedianya panti rehabilitasi untuk penyandang disabilitas yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Tabel II.61  
 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/ Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)  
 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks)	Balikpapan		KUKAR		Samarinda		PPU		KUBAR		Paser	
		Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
1	Anak Balita Terlantar	94	-	68	-	1.841	-	59	-	102	-	82	-
2	Anak Terlantar	327	-	743	-	1.542	-	274	-	326	-	1.625	-
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	71	-	79	-	66	-	48	-	26	-	21	-
4	Anak Jalanan	124	-	81	-	206	-	-	-	-	-	39	-
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	76	-	63	-	435	-	31	-	14	-	164	-
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	187	-	24	-	97	-	170	-	59	-	93	-
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	161	-	921	-	816	-	23	-	-	-	43	-
8	Lanjut Usia Terlantar	29	-	668	-	1.162	-	-	-	422	-	-	-
9	Penyandang Disabilitas	314	-	2.349	-	1.626	-	1.097	-	449	-	530	-
10	Tuna Susila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gelandangan	11	-	4	-	51	-	-	-	26	-	10	-
12	Pengemis	9	-	8	-	55	-	-	-	-	-	-	-
13	Pemulung	21	-	5	-	64	-	-	-	-	-	7	-
14	Kelompok Minoritas	65	-	-	-	38	-	93	-	-	-	17	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat (BWBLP)	143	-	134	-	439	-	110	-	240	-	298	-
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	1.091	-	180	-	1.990	-	19	-	43	-	7	-
17	Korban Penyalahgunaan Napza	303	-	75	-	508	-	4	-	6	-	3	-
18	Korban <i>Trafficking</i>	2	-	3	-	8	-	6	-	-	-	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	56	-	-	-	73	-	-	-	-	-	51	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	399	-	-	-	59	-	-	-	48	-	34	-
21	Korban Bencana Alam	2.807	591	169	43	5.950	1.267	981	214	47.301	9.748	1.211	287
22	Korban Bencana Sosial	948	171	2.477	412	3.288	612	781	192	25.304	5.941	1.011	214

No	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks)	Balikpapan		KUKAR		Samarinda		PPU		KUBAR		Paser	
		Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	56	-	-	-	-	-	27	-	29	-	48	-
24	Fakir Miskin	14.704	3.114	20.114	3.193	14.248	3.101	12.047	3.012	12.678	2.870	13.647	3.291
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-	-	34	-	337	-	-	-	581	-	11	-
26	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-	-	-	-	-	-	72	27	1.697	378
<b>JUMLAH</b>		<b>21.998</b>	<b>3.876</b>	<b>28.199</b>	<b>3.648</b>	<b>34.899</b>	<b>4.980</b>	<b>15.770</b>	<b>3.418</b>	<b>87.726</b>	<b>18.586</b>	<b>20.648</b>	<b>4.170</b>

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2022

Tabel II.56 Lanjutan

NO	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	BERAU		KUTIM		BONTANG		MAHULU	
		Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK
1	Anak Balita Terlantar	77	-	128	-	78	-	-	-
2	Anak Terlantar	502	-	213	-	437	-	-	-
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	172	-	442	-	43	-	18	-
4	Anak Jalanan	16	-	-	-	51	-	-	-
5	Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)	35	-	872	-	43	-	-	-
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	139	-	187	-	56	-	-	-
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	147	-	587	-	-	-	-	-
8	Lanjut Usia Terlantar	-	-	198	-	337	-	-	-
9	Penyandang Disabilitas	276	-	612	-	795	-	310	-
10	Tuna Susila	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gelandangan	75	-	19	-	17	-	-	-
12	Pengemis	-	-	-	-	4	-	-	-
13	Pemulung	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat (BWBLP)	44	-	-	-	-	-	-	-
16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	31	-	159	-	160	-	-	-
17	Korban Penyalahgunaan Napza	2	-	4	-	4	-	-	-
18	Korban <i>Trafficking</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	52	-	-	-	34	-	-	-
21	Korban Bencana Alam	-	-	712	154	869	196	-	-
22	Korban Bencana Sosial	422	106	392	98	377	95	-	-
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Fakir Miskin	9.307	2.107	12.001	3.001	4.587	1.047	1.067	264
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Komunitas Adat Terpencil	1.717	411	575	104	-	-	1.250	249
JUMLAH		13.014	2.624	17.101	3.357	7.892	1.338	2.645	513

Sumber: Dinas Sosial Provinsi KALTIM, 2021

G. Ketenagakerjaan

Bila dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, ternyata penduduk yang bekerja di Kalimantan Timur persentase terbesar adalah pendidikan SMA/SMK dan persentase terkecil adalah tamatan Diploma I/II/III.. Pada tahun 2022 persentase penduduk bekerja dengan pendidikan SD ke bawah tercatat 25,98 persen menurun dibanding tahun 2021 yang mencapai 28,57 persen. Sementara Persentase penduduk yang bekerja dengan latar belakang pendidikan lulus Diploma I/II/III sekitar 3,26 persen meningkat dibandingkan pada tahun 2021 yang mencapai 3,77 persen.

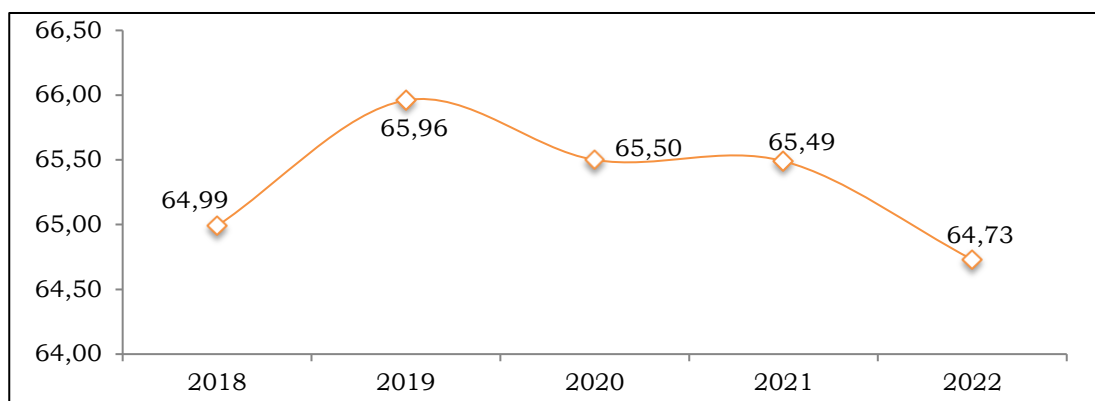
Tabel II.62  
Penduduk Usia 15 Tahun keatas yang Bekerja menurut  
Tingkat Pendidikan Tahun 2018-2022

No	Tingkat Pendidikan	2018	2019	2020	2021	2022
1	SD ke Bawah	477.106	482.844	493.889	491.456	453.853
		(29,43)	(28,51)	(29,18)	(28,57)	(25,98)
2	SMP	260.843	273.257	267.721	260.789	259.693
		(16,09)	(16,14)	(15,82)	(15,16)	(14,87)
3	SMA/SMK	609.994	659.047	643.105	666.878	760.250
		(37,63)	(38,92)	(37,99)	(38,76)	(43,52)
4	Diploma I/II/III	64.291	57.174	64.507	64.906	56.923
		(3,97)	(3,38)	(3,81)	(3,77)	(3,26)
5	Universitas/DIV	208.735	221.159	223.574	236.332	216.201
		(12,88)	(13,06)	(13,21)	(13,74)	(12,38)
Kalimantan Timur		1.620.969	1.693.481	1.692.796	1.720.361	1.746.920
		(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Perkembangan jumlah penduduk angkatan kerja yang bekerja selama tahun 2018-2022 selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 yang sempat turun dari 1.693.481 orang di tahun 2019 menjadi 1.692.796 orang di tahun 2020. Penurunan jumlah penduduk yang bekerja tersebut merupakan salah satu dampak pandemi COVID- 19 yang menyebabkan banyak penduduk kehilangan pekerjaannya atau usahanya, pengurangan jam kerja ataupun pemberhentian kerja. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu serta program pemulihan ekonomi pasca pandemi yang dilaksanakan pemerintah, jumlah penduduk yang bekerja telah kembali meningkat. Kondisi itu tercermin pada peningkatan jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 1.720.361 orang di tahun 2021 kemudian menjadi sebanyak 1.746.920 orang di tahun 2022.

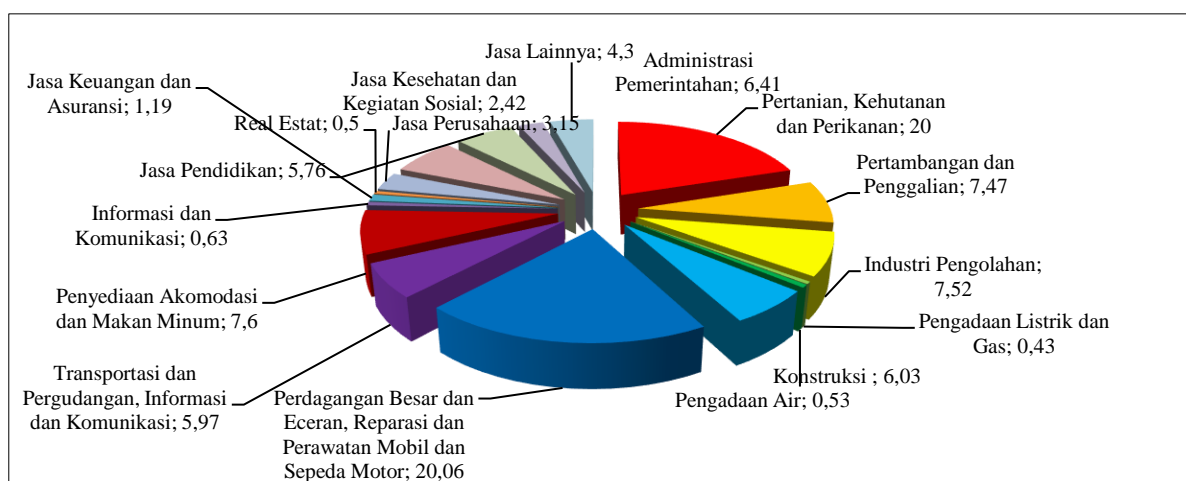
Pada tahun 2022 terjadi penurunan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan tingkat pendidikan tertinggi Diploma dan Sarjana ke atas. Sebaliknya, terjadi peningkatan pada penduduk bekerja yang memiliki pendidikan tertinggi SMA dan SMK. Kedua hal ini juga dapat mengindikasikan adanya kecenderungan penurunan lulusan SMA dan SMK yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih memilih untuk bekerja. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor ekonomi yang dominan menyerap tenaga kerja di Kalimantan Timur tidak memerlukan kompetensi/keahlian pada jenjang Diploma dan Universitas. Jika melihat fakta, penduduk paling banyak bekerja di wilayah perkotaan dengan lapangan usaha dominan di sektor perdagangan dan jasa (20,06%). Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa para pekerja sektor-sektor tersebut memiliki potensi untuk mendapatkan peluang kesejahteraan yang lebih baik apabila berpendidikan lebih tinggi yang didukung dengan kebutuhan perkembangan sektor ekonominya.



Gambar II.62  
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2018-2022

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja turun dari 65,49 persen menjadi 64,73 persen. Hal ini dimungkinkan karena terjadinya pergeseran penduduk angkatan kerja menjadi penduduk bukan angkatan kerja, baik yang sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan yang lainnya. Selain itu, penurunan ini juga bisa disebabkan oleh penimbangannya, yaitu jumlah penduduk yang tumbuh melebihi pertumbuhan angkatan kerja. Membaiknya kinerja ekonomi turut berdampak pada meningkatnya kesempatan kerja yang tersedia dan hal tersebut juga membantu menurunkan angka pengangguran.



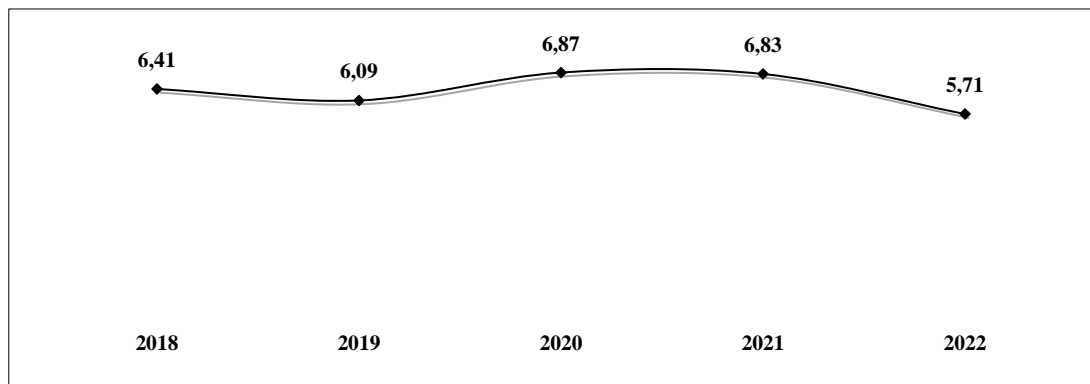
Gambar II.63

Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan Utama Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 (%)

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022)

Tahun 2022, penduduk bekerja di Kalimantan Timur memiliki pekerjaan yang terbagi dalam 17 (tujuh belas) kategori sektor lapangan usaha seperti yang terlihat pada gambar di atas. Sebagian besar penduduk Provinsi Kalimantan Timur bekerja pada sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor mencapai 20,06 persen diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai

20,00 persen, dan yang paling sedikit bekerja di sektor pengadaan listrik dan gas mencapai 0,43 persen.



Gambar II.64

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2018-2022 (persen)

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022)

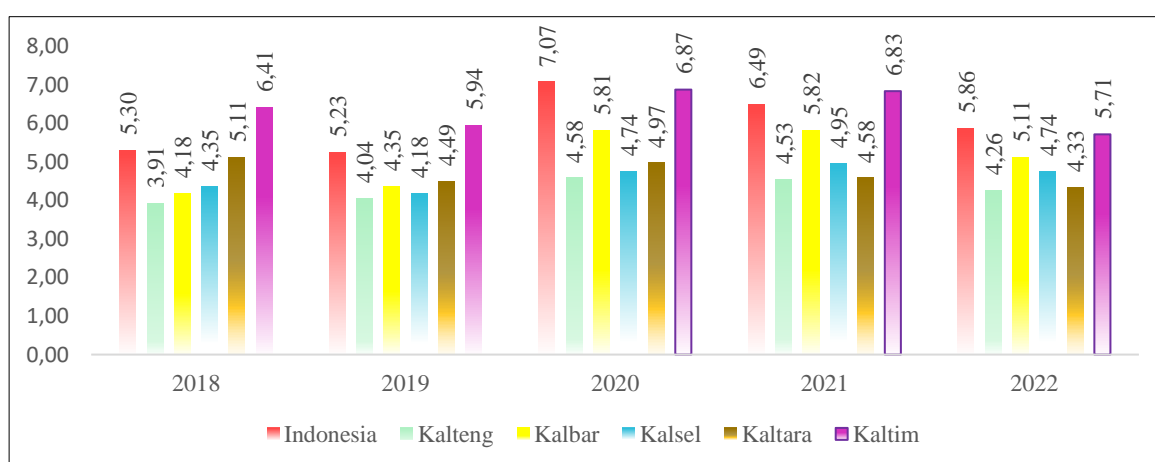
Penduduk yang tidak bekerja (pengangguran) di Provinsi Kalimantan Timur semakin menurun di setiap tahunnya. Akan tetapi pada tahun 2020, tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan yang mencapai 6,87 persen dimana angka ini meningkat jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 5,94 persen. Peningkatan ini diperkirakan akibat dampak dari Pandemi COVID-19 yang mulai mewabah di dunia pada akhir tahun 2019 dan mulai terasa dampaknya di Indonesia khususnya di Kalimantan Timur pada awal tahun 2020 terutama pada sektor transportasi dikarenakan beberapa negara memberlakukan pembatasan berskala besar bahkan ada yang memberlakukan karantina wilayah. Sehingga berdampak pada pengurangan tenaga kerja pada sektor Transportasi dan Pergudangan serta sektor informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, *real estate* dan jasa perusahaan. Namun di tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan mencapai 5,71 persen, penurunan terjadi dikarenakan di tahun 2022 pandemi COVID-19 sudah mulai berkurang dan banyaknya masyarakat yang telah di vaksin serta pemulihan ekonomi mulai membaik.

Tabel II.63  
Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (persen)

No	KAB/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Paser	5,00	4,55	4,52	5,70	4,88
2	KUBAR	4,86	5,08	4,97	5,14	4,62
3	KUKAR	5,96	5,98	5,70	5,66	4,14
4	KUTIM	5,93	5,53	5,45	5,35	6,48
5	Berau	5,62	5,08	5,08	5,82	5,02
6	PPU	4,76	6,26	6,22	2,95	2,12
7	MAHULU	4,17	3,69	3,49	3,14	2,44
8	Balikpapan	9,52	7,29	9,00	8,94	6,90
9	Samarinda	6,16	5,87	8,26	8,16	6,78
10	Bontang	9,61	9,19	9,46	9,92	7,81

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

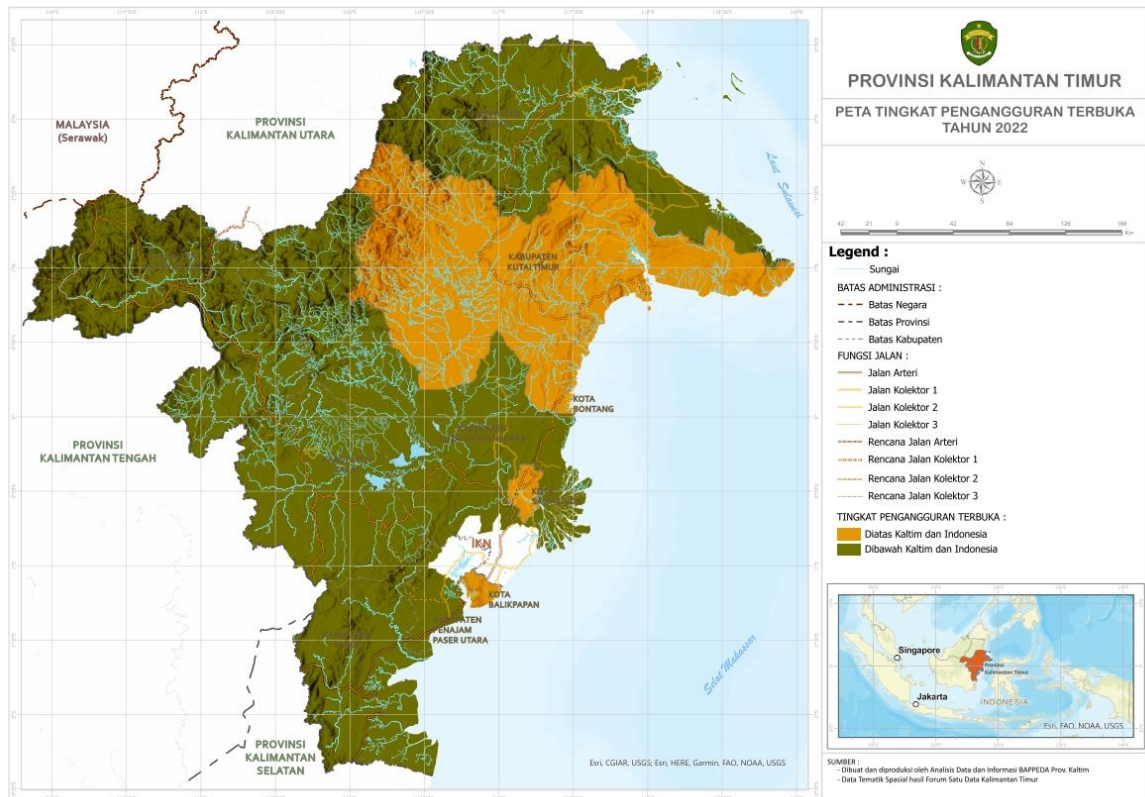
Pada tahun 2022 terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka pada kabupaten/kota di Kalimantan Timur paling tinggi terdapat di Kota Bontang sebesar 7,81 persen, Kota Balikpapan sebesar 6,90 persen, dan Kota Samarinda sebesar 6,78 persen. Sedangkan tingkat pengangguran terendah ditorehkan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 2,12 persen. Jika dilihat dari perbandingan regionalnya, maka Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Timur tahun 2022 masih menjadi yang tertinggi diantara provinsi lainnya di regional Kalimantan dan berada di atas tingkat pengangguran terbuka nasional sebesar 5,86 persen. Hal ini memerlukan perhatian lebih lanjut, jika mengingat Kalimantan Timur sebagai penghasil nilai tambah ekonomi terbesar di Regional Kalimantan.



Gambar II.65  
Tingkat Pengangguran Terbuka Regional Kalimantan dan Indonesia  
(Sumber: BPS RI, 2022)

Meskipun TPT Kaltim mengindikasikan penurunan, namun peringkat TPT Kaltim berada di atas TPT wilayah Kalimantan lainnya. Hal ini

mengindikasikan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kaltim relatif lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Kalimantan. TPT Kaltim pada Februari 2022 sebesar 6,77% atau berada di posisi paling tinggi dibandingkan dengan TPT provinsi lainnya di wilayah Kalimantan. Secara nasional, Kaltim menempati 10 besar provinsi yang memiliki TPT tertinggi dan berada di atas level TPT nasional sebesar 5,83%



Gambar II.66

### Peta Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Timur Tahun 2022

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, diolah BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Salah satu upaya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur untuk mengurangi jumlah pengangguran adalah dengan memberikan kemudahan akses informasi kepada pencari kerja terutama yang telah mendaftarkan ke dalam database pada Disnakertrans. Untuk kemudian akan disesuaikan dengan data yang bersumber dari perusahaan yang sedang membutuhkan pekerja.

Perkembangan persentase penempatan tenaga kerja cenderung fluktuatif dan terus mengalami penurunan semenjak tahun 2020 dan capaian terendah pada tahun 2021 yaitu mencapai 15,79 persen. Salah satu faktor penyebab masih rendahnya persentase penempatan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Timur adalah tingkat kompetensi pencari kerja yang tidak sesuai

dengan kebutuhan dunia usaha. Dalam hal ini masih diperlukan perhatian pemerintah untuk meningkatkan sertifikasi keahlian yang dibutuhkan oleh pasar kerja melalui balai-balai pelatihan kerja baik yang dibawah wewenang Disnakertrans maupun perangkat daerah lainnya.

Tabel II.64  
Persentase Penempatan Tenaga Kerja  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (persen)

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pencari Kerja yang Mendaftar (orang)	49.552	26.148	30.719	22.358	47.254
2	Pencari Kerja yang ditempatkan (orang)	11.266	7.690	5.538	3.531	12.334
4	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)	22,74	29,41	18,03	15,79	26,10

Sumber: Disnakertrans Provinsi KALTIM, 2023

Jika dilihat berdasarkan kabupaten/kota, maka terlihat capaian tertinggi persentase penempatan tenaga kerja pada tahun 2022 adalah Kabupaten Kutai Timur mencapai 65,14 persen. Capaian yang cukup tinggi kemudian diikuti oleh Kota Samarinda yang mencapai 44,07 persen dan Kota Balikpapan mencapai 39,98 persen.

Tabel II.65  
Persentase Penempatan Tenaga Kerja menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No	KAB/KOTA	Pencari Kerja Terdaftar (Orang)	Penempatan Pencari Kerja (Orang)	Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%)
1	Paser	2.592	657	25,35
2	KUBAR	3.116	388	12,45
3	KUKAR	13.622	335	2,46
4	KUTIM	3.815	2.485	65,14
5	Berau	6.215	2.282	36,72
6	PPU	1.149	447	38,90
7	MAHULU	-	-	-
8	Balikpapan	4.077	1.630	39,98
9	Samarinda	4.261	1.878	44,07
10	Bontang	8.407	2.232	26,55

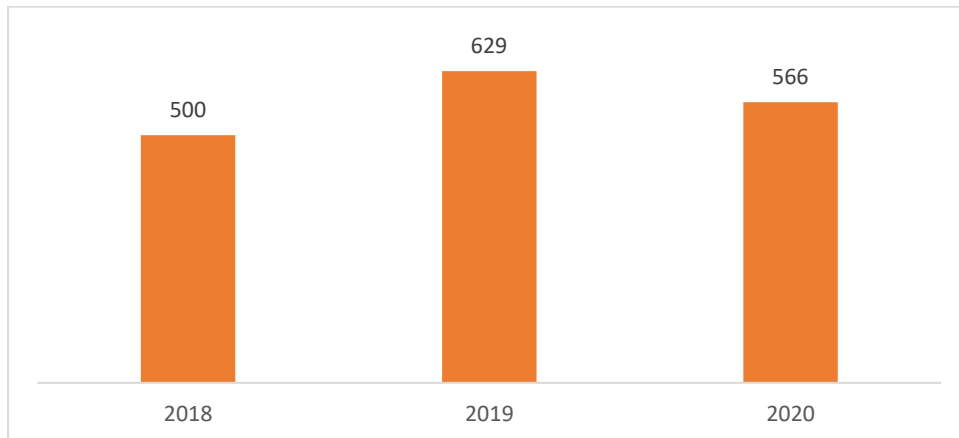
Sumber: Disnakertrans Provinsi KALTIM, 2023

#### H. Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

Perlindungan terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan bukan saja memberikan pelayanan namun dilakukan juga pencegahan dan peningkatan kelembagaan melalui Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan

Anak (PUSPA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Sedangkan untuk pelayanan korban kekerasan melalui UPTD PPPA di seluruh Kab/Kota.

Menurut laporan Sistem Informasi Online (SIMFONI) PPPA Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 629 kasus dan terjadi penurunan di tahun 2020 menjadi 566 kasus di Provinsi Kalimantan Timur, secara lengkap dapat dilihat dalam gambar di bawah.



Gambar II.67

Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan di Kalimantan Timur  
Tahun 2018-2020

(Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2022)

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan data simfoni tahun 2020 terdapat jumlah kekerasan pada anak sebanyak 347 kasus.

Situasi ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki kerentanan untuk menjadi korban kekerasan. Kondisi ini memerlukan upaya integratif selain Pemerintah juga meliputi keluarga, lingkungan sekitar, sekolah, masyarakat, dunia usaha, dan mas media. Beberapa kelembagaan perlindungan anak adalah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA), Forum Anak, dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Sedangkan untuk pelayanan korban kekerasan melalui UPTD PPPA di seluruh Kab/Kota, jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat ini bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

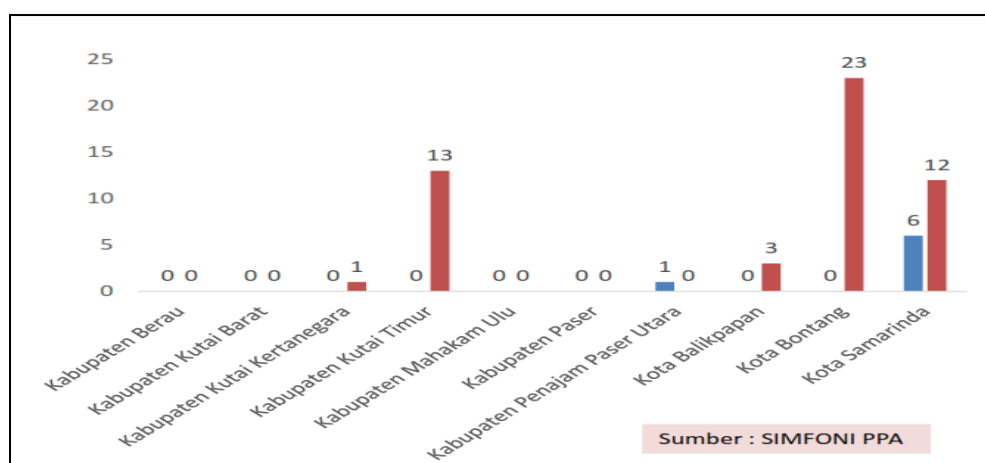
Setiap anak termasuk anak penyandang disabilitas berhak untuk tumbuh dan berkembang serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk itu diperlukan upaya pemenuhan hak anak serta melakukan percepatan perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas. Jumlah Anak Disabilitas Kalimantan Timur cukup tinggi. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Kalimantan Timur seperti dalam tabel berikut.

Tabel II.66  
Jumlah penduduk disabilitas di Kalimantan Timur Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Cacat Fisik	Cacat Netra	Cacat Rungu	Cacat Mental Jiwa	Cacat Fisik Mental	Cacat Lainnya
1	Paser	2	0	2	0	0	0
2	Kukar	40	5	6	6	3	16
3	Berau	5	1	2	0	3	3
4	Kubar	2	1	1	0	2	6
5	Kutim	11	4	5	0	1	13
6	PPU	7	1	1	1	1	2
7	Mahakam Ulu	7	0	3	1	2	1
8	Balikpapan	12	1	4	0	0	2
9	Samarinda	10	5	5	1	1	2
10	Bontang	9	0	2	1	0	6
JUMLAH		105	18	31	10	13	51

Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2022

Disabilitas/kecacatan merupakan bagian dari keberagaman. Disabilitas disebabkan oleh lingkungan, bukan kekurangan fisik seseorang. Lingkunganlah yang harus berubah agar kaum disabilitas, khususnya anak penyandang disabilitas bisa mendapatkan perlindungan dan berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. Anak-anak penyandang disabilitas rentan menjadi korban kekerasan seksual dari lingkungannya. Mereka juga rentan mendapat stigma atas kondisi kedisabilitasnya. Rentan menjadi korban pemasungan, rentan mendapat *bullying*, dan rentan menjadi korban kekerasan fisik atau eksploitasi. Berikut data korban kekerasan difabel di Kaltim pada tahun 2020.



Gambar II.68

Korban Kekerasan Difabel di Kalimantan Timur Tahun 2020

(Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2022)

### I. Pangan

Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP (Indeks Ketahanan Pangan) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan sub sistem yang membentuk sistem ketahanan pangan, Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan tiga pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

Tabel II.67

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Tahun 2018-2022

No	Kabupaten/Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Paser	72,76	72,25	82,26	80,48	81,76
2.	KUBAR	70,64	66,85	54,98	57,76	66,94
3.	KUKAR	79,50	84,51	84,28	84,73	84,44
4.	KUTIM	71,27	57,58	73,13	66,19	60,09
5.	Berau	79,47	84,19	85,34	86,77	86,16
6.	PPU	80,18	84,26	86,20	86,24	85,51
7.	MAHULU	68,88	58,73	63,17	52,75	53,29
8.	Balikpapan	83,62	88,74	87,66	88,68	89,47
9.	Samarinda	82,56	85,19	80,75	83,72	84,66
10.	Bontang	81,42	85,34	84,59	87,24	84,21
Kalimantan Timur		77,03	76,90	78,24	77,46	77,65

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 sebesar 77,65 mengalami peningkatan dari IKP Tahun 2021 yang sebesar 77,46. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mulai mampu meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Timur.

Sejalan dengan hal tersebut, apabila dilihat hingga level desa masih terdapat 412 pada Tahun 2022 desa di Kalimantan Timur masih termasuk dalam kategori rawan pangan. Desa rawan pangan ini merupakan suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Adapun penyebab terbesar terjadinya desa rawan pangan disebabkan oleh faktor Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan bersih (beras, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu dan stok), rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk dan persentase angka kesakitan/angka harapan hidup.

Tabel II.68  
Jumlah Desa Rawan Pangan Berdasarkan Hasil FSVA Kabupaten/Kota Tahun 2021 dan 2022

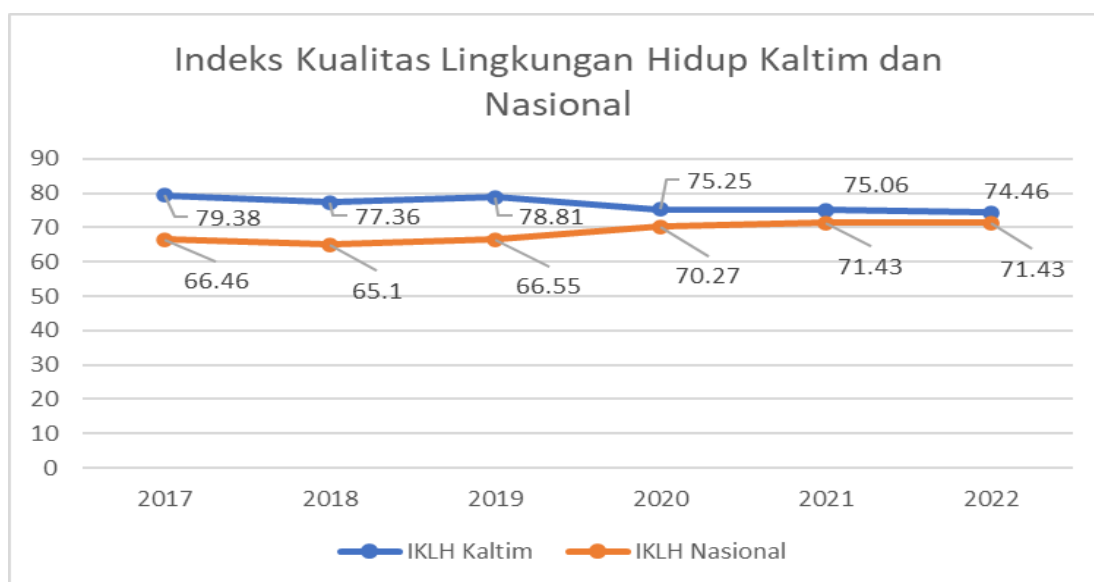
No	Kab/Kota	Jumlah		2021			2022		
		Kecamatan	Desa	Desa Rawan Pangan	% Per Kab/Kota	% Provinsi	Desa Rawan Pangan	% Per Kab/Kota	% Provinsi
1.	Paser	10	144	35	24,31	12,20	24	16,67	5,84
2.	KUBAR	16	194	50	25,77	17,42	62	31,96	15,09
3.	KUKAR	18	237	60	25,32	20,91	85	35,86	20,68
4.	KUTIM	18	141	44	31,21	15,33	96	68,09	23,36
5.	Berau	13	110	19	17,27	6,62	56	50,91	13,63
6.	PPU	4	54	11	20,37	3,83	20	37,04	4,87
7.	MAHULU	5	50	21	42,00	7,32	21	42,00	5,11
8.	Balikpapan	6	34	16	47,06	5,57	18	52,94	4,38
9.	Samarinda	10	59	26	44,07	9,06	23	38,98	5,60
10.	Bontang	3	15	5	33,33	1,74	6	40,00	1,46
Kalimantan Timur		103	1.038	287	27,65	100,00	411	39,60	100,00

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi KALTIM, 2022

#### J. Lingkungan Hidup

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh sumber daya alam tak terbarukan dengan pengelolaan yang bersifat eksploitatif dan banyak menyebabkan permasalahan kerusakan lingkungan hidup. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi indikator yang digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan

kualitas lingkungan hidup. Secara umum, IKLH Kalimantan Timur lebih tinggi dibandingkan dengan IKLH Nasional.



Gambar II.69

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2022

(Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2022)

Pada tahun 2019, IKLH Kalimantan Timur mengalami kenaikan angka indeks dari 77,36 di tahun 2018 menjadi 78,81 (predikat baik,  $70 < \text{IKLH} \leq 80$ ) dan terus menurun pada tahun 2022 menjadi 74,46. Menurunnya IKLH tahun 2021 dapat dipengaruhi oleh penambahan indeks baru yaitu Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan penurunan Indeks Kualitas Air Sungai. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 kemudian menurun menjadi 74,46. Capaian ini berada di bawah Target P-RPJMD Kaltim 2019-2023 pada tahun 2022 yakni, 76,05. Capaian IKLH Tahun 2022 ini menurun dikarenakan adanya penurunan angka indeks pada Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Air Laut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kaltim masih belum tercapai apabila dibandingkan dengan target di P-RPJMD.

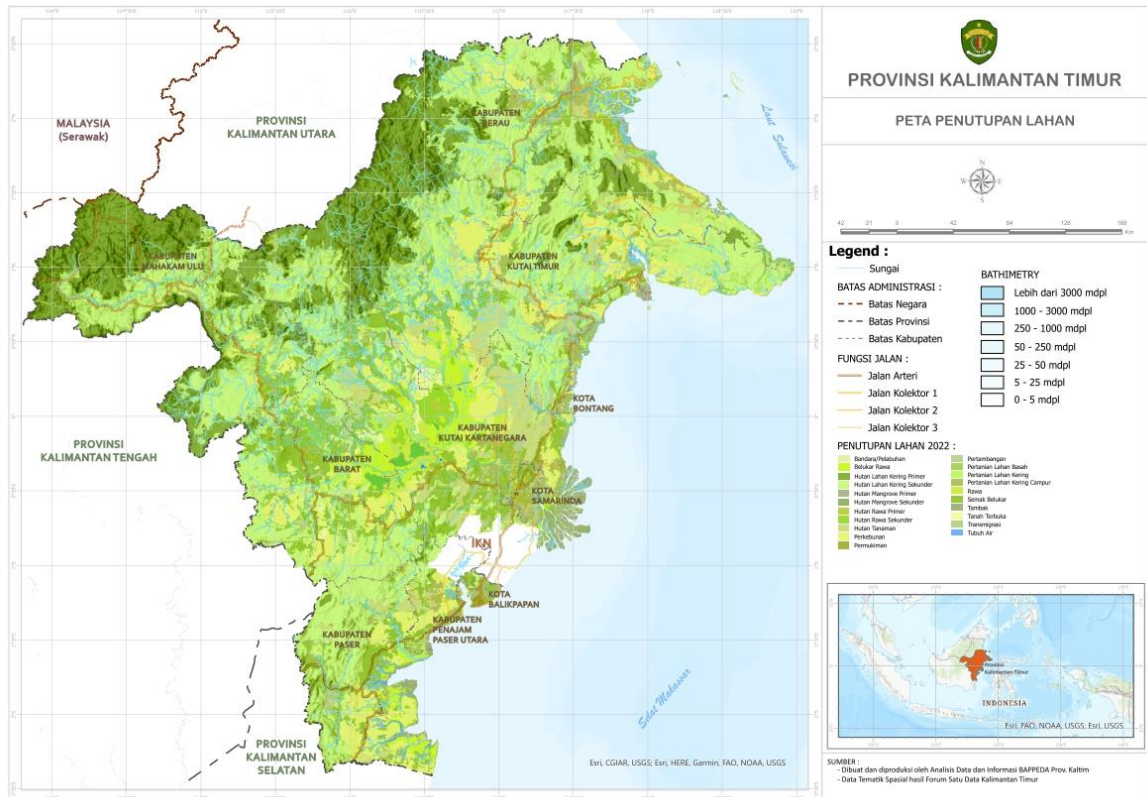
Tabel II.69

Indeks Kualitas Air, Udara, Lahan dan Air Laut  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

INDEKS	2018	2019*)	2020	2021	2022	KET
IKA	57,73	77,09	53,7	51,92	53,02	*)IKAL/Indeks Kualitas Air Laut masih belum masuk menjadi salah satu penilaian IKLH pada Tahun 2019.
IKU	83,36	89,42	89,06	88,84	87,59	
IKL	87,59	72,12	79,76	82,21	81,85	
IKAL	-	-	83,51	85,4	81,45	

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2022

Seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Timur berisi lahan yang diidentifikasi melalui interpretasi Peta Citra Satelit yang dibedakan dalam klasifikasi tutupan lahan. Hasil akhir tutupan lahan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar II.70  
Peta Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Timur  
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tidak hanya diukur di tingkat Nasional dan Provinsi saja namun juga ada pada tingkat Kabupaten/Kota. Jika dilihat melalui capaian IKLH dari 10 Kabupaten/Kota di Tahun 2022 yang ada di Kalimantan Timur, Capaian IKLH Kabupaten Mahakam Ulu merupakan Kabupaten dengan capaian terbaik, yakni 82,65 dengan Rating Baik. Capaian ini didukung oleh Capaian Indeks Kualitas Lahan yang sempurna yakni 100 Indeks. Sementara Kabupaten/Kota dengan capaian Rating Sedang adalah Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Samarinda dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Selengkapnya dapat terlihat di tabel berikut:

Tabel II.70  
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	IKA	IKU	IKL	IKLH	Target	Rating
1	Kabupaten Kutai Timur	50,00	86,61	81,09	71,64	70,44	BAIK
2	Kota Balikpapan	50,00	84,29	49,79	63,84	68,15	SEDANG
3	Kota Bontang	60,00	86,60	36,30	65,58	65,33	SEDANG
4	Kabupaten Kutai Barat	62,31	91,50	66,09	74,96	70,08	BAIK
5	Kabupaten Kutai Kartanegara	53,08	89,31	70,87	71,65	73,14	BAIK
6	Kota Samarinda	45,81	81,81	25,90	56,03	58,25	SEDANG
7	Kabupaten Mahakam Ulu	61,88	92,56	100,00	82,65	83,86	BAIK
8	Kabupaten Paser	54,09	89,53	72,02	72,37	71,43	BAIK
9	Kabupaten Penajam Paser Utara	48,33	89,90	61,70	68,09	73,18	SEDANG
10	Kabupaten Berau	53,48	83,76	94,73	74,77	76,71	BAIK

Sumber: [ppkl.menlhk.go.id/iklh](http://ppkl.menlhk.go.id/iklh)

Kabupaten/kota yang memiliki capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang baik adalah kabupaten/kota yang menghasilkan capaian Indeks Kualitas Lahan yang baik pula. Hal ini disebabkan porsi perhitungan Indeks Kualitas Lahan yang lebih besar dalam rumus perhitungan IKLH, yakni 40%.

Indonesia dan Kalimantan Timur diakui turut berkontribusi terhadap pemanasan global melalui peningkatan emisi gas rumah kaca (GRK) dimana Indonesia termasuk penghasil emisi terbesar ke-6 di dunia, sementara Kalimantan Timur sendiri penghasil emisi terbesar ke-6 secara nasional (WRI, 2016). Penyumbang emisi GRK di Kalimantan Timur sampai tahun 2015 didominasi oleh sektor berbasis lahan berupa alih guna dan degradasi hutan (64%), energi (17%), limbah (17%) dan pertanian (2%).

Strategi transformasi ekonomi yang dipilih oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengarahkan pembangunan dengan cara meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk sumber daya alam yang ada selama ini. Dengan melihat semakin menurunnya laju pertumbuhan ekonomi dan semakin menurunnya ekonomi dari sumber daya alam tak terbarukan, maka Pemprov Kaltim melakukan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang lebih seimbang, antara berbasis sumber daya alam tidak terbarukan dengan sumber daya alam yang terbarukan, yang dilakukan secara sistematis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengarahkan rencana pembangunan di Kalimantan Timur sejalan dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca

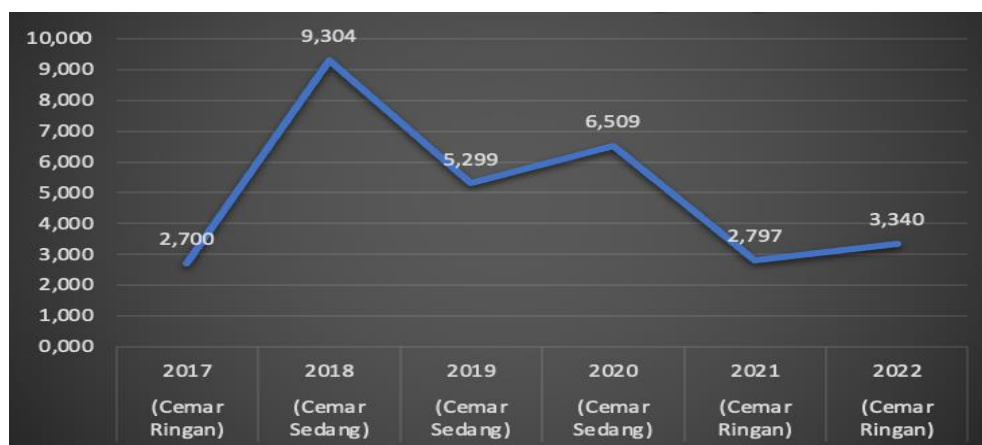
(GRK) dan strategi pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan disertai upaya mengarusutamakan ekonomi hijau ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengah kabupaten/kota di Kaltim.

Dalam Konteks Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK), Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) adalah suatu keharusan untuk dilakukan. Tujuannya adalah agar Pemerintah Daerah mengetahui capaian pelaksanaan kegiatan RAD GRK, meningkatkan efisiensi pengumpulan data dan informasi pelaksanaan kegiatan dalam upaya pencapaian target penurunan emisi dan penyerapan GRK. Selain itu, tahapan PEP ini dapat menjadi momentum untuk penyiapan bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan/Tindakan yang diperlukan dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan RAD GRK di tahun-tahun berikutnya. Sejak Tahun 2017, Kalimantan Timur tercatat sudah melakukan inventarisasi aksi mitigasi perubahan iklim dan di PEP kan. Hingga tahun 2022 total aksi yang sudah disetujui dan final di PEP/Aplikasi AKSARA Bappenas adalah sebanyak 836 aksi.

Kalimantan Timur sebagai Provinsi yang terpilih sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) yang baru juga memiliki masalah yang populer terjadi di Provinsi yang memiliki kota besar lainnya di Indonesia, yakni permasalahan pencemaran lingkungan. Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan penanganan yang serius oleh semua pihak agar penanganannya dilakukan secara serius dan cepat tanggap. Maka dari itu dalam menentukan tingkat pencemaran lingkungan dilakukan pengukuran Indeks Pencemaran Lingkungan. Indeks Pencemaran Lingkungan adalah Indeks Pencemaran (IP) dari pemantauan Kualitas Air yang kemudian dilakukan penghitungan indeks pencemarannya berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Tahun 2021 capaian Indeks Pencemaran 2,797 (Status Cemar Ringan) dari rata-rata 27 titik pemantauan kualitas air, sedangkan target yang ditetapkan adalah 8 (Status Cemar Sedang) artinya Indeks Pencemaran pada tahun 2021 masih dibawah status cemar sedang, yaitu cemar ringan. Tahun 2022 data Indeks Pencemar yang dihitung adalah 3,34 (Cemar ringan) dari 179 titik pemantauan kualitas air, sedangkan target tahun 2022 yang ditetapkan adalah 8 (cemar sedang) artinya capaian sementara tahun 2022 masih dibawah status mutu air cemar sedang. Jika dibandingkan dengan capaian IP tahun 2021 (2,797) dan IP sementara

tahun 2022 (3,34) terdapat selisih nilai yaitu 0,543, hal ini disebabkan adanya pada Tahun 2022 nilai Indeks Pencemaran dilakukan perhitungan penggabungan titik pantau kualitas air sebanyak 179 titik pemantauan kualitas air antara titik KLHK, titik Provinsi Kaltim dan titik Kabupaten/Kota, sehingga nilai tersebut dapat mempengaruhi hasil perhitungan Indeks Pencemaran pada Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar II.71  
Indeks Pencemaran Lingkungan  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2022  
(Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2022)

Selanjutnya, Kaltim telah dipilih sebagai lokasi Program Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan melalui *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* (FCPF-CF) pada Oktober 2015. Program FCPF *Carbon Fund* dilaksanakan pada tahun 2020-2024 di seluruh Kaltim (12,7 juta hektar) untuk mempertahankan 6,5 juta hektar kawasan berhutan. Apabila dilihat dari pengurangan emisi gas rumah kaca, Provinsi Kaltim terus berusaha untuk melakukan upaya-upaya penurunan emisi.

Tabel II.71  
Angka Penurunan Emisi  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2022

Keterangan	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Angka Penurunan Emisi (juta ton co2eq)	54,12	42,14	34,65	24,41	20,89	36,4

Sumber: DLH Provinsi KALTIM, 2022

Dalam pengukuran emisi GRK Kalimantan Timur Tahun 2022 (Sementara), menggunakan 2 rumus dalam mendapatkan nilai persentase

penurunan emisi dari BAU (%), berikut rumus yang digunakan dalam perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Penurunan Emisi GRK} &= \text{BAU } \textit{Baseline} \text{ Total} - \text{Total Emisi GRK} \\ \text{Persentase Penurunan Emisi GRK} &= (\text{Jumlah Penurunan Emisi GRK} : \text{BAU} \\ &\quad \textit{Baseline} \text{ Total}) \times 100\% \end{aligned}$$

Saat ini merujuk pada data sementara Tahun 2022, Kalimantan Timur berhasil menurunkan emisi sebanyak 36,4 Juta Ton CO<sub>2</sub> eq atau sebanyak 70,68%. Capaian persentase ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan target capaian persentase penurunan emisi dari BAU (*Business As Usual*) di P-RPJMD Kaltim 2019-2023, yakni 28,50. Sehingga dapat dikatakan sementara ini capaian penurunan emisi dari BAU telah melampaui target pada P-RPJMD. Menurut Data Tahun 2021, potensi penurunan emisi sebesar 20,89 Juta ton CO<sub>2</sub> eq, dimana penurunan emisi terbesar berasal dari sektor lahan sebesar 18.9 Juta ton CO<sub>2</sub> eq, energi dan transportasi sebesar 1.6 Juta ton CO<sub>2</sub> eq, sektor limbah sebesar 0.2 Juta ton CO<sub>2</sub> eq dan pertanian-peternakan sebesar 0.098 Juta ton CO<sub>2</sub> eq. Total Penurunan Emisi pada tahun tersebut sebesar 41.96%, penurunan ini jauh dari targetan dalam dokumen RAD GRK 2010-2030 yang sebesar 27.75% untuk tahun 2021. Besaran capaian penurunan Emisi jika di bandingkan target sebesar 151.21%. Fluktuatif capaian ini jelas sangat terlihat dari tingginya capaian penurunan emisi dari sektor lahan.

#### K. Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Indikator Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun LPPD di Tahun 2022 bernilai 100 persen yang didapat dari Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 tahun dengan realisasi dan target sebanyak 2 kali. Pada Indikator Pemanfaatan data kependudukan LPPD OPD Provinsi yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian 107 kerja sama sebanyak 9 kabupaten/kota dari 34 kabupaten/kota.

Tabel II.72

Capaian Indikator Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

No	KAB/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
1	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh	82,84	84,83	-	-	-

No	KAB/KOTA	2018	2019	2020	2021	2022
	lembaga pencatatan sipil, menurut umur. (persen)					
2	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran (persen)	92,30	92,69	-	-	-
3	Kebijakan terkait dengan pendaftaran penduduk (kebijakan)	-	0	0	6	6
4	Kebijakan terkait pencatatan sipil (kebijakan)	-	0	0	6	6
5	Kebijakan terkait pengelolaan administrasi kependudukan (kebijakan)	-	0	0	5	5
6	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun LPPD (kali)	-	-	-	100%	100%
7	Pemanfaatan data kependudukan lppd (OPD)	-	-	-	18,92	26,47

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2022

#### L. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa mempunyai tujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memiliki target sasaran desa prioritas sebanyak 10.000 desa dari 74.953 desa di seluruh Indonesia, kemudian dari 271 kawasan perdesaan ditetapkan jumlah Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN sebanyak 62 kawasan dan 30 sasaran Kawasan perdesaan non KPPN yang sudah memiliki indeks perkembangan kawasan perdesaan. Dua Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi pengembangan KPPN yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau. Pada Kabupaten Kutai Timur memiliki keunggulan berupa potensi wisata terpadu, sedangkan pada Kabupaten Berau memiliki potensi Minapolitan (Udang dan Bandeng).

Tabel II.73  
Lokus Prioritas Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional  
Provinsi Kalimantan Timur

NO	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Nama Kawasan Perdesaan
1.	Kutai Timur	Sangatta Selatan	Sengata Selatan, Sangkima, Teluk Sangkima	Kawasan Perdesaan Ekowisata Terpadu TNK Kutai Timur yang ditetapkan dalam SK Bupati Nomor 050/K.433/2018 dan Perbup No 27 Tahun 2018 tentang RPKP
		Kecamatan Teluk Pandan	Kandolo dan Teluk Pandan	
2.	Berau	Pulau Derawan	Pulau Derawan, Teluk Semanting, Pegat Bertumbuk, Kasai dan Tanjung Batu	Kawasan Perdesaan Mina-Bestari Tanjung Redeb yang ditetapkan dalam Kep. Bupati Berau Nomor 227 tahun 2017 dan Nomor 236 tahun 2017

Sumber: Renstra Direktorat Jendral Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendes PDTT 2021

Berikut ini merupakan indikator kinerja bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dalam kurun waktu Tahun 2018-2022, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.74  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	-	-	-	27	-
2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	-	-	-	8	-
3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	-	-	-	15	-
4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan	-	-	-	30	-

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
	lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan					
5	Persentase pengentasan desa tertinggal	-	-	-	90,00	68,52
6	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	-	-	-	0,66	92,25
7	Indeks Desa Membangun	-	0,6238	0,6752	0,7071	0,7320
8	Lembaga Kemasyarakatan Desa Yang Berperan Aktif Dalam pembangunan Desa dan Kelurahan	-	35	35	-	-
9	Jumlah Bumdes Yang Aktif	289	304	323	353	388
10	Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	-	80	80	-	-
11	Rekomendasi Sinkronisasi Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan masyarakat	-	1	1	-	-
12	Jumlah Kelompok Masyarakat Desa Pengelola Sarana dan Prasarana dan pemanfaatan TTG Yang Mempunyai Daya Saing Pasar	-	18	18	-	-
13	PKK yang berperan aktif dalam pemberdayaan/ pembinaan masyarakat dan keluarga desa/ kelurahan	-	150	165	-	-
14	Rekomendasi Sinkronisasi Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemberdayaan masyarakat	-	1	1	-	-
15	Jumlah Desa Yang Memiliki Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran	-	15	363	-	-
16	Jumlah Desa berkembang	-	15	329	-	339
17	Jumlah Kampung/Desa Iklim	-	-	40	-	-
18	Desa Tertinggal (Desa)	381	285	128	78	17
19	Desa yang mampu menjalankan Pemerintahan Desa secara optimal (Desa)	-	-	-	30	35
20	Desa yang telah melaksanakan Penataan	-	-	-	7	7
21	Kampung/Desa Iklim + (Desa	-	-	-	25	27
22	Meningkatnya Desa Berkembang (Desa)	381	285	128	30	35
23	Desa Berkembang	-	-	-	30	30
24	Meningkatnya Bumdes yang aktif (Bumdes)	289	304	323	353	388
25	Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Lembaga Kemasyarakatan Desa, TP PKK, MHA, KPM dan Pokmas mampu berperan aktif dalam pembangunan	-	-	-	30	30
26	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan yang memperoleh pembinaan	323	338	363	-	-

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2023

### M. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah sosial ekonomi dan masalah kependudukan. Tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk juga akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi). Indikator kinerja lainnya pada Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu Tahun 2018-2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.75  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

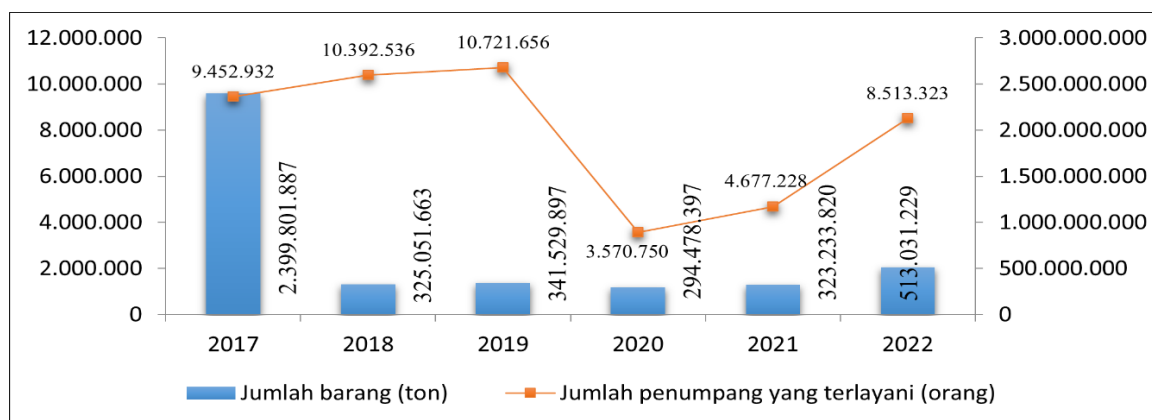
No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	peran perempuan dalam membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga	-	100	-	-	-
2	terwujudnya keluarga berencana dalam kesetaraan gender dan anak dalam pengendalian penduduk	-	100	-	-	-
3	jumlah remaja yang mendapatkan advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi)	-	100 org	-	-	-
4	Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan Perangkat Daerah (SKM)	50	-	70	-	-
5	Kebijakan tentang pengendalian penduduk	0	0	1	1	-
6	Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	0	0	33	40	-
7	Peningkatan SDM Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0	0	1	1	-
8	Kebijakan tentang pengendalian penduduk	-	-	-	1	-
9	Jumlah dokumen grand desain pembangunan Kab/Kota dalam 5 aspek	-	-	-	1	-
10	Peningkatan SDM yang mendapatkan KIE Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-	-	160	-
11	Peningkatan jumlah peserta KB	-	-	-	160	-
12	Peningkatan SDM Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-	-	140	-
13	Peningkatan organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	-	-	-	140	-
14	TFR (Angka Kelahiran Total)	-	-	-	2,51	2,18
15	Kampung KB	154	160	175		

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
16	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern ( <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i> )	-	-	-	50,82	55,50
17	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )	-	-	-	22,18	29,70

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2023

#### N. Perhubungan

Jumlah Penumpang yang terlayani dan jumlah barang yang diangkut terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Pada tahun 2019 jumlah orang yang terlayani sebesar 10.721.656 orang penumpang, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 7.150.906 orang penumpang sehingga menjadi 3.570.750 orang penumpang, kemudian mengalami peningkatan kembali sehingga menjadi 4.667.228 orang penumpang. Pada tahun 2019 jumlah barang yang diangkut sebesar 341.529.297 ton, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 47.041.900 ton sehingga menjadi 294.478.397 Ton. Hal ini disebabkan beberapa negara telah melakukan pembatasan penerbangan untuk mencegah wabah pandemi COVID-19 masuk ke negara tersebut. Pada tahun 2021, seiring dengan mulai pulihnya perekonomian dikarenakan telah berkurangnya pandemi COVID-19 dan telah dilaksanakannya vaksinasi sehingga jumlah penumpang dan barang yang diangkut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 4.667.228 orang dan 323.233.820 ton. Pada tahun 2022 jumlah penumpang dan barang yang diangkut terus mengalami peningkatan, untuk jumlah penumpang menjadi 8.513.323 orang dan jumlah barang menjadi 513.031.229 ton.

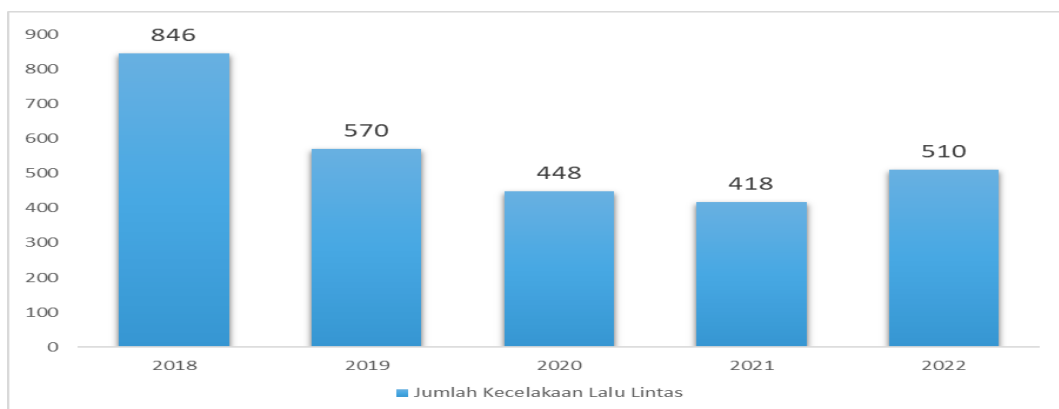


Gambar II.72

Jumlah Penumpang yang terlayani dan Jumlah Barang Tahun 2017-2022

(Sumber: DISHUB Provinsi KALTIM, 2022)

Terjadi penurunan jumlah kecelakaan di Kalimantan Timur dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Data kecelakaan pada tahun 2018 mencapai 846 kasus kecelakaan, sedangkan pada tahun 2021 mencapai 418 kasus kecelakaan. Hal yang mengakibatkan penurunan kasus kecelakaan adalah pemasangan fasilitas pengaman jalan pada ruas-ruas jalan provinsi di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, sinergitas dan koordinasi antar *stakeholders* untuk menurunkan angka kasus kecelakaan semakin baik. Hal tersebut dicapai melalui rapat – rapat koordinasi secara berkala antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Polda Kaltim dan *Stakeholders* lainnya. Namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus kecelakaan menjadi sebanyak 510 kasus kecelakaan, hal ini diakibatkan oleh aktivitas masyarakat yang berkendara di jalan terus meningkat karena pada tahun 2022 merupakan tahun pemulihan perekonomian pasca kasus COVID-19.



Gambar II.73  
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2018 – 2022  
(Sumber: DISHUB Provinsi KALTIM, 2022)

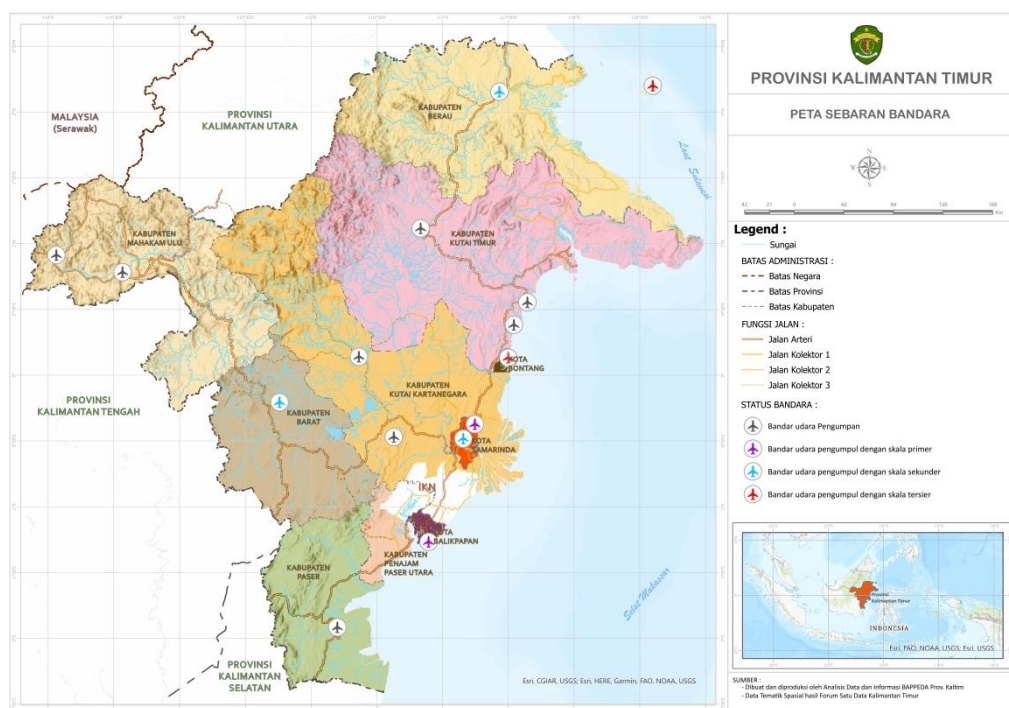
Ketersediaan prasarana perhubungan laut juga sudah cukup baik, upaya pengembangan pelabuhan terus berjalan sampai saat ini melalui pengembangan pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Terminal Peti Kemas Balikpapan dan Pelabuhan Maloy.

Provinsi Kalimantan Timur memiliki salah satu Bandar Udara Internasional terbesar di Indonesia yaitu Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang yang terletak di Kota Balikpapan. Selain itu layanan transportasi udara yang cukup memadai juga difasilitasi oleh Bandara Kalimantan di Berau dan Bandara APT Pranoto di Samarinda. Bandara-bandara tersebut mampu melayani penerbangan udara menggunakan pesawat Boeing berkapasitas besar. Selain itu, aktivitas transportasi udara

di Provinsi Kalimantan Timur juga ditopang oleh 6 bandara lokal. Saat ini terdapat 13 bandara yang beroperasi yang mampu melayani hampir seluruh kecamatan di dalam provinsi. Meskipun kuantitas bandara dan maskapai tidak mengalami perubahan sejak tahun 2017, namun kebutuhan masyarakat terhadap akses pelayanan perhubungan udara terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan kapasitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Di Kalimantan Timur terdapat 6 bandar udara yang terdiri dari 1 bandara yang diusahakan oleh PT. Angkasa Pura I dan 5 bandara dikelola oleh Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Kementerian Perhubungan RI. Secara khusus perkembangan bandara APT. Pranoto, saat ini telah beroperasi 7 (tujuh) maskapai dengan rute penerbangan yaitu Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Berau, Melak, Tanjung Selor, dan Datah Dawai.

Upaya pemerataan pembangunan melalui peningkatan konektivitas transportasi udara khususnya di perbatasan telah dilakukan secara serius dan komprehensif. Pembangunan bandara dengan panjang *runway* 1.600 m telah dilakukan di kawasan perbatasan yaitu kecamatan Data Dawai dan di Pulau kecil terluar yaitu Pulau Maratua. Selain itu, telah direncanakan pembangunan bandara Ujoh Bilang di Kabupaten Mahakam Ulu dalam rangka peningkatan konektivitas dan aksesibilitas di daerah perbatasan.



Gambar II.74  
Peta Bandara Kalimantan Timur  
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2021)

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP 432 Tahun 2017 bahwa pendekatan multi-dimensi dalam perumusan kebijakan pelabuhan nasional sebagaimana amanat undang-undang diharapkan mampu mendukung dan menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas orang, barang dan jasa, membantu menciptakan konektivitas dan pola distribusi nasional yang handal (*reliable*) dan dinamis serta berkontribusi dan menurunkan biaya logistik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan hierarki pelabuhan, di Kalimantan Timur tahun 2017 telah ditetapkan 13 pelabuhan laut yang terdiri 1 (satu) Pelabuhan Utama, 9 (Sembilan) Pelabuhan Pengumpul dan 3 (Tiga) Pelabuhan Regional. Selanjutnya pada tahun 2022 penetapan Pelabuhan tersebut mengalami perubahan menjadi 1 (satu) Pelabuhan Utama, 10 (Sepuluh) Pelabuhan Pengumpul dan 2 (Dua) Pelabuhan Regional yaitu Pelabuhan Mataritip di Kabupaten Berau dan Pelabuhan Sangkulirang di Kabupaten Kutai Timur.

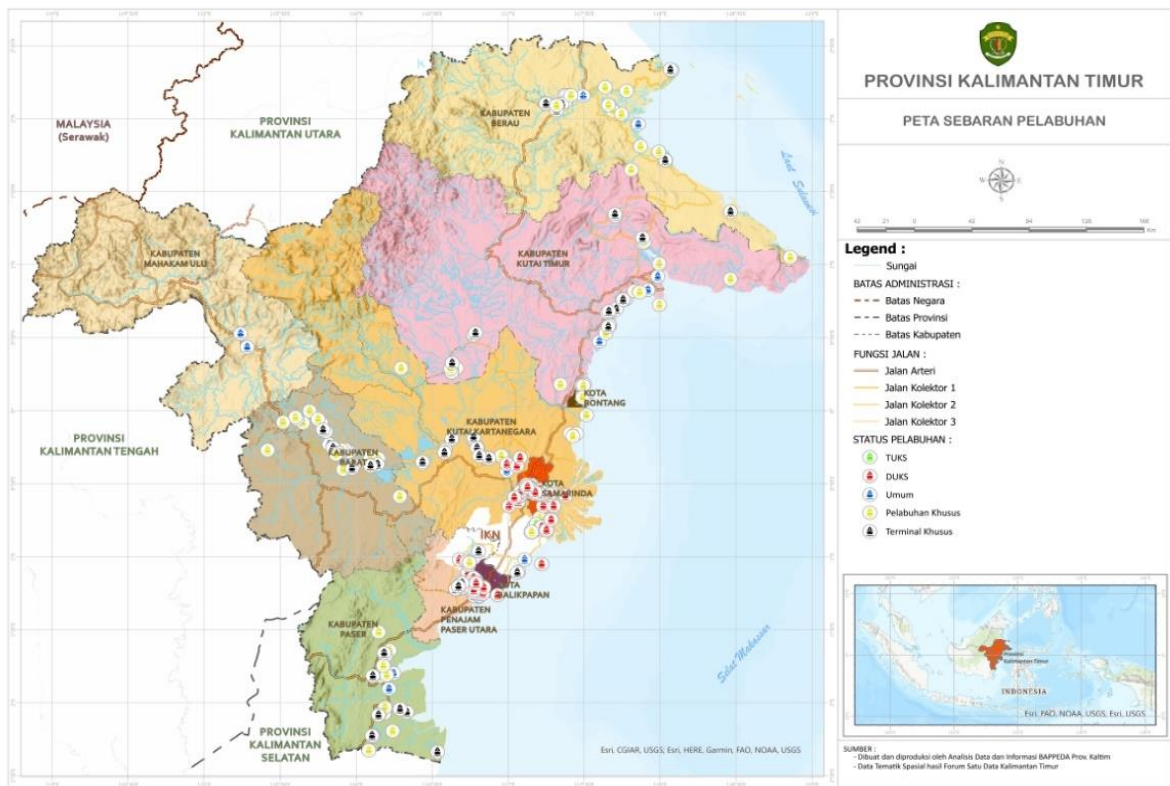
Tabel II.76  
Rencana Induk Pelabuhan Nasional  
Di Kalimantan Timur Berdasarkan KP 432 Tahun 2017

No.	Penetapan Lokasi Dan Hierarki Pelabuhan						
	Kab/Kota	No.	Pelabuhan	Hierarki Pelabuhan			
				2017	2022	2027	2037
XXIII. Provinsi Kalimantan Timur							
304	Balikpapan	1	Balikpapan	PU	PU	PU	PU
305	Berau	2	Mataritip	PR	PR	PR	PR
306	Berau	3	Tanjung Redeb	PR	PP	PP	PP
307	Bontang	4	Lhok Tuan	PP	PP	PP	PP
308	Bontang	5	Tanjung Laut	PP	PP	PP	PP
309	KUKAR	6	Kuala Samboja / Sebulu	PP	PP	PP	PP
310	KUKAR	7	Tanjung Santan	PP	PP	PP	PP
311	KUTIM	8	Maloy	PP	PP	PP	PP
312	KUTIM	9	Sangatta	PP	PP	PP	PP
313	KUTIM	10	Sangkulirang	PR	PR	PR	PR
314	Paser	11	Tana Paser / Pondong	PP	PP	PP	PP
315	PPU	12	Penajam Paser	PP	PP	PP	PP
316	Samarinda	13	Samarinda	PP	PP	PP	PP

Sumber: Kementerian Perhubungan Provinsi KALTIM

Untuk pelayanan angkutan penyeberangan telah ditetapkan 7 (tujuh) pelabuhan penyeberangan yang terdapat di Kalimantan Timur yaitu 2 (dua) Pelabuhan Kelas I yang terdiri dari Pelabuhan Kariangau dan Pelabuhan Penajam, 1 (satu) Pelabuhan Kelas II yaitu Pelabuhan Tenggarong, dan 4

(empat) Pelabuhan Kelas IV yang terdiri dari Pelabuhan Desa Sakka, Sungai Meriam, Handil I dan Gunung Tabur.



Gambar II.75  
Peta Pelabuhan Kalimantan Timur  
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Untuk transportasi darat, di Kalimantan Timur terdapat 2 terminal tipe A yang telah beroperasi untuk melayani rute Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yaitu Terminal Tipe A Batu Ampar di Balikpapan, dan Terminal Tipe A Samarinda di Samarinda Seberang. Namun kondisi kedua terminal tersebut memerlukan peningkatan pelayanan fasilitas. Selanjutnya untuk melayani Antar Kota Dalam Provinsi ditetapkan 7 Terminal Tipe B yang tersebar di 6 Kabupaten/Kota.

#### O. Komunikasi Dan Informatika

##### 1) Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pada tahun 2021 Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan nilai menjadi 2,22 dibandingkan tahun sebelumnya berada di angka 3,14. Hal ini disebabkan karena perubahan aspek penilaian dan evaluasi yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Pada tahun 2018 hingga 2020 pedoman evaluasi yang dilakukan

menggunakan Permen PAN & RB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sedangkan tahun 2021 hingga saat ini menggunakan Permenpan RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Tabel II.77  
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks SPBE	2,89	3,04	3,14	2,22	2,11

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim

Pelaksanaan SPBE Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga diikuti dengan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan data 2022, terdapat 6 (enam) daerah yang memiliki SPBD dengan predikat Cukup, sedangkan sisanya masih berpredikat Kurang. Ini menunjukkan masih perlunya penyiapan dan peningkatan penerapan SPBR baik di provinsi maupun di kabupaten/kota.

Tabel II.78  
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

INSTANSI	INDEKS SPBE	PREDIKAT
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	2,22	CUKUP
Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara	2,48	CUKUP
Pemerintah Kab. Paser	1,36	KURANG
Pemerintah Kab. Kutai Barat	1,83	CUKUP
Pemerintah Kab. Kutai Timur	1,03	KURANG
Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	2,14	CUKUP
Pemerintah Kab. Mahakam Ulu	1,03	KURANG
Pemerintah Kota Samarinda	2,46	CUKUP
Pemerintah Kota Balikpapan	2,44	CUKUP
Pemerintah Kota Bontang	2,11	CUKUP

Sumber : Kepmenpan RB No. 1503 Tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun 2021

#### L. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pentingnya peran koperasi dan UKM Koperasi dan UKM ditujukan untuk membantu pemberdayaan perekonomian masyarakat terutama para pengusaha mikro kecil dan menengah. Pembangunan dan pembinaan Koperasi dan UKM telah menunjukkan dampak yang positif, meskipun

belum optimal mengubah struktur perekonomian daerah. Pentingnya peran koperasi dan UKM di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa Koperasi dan UKM merupakan bentuk perekonomian kerakyatan di Kalimantan Timur. Adapun jumlah koperasi aktif tahun 2022 adalah sebanyak 3.117 Koperasi dari jumlah koperasi sebanyak 6.041 Koperasi. Secara rinci perkembangan aktivitas koperasi dijelaskan melalui tabel berikut:

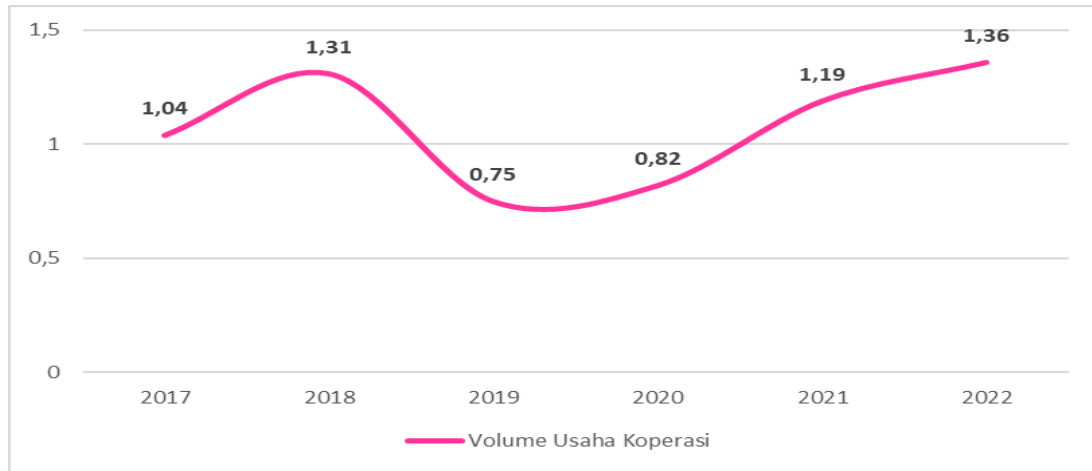
Tabel II.79  
Perkembangan Koperasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018–2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Koperasi Aktif	3.428	2.832	2.751	2.844	3.117
2	Jumlah Koperasi yang Melaksanakan RAT	657	583	351	457	451
3	Jumlah Seluruh Koperasi	5.406	5.664	5.619	5.676	6.041
4	Jumlah Anggota Koperasi	86.297	82.054	57.381	68.580	96.940

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2023

Pada tabel diatas terlihat jumlah koperasi aktif, jumlah koperasi yang melaksanakan RAT dan jumlah seluruh koperasi dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman para pengurus koperasi dalam pertanggung jawaban koperasi. Disamping itu masih rendahnya koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal 1 tahun sekali atau paling lambat 6 bulan setelah tutup buku. Pelaksanaan RAT bagi koperasi menjadi syarat untuk menjadi koperasi yang bisa dikatakan aktif dan sehat.

Jumlah anggota koperasi di Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, kondisi tahun 2020 mengalami penurunan jumlah anggota yakni 57.381 orang. Secara umum kendala penurunan di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi COVID-19, namun kendala lain yang dihadapi adalah berkurangnya modal, berkurangnya pelanggan, dan harga produk yang menurun. Hal ini juga memberi pengaruh pada jumlah volume usaha koperasi yang tergambar pada gambar berikut.



Gambar II.76  
 Volume Usaha Koperasi Provinsi Kalimantan Timur  
 Tahun 2016–2022 (Triliun Rupiah)  
 (Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2023)

Jumlah volume usaha koperasi di Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Jumlah volume usaha koperasi tahun 2019 dan 2020 berada di bawah 1 Triliun Rupiah. Tahun 2021 jumlah volume usaha koperasi kembali pulih mencapai 1,19 Triliun Rupiah dan 1,36 Triliun Rupiah pada tahun 2022 yang diikuti dengan bertambahnya jumlah koperasi aktif, jumlah anggota koperasi, dan koperasi yang melaksanakan RAT.

Sementara Usaha Kecil dan Menengah (UKM) juga mempunyai peran yang cukup signifikan dalam pergerakan perekonomian daerah khususnya perekonomian masyarakat. Usaha kecil dan menengah merupakan usaha yang mampu bertahan lebih baik di saat pandemi COVID-19. Secara rinci jumlah UKM berdasarkan jenis usaha di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel II.80  
 Jumlah UKM Berdasarkan Jenis Usaha di Kabupaten/Kota  
 Tahun 2022

No.	Kab/Kota	Industri			Dagang	Jasa	Total
		Kuliner	Industri Pengolahan	Kerajinan			
1	Paser	18.469	983	783	21.886	5.368	47.489
2	KUBAR	2.235	-	861	8.511	2.223	13.830
3	KUKAR	35.320	825	130	23.719	434	60.428
4	KUTIM	11.221	1.204	30	3.360	875	2.989
5	Berau	4.509	62	53	9.467	851	14.942
6	PPU	5.813	489	18	6.269	878	13.467
7	MAHULU	338	1	-	247	-	586
8	Balikpapan	59.861	1.999	443	52.791	12.581	127.675

No.	Kab/Kota	Industri			Dagang	Jasa	Total
		Kuliner	Industri Pengolahan	Kerajinan			
9	Samarinda	60.629	1.626	620	53.172	14.477	130.524
10	Bontang	16.631	968	160	16.282	475	34.516
	<b>Jumlah</b>	<b>215.026</b>	<b>8.157</b>	<b>3.098</b>	<b>195.704</b>	<b>38.162</b>	<b>460.147</b>

Sumber: Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi KALTIM, 2023

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 sebanyak 460.147 UMKM. Jumlah terbanyak berada di Kota Samarinda yakni 130.524 UMKM, sedangkan terbanyak kedua adalah Kota Balikpapan sebanyak 127.675 UMKM. Jenis usaha UMKM yang terdapat di Provinsi Kalimantan Timur beragam, mulai dari kuliner, industri pengolahan, industri kerajinan, perdagangan dan jasa. Jenis usaha didominasi pada usaha kuliner sebanyak 215.036 UMKM dan usaha dagang sebanyak 195.704 UMKM. Banyaknya usaha dagang dan kuliner ini tidak dipungkiri karena kemudahan dalam penyediaan modal dan banyak peminat. Sedangkan jenis usaha paling sedikit adalah industri kerajinan yakni 3.098 UMKM dimana jenis usaha ini tidak terdapat pada Kabupaten Mahulu.

#### M. Penanaman Modal

##### 1) Jumlah Proyek Investasi Dalam Negeri dan Asing (PMDN/PMA)

Kenaikan jumlah proyek investasi merupakan “angin segar” bagi perekonomian Kalimantan Timur karena selain meningkatkan perekonomian secara makro dan mikro, juga meningkatkan faktor produksi penunjang kegiatan perekonomian.

Tabel II.81  
Jumlah Proyek PMDN/PMA  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

Tahun	PMDN	PMA	Total
2018	520	513	1.033
2019	2.227	903	3.130
2020	3.924	778	4.702
2021	9.291	1.034	10.325
2022	6.706	1.055	7.711

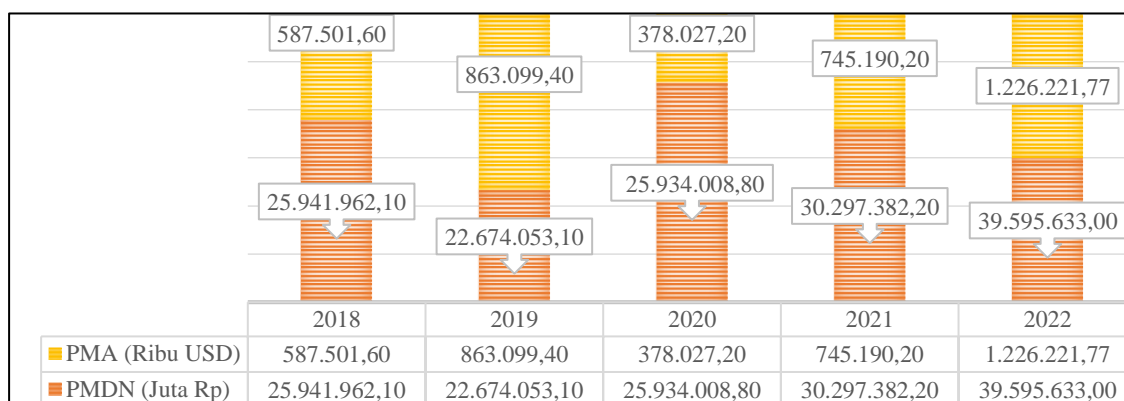
Sumber: DPMPSTSP Provinsi KALTIM, 2022

Dilihat dari total jumlah proyek PMDN/PMA dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 jumlah proyek

PMDN/PMA di Kalimantan Timur sebanyak 10.325 proyek, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2020 yang hanya sebanyak 4.702 proyek. Kenaikan jumlah proyek pada investasi Dalam Negeri sebesar 5.367 proyek dan kenaikan proyek pada investasi Asing sebesar 256 proyek. Peningkatan jumlah proyek baik penanaman modal dalam negeri maupun asing ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih positif pada nilai investasi sehingga mampu menggerakkan perekonomian dengan lebih baik. Pada tahun 2022 jumlah proyek PMDN sebesar 6.706 proyek dan PMA sebesar 1.005 proyek. Proyek pada investasi Dalam Negeri dominan berlokasi di Kota Balikpapan dengan jumlah 1.850 proyek dan di Kota Samarinda dengan jumlah 1.845 proyek. Begitu juga untuk proyek investasi asing dominan berlokasi di Kota Balikpapan dengan jumlah 332 proyek.

2) Nilai Investasi (PMDN/PMA)

Nilai realisasi investasi dalam negeri tahun 2022 mencapai Rp 39,59 triliun dengan 5 (lima) sektor utama yakni pertambangan (37,91%), Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi (37,67%), Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan (9,22%), Industri Makanan (6,04%), dan Perdagangan dan Reparasi (1,74%). Selanjutnya nilai realisasi investasi asing mencapai US\$ 1.266,22 Juta dengan 5 (lima) sektor utama yaitu pertambangan (40,74%), Industri Mineral Non Logam (17,06%), Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan (15,01%), Industri makanan (7,59%), dan Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (7,42%). Dengan adanya IKN Nusantara di Kalimantan Timur tentunya akan membawa pengaruh yang baik terhadap nilai investasi di kemudian hari dikarenakan adanya peningkatan aktivitas investasi oleh investor.



Gambar II.77

Nilai Investasi PMDN dan PMA Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2018-2022

(Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2023)

Kalimantan Timur telah dikenal sebagai provinsi yang punya banyak kekayaan alam, mulai dari minyak bumi, gas alam, batu bara, maupun sektor lainnya seperti Agrikultur, Pariwisata dan Industri pengolahan. Hal ini menjadi daya tarik investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modal di Kalimantan Timur baik pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Di samping itu, kehadiran IKN Nusantara tentu menjadi potensi yang baik untuk investasi ke depan.

Berdasarkan Realisasi Investasi PMDN, mulai tahun 2017-2019 sektor pertambangan merupakan sektor yang paling dominan dalam investasi Penanaman Modal Dalam Negeri, namun sejak pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia sektor yang paling dominan di tahun 2020 adalah sektor industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi yang mencapai Rp 7.965,22 miliar dan meningkat tajam di tahun 2021 hingga mencapai Rp 15.145,34 miliar. Investasi sektor pertambangan juga mengalami peningkatan pada tahun 2021 mencapai Rp 5.859,33 miliar meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 3.818,59 miliar diikuti sektor Tanaman pangan dan perkebunan yang mencapai Rp 4.828,00 miliar. Pada tahun 2022 sektor pertambangan kembali menjadi sektor paling dominan dalam investasi Penanaman Modal Dalam Negeri yakni Rp 15.012,38 miliar. Peningkatan ini terjadi karena adanya momentum membaiknya harga komoditas batubara pada level tinggi dan menjadi faktor pendorong investasi di sektor pertambangan. Sektor lain yang juga berkontribusi cukup besar adalah sektor Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi mencapai Rp 14.914,62 miliar, serta sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan mencapai Rp 3.650,82 miliar.

Tabel II.82  
Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

No.	Sektor Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
I.	Sektor Primer					
1.	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	3.747.269,70	4.278.148,30	4.738.083,60	4.828.002,20	3.650.817,60
2.	Kehutanan	602.835,40	283.625	125.549,60	73.973,60	346.853,60
3.	Perikanan	.	.	3,00	0,50	2,00
4.	Pertambangan	12.559.385,40	8.712.257,70	3.818.587,60	5.859.330,30	15.012.379,10
II.	Sektor Sekunder					
1.	Industri Makanan	1.687.495,70	569.890,60	1.397.339,40	671.841,30	2.390.781,50

No.	Sektor Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
2.	Industri Tekstil	.	.	-	2,00	431,00
3.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	.	.	-	-	-
4.	Industri Kayu	264.104,30	350.224	97.509,90	5.996,00	24.001,70
5.	Industri Kertas, Barang Kertas, dan Percetakan	.	.	0	5,00	500,00
6.	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	1.034,70	444.145,60	7.965.221,90	15.145.338,40	14.914.625,40
7.	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik	.	9.000	70,80	-	7.209,90
8.	Industri Mineral Non-Logam	17.919,90	292.133,10	95,00	2.351	18.184,90
9.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	.	.	5.000	10,30	521.796,50
10.	Industri Instrumen Kedokteran, Presesi, Optik dan Jam	.	.	0	39,50	4.381,50
11.	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	7.620	151.706,50	3.626,30	9.221,80	21.487,30
12.	Industri lainnya	.	509,50	70.348,60	5.200,50	48.889,00
III.	Sektor Tersier					
1.	Listrik, Gas, dan Air	2.559.556,90	2.021.363,60	759.122,70	298.896,80	165.780,50
2.	Konstruksi	3.204.289,50	1.223.384,70	5.777.776,90	113.413,70	55.394,60
3.	Perdagangan dan Reparasi	82.557,40	341.327,60	218.379,90	295.260,00	687.631,40
4.	Hotel dan Restoran	480	1.086.261,80	25.127	55.384,90	199.549,50
5.	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	165.403,80	940.606,30	459.299,20	1.503.072,30	573.564,20
6.	Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	26.874,40	345.944,10	53.687,40	840.351,30	286.654,80
7.	Jasa Lainnya	1.015.135	1.623.524,70	419.150	589.690,80	664.717,90
Total		25.941.962,10	22.674.053,10	25.934.008,80	30.297.382,20	39.595.633,00

Sumber: DPMPSTSP Provinsi KALTIM, 2023

Disamping itu pada realisasi investasi PMA, lapangan usaha pertambangan yang memiliki peranan terbesar di Kalimantan Timur tahun 2017-2022 mengalami peningkatan nilai investasi PMA yang mencapai US\$ 515.919,94 Ribu dibanding tahun sebelumnya yang mencapai US\$ 252.125,20 Ribu. Sedangkan sektor yang mengalami peningkatan secara signifikan tahun 2021 yaitu sektor Industri Makanan yang mencapai US\$ 242.430,00 Ribu. Kondisi ini merupakan posisi tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan tahun 2022 yang hanya mencapai US\$ 96.106,59 Ribu diikuti sektor industri kimia dasar, barang kimia dan farmasi, serta tanaman pangan, perkebunan dan peternakan.

Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan masuknya investasi asing ke Kalimantan Timur. Salah satunya adalah masuknya modal baru untuk membantu mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana. Investasi

asing ini juga banyak membuka lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Selain itu, masuknya investasi asing biasanya disertai dengan transfer teknologi baru yang dikembangkan serta tidak menutup kemungkinan pula para investor asing akan bekerja sama dengan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Keterlibatan UMKM ini tentunya akan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. UMKM atau perusahaan dalam negeri juga berpeluang untuk memasarkan produknya ke pasar internasional.

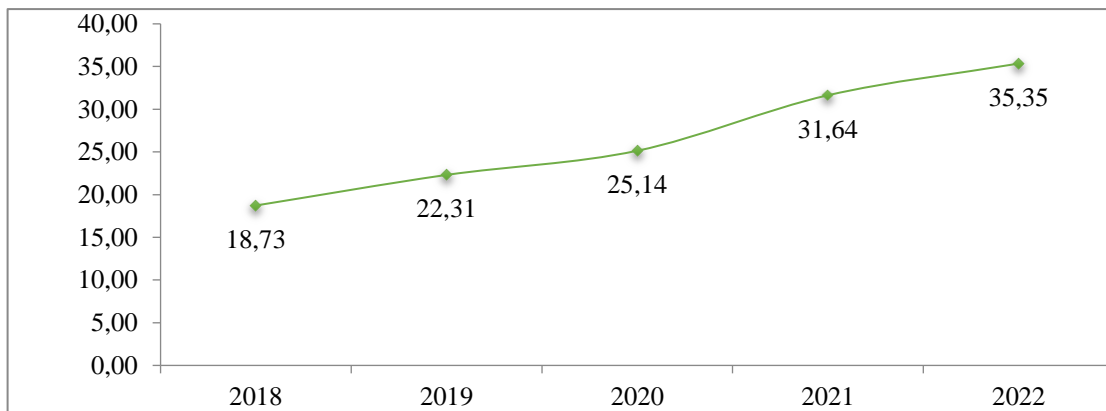
Tabel II.83  
Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (US\$)

No	Sektor Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
<b>I.</b>	<b>Sektor Primer</b>					
1.	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan	64.114.100	185.796.300	67.781.500	58.097.000	190.013.892
2.	Kehutanan	657.100	2.751.700	2.071.400	2.330.000	37.276.491
3.	Perikanan	135.500	.	-	-	-
4.	Pertambangan	188.763.000	306.457.800	167.858.400	252.125.200	515.919.940
<b>II.</b>	<b>Sektor Sekunder</b>					
1.	Industri Makanan	118.386.600	14.264.600	41.235.500	242.430.000	96.106.592
2.	Industri Tekstil	.	.	-	-	-
3.	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	.	.	-	-	-
4.	Industri Kayu	6.600	33.300	-	15.291.200	1.811.899
5.	Industri Kertas, Barang Kertas, dan Percetakan	.	.	-	-	-
6.	Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	760.700	60.000	32.861.600	66.411.000	60.176.592
7.	Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik	256.700	561.100	986.400	990.600	136.400
8.	Industri Mineral Non-Logam	.	15.809.600	24.840.000	40.020.700	216.016.282
9.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Mesin dan Elektronik	22.600	1.879.400	276.400	24.600	93.934.693
10.	Industri Instrumen Kedokteran, Presesi, Optik dan Jam	253.200	1.533.400	3.550.700	1.084.700	1.967.500
11.	Industri Alat Angkutan dan Transportasi Lainnya	.	43.800	-	-	10.091.596
12.	Industri lainnya	526.100	134.600	-	-	-
<b>III.</b>	<b>Sektor Tersier</b>					
1.	Listrik, Gas, dan Air	53.012.000	280.607.900	278.800	-	-
2.	Konstruksi	5.093.100	.	-	-	-
3.	Perdagangan dan Reparasi	3.738.700	4.258.100	5.618.500	3.804.800	9.497.500
4.	Hotel dan Restoran	2.245.800	1.297.000	791.000	586.000	3.682.299
5.	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	86.566.000	14.847.700	29.415.000	52.588.300	16.726.698

No	Sektor Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
6.	Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran	301.200	146.900	221.300	9.379.800	6.288.898
7.	Jasa Lainnya	62.662.600	32.616.200	240.700	26.300	6.574.500
Total		587.501.600	863.099.400	378.027.200	745.190.200	1.266.221.770

Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2022

Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan pada tahun 2017 yang mencapai Rp 11,42 triliun dan mengalami peningkatan ditahun berikutnya hingga mencapai Rp 35,35 triliun pada tahun 2022.



Gambar II.78

Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Triliun Rp)

(Sumber: DPMPTSP Provinsi KALTIM, 2023)

Nilai investasi sektor non migas dan batubara tahun 2021 yang mencapai Rp 31,64 triliun ini terdiri dari investasi PMDN sebesar Rp 24,44 triliun dan PMA sebesar Rp 7,2 triliun. Peningkatan nilai investasi ini dipengaruhi oleh masih tingginya angka kasus Covid-19 di tahun 2021 sehingga kontribusi sektor usaha Industri Kimia Dasar, Barang Kimia & Farmasi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni mencapai Rp 15,145 triliun. Selanjutnya nilai investasi sektor non migas dan batubara tahun 2022 ditargetkan di angka Rp 35 triliun. Di Triwulan IV target tercapai sebesar Rp 35,35 triliun. Tahun 2023 Nilai Investasi sektor non migas dan batubara ditargetkan mencapai Rp 35,67 triliun dan diharapkan ke depannya investasi sektor non migas dan batubara lebih maksimal.

## N. Kepemudaan Dan Olah Raga

Setelah sukses meraih peringkat 7 besar pada PON XX Tahun 2021, Pemerintah Kalimantan Timur terus meningkatkan pembinaan bagi para atlet dengan tujuan menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lumbung atlet berprestasi untuk wilayah Indonesia Timur. dari hasil capaian tersebut Pemerintah Kalimantan Timur terus meningkatkan pembinaan bagi para atlet dengan tujuan menjadikan Provinsi Kalimantan Timur sebagai lumbung atlet berprestasi untuk wilayah Indonesia Timur. Selain itu Provinsi Kalimantan Timur siap menjadi tuan rumah dalam *Event* berskala nasional maupun internasional. Selain itu Provinsi Kalimantan Timur siap menjadi tuan rumah dalam *Event* berskala nasional maupun internasional dengan mengoptimalkan seluruh sarana dan prasarana olahraga yang ada.

Pada urusan kepemudaan dan olahraga ada 2 (dua) indikator kinerja yang perlu menjadi perhatian serius dalam menunjang peningkatan sumber daya pemuda yaitu :

1. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, indikator ini cukup menggambarkan tingkat partisipasi pemuda dalam berwirausaha.
2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan, indikator ini mewakili peningkatan pemuda yang berpartisipasi aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat.

Pemuda Kaltim diharapkan mampu memberikan dampak serta solusi ke depan dengan menjawab segala tantangan pembangunan di era revolusi industri 4.0 dan era *society* 5.0.

Pemuda Kaltim harus mampu bersaing dalam kepemimpinan dan kepeloporan ditingkat nasional agar memberikan motivasi bagi pemuda-pemuda lainnya untuk memberikan kontribusi positif dalam pengembangan organisasi pemuda dan kemasyarakatan yang saat ini masih belum optimal. Tingkat kepercayaan diri pemuda Kaltim harus ditingkatkan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam kebebasan berpendapat yang bertujuan terhadap perubahan ke arah yang lebih baik dan maju.

Tabel II.84  
Kondisi Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan  
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2021

Uraian	Tahun					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Organisasi Pemuda	107	107	107	107	107	305
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	42	42	42	45	45	38
Jumlah Klub Olahraga	1.050	1.050	1.087	1.109	1.109	1.112
Jumlah Lapangan/Gedung Olahraga	97	101	102	105	105	105
Jumlah Kegiatan Olahraga	152	152	152	161	161	120
Jumlah Organisasi Olahraga	57	57	63	63	63	63

Sumber: DISPORA Provinsi KALTIM, 2022

#### O. Statistik

Indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah bernilai 100 persen pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah berjumlah 37 OPD dari 37 OPD yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Indikator kinerja urusan statistik lainnya dalam kurun waktu Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.85  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	2021	2022
1	Tersedianya buku profil daerah	1	-
2	Jumlah survei statistik sektoral yang dilakukan	1	-
3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	1	-
4	Jumlah survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1	-
5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	1	-
6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan Statistik sektoral	100	-
7	Persentase kelengkapan metadata indikator sektoral	100	-
8	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%
9	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%
10	Persentase elemen data statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur	50	-
11	Jumlah Persentase Elemen Data Statistik Bidang Ekonomi, Sosial, Sumber daya Alam dan Infrastruktur di Lingkup Daerah Provinsi	50	-

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2023

P. Persandian

Pada Indikator Tingkat keamanan informasi pemerintah pada Tahun 2021 bernilai 1,73, dimana didapat dari hasil penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI), yang dibagi menjadi beberapa aspek, yaitu: 1. Fase Persiapan: 2,54 2. Fase Aksi 1,76 3. Fase Tindak Lanjut 0,90. Sedangkan untuk Indikator yang lain sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.86  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	2021	2022
1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	40	-
2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	63,28	-
3	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan risiko kategori rendah	54,69	-
4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	84,33	-
5	Tingkat keamanan informasi pemerintah	173,33	38,76
6	Indeks keamanan informasi	Level 2	-
7	Meningkatnya Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah (Indeks KAMI)	Level 2	-

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2023

Q. Kebudayaan

Pada tahun 2019, Provinsi Kalimantan Timur mendapat apresiasi penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) oleh Kemendikbud Republik Indonesia. Apresiasi ini diberikan dalam rangka untuk menjaga agar karya budaya baik benda dan tak benda di Kalimantan Timur tidak diklaim oleh negara lain. Pada tahun 2020 mensertifikasikan calon TACB, berdasarkan hasil sertifikasi maka dibentuklah Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Kalimantan Timur yang diputuskan melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 430 tahun 2020 tentang TACB Prov. Kaltim. dan yang sudah melakukan sidang penetapan cagar budaya peringkat provinsi untuk Kawasan Gambar Cadas Prasejarah Sangkulirang, Mangkalihat dan Situs Penguburan Gunung Selendang.

Tabel II.87  
Karya Budaya Benda dan tak Benda di Provinsi Kalimantan Timur  
yang Telah Dipatenkan Tahun 2021

No	Kabupaten/ Kota	Karya Budaya tak Benda	Peringkat	Karya Budaya Benda
1.	KUBAR	Alat Musik Kelentangan Tari Ngerangkau Tari Gong Alat Musik Sapeq Tari Perang Dayak Suliikng Dewa Belian Bawo Hudoq Upacara adat Kwangkay Musik Genikng Pakaian Kulit Kayu Parapm Api Bayaq Rumah Panjang Dayak	Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional Nasional	Bunker Komando Gudang Peluru Kolam Belanda Penampungan Air Belanda Pillbox Sumur Kembar Belanda Lamin Mancong Lamin Tolar
2.	SAMARINDA	Sarung Tenun Samarinda	Nasional	
3.	KUKAR	Tari Dewa Memanah Tari Ganjur Tari Datun Ngentau Tari Topeng Kemindu Undang-Undang Kerajaan Kutai Kertanegara (uu Panju Selatan) Erau Kertanegara Suling Dewa Punan Leto Kanjat Lasan Belian Namang Naek Ayun Muang Tarsul Kutai Begasing Kutai Nutuk Beham	Nasional Nasional	
4.	Paser	Tari Ngarang Petis Udang Paser Ronggeng Paser Pentengan Gambus Paser	Nasional Nasional Nasional Nasional	
5.	Kutai Timur	Lom Plai Blontang Bekengjong Mandau	Nasional Nasional Nasional Nasional	
6.	Provinsi			1. Kawasan Gambar Cadas Prasejarah

No	Kabupaten/ Kota	Karya Budaya tak Benda	Peringkat	Karya Budaya Benda
				Sangkaliran Mangkalihat 2. Situs Penguburan Gunung Selendang

Sumber: DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2022

Di Provinsi Kalimantan Timur terdapat berbagai cagar budaya yang tersebar di beberapa kabupaten/kota. Secara keseluruhan pada Tahun 2021 tercatat sebanyak 698 Cagar Budaya, 9 Museum, 537 Komunitas Budaya, 245 Tenaga Budaya, dan 216 Adat Istiadat/Tradisi.

Tabel II.88  
Kekayaan Budaya yang Dimiliki Kab/Kota  
di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kekayaan Budaya				
		Cagar Budaya	Museum	Komunitas Budaya	Tenaga Budaya	Adat Istiadat/Tradisi
1	Paser	83	1	58	9	7
2	Kubar	13	1	81	31	19
3	Kukar	187	2	69	39	8
4	Kutim	57	0	7	10	7
5	Berau	167	3	7	7	2
6	PPU	33	0	24	12	7
7	Mahulu	47	0	0	9	137
8	Balikpapan	75	1	29	29	29
9	Samarinda	32	1	222	93	0
10	Bontang	4	0	40	6	0
	Kalimantan Timur	698	9	537	245	216

Sumber: DISDIKBUD Provinsi KALTIM, 2022

#### R. Perpustakaan

Perkembangan Indikator Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan (*online* dan *onsite*) di Provinsi Kalimantan Timur mengalami fluktuatif, dimana di tahun 2018 berjumlah 137.841 orang, meningkat di tahun 2019 menjadi 145.731 orang, namun menurun Kembali di tahun 2019 menjadi 77.884 orang. Sedangkan untuk Indikator yang lain dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.89  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2021

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	-	-	-	5,49	-
2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	-	-	-	1,43	-
3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	-	-	-	0,001	-
4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	-	-	-	6.16	-
5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	-	-	-	19	-
6	Jumlah KCKR Daerah yang dihimpun	-	-	-	575	-
7	Jumlah judul yang tercantum dalam katalog induk Daerah	-	-	-	3050	-
8	Jumlah perpustakaan yang bergabung dalam katalog induk daerah	-	-	-	5	-
9	Jumlah terbitan yang terhimpun dalam bibliografi Daerah	-	-	-	575	-
10	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya	-	-	-	30	-
11	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih Bahasa	-	-	-	0	-
12	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	-	-	-	150	-
13	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	-	-	-	8,1	-
14	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan sebagai Wahana Pembelajaran Sepanjang Hayat	-	-	-	100	-
15	Peningkatan Gerakan Gemar Membaca dalam Mewujudkan Masyarakat yang Kreatif dan Inovatif	-	-	-	2	-
16	Jumlah masyarakat yang mengakses layanan perpustakaan ( <i>online</i> dan <i>onsite</i> ) (orang)	137.841	145.731	77.884	-	-
17	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (skor)	-	-	-	60,85	46,27
18	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (indeks)	-	-	-	17,74	34,16

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2023

#### S. Kearsipan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan mempunyai tujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dilaksanakan seluruh perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang autentik dan terpercaya sesuai dengan kaidah, prinsip, dan

standar kearsipan. Indikator kinerja bidang Kearsipan dalam kurun waktu Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel II.90  
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan  
Provinsi Kalimantan Timur

No	Indikator	2021	2022
1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	73,09	-
2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100	-
3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	80,48	-
4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	4	-
5	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	16991	-
6	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	-
7	Penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di provinsi	3552	-
8	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi yang sesuai NSPK	23115	-
9	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	625	-
10	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah provinsi yang sesuai NSPK	33	-
11	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang -Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	64.30%	74,65%
12	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek 7.39 % 111 kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	7,39	3,34
13	Persentase kualitas pengelolaan tertib arsip	90	-
14	Tercapainya penyelenggaraan kearsipan pada LKD Kabupaten / Kota sesuai dengan Peraturan Kearsipan	10	-
15	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Arsip yang Autentik dan Terpercaya	125	-
16	Pelaksanaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) pada Daerah	1 OPD	-
17	Persentase Tingkat Penyelamatan, Pengolahan, Perlindungan serta	200	-
18	Penyelamatan Arsip OPD akibat Penggabungan, Pembubaran dan Pemekaran Organisasi	2 OPD	-

Sumber: LPPD dan LKPJ KALTIM, 2023

#### T. Kepegawaian

Peningkatan penerapan sistem merit yang menjadi salah satu prioritas kerja nasional Presiden Republik Indonesia dalam pembangunan SDM. BKD Prov Kaltim telah mengikuti penilaian mandiri dalam penerapan

sistem merit berdasarkan Peraturan KASN No. 9 Tahun 2019. Dalam penilaian tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2022 mendapatkan poin sebesar 263,5 atau berada pada kategori “III” (Baik) dan belum mencapai pada kategori ke IV “Sangat Baik”.

Tabel II.91  
Nilai Sistem Merit Pemprov. Kaltim

No.	Aspek Skor Sistem Merit	2021	2022
1.	Perencanaan Kebutuhan	35	35
2.	Pengadaan	32	36
3.	Pengembangan Karier	62,5	67,5
4.	Promosi dan Mutasi	17,5	17,5
5.	Manajemen Kinerja	45	42,5
6.	Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	30	30
7.	Perlindungan dan Pelayanan	16	16
8.	Sistem Informasi	18	19
	Jumlah Nilai	256	263,5

Sumber: KASN, 2022

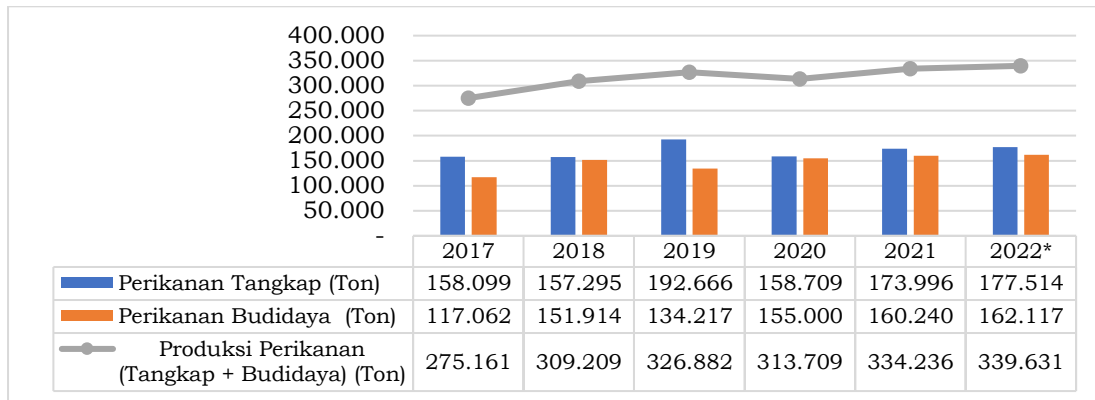
### 2.1.2. Urusan Pilihan

#### A. Kelautan dan Perikanan

Kalimantan Timur memiliki wilayah perairan yang sangat luas baik laut seluas 3,99 juta Ha maupun perairan darat dengan potensi perikanan yang juga sangat besar. Kondisi perubahan iklim, kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya sarana prasarana penangkapan maupun budidaya menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap produksi perikanan.

Produksi perikanan Kalimantan Timur selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Namun pada tahun 2022 produksi perikanan di Kalimantan Timur diperkirakan mencapai 321.644 Ton atau menurun dari tahun sebelumnya. Dalam pencapaian produksi perikanan di Kalimantan Timur masih ditemui permasalahan yang perlu mendapat perhatian yakni tingginya harga pakan mengakibatkan beberapa pelaku usaha menurunkan produksinya atau berhenti produksi sementara waktu,

masih rendahnya kesadaran penggunaan alat tangkap ramah lingkungan, belum optimalnya sarana dan prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan, serta sistem pemasaran dan peningkatan nilai tambah produk perikanan.



Gambar II.79  
Produksi Perikanan di Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2017–2022

(Sumber: DKP Provinsi KALTIM, 2022 (diolah))

## B. Pariwisata

Kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara di Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu 5 tahun mengalami tren penurunan. Penurunan terjadi akibat terjadinya wabah COVID – 19 yang masuk ke Indonesia tahun 2020 sehingga terjadinya pembatasan sosial berskala besar seperti adanya larangan bepergian ke dalam maupun luar negeri. Di samping itu belum optimalnya kerja sama antar sektor/instansi dalam pengembangan pariwisata terutama dalam hal promosi dan destinasi pariwisata. Pengembangan sarana dan prasarana masih sangat diperlukan dalam rangka menunjang perkembangan pariwisata di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk capaian jumlah kunjungan wisatawan (wisman – wisnus) pada Triwulan III tahun 2022 sebesar 2,511,419 orang tercapai 125,26 dari target 2022 sebesar 2,005,000 orang. Berdasarkan hasil evaluasi masih terdapat hambatan dalam analisis pasar promosi pariwisata. Diharapkan dengan analisis tersebut promosi pariwisata bisa lebih terarahkan.

Tabel II.92  
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara 2018–2022

No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	Tw III 2022
1	Kota Balikpapan	2.837.034	2.878.561	1.072.569	1.431.862	1,214,958
2	Kota Samarinda	2.036.236	1.643.536	654.984	1.119.174	700,798
3	Kota Bontang	409.319	472.037	215.029	156.212	93,965
4	Kabupaten Paser	39.566	7.501	32.965	89.931	44,534
5	Kabupaten Penajam Paser Utara	86.375	57.576	20.263	114.869	49,824
6	Kabupaten Kutai Kartanegara	1.715.660	1.394.171	692.689	617.018	221,918
7	Kabupaten Kutai Timur	36.717	70.560	40.129	72.438	12,757
8	Kabupaten Kutai Barat	32.205	56.125	25.929	10.871	54,126
9	Kabupaten Mahulu	3.464	3.058	2.596	5.590	5,002
10	Kabupaten Berau	283.294	292.692	127.176	141.398	102, 770
Jumlah Se-Kalimantan Timur		7.479.870	6.875.817	2.884.329	3.759.363	2.500.652

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi KALTIM

Tabel II.93  
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2018–2021

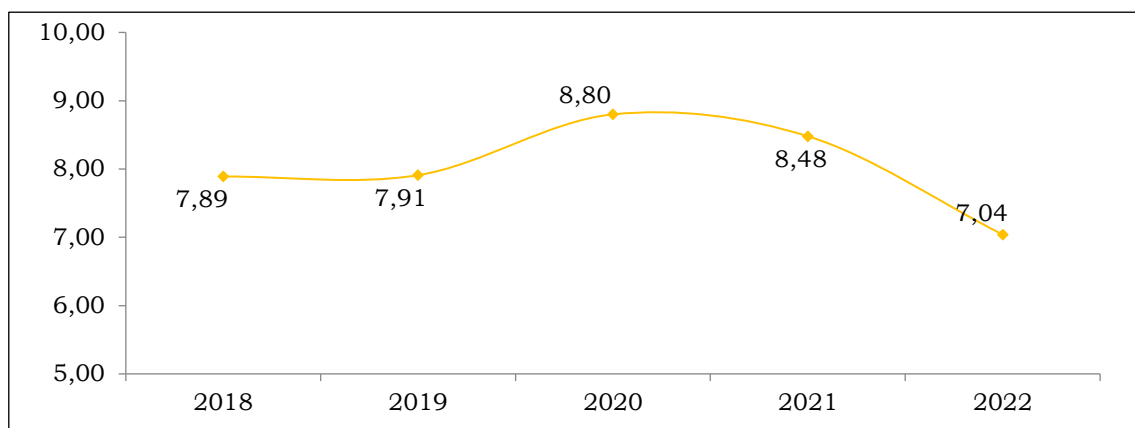
No	Indikator	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	TW III 2022
1	Kota Balikpapan	47.040	56.577	16.510	17.458	8,860
2	Kota Samarinda	4.835	2.735	2.075	444	80
3	Kota Bontang	174	168	-	-	1,024
4	Kabupaten Paser	431	-	-	1	1
5	Kabupaten Penajam Paser Utara	135	8	26	-	-
6	Kabupaten Kutai Kartanegara	4.557	3.872	557	46	4
7	Kabupaten Kutai Timur	2.340	345	365	6	2
8	Kabupaten Kutai Barat	279	273	28	5	190
9	Kabupaten Mahulu	47	-	5	-	562
10	Kabupaten Berau	2.586	8.323	220	85	44
Jumlah Se-Kalimantan Timur		62,424	72.301	19.786	18.045	10.767

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi KALTIM

### C. Pertanian

Kontribusi sektor Pertanian Arti Luas Tahun 2018-2022 secara umum mengalami tren fluktuasi, dimana tercatat pada Tahun 2022 kontribusi sektor mencapai 7,04%. Kontribusi sektor pertanian arti luas di Kaltim didominasi oleh kinerja sub sektor Tanaman Perkebunan dan sub

sektor Perikanan. Kedua kontributor tersebut sangat dipengaruhi oleh harga komoditi di pasar dan biaya produksi. Sub sektor Tanaman Perkebunan pada tahun 2022 terjadi penurunan pendapatan di tingkat petani dikarenakan adanya pelarangan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) yang mengakibatkan hasil panen petani tidak terserap dan berimbas pada harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani turun signifikan. Untuk Sub sektor perikanan sangat dipengaruhi oleh biaya produksi dan iklim. Selain itu usaha pertambangan batu bara sejak 2021 sudah kembali bangkit, yang mengakibatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB belum dapat menyaingi kecepatan pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalan. Sejalan dengan hal tersebut, sektor pertanian di Kalimantan Timur masih belum mampu menunjukkan kinerja yang optimal terutama pada tingkat produksi dan produktivitas komoditas pertanian.

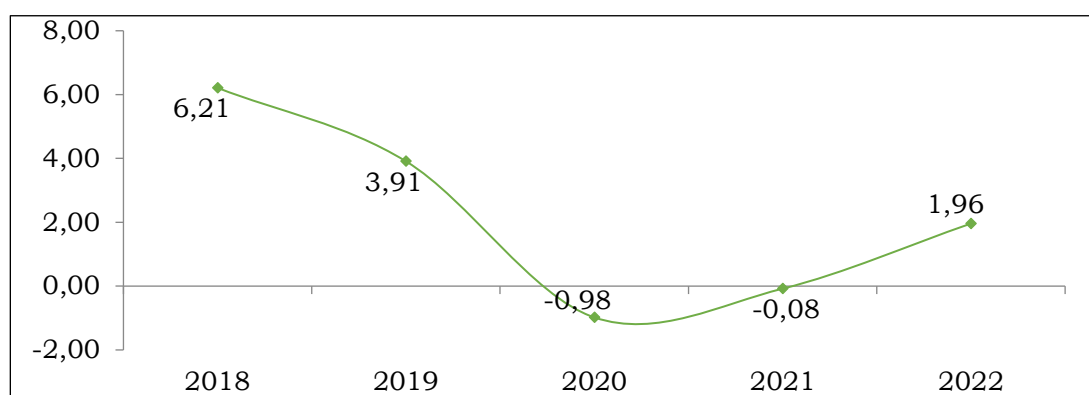


Gambar II.80  
Kontribusi Sektor Pertanian  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022)

Pada gambar di atas, terlihat pada tahun 2022 masih mengalami penurunan dimana target kontribusi PDRB sektor pertanian di tahun 2022 sebesar 8,99 persen. Berdasarkan hasil evaluasi, belum berhasilnya pencapaian target pada tahun 2022 ini salah satunya dikarenakan sektor pertanian masih belum mampu menunjukkan kinerja yang optimal terutama pada tingkat produksi dan produktivitas sektor pertanian.

Dari sisi Laju Pertumbuhan Ekonomi sektor Pertanian Arti Luas dari tahun ke tahun menunjukkan tren penurunan. Tercatat pada tahun 2020 dan tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Sub sektor Pertanian Arti Luas mengalami pertumbuhan negatif yaitu pada angka  $-0,98$  dan  $-0,08\%$ . Penurunan ini dipengaruhi oleh kinerja sub sektor kehutanan dan

penebangan kayu yang berkontraksi cukup pada tahun 2020 yaitu sebesar -6,28 dan kontraksi yang cukup dalam juga terjadi pada sub sektor tanaman pangan pada tahun 2021 yaitu sebesar -4,48. Namun hal menggembirakan terjadi pada tahun 2022, dimana Laju Pertumbuhan ekonomi Sektor Pertanian telah mampu tumbuh positif sebesar 1,96 persen, dengan sub sektor perkebunan yang menjadi penopang utamanya.



Gambar II.81  
Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022)

#### 1) Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Swasembada beras merupakan status yang diupayakan terwujud di Provinsi Kalimantan Timur sejak lama, tetapi belum dapat dicapai hingga saat ini. Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan pada lahan kering (ladang) dan lahan basah (sawah). Berdasarkan dukungan teknologi, agro-ekosistem sawah hingga saat ini mendapat dukungan teknologi lebih maju dibandingkan dengan ladang sehingga produksi padi sawah lebih banyak berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan, meskipun produksi padi masih belum mencapai swasembada untuk tingkat Provinsi dan masih di bawah target produksi yang ditetapkan.

Secara umum, terjadi penurunan produktivitas padi selama empat tahun terakhir dimana pada tahun 2018 mencapai 4,04 ton per hektar dan menurun hingga 3,63 ton/ha. Selain karena penurunan produksi, menurunnya produktivitas ini juga ternyata dikarenakan fluktuasinya luas panen secara umum. Beberapa upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi padi salah satunya adalah pemberian bantuan saprodi pertanian kepada petani dan Kegiatan Gerakan Tanam yang menjadi motivasi bagi petani untuk menanam padi. Namun program tersebut belum terlalu efektif untuk mewujudkan swasembada pangan.

Tabel II.94  
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2018	64.961	262.774	4,04
2019	69.708	253.818	3,64
2020	73.569	262.436	3,57
2021	66.269	244.678	3,69
2022	64.031	232.144	3,63

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

## 2) Perkebunan

Provinsi Kalimantan Timur memiliki 5 (lima) komoditas perkebunan unggulan yang memberikan dampak cukup signifikan dalam pembentukan perekonomian daerah. Lima komoditas unggulan itu adalah kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao, dan lada. Komoditas perkebunan yang cukup mendominasi dan menarik banyak investor dari luar daerah adalah kelapa sawit yang hingga saat ini luas tanamnya mencapai 1,59 juta Ha dengan tingkat produksi mencapai 17,36 juta ton. Kemudian komoditas yang juga cukup memberikan sumbangsih dalam perekonomian adalah tanaman karet dengan luas tanam saat ini mencapai 123.776 Ha dan produksi sebesar 71,4 ribu ton pada Tahun 2022. Luasan dan Produksi ini meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan membaiknya harga komoditi perkebunan pada Tahun 2022 sehingga membangkitkan semangat pekebun untuk berbudidaya dan memanen hasil budidayanya. Namun peningkatan produksi perkebunan di Kalimantan Timur masih dihadapkan pada tantangan berupa mahalnya harga pupuk yang berpengaruh pada produksi tanaman. Serta masih adanya tanaman tua/rusak belum dilakukan peremajaan maupun rehabilitasi.

Tabel II.95  
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Perkebunan  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

No.	Komoditi	Luas Tanam (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1.	Karet	123.776	71.483	0,58
2.	Kelapa	20.068	7.201	0,36
3.	Kopi	1.495	165	0,11
4.	Lada	8.321	5.080	0,61
5.	Kakao	7.777	2.566	0,33
6.	Kelapa Sawit	1.411.861	16.938.307	11,99

Sumber: DISBUN Provinsi KALTIM, 2023

Secara umum seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki perkebunan Kelapa Sawit dengan Kabupaten Kutai Timur sebagai kabupaten yang memiliki produksi terbanyak yaitu sebanyak 6,84 juta ton pada tahun 2022, Sedangkan Kabupaten Kutai Barat merupakan penghasil jenis karet terbesar di Kalimantan Timur sebanyak 32,06 Ribuan Ton. Untuk tanaman lada, produksi terbesar ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah produksi sebanyak 2.961 ton, Kabupaten Paser menjadi kabupaten dengan penghasil kelapa terbesar dibanding kabupaten/kota lain dengan jumlah produksi sebesar 2.325 ton dan Kabupaten Kutai Timur dengan produksi tanaman kakao terbesar yaitu 1.664 ton. Dengan tingkat produksi yang ada, akan terus dilakukan pengembangan salah satunya melalui pengembangan kawasan perkebunan berbasis korporasi sehingga kegiatan perkebunan tidak hanya terbatas pada peningkatan produksi namun akan dapat terintegrasi dari hulu – hilir. Dimana pengadaan benih/bibit, pengolahan/produksi, hingga distribusi ke konsumen akhir diintegrasikan dan dikelola oleh korporasi petani sedemikian rupa sehingga nilai tambah terbesar dari kegiatan pertanian bisa dinikmati pekebun yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan pekebun.

Tabel II.96

Produksi Perkebunan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Kalimantan Timur (ton), Tahun 2022

No	Kab/Kota	Kelapa Sawit	Kelapa	Karet	Kopi	Kakao	Lada
1	Paser	1.974.991	2.325	8.703	71	4	18
2	KUBAR	728.607	147	32.064	21	24	6
3	KUKAR	2.901.860	1.667	15.466	7	44	2.961
4	KUTIM	6.835.708	751	1.868	51	1.664	156
5	Berau	4.063.493	1.110	7.256	13	484	556
6	PPU	299.681	723	1.564	1	2	1.240
7	MAHULU	124.824	4	-	-	339	-
8	Balikpapan	477	340	4.246	1	1	127
9	Samarinda	8.548	126	316	-	4	16
10	Bontang	118	8	-	-	-	-

Sumber: DISBUN Provinsi KALTIM, 2022

Namun jika dilihat dari pola pengelolaannya dapat dilihat bahwa produktivitas perkebunan rakyat masih jauh jika dibandingkan dengan produktivitas komoditi perkebunan yang dikelola oleh perusahaan/swasta. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pendampingan pemerintah terhadap petani terutama pada aspek akses terhadap benih unggul, sarana dan prasarana produksi, serta akses modal dan pasar.

Tabel II.97  
Data Perbandingan Produktivitas Perkebunan Rakyat dan Perkebunan Swasta (Ton/Ha)

Kabupaten / Kota	Kelapa Sawit		Karet	
	Swasta	Rakyat	Swasta	Rakyat
1. Kutai Kartanegara	14.92	9.75	0.63	0.65
2. Kutai Timur	14.81	11.37	0.01	0.11
3. Kutai Barat	6.54	0.87	0.02	0.73
4. Penajam Paser Utara	10.80	4.51		0.24
5. Paser	13.42	8.80	0.75	0.48
6. Berau	22.52	15.97		0.01
7. Mahakam Ulu	5.88	0.00		0.00
8. Samarinda		7.21		0.54
9. Balikpapan		12.82		0.60
10. Bontang	13.60	0.75		
Kalimantan Timur	14.06	11.85	0.09	0.52

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi KALTIM, 2022 (diolah)

Disamping itu, guna meningkatkan daya saing hasil komoditi perkebunan diperlukan upaya hilirisasi hasil produk perkebunan. Dengan adanya upaya hilirisasi maka geliat produksi pada sektor hulu akan semakin meningkat dan harga komoditi perkebunan di tingkat pasar akan cenderung stabil. Terdapat 97 Perusahaan Besar Sawit (PBS) di Kalimantan Timur dimana perusahaan tersebut mengolah dari produk mentah Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit menjadi produk setengah jadi berupa *Crude Palm Oil* (CPO). Diperlukan upaya pemerintah untuk menarik investor untuk membangun industri pengolahan berupa turunan produk rumah tangga, membentuk korporasi pekebun serta penyediaan infrastruktur pendekat dari kebun menuju pabrik pengolahan guna meningkatkan geliat perekonomian Kalimantan Timur.

Tabel II.98  
Jumlah Perusahaan Besar Sawit (PBS)  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

Kabupaten / Kota	Perusahaan Besar Sawit	Kapasitas Produksi TBS (ton/jam)	
		Terpasang	Terpakai
1. Kutai Kartanegara	18	975	858.87
2. Kutai Timur	35	1917	1746.32
3. Kutai Barat	8	460	446.99
4. Penajam Paser Utara	7	360	238.33
5. Paser	17	890	674.67
6. Berau	11	685	636
7. Mahakam Ulu	1	60	50.5
8. Samarinda	0	0	0
9. Balikpapan	0	0	0

Kabupaten / Kota	Perusahaan Besar Sawit	Kapasitas Produksi TBS (ton/jam)	
		Terpasang	Terpakai
10. Bontang	0	0	0
KALIMANTAN TIMUR	97	5347	4651.68

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi KALTIM, 2022

### 3) Peternakan

Populasi ternak di Provinsi Kalimantan Timur sampai saat ini didominasi ternak ayam ras pedaging sebanyak 72,28 juta ekor, ayam kampung 4,96 juta ekor dan ayam ras petelur 1.975,93 ribu ekor. Sedangkan untuk populasi sapi potong hanya sebesar 124,93 ribu ekor dan babi sebanyak 78,58 ribu ekor yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota.

Tabel II.99  
Populasi Ternak di Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2018-2022 (ekor)

No	Hewan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Sapi Potong	117.504	119.485	119.974	121.290	124.930
2	Sapi Perah	110	91	87	76	78
3	Kambing	66.378	67.892	69.929	68.997	71.068
4	Domba	439	590	635	694	714
5	Babi	78.968	82.546	83.652	76.292	78.581
6	Kerbau	6.157	6.194	6.552	6.539	6.734
7	Kuda	97	102	95	143	146
8	Kelinci	14.189	8.859	10.830	11.044	
9	Ayam Kampung	4.569.169	4.372.415	4.435.205	4.815.976	4.960.453
10	Ayam Ras Pedaging	66.672.445	67.886.566	59.402.832	55.877.917	72.283.207
11	Ayam Ras Petelur	1.055.432	853.693	1.218.994	2.263.835	1.975.927
12	Itik	248.978	254.683	254.749	325.441	335.203

Sumber: DPKH Provinsi KALTIM, 2022

Untuk mendukung program pemerintah berupa swasembada dan ketahanan pangan, maka jumlah ketersediaan daging sapi harus mampu mengimbangi jumlah kebutuhan daging sapi masyarakat di Kalimantan Timur dengan mutu yang baik dan harga yang terjangkau sehingga kebutuhan akan daging sapi terpenuhi. Ketersediaan daging sapi sampai saat ini belum bisa mengimbangi kebutuhan akan daging sapi setiap tahunnya untuk masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur dan hanya mampu memenuhi sekitar 30% kebutuhan. Hal ini dikarenakan populasi sapi di Kalimantan Timur masih tergolong sedikit, sehingga masih harus memasok dari luar daerah seperti dari Sulawesi Selatan, NTT, NTB.

Keterbatasan fasilitas yang pada umumnya menimbulkan efek langsung untuk usaha peternakan juga mempengaruhi produksi daging sapi, serta adanya kecenderungan peternak berusaha sendiri. Sehingga sebagai upaya mendorong pemenuhan konsumsi daging sapi maka Pemerintah Kalimantan Timur telah melakukan strategi pengembangan peternakan sapi pada lahan bekas tambang melalui fasilitasi *miniranch* dan areal kebun sawit melalui Program Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA).

Tabel II.100  
Jumlah *Miniranch* di Provinsi Kalimantan Timur

No	Kab/Kota	2019	2020	2021	2022
1	Paser	1	2	3	9
2	KUBAR	1	2	3	6
3	KUKAR	-	3	5	12
4	KUTIM	2	-	4	5
5	Berau		1	5	8
6	PPU	1	2	3	4
7	MAHULU	-	2	-	2
8	Balikpapan	-	-	-	2
9	Samarinda	-	-	-	1
10	Bontang	-	-	1	1
Kalimantan Timur		5	12	24	49

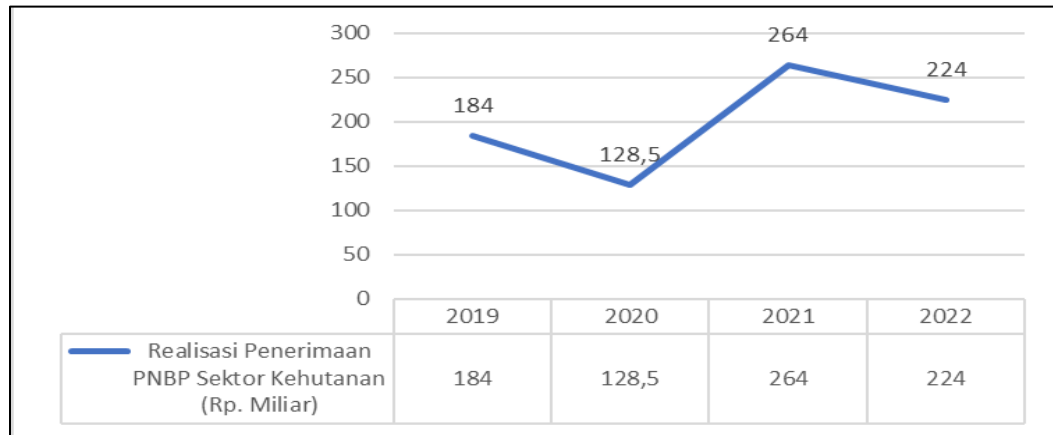
Sumber: *Siranch, DPKH Provinsi KALTIM, 2022*

#### D. Kehutanan

Peraturan perundang-undangan dan kebijakan sektor Kehutanan menempatkan kewenangan terbatas dalam pemanfaatan hutan. Bilamana sebelumnya UPTD KHP dan Tahura dapat melakukan pemanfaatan Kawasan hutan, namun kemudian UPTD KPH dan Tahura berperan sebagai fasilitator dalam pemanfaatan Kawasan hutan. Perubahan kebijakan pemanfaatan hutan juga mengubah penyebutan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu menjadi Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, yang dapat melakukan pemanfaatan hutan dengan multi-usaha kehutanan.

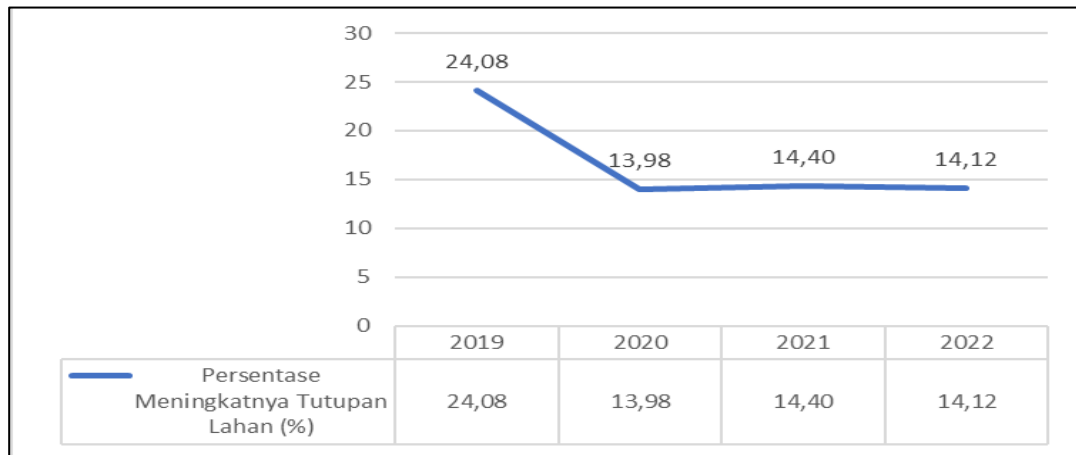
Dari pemanfaatan hutan tersebut, realisasi penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan adalah dari tahun ke tahun cenderung berfluktuatif namun jika dilihat secara umum maka terjadi penurunan. Dalam empat tahun terakhir, Pada tahun 2019 kontribusi sub sektor kehutanan sebesar Rp. 184 Milyar, lalu terjadi penurunan dengan kontribusi terendah pada tahun 2020 yakni sebesar Rp. 128,5 Milyar. Kontribusi terbesar sub sektor kehutanan terjadi pada tahun 2021 yang

mencapai Rp. 264 Milyar sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 224 Milyar.



Gambar II.82  
Realisasi PNPB Sektor Kehutanan  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2022 (Rp. Miliar)  
(Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2022)

Permasalahan lingkungan hidup di Kalimantan Timur yang berasal dari alih fungsi lahan dan hutan tidak sepenuhnya diantisipasi kerusakannya sehingga berdampak pada peningkatan jumlah bencana banjir dan tingginya emisi dari pembukaan lahan. Perubahan tutupan lahan di Kalimantan Timur dari tahun 2019 hingga 2022 mengalami perubahan tutupan lahan dari satu tipe menjadi tipe lainnya, dengan laju perubahan Persentase Tutupan Lahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 sebesar 24,08%, dan pada tahun 2020 mengalami penurunan terendah yakni 13,98%, pada tahun 2021 meningkat sebesar 14,40%, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 14,12%. Umumnya perubahan tersebut memicu berkurangnya luasan hutan alami karena perluasan hutan tanaman, perkebunan, pertanian, pertambangan, serta meningkatnya lahan-lahan tidur seperti tanah terbuka dan semak belukar.



Gambar II.83  
Persentase Tutupan Lahan Di Kalimantan Timur  
Tahun 2019–2022 (%)  
(Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2022)

Potensi hutan yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur sangat besar. Luas hutan di Kalimantan Timur seluas 8.371.478,05 hektar yang terdiri dari hutan produksi konversi, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan lindung dan KSA/KPA.

Tabel II.101  
Rehabilitasi Hutan dan Lahan

No	Tahun	Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi (Ha)
1.	2018	38.771,77
2.	2019	66.302,27
3.	2020	38.737,80
4.	2021	39.900,80
5.	2022	1.144,00
TOTAL		184.856,64

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2022

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tanggal 5 Juli 2018 tentang Luas Lahan Kritis Nasional Tahun 2018, Luas Lahan Kritis di Provinsi Kalimantan Timur seluas 275.272 Hektar (diperbaharui setiap 5 tahun). Pada tahun 2018 luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 38.771,77 Hektar. Pada tahun 2019 luas lahan kritis yang direhabilitasi mengalami peningkatan seluas 66.302,27 hektar. Pada tahun 2020 luas lahan kritis yang direhabilitasi mengalami penurunan seluas 38.737,80 hektar. Pada tahun 2021 luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 39.900,80 hektar dan pada tahun 2022 luas lahan kritis yang direhabilitasi seluas 38.866,17 hektar.

Jumlah total lahan kritis yang direhabilitasi hingga tahun 2022 adalah 222.578,81 hektar dengan persentase 80,86%.

Pengawasan terhadap gangguan hutan tidak dilakukan jauh di provinsi, namun menjadi efektif ketika dilakukan oleh KPH yang berada dekat dengan lokasi. Walaupun pada level tertentu, harus memberikan perhatian terhadap wilayah-wilayah di luar kawasan hutan. Terutama untuk wilayah yang di atasnya masih ditumbuhi pohon dan masih menjadi aset negara. Ini dapat ditemui di wilayah-wilayah berhutan yang akan dikonversi. Selain itu, pembinaan dan pengawasan kepada industri pengolahan kayu tetap harus dilakukan. Karena sangat mungkin di industri pengolahan ditemukan bahan baku dari sumber yang tidak sah. Hal ini merupakan tugas dan fungsi untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hukum atas hilangnya aset-aset negara tersebut. Hal lain yang juga penting adalah bagaimana mendorong SDM untuk lebih cerdas dan profesional dalam menangani perkara-perkara ilegal *logging*/kebakaran hutan, memberikan dalam memberikan keterangan ahli untuk tujuan-tujuan penyidikan/penyelidikan, termasuk juga penanganan pelanggaran administratif kehutanan (perdata) yang dikoordinir oleh Dinas Kehutanan Provinsi.

Tabel II.102  
Jumlah Luas Hutan yang Rusak/Terbakar/Perambahan/Ilegal Logging  
Tahun 2022

No	Kab/Kota	Jumlah Luas Hutan yang Rusak/ Terbakar/Perambahan/Ilegal Logging (dalam Ha)
1.	Kab. Berau	1.935
2.	Kab. Kutai Timur	2.157
3.	Kab. Kutai Kartanegara	2.518
4.	Kab. Kutai Barat	495
5.	Kab. PPU	1.136
6.	Kab. Paser	2.054
7.	Kab. Mahakam Ulu	64
8.	Kota Bontang	17
9.	Kota Balikpapan	25,84
TOTAL		10.401,84

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2022

Guna optimalisasi daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis dan pemulihan cadangan sumber daya alam, peningkatan kualitas hutan dan lahan dapat dicapai dengan menurunkan laju kerusakan hutan (per tahun) melalui upaya menurunkan luas lahan kritis dan mempertahankan kelestarian hutan, diantaranya dengan menjaga hutan dari ilegal *logging* dan kebakaran hutan yang merupakan penyebab kerusakan

hutan. Melalui Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam ekosistemnya di tahun 2022 berorientasi pada menurunnya intensitas terjadinya gangguan hutan dalam bentuk aktivitas kebakaran hutan, ilegal *logging*/perambahan, dan yang menjadi kewenangan Dinas Kehutanan. Persentase pencegahan kerusakan hutan pada tahun 2022 sebesar 0,12% dan persentase pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2022 sebesar 0,0012%. Beberapa pencegahan kerusakan hutan yang dilakukan adalah patroli pencegahan kerusakan hutan yang melibatkan masyarakat, sosialisasi pencegahan kerusakan hutan serta pembentukan dan pembinaan Masyarakat Mitra Polhut (MMP). Dan untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan kegiatan belanja sarana prasarana Karhutla (perlengkapan lapangan, alat pemadam kebakaran/selang pemadam, pompa air mesin pemadam, *drone* pemantau kebakaran hutan) patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan masyarakat, sosialisasi penyadartahuan kebakaran hutan, pembentukan dan pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA). Namun hal ini belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan jumlah personil Polisi Kehutanan, Masyarakat Mitra Polhut dan Masyarakat Peduli Api masih belum memadai.

Pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan berasal dari hutan alam dan tanaman. Produksi hasil hutan kayu mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 4.104.271,21 m<sup>3</sup> menjadi 4.471.286,16 m<sup>3</sup> di tahun 2022. Hal tersebut disebabkan adanya faktor pendukung yaitu 1). Meningkatnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Rencana Kerja Tahunan (RKT) kepada Unit Manajemen terkait aspek produksi, lingkungan dan sosial; 2.) Melakukan Monitoring dan Evaluasi pada pemegang Izin terkait penatausahaan hasil hutan; 3). Adanya akses ke sistem pelaporan (SI-PUHH, SI-CAKEP, SI-HHBK, SI-PNBP, SIMPONI) sehingga produksi Hasil Hutan unit manajemen dapat terpantau melalui sistem. Namun demikian, adapun yang menjadi penghambat pada pemanfaatan hasil hutan kayu yaitu: 1). Realisasi Produksi Hasil Hutan Kayu menurun karena adanya beberapa faktor: a). Curah hujan tinggi menyebabkan produksi terganggu; b). Peralatan Produksi yang sudah berumur sehingga produktivitas alat rendah; c). Harga kayu yang menurun cukup tajam (terutama pada bulan – bulan terakhir) karena lesunya permintaan pasar dunia sementara biaya operasional meningkat karena kenaikan bbm, kenaikan biaya perawatan, biaya *sparespart*, dll

Sementara harga jual produksi kayu bulat tidak naik signifikan, malah cenderung turun pada beberapa bulan menjelang akhir tahun 2022, serta lesunya permintaan pasar dunia (ekspor) terhadap produk-produk olahan kayu terutama dari negara Eropa pada beberapa bulan. Tidak hanya hasil hutan kayu, produksi hasil hutan bukan kayu juga mengalami Penurunan yang signifikan yakni pada tahun 2021 sebesar 1.175,38 ton menjadi 826,05 ton di tahun 2022. Hal tersebut disebabkan karena tanaman karet sudah masuk usia siap sadap.

Tabel II.103  
Data Rekapitulasi Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi VII  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

NO	Kabupaten/Kota	Status dan Fungsi Kawasan				Jumlah Total
		HL	HP	HPK	HPT	
1	Paser	6,703.20	11,483.43	3,421.56	23,528.38	45,136.57
2	Kutai Barat	13,809.10	10,806.60	-	5,271.50	29,887.19
3	Kutai Kartanegara	5,264.61	30,362.96	1,497.82	19,193.10	56,318.49
4	Kutai Timur	11,395.93	15,947.34	685.74	9,017.65	37,046.67
5	Berau	20,963.55	18,183.52	181.72	2,615.23	41,944.01
6	Penajam Paser Utara	-	2,421.47	-	-	2,421.47
7	Mahakam Ulu	11,742.98	6,863.48	318.73	25,332.58	44,257.77
8	Balikpapan	-	127.55	-	-	127.55
9	Bontang	-	-	61.98	-	61.98
<b>TOTAL</b>		<b>69,879.36</b>	<b>96,196.35</b>	<b>6,167.55</b>	<b>84,958.44</b>	<b>257,201.70</b>

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2022

Dalam rangka mengurangi kemiskinan masyarakat sekitar hutan, menurunkan pengangguran dan memberikan akses secara legal kepada masyarakat setempat dalam pengelolaan lahan kawasan hutan, maka Pemerintah berkomitmen meningkatkan alokasi lahan kawasan hutan dari 1,7 juta hektar menjadi 12,7 juta hektar dari total kawasan hutan Indonesia untuk dikelola oleh masyarakat setempat, dan Kalimantan Timur mendapatkan luas kawasan yang dikelola sebesar 250 ribu hektar. Pelibatan peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan kawasan hutan ini, pada akhirnya menjadi cikal bakal terciptanya model pengelolaan hutan yang kini kita kenal sebagai Kebijakan Program Perhutanan Sosial (PS). Selain diharapkan dapat menjaga kawasan hutan agar tetap lestari, Program Perhutanan Sosial lahir untuk menjawab pertanyaan apakah benar bahwa hutan sebagai sumber penghidupan warga masyarakat perdesaan, telah dioptimalkan fungsinya secara sosial, sehingga dapat membantu mengurangi dan mengatasi kemiskinan, bagi warga masyarakat di dalam dan sekitar

hutan. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) merupakan instrumen yang disiapkan untuk memberikan arahan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat dibawah skema Perhutanan Sosial tersebut. Namun Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat memiliki kendala yaitu Tata Waktu Penerbitan SK Persetujuan dari KLHK Yang belum Terukur dan Lokasi PIAPS Relatif Jauh Dari Pemukiman.

Tabel II.104  
Data Rekapitulasi Perkembangan Perhutanan Sosial  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

NO	Kabupaten/ Kota	Jumlah					Luas (Ha)					Total Per Kab/Kota	
		HD	HKm	HTR	Kemitraan	HA	HD	HKm	HTR	Kemitraan	HA	Jumlah	Luas (Ha)
1	Berau	10	-	1	3	-	80.089	-	1.096	425	-	14	81.610
2	Kutai Timur	5	3	9	1	-	24.945	2.996	9.482	109	-	18	37.532
3	Kutai Kartanegara	12	29	4	-	-	43.550	8.375	3.574	-	-	45	55.499
4	Kutai Barat	5	-	3	-	1	19.706	-	989	-	48,85	9	20.744
5	Paser	2	-	-	-	1	1.550	-	-	-	7.722	3	9.272
6	Mahakam Ulu	10	-	-	1	-	30.776	-	-	96	-	11	30.872
7	Balikpapan	-	11	-	-	-	-	1.897	-	-	-	11	1.897
<b>TOTAL</b>		<b>44</b>	<b>43</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>200.616</b>	<b>13.268</b>	<b>15.141</b>	<b>630</b>	<b>7.770,85</b>	<b>111</b>	<b>237.426</b>

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2022

Selain itu, dari sektor kehutanan dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perhutanan sosial. Perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan lestari yang dapat dikelola oleh masyarakat dan mendapatkan manfaat ekonomi dari hutan. Perhutanan sosial di Kalimantan Timur pada tahun 2022 terdiri dari 5 (lima) skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemitraan dan Hutan Adat. Pada tahun 2022, perkembangan perhutanan sosial mencapai 111 unit dengan luas sebesar 237.426 hektar.

Perhutanan Sosial (*social forestry*) sebagai program pemerintah pada dasarnya sudah dimulai sekitar 4 (empat) dasawarsa lalu, namun baru menjadi program utama Kementerian LHK pada 4 (empat) tahun terakhir. Perhutanan Sosial secara resmi didefinisikan sebagai sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau

masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016).

Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sangat penting diketahui karena berhubungan erat dengan pemberdayaan masyarakat terutama di sekitar hutan. Desa yang memiliki hutan memiliki potensi membentuk KUPS. KUPS sendiri merupakan amanat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Desa yang mendapatkan Surat Keputusan (SK) kepemilikan areal hutan didorong untuk membentuk KUPS. Namun, terlebih dahulu membentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD).

KLHK membuat tingkatan kemandirian KUPS dengan beberapa kategori. Pertama adalah kategori Biru, yaitu baru mendapatkan izin/hak pengelolaan hutan sosial, Kedua adalah kategori Perak/Silver, yang berarti sudah menyusun Rencana Kerja Usaha dan melakukan kegiatan usaha. Selanjutnya Ketiga adalah Kategori Emas/Gold, yaitu yang telah memiliki unit usaha dan memasarkan produk, dan terakhir, Kategori keempat adalah Platinum, yang berarti KUPS tersebut telah memiliki pasar yang luas, baik nasional maupun internasional. Di Kalimantan Timur hingga tahun 2022 baru mencapai 2 KUPS dengan Kategori Gold, yakni Kelompok Tani Hutan Delta Mahakam, Desa Muara Jawa Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kelompok Tani Hutan Bunga Pisang, Desa Sungai Wain, Kota Balikpapan Melalui Dinas Kehutanan, Kalimantan Timur berfokus untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang telah mendapatkan izin hutan sosial.

Tabel II.105  
Perkembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)  
Di Kalimantan Timur Tahun 2022

Kabupaten/ Kota	HUTAN DESA						HUTAN KEMASYARAKATAN						HUTAN TANAMAN RAKYAT					
	Luasan (Ha)	Tingkat Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)				Jumlah KUPS	Luasan (Ha)	Tingkat Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)				Jumlah KUPS	Luasan (Ha)	Tingkat Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)				Jumlah KUPS
		Platinum	Gold	Silver	Blue			Platinum	Gold	Silver	Blue			Platinum	Gold	Silver	Blue	
Berau	80089	-	-	6	7	13	-	-	-	-	-	-	1096	-	-	-	-	-
Kutai Barat	19706	-	-	15	6	21	-	-	-	-	-	-	989	-	-	-	-	-
Kutai Kartanegara	43550	-	-	-	8	8	8375	-	1	1	12	14	3574	-	-	-	1	1
Kutai Timur	24895	-	-	-	7	7	2996	-	-	-	-	-	9482	-	-	-	-	-
Mahakam Ulu	30776	-	-	15	4	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paser	1550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Balikpapan	-	-	-	-	-	-	1400	-	1	-	24	25	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>200566</b>	-	-	<b>36</b>	<b>32</b>	<b>68</b>	<b>12771</b>	-	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>15141</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi KALTIM, 2022

## E. Energi Dan Sumber Daya Mineral

### 1) Ketenagalistrikan

Ketenagalistrikan adalah infrastruktur dasar yang menjadi fondasi bagi kegiatan ekonomi di berbagai sektor potensial, khususnya industri. Kondisi ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan tren yang semakin membaik, namun tetap memerlukan upaya peningkatan agar akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan dapat berjalan dengan optimal.

Tabel II.106  
Data Rasio Desa Berlistrik dan Rasio Elektrifikasi  
Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2022 TW IV

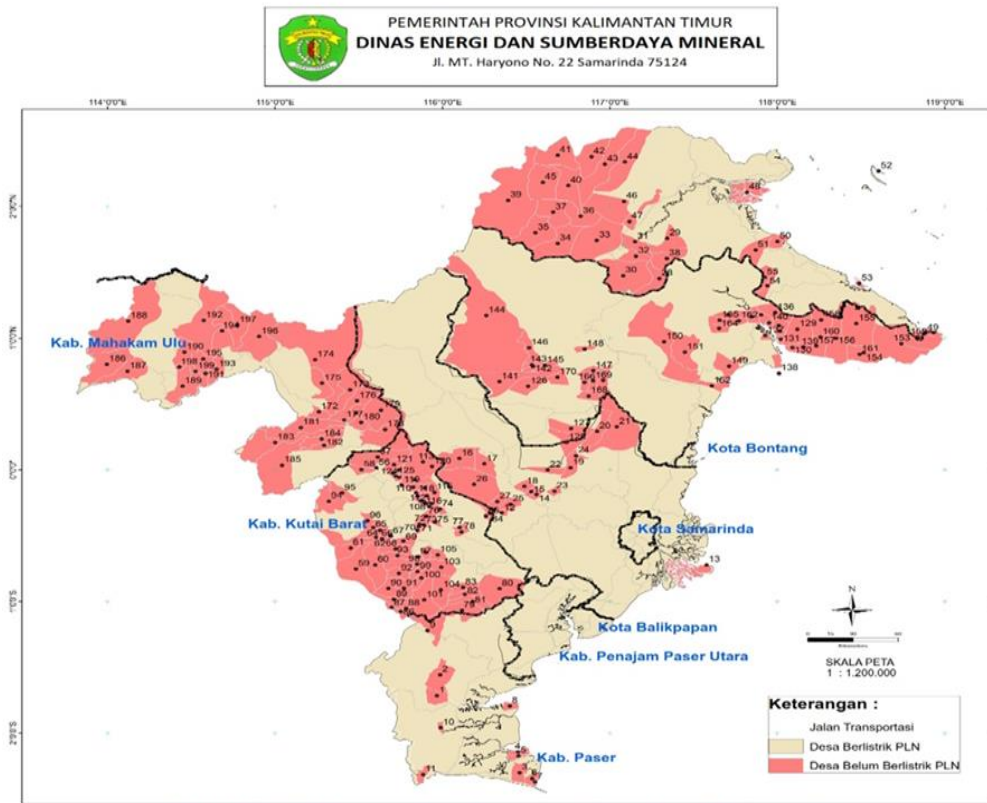
No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kel	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Desa Berlistrik			Desa Belum Berlistrik	KK Berlistrik			Rasio Desa Berlistrik (%)	Rasio Elektrifikasi / Rasio KK Berlistrik (%)
					PLN	Non PLN	Jumlah		PLN	NON PLN	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=3-8	10	11	12=10+11	13=(8/3)*100	14=(12/4)*100%
I	Balikpapan	34	240.079	710.293	34	0	34	0	224.999	416	225.415	100,00%	93,89%
II	Berau	110	88.427	263.150	82	28	110	0	68.252	13.104	81.356	100,00%	92,00%
III	Kutai Kartanegara	237	243.862	753.862	221	16	237	0	198.502	13.426	211.928	100,00%	86,90%
IV	Samarinda	59	272.054	831.220	59	0	59	0	281.599	0	281.599	100,00%	100,00%
V	Kutai Timur	141	139.068	424.743	96	45	141	0	84.798	30.053	114.851	100,00%	82,59%
VI	Bontang	15	58.292	185.393	15	0	15	0	52.447	1.123	53.570	100,00%	91,90%
VII	Penajam Paser Utara	54	59.995	186.801	54	0	54	0	46.687	2.963	49.650	100,00%	82,76%
VIII	Paser	144	94.080	288.225	133	11	144	0	77.728	6.652	84.380	100,00%	89,69%
IX	Kutai Barat	194	55.789	170.871	124	70	194	0	44.152	8.383	52.535	100,00%	94,17%
X	Mahulu	50	12.185	35.274	21	29	50	0	4.596	6.461	11.057	100,00%	90,74%
<b>TOTAL</b>	<b>KALTIM</b>	<b>1.038</b>	<b>1.263.831</b>	<b>3.849.832</b>	<b>839</b>	<b>199</b>	<b>1.038</b>	<b>0</b>	<b>1.083.760</b>	<b>82.581</b>	<b>1.166.341</b>	<b>100,00%</b>	<b>92,29%</b>

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi KALTIM, 2022

Dari total 1.263.831 jumlah KK dan 3.849.832 jumlah penduduk di Kalimantan Timur, 85,75 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik PLN dan 6,53 persen keluarga yang mendapatkan akses listrik non-PLN dan sampai dengan tahun 2022 masih terdapat 199 Desa Berlistrik Non PLN dan 82.581 KK Berlistrik Non PLN. Rasio Elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik PLN maupun listrik Non-PLN. Pada Tahun 2022, Rasio Elektrifikasi Kalimantan Timur mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni dari 91,98 persen pada tahun 2021 menjadi sebesar 92,29 persen pada tahun 2022.

Desa yang sudah terjangkau aliran listrik, baik hanya menggunakan genset dan listrik yang menyala tidak lebih dari 6 jam sehari. Terdapat 199 desa yang belum berlistrik PLN atau bisa dikatakan belum berlistrik selama 24jam, yang akan dikejar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama PLN dalam pembangunan energi berbasis tenaga surya/matahari (PLTS).

Dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi agar menjadikan Kalimantan Timur sebagai daerah berdaya saing tinggi, maka sektor energi listrik ini berperan sebagai salah satu kontributor yang cukup besar. Dalam rangka mendukung perwujudan pertumbuhan ekonomi dengan salah satunya adalah pengembangan kawasan industri, maka peran sektor energi listrik ini menjadi cukup penting sebagai penyedia energi bagi kawasan industri baru.



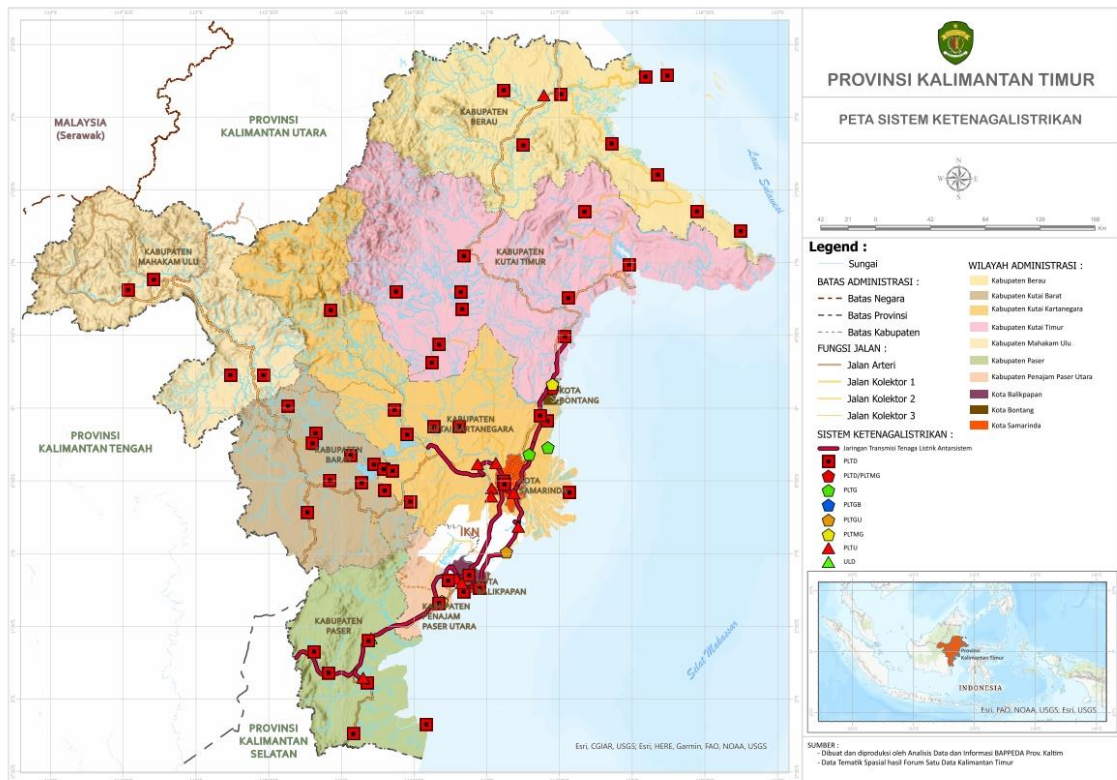
DESA BERLISTRIK NON PLN DI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021													
Kab. Paser (11 Desa)		Kab. Berau (28 Desa)		Kab. Kutai Barat (70 Desa)				Kab. Mahulu (29 Desa)					
1	Desa Rantau Buta	28	Desa Merabu	57	Desa Ujih Halang	86	Desa Randa Empas	115	Desa A bit	143	Desa Long Lees	171	Desa Long Hurai
2	Desa Rantau Layung	29	Desa Panaan	58	Desa Kelian Luar	87	Desa Tukuq	116	Desa Rambayan	144	Desa Mekar Baru	172	Desa Long Melaham
3	Desa Keladen	30	Desa Merapun	59	Desa Besiq	88	Desa Tenide	117	Desa Gunung Rampah	145	Desa Rantau Sentosa	173	Desa Memahak Besar/Ilir
4	Desa Labuangkallo	31	Desa Muara Lesan	60	Desa Bermai	89	Desa Sambung	118	Desa Jengan	146	Desa Long Nyelong	174	Desa Memahak Ulu
5	Desa Selenot	32	Desa Lesan Dayak	61	Desa Muara Niliq	90	Desa Aftan Jaya	119	Desa Muara Kalaq	147	Desa Long Noran	175	Desa Batu Majang
6	Desa Randoim	33	Desa Long Bellu	62	Desa Mantar	91	Desa Jelmu Sibak	120	Desa Tondoh	148	Desa Rantau Panjang	176	Desa Long Merah
7	Desa Senpah	34	Desa Long Duhung	63	Desa Muara Bombo	92	Desa Suakong	121	Desa Tukul	149	Desa Sekerat	177	Desa Rukun Darmi
8	Desa Harapan Baru	35	Desa Long Lamcin	64	Desa Lumpat Dahug	93	Desa Penarung	122	Desa Muyub Ulu	150	Desa Tepian Langsat	178	Desa Matalbaq
9	Desa Kepala Telake	36	Desa Long Keluh	65	Desa Muara Tokong	94	Desa Intu Lingau	123	Desa Muyub Aket	151	Desa Tebangan Lembak	179	Desa Tri Panig Makmur
10	Desa Luan	37	Desa Long Pelay	66	Desa Muara Nyahing	95	Desa Lakan Bilem	124	Desa Linggang Muyub Ilir	152	Desa Muara Bengalon	180	Desa Wana Pariq
11	Desa Muara Andeh	38	Desa Mapulu	67	Desa Kelian Luar	96	Desa Sentalar	125	Desa Gabung Baru	153	Desa Sandaran	181	Desa Laham
12	Kab. Kukar (16 Desa)	39	Desa Long Sului	68	Desa Muara Begai	97	Desa Betung	Kab. Kutai Timur (45 Desa)	154	Desa Manubar	182	Desa Long Gelawang	
13	Desa Tanjung Batuq Hara	40	Desa Long Lalai	69	Desa Lotaq	98	Desa Kiaq	126	Desa Long Poq Baru	155	Desa Tadoan	183	Desa Muara Ratah
14	Desa Sepatin	41	Desa Punan Segah	70	Desa Jerang Dayak	99	Desa Tendiq	127	Desa Senambah	156	Desa Marukanan	184	Desa Danum Paroy
15	Desa Muhuran	42	Desa Long Ayap	71	Desa Mendung	100	Desa Penawang	128	Desa Mulupan	157	Desa Susuk Luar	185	Desa Nyanbungan
16	Desa Sembelmbingan	43	Desa Long Anyan	72	Desa Jerang Melayu	101	Desa Lendan Liang Naju	129	Desa Kerayaan	158	Desa Susuk Dalam	186	Desa Naha Tifab
17	Desa Lamin Putih	44	Desa Punan Malinau	73	Desa Dasaq	102	Desa Kenyanan	130	Desa Tanjung Manis	159	Desa Tanjung Mangkalat	187	Desa Naha Slat
18	Desa Teluk Muda	45	Desa Punan Mahaka	74	Desa Tanjung Pagar	103	Desa Rikong	131	Desa Peridan	160	Desa Susuk Tengah	188	Desa Long Apari
19	Desa Teluk Indah	46	Desa Baru Rajang	75	Desa Gunung Bayar	104	Desa Kendisq	132	Desa Saka	161	Desa Manubar Dalam	189	Desa Delang Kerohong
20	Desa Tunjungan	47	Desa Sidukung Indah	76	Desa Muara Belan	105	Desa Muara Ponaq	133	Desa Mandu Dalam	162	Desa Kadungan Jaya	190	Desa Long Pakaq
21	Desa Menamang Kiri	48	Desa Pegat Batumbu	77	Desa Muara Ohong	106	Desa Sakaq Lotog	134	Desa Semparau	163	Desa Pengadan Baru	191	Desa Long Lunuk
22	Desa Menamang Kanan	49	Desa Teluk Sumban	78	Desa Tanjung Jone	107	Desa Sakaq Tada	135	Desa Pelawan	164	Desa Mata Air	192	Desa Long Isun
23	Desa Kupang Baru	50	Desa Tabalar Muara	79	Desa Gunungq	108	Desa Gemuruh	136	Desa Tepian Terap	165	Desa Bukit Permata	193	Desa Naha Aru
24	Desa Bukit Jerinq	51	Desa Tabalar Ulu	80	Desa Perend Taliq	109	Desa Karangan	137	Desa Kolek	166	Desa Beno Harapan	194	Desa Datar Naha
25	Desa Liang Buaya	52	Desa Teluk Alulu	81	Desa Tanjung Soke	110	Desa Merazaq	138	Desa Pulau Miang	167	Desa Muq Rahayu	195	Desa Lunq Ubiq
26	Desa Melintang	53	Desa Balkukup	82	Desa Deraya	111	Desa Linggang Marimun	139	Desa Penupuk	168	Desa Mawai Indah	196	Desa Long Tuyuq
27	Desa Enggelam	54	Desa Biatan Ulu	83	Desa Lempur	112	Desa Gadur	140	Desa Mandu Pantai Sejar	169	Desa Humba Lesan	197	Desa Liu Mulang
28	Desa Muara Enggelam	55	Desa Bukit Makmur	84	Desa Loa Deras	113	Desa Linggang Muara Ba	141	Desa Long Bantuq	170	Desa Meian	198	Desa Long Pakaq Baru
29		56	Desa Kelwai	85	Desa Minta	114	Desa Muara Jawaq	142	Desa Long Pejeng			199	Desa Long Lunuk Baru

Gambar II.84

Data Desa BerlistriK Non PLN

(Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi KALTIM, 2022)

Sistem ketenagalistrikan Kalimantan Timur ditransmisikan dari satu kesatuan sistem interkoneksi yang disebut Sistem Mahakam yang terkoneksi dengan Sistem Barito Kalimantan Selatan. Dengan demikian dalam pemenuhan kebutuhan listrik, Kalimantan Timur tidak hanya ditopang oleh pembangkit listrik yang ada di Kalimantan Timur namun juga Kalimantan Selatan.



Gambar II.85  
Peta Sistem Ketenagalistrikan  
(Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2022)

Tersedianya listrik di seluruh desa berbasis potensi lokal, potensi energi matahari selalu ada setiap perdesaan di Provinsi Kalimantan Timur ditambah dengan luasan wilayah merupakan Provinsi Peringkat 2 di NKRI sehingga dalam pembangunan energi berbasis tenaga surya/matahari sangat lebih baik. Dalam wilayah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai 7 Kabupaten (Paser, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, & Mahakam Ulu dan 3 Kota (Samarinda, Balikpapan & Bontang) dengan desa/kelurahan sebanyak 1.038 desa/kelurahan. Desa Belum Berlistrik PLN tahun 2021 sebanyak 199 desa yang mana diantaranya desa-desa tersebut akan dibangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Pembangunan PLTS Terpusat merupakan satu diantara program unggulan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Adapun pelaksanaan program unggulan pembangunan PLTS Terpusat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.107  
Data Listrik di Seluruh Desa Berbasis Potensi Lokal

NO.	TAHUN	AKTIFITAS	LOKASI	OPD PENANGGUNG JAWAB	OUTPUT/OUTCOME
1	2019				
2	2020	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat	Desa Rantau Buta, Kec. Batu Sopang, Kab.Paser	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	51 Pelanggan, kapasitas 23 kWp
			Desa Sandaran, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur		130 Pelanggan, kapasitas 65.34 kWp
Desa Sandaran, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur	54 Pelanggan, kapasitas 27.72 kWp				
3	2021	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat	Desa Tadoan, Kec. Sandaran, Kab. Kutai Timur		203 Pelanggan, kapasitas 58.80 kWp
			Desa Enggelam, Kec. Muara Wis, Kab. Kutai Kertanegara		201 Pelanggan, kapasitas 83.16 kWp
			Dusun Ketibeh Desa Enggelam, Kec. Muara Wis, Kab. Kutai Kertanegara		91 Pelanggan, kapasitas 47.04 kWp
			Desa Long Lamcin, Kec. Kelay, Kab. Berau		67 Pelanggan, kapasitas 29.40 kWp
			Desa Rantau Layung, Kec. Batu Sopang, Kab. Paser		79 Pelanggan, kapasitas 33.60 kWp
			Desa Tanjung Soke, Kab. Bongan, Kab. Kutai Barat		49 Pelanggan, kapasitas 29.40 kWp
4	2022	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat	Desa Selengot, Kec. Tanjung Harapan, Kab. Paser		293 Pelanggan, kapasitas 73.65 kWp
			Desa Pegat Betumbuk, Kec. Pulau Derawan, Kab. Berau		139 Pelanggan, kapasitas 40.45 kWp
			Desa Menamang Kanan, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kertanegara		208 Pelanggan, kapasitas 65.54 kWp
			Desa Menaman Kiri, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kertanegara		141 Pelanggan, kapasitas 37.45 kWp
			Desa Long Duhung, Kec. Kelay, Kab. Berau		69 Pelanggan, kapasitas 21.89 kWp
5	2023	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat	Desa Pegat Betumbuk, Kec. Pulau Derawan, Kab. Berau		
			Desa Long Sului, Kec. Kelay, Kab. Berau		
			Desa Lemper dan Desa Seraya, Kec. Bongan, Kab. Kutai Barat		
			Desa Mata Libaq, Kec. Long Hubung, Kab. Mahakam Ulu		
			Desa Ujoh Halang, Kec. Long Iram, Kab. Kutai Barat		
			Dusun Muluy Desa Swan Slutung, Kec. Muara Komam, Kab. Paser		
			Desa Labuan Kallo, Kec. Tanjung Harapan, Kab. Paser		

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi KALTIM, 2022

Pembangunan PLTS Terpusat merupakan satu diantara program unggulan Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Pada tahun 2020 pembangunan PLTS Terpusat berlokasi di Paser dengan jumlah 51 pelanggan dan Kutai Timur dengan jumlah 184 pelanggan dengan jumlah pembangunan 235 Pelanggan pada tahun 2020. Pada tahun 2021 pembangunan PLTS Pusat berlokasi di Kutai Timur dengan jumlah 203 pelanggan, Kutai Kartanegara dengan jumlah 292 pelanggan, Berau dengan jumlah 67 pelanggan, Paser dengan jumlah 79 pelanggan, dan Kutai Barat dengan jumlah 49 pelanggan dengan jumlah pembangunan 690 pelanggan pada tahun 2021. Pada tahun 2022 pembangunan PLTS Pusat berlokasi di Paser dengan jumlah 293 pelanggan, Berau dengan jumlah 208 pelanggan, dan Kutai Kartanegara dengan jumlah 349

pelanggan dengan jumlah pembangunan 850 Pelanggan pada tahun 2022, dimana pada tahun 2022 ini masih dalam proses pembangunan.

Infrastruktur listrik di Provinsi Kalimantan Timur memang perlu pembenahan, utamanya dalam pendistribusian listrik ke seluruh masyarakat. Oleh karena itu, PLN berusaha meningkatkan produksi tenaga listrik mencapai 4.273.525 MWh pada tahun 2019. Jumlah Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sebanyak 1.038 Desa dan telah memiliki listrik (Desa Berlistrik) yang bersumber dari PLN maupun Non-PLN (Genset, PLTS dan lain-lain). Desa berlistrik yang bersumber dari PLN sebanyak 839 Desa dan yang bersumber dari non-PLN sebanyak 199 Desa, sehingga rasio desa berlistrik pada tahun 2020 telah mencapai 100 persen. Sejalan dengan peningkatan rasio desa berlistrik, rasio elektrifikasi Kalimantan Timur juga mengalami peningkatan yakni sebesar 90,21 persen pada tahun 2020 menjadi 91,98 persen pada tahun 2021.

Tabel II.108  
Pelanggan Listrik Rumah Tangga Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2016-2020

NO	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pelanggan listrik rumah tangga	774.995	832.528	1.018.222	1.089.707	1.163.243
2	Banyaknya tenaga listrik rumah tangga yang terjual (GWh)	1.801,72	1.748,94	2.053,4	2.213,4	2.379,9

Sumber: PT. PLN Wilayah KALTIMRA

## 2) Energi Baru Terbarukan (EBT)

Potensi energi baru terbarukan di Kalimantan Timur cukup besar, namun pemanfaatannya belum optimal, sementara pengembangan energi baru dan terbarukan masih mengalami kendala, lokasi sebagian besar berada di kawasan tertinggal, terdepan, terluar (3T) serta kurangnya dukungan infrastruktur yang memadai. Adapun potensi energi yang bersumber dari energi terbarukan yang cukup besar seperti energi air,

surya, angin, *bioenergy*, panas bumi, gelombang laut dan lahan bekas tambang.

Pembangkit Listrik Tenaga Matahari (*Solar Cell*) merupakan pembangkit listrik yang mampu mengonversi sinar matahari menjadi arus listrik. Energi matahari sesungguhnya merupakan sumber energi yang paling menjanjikan mengingat sifatnya yang berkelanjutan (*sustainable*) serta jumlahnya yang sangat besar. Untuk wilayah khatulistiwa seperti Kalimantan Timur, potensi radiasi sinar matahari mencapai 1000 Watt Peak (Wp) per meter persegi. Dengan efisiensi panel surya 20%, maka dapat diperoleh daya listrik sebesar 200 Wp per meter persegi. Bila diasumsikan daya yang dapat diperoleh dari sistem tenaga surya sebesar 1 MWp per Hektar, maka apabila luasan void tambang yang dibangun dengan sistem tenaga surya terapung seluas 1000 Ha akan diperoleh daya listrik sebesar 1 GWp.

Tabel II.109  
Rincian data Kualitatif/Absolut Terkait Presentasi Pemanfaatan EBT (Realisasi Capaian 7,27)

JENIS ENERGI	UNIT	2022	Konversi ke BOE	Satuan Energi	
				BOE	TOE
Minyak Bumi					
Total konsumsi					
1. BBM					
Avgas	KL		5,53	0	0
Avtur	KL	105932	5,8907	624013,6324	87361,90854
MFO 180/380	KL	89128	6,9612	620437,8336	86861,2967
RON 95/98	KL	1754	5,8275	10221,435	1431,0009
RON 88	KL	0	5,8275	0	0
RON 89/90	KL	480251	5,8275	2798662,703	391812,7784
RON 92	KL	52472	5,8275	305780,58	42809,2812
IDO	KL	0	6,6078	0	0
CN 48 (murni)	KL	23714,776	6,4871	153840,1234	21537,61727
CN 51 (murni)	KL	63526	6,4871	412099,5146	57693,93204
CN 53 (murni)	KL	16514	6,4871	107127,9694	14997,91572
Kerosene	KL	237	5,9274	1404,7938	196,671132
Biogasoil (B20/B30)	KL	2104371	6,4871	9555885,58	1337823,981
2. LPG	MT	112650	8,5246	960296,19	134441,4666
Total				15549770,35	2176967,85

JENIS ENERGI	UNIT	2022	Konversi ke BOE		Satuan Energi	
					BOE	TOE
Batubara						
total Konsumsi						
1. Bahan Bakar Pembangkit	Ton	660238,804	4,2		2773002,977	388220,4168
2. Bahan Bakar Industri	Ton		4,2		0	0
Total		660238,804			2773002,977	388220,4168
Gas Bumi						
Total Konsumsi						
1. bahan Bakar Pembangkit	mmscf	3710,36888	0,1796		666,3822508	93,29351512
2. Bahan bakar industri	mmscf	264,996	0,1796		47,5932816	6,663059424
3. Jargas Rumah Tangga	sambungan RT/mmscf	62735	0,1796		11267,206	1577,40884
4. Sektor Komersial	mmscf		0,1796		0	0
Total					11981,18153	1677,365415
Energi baru terbarukan (EBT)						
Non Listrik						
Total konsumsi						
1. FAME	KL	2104371	6,4871		1010193,618	141427,1066
2. Etanol	KL		2,2979		0	0
3. Biomassa	Ton		3,2979		0	0
4. Kapasitas Biogas RT	m3/tahun	183898,4	0,00634		1165,915856	163,2282198
Total					1011359,534	141590,3348
Listrik			Cf	Eff		
Kapasitas Terpasang On Grid Off Grid			E	F		
1. PLTA	MW		0,6	0,33	0,00	0
2. PLTB	MW		0,5	0,25	0,00	0
3. PLT BIOGAS	MW	9	0,8	0,25	154652,54	21651,35616
4. PLT Biomassa	MW	11	0,8	0,25	189019,78	26462,76864
5. PLTM	MW		0,6	0,25	0,00	0
6. PLTMH	MW	0,529	0,6	0,25	6817,60	954,4639507
7. PLTP	MW		0,9	0,33	0,00	0
8. PLTS/PLTS ATAP	MW	9,16	0,2	0,13	75674,00	10594,36017
9. PLTS Hybrid	MW	0,15	0,17	0,13	1053,32	147,4651662

JENIS ENERGI	UNIT	2022	Konversi ke BOE		Satuan Energi	
					BOE	TOE
10. PLT Sampah	MW		0,8	0,25	0,00	0
11. PJUTS	MW				0,00	0
12. LTHSE	MW				0,00	0
Total					427217,24	59810,41409
Total EBT					1438576,78	201400,7489
Perhitungan Bauran Energi 2022						
Energi Primer		MTOE		%		
Minyak Bumi		2176967,85		78,64011443		
Batubara		388220,4168		14,02395447		
Gas Bumi		1677,365415		0,06059263		
EBT		201400,7489		7,275338468		
Total		2768266,381		100		

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi KALTIM, 2022

Bio-energi yang berasal dari biomassa, baik dalam bentuk cair, gas atau padat yang didukung oleh:

- limbah ternak seperti kotoran sapi perah, potong, kambing dan unggas.
- limbah industri seperti tahu, kelapa sawit (POME), dan tapioka.
- limbah rumah tangga dan perkotaan seperti kotoran manusia, sampah industri dan rumah tangga, *biomass* seperti hutan tanaman energi, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, limbah kayu, sekam padi, tongkol jagung, cangkang sawit, tangkos sawit.

Tabel II.110  
Potensi Bioenergi dari Pome

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Pabrik Minyak Sawit	TBS Diolah / Tahun (ton)	Pome Yang Dihasilkan (m3)	Listrik Yang Dihasilkan (MWh)	Kabupaten Pembangkitan (MW)
1	Kutai Timur	34	8.325.264	4.995.158	264.978	32,6
2	Kutai Kartanegara	18	4.260.823	2.556.494	135.614	16,7
3	Berau	11	3.064.374	1.838.624	97.534	12
4	Kutai Barat	6	1.736.580	1.058.148	56.132	6,9
5	Penajam Paser Utara	7	1.405.494	843.296	44.734	5,5
6	Paser	17	3.080.340	1.848.204	98.942	12,1
7	Mahakam Ulu	1	152.550	91.530	4.855	0,60
	Jumlah	94	22.025.425	13.231.454	702.789	86,4

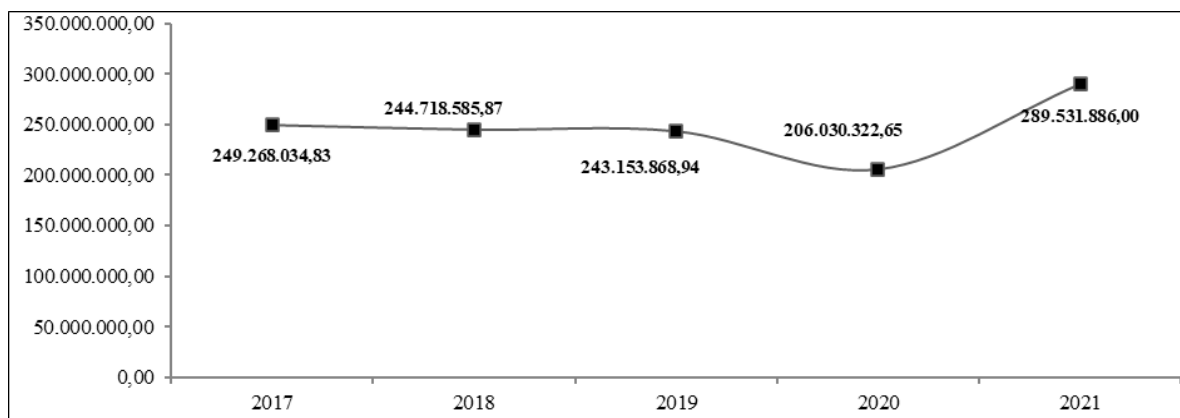
Sumber : Disbun Kaltim, 2021 (Data Diolah)

Tabel II.111  
Potensi Bioenergi dari Biomass Hutan Energi

Unit Usaha	Lokasi (Kab)	Luas (ha)	Kelas Perusahaan	Luas Alokasi HTE	Rencana Penanaman 2015-2024	Jenis Tanaman Energi
<b>Unit Usaha yang telah mengembangkan THE di Kaltim</b>						
PT. Dharma Hutani Makmur	Kutai Kartanegara	41,545	Pertukangan dan energi	7,500	7,500	Akasia, Gamal, Giant Bamboo
<b>Unit Usaha yang Berkomitmen untuk Mengembangkan Bioenergi di Kaltim</b>						
PT. Inhutani I	Paser	16,816		0	0	
PT. Hutan Mahligai	Kutai Barat	11,275		100	0	
PT. Belantara Pusaka	Berau	14,010		500	500	
PT. Oceanic Timber Product	Berau	16,600		3000	0	

### 3) Pertambangan

Produksi batubara tahun 2021 adalah sebesar 289,53 juta ton, yang menunjukkan peningkatan sebesar 40,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan produksi batubara disebabkan oleh permintaan batubara yang meningkat dari negara tujuan seperti Tiongkok dan India akibat mulai berkurangnya pandemi COVID-19 serta peningkatan yang signifikan pada harga batubara global.



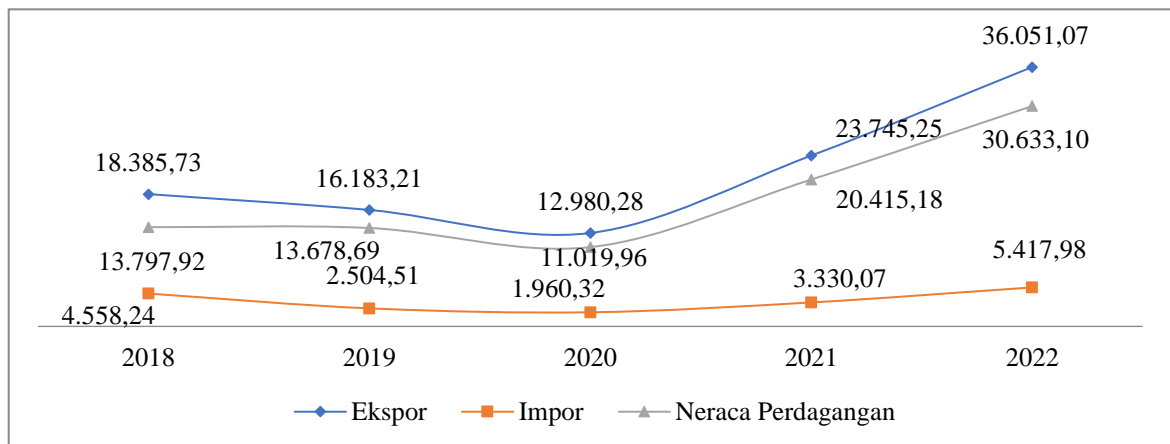
Gambar II.86  
Produksi Pertambangan Batubara Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2017-2021 (Ton)

(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022)

Pada tahun 2022 produksi pertambangan unggulan lainnya di Kalimantan Timur terdapat penurunan produksi minyak bumi dan gas bumi. Penurunan produksi migas tak lepas dari pengaruh pandemi COVID-19 yang berdampak pada penurunan kinerja aktivitas hulu migas.

#### F. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kaltim lebih kecil dibandingkan dengan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Persoalan ini disebabkan oleh masih belum optimalnya daya saing produk dan masih terbatasnya pasar produk, karena kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk belum optimal dan belum luasnya jangkauan jaringan perdagangan.



Gambar II.87  
Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022)

Kinerja perdagangan sangat dipengaruhi oleh nilai transaksi, kerja sama pemasaran, pelaku usaha, dan nilai ekspor. Selama periode 2018-2022, neraca perdagangan Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan neraca positif karena nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. Sementara dilihat dari tren pertumbuhan mengalami surplus perdagangan.

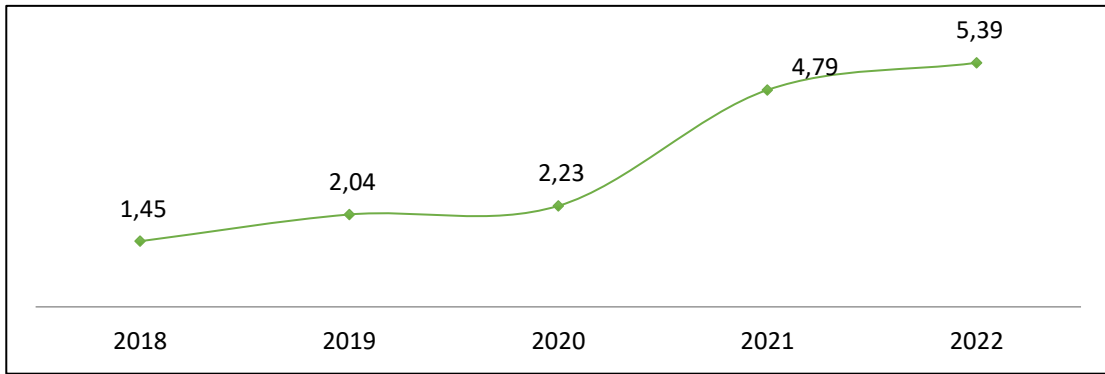
Tabel II.112  
Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2018 – 2022 (Juta US\$)

No	Golongan Barang	2018	2019	2020	2021	2022
Migas		4.302,83	3.356,38	2.068,20	1.605,15	2.998,12
1	Minyak Mentah	334,70	12,63	7,27	-	8,48
2	Hasil Minyak	12,97	224,05	108,64	7,40	763,12
3	Gas	2.977,57	1.831,52	1.032,38	1.597,75	2.226,52
Non Migas		13.230,03	15.029,36	14.113,59	22.554,76	33.052,95
1	Hasil Tambang	13.580,80	12.408	9.600,36	17.767,61	27.665,96
2	Hasil Industri	1.445,92	1.696,72	2.222,52	4.780,52	5.377,14
3	Hasil Pertanian	4,21	8,87	9,11	6,63	9,85
Total Ekspor		18.385,73	16.183,21	12.980,28	24.159,90	36.051,07

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022

Ekspor Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 32,84 persen dibanding tahun 2021 yaitu dari US\$ 24,16 miliar menjadi US\$ 36,05 miliar. Peningkatan ekspor tahun 2022 disebabkan oleh naiknya nilai ekspor barang migas maupun non migas. Ekspor barang migas tahun 2022 mencapai US\$ 2,99 miliar naik sebesar 129,01 persen dibanding tahun 2021. Sementara ekspor barang non migas mencapai US\$ 33,05 miliar naik sebesar 24,39 persen dibanding tahun 2021.

Nilai ekspor komoditas Non Migas dan Batubara Provinsi Kalimantan Timur mengalami peningkatan dalam 5 tahun terakhir hingga mencapai 5,39 miliar US\$ pada tahun 2022 mengalami peningkatan 12,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,79 miliar US\$.



Gambar II.88

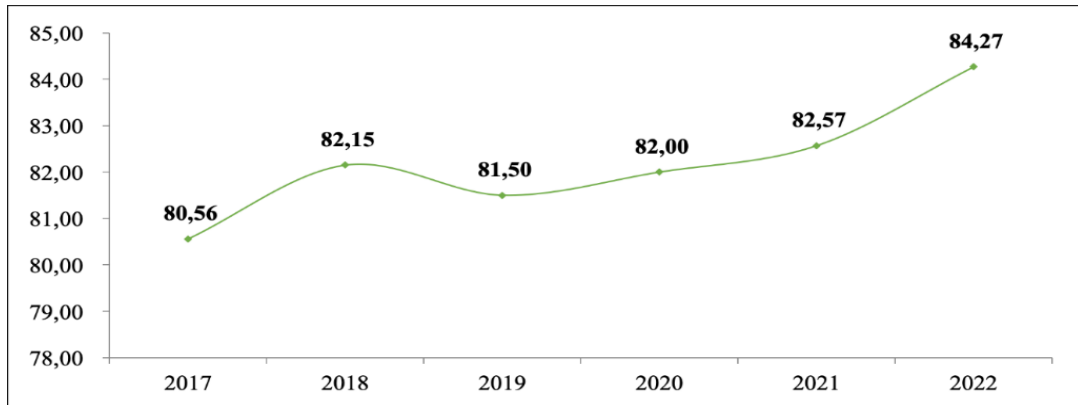
Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Miliar US\$)

(Sumber: BPS Prov KALTIM, 2022)

### 2.1.3. Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah

#### 1) Indeks Kepuasan Masyarakat

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berupaya memberikan pelayanan prima untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan berbagai fasilitas dan pelayanan pada setiap bidang pembangunan. Hasil dari berbagai program dan kegiatan terkait pelayanan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung, dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Survei Kepuasan Masyarakat pada perangkat daerah di Kalimantan Timur pada tahun 2022 meningkat di angka sementara 84,27 dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 82,57. Hal ini mengindikasikan bahwa ada kemajuan dalam kualitas pelayanan publik di Kalimantan Timur walaupun belum stabil sehingga terjadi fluktuasi pada angka IKM.



Gambar II.89  
Survei Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2017-2022

(Sumber: Biro Organisasi Provinsi KALTIM)

## 2) Nilai SAKIP

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan nilai sebesar 78,10 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Tabel II.113  
Komponen Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kalimantan Timur

KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI				
		2018	2019	2020	2021	2022
a. Perencanaan Kinerja	30	25.35	25.59	25.92	25.94	26,06
b. Pengukuran Kinerja	25	18.28	18.77	18.97	18.99	22,50
c. Pelaporan Kinerja	15	12.47	12.54	12.75	12.76	12,84
d. Evaluasi Kinerja	10	5.13	5.91	6.21	6.21	-
e. Capaian Kinerja	20	13.66	13.74	13.82	13.92	-
Nilai Hasil Evaluasi	100	77,50	74,89	76,55	77,67	78,10
Predikat Akuntabilitas Kinerja		BB	BB	BB	BB	BB
Persentase Kenaikan / Penurunan		0.2%	-3.4%	2.2%	3.7%	0,6%

Sumber: Surat Kementerian PAN dan RB Nomor: B/798/AA.05/2022 Tanggal 6 Desember 2022 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022.

Hasil evaluasi tahun 2022 “tidak diperbandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun level Perangkat Daerah.

### 3) Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Selain opini BPK, peringkat EKPPD juga menjadi salah satu gambaran akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peringkat EKPPD atau Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan penilaian terhadap dokumen LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) untuk melihat kualitas pelaksanaan otonomi daerah. Peringkat EKPPD Provinsi Kalimantan telah mencapai status skor sangat tinggi dengan peringkat ke tiga nasional. Tingkat akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga dapat dilihat melalui hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berdasarkan Evaluasi AKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 mendapat predikat BB dengan skor 77,82. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur semakin meningkat. Untuk meningkatkan kinerja akuntabilitas pemerintah daerah, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan nilai SAKIP, yaitu meningkatkan konsistensi penentuan indikator perencanaan program dan kegiatan di setiap perangkat daerah.

#### 2.1.4. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

##### A. Perencanaan

Pemerintah daerah telah menyusun dokumen perencanaan daerah Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan periodesasinya. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD dan RKPD, maka perangkat daerah juga menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Dokumen perencanaan yang disusun melalui proses penyesuaian dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan perencanaan di bawahnya. Terdapat beberapa capaian kinerja pada unsur Perencanaan yang telah baik namun masih terdapat yang belum optimal. Beberapa kinerja yang belum optimal ditunjukkan oleh indikator Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota, Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur, dan Persentase target kinerja pembangunan yang didukung oleh data. Indikator kinerja unsur Perencanaan dalam kurun waktu Tahun 2018-2022, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.114  
Capaian Indikator Kinerja Unsur Perencanaan  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
1	Proporsi program pembangunan daerah yang sinergi antara Provinsi, Nasional dan Kabupaten/Kota (%)	82,3	43,33	79,30		
2	Persentase capaian sasaran pembangunan RPJMD Kalimantan Timur (%)		83	75,00		
3	Persentase target kinerja pembangunan yang didukung oleh data (%)		80	81,48		
4	Persentase prioritas pembangunan daerah yang mencapai target (%)				43,09	93,75

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
5	Persentase program/kegiatan bidang perencanaan (Bidang Perekonomian dan SDA, Bidang PPM dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan) yang dijabarkan dalam dokumen anggaran (%)				96,97	99,61

*Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023*

## B. Keuangan

Salah satu indikator untuk mengukur keuangan daerah adalah kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal merupakan gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah. Indeks Kapasitas Fiskal diperoleh dengan membandingkan kapasitas fiskal suatu daerah terhadap kapasitas fiskal seluruh daerah. Capaian indeks kapasitas fiskal Provinsi Kalimantan Timur termasuk kategori tinggi.

Kalimantan Timur berupaya untuk mencapai kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena dana perimbangan cenderung semakin menurun. Namun peningkatan PAD tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Badan Usaha Milik Daerah yang ada belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal, Kalimantan Timur perlu upaya keras untuk melakukan transformasi sumber-sumber PAD lainnya secara bertahap, melalui peningkatan kapasitas dan kinerja BUMD, serta pengembangan nilai tambah sektor ekonomi non migas dan batu bara yang berkelanjutan seperti industri pengolahan, pariwisata, perikanan dan pertanian.

Kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui Derajat Kemandirian Fiskal Daerah/Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD). DOFD dihitung melalui perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam APBD pada tahun yang sama tidak termasuk transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan kriteria penilaian

tingkat desentralisasi fiskal, nilai DOFD Provinsi Kalimantan Timur masuk dalam kategori sangat baik karena lebih dari 50 persen. Rata-rata DOFD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018-2022 adalah 54,07 persen. Kondisi ini menunjukkan kemandirian keuangan pemerintah daerah cukup tinggi untuk membiayai pembangunan daerah.

Tabel II.115  
Derajat Otonomi Fiskal Daerah  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

Tahun	PAD (Ribu Rupiah)	Total Pendapatan (Ribu Rupiah)	DOF (Persen)
2018	5.800.270.286,00	10.669.542.802,00	54,36
2019	6.555.852.805,00	11.775.086.446,00	55,68
2020	4.116.573.388,00	8.763.476.903,00	46,97
2021	6.111.918.272,28	10.220.142.967,27	59,80
2022	8.997.262.537,26	16.804.693.776,01	53,54
Rata-rata	6.316.375.457,71	11.646.588.578,86	54,07

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, 2023

Laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur semakin membaik dan telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sejak tahun 2012 sampai 2021. Meskipun demikian, Kalimantan Timur masih menghadapi permasalahan dalam pengelolaan aset daerah terutama terkait dengan belum optimalnya identifikasi dan pengelolaan aset-aset daerah. Hal ini terjadi karena adanya pelimpahan wewenang berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal integritas kinerja, Provinsi Kalimantan Timur memperoleh peringkat keempat dari lima provinsi yang memiliki Skor Integritas Tertinggi secara nasional.

Selain itu, persoalan lain juga berkaitan dengan belum seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur memiliki status opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian, pada tahun 2012 hanya Kabupaten Kutai Kartanegara yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 8 Kabupaten/Kota masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Kabupaten Mahakam Ulu masih belum mendapatkan status opini dari BPK dan pada tahun 2020 seluruh

kabupaten/kota telah berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

C. Penelitian dan Pengembangan

Walaupun nilai capaian kinerja kelitbangan sebagaimana dimuat pada tabel di bawah mencapai target bahkan melampaui target yang dimuat dalam Renstra PD, namun masih perlu dilakukan perbaikan karena indikator tersebut belum mengukur kebermanfaatannya. Selanjutnya, pada tahun 2021 telah dilakukan perbaikan terhadap indikator kinerja sasaran yang lebih berorientasi pada pemanfaatan hasil kelitbangan, sehingga dibuatlah pemetaan pemanfaatan terhadap hasil kelitbangan.

Tabel II.116  
Capaian Kinerja Kelitbangan Tahun 2018-2021

No	Indikator	2018	2019	2020	2021
1	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (%)			26	57
2	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan IKN (%)			9	27

Sumber: LkjIP BALITBANGDA Kaltim Tahun 2021

Perolehan angka realisasi tahun 2020 sebesar 26% diperoleh dari perhitungan  $(23/88 \times 100 = 26\%)$ , sedangkan realisasi tahun 2021 diperoleh dari perhitungan  $(50/88 \times 100 = 57\%)$ . dari realisasi tersebut kemudian dapat diketahui peningkatan realisasi dari tahun 2020 ke tahun 2021. Kemudian untuk melihat sampai sejauh mana peningkatan/penurunan persentase capaian indikator kinerja sasaran, dibandingkanlah realisasi antara tahun 2021 dengan 2020, dan diperolehlah angka peningkatan sebesar 119%.  $(57/26 \times 100)$ . Peningkatan tersebut disebabkan akumulasi dari jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Hal lainnya yang mendukung peningkatan kinerja tersebut adalah inovasi yang telah

dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di bawah kepemimpinan Kepala Badan. Keberhasilan tersebut juga tak lepas dari kerja keras dan peran dari ASN Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang tetap semangat dalam melakukan kegiatan kelitbangan walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19.

Persentase hasil kelitbangan yang memanfaatkan untuk mendukung pembangunan IKN mengalami kenaikan sebesar 200% dari tahun 2020 ke 2021. Pada tahun 2020 jumlah kelitbangan yang telah dimanfaatkan sebanyak 1 judul kelitbangan dari target RENSTA 1 judul kelitbangan, sedangkan tahun 2021 terlaksana sebanyak 2 pemanfaatan judul kelitbangan dari target RENSTRA 2 judul kelitbangan. Kemudian untuk melihat sampai sejauh mana peningkatan/penurunan persentase capaian indikator kinerja sasaran, dibandingkanlah realisasi antara tahun 2021 dengan 2020, dan diperoleh angka peningkatan sebesar 200%.

#### 2.1.5. Pengawasan

##### 1. Tingkat Maturitas Sistem Intern Pemerintah (SPIP)

Capaian Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 berada pada Level 3 atau Tingkat Terdefinisi yang artinya pada tingkat ini, Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi.

Pencapaian level Maturitas SPIP Pemda Kaltim Tahun 2021 pada level 3 sesuai dengan target yang ditetapkan dan dengan capaian 100 %. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dimana yang akan dinilai dan dievaluasi meliputi antara lain Efektivitas dan Efisiensi, Keandalan Pelaporan Keuangan, Pengamanan Aset dan Ketaatan

terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Hal ini menunjukkan adanya bahwa Hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada pada level 3 atau Terdefinisi yaitu pada tingkat 4 dari 6 tingkatan, yaitu Belum ada (1), Rintisan (2), Berkembang (3), Terdefinisi (4), Terkelola dan Terukur (5) dan Optimum (6) dengan Level 0 s.d. 5.

Penilaian dilakukan terhadap 25 fokus Maturitas SPIP dan menghasilkan nilai sebesar 3,234. Dengan tingkat maturitas Terdefinisi, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim telah melaksanakan praktik secara memadai, serta pemantauan berkelanjutan dan terintegrasi namun belum didukung oleh sistem pemantauan otomatis berbasis aplikasi komputer sehingga kelemahan pengendalian tidak segera teridentifikasi. Penilaian dan Evaluasi Maturitas SPIP dilaksanakan terhadap perangkat daerah sampel sebanyak 11 Perangkat Daerah, yaitu Inspektorat, Bappeda, BPSDM, BPKAD, Dinas Perindagkop UKM, Disnakertrans, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Sosial. Pada tahun 2021 ini sebenarnya penilaian maturitas SPIP Terintegrasi yang harus dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan, namun belum dilaksanakan hal ini disebabkan belum adanya sosialisasi dan Bimtek SPIP kepada perangkat daerah yang akan ditetapkan sebagai *pilot project* Maturitas SPIP Terintegrasi. Pada tahun 2022 telah dilakukan *Quality Assurance* (QA) oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur pada perangkat daerah yang pemangku penanggung jawab atas pencapaian RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dimana dari hasil *Quality Assurance* tersebut hasil sama dengan seperti pada tahun 2021 yang pada level 3 atau pada tingkat maturitas Terdefinisi. Penilaian Maturitas pada Tahun 2022 ini ada sedikit perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya perubahan atas peraturan Perka BPKP menggunakan Perka BPKP Nomor 5 Tahun 2021 yaitu Penilaian Maturitas New SPIP Terintegrasi yang bertujuan agar penilaian Maturitas SPIP lebih

berkaitan dengan Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses serta Pencapaian Tujuan SPIP.

Namun demikian masih ditemukan beberapa kendala pada saat dilakukan evaluasi atas Maturitas SPIP antara lain:

1. Belum dilakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi, terhadap: (1). Aturan Perilaku PNS (Kode Etik) dalam rangka menilai efektivitas implementasi peraturan tersebut, (2) Standar Kompetensi dan Kesesuaian penempatan pejabat serta Struktur Organisasi dan Uraian Tata Laksananya pada Organisasi/Unit Kerja, (3) Prosedur dan hasil pelaksanaan pendelegasian wewenang, (4) Kebijakan pembinaan SDM, kesesuaian pelaksanaan rekrutmen, evaluasi kinerja pegawai sampai dengan pemberhentiannya, (5) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait dan mekanisme saling uji data antar unit kerja/ rekonsiliasi, (6) Pengamanan Aset Daerah, (7) Penerapan pemisahan tanggung jawab dan tugas, (8) Otoritas dan kejadian penting, (9) Kebijakan dan Standar Prosedur Operasional.
2. Pemprov Kaltim belum sepenuhnya melakukan pemantauan otomatis melalui sistem berbasis aplikasi komputer atas pelaksanaan kegiatan dan pelayanan publik.
3. Belum seluruh perangkat daerah melakukan identifikasi risiko dan melakukan tindak pengendalian atas dokumen penilaian risiko.
4. Pemprov Kaltim belum mengembangkan *Whistle Blowing System* (WBS) dan Informasi yang sepenuhnya berbasis komputer dan yang terintegrasi.
5. Pemprov Kaltim belum sepenuhnya melakukan identifikasi dan Evaluasi atas pelaksanaan Benturan Kepentingan.
6. Pemprov Kaltim belum mempunyai Sistem Pengendalian Froud (*Fraud Control System*) dan Implementasinya.

Tabel II.117  
Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Level Maturitas SPIP Pemda Kaltim	2	3	3	3	3

Sumber: Inspektorat Provinsi KALTIM, 2023

## 2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan/pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur, dimana dalam laporan tersebut ditemukan temuan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh obrik/entitas. Selama lima tahun terakhir, indikator ini menunjukkan peningkatan kecuali pada tahun 2021 sempat sedikit mengalami penurunan akibat ada rekomendasi yang belum atau sulit dilaksanakan. Secara umum, peningkatan ini menunjukkan bahwa hasil pemeriksaan APIP semakin banyak yang ditindaklanjuti.

Target Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP pada tahun 2022 memang belum 100% sebab jumlah rekomendasi setiap tahun yang selalu bertambah sesuai laporan hasil pemeriksaan, masih terdapat rekomendasi temuan yang sudah lama dan berlarut-larut atau sulit untuk ditindaklanjuti. Selain itu, faktor lainnya adalah masih kurangnya kesadaran dan respon dari obrik untuk penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa ditindaklanjuti selama 60 hari setelah menerima LHP, masih kurangnya pemahaman obrik terhadap rekomendasi yang diberikan dan cara untuk menindaklanjutinya, serta belum ada *reward and punishment*.

Tabel II.118  
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

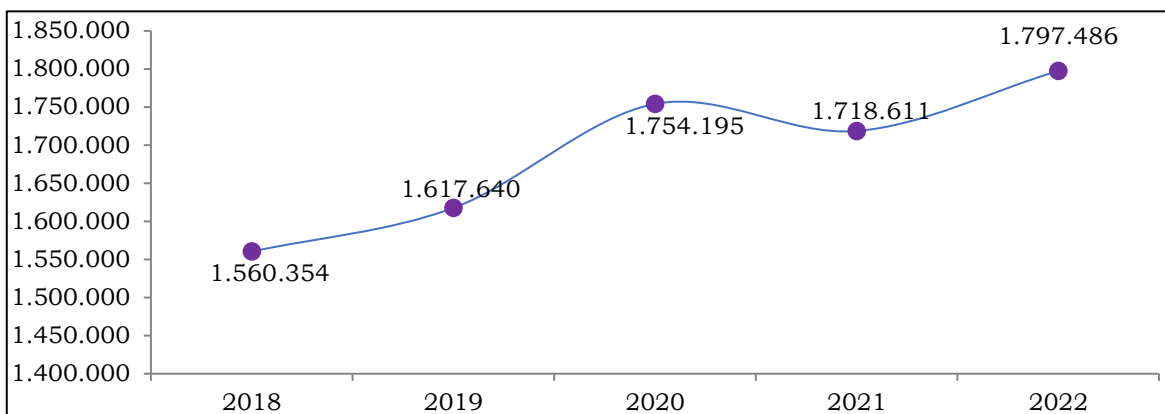
Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (%)	75	80	81	80	85

Sumber: LkjIP Inspektorat Provinsi KALTIM Tahun 2019-2022

### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

### A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator dalam melihat kemampuan ekonomi suatu daerah adalah dengan menelaah pengeluaran rata-rata per kapita setiap bulannya. Selama 5 tahun terakhir, pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita per bulan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami kenaikan yang cukup baik akan tetapi pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan yang mencapai Rp. 1.718.611,- per bulan. Namun di tahun 2022, pengeluaran konsumsi rumah tangga kembali mengalami meningkat mencapai Rp. 1.797.486,-. Penyebab naiknya pengeluaran rata-rata per kapita adalah meningkatnya pengeluaran konsumsi makanan di tahun 2022 yang mencapai Rp 813.448 (42,85 persen) dimana pengeluaran untuk tahun 2020 sebesar Rp 736.465 (45,06 persen).



Gambar II.90  
Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (Rupiah)  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

### B. Pengeluaran Konsumsi Non Pangan (Persentase Konsumsi Rumah Tangga untuk Non Pangan)

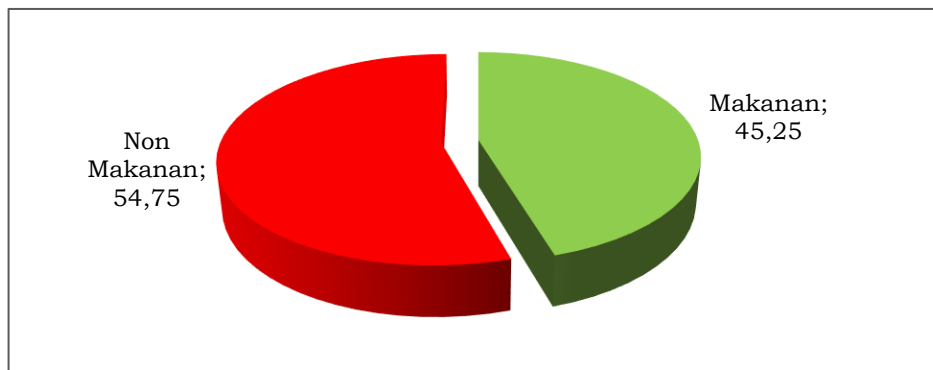
Kenaikan persentase konsumsi rumah tangga non makanan di tiap tahunnya, secara umum menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga sudah mulai fokus ke pengeluaran barang sekunder maupun tersier yang merupakan kebutuhan penunjang kehidupan dan tidak

hanya memikirkan pemenuhan kebutuhan dasarnya (terutama makanan).

Tabel II.119  
Konsumsi Rumah Tangga non Makanan Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan Non Makanan (Rp)	857.449	893.217	963.725	982.146	984.038
2	Rata-rata Pengeluaran Per Kapita/Bulan (Rp)	1.560.354	1.617.640	1.754.195	1.718.611	1.797.486
3	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Makanan (%)	54,95	55,22	54,94	57,15	54,75

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023



Gambar II.91  
Persentase Pengeluaran Konsumsi per Kapita sebulan  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

### C. Nilai Tukar Petani

Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga perdesaan di 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, NTP gabungan tahun 2019 – 2022 selalu berada di atas angka 100. Hal ini menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima petani lebih besar daripada indeks harga yang dibayarkan petani di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel II.120  
Rata-Rata Nilai Tukar Petani Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Yang Diterima Petani (It)	123,77	107,91	116,96	128,25	139,73
2.	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	128,75	102,41	104,76	106,05	110,87
3.	Nilai Tukar Petani (NTP)	96,14	105,38	111,65	120,94	126,03

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Peningkatan NTP tahun 2022 disebabkan meningkatnya NTP pada hampir seluruh sub sektor, kecuali sub sektor tanaman pangan dan perikanan yang mengalami penurunan. Selanjutnya, ada tiga sub sektor yang mengalami peningkatan NTP, yaitu sub sektor hortikultura, tanaman perkebunan rakyat dan peternakan. Penurunan NTP sub sektor Tanaman Pangan disebabkan menurunnya indeks harga yang diterima petani (It) sejak bulan Februari dan terus menurun hingga bulan Mei tahun 2022 dan mulai sedikit meningkat pada bulan Juni tahun 2022. Bahkan pada bulan Mei tahun 2022 angka indeks harga yang diterima petani dibawah 100. Artinya pada bulan Mei tersebut, harga produk pertanian tanaman pangan yang diterima petani nilainya dibawah harga tahun dasar 2018. Sedangkan penyebab menurunnya nilai NTP tahun 2022 sub sektor perikanan adalah karena sejak bulan Juli hingga Oktober, indeks harga yang diterima petani perikanan lebih rendah daripada yang harus dibayarkan. Sehingga menyebabkan NTP bulan Juli hingga Oktober tahun 2022 berada dibawah 100 yang artinya pada bulan-bulan tersebut petani perikanan merugi.

Diantara kelima sub sektor dalam pembentukan NTP, petani pada sub sektor perkebunan rakyat adalah petani yang paling sejahtera dibandingkan dengan sub sektor yang lain karena rata-rata NTP tiap tahun sudah diatas 150 artinya bahwa nilai yang diterima dari hasil produksi perkebunannya sudah 50 persen lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga maupun biaya produksi dan penambahan barang modal untuk proses produksi

perkebunannya. Untuk sub sektor yang lain masih belum aman karena nilai NTP masih berfluktuasi disekitaran angka 100.

Tabel II.121  
Nilai Tukar Petani (NTP) Regional Kalimantan dan Nasional  
Menurut Sub sektor Tahun 2022

No	Uraian	Kaltim	Kalbar	Kalteng	Kalsel	Kaltara	Nasional
	NTP Gabungan	126,03	141,34	121,60	107,33	109,00	107,33
1.	Tanaman Pangan	92,34	92,59	94,63	98,79	96,78	98,82
2.	Hortikultura	112,32	102,01	111,82	105,54	101,41	108,74
3.	Tanaman Perkebunan Rakyat	162,54	167,77	139,17	123,02	154,16	126,22
4.	Peternakan	108,77	100,53	107,74	102,38	104,55	101,24
5.	Perikanan	97,98	102,64	94,46	100,60	104,29	105,24

Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023

Ternyata fenomena yang terjadi di Kalimantan Timur, juga terjadi di wilayah lain di pulau Kalimantan, bahwa petani sub sektor perkebunan rakyat lebih sejahtera dibandingkan dengan sub sektor yang lain. Sementara sub sektor tanaman pangan dan perikanan merupakan sub sektor yang masih rentan berfluktuasi nilai NTP-nya berada dibawah 100.

Nilai Tukar Petani di regional Kalimantan berada di atas 100 dan berada di atas nasional sebesar 107,33. Namun jika diurutkan, Provinsi Kalimantan Timur memiliki rata-rata NTP tertinggi kedua sebesar 126,03, dibawah Kalimantan Barat sebesar 141,34.

#### D. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap memperlihatkan bagaimana investasi yang ditanamkan di Kalimantan Timur mampu menyerap tenaga kerja (penduduk Provinsi Kalimantan Timur maupun migran). Pada tahun 2017-2021, proyek penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing mengalami kenaikan namun rasio daya serap tenaga kerja justru mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya permasalahan dalam penyediaan lapangan kerja yang belum sesuai

dengan kualitas dan *skill* tenaga kerja lokal yang tersedia. Sejalan dengan itu, peralihan investasi dari sektor industri/manufaktur yang padat karya menjadi sektor industri/manufaktur padat modal yang cenderung memiliki serapan tenaga kerja yang lebih sedikit. Pemerintah terus berupaya untuk memberikan peluang dan kesempatan kerja lebih kepada masyarakat lokal melalui peningkatan investasi yang memberikan timbal balik positif bagi masyarakat. Rasio daya serap tenaga kerja dari nilai investasi, baik PMDN maupun PMA, di Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.122  
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2018-2022

No	Uraian	PMDN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMDN	12.935	20.837	19.952	21.596	24.829
2	Jumlah proyek seluruh PMDN	520	2.227	3.924	9.291	4.938
3	Rasio daya serap tenaga kerja	24,88	9,36	5,08	2,32	5,03
No	Uraian	PMA				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja pada perusahaan PMA	12.500	15.166	5.868	5.650	11.609
2	Jumlah proyek seluruh PMA	513	903	778	1.034	742
3	Rasio daya serap tenaga kerja	24,37	16,80	7,54	5,46	15,65

Sumber: DPMPSTSP Provinsi KALTIM, 2023

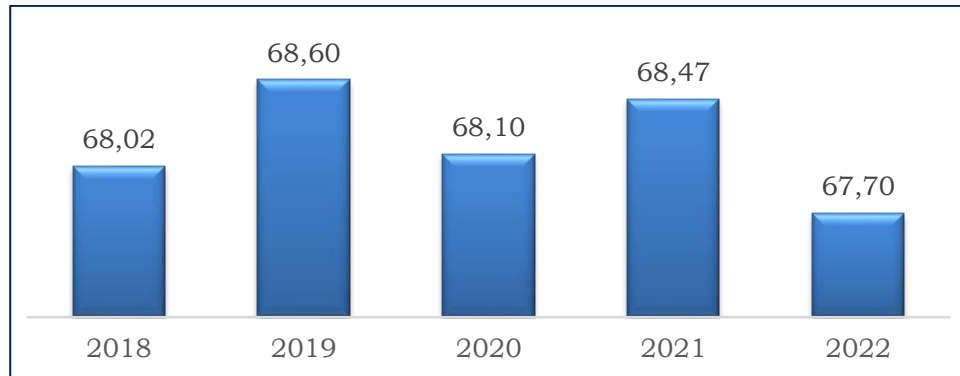
Sektor usaha tenaga kerja di Kalimantan Timur pada tahun 2022 pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) paling banyak diserap oleh sektor pertambangan sebesar 41,03 persen dan sektor pertanian, kehutanan, perikanan sebesar 28,88 persen. Hal ini terjadi dikarenakan nilai realisasi investasi dan jumlah proyek terbesar pada PMDN adalah sektor pertambangan. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) paling banyak diserap oleh sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan menyerap 50,59 persen tenaga kerja, sedangkan sektor

pertambahan menyerap tenaga kerja sebanyak 26,13 persen. Sama halnya seperti pada PMDN, pada PMA penyerapan tenaga kerja sektor Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan terbanyak juga dipengaruhi dengan nilai investasi dan jumlah proyek yang tinggi pada sektor tersebut. Kemudian dengan berkembangnya investasi, efek yang akan diperoleh yakni terhadap upaya memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

#### E. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur. Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional serta daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selalu melakukan perbaikan guna menunjang reformasi birokrasi yang baik dan mengarah kearah tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pada tahun 2020 Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di angka 68,10 dengan predikat B (Cukup Baik), sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,54% berada di angka 68,47 dengan predikat B (cukup baik).



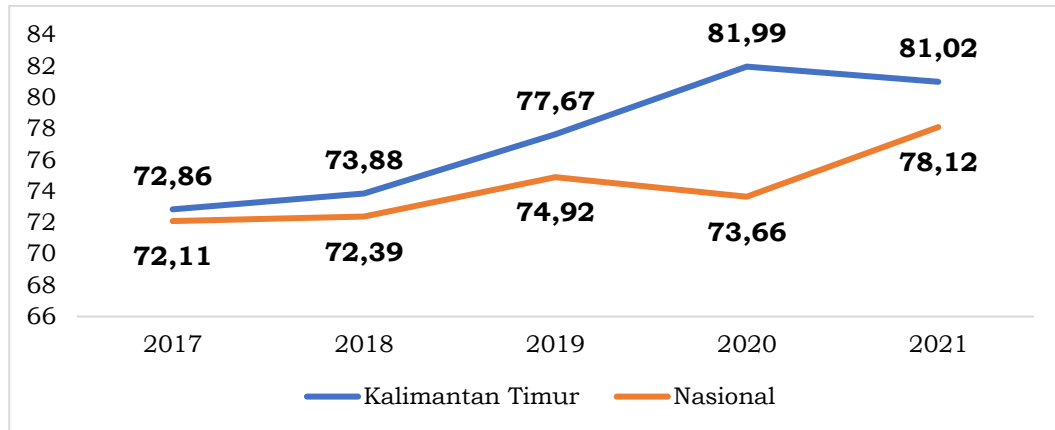
Gambar II.92

Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Timur

(Sumber: Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 2023)

F. Indeks Demokrasi

Provinsi Kalimantan Timur, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib untuk menjalankan sistem demokrasi yang berkeadilan. Jika dilihat dari perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kehidupan berdemokrasi yang baik dengan indeksinya mencapai 81,02 persen pada tahun 2022 dan di level nasional berada pada peringkat ke Lima, nilai indeks ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan metode dalam perhitungan indeks demokrasi mengalami perubahan. Dengan capaian tersebut kinerja demokrasi Kalimantan Timur masuk dalam kategori “*high performing democracy*”. Walau mengalami penurunan di tahun 2021, namun IDI Kalimantan Timur masih tetap berada di atas IDI nasional yang mencapai 78,12.



Gambar II.93  
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2017-2021  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2022)

Perkembangan IDI Kalimantan Timur dari 2017 hingga 2021 mengalami fluktuasi, Capaian IDI terendah pada tahun 2017 sebesar 72,86 sedangkan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 81,99. Fluktuasi angka IDI mencerminkan dinamika situasi demokrasi di wilayah Kalimantan Timur.

Pada tahun 2021 Indeks Demokrasi Indonesia menggunakan metode baru dimana pada metode lama fokus pada demokrasi politik yang hanya mengukur demokrasi politik yang memiliki porsi besar pada *institutional democracy* seperti Lembaga pemilu, DPRD, birokrasi, dll sedangkan pada metode baru fokus pada demokrasi yang lebih luas dimana mengurangi porsi ukuran *institutional democracy* dan melibatkan aspek ekonomi politik. Selain itu pada metode lama terdapat 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator sedangkan pada metode baru hanya ada 3 aspek dan 22 indikator.

Berdasarkan capaian IDI Tahun 2021 di Kalimantan Timur, masih terdapat 2 indikator yang nilainya masih dibawah 60, yaitu:

1. Indikator Anti Monopoli Sumber Daya Ekonomi

Indikator ini diperoleh dari KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Dari data KPPU, ada peningkatan data dari 4,51 di tahun 2020 menjadi 4,57 di tahun 2021. Kondisi ini didukung dengan

peningkatan dimensi regulasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

## 2. Indikator Lembaga Kinerja Legislatif

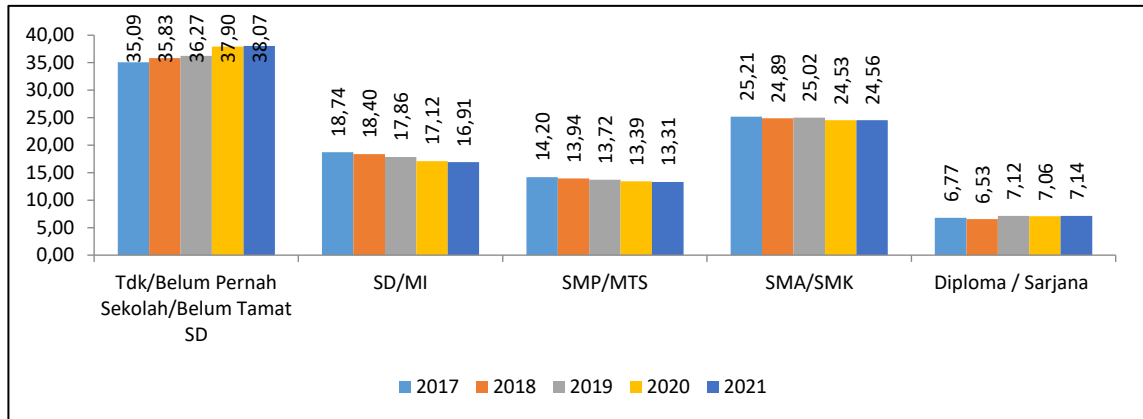
Diperoleh dari persentase perda yang disahkan terhadap target Propemperda. Data dari sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur diperoleh ada 8 perda yang disahkan dari 15 target yang masuk di Propemperda pada tahun 2021.

## G. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Semakin tinggi penduduk mengenyam pendidikan maka semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah. Oleh karena itu, perlu adanya analisis terkait pendidikan penduduk sebagai subyek pembangunan untuk mengetahui seberapa tinggi kualitas potensi sumber daya manusia di suatu wilayah.

Terlihat bahwasanya penduduk yang telah mengenyam pendidikan hingga bangku diploma/sarjana pada tahun 2021 hanya sebesar 7,14 persen, sementara yang lain hanya mengenyam pendidikan hingga jenjang SMA/MA/SMK (24,56 persen), SLTP/MTs (13,31 persen) dan SD/MI (16,91 persen). Diluar hal tersebut yang penting untuk ditekankan adalah masih cukup tingginya masyarakat yang tidak/belum sekolah/belum tamat SD yang mencapai 38,07 persen, persentase ini meningkat dibandingkan persentase pada tahun-tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan masih belum optimalnya perhatian pemerintah dalam menggalakkan peningkatan sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.

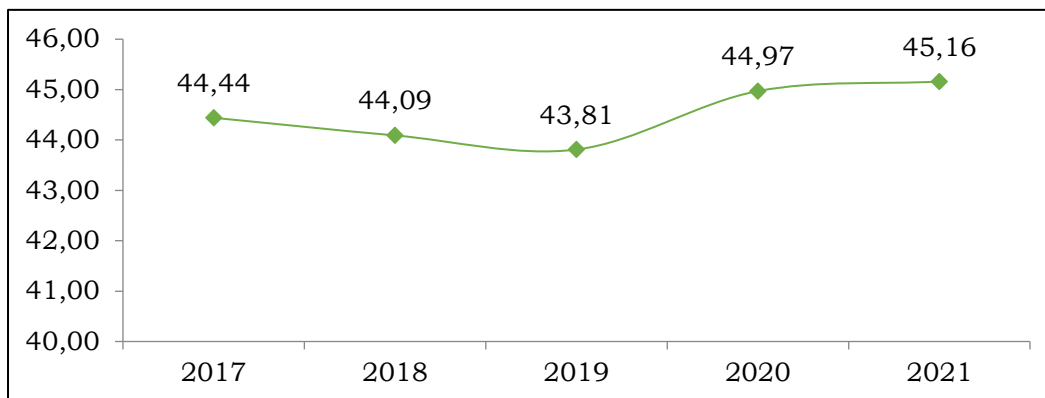
Efek dari rendahnya tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Hal tersebut perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah maupun *stakeholder* terkait untuk mengoptimalkan kembali program dan kegiatan dalam meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar II.94  
Persentase Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021  
(Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2022)

#### H. Rasio Ketergantungan

Produktivitas penduduk, selain dari kualitas pendidikan juga ditentukan oleh kelompok umur dimana terdapat kelompok usia non produktif (<15 tahun dan >64 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Asumsi umum yang berlaku adalah penduduk usia non produktif akan menjadi beban tanggungan oleh penduduk usia produktif, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, maupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Di Provinsi Kalimantan Timur, rasio ketergantungan penduduk non produktif pada tahun 2021 sedikit mengalami peningkatan menjadi sebesar 45,16, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 45-46 orang penduduk usia non produktif. Bila disandingkan dengan tingkat kemiskinan dapat disimpulkan bahwa angka kemiskinan dipengaruhi oleh rasio ketergantungan, dimana pengeluaran per kapita usia produktif harus menanggung biaya hidup kelompok usia non produktif. Upaya mengurangi angka ketergantungan usia non produktif dapat dilakukan dengan meningkatkan Pendidikan dan keterampilan kelompok usia produktif serta menciptakan kesempatan lapangan kerja yang melibatkan usia non produktif.



Gambar II.95

Rasio Ketergantungan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017-2021  
(Sumber: DKP3A Provinsi KALTIM, 2022)

## 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Perumusan berbagai dokumen perencanaan tidak akan terlepas dari analisis dan evaluasi kinerja pembangunan pada periode sebelumnya sebagai bagian penting untuk memulai tahapan lanjutan pembangunan daerah. Salah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah adalah evaluasi terhadap program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan perencanaan dan mencapai target yang diinginkan. Dengan adanya evaluasi, ketidakcocokan atau kesalahan perumusan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan untuk mencapai target dapat segera diantisipasi dengan berbagai perubahan sehingga arah pembangunan daerah dapat kembali ke koridor sesuai visi dan misi kepala daerah.

Secara umum, hasil evaluasi pada setiap misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur hingga tahun 2022 menunjukkan kecenderungan positif sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi masukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kalimantan Timur Tahun 2024. Berikut hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan Provinsi Kalimantan Timur:

Tabel II.123  
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Prioritas Daerah  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang/Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2021		Target Kinerja RKPDP Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
[ MISI ] 1. Berdaut Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia Dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas																	
[ TUJUAN ] 1 Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berkarakter dan berakhlak mulia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,25		77,44		76,88		77,25		77,44		100,25		100,25		
[ SASARAN ] 1.1 Meningkatkan pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	14,02		13,84		13,81		13,9		13,84		99,57		98,72		
	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	Tahun	10,04		9,92		9,84		10,04		9,92		98,80		98,80		
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Peningkatan Jangkauan dan Kapasitas Perpustakaan yang terakreditasi	%	9,19	2.325.000.000	10,64	13.499.680.760	8,1	2.017.396.306	9	5.462.794.661	10,64	13.499.680.760	118,22	247,12	115,78	580,63	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Angka Partisipasi Murni SMA/SMK	%	82	894.742.153.237	83,3	946.842.723.002	78,15	518.070.640.416	82	657.333.850.063	83,3	763.661.010.906	101,59	116,18	101,59	105,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
[ SASARAN ] 1.2 Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Pemuda dalam Pembinaan Kepemudaan	%	0,85		0,88		0,13		0,85		0,88		103,53		103,53		

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2021		Target Kinerja RKPDP Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	%	70	26.000.000.000	71	120.432.779.815	20,59	110.430.633.679	70	118.316.524.305	71,74	120.431.597.843	102,49	101,79	101,43	463,20	Dinas Pemuda dan Olah Raga
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pengembangan Kapasitas daya Saing Kepemudaan	%	1	8.420.000.000	0,88	8.942.653.376	0,13	1.789.757.399	1	8.081.638.000	0,88	8.942.326.376	88,00	110,65	88,00	106,21	Dinas Pemuda dan Olah Raga
[ SASARAN ] 1.3 Meningkatkan pemerataan ketahanan kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	Tahun	74,6		74,62		74,61		74,65		74,62		99,96		100,03		
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah Kab/Kota yang melakukan PHBS	Kab/Kota	3	504.923.350	3	388.527.545	3	780.540.850	3	8.081.638.000	3	8.942.326.376	100,00	110,65	100,00	76,95	Dinas Kesehatan
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan oleh kab/kota	%	100	88.073.706.300	100	62.420.498.641	100	35.978.932.834	100	469.523.350	100	388.527.545	100,00	82,75	100,00	70,87	Dinas Kesehatan
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase Kab/Kota yang memiliki ≥ 45% Puskesmas memenuhi	%	40	500.000.000	70	0	60	28.801.187.079	40	72.497.145.630	67,02	62.420.498.641	167,55	86,10	175,00	0,00	Dinas Kesehatan

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2021		Target Kinerja RKPDP Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
	9 jenis tenaga kesehatan																
[ SASARAN ] 1.4 Meningkatkan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	65,64		66,64		66,64		65,65		66,64		101,51		101,52		
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Implementasi Kelembagaan PUG	Kebijakan	1	1.200.000.000	1	1.524.154.513	1	798.506.351	1	1.306.710.000	1	1.524.154.513	100,00	116,64	100,00	127,01	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
[ TUJUAN ] 2 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan (%)	%	6		6,31		6,54		6,15		6,31		97,40		94,83		
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	6,75		5,71		6,83		6,75		5,71		115,41		115,41		
[ SASARAN ] 2.1 Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6825		0,732		0,7071		0,7071		0,732		103,52		107,25		
[ PROGRAM ] PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Desa yang mampu menjalankan pemerintahan desa secara optimal (Desa)	Desa	35	2.698.564.625	35	2.137.318.302	30	1.681.845.362	35	2.190.940.500	35	2.137.318.302	100,00	97,55	100,00	79,20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2021		Target Kinerja RKPDP Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Desa Berkembang	Desa	30	1.281.412.513	38	14.814.563.403	27	624.712.927	30	893.397.500	38	14.814.563.403	126,67	1.658,23	126,67	1.156,11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
[ SASARAN ] 2.2 Meningkatnya daya saing angkatan kerja	Persentase Penyerapan Tenaga Kerja (%)	%	35		25,08		26,04		35		25,08		71,66		71,66		
[ PROGRAM ] PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang terserap di Pasar Kerja	%	70	1.191.517.040	62,22	832.889.618	75	1.261.566.671	70	2.555.911.000	62,22	832.889.618	88,89	32,59	88,89	69,90	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
[ PROGRAM ] PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja	%	31	1.967.167.260	68,43	716.846.853	79,07	1.576.375.854	31	861.978.000	34,88	716.846.853	112,52	83,16	220,75	36,44	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
[ MISI ] 2 Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah dan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan																	
[ TUJUAN ] 3 Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	%	3,5±1		4,48		2,48		3,5+1		4,48		128,00		128,00		
	PDRB per Kapita (Juta Rp)	Juta Rp	172		238,7		182,54		182,5		238,7		130,79		138,78		
	LPE Non Migas dan Batubara (%)	%	2		6,11		2,69		2		6,11		305,50		305,50		
	Nilai Tukar Petani		113		126,03		120,94		119		126,03		105,91		111,53		
[ SASARAN ] 3.1 Meningkatkan pendanaan	Pendapatan Daerah (Miliar Rp)	Miliar Rp	11.038		15.909		10.090		10.861		15.909		146,48		144,13		

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang/Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2021		Target Kinerja RKPDP Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
pembangunan pemerintah																	
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya	%	100		144,72		92,98		100		144,72		144,72				Badan Pendapatan Daerah
	Jumlah wajib pajak cabang yang beroperasi di Kaltim (wajib pajak)	Wajib Pajak	739	1.633.400.000	697	879.861.347	692	654.933.456	739	1.237.200.000	697	879.861.347	94,32	71,12	94,32	53,87	Badan Pendapatan Daerah
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target pendapatan asli daerah	%	100	19.318.082.000	127,19	11.234.929.165	114,69	6.897.139.934	100	9.443.475.000	127,19	8.768.789.802	127,19	92,86	127,19	58,16	Badan Pendapatan Daerah
[ SASARAN ] 3.2 Meningkatnya Nilai Ekspor Non Migas dan Batubara	Nilai Ekspor Komoditas Non Migas dan Batubara (Miliar US\$)	Miliar US\$	1,72		5,05		4,75		2		5,05		252,50		293,60		
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor non migas dan non batubara	%	5	1.185.650.240	15,85	556.639.658	116,56	682.531.738	5	574.185.166	15,85	556.639.658	317,00	96,94	317,00	46,95	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
[ SASARAN ] 3.3 Meningkatnya	Kontribusi Sektor	%	9,64		8,24		7,97		7,9		8,24		104,30		85,48		

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang/Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2021		Target Kinerja RKPDP Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
kontribusi Sektor industri pengolahan Non Migas dan Batubara	Industri pengolahan Non Migas dan Batubara thd PDRB (%)																
[ PROGRAM ] PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Jumlah Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara di kawasan peruntukan industri	Industri	2	3.022.500.000	2	3.818.212.642	2	587.368.100	2	1.641.231.000	2	3.818.212.642	100,00	232,64	100,00	126,33	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah
[ SASARAN ] 3.4 Meningkatkan Peran Sektor Pertanian (dalam arti luas)	Kontribusi lapangan usaha sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB (%)	%	0,65		0,43		0,54		0,6		0,43		71,67		66,15		
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor peternakan terhadap PDRB (%)	%	0,37		0,27		0,32		0,37		0,27		72,97		72,97		
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	%	5,2		4,22		4,97		5,2		4,22		81,15		81,15		

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang/Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2021		Target Kinerja RKPDP Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	%	1,7		1,28		1,56		1,6		1,28		80,00		75,29		
	Kontribusi lapangan usaha sub sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	%	1,07		0,81		1,04		1,07		0,81		75,70		75,70		
[ PROGRAM ] PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas Kawasan Hutan yang Dikelola Masyarakat (Ha)	Ha	32.000	25.158.200.136	48.258	25.806.300.490	19.178	17.264.230.139	32.000	17.450.953.875	48.258	25.806.300.490	150,81	147,88	150,81	102,58	Dinas Kehutanan
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	1. Produksi Hasil Hutan Kayu;	M3	5.000.000	181.688.359.057	4.471.286	74.141.066.287	4.104.271,21	97.904.199.304	5.000.000	23.467.618.071	4.471.286,16	15.163.952.667	89,43	64,62	89,43	40,81	Dinas Kehutanan
	2. Produksi Hasil Hutan Non Kayu	Ton	700		826,05		1.175,38		700		826,05		118,01		118,01		Dinas Kehutanan
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Luasan Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	Ha	297.806	4.036.245.818	293.031	3.855.107.558	289.048	3.449.833.835	297.805,90	3.986.235.800	293.030,78	3.855.107.558	98,40	96,71	98,40	95,51	Dinas Kelautan Dan Perikanan
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	ton	164.441	5.394.447.000	161.230	6.065.065.353	158.086	5.090.172.070	164.441	6.392.307.000	161.051	6.065.065.353	97,94	94,88	98,05	112,43	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang/Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2021		Target Kinerja RKPDP Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
PERIKANAN BUDIDAYA																	
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	ton	162.593	72.422.675.000	177.514	21.251.309.706	168.964	17.179.335.545	162.593	27.714.746.660	160.593	21.251.309.706	98,77	76,68	109,18	29,34	Dinas Kelautan Dan Perikanan
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan	Juta Ton CO2eq	4,067	1.080.500.000	7,92	2.041.859.335	6,02	1.132.376.875	4,067	1.195.590.000	7,92	1.181.406.320	194,74	98,81	194,74	188,97	Dinas Perkebunan
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	Jenis	3	1.481.250.000	3	1.447.597.872	2	771.015.020	3	1.573.750.000	3	1.447.597.872	100,00	91,98	100,00	97,73	Dinas Kelautan Dan Perikanan
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1. Luas Lahan Kelompok Tani Tanaman Pangan Yang Difasilitasi ;	Ha	8.000	4.716.890.000	8.000	2.875.053.809	7.000	4.414.794.317	8.000	2.965.929.180	8.000	2.875.053.809	100,00	96,94	100,00	60,95	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2. Jumlah Fasilitas Pengembangan Sarana Pertanian Hortikultura	Unit	7		7		6		7		7		100,00		100,00		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2021		Target Kinerja RKPDP Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1) Jumlah Kelompok Tani yang mendapatkan Bantuan Prasarana Perkebunan ;	Kelompok	30	6.722.948.500	36	6.037.862.000	34	6.679.289.750	30	6.997.252.000	36	6.037.862.000	120,00	86,29	120,00	89,81	Dinas Perkebunan
	2) Luas Kebun yang dibangun	Ha	1.462.645		1.575.966	1.540.488		1.462.645	1.575.966			107,75		107,75			Dinas Perkebunan
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Miniranch yang teregister	Unit	49	10.023.538.200	49	7.757.188.752	24	7.430.159.604	49	8.330.342.400	49	7.757.188.752	100,00	93,12	100,00	77,39	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Jumlah produksi padi ;	Ton	279.681		280.665		244.677,96		279.681		280.665		100,35		100,35		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2. Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura	Ton	283.592	25.533.110.000	319.257	38.729.839.200	345.230	18.744.721.100	283.592	43.496.197.500	380.283	38.729.839.200	134,10	89,04	112,58	151,68	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi komoditas perkebunan	Ton	18.126.490,20	6.465.557.600	17.022.588,00	13.218.069.532	17.792.792	5.190.021.450	18.126.490,20	14.810.658.000	17.022.588,00	11.156.061.775	93,91	75,32	93,91	204,44	Dinas Perkebunan
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYEDIAAN DAN	Angka Kelahiran Sapi	%	21	7.243.486.018	21	3.458.041.537	19	7.171.086.750	21	4.206.881.500	21	2.975.608.741	100,00	70,73	100,00	47,74	Dinas Peternakan dan

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang/Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2021		Target Kinerja RKPDP Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN																	Kesehatan Hewan
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1. Jumlah Aparatur Non Aparatur yang di bina ;	Orang	330		333		91		330		333		100,91		100,91		Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
	2. Jumlah Kelembagaan Petani berbasis Koorporasi yang dibina	Lembaga	4	3.693.331.700	4	3.522.700.804	4	4.787.423.236	4	3.616.662.000	4	3.522.700.804	100,00	97,40	100,00	95,38	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Jumlah kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk	lembaga	1	3.715.204.900	1	2.131.689.820	1	3.537.377.859	1	1.963.897.000	1	2.131.689.820	100,00	108,54	100,00	57,38	Dinas Perkebunan
[ PROGRAM ] PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	Perusahaan	35	750.000.000	36	583.449.050	41	772.764.300	35	584.700.000	36	583.449.050	102,86	99,79	102,86	77,79	Dinas Perkebunan
[ SASARAN ] 3.5 Meningkatkan realisasi investasi sektor Non Migas dan non Batu Bara	Nilai Realisasi Investasi Sektor Non Migas dan Batubara (Triliun Rp)	Triliun Rp	35		36,17		31,64		35		36,17		103,34		103,34		

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2021		Target Kinerja RKPD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPD Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
[ PROGRAM ] PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Waktu penyelesaian proses perizinan	Hari	11	3.651.300.000	5	1.372.443.216	5	1.354.323.701	11	1.820.219.524	5	1.372.443.216	154,55	75,40	154,55	37,59	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase tercapainya target perusahaan yang melaporkan LKPM	%	100	1.500.000.000	100	1.514.309.436	100	1.069.577.836	100	1.610.282.000	100	1.514.309.436	100,00	94,04	100,00	100,95	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
[ SASARAN ] 3.6 Meningkatkan usaha ekonomi koperasi dan UKM	Kontribusi Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	%	13		15,13		12,13		13		15,13		116,38		116,38		
[ PROGRAM ] PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase tercapainya target UKM naik kelas	%	1	271.143.400	4,84	31.818.261.900	1	436.292.550	1	369.151.000	4,84	31.818.261.900	484,00	8.619,31	484,00	11.734,85	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase tercapainya target Koperasi sehat	%	10	576.519.240	13	705.461.493	0		10	731.659.500	13	705.461.493	130,00	96,42	130,00	122,37	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2021		Target Kinerja RKPDP Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase pertumbuhan UKM yang menggunakan platform pasar berbasis digital	%	3	701.986.600	36,2	8.108.087.742	2,75	498.824.200	3	302.400.000	36,2	8.108.087.742	1.206,67	2.681,25	1.206,67	1.155,02	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
[ SASARAN ] 3.7 Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ekonomi daerah	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	%	9,67		8,58		10,47		9,67		8,58		88,73		88,73		
	Kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap PDRB (%)	%	15,23		14,38		16,34		15,23		14,38		94,42		94,42		
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Sub Sektor Ekraf yang Dikembangkan	%	23,53	2.794.999.500	23,53	2.535.799.565	0		23,53	4.583.154.474	23,53	2.535.799.565	100,00	55,33	100,00	90,73	Dinas Pariwisata
[ PROGRAM ] PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi dalam Kawasan Pariwisata Provinsi (KPP) yang dikembangkan	Destinasi	3	7.602.445.000	3	4.763.794.929	2	3.956.536.975	3	5.745.573.520	3	4.763.794.929	100,00	82,91	100,00	62,66	Dinas Pariwisata
[ MISI ] 3 Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan																	

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang/Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2021		Target Kinerja RKPDP Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
[ TUJUAN ] 4 Meningkatkan Pemerataan Pelayanan Pelayan Infrastruktur Dasar	Indeks Gini	Indeks	0,313		0,327		0,334		0,327		0,327		100,00		95,53		
[ SASARAN ] 4.1 Meningkatnya konektivitas dan pelayanan infrastruktur dasar yang menunjang perekonomian berbasis tata ruang/kewilayahan	Jumlah Penumpang yang terlayani (Orang)	orang	6.000.000		8.513.323		4.664.922		6.000.000		8.513.323		141,89		141,89		
	Jumlah barang yang diangkut (Ton)	Ton	337.000.000		513.031.229		323.231.994		337.000.000		513.031.229		152,23		152,23		
	Jumlah kawasan ekonomi yang terhubungkan (Kawasan )	Kawasan	5		5		4		5		5		100,00		100,00		
	Capaian akses air minum layak (%)	%	68,53		78		70,78		68,53		78		113,82		113,82		
	Luas lahan pertanian yang beririgasi (Ha)	Ha	14.278,50		14.278,50		14.078,50		14.278,50		14.278,50		100,00		100,00		
	Luas kawasan kumuh (Ha)	Ha	1.187,82		1.185,14		1.190,14		1.187,82		1.185,14		100,23		100,23		

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang/Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2021		Target Kinerja RKPDP Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
	Luas genangan banjir perkotaan (Ha)	Ha	374		318,9		406,3		374		318,9		114,73		114,73		
	Skoring Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	%	76,74		78,57		75,94		76,74		78,57		102,38		102,38		
	Rasio elektrifikasi (%)	%	93		93,09		91,98		93		93,09		100,10		100,10		
[ PROGRAM ] PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	unit	70.781	43.686.076.280	70.811	38.635.518.094	71.781	38.820.826.321	70.781	44.412.284.978	70.781	36.934.252.000	100,00	83,16	100,04	88,44	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang saluran drainase yang berfungsi baik	meter	3.020	18.611.113.120	2.723,70	12.316.674.513	2.180,2	10.275.217.797	3.020,00	10.739.754.460	2.723,70	7.768.724.512	90,19	72,34	90,19	66,18	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Capaian akses Air Minum Layak Perpipaan	%	66,64	150.384.487.100	69,28	136.777.317.877	67,48	44.446.590.391	66,64	167.235.906.513	69,67	136.777.317.877	104,55	81,79	103,96	90,95	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Persentase Pemanfaatan EBT	%	7,34	2.920.731.000	7,27	2.003.793.750	6,53	1.812.325.181	7,34	2.184.377.000	7,27	2.003.793.750	99,05	91,73	99,05	68,61	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2021		Target Kinerja RKPDP Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIK AN	Jumlah KK Berlistrik	KK	1.165.000	54.200.364.300	1.197.475	41.149.510.955	1.143.533	39.092.429.018	1.165.000	44.245.192.660	1.197.475	41.149.510.955	102,79	93,00	102,79	75,92	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Laut dan SDP	%	87	5.005.777.515	85	3.090.171.936	83	7.319.264.313	87	3.390.803.000	85	3.090.171.936	97,70	91,13	97,70	61,73	Dinas Perhubungan
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Capaian Layanan SDA	%	76	103.392.334.896	76,95	79.199.791.645	74,07	65.828.802.915	76	104.718.557.425	76,95	79.106.639.213	101,25	75,54	101,25	76,60	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	%	76,15	728.072.635.446	77,52	810.674.327.488	75,2	668.550.468.742	76	1.144.276.260.054	77,52	664.721.895.183	102,00	58,09	101,80	111,35	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Jumlah Lakalantas	kasus	427	18.601.404.483	195	17.201.253.416	418	15.106.518.512	427	10.634.422.056	195	13.615.817.387	154,33	128,04	154,33	92,47	Dinas Perhubungan
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	indeks	0,91	8.000.000.000	0,92	7.788.192.591	0,87	6.786.010.461	0,91	9.131.874.700	0,92	7.788.193.591	101,10	85,29	101,10	97,35	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat
[ MISI ] 4 Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan																	

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2021		Target Kinerja RKPDP Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
[ TUJUAN ] 5 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		76,05		74,46		75,06		76,05		74,46		97,91		97,91		
[ SASARAN ] 5.1 Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persentase penurunan emisi dari BAU (%)		28,5		70,68		41,96		28,5		70,68		248,00		248,00		
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Indeks Kualitas Air Sungai (IKA) ;	Indeks	53,8	6.807.500.000	53,02	4.437.095.398	51,92	3.842.447.826	53,8	4.728.990.700	53,02	4.437.095.398	98,55	93,83	98,55	65,18	Dinas Lingkungan Hidup
	2. Indeks Kualitas Udara (IKU) ;	Indeks	89,16		87,59		88,84		89,16		87,59		98,24		98,24		Dinas Lingkungan Hidup
	3 Indeks Kualitas Lahan (IKL) ;	Indeks	79,86		81,85		82,21		79,86		81,85		102,49		102,49		Dinas Lingkungan Hidup
	4 Indeks kualitas air laut (IKAL)	Indeks	83,61		81,45		85,4		83,61		81,45		97,42		97,42		Dinas Lingkungan Hidup
[ SASARAN ] 5.2 Meningkatkan Ketangguhan Menghadapi Bencana	Indeks Risiko Bencana		151,49		146,67		154,02		151,49		146,67		96,82		96,82		
[ PROGRAM ] PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa / Kelurahan Tangguh Bencana	%	82,67	3.156.19.870	82,67	3.843.054.179	66,67	2.395.860.262	82,67	3.711.345.907	82,67	3.843.054.179	100,00	103,55	100,00	121,77	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
[ MISI ] 5 Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik																	
[ TUJUAN ] 6 Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang bersih, profesional	Indeks Reformasi Birokrasi		B (71,50)		67,7		68,47		B (69,00)		B (67,70)		98,12		94,69		

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2021		Target Kinerja RKPDP Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
dan berorientasi pelayanan publik																	
[ SASARAN ] 6.1 Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat		82,5		84,41		82,57		82,5		84,41		102,32		102,32		
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3,25		2,11		2,24		2,75		2,11		76,73		64,92		
[ PROGRAM ] PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengamanan dan layanan informasi	indeks	80	8.637.367.937	97,84	3.825.888.344	92	4.639.215.203	85	7.362.108.000	97,84	7.203.081.824	115,11	97,84	122,30	44,29	Dinas Komunikasi dan Informatika
[ SASARAN ] 6.2 Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai Akuntabilitas Kinerja		77		78,1		77,67		79		78,1		98,86		101,43		
[ PROGRAM ] PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nua memperoleh Predikat Minimal (BAIK)	%	79	4.794.658.057	89,19	3.386.637.313	75,67	1.046.246.218	79	3.656.979.000	89,19	3.386.637.313	112,90	92,61	112,90	70,63	Sekretariat Daerah
	Persentase Perangkat Daerah yang dibentuk sesuai Norma Standar Prosedur	%	95		91,89		92	865.889.630	95		91,89		96,73		96,73		Sekretariat Daerah

Misi/Tujuan/Sasaran/Bidang Urusan/Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RPJMD Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2021		Target Kinerja RKPDP Tahun 2022		Realisasi Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RKPDP Tahun 2022		Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2022		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4		5		6		7		8		9 = 8/7*100		11=5/4*100		11
	Kriteria (NSPK)																
	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	79		81,03		83,44	510.243.220	79		81,03		102,57		102,57		Sekretariat Daerah
[ SASARAN ] 6.3 Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Tingkat Maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) Pemda		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		Level 3		100,00		100,00		
[ PROGRAM ] PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase peningkatan kualitas laporan keuangan Pemda sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	%	90	13.084.203.070	86,53	9.872.851.607	90	7.093.609.671	90	11.409.744.064	90	9.872.851.607	100,00	86,53	96,14	75,46	Inspektorat

Ket: Faktor penghambat dan pendorong dapat dilihat pada Dokumen Evaluasi RKPDP Tahun 2022

Keterangan :

Sangat Tinggi :  $\geq 90,01$   
 Tinggi : 75,01 - 90  
 Sedang : 65,01 - 75  
 Rendah : 50,01 - 65  
 Sangat Rendah :  $\leq 50$



Dari 6 tujuan dan 19 sasaran yang ditetapkan dalam P-RKPD Tahun 2022, terdapat 44 (empat puluh empat) indikator tujuan dan sasaran. Dari total indikator tersebut, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) indikator yang telah mencapai target yang telah ditetapkan, dan sebanyak 17 (tujuh belas) indikator masih belum mencapai target di tahun 2022.

Berdasarkan hasil evaluasi di atas, dari 54 program prioritas di Kalimantan Timur, terdapat 3 (tiga) program prioritas yang pencapaian targetnya berada di bawah 90 persen. Program tersebut antara lain: Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, serta Program Pengelolaan Hutan.

Dari total 54 (lima puluh empat) program prioritas yang ditetapkan dalam P-RKPD tahun 2022, terdapat sebanyak 65 (enam puluh lima) indikator yang menjadi target kinerja pembangunan yang harus dicapai agar pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dinilai berhasil. Dari total indikator yang telah ditentukan tersebut, sebanyak 50 (lima puluh) indikator yang telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2022, dan sebanyak 15 (lima belas) masih belum mencapai target yang telah ditentukan pada tahun 2022.

## 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

### 2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Indikator Makro Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja di tahun 2022, diidentifikasi masih terdapat empat permasalahan utama pembangunan yang masih dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Timur, yaitu :

#### 1) Indeks Pembangunan Manusia

Capaian kinerja dari IPM Kalimantan Timur telah melampaui target yang telah ditentukan, tetapi masih terdapat permasalahan

karena belum tercapainya kinerja harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, serta usia harapan hidup.

Belum tercapainya rata-rata lama sekolah disebabkan oleh akses pendidikan wajib belajar 12 tahun belum terpenuhi secara merata. Kabupaten Mahakam Ulu, Penajam Paser Utara, Kutai Barat serta Paser merupakan Kabupaten yang memiliki rata-rata lama sekolah dengan angka capaian di bawah 9 tahun.

Untuk harapan lama sekolah yang belum mencapai target disebabkan oleh pemerataan dan perluasan akses pendidikan baik pada peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan maupun pemenuhan tenaga pendidik dan kependidikannya sehingga peningkatan angka harapan lama sekolah dapat segera diwujudkan. Kabupaten Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara merupakan Kabupaten yang memiliki rata-rata lama sekolah dengan angka capaian di bawah 13 tahun.

Belum tercapainya usia harapan hidup disebabkan oleh akses dan layanan terhadap fasilitas kesehatan masyarakat belum maksimal, khususnya pada wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai usia harapan hidup 71,71 tahun merupakan usia harapan hidup terendah dibanding kabupaten/kota lainnya.

## 2) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Capaian kinerja dari laju pertumbuhan ekonomi (LPE) telah melampaui target yang telah ditentukan, tetapi masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian yang masih bergantung pada pengiriman ekspor ke negara tujuan, disertai momen harga komoditas batu bara yang berada pada level tinggi. Dengan keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pembangunan proyek-proyek strategis nasional di fokuskan ke wilayah Kaltim. Hal ini menyebabkan perlunya dilakukan diversifikasi ekonomi agar tidak bergantung pada sumber daya alam.

### 3) Indeks Gini

Indeks Gini Kalimantan Timur pada tahun 2022 menunjukkan penurunan angka ketimpangan menjadi 0,327. Sebelumnya indeks gini Kalimantan Timur sebesar 0,334. Jika dibandingkan dengan regional Kalimantan, pada tahun 2022 ketimpangan pendapatan terendah di Kalimantan Utara sebesar 0,272. Sedangkan sisanya menunjukkan level ketimpangan yang serupa pada posisi 0,31-0,32. Dengan capaian indeks gini Kalimantan Timur tersebut, masih berada di bawah tingkat ketimpangan Indonesia yang mencapai 0,384 pada tahun 2022. Cukup tingginya ketimpangan Kalimantan Timur ini dikarenakan terbatasnya konektivitas dan sulitnya aksesibilitas yang menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Timur, khususnya daerah terpencil dan terdalam. Jika aksesibilitas dan konektivitas sudah baik, maka distribusi alur barang dan jasa akan lebih lancar, perekonomian masyarakat dapat bergerak secara lebih efisien dan produktif, yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong kelompok berpendapatan rendah untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya.

### 4) Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yakni menjadi 6,31 persen. Secara absolut, jumlah penduduk miskin juga menurun menjadi sebanyak 236,25 ribu jiwa dibandingkan tahun 2021 yaitu sebanyak 241,77 ribu jiwa. Dimana garis kemiskinan di Kalimantan Timur juga meningkat menjadi sebesar Rp 728.208 yang didominasi untuk memenuhi kecukupan pangan/makanan.

Berdasarkan kabupaten/kota tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2021 masih di Kabupaten Mahakam Ulu yaitu mencapai 11,55 persen, sementara tingkat kemiskinan terendah adalah Kota Balikpapan hanya sebesar 2,89 persen. Sebagai daerah baru dan memiliki wilayah yang sulit diakses, menjadi salah satu penyebab tingginya angka kemiskinan Mahakam Ulu.

Permasalahan lain berdasarkan identifikasi pilar sosial TPB/SDGs adalah belum maksimalnya penjangkauan dan pemerataan program pengentasan kemiskinan dimana program-program masih terpusat pada wilayah perkotaan dan hanya sebagian kecil berada di kabupaten/kota, terlebih di sekitar pedesaan. Situasi ini dimungkinkan faktor aksesibilitas akibat kondisi geografis yang relatif sulit dan pemenuhan fasilitas penunjang lainnya, tidak terkecuali jarak dengan pusat pemerintahan dan perekonomian.

#### 5) Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka mengalami penurunan menjadi 5,71%, lebih baik dari capaian nasional sebesar 5,86%, namun capaian ini masih menjadi yang tertinggi diantara provinsi lainnya di regional Kalimantan. Permasalahan yang masih dihadapi antara lain Rasio antara lapangan kerja dan pencari kerja masih tidak berimbang; Peserta magang yang telah menjalankan pemagangan di perusahaan menemukan minat yang berbeda dengan kejuruan yang dijalankan, sehingga sebagian dari peserta tidak optimal dalam bekerja; Kompetensi atau *skill* yang dimiliki peserta magang tidak sesuai dengan standar perusahaan penyelenggara pemagangan, sehingga tidak terjadi penyerapan; Kurangnya pengetahuan tentang pengurusan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Lokal (AKL) sehingga memperlambat proses pembuatan rekomendasi; Tidak sesuainya penyediaan fasilitas bagi tenaga kerja yang di datangkan.

#### 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan per-urusan disusun berdasarkan sebab indikatif dari analisis data gambaran umum kondisi daerah dan berbagai data lain, seperti kesepakatan mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) dan kebijakan-kebijakan di level nasional yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema RKPD Kalimantan Timur tahun 2024.

Tabel II.124  
Permasalahan Pembangunan Per Urusan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
<b>Pendidikan</b>		
Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar pada SPM di bidang Pendidikan Menengah dan Khusus serta kebudayaan	Belum optimalnya pencapaian APM, APK dan APS SMA/SMK/Khusus di beberapa wilayah Kalimantan Timur	Belum terpenuhinya sarana, prasarana untuk wilayah yang telah diperhitungkan dengan banyak jumlah penduduk usia sekolah menengah dan pendidikan khusus di wilayah tersebut
		Belum terpenuhi salah satu indikator pemenuhan standar pelayanan minimal untuk sekolah menengah yaitu pemenuhan ruang kelas untuk sekolah yang kekurangan ruang kelas baru sehingga ketimpangan antara jumlah rombel dan ruang kelas dapat terpenuhi
<b>Kesehatan</b>		
Status gizi dan kesehatan ibu dan anak belum optimal	Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi	Masih rendahnya kualitas skrining pada ibu hamil maupun bayi baru lahir yang masih belum sesuai standar
		Belum optimalnya Sistem Rujukan, sehingga proses koordinasi antar tenaga kesehatan terhambat
		Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan Antenatal dan Neonatal
	Masih rendahnya pemantauan pertumbuhan terkait <i>stunting</i> , <i>wasting</i> dan <i>underweight</i>	Masih kurang optimalnya alkes deteksi dini <i>Stunting</i> di Posyandu
		Kurangnya pemanfaatan Buku Konsultasi Ibu dan Anak (KIA) sebagai pemantauan pertumbuhan
	Belum optimalnya implementasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga pola makan dengan gizi seimbang dan olahraga
Akses dan mutu pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar	Belum optimalnya ketersediaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan	Masih sulitnya/terjadinya keterlambatan pendistribusian obat dan vaksin ke daerah
		Keterbatasan penyediaan obat program dan vaksin oleh Pusat
		Terdapat banyak vaksin yang <i>expired date</i>
Masih tingginya beban penyakit menular dan penyakit tidak menular	Belum optimalnya penemuan kasus penyakit menular	Masih kurangnya alat kesehatan dan logistik untuk pemeriksaan diagnostik (TCM dan Mikroskop)
		Belum maksimalnya sistem pencatatan dan pelaporan penyakit menular
		Belum optimalnya aplikasi pelaporan dengan sistem informasi pelayanan faskes

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum meratanya distribusi tenaga kesehatan	Belum optimalnya pendayagunaan dan pemerataan 9 jenis tenaga kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar	Belum optimalnya sistem Perencanaan Kebutuhan (Renbut) Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dan formasi (kebutuhan) tenaga kesehatan Masih rendahnya insentif tenaga kesehatan Kurangnya dokter yang ditugaskan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar)
	Belum terpenuhinya tenaga 4 Spesialis Dasar dan 3 Penunjang pada RSUD milik Pemerintah Daerah Kab/Kota	Belum optimalnya sistem pengembalian/pendayagunaan Dokter Spesialis yang telah selesai pendidikan (Program Pendidikan Dokter Spesialis) Kurangnya pendayagunaan dokter spesialis yang berlokasi di Kaltim
	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	
	Belum optimalnya pemerataan dan pengembangan pelayanan infrastruktur dasar	Konektivitas dan aksesibilitas kawasan strategis provinsi belum terhubung dengan baik
Masih rendahnya ketersediaan infrastruktur pendayagunaan sumber daya air		Belum optimalnya infrastruktur penyedia air baku
Belum optimalnya dan masih rendahnya pengendalian daya rusak air		Masalah sosial dan lahan Belum optimalnya sistem pengendali banjir Masih rendahnya ketersediaan sistem pengendali banjir Pendangkalan dan penyempitan sungai serta bangunan pengendali yang tidak berfungsi optimal Penanganan pantai kritis belum optimal
Penyelenggaraan penataan ruang belum optimal		Belum optimalnya sinkronisasi dokumen perencanaan penataan ruang RTR belum sepenuhnya menjadi acuan pembangunan, pengawasan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah
		Terdapat beberapa dinamika pembangunan dan perubahan kebijakan
		Masih terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pemanfaatan ruang
	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur air minum skala regional	Kaltim belum memiliki lembaga pengelola SPAM Regional
		Masih ada kabupaten/kota yang kekurangan sumber suplai air baku untuk air minum yang handal, baik dari sisi kuantitas, kontinuitas, dan kualitas
	Belum optimalnya penyediaan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi serta yang mendukung kawasan strategis provinsi	Masih terdapat permukiman di kawasan strategis provinsi yang belum terpenuhi kebutuhan infrastruktur dasarnya
	Belum tersedianya infrastruktur pengelola air limbah domestik skala regional	Kaltim belum memiliki infrastruktur pengelola air limbah lintas Kabupaten/Kota
		Belum tersedianya kelengkapan dokumen perencanaan pada lokasi yang berpotensi dibangun infrastruktur pengelola limbah skala regional
		Pengelolaan air limbah domestik dan sanitasi masih sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan program/kegiatan di Kabupaten/Kota
	Belum tersedianya infrastruktur pengelolaan sampah skala regional	Belum tersedianya kelengkapan dokumen perencanaan pada lokasi yang berpotensi dibangun infrastruktur pengelola sampah skala regional
		Belum tumbuhnya kesadaran penduduk untuk melakukan efisiensi serta pengurangan volume sampah domestik
	Belum optimalnya kondisi bangunan gedung yang menjadi kepentingan strategis provinsi	Masih terdapat gedung yang menjadi kepentingan strategis provinsi yang mengalami penurunan fungsi dan kelayakan
		Kebutuhan akan bangunan gedung yang mendukung kepentingan strategis provinsi belum terpenuhi secara optimal
	Belum optimalnya kondisi bangunan cagar budaya level provinsi	Terdapat bangunan serta lingkungan cagar budaya yang kondisinya belum memadai dari sisi fisik dan tata bangunan dan lingkungan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
	Belum optimalnya pemenuhan tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Masih tingginya angka tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang belum tersertifikasi	
<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>			
Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Beberapa lokasi permukiman masih termasuk dalam kategori kumuh	<p>Beberapa permukiman kumuh kewenangan provinsi belum memiliki sarana prasarana yang memenuhi standar teknis dan kelaikan fungsi</p> <p>Penanganan kumuh belum menjangkau aspek yang menjadi faktor penyebab kekumuhan</p> <p>Penanganan kekumuhan masih fokus pada aspek fisik dan tata lingkungan</p> <p>Masih terdapat bangunan rumah yang tidak memenuhi standar teknis dan kelaikan fungsi</p> <p>Belum tersedia data komprehensif terkait lokasi penanganan Rumah Tidak Layak Huni</p>	
	Pemenuhan SPM bidang perumahan level provinsi masih belum optimal	<p>Belum terpenuhinya seluruh kebutuhan/ kelengkapan data dan administrasi untuk pemenuhan SPM bidang perumahan level provinsi</p> <p>Belum optimalnya koordinasi lintas sektor terkait pemenuhan SPM bidang perumahan level provinsi</p> <p>Belum terpenuhinya kebutuhan perumahan untuk masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi maupun untuk kebutuhan korban bencana level provinsi</p>	
	Pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) untuk permukiman masih belum optimal	<p>Belum tersedianya perencanaan komprehensif terkait kebutuhan penyediaan PSU permukiman</p> <p>Terdapat permukiman yang mengalami penurunan fungsi akibat belum tersedianya PSU yang memadai</p>	
	<b>Trantibumlinmas</b>		
	Belum optimalnya pelayanan trantibumlinmas	Belum maksimalnya penegakan perda dan perkara di lapangan	Kurangnya tenaga anggota personil baik PPNS maupun anggota di lapangan dan ketersediaannya sarana dan prasarana
			Kurangnya minat ASN Sarjana S1 untuk menjadi PPNS
			PPNS masih belum optimal dalam menjalankan tugasnya
Kurangnya peningkatan kapasitas SDM baik PPNS, anggota personil Satpol PP dan Satlinmas			

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Kuranginya keterlibatan Perangkat Daerah pemangku perda dan perkada didalam pelaksanaan aksi penegakan perda dan perkada
Rendahnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan tingginya tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan (GALKARHUTLA)	Belum maksimalnya sistem kerja penanggulangan bencana	Rendahnya tata kerja, kelola BPBD dan fasilitasi hubungan kerja sama antar Lembaga, Mitra dan Masyarakat
	Belum maksimalnya sistem penanganan dan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Rendahnya penanggulangan pada tingkat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, pelayanan kedaruratan dan logistik serta pelayanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana serta pelayanan pengendalian operasi penanggulangan bencana
		Rendahnya kualitas SDM aparatur
		Rendahnya sistem pengawasan dalam penanggulangan bencana
<b>Sosial</b>		
Belum maksimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Bertambahnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Belum optimalnya fungsi rehabilitasi sosial dalam pemulihan dan pengembangan diri bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
	Belum optimalnya pemberdayaan sosial	Belum optimalnya pelayanan rehabilitasi sosial dasar dalam panti
	Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial	Belum optimalnya pemanfaatan dan pendayagunaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
		Belum maksimalnya proses verifikasi dan validasi data ditingkat kab/kota, sehingga bantuan sering tidak tepat sasaran
		Belum maksimalnya keberdayaan berusaha bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah tergraduasi baik berupa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
	Belum optimalnya penanganan fakir miskin	Belum maksimalnya akselerasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan yang ditangani provinsi, kab dan kota
		Belum optimalnya penanganan fakir miskin khususnya wilayah pesisir dan pulau terluar disebabkan karena faktor geografis/luas wilayah
		Belum optimalnya proses pendampingan Program Penanganan Kemiskinan di tingkat Kab/Kota

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
<b>Tenaga Kerja</b>		
Masih rendahnya kesempatan kerja dan penempatan kerja bagi para pencari kerja	Belum maksimalnya informasi peluang kerja dan mekanisme penempatan tenaga kerja bagi pencari kerja	Kurangnya dukungan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Belum optimalnya dukungan layanan yang mempertemukan pencari kerja dengan pasar kerja
Belum optimalnya kualitas hubungan industrial	Belum optimalnya penerapan tata kelola kerja (perusahaan) yang layak	Masih kurangnya pemahaman baik oleh pekerja maupun perusahaan terkait dengan syarat kerja Masih kurangnya pemahaman pekerja dalam memahami aturan ketenagakerjaan Belum optimalnya pembinaan dan sosialisasi dari mediator hubungan industrial terkait syarat-syarat kerja
Belum optimalnya penerapan norma ketenagakerjaan dan norma K3 di tempat kerja	Belum optimalnya ketaatan perusahaan pada norma ketenagakerjaan dan norma K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di tempat kerja	Sulitnya jangkauan akses geografis wilayah Kaltim Kurang kooperatifnya peran perusahaan dalam pelaksanaan pemeriksaan
Belum optimalnya pengembangan di kawasan transmigrasi	Belum ada fokus lintas sektor dalam mendukung pengembangan kawasan transmigrasi	Masih kurangnya dukungan pelatihan, ketersediaan sarana dan prasarana pada kawasan transmigrasi.
<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>		
Belum optimalnya kesetaraan gender	Masih tingginya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam sumbangan pendapatan per kapita	Kurangnya sosialisasi kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kurangnya pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial dan ekonomi
Tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terhadap perlindungan perempuan	Masih rendahnya kepedulian masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga Masih adanya stigma bahwa kasus kekerasan merupakan privasi Masih kurangnya pemahaman dan kepedulian terkait perlindungan Perempuan Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan
Belum optimalnya KIE pengendalian penduduk, Keluarga	Masih kurangnya advokasi dan sosialisasi di kabupaten/kota	Masih rendahnya pemahaman terhadap ketahanan keluarga Masih tingginya kesenjangan antar pertumbuhan penduduk dan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Berencana dan Ketahanan Keluarga		peningkatan kualitas sumber daya manusia
	Masih rendahnya fleksibilitas peran dalam keluarga	Masih rendahnya pemahaman terhadap pengendalian penduduk dan KB
		Masih kurangnya pelatihan kepekaan dan kepedulian terhadap anggota keluarga
Belum maksimalnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di Kab/Kota	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan	Belum maksimalnya sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan masyarakat
		Masih rendahnya laporan penduduk pendatang dari luar daerah
		Belum terstandarnya layanan <i>online</i> di kab/kota
	Belum optimalnya pengurusan dokumen	Belum optimalnya sarana peralatan Disdukcapil dalam mendukung aplikasi terbaru
		Masih minimnya pelayanan Adminduk dalam pelayanan di Kab/Kota
<b>Perhubungan</b>		
Belum optimalnya pemerataan dan pengembangan pelayanan infrastruktur perhubungan	Tingkat kecelakaan lalu lintas masih tinggi	Masih tingginya tingkat kerusakan jalan
		Belum terdapat fasilitas keselamatan jalan di beberapa ruas jalan
		Regulasi terkait kewenangan pemasangan fasilitas jalan masih belum optimal diterapkan
		Koordinasi antar <i>stakeholders</i> belum maksimal
		Geometrik jalan yang belum sesuai
		Keterampilan pengemudi yang belum memadai
		Kondisi kendaraan yang tidak layak
	Belum optimalnya distribusi barang dan penumpang	Prasarana transportasi seperti terminal dan pelabuhan belum memadai
		Sarana dan prasarana transportasi belum optimal
		Regulasi terkait pembangunan dan pengelolaan prasarana transportasi belum terlaksana dengan baik
	Minat masyarakat untuk menggunakan transportasi massal masih rendah	
<b>Lingkungan Hidup</b>		
Terjadinya penurunan kualitas air, air laut, udara dan lahan	Belum optimalnya upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Belum optimalnya upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		Belum optimalnya upaya penanggulangan pencemaran

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		dan/atau kerusakan lingkungan hidup Belum optimalnya upaya pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
	Belum optimalnya perencanaan lingkungan hidup	Belum optimalnya pendampingan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kab/Kota Belum tersusunnya penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD/RPD/RPJMD
	Belum optimalnya pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Belum optimalnya upaya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) di luar kawasan hutan dan taman keanekaragaman hayati
	Belum optimalnya pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan limbah B3 skala provinsi
	Belum optimalnya pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	Masih rendahnya pemahaman masyarakat, dunia pendidikan, pelaku usaha, pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan
	Belum optimalnya pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Belum optimalnya hasil dari Penilaian dan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup
	Banyaknya pengaduan lingkungan hidup	Banyaknya pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	Belum optimalnya pengelolaan persampahan	Belum optimalnya penanganan sampah darat dan laut
<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>		
Belum optimalnya pengelolaan desa secara menyeluruh	Belum optimalnya pembangunan potensi kawasan perdesaan	Belum meratanya kualitas pembangunan wilayah perdesaan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya peningkatan kapasitas BUMDes untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa	Masih terbatasnya pengembangan ekonomi perdesaan melalui BUMDes
	Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan belum berjalan dengan baik	Masih rendahnya Kompetensi SDM desa dan anggota BPD rata-rata masih rendah, jumlah perangkat sebagian desa belum terpenuhi, prasarana dan sarana pemdes dan kelurahan belum memadai
	Belum optimalnya fasilitasi penguatan kapasitas kemasyarakatan desa	Masih terbatasnya kemampuan memfasilitasi pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat
	Belum optimalnya pembangunan potensi kawasan perdesaan	Masih terbatasnya potensi desa pada pembangunan kawasan perdesaan, masih terbatasnya pengembangan lembaga masyarakat seperti BKAD dan BUMDES
		Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim
<b>Komunikasi dan Informatika</b>		
Transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal	Belum semua layanan (publik dan pemerintah) terdigitalisasi	Kurang SDM bidang TIK
	Masih banyak PD yang mengadakan infrastruktur TIK masing-masing	Kurang kapasitas peningkatan infrastruktur TIK
	belum maksimalnya penerapan SPBE di PD	Belum diaktifkannya forum SPBE
	Belum terintegrasi aplikasi pada beberapa PD	Belum terinventarisasi aplikasi layanan PD
Tata kelola keamanan informasi yang belum optimal	Tingkat keamanan informasi masih rendah	Kurang SDM urusan Persandian
Belum optimalnya layanan informasi publik	Kurang penyebaran informasi program dan kebijakan Pemprov Kaltim ke seluruh wilayah Kaltim	Kurang penyebaran informasi program dan kebijakan Pemprov Kaltim ke seluruh wilayah Kaltim
Penyediaan data statistik sektoral dilingkungan pemda yang belum berkualitas	Data statistik sektoral yang tersedia kurang lengkap dan akurat	Kurang kemampuan dan keterampilan SDM pengelola data pada masing-masing produsen data

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
<b>Koperasi dan UKM</b>		
Rendahnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian daerah	Belum optimalnya kualitas usaha koperasi	Belum optimalnya kinerja kelembagaan koperasi
		Rendahnya kualitas SDM koperasi
		Lemahnya sistem pengawasan koperasi
	Rendahnya produktivitas UKM	Minimnya pelaku UKM dalam pemanfaatan pemasaran digital
		Menurunnya aktivitas ekonomi UKM semasa pandemi COVID-19
		Rendahnya daya saing produk UKM
		Kurangnya informasi permodalan UKM dalam menjalankan usahanya
<b>Penanaman Modal</b>		
Belum optimalnya realisasi nilai investasi pada sektor sekunder dan tersier	Belum optimalnya kondusivitas investasi industri non migas dan non batubara	Belum terintegrasinya promosi investasi yang dilakukan antara provinsi dan kabupaten/kota
		Belum optimal layanan yang diberikan karena masih terbatasnya SDM
		Masih kurangnya ketersediaan informasi detail tentang peluang investasi
		Belum optimalnya komitmen perizinan
		Belum efektifnya pengawasan perizinan penanaman modal
<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>		
Masih rendahnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga	Belum berkembangnya daya saing generasi pemuda	Masih kurangnya peluang usaha sesuai dengan tuntutan zaman bagi pemuda Kaltim dalam mendukung IKN
		Perilaku generasi muda yang menjurus kepada pengguna/pengedar NAPZA dan Kriminal Remaja
		Masih kurangnya kesadaran, pemberdayaan dan pengembangan (kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan) pemuda
	Masih rendahnya prestasi olahraga	Masih lemahnya kualitas SDM yang menangani keolahragaan sehingga beberapa prestasi atlet pada <i>event</i> Olahraga seperti PON dan <i>Seagames</i> cenderung menurun dari tahun ke tahun
		Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya olahraga bagi kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup
		Pembina, pengurus, pelatih dan insan olahraga kurang profesional, baik

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		ditingkat provinsi, kab/kota serta klub cabor
<b>Perpustakaan</b>		
Masih rendahnya pelayanan perpustakaan	Masih rendahnya pembangunan literasi masyarakat dan tingkat kegemaran membaca masyarakat	<p>Masih kurangnya minat baca bagi masyarakat yang menggunakan fasilitas di Badan Perpustakaan</p> <p>Sarpras yang telah dibangun masih kurang optimal terhadap penyelenggaraan minat baca/literasi</p> <p>Belum optimalnya aplikasi secara digital yang diterapkan oleh Badan Perpustakaan</p>
<b>Kelautan dan Perikanan</b>		
Lambatnya transformasi ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan	Masih rendahnya produksi perikanan budidaya	<p>Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana perbenihan dan produksi perikanan budidaya</p> <p>Penanggulangan hama dan penyakit ikan belum optimal</p> <p>Pengembangan komoditas budidaya unggulan belum maksimal</p> <p>Ketergantungan induk unggulan dari daerah lain</p>
	Masih rendahnya produksi perikanan tangkap	<p>Struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil</p> <p>Penyaluran BBM subsidi untuk nelayan masih belum optimal dikarenakan masih banyaknya kapal perikanan tangkap yang belum memiliki Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP)</p> <p>Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap</p>
	Belum optimalnya pengembangan nilai tambah dan pemasaran produk kelautan dan perikanan	<p>Sistem promosi yang belum berinovasi dan modern</p> <p>Masih banyaknya Usaha Kecil Menengah (UKM) hasil perikanan yang belum memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)</p> <p>Minimnya kerja sama bidang usaha perikanan</p> <p>Inovasi peningkatan produk hasil perikanan belum berkembang</p>
	Belum terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	<p>Belum optimalnya pengelolaan Kawasan Konservasi Kelautan</p> <p>Masih kurangnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku</p>

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
<b>Pariwisata</b>		
Masih rendahnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah	Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata	Sarana dan prasarana serta amenitas pendukung pariwisata belum dibangun/dikembangkan secara maksimal
		Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata tiap destinasi
		Belum maksimalnya kerja sama dan sinergitas antara <i>stakeholder</i> pariwisata (mitra kerja, kab/kota, dll)
	Belum maksimalnya pengembangan ekosistem ekonomi kreatif	Belum optimalnya pengembangan sub sektor ekonomi kreatif sebagai pendukung daya tarik wisata
		Belum optimalnya dukungan dan pembinaan multi sektor kepada para pelaku ekonomi kreatif
		Belum fokus pada nilai kekhasan daerah dalam pengembangan potensi ekraf
<b>Pangan</b>		
Belum optimal pemenuhan pangan dalam mendukung IKN	Tingkat ketersediaan dan diversifikasi pangan masih belum optimal	Stabilisasi pasokan pangan masih belum optimal
		Promosi dan edukasi kepada masyarakat untuk memanfaatkan pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) yang masih kurang
<b>Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)</b>		
Lambatnya transformasi Ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan	Rendahnya produktivitas tanaman pangan (padi) dan hortikultura	Ketersediaan lahan pertanian yang berkurang
		Kurangnya infrastruktur pendukung pertanian
		Tingginya biaya produksi TPH
		Masih kurangnya ketersediaan benih unggul tanaman pangan dan hortikultura
		Belum optimalnya penanganan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura
		Minat kaum milenial menjadi petani semakin berkurang
<b>Pertanian (Pternakan)</b>		
Lambatnya transformasi ekonomi menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan	Populasi dan produktivitas ternak masih rendah	Ketersediaan bibit ternak lokal masih kurang
		Penerapan <i>Good Breeding Practice</i> dan <i>Good Farming Practice</i> belum optimal
		Keterbatasan prasarana pendukung usaha peternakan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Ketersediaan pakan ternak berkualitas masih kurang Masih munculnya penyakit hewan menular strategis dan zoonosis Terbatasnya kawasan peternakan Hilirisasi dan industrialisasi produk peternakan masih rendah Manajemen pemasaran produk peternakan belum optimal
<b>Pertanian (Perkebunan)</b>		
Lambatnya transformasi ekonomi di sektor perkebunan menuju pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan	Rendahnya produktivitas kebun rakyat  Permasalahan pemasaran dan lambatnya pembangunan industri hilir komoditas perkebunan  Meningkatnya tuntutan isu lingkungan dan penurunan emisi dalam pembangunan perkebunan	Infrastruktur di areal perkebunan yang tidak memadai Tingginya biaya produksi komoditas perkebunan tidak efisien Masih terbatasnya ketersediaan benih unggul bermutu bersertifikat dalam daerah dan sumber benih untuk mendorong pembangunan kebun Kurangnya pendampingan dari tenaga penyuluh untuk mendampingi budidaya pekebun Tidak kontinu dan tidak padunya proses fasilitasi dan pendampingan kegiatan hulu hilir usaha perkebunan Rendahnya kualitas olahan hasil perkebunan Akses pemasaran yang masih konvensional Masih banyak pekebun yang belum bermitra dengan PBS Pengelolaan ANKT di area perkebunan belum diterapkan secara konsisten Pemanfaatan limbah kelapa sawit (Biomassa dan POME) untuk pengembangan Bioenergi masih terbatas
<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>		
Belum meratanya infrastruktur ketenagalistrikan	Infrastruktur jaringan PLN hanya terpusat pada wilayah padat penduduknya	Kendala dalam pemerataan infrastruktur penyaluran tenaga listrik Kendala masyarakat tidak mampu dalam membiayai Belum optimalnya pembinaan, pengawasan dan kerja sama Pemerintah, PLN dan Swasta dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>Masih banyak masyarakat yang belum menikmati listrik PLN karena jauhnya jangkauan dari jaringan PLN, sehingga perlu dibangun infrastruktur listrik dengan menggunakan Energi Baru Terbarukan yang PLTS terpusat sehingga masyarakat dapat menikmati listrik 24 jam</p> <p>Masih adanya pelaku usaha ketenagalistrikan yang belum memahami perizinan usaha ketenagalistrikan dan kurangnya kesadaran tentang keselamatan ketenagalistrikan (K2)</p>
<p>Belum optimalnya peningkatan pembangkit listrik dengan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)</p>	<p>Belum optimalnya pencapaian bauran EBT sektor kelistrikan</p> <p>Masih rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan dan konservasi energi</p>	<p>Belum optimalnya cakupan pelayanan listrik pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik pada daerah belum berkembang, terpencil dan perdesaan</p> <p>Masih rendahnya pemanfaatan potensi sumber energi baru terbarukan sebagai energi alternatif pengganti energi fosil</p> <p>Belum optimalnya pembinaan, pengusahaan dan pengendalian pengusahaan pemanfaatan ketenagalistrikan</p> <p>Belum ditetapkannya regulasi daerah tentang rencana umum energi daerah</p> <p>Masih rendahnya pemanfaatan energi baru dan terbarukan, dipengaruhi oleh kurangnya ketersediaan infrastruktur energi baru dan terbarukan, dan belum menjadi prioritas pemerintah dibandingkan energi fosil</p> <p>Masih rendahnya persentase konsumsi energi di Kaltim dari sumber energi baru terbarukan</p>
<p>Belum tersedianya hasil evaluasi zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi</p>	<p>Pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan yang belum optimal</p>	<p>Masih terjadinya kekurangan air bersih di wilayah Kaltim</p> <p>Belum ditetapkannya cekungan air tanah, yang disebabkan keterbatasan kajian identifikasi potensi air tanah</p> <p>Belum ditetapkannya zona konservasi air tanah, dipengaruhi oleh kajian pendataan zona konservasi air tanah yang terbatas</p> <p>Belum tersedianya <i>database</i> dan sistem informasi hidrogeologi</p> <p>Masih terdapat pengguna air tanah yang belum memiliki ijin pemanfaatan air tanah, dan pemegang ijin pemanfaatan air tanah</p>

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>yang belum melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan</p> <p>Belum optimalnya penetapan nilai perolehan air tanah (NPA) dalam rangka peningkatan pendapatan bersumber dari pemanfaatan air tanah</p>
<p>Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan</p>	<p>Masih banyak perusahaan pertambangan yang belum menerapkan kaidah teknis pertambangan yang baik, sesuai dengan perundangan yang berlaku, baik secara administratif maupun teknis</p>	<p>Belum optimalnya inventarisasi atas pengumpulan, penetapan, pengelolaan data dan informasi WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil</p> <p>Belum optimalnya kegiatan penerbitan IUP dan perpanjangan IUP Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil, serta pengelolaan WIUP Pertambangan Mineral Logam dan Batubara untuk membantu kegiatan pengawasan dari Kementerian ESDM maupun kepolisian</p> <p>Belum terwujudnya perusahaan pertambangan yang melaksanakan kaidah teknik pertambangan yang baik untuk kegiatan pertambangan mineral logam dan batubara dan kegiatan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.</p> <p>Belum optimalnya kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi harga patokan mineral bukan logam dan batuan sebagai acuan penetapan harga patokan MBLB</p>
<b>Kehutanan</b>		
<p>Belum terwujudnya diversifikasi ekonomi sub sektor kehutanan</p>	<p>Belum optimalnya pemanfaatan hutan yang berkelanjutan</p>	<p>Belum optimalnya pemanfaatan hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung</p> <p>Belum optimalnya pembinaan pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi &lt;6000 m<sup>3</sup>/Tahun</p> <p>Belum optimalnya pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)</p>
<p>Belum terwujudnya penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan</p>	<p>Belum optimalnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan</p>	<p>Penyusunan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan provinsi yang belum optimal</p>

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) yang masih belum optimal</p> <p>Terhambatnya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan di luar kawasan hutan</p> <p>Masih kurangnya kualitas dan kuantitas bibit tanaman melalui sertifikasi sumber benih</p> <p>Belum optimalnya kegiatan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan dengan melibatkan masyarakat</p> <p>Belum optimalnya pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting (KBEP) dan konservasi provinsi</p> <p>Belum optimalnya perlindungan tumbuhan dan satwa liar tidak dilindungi</p> <p>Belum optimalnya perencanaan dan pengelolaan multi-pihak kawasan bernilai ekosistem penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam</p> <p>Belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</p> <p>Penyusunan rencana pengelolaan DAS dan pelaksanaan pengelolaan DAS terpadu multi pihak yang belum terintegrasi</p> <p>Belum optimalnya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan</p> <p>Masih kurangnya kuantitas dan kapasitas penyuluh kehutanan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan</p>
<b>Perdagangan</b>		
Belum optimalnya ekspor non migas dan batubara	<p>Ekspor Kaltim masih didominasi oleh produk Primer (migas dan batubara)</p> <p>Rendahnya daya saing produk yang dipasarkan</p>	<p>Terbatasnya ekspor komoditi dan produk non migas non batubara</p> <p>Belum optimalnya pemanfaatan/ peluang ekspor langsung di Kalimantan Timur</p> <p>Terbatasnya jangkauan pemasaran komoditi dan produk ekspor</p> <p>Minimnya produksi dan sarana distribusi bahan pokok</p> <p>Belum optimalnya fasilitasi sistem distribusi perdagangan</p> <p>Belum optimalnya kerja sama perdagangan</p>
<b>Perindustrian</b>		
Belum optimalnya pembangunan industri berbasis komoditi unggulan	Belum maksimalnya daya saing dan daya tarik investasi di Kawasan Peruntukan	<p>Kurang siapnya ketersediaan lahan industri</p> <p>Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur industri dan penunjang</p>

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	
	Industri dan Kawasan Industri	Belum optimalnya koordinasi, sinkronisasi, dan komitmen antar organisasi Kinerja kelembagaan dalam membangun dan mengelola kawasan belum optimal Belum optimalnya penerapan dan pengawasan standar produk	
	Masih rendahnya kompetensi sumber daya manusia industri	Kuranginya kerjasama lembaga pendidikan/pelatihan dan pelaku industri dalam pemenuhan tenaga kerja industri yang dibutuhkan Masih rendahnya kapasitas keterampilan dan penguasaan teknologi Belum optimalnya inovasi dan kreativitas	
	Belum kuatnya struktur industri di daerah	Integrasi industri hulu dan hilir antar sektor belum optimal Belum terbangunnya basis data sektor industri Belum optimalnya pemberdayaan industri melalui dukungan pengembangan kompetensi pengembangan ekosistem bisnis dan penyediaan fasilitas	
	<b>Sekretariat Daerah</b>		
	Belum optimalnya fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi simplikasi dalam perumusan pelaksanaan kebijakan daerah dan penyelenggaraan pemerintah	Belum optimalnya kinerja aparatur dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan	Kuranginya pemahaman secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya
			Belum adanya regulasi teknis terkait pelaksanaan tugas di Biro Pemerintahan dan Biro Kesejahteraan Rakyat
			Data yang tersedia belum lengkap, akurat dan valid
			Belum optimalnya penanganan permasalahan perbatasan
			Belum optimalnya koordinasi dalam rangka pencapaian sasaran di Perangkat Daerah
	Belum optimalnya target penawaran kerja sama	Kuranginya pemahaman penawaran kerja sama secara mendalam	
	Belum terpenuhinya kebutuhan produk hukum secara kuantitas, kualitas dan kejelasan objek hukum	Kuranginya pemahaman secara mendalam oleh ASN maupun Perangkat Daerah dalam menelaah ketentuan perundang-undangan dan produk-produk Hukum	
	Belum optimalnya pengendalian pembangunan	Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya.	

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Belum optimalnya penerapan kebijakan dan prinsip serta ketaatan kode etik pengadaan barang dan jasa	Kurangnya penerapan prinsip, kode etik, dan kebijakan pengadaan barang dan jasa
	Belum optimalnya Penerapan SAKIP	Masih kurangnya penerapan akuntabilitas kinerja sebagai budaya kerja
	Belum optimalnya kualitas layanan administrasi Pimpinan	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi guna perbaikan kinerja
	Belum optimalnya kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Belum optimalnya penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
<b>Sekretariat DPRD</b>		
Belum optimalnya pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	Belum optimalnya standar layanan yang diberikan kepada DPRD	Kurang koordinasi baik dari internal maupun eksternal sehingga berpengaruh terhadap kinerja DPRD
		Belum optimalnya pelayanan yang diberikan terhadap kegiatan DPRD
		Kurangnya pemahaman terkait prosedur administrasi keuangan
	Belum optimalnya pemanfaatan sarana teknologi informasi yang tersedia	Minimnya pemahaman terhadap teknologi informasi sehingga belum banyak mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota DPRD
		Lamban dalam memberikan informasi ter-update/perubahan kepada Anggota DPRD terkait regulasi maupun jadwal kegiatan kedewanan
		tidak adanya teknologi informasi internal terkait verifikasi SPJ kegiatan Anggota DPRD yang sudah selesai
Belum optimal pemanfaatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Belum tersedianya <i>nursery room</i> dan <i>play ground</i>	
	Fasilitas peralatan kerja di ruangan anggota DPRD sering rusak	
<b>Perencanaan</b>	Belum optimalnya pelaksanaan proses perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah, serta sinergi	Tingkat keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan belum optimal
Belum optimalnya capaian sasaran pembangunan daerah		Belum optimalnya pemanfaatan data dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	pusat, provinsi dan kabupaten/kota	<p>Adanya perbedaan periode dokumen rencana pembangunan jangka menengah antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang menyulitkan untuk sinergi prioritas dan target pembangunan.</p> <p>Perbedaan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi dengan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota sebab pada sebagian kabupaten/kota masih belum melakukan penyesuaian terhadap RPJMD dan RKPD Provinsi dikarenakan belum menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (bupati/walikota) sehingga sinergi perencanaan dari provinsi terhadap kabupaten/kota belum terlaksana secara optimal.</p>
<b>Keuangan</b>		
Belum optimalnya Laporan Akuntabilitas Keuangan Daerah yang mencapai WTP	Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	<p>Belum optimalnya identifikasi, Pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah</p> <p>Masih lemahnya sistem pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah</p> <p>Sering terjadinya perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat</p>
Belum optimalnya pendapatan asli daerah	<p>Belum optimalnya pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</p> <p>Belum optimalnya pelaksanaan pelayanan dan penatausahaan Penerima Pendapatan Asli Daerah berbasis digitalisasi</p>	<p>Belum optimalnya penyusunan perencanaan pendapatan daerah</p> <p>Belum optimalnya validasi atas pajak daerah yang bersifat <i>Self Assessment</i></p> <p>Masih tingginya piutang pajak daerah</p> <p>Belum optimalnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis elektronifikasi</p> <p><i>Database</i> berbasis digital yang belum aktual</p>
<b>Kepegawaian</b>		
Implementasi penyelenggaraan Sistem Merit yang belum berjalan secara optimal	<p>Belum terpenuhinya ASN sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah</p> <p>Belum terukurnya penilaian kinerja ASN sesuai kaidah dan belum optimalnya</p>	<p>Belum tersedianya perhitungan kebutuhan ASN sesuai dengan ketentuan</p> <p>Sebagian besar ASN yang telah diukur kompetensinya belum memenuhi standar kompetensi jabatan</p> <p>Instrumen pengukuran kinerja masih dalam tahap penyiapan</p> <p>Penilaian SKP masih sebatas formalitas untuk memenuhi</p>

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>persyaratan administrasi kepegawaian</p> <p>Pejabat penilai kinerja secara berjenjang belum sepenuhnya memahami tata cara melakukan penilaian kinerja secara objektif</p> <p>Pelaksanaan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> belum optimal</p> <p>Belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN</p> <p>Belum semua ASN diukur kompetensinya</p> <p>Belum tersedianya dokumen analisis kebutuhan diklat</p>
<b>Pendidikan dan Pelatihan</b>		
Masih rendahnya profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia/ aparatur	Belum optimalnya upaya pengembangan kompetensi SDM/Aparatur, baik dari segi kuantitas maupun kualitas	Masih rendahnya aparatur yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi yang meliputi kompetensi manajerial, teknis, dan sosio-kultural.
<b>Penelitian dan Pengembangan</b>		
Hasil kelitbangan belum optimal dimanfaatkan oleh perangkat daerah maupun masyarakat	<p>Belum adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan hasil kelitbangan</p> <p>Hasil Kelitbangan belum aplikatif</p>	<p>Kepedulian dan perhatian terhadap hasil kelitbangan masih rendah</p> <p>Pembinaan kab/kota belum optimal</p> <p>Kurangnya pelatihan dan pendampingan dalam menghasilkan naskah kebijakan yang dihasilkan sebagai dasar kebijakan Pemprov Kaltim</p> <p>Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam riset</p> <p>Skema pendanaan riset yang belum memadai</p> <p>Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang riset</p> <p>Kurangnya kemitraan (praktisi) dalam penelitian</p> <p>Monitoring dan evaluasi hasil kelitbangan belum dilaksanakan secara periodik</p> <p>Kurangnya pelatihan dan pendampingan dalam menghasilkan publikasi ilmiah/buku/naskah akademik/di nasional dan internasional/prosiding</p>
Belum berkembangnya inovasi daerah	Produk-produk inovasi yang dihasilkan masih belum memenuhi kebutuhan penyelesaian permasalahan pembangunan	<p>Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang inovasi dan teknologi</p> <p>Kurangnya pelatihan dan pendampingan dalam menghasilkan produk inovasi dari perangkat daerah Pemprov Kaltim dan para pihak yang dibina masih kurang</p>

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Kemampuan inovator dalam menghasilkan produk inovasi dari perangkat daerah Pemprov Kaltim dan para pihak yang dibina masih kurang
		Kemampuan SDM IPTEK dalam menghasilkan perekayasa IPTEK untuk daerah masih kurang
	Regulasi pengembangan inovasi belum dilaksanakan secara optimal	Standar penilaian terkait indeks inovasi daerah dari pusat yang meningkat dan berubah-ubah
	Komitmen pengembangan inovasi masih rendah	Pemahaman terkait inovasi masih kurang
<b>Pengawasan</b>		
Belum optimalnya pengawasan internal pemerintah daerah	SPIP belum sepenuhnya diimplementasikan	Pedoman pelaksanaan SPIP terintegrasi, sehingga harus disosialisasikan kembali
		Masih adanya temuan hasil pengawasan baik dari internal dan eksternal
	Kapabilitas APIP masih pada Level 3	Belum optimalnya penerapan kebijakan dan standar operasional pengendalian internal
		Belum optimalnya pendokumentasian pengendalian internal secara rapi, terstruktur, rutin dan konsisten
		Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi atas efektivitas pengendalian secara periodik
	Belum optimalnya program yang terkait implementasi Reformasi Birokrasi melalui penguatan pengawasan	Penguatan monitoring dan evaluasi SPIP, Zona Integritas menuju WBK/WBBM, penanganan laporan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, penanganan pengaduan, PMRB, Survei Penilaian Integritas, <i>Wistle Blowing</i> Sistem, <i>Probitiy Audit</i> , LHPKN dan LHKASN
		Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan belum optimal
		Peran Inspektorat Daerah selaku <i>Quality Assurance</i> (QA) dan <i>Advisory</i> belum optimal
		Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah
	Belum terbangunnya sistem pengawasan melalui pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dan membangun sinergitas dengan pihak terkait	Belum optimalnya pemeriksaan berkala dan tujuan tertentu, reuiu atas dokumen perencanaan dan keuangan serta lainnya, evaluasi, monitoring hasil pengawasan dan kegiatan tertentu, pemutakhiran data hasil pengawasan.

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	dalam upaya mencegah penyimpangan- penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Inspektorat Daerah belum memiliki sistem deteksi dini ( <i>early warning</i> ) yang handal dalam mencegah korupsi baik untuk deteksi <i>fraud</i> , maupun penyimpangan lainnya
	Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia aparat pengawasan maupun tenaga fungsional umum lainnya yang belum sebanding dengan beban tugas dan kewenangan APIP	Belum optimalnya prioritas program yang dapat membangun sistem pengawasan internal yang efektif dan menghasilkan kegiatan penjaminan ( <i>assurance</i> ) dan layanan konsultasi yang berkualitas
	Masih belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh perangkat daerah	Masih belum optimalnya peningkatan kompetensi APIP seiring dengan kebutuhan pengawasan dan cakupan pengawasan
		Jumlah SDM Pengawasan / Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD belum sebanding dengan tugas pengawasan baik tugas rutin maupun <i>mandatory</i>
<b>Pemerintahan Umum</b>		
Terganggunya stabilitas IPOLEKSOSBUD di Kalimantan Timur	Belum optimalnya kesadaran berdemokrasi masyarakat	Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan berdemokrasi
	Belum optimalnya kesadaran masyarakat mengenai wawasan kebangsaan	Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik demokrasi
	Merosotnya kecintaan terhadap nilai-nilai seni dan budaya bangsa	Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan
	Meningkatnya angka prevalensi penyalahgunaan narkotika	Masih lemahnya semangat kebersamaan dan turunnya kepedulian sosial
		Masih meningkatnya simbolisme agama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan
		Masih meningkatnya tindak kekerasan dan disharmoni sosial dalam masyarakat
		Kurangnya pemahaman nilai-nilai seni dan Budaya di masyarakat
		Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya narkoba

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Meningkatnya penganut agama yang menyimpang	Kurangnya edukasi moderasi beragama
	Peningkatan penggunaan produk impor atau penurunan penggunaan produk dalam negeri	Kurangnya edukasi cinta produk dalam negeri
	Banyaknya ormas yang tidak sesuai AD/ART	Kurangnya pembekalan dan pendampingan kepada pengurus-pengurus ormas untuk menjalankan tupoksinya
	Tingginya potensi konflik sosial diwilayah Kalimantan Timur	Ego sektoral kedaerahan menyebabkan mudahnya masyarakat terprovokasi
		Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang konflik sosial
		Geografis Kalimantan Timur yang multikultural

### BAB III

#### KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan pembiayaan pembangunan yang direncanakan pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang arah kebijakan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur, perkiraan kondisi ekonomi makro yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang akan memberikan pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja makro ekonomi yang direncanakan, kerangka pendanaan menjadi bagian yang sangat penting dan berpengaruh serta harus dilakukan pencermatan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Analisis kerangka pendanaan memberikan analisis terkait perkiraan besaran pendapatan dari berbagai sumber pendapatan pada sektor-sektor potensial, perkiraan belanja daerah yang akan dilakukan pemerintah, dan pembiayaan untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja.

#### 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada masa pemulihan perekonomian daerah pasca pandemi COVID-19, kinerja perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2022 masih memiliki tren perbaikan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2021 yang mencapai 2,55 persen yang merupakan pertumbuhan positif kali pertama semenjak pandemi berlangsung. Capaian ini sebagai salah satu dampak *base effect* mulai membaiknya perekonomian di tengah kasus COVID-19 yang terjadi, mengingat pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan kinerja sektor-sektor di dalam negeri, serta melemahkan permintaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Seiring dengan pulihnya perekonomian, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur tahun 2022 tumbuh signifikan mencapai 4,48 persen.

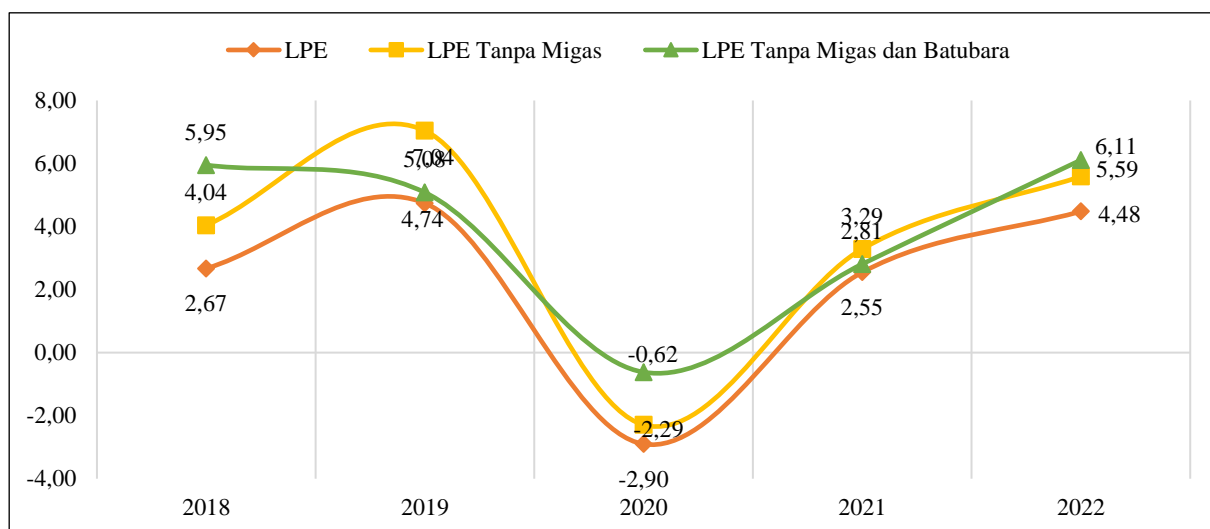
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur, hampir seluruh provinsi di Kalimantan melanjutkan tren perbaikan kinerja perekonomian meski melambat. Berdasarkan pangsaanya, Kalimantan Timur masih menjadi provinsi dengan ekonomi terbesar di Kalimantan dengan pangsa mencapai 52,14 persen terhadap total perekonomian Kalimantan. Selaras dengan hal tersebut, Perbaikan perekonomian nasional juga mengalami tren perbaikan seperti perekonomian Kalimantan Timur dan Kalimantan. Laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2022 mencapai 5,31 persen, setelah pada tahun sebelumnya tumbuh 3,69 persen.

### 3.1.1 Kinerja Ekonomi Daerah, Peluang, Tantangan dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional pada RKP 2024

#### A. Kinerja Ekonomi Daerah

##### 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami perbaikan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 setelah berkontraksi pada tahun 2016. Namun pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur mengalami kontraksi paling dalam hingga 2,85 persen (*y-o-y*) yang dipengaruhi oleh penurunan kinerja beberapa lapangan usaha sebagai dampak pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia. Kinerja perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2021 ini mengalami perbaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 seiring dengan keberhasilan program vaksinasi di seluruh wilayah yang mendorong pulihnya aktivitas perekonomian masyarakat. Laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2021 tercatat mencapai 2,55 persen (*y-o-y*). Seiring dengan pulihnya perekonomian Kalimantan Timur pada tahun 2022, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur tumbuh 4,48 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

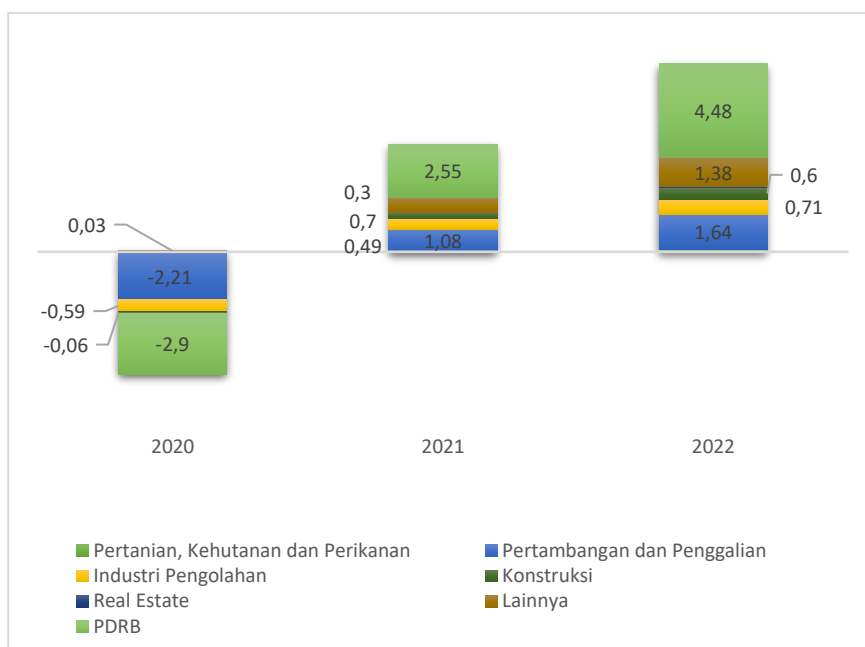


Gambar III.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%) (*y-o-y*)  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

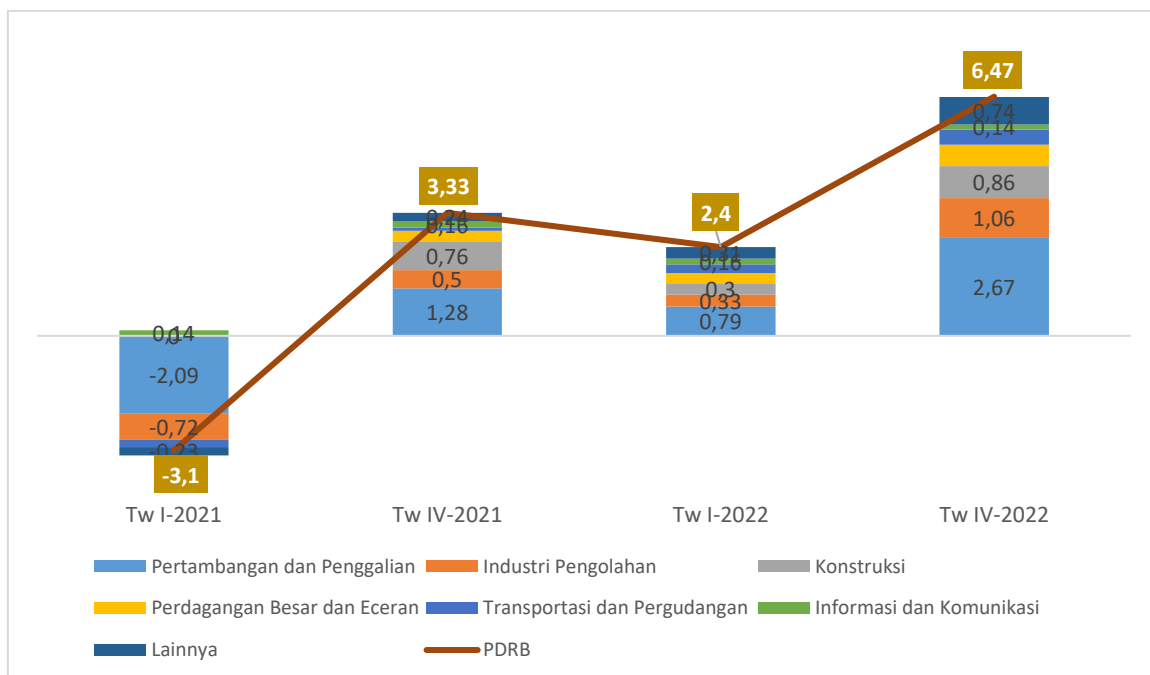
Jika dilihat laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas Tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,59 persen, meningkat lebih baik dibandingkan Tahun 2021. Adapun kinerja perekonomian tanpa migas dan batubara juga mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 6,11 persen di Tahun 2022.

Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi tahun 2022 menunjukkan capaian kinerja yang positif di seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 11,96 persen, lapangan usaha Jasa Keuangan sebesar 9,46 persen, dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum sebesar 9,16 persen. Selain itu, kinerja lapangan usaha utama Kalimantan Timur, yaitu Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian pada periode ini juga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,49 persen.



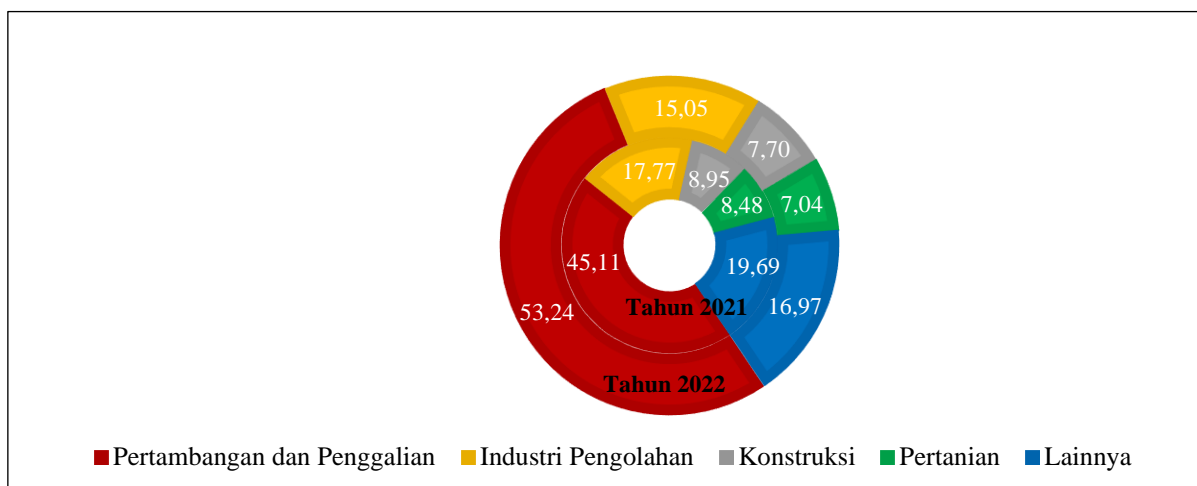
Gambar III.2  
Sumber Pertumbuhan PDRB Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha  
Tahun 2020-2022 (persen)  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022, lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian merupakan lapangan usaha yang memberikan andil positif terbesar, yaitu sebesar 1,64 persen. Kemudian diikuti oleh lapangan usaha Industri Pengolahan dengan andil positif sebesar 0,71 persen, lapangan usaha Konstruksi dengan andil positif sebesar 0,60 persen, dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan andil positif sebesar 0,40 persen.



Gambar III.3  
 Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 (*y-on-y*) (Persen)  
 (Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Struktur perekonomian Kalimantan Timur menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 masih didominasi oleh pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 53,24 persen dan industri pengolahan sebesar 15,05 persen. Kemudian disusul sektor konstruksi yang kontribusinya meningkat menjadi sebesar 7,70 persen. Sedangkan kontribusi sektor pertanian yang diharapkan mampu menjadi salah satu sektor yang berkembang di Kalimantan Timur, hanya memberikan kontribusi sebesar 7,04 persen, namun kontribusinya menurun dibandingkan Tahun 2021 sebesar 8,48 persen.



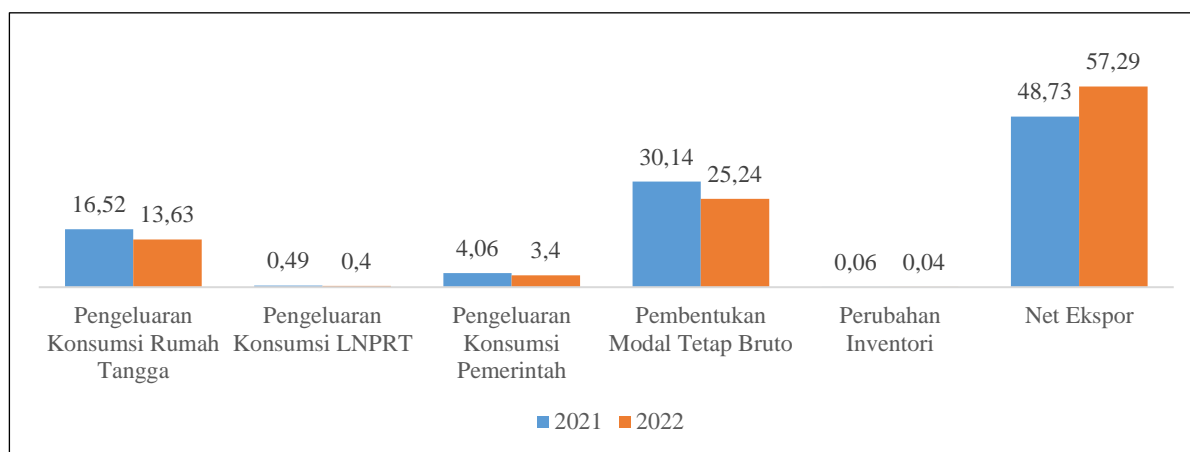
Gambar III.4  
 Struktur Ekonomi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2022 (%)  
 (Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Berdasarkan gambar di atas, dapat terlihat dinamika struktur perekonomian Kalimantan Timur yang mengalami pemulihan. Kontribusi Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian pada Tahun 2022 mengalami peningkatan diakibatkan oleh tren peningkatan harga minyak dunia dan batubara, serta meningkatnya permintaan hasil pertambangan dari negara tujuan ekspor Kalimantan Timur. Selain itu pula, perbaikan ini diakibatkan oleh peningkatan kinerja *lifting* migas di Kaltim yang bersumber baik dari produksi sumur-sumur eksisting, hasil produksi sumur-sumur baru dan hasil *artificial lift*.

Lapangan usaha industri pengolahan juga memiliki peran yang cukup besar terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Timur dengan kontribusi pada Tahun 2022 lebih rendah dari tahun 2021 dengan capaian 15,05 persen. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan kinerja CPO merupakan dampak dari hasil panen yang tidak sebaik perkiraan sebelumnya akibat efek cuaca buruk pada tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan struktur PDRB Provinsi Kalimantan Timur menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 masih relatif sama dengan dominasi sektor unggulan yang sama dengan tahun sebelumnya. Terdapat empat lapangan usaha utama yang mendominasi yaitu Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian dengan peranan sebesar 53,24 persen, Industri Pengolahan dengan peranan sebesar 15,05 persen, Konstruksi dengan peranan sebesar 7,70 persen serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan peranan sebesar 7,04 persen.

Distribusi PDRB Kalimantan Timur menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada Tahun 2022 masih didominasi oleh Komponen Net Ekspor dengan peranan sebesar 57,29 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 25,24 persen, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 13,63 persen, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 3,40 persen dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit Rumah Tangga sebesar 0,4 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya, meningkatnya aktivitas perdagangan Kalimantan Timur menyebabkan meningkatnya porsi terhadap pembentukan PDRB dari sisi pengeluaran. Meningkatnya permintaan negara tujuan terhadap migas dan batubara mengakibatkan perubahan pada struktur perekonomian Kalimantan Timur.

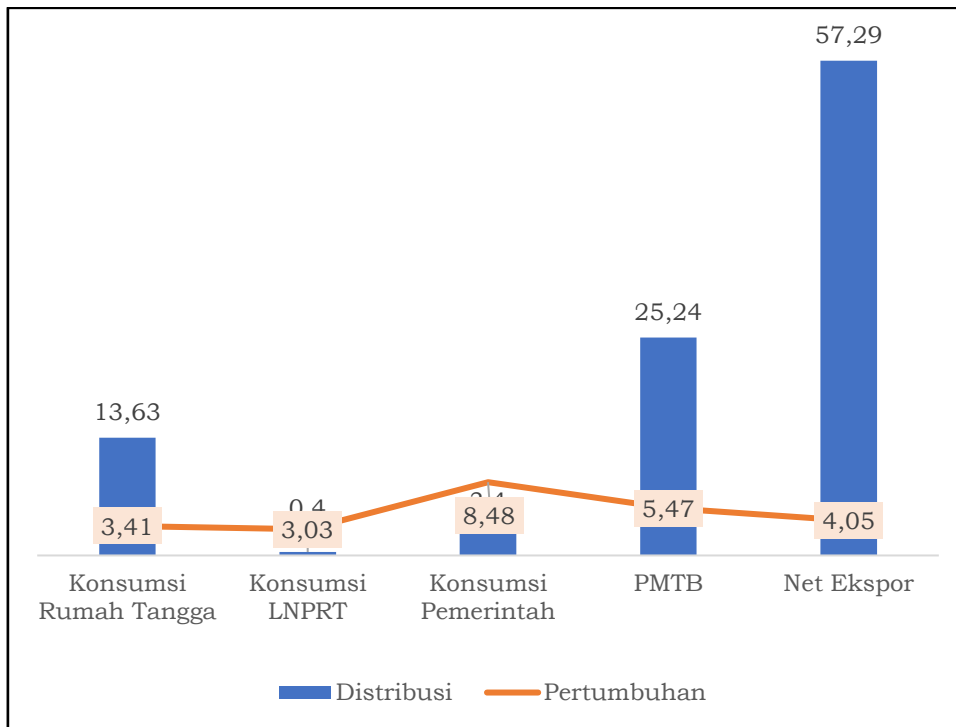


Gambar III.5

Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 dan 2022 (%)  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2022 tumbuh positif mencapai 4,48 persen. Seluruh komponen PDRB menurut Pengeluaran mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang mencapai 8,48 persen yang disebabkan oleh adanya peningkatan kegiatan pemerintah. Diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto tumbuh sebesar 5,47 persen, komponen ekspor Barang dan Jasa sebesar 3,67 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,41 persen.

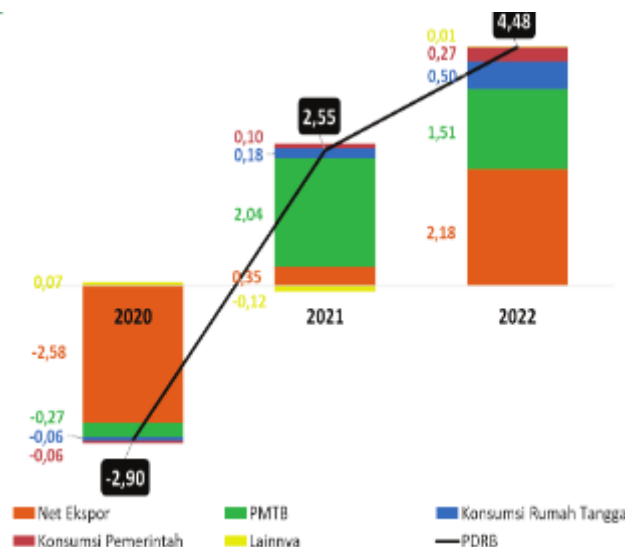
Struktur PDRB Kalimantan Timur menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 masih didominasi oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yaitu sebesar 108,00 persen, diikuti oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 25,24 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 13,63 persen, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 3,40 persen dan komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga sebesar 0,40 persen. Sementara itu, komponen Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut Pengeluaran memiliki peran sebesar 50,71 persen, sehingga Net Ekspor memberikan kontribusi sebesar 57,29 persen terhadap total ekonomi Kalimantan Timur.



Gambar III.6  
Distribusi dan Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 (%)  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Perkembangan PDRB Pengeluaran pada tahun 2022 (*y-o-y*), komponen konsumsi pemerintah tumbuh paling tinggi dengan capaian 8,48 persen. Pertumbuhan tertinggi berikutnya terjadi pada Komponen PMTB sebesar 5,47 persen dan komponen konsumsi LNPRT tumbuh paling rendah sebesar 3,03 persen.

Jika dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 secara (*y-on-y*), maka sumbangan terbesar adalah berasal dari Komponen Net Ekspor, yaitu sebesar 2,18 persen. Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi selanjutnya disumbang dari Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,51 persen, dan Komponen lainnya yang memberikan andil positif sebesar 0,79 persen.

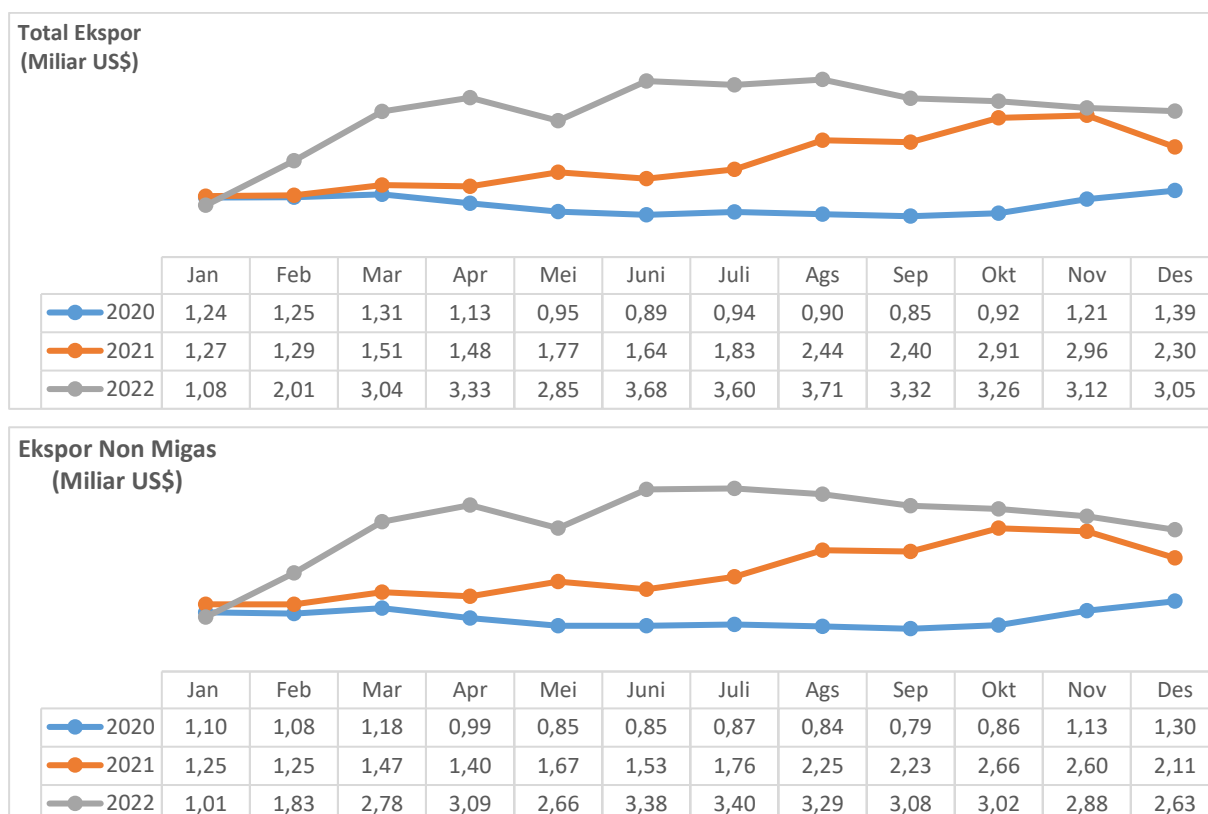


Gambar III.7  
Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 (y-o-y) (%)  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

## 2) Ekspor dan Impor

Nilai Ekspor Kalimantan Timur pada Desember 2022 mencapai US\$ 3,05 miliar mengalami penurunan sebesar 2,09 persen dibanding November 2022 yang mencapai US\$ 3,12 miliar. Secara kumulatif, nilai ekspor Kalimantan Timur pada tahun 2022 mencapai US\$ 36,05 miliar dan capaian ini lebih tinggi dari capaian ekspor pada tahun 2021 yang mencapai US\$ 5,55 miliar. Penurunan nilai ekspor Desember 2022 disebabkan oleh turunnya ekspor nonmigas sebesar 8,81 persen, sementara ekspor migas naik 79,67 persen. Peranan ekspor nonmigas yang mencapai 86,08 persen mempengaruhi turunnya ekspor secara total. Ekspor non migas Desember 2022 tercatat sebesar US\$ 2,63 miliar, turun dari ekspor migas November 2022 yang tercatat US\$ 2,88 miliar. Sedangkan ekspor migas Desember sebesar US\$ 0,43 miliar, naik dari ekspor migas November yang tercatat US\$ 0,24 miliar.

Nilai ekspor 10 (sepuluh) golongan barang utama pada Desember 2022 jika dibandingkan November 2022 mengalami penurunan sebesar 8,51 persen. Jika dirinci, penurunan terbesar terjadi pada golongan barang pupuk yang menurun sebesar 81,87 persen, disusul golongan bahan kimia anorganik yang menurun sebesar 42,84 persen dan golongan barang yang memiliki peran paling besar yakni bahan bakar mineral nonmigas menurun sebesar 9,75 persen.



Gambar III.8

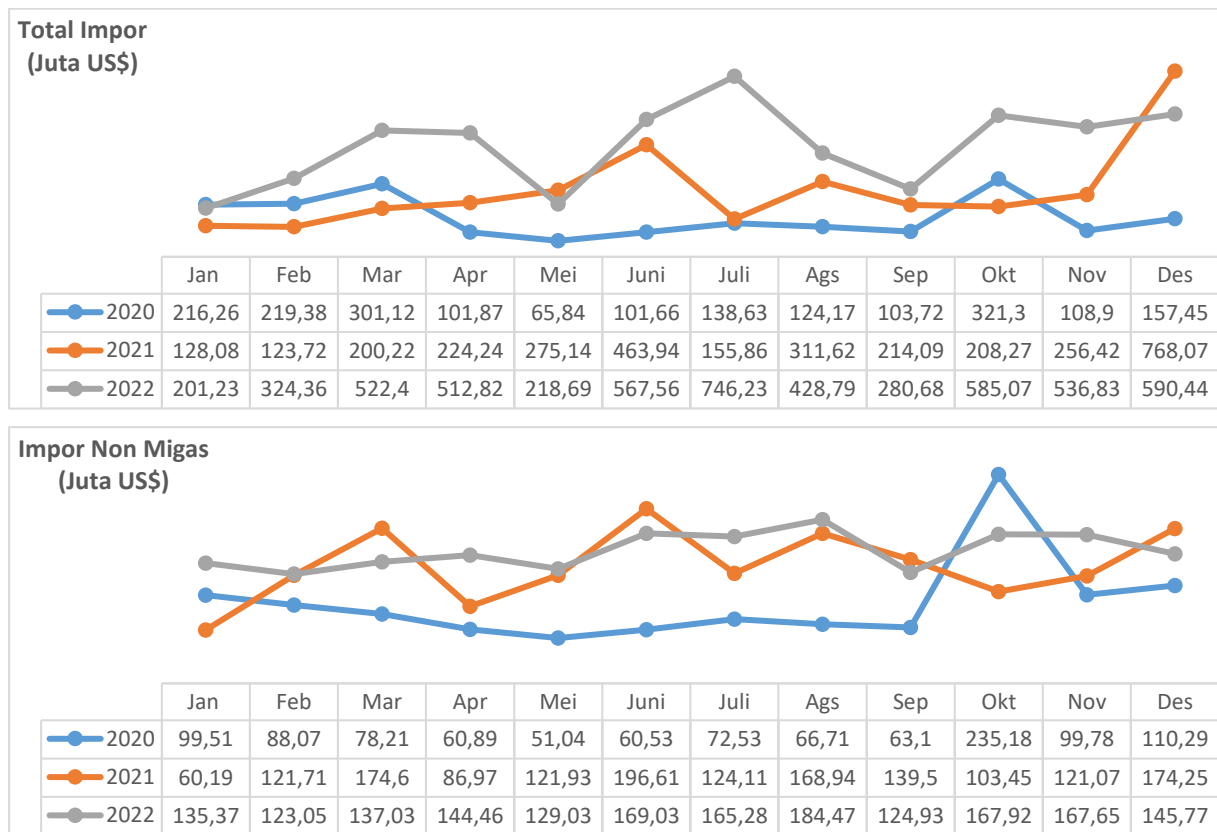
Perkembangan Ekspor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2022  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Total nilai ekspor nonmigas ke 13 negara tujuan utama pada Desember 2022 mencapai US\$2.397,27 juta mengalami penurunan US\$284,59 juta (10,61 persen) dibandingkan November 2022. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh turunnya nilai ekspor ke beberapa negara utama seperti ekspor ke negara Tiongkok yang turun US\$ 162,13 juta (16,40 persen), kemudian negara Taiwan yang turun US\$133,47 juta. Di kawasan Eropa nilai ekspor Kalimantan Timur naik US\$32,17 juta (66,79 persen), sedangkan di kawasan ASEAN naik US\$18,99 juta (3,44 persen). Ekspor Kalimantan Timur yang mengalami peningkatan nilai cukup signifikan terjadi pada ekspor ke negara Thailand yang naik sebesar US\$59,26 juta (156,77 persen).

Impor Kalimantan Timur pada Desember 2022 mencapai US\$ 590,44 juta dan mengalami peningkatan 9,99 persen dibanding November 2022 serta bila dibanding Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 23,13 persen. Nilai impor barang migas tercatat mencapai US\$ 444,66 juta atau naik 20,45 persen dibanding November 2022. Sementara untuk komoditi barang non migas tercatat mencapai US\$ 145,77 juta atau turun 13,05 persen dibanding November 2022.

Secara kumulatif nilai impor Kalimantan Timur pada tahun 2022 mencapai US\$ 5,42 miliar, naik sebesar 62,72 persen dibanding periode yang sama tahun 2021. Peran impor barang migas mencapai 67,75 persen sedangkan peranan impor barang non migas mencapai 32,25 persen.

Jika dibanding dengan November 2022, penurunan nilai impor terbesar pada Desember 2022 terjadi pada golongan barang bahan bakar mineral non migas yang turun 99,99 persen, yaitu dari US\$ 0,33 juta, menjadi US\$ 0,00 juta, kemudian disusul oleh golongan pupuk yang turun 56,77 persen yaitu dari US\$ 49,01 juta menjadi US\$ 21,18 juta serta golongan karet dan barang dari karet yang mengalami penurunan 28,00 persen yaitu dari US\$ 5,62 juta menjadi US\$ 4,05 juta.

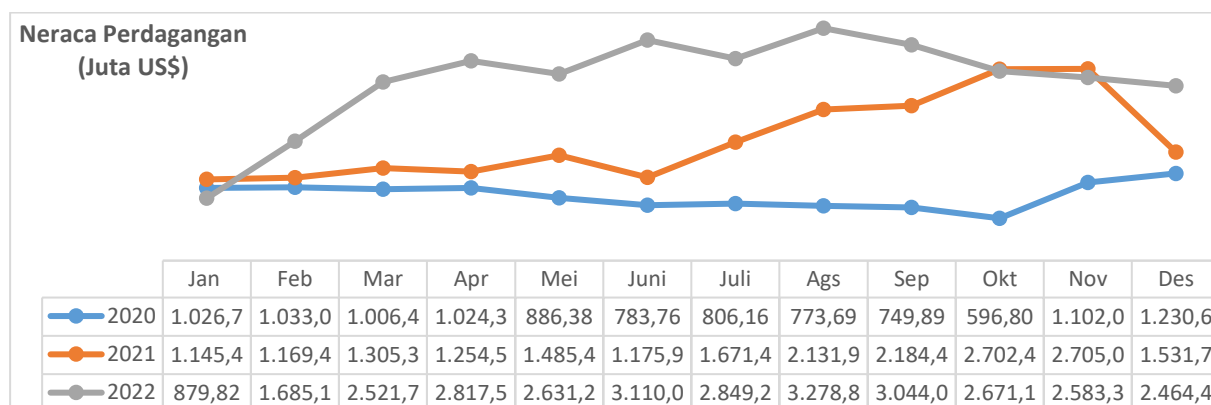


Gambar III.9

Perkembangan Impor Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2022  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Neraca perdagangan Kalimantan Timur pada Desember 2022 menunjukkan nilai yang positif (surplus) sebesar US\$ 2,46 miliar. Angka ini mengalami penurunan dibanding neraca perdagangan pada November 2022 yang surplus sebesar US\$ 2,58 miliar. Secara kumulatif tahun 2022 neraca perdagangan Kalimantan Timur tercatat surplus sebesar US\$ 30,63 miliar, atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan neraca perdagangan

pada periode yang sama di tahun 2021 yang surplus sebesar US\$ 20,47 miliar.



Gambar III.10  
Neraca Perdagangan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2022  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

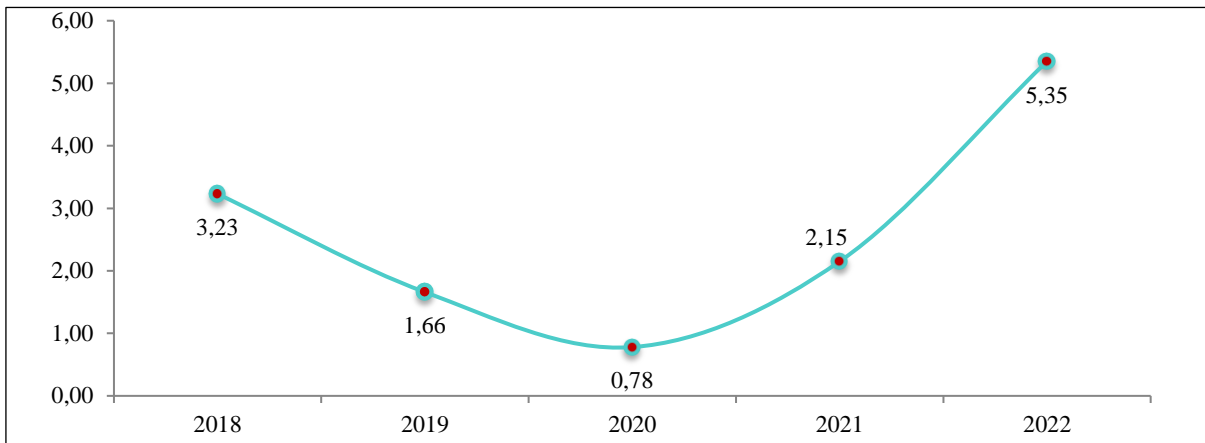
### 3) Inflasi

Inflasi Kalimantan Timur pada tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 seiring dengan peningkatan permintaan masyarakat, namun tetap berada di sekitar rentang sasaran inflasi nasional. Proses pemulihan ekonomi Kalimantan Timur yang mendorong berangsurnya peningkatan permintaan dan risiko terganggunya distribusi/pasokan menjadi faktor utama yang akan menyebabkan peningkatan tekanan inflasi.

Selain dari sisi peningkatan permintaan, risiko peningkatan inflasi juga bersumber dari keterbatasan pasokan dari daerah sentra produsen yang utamanya disebabkan oleh gangguan cuaca akibat adanya fenomena La Nina. Tekanan inflasi juga berasal dari sektor pangan berasal dari *pricing behavior* pasca COVID-19 sehingga mendorong produsen meningkatkan harga sebagai kompensasi kerugian di tahun 2020. Sementara itu, tekanan inflasi juga berasal dari sektor transportasi yang disebabkan oleh lebih mudahnya persyaratan masyarakat untuk melakukan perjalanan dan juga diiringi fasilitas kesehatan yang lebih memadai serta terjangkau. Lebih lanjut, kenaikan inflasi juga didorong oleh penyesuaian harga sejumlah komoditas yang terpengaruh kebijakan tarif/fiskal pemerintah seperti kenaikan cukai rokok, kenaikan tarif iuran BPJS kelas III, dan tarif bea materai.

Jika melihat dari tingkat inflasi kelompok pengeluaran, lima kelompok pengeluaran yang memiliki tingkat inflasi tertinggi terjadi pada kelompok transportasi sebesar 13,26 persen, diikuti kelompok makanan, minuman dan

tembakau sebesar 6,56 persen, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,62 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,29 persen, kelompok perumahan sebesar 3,87 persen.



Gambar III.11  
Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022 (%)  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

#### 4) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Kalimantan Timur tahun 2022 sebesar 5,71 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam orang penganggur. Pada 2022, TPT mengalami penurunan sebesar 1,12 poin dibandingkan tahun 2021.

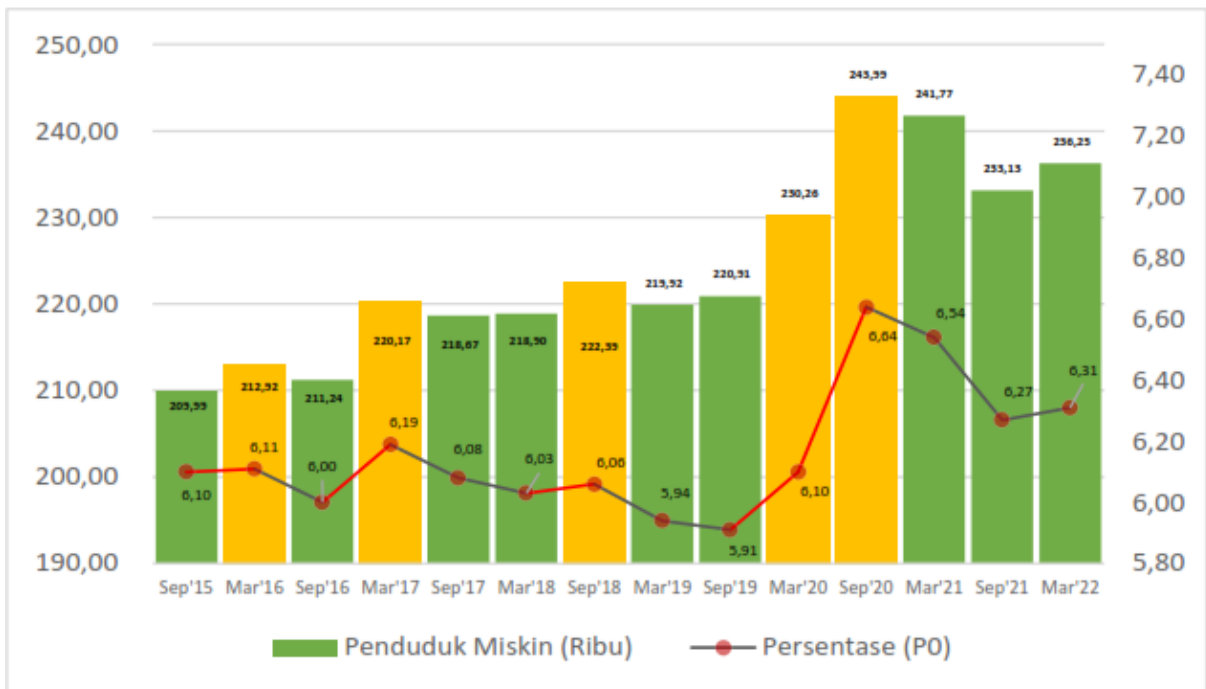
Berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki pada tahun 2022 sebesar 5,12 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 6,90 persen. TPT menurut jenis kelamin memiliki pola yang berkebalikan antara perempuan dan laki-laki, yaitu TPT laki-laki mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 dan perempuan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021. TPT laki-laki turun 2,10 poin persen, sedangkan TPT Perempuan cenderung naik sebesar 0,77 poin persen.

Jika berdasarkan daerah tempat tinggal, TPT perkotaan mencapai 6,72 persen atau lebih tinggi dibanding TPT di daerah perdesaan yang mencapai 3,61 persen. Dibandingkan tahun 2021, TPT perkotaan turun sebesar 0,88 persen dan perdesaan turun sebesar 1,68 persen.

Dampak pandemi COVID-19 terhadap ketenagakerjaan di Kalimantan Timur pada tahun 2022 telah mengalami penurunan yang berarti perkembangan aktivitas usaha yang melibatkan tenaga kerja telah berangsur-angsur pulih. Hal ini tampak dari perkembangan jumlah pengangguran karena COVID-19 pada tahun 2022 yang turun sebesar 21.439 orang atau 79,17 persen dibanding tahun 2021. Begitu juga halnya dengan penduduk yang sementara tidak bekerja karena Covid-19 dan penduduk yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 juga mengalami penurunan.

### 5) Tingkat Kemiskinan

Perkembangan tingkat kemiskinan Kalimantan Timur pada periode Maret 2022 mengalami perbaikan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Hal ini menggambarkan pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kalimantan Timur dalam kurun waktu tiga tahun terakhir pasca pandemi Covid-19 pertama kali melanda Indonesia dan secara khusus Kalimantan Timur.



Gambar III.12  
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Timur September 2015-Maret 2022  
(Sumber: BPS Kalimantan Timur, 2023)

Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur pada tahun 2022 mencapai 236,25 ribu orang. Dibandingkan 2021, jumlah penduduk miskin turun 5,52 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 tercatat sebesar 6,31 persen, turun 0,23 persen poin terhadap Maret.

#### 6) Investasi

Nilai investasi Kalimantan Timur sampai dengan triwulan III Tahun 2022 telah mencapai Rp 41,20 Triliun dengan realisasi PMDN sebesar Rp.28,76 triliun dan realisasi PMA sebesar Rp 12,44 triliun. Realisasi Investasi PMDN paling besar berada di Kota Balikpapan, yaitu mencapai Rp 9,35 triliun atau 32,51 persen, dan Kabupaten Kutai Timur dengan realisasi sebesar Rp 8,43 triliun. Sedangkan investasi PMA paling besar berada di Kabupaten Kutai Timur, yaitu mencacapi US\$ 430,54 juta dan Kabupaten Kutai Barat mencapai US\$ 118,61 juta. Adapun sektor usaha yang mampu menarik investasi PMDN tertinggi adalah Pertambangan, Industri Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi serta Industri Makanan. Sedangkan Realisasi PMA berdasarkan sektor usaha, sub sektor Pertambangan memiliki realisasi investasi terbesar yaitu US\$ 449,19 juta atau sebesar 51,80 persen dan Industri Mineral Non Logam yaitu sebesar US\$ 100,18 juta atau sebesar 11,55 persen.

### B. Tantangan dan Peluang Perekonomian Daerah Tahun 2023 dan 2024

#### 1) Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kalimantan Timur masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa Tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara cermat dan komprehensif serta dengan langkah-langkah yang lebih nyata. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

- a) Potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara yang menjadi mitra dagang utama Kalimantan Timur yang berpengaruh terhadap permintaan komoditi ekspor;
- b) Isu geopolitik dunia yakni perang dagang Australia- Republik Rakyat Tiongkok, serta Konflik Rusia – Ukraina yang berdampak pada perekonomian global;

- c) Potensi terjadinya krisis ekonomi global akibat gangguan rantai pasok, kerawanan pangan dan tantangan kesehatan masyarakat yang dikhawatirkan memicu stagflasi perekonomian dunia;
- d) Kebijakan ekonomi hijau menjadi tuntutan masyarakat global dimana Indonesia untuk mendorong transformasi ekonomi menuju pembangunan yang rendah emisi dan ramah lingkungan;
- e) Kebijakan pemerintah pusat yang sewaktu-waktu dapat berubah berkaitan dengan ekspor bahan mentah (terutama komoditas batubara);
- f) Mulai digalakkannya implementasi energi baru terbarukan di Kawasan Asia Timur menyebabkan permintaan ekspor berpotensi menurun;
- g) Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang melambat akibat masih dalam situasi pemulihan pandemi COVID-19 yang menurunkan tingkat konsumsi masyarakat;

## 2) Peluang

Ekonomi Kaltim Tahun 2023 dan 2024 diperkirakan tetap tumbuh positif namun masih terbatas. Beberapa peluang yang diperkirakan mampu mempertahankan kinerja positif ekonomi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a) Momentum pembangunan Ibu Kota Nusantara, diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan sentimen bisnis di daerah serta mempercepat realisasi investasi, terutama dalam rangka pembangunan sarana dan prasarana IKN Nusantara;
- b) Tumbuhnya minat investasi di sektor hilirisasi produk turunan batubara dan komoditas kelapa sawit bernilai tambah tinggi seperti biodiesel dan minyak goreng;
- c) Realisasi tambahan perolehan pendapatan daerah melalui sumber pendanaan alternatif dari Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca *Forest Carbon Partnership Facilities – Carbon Fund (FCPF-CF)* serta potensi sumber pendanaan dari Dana Bagi Hasil Sawit;
- d) Berlanjutnya proyek peningkatan kapasitas kilang minyak Balikpapan/*Refinery Development Master Plan Refinery Unit V (RDMP RU V Pertamina)* dan beberapa proyek swasta lain;
- e) Peningkatan kinerja ekspor batu bara seiring dengan berlanjutnya perbaikan ekonomi negara tujuan utama ekspor seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Negara Asia lainnya;

- f) Meningkatnya kinerja lapangan usaha konstruksi seiring dengan berlanjutnya pembangunan Ibu Kota Nusantara, pengerjaan proyek strategis *multiyears existing* (RDMP RU V, Bendungan Sepaku – Semoi, Pabrik Amonium Nitrat, Pabrik Coal-Methanol) dan realisasi investasi baru korporasi di Kaltim dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi;
- g) Optimalisasi Kebijakan B20 dan B30 dan rencana B40 memberi peluang bagi peningkatan daya serap produk CPO di pasar domestik;
- h) Optimalisasi sumur-sumur migas baru serta optimalisasi Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- i) Perluasan kesempatan kerja sebagai dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diharapkan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal.

### C. Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi Nasional pada tahun 2024

Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, RKP Tahun 2024 mendorong transformasi ekonomi sebagai *game changer* menuju Indonesia Maju. Transformasi ekonomi berorientasi pada peningkatan produktivitas, terutama dalam peningkatan nilai tambah di dalam dan antar sektor ekonomi, dan pergeseran tenaga kerja dari sektor informal yang bernilai tambah relatif rendah menuju sektor formal yang bernilai tambah tinggi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan potensial jangka panjang. Peningkatan produktivitas juga diarahkan untuk menciptakan pembangunan inklusif dan berkelanjutan melalui pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan perluasan akses serta kesempatan.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020–2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025–2029 melalui percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif.

Upaya percepatan agenda transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,7 persen pada tahun 2024. Tingkat pertumbuhan ekonomi

tersebut akan meningkatkan GNI per kapita (*Atlas Method*) menjadi US\$4.970–5.150 pada tahun 2024, berada pada kategori *upper-middle income countries*.

Adapun target pembangunan nasional pada tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel III.1 sebagai berikut.

Tabel III.1  
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2024

Uraian		Tahun 2024
Perkiraan besaran-besaran pokok		
1	Pertumbuhan PDB (% ,yoy)	5,3-5,7
2	Laju inflasi, IHK (% ,yoy)	1,5-3,5
Neraca Pembayaran		
3	Cadangan Devisa (US\$ miliar)	149,1-150,2
4	Neraca transaksi berjalan (% PDB)	0,5-0,4
Keuangan Negara		
5	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	9,9–10,2
6	Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,0)–(0,4)
7	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,2)–(2,6)
8	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	38,1–39,0
PMTB/Investasi		
9	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,2-7,0
10	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.450–1.650
11	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan (Triliun Rp)	662,7–731,1
Target Pembangunan		
12	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0-5,7
13	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5
14	Indeks Gini (nilai)	0,374-0,377
15	Indeks Pembangunan Manusia (nilai)	73,99-74,02
16	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	27,27
Indikator Pembangunan		
17	Nilai Tukar Petani (nilai)	105-108
18	Nilai tukar Nelayan (nilai)	107-110

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas RI, 2023

Arah kebijakan tahun 2024 difokuskan pada percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengejar sasaran pembangunan jangka menengah serta mengembalikan *trajectory* jangka panjang. Arah kebijakan tersebut akan mendorong penguatan fondasi ekonomi Indonesia pada tahun selanjutnya untuk menjadi tahun dasar pelaksanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045.

Untuk arah kebijakan pembangunan yang berpengaruh terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan timur antara lain mempercepat pertumbuhan wilayah melalui diversifikasi kegiatan ekonomi, memantapkan peran Kalimantan Timur sebagai lumbung energi nasional, mempertahankan peran Kalimantan sebagai paru-paru dunia. Arah kebijakan nasional ini diharapkan mampu meningkatkan pencapaian target makro ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2024.

Strategi pembangunan wilayah Kalimantan Timur diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan wilayah melalui diversifikasi ekonomi, pemantapan peran sebagai lumbung energi nasional, mempertahankan peran sebagai paru-paru dunia dan mendorong pemerataan pembangunan.

Sedangkan sasaran utama pengembangan Wilayah Kalimantan pada tahun 2024 diutamakan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas. Adapun target pengembangan Wilayah Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam Tabel III.2 sebagai berikut.

Tabel III.2  
Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Uraian		Tahun 2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1 - 5,6
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,78 - 5,48
3	Tingkat Kemiskinan (%)	3,50 - 4,00

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas RI, 2023

### 3.1.2 Sasaran dan Arah Kebijakan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2022 mengalami perbaikan dan tumbuh positif, dan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,48 persen. Perbaikan ini disebabkan oleh tingginya produksi lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang mendominasi PDRB Kalimantan Timur seiring dengan meningkatnya permintaan global terhadap batu bara. Selain itu dampak bangkitan ekonomi pasca pandemi COVID-19 juga berakibat pada meningkatnya aktivitas perekonomian lainnya.

Peningkatan daya saing daerah perlu didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini penyediaan kompetensi angkatan kerja yang dapat memenuhi standar pasar kerja industri di

Kalimantan Timur. Selain itu, pengendalian investasi di Kalimantan Timur Tahun 2023 dan 2024 perlu diarahkan pada sektor-sektor yang mendukung pengembangan hilirisasi industri dan infrastruktur pendukung penunjang Ibu Kota Negara Baru terlebih setelah ditetapkannya Undang-Undang Ibu Kota Negara Baru.

#### A. Sasaran Ekonomi Makro

Pada Tahun 2024, ekonomi makro Kalimantan Timur diharapkan dapat tumbuh positif dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Stabilitas makro sangat penting bagi penciptaan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua pihak atau ekonomi yang inklusif. Sasaran ekonomi makro pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel III.3  
Sasaran Ekonomi Makro Daerah

Uraian		Target 2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,10 – 4,90
2	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	255,00
3	Inflasi (persen)	3,00 - 4,00

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 2023

Pada Tahun 2024, merupakan periode bagi Kalimantan Timur untuk melakukan penguatan daya saing daerah dan meneruskan perbaikan dari sisi perekonomian yang telah dicapai pada tahun 2022 yang diharapkan masih terus berlanjut. Seiring dengan pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat tersebut, diharapkan pada tahun 2024 terus mengalami perbaikan sehingga target pembangunan yang direncanakan dapat tercapai.

Stabilitas pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diharapkan terjaga dengan laju pertumbuhan positif pada rentang 3,5±1 persen dan untuk tahun 2024 juga diharapkan mampu tumbuh positif pada 4,10 – 4,90 persen. Pertumbuhan ekonomi ini diasumsikan dengan masih terjaganya harga komoditas batubara dan kelapa sawit, berjalannya proyek strategis seperti *Refinery Development Master Project (RDMP) RU V Balikpapan*, pembangunan proyek infrastruktur Ibu Kota Nusantara beserta dampak ikutannya, dan berbagai proyek lainnya yang bersumber dari APBN dan APBD.

## B. Arah Kebijakan Ekonomi

Untuk mencapai target ekonomi makro daerah yang telah ditetapkan pada tahun 2024, dirumuskan arah kebijakan ekonomi makro sebagai berikut :

1. Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 4,10 – 4,90 Persen, yakni melalui :
  - a) Memperkuat kinerja industri pengolahan dengan mendorong operasionalisasi pabrik-pabrik pengolahan produk kelapa sawit seperti biodiesel, minyak goreng, dan produk turunan lainnya;
  - b) Meningkatkan produktivitas hasil produksi pertanian (dalam arti luas) melalui intensifikasi di sektor pangan dan ekstensifikasi di sektor perkebunan (optimalisasi pemanfaatan kawasan perkebunan);
  - c) Mendorong peningkatan sektor konstruksi, perdagangan, transportasi, serta sektor akomodasi makan dan minum dengan menangkap peluang bangkitan ekonomi terhadap pembangunan IKN;
2. Mendorong Inklusifitas Ekonomi dengan meningkatkan *trickle down effect* pertumbuhan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui upaya peningkatan nilai tambah produk unggulan, mendorong pertumbuhan sektor padat karya, serta menyiapkan SDM yang berkompeten untuk bersaing di pasar kerja;
3. Menjaga Stabilitas Ekonomi Daerah, melalui :
  1. Menjaga dan meningkatkan iklim investasi di daerah
  2. Mengendalikan tingkat inflasi untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga
  3. Meningkatkan kualitas belanja pemerintah yang signifikan dapat memicu pertumbuhan sektor lainnya
  4. Mendorong peran komoditas hasil olahan industri untuk peningkatan ekspor perdagangan antar wilayah

### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### 3.2.1 Pendapatan Daerah

Perhitungan pendapatan daerah Tahun 2024 pada RKPD dilakukan dengan asumsi/pendekatan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, yakni sebagai berikut:

- 1) Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi dan perkembangan pendapatan pada tiga tahun terakhir, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
- 2) Pendapatan transfer berupa Dana Bagi Hasil (DBH) hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing komponen bagi hasil termasuk telah menambahkan komponen pendapatan yang bersumber dari DBH Sawit dan dana *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* (FCPF-CF). Sedangkan DAU, DAK dan DID diperhitungkan dengan memperhatikan capaian pendapatan pada Tahun 2022 atau disesuaikan dengan prakiraan kondisi pada tahun 2024;
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah dihitung dengan memprakirakan pendapatan yang bersumber dari hibah, remunerasi atas dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) dan penerimaan atas keuntungan bersih perusahaan pemegang izin usaha pertambangan khusus yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur.

Untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus melakukan pengembangan dan terobosan-terobosan untuk peningkatan pendapatan daerah tahun 2024. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut :

- 1) Menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- 2) Melakukan penyesuaian terhadap potensi Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- 3) Melakukan penyesuaian tarif Pajak Daerah dengan berlakunya Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4) Melakukan kajian secara *holistic* untuk seluruh potensi pendapatan daerah di seluruh lingkup perangkat daerah;
- 5) Pendekatan pelayanan kepada masyarakat serta perluasan dan pengembangan layanan untuk mempermudah pembayaran pajak oleh masyarakat/Wajib Pajak;
- 6) Optimalisasi penanganan pemungutan piutang pajak dan retribusi melalui inventarisasi dan penagihan piutang pajak dan retribusi daerah dengan melibatkan Instansi Vertikal, SKPD dan pemerintah Kabupaten/Kota;

- 7) Melakukan pengendalian dan Pengawasan terhadap penjualan/distribusi BBM sektor Industri oleh Tim Inspektorat, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, dan Kepolisian terhadap penerimaan dari Wajib Pungut;
- 8) Penertiban ijin wajib pungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 9) Adanya penambahan izin pemakaian/pemanfaatan air permukaan dari perusahaan baru;
- 10) Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai langkah Pengendalian dan Pengawasan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 11) Melakukan *cleansing data base* kendaraan bermotor melalui registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 12) Pelaksanaan program pemutihan dan pengurangan pajak kendaraan bermotor;
- 13) Pembaharuan regulasi melalui revisi kebijakan terhadap peraturan untuk menjamin kepastian hukum dalam upaya optimalisasi Pendapatan Daerah;
- 14) Upaya penyesuaian dividen dari Perusda/BUMD untuk Pemerintah Provinsi melalui hasil evaluasi dan monitoring terhadap kinerja BUMD;
- 15) Penyusunan regulasi tentang kebijakan penerimaan daerah yang bersumber dari keuntungan bersih perusahaan pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur.

Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan proyeksi tahun 2023 secara umum dapat dilihat pada tabel III.4. Pada kurun waktu dari tahun 2019 hingga 2022 tren realisasi pertumbuhan pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar 38,03 persen. Peningkatan tren realisasi ini dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan daerah yang signifikan pada tahun 2022 akibat meningkatnya pendapatan pada seluruh komponen pendapatan. Namun proyeksi pendapatan tahun 2023 diperhitungkan akan mengalami penurunan dengan sebesar 11,07 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022, target pendapatan daerah tahun 2023 dipengaruhi oleh penurunan Pendapatan Asli Daerah sebesar 6,86 persen, pendapatan transfer sebesar 14,71 persen dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 19,18 persen.

Tabel III.4  
Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2019-2022 dan Penetapan Tahun 2023

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (unaudited) (Rp)	Penetapan Tahun 2023* (Rp)
4	Pendapatan Daerah	11.775.086.836.200	9.987.385.879.199	10.220.142.967.274	16.804.693.776.013	14.621.856.687.106
4.1	Pendapatan Asli Daerah	6.555.853.195.408	5.143.521.676.422	6.111.918.272.284	8.997.262.537.258	8.045.500.965.106
4.1.01	Pajak Daerah	4.984.520.517.159	3.900.431.414.629	4.774.890.855.289	7.623.597.479.496	7.010.000.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	26.492.587.130	10.123.187.099	13.590.719.061	19.980.889.916	20.052.388.240
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	392.379.951.610	110.988.636.348	214.599.338.882	310.262.666.522	232.740.891.298
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.152.460.139.510	1.121.978.438.346	1.108.837.359.053	1.043.421.501.324	782.707.685.568
4.2	Pendapatan Transfer	5.186.147.690.792	4.831.865.557.777	4.094.319.639.990	7.790.284.158.755	6.562.497.042.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.186.147.690.792	4.831.865.557.777	4.094.319.639.990	7.790.284.158.755	6.562.497.042.000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	5.176.264.298.792	4.759.526.731.777	4.056.865.328.990	7.753.114.697.755	6.562.497.042.000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	3.207.168.795.642	3.544.638.973.637	2.591.967.832.399	6.329.446.113.503	5.021.968.600.000
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	815.693.641.000	831.404.756.000	828.050.174.361	824.108.986.889	857.929.020.000
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	221.093.462.036	212.147.502.140	247.450.542.385	233.206.951.954	190.152.584.000
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	932.308.400.114	171.335.500.000	389.396.779.845	366.352.645.409	492.456.838.000

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (unaudited) (Rp)	Penetapan Tahun 2023* (Rp)
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	9.883.392.000	72.338.826.000	37.454.311.000	37.169.461.000	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	33.085.950.000	11.998.645.000	13.905.055.000	17.147.080.000	13.858.680.000
4.03.01	Hibah	33.085.950.000	11.998.645.000	13.905.055.000	17.147.080.000	13.858.680.000

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2023

Keterangan: \*) Penetapan APBD TA. 2023

Tabel III.5  
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2019-2022 dan Penetapan Tahun 2023 (persen)

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Penetapan Tahun 2023*
4	Pendapatan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	55,68%	51,50%	59,80%	53,54%	55,02%
4.1.01	Pajak Daerah	76,03%	75,83%	78,12%	84,73%	87,13%
4.1.02	Retribusi Daerah	0,40%	0,20%	0,22%	0,22%	0,25%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	5,99%	2,16%	3,51%	3,45%	2,89%
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	17,58%	21,81%	18,14%	11,60%	9,73%
4.2	Pendapatan Transfer	44,04%	48,38%	40,06%	46,36%	44,88%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	99,81%	98,50%	99,09%	99,52%	100,00%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	61,84%	73,36%	63,89%	81,64%	76,53%
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	15,73%	17,21%	20,41%	10,63%	13,07%
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	4,26%	4,39%	6,10%	3,01%	2,90%

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Penetapan Tahun 2023*
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	17,98%	3,55%	9,60%	4,73%	7,50%
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,19%	1,50%	0,91%	0,48%	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,28%	0,12%	0,12%	0,10%	0,09%
4.03.01	Hibah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: BAPENDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2023

Keterangan: \*) Penetapan APBD TA. 2023

Proyeksi pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024 mengalami penurunan dari target yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Tahun 2023 sebesar 25,72 persen. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan Pendapatan Asli Daerah sebesar 18,14 persen dan penurunan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat signifikan sebesar 35,03 persen. Secara proporsi pada Pendapatan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024 masih memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah sebesar 60,33 persen.

Tabel III.6  
Proyeksi dan Proporsi Pendapatan Daerah Pendapatan  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Tahun 2024	
		Rp	%
4	Pendapatan Daerah	20.000.000.000.000	100,00%
4.1	Pendapatan Asli Daerah	9.804.205.686.170	49,02%
4.1.01	Pajak Daerah	8.592.000.000.000	87,64%
4.1.02	Retribusi Daerah	874.811.711.940	8,92%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yg Dipisahkan	252.916.355.582	2,58%
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	84.477.618.648	0,86%
4.2	Pendapatan Transfer	9.411.932.777.866	47,06%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	9.411.932.777.866	100,00%
4.2.01.01	Dana Perimbangan	9.401.932.777.866	99,89%
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	7.858.263.118.029	83,58%
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	872.370.733.844	9,28%
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	192.713.322.771	2,05%
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	478.585.603.223	5,09%
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	10.000.000.000	0,11%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	783.861.535.964	3,92%
4.03.01	Hibah	13.861.535.964	1,77%

Kode Rek	Komponen Penerimaan	Tahun 2024	
		Rp	%
	Remunerasi TDF	201.000.000.000	25,64%
	Keuntungan Bersih IUPK	569.000.000.000	72,59%

Sumber: BAPENDA, BPKAD Provinsi KALTIM, 2023

### 3.2.2 Belanja Wajib dan Mengikat Daerah

Penyusunan kebijakan keuangan daerah perlu didukung dengan analisis proyeksi belanja yang bersifat wajib dan mengikat. Analisis terhadap pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam satu tahun anggaran. Belanja bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga. Sedangkan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan rutin dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Tabel III.7  
Pengeluaran Wajib dan Mengikat Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2024

No	Uraian Belanja Wajib Mengikat	Tahun 2024 (Rp)
A	BELANJA OPERASI	13.056.044.060.968
1	Belanja Gaji, Tunjangan dan TPP	3.194.580.408.253
2	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH-DPRD	70.881.101.138
3	Belanja Non PNS	455.924.528.744
4	Belanja Operasional Kantor (Telepon, Listrik, Air, Internet, dan Jasa Kebersihan dan Satpam)	132.470.086.500
5	Dana Alokasi Khusus (DAK)	671.298.925.993
6	Dana Bagi Hasil Reboisasi (DBH-DR)	327.354.779.862
7	Dana Insentif Daerah (DID)	10.000.000.000
8	Dana FCPF-CF	66.185.600.000
9	Belanja pajak rokok (JPKM)	75.000.000.000
10	BLUD	859.135.000.000
11	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik/Belanja Hibah kepada Partai Politik	8.123.695.000

No	Uraian Belanja Wajib Mengikat	Tahun 2024 (Rp)
12	Dukungan pelaksanaan Pemilu 2024 (Hibah Ke KPU, Bawaslu, TNI/POLRI)	336.066.098.500
13	Bantuan keuangan Umum Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	1.386.548.752.677
14	Belanja Tidak Terduga	669.575.084.301
15	Belanja Bagi Hasil	4.792.900.000.000
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	500.000.000.000
1	Pembayaran Pokok Utang	
2	Penyertaan Modal	500.000.000.000
TOTAL BELANJA WAJIB & MENGIKAT		13.556.044.060.968

Sumber: *BAPPEDA Provinsi KALTIM, BPKAD Provinsi KALTIM, 2023*

Adapun penjelasan terhadap masing-masing komponen belanja mengikat yang menjadi dasar analisis perhitungan adalah sebagai berikut :

- a) Belanja Pegawai yakni belanja Gaji, Tunjangan dan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) yang diberikan kepada seluruh PNS;
- b) Belanja Gaji, Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pj. Gubernur, dianggap belanja mengikat karena merupakan gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan DPRD yang harus dibayarkan (seperti belanja pegawai dan tunjangan serta biaya operasional);
- c) Belanja Non PNS merupakan belanja gaji yang diberikan kepada pegawai Non PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- d) Bagi Hasil Pajak Kepada Pemerintah Kabupaten Kota merupakan transfer pembagian hasil penerimaan pajak Provinsi Kalimantan Timur untuk Pemerintah Kabupaten Kota yang diatur pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2018;
- e) Belanja operasional wajib kantor, dianggap belanja mengikat karena menjadi pembiayaan rutin untuk penyelenggaraan kegiatan perkantoran selama satu tahun, seperti air, listrik, telepon, internet, dan pajak kendaraan;

- f) Insentif pemungut pajak, dianggap belanja mengikat karena peruntukannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 terkait pemberian insentif bagi pemungut pajak;
- g) Dana Alokasi Khusus (DAK), dianggap Belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah ditentukan, dan diasumsikan hampir pasti selalu ada di setiap tahunnya;
- h) DBH-DR, dianggap Belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah jelas dan diatur dalam PMK Nomor 230/PMK.07/2017;
- i) Belanja pajak rokok, dianggap belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah jelas dan diatur (Dinkes untuk JPKN, Satpol untuk Penegakan Perda) PMK Nomor 102/PMK.07/2015;
- j) BLUD, dianggap belanja mengikat karena perolehan dan peruntukannya sudah jelas digunakan untuk operasional masing-masing BLUD;
- k) Bankeu/Hibah kepada Partai Politik, dianggap Belanja mengikat karena telah diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2018;
- l) Bantuan Keuangan Umum kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dianggap belanja mengikat karena bersifat rutin di setiap tahunnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang bersifat prioritas, namun bukan menjadi kewenangan provinsi;
- m) Belanja Tidak Terduga, dianggap belanja mengikat karena pengalokasiannya bersifat rutin dan dibutuhkan sebagai antisipasi kondisi darurat dan mendesak yang tidak dapat diprediksi di daerah;
- n) Penyertaan Modal diberikan kepada BUMD yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

### 3.2.3 Belanja Daerah

Belanja daerah yang terdapat pada RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Namun pada pelaksanaan pada APBD tahun 2021 telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam RPJD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023. Namun pada realisasi belanja daerah tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang terdiri dari:

- 1) Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :
  - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Pj. Gubernur, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa;
  - c. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran;
  - d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial;
- 2) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya;

- 3) Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- 4) Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer dirinci atas jenis:
  - a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
  - b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan.

Belanja daerah provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 cenderung fluktuatif namun dengan tren pertumbuhan yang positif sebesar 5,72 persen. Dalam kurun waktu tersebut, peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2019 dikarenakan terjadinya pelimpahan pegawai dari pemerintah kabupaten/kota dan nasional ke provinsi sebagai akibat penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kemudian kembali meningkat pada tahun 2022.

Realisasi dan proporsi belanja daerah pada kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.8  
 Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
 Tahun 2019-2022 dan Penetapan Tahun 2023

Kode Rek	Uraian	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Realisasi Tahun 2020 (Rp)	Realisasi Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Tahun 2022 (Rp)	Penetapan Tahun 2023* (Rp)
5	BELANJA	12.900.000.000.000	10.683.921.000.001	10.723.529.422.431	12.393.745.833.368	17.031.194.223.080
5.01	BELANJA OPERASI	5.940.390.533.458	5.356.491.717.806	4.983.150.466.273	6.001.780.302.943	7.414.552.277.521
5.01.01	Belanja Pegawai	2.276.292.750.006	2.246.712.057.549	2.105.588.712.918	2.334.585.774.591	2.796.363.758.450
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	2.839.199.050.718	2.870.659.107.195	2.634.941.566.554	3.184.224.252.607	4.207.685.257.571
5.01.05	Belanja Hibah	815.124.182.734	223.050.003.062	228.665.386.800	432.031.575.745	395.879.061.500
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	9.774.550.000	16.070.550.000	13.954.800.000	50.938.700.000	14.624.200.000
5.02	BELANJA MODAL	1.825.021.228.128	1.317.417.909.377	1.514.465.189.715	1.980.010.052.268	4.097.300.945.741
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000	500.000.000.000	221.409.234.933	6.688.799.413	129.340.999.818
5.04	BELANJA TRANSFER	5.109.588.238.414	3.510.011.372.818	4.004.504.531.511	4.405.266.678.744	5.390.000.000.000
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	3.087.791.772.893	1.911.308.336.000	2.455.934.232.318	3.542.721.678.744	4.192.500.000.000
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	2.021.796.465.521	1.598.703.036.818	1.548.570.299.193	862.545.000.000	1.197.500.000.000

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2023

Keterangan: \*) Penetapan APBD TA. 2023

Tabel III.9  
Proporsi Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur  
Tahun 2019-2022 dan Penetapan Tahun 2023

Kode Rek	Uraian	Realisasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Penetapan Tahun 2023*
5	BELANJA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5.01	BELANJA OPERASI	46,05%	50,14%	46,47%	48,15%	43,54%
5.01.01	Belanja Pegawai	38,32%	41,94%	42,25%	39,55%	37,71%
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	47,79%	53,59%	52,88%	52,26%	56,75%
5.01.05	Belanja Hibah	13,72%	4,16%	4,59%	7,32%	5,34%
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	0,16%	0,30%	0,28%	0,86%	0,20%
5.02	BELANJA MODAL	14,15%	12,33%	14,12%	15,85%	24,06%
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	0,19%	4,68%	2,06%	0,05%	0,76%
5.04	BELANJA TRANSFER	39,61%	32,85%	37,34%	35,95%	31,65%
5.04.01	Belanja Bagi Hasil	60,43%	54,45%	61,33%	80,42%	77,78%
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	39,57%	45,55%	38,67%	19,58%	22,22%

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, dan BPKAD Provinsi KALTIM, 2023

Keterangan: \*) Penetapan APBD TA. 20223

Peran kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Tahun 2024 sangat diperlukan terlebih dengan ruang fiskal daerah yang semakin terbatas. Pada tahun 2024 komponen konsumsi pemerintah terhadap PDRB Kalimantan Timur diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024. Berdasarkan tema pembangunan tahun 2024, arah kebijakan belanja daerah difokuskan untuk mendukung peningkatan daya saing SDM, infrastruktur wilayah untuk percepatan transformasi ekonomi dan berkelanjutan. Untuk dapat mencapai target tersebut maka arah kebijakan belanja daerah diarahkan pada :

- 1) Meningkatkan belanja produktif seperti belanja pendidikan, kesehatan, pertanian dan pembangunan infrastruktur mendukung konektivitas antar daerah;
- 2) Meningkatkan efisiensi dan penajaman pada belanja non-operasional untuk meningkatkan ruang fiskal;
- 3) Meningkatkan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial terutama akses pendidikan dan mutu layanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin;
- 4) Kebijakan belanja pemerintah daerah diarahkan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 5) Penguatan perekonomian di berbagai sektor seperti Pariwisata, Perdagangan, Pertanian dalam arti luas, UMKM dan IKM serta pemulihan kembali daya beli masyarakat ;
- 6) Pencapaian target, sasaran, dan program prioritas Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
- 7) Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan dan 10 persen fungsi kesehatan. Sedangkan untuk belanja *mandatory* lainnya seperti belanja peningkatan SDM ASN dan pengawasan (APIP) disesuaikan dengan potensi besaran anggaran;
- 8) Transfer ke kabupaten/kota dan Dana Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota diarahkan pada keselarasan untuk pencapaian tujuan pembangunan daerah provinsi, peningkatan kualitas pelayanan publik,

menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, penurunan stunting dan mengurangi ketimpangan antar daerah.

Proyeksi belanja daerah digunakan untuk memperkirakan segala kebutuhan belanja daerah terkait pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di tahun ke depan. Adapun proyeksi 2024 Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.10  
Proyeksi dan Proporsi Belanja Daerah  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Kode Rek	Uraian	Proyeksi Tahun 2024	
		Rp	%
5	BELANJA	20.175.000.000.000	100,00%
5.01	BELANJA OPERASI	8.389.970.766.620	41,59%
5.01.01	Belanja Pegawai	3.265.461.509.391	38,92%
5.01.02	Belanja Barang dan Jasa	4.041.250.679.083	48,17%
5.01.05	Belanja Hibah	1.063.258.578.146	12,67%
5.01.06	Belanja Bantuan Sosial	20.000.000.000	0,24%
5.02	BELANJA MODAL	4.936.005.396.402	26,53%
5.03	BELANJA TIDAK TERDUGA	669.575.084.301	6,23%
5.04	BELANJA TRANSFER	6.179.448.752.677	30,20%
5.04.01	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	4.792.900.000.000	78,66%
5.04.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.386.548.752.677	21,34%

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 20223

Sebagai informasi, bahwa dalam penyusunan proporsi jenis belanja daerah dalam tabel III.10 di atas masih berdasarkan asumsi arahan belanja yang diharapkan, dikarenakan penyusunan RKPD Tahun 2024 belum menggunakan rincian belanja. Proporsi belanja modal diharapkan lebih meningkat dari tahun sebelumnya dalam upaya meningkatkan kualitas belanja pemerintah yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam pemenuhan kebutuhan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan publik terkait pemenuhan belanja mandatori (*mandatory spending*), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan belanja seperti belanja fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi pengawasan dan peningkatan SDM ASN pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III.11  
 Proyeksi Belanja Mandatori (*Mandatory Spending*)  
 Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Pagu (Rp)	%
A	Belanja Fungsi Pendidikan	4.227.847.699.463	20,96
1	Belanja pada Dinas Pendidikan	3.807.276.000.000	
2	Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang pelaksanaan fungsi pendidikan, antara lain:	420.571.699.463	
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.590.940.800	
	Program Pembinaan Perpustakaan	6.900.000.000	
	Dinas Pemuda dan Olahraga	322.258.867.000	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	26.475.000.000	
	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	295.783.867.000	
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	7.000.000.000	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	19.000.000.000	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Bantuan Keuangan bidang pendidikan)	19.000.000.000	
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	64.474.891.663	
	Hibah Kepada Lembaga Pendidikan/Sekolah Swasta	64.474.891.663	
	Sekretariat Daerah	12.247.000.000	
	Hibah Kepada Lembaga Pendidikan/Sekolah Swasta	12.247.000.000	
B	Belanja Fungsi Kesehatan	2.055.550.967.580	10,19
1	Belanja pada Dinas Kesehatan dan RSUD	1.553.768.905.704	
	Pagu Belanja Dinkes dan RSUD diluar gaji ASN	1.553.768.905.704	
2	Belanja di luar Dinas Kesehatan/RSUD yang menunjang pelaksanaan fungsi Kesehatan, antara lain:	501.782.061.876	
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	451.194.761.876	
	Pembangunan Rumah Sakit	451.194.761.876	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	19.000.000.000	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Bantuan Keuangan bidang Kesehatan)	19.000.000.000	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	30.000.000.000	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Bantuan Keuangan bidang Kesehatan)	30.000.000.000	

No	Uraian	Jumlah Pagu (Rp)	%
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1.587.300.000	
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.587.300.000	
C	Belanja Pengawasan	71.000.000.000	0,35
	Belanja pada Inspektorat	68.000.000.000	
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.000.000.000	
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah (Bantuan Keuangan bidang Pengawasan)	3.000.000.000	
D	Belanja Peningkatan Kapasitas SDM ASN	66.550.000.000	0,33
	Belanja pada BPSDM	66.550.000.000	

Sumber: BAPPEDA Provinsi KALTIM, 20223

### 3.2.4 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Tabel III.12  
Penetapan Pembiayaan APBD Tahun 2023 dan Proyeksi Pembiayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Uraian	Penetapan Tahun 2023	Proyeksi Tahun 2024
A	Penerimaan Pembiayaan		
1	Penerimaan Pembiayaan	2.578.143.312.894	675.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	2.578.143.312.894	675.000.000.000
B	Pengeluaran Pembiayaan		
1	Penyertaan Modal	168.805.776.920	500.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	168.805.776.920	500.000.000.000
	Jumlah Pembiayaan Netto	2.409.337.535.974	175.000.000.000

Sumber: BPKAD Provinsi KALTIM, 2023

Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 675.000.000.000 yang bersumber penghematan belanja pada tahun sebelumnya sebesar Rp. 500.090.495.384 dan sisa belanja dengan dana yang

bersumber dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi (DBH SDA-DR) pada Dinas Kehutanan sebesar Rp. 174.909.504.616.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp. 500.000.000.000 untuk penyertaan modal ke BUMD dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang bertujuan peningkatan pendapatan daerah, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta telah dilakukannya penyusunan perencanaan investasi Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.

BAB IV  
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan pelaksanaan rencana pembangunan tahun pertama dari RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 guna mewujudkan konsistensi dan kesinambungan rencana pembangunan daerah. Secara umum, kerangka kebijakan pembangunan Kalimantan Timur untuk Tahun 2024 dapat di lihat seperti pada Gambar IV.1 berikut.

<b>RPD Provinsi Kalimantan Tahun 2024 - 2026</b>	
Fokus Utama	
I. SDM yang Berdaya Saing	II. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas
1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Ketenagakerjaan 4. Pemberdayaan Gender	1. Diversifikasi Ekonomi 2. Inklusifitas Ekonomi 3. Kemiskinan 4. Infrastruktur Wilayah
Fokus Pendukung/Kondisi Perlu	
III. Lingkungan Hidup	IV. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
1. Kualitas Lingkungan Hidup 2. Penurunan Emisi GRK 3. Bauran Energi Baru Terbarukan	1. Reformasi Birokrasi 2. ASN BerAKHLAK

Gambar IV.1  
Pola Hubungan Antar Fokus Pembangunan RPD Kalimantan Timur  
Tahun 2024-2026

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan yang menjadi pedoman penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada rencana tahunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.1  
 Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024  
 “Peningkatan daya saing SDM dan Infrastruktur Wilayah yang Andal untuk  
 Percepatan Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan”

Tujuan dan Sasaran		Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target Tahun 2024
<b>Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing</b>		<b>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)</b>	<b>Indeks</b>	<b>78,32</b>
Sasaran 1: Meningkatnya Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat	1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,95
	2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,10
Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,82
	2	Prevalensi Stunting	Persen	12,83
Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,46
Sasaran 4: Meningkatnya Daya Saing Perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	67,31
<b>Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas</b>	<b>1</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)</b>	<b>Persen</b>	<b>4,10-4,90</b>
	<b>2</b>	<b>Tingkat Kemiskinan</b>	<b>Persen</b>	<b>5,78</b>
	<b>3</b>	<b>Indeks Gini</b>	<b>Indeks</b>	<b>0,316</b>
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi		LPE Non Migas dan Batubara	Persen	5,90-6,70
Sasaran 6: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin	1	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks	0,86
	2	Indeks Keparahan Kemiskinan	Indeks	0,15
	3	Tingkat inflasi	Persen	4,50

Tujuan dan Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran		Satuan	Target Tahun 2024
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	7,74
<b>Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>1</b>	<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</b>	<b>Indeks</b>	<b>75,00</b>
	<b>2</b>	<b>Persentase Penurunan Emisi dari <i>Business As Usual</i> (BAU)</b>	<b>Persen</b>	<b>31,05</b>
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	1	Indeks Kualitas Air	Indeks	53,52
	2	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	81,95
	3	Indeks Kualitas Udara	Indeks	88,17
	4	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	82,35
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan		Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	Persen	23,32
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan		Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Persen	10,39
<b>Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi</b>		<b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>	<b>Indeks</b>	<b>69,00 (B)</b>
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,00
	2	Sistem Merit	Poin	270
	3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,90
	4	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Poin	78,50 (BB)
	5	Tingkat maturitas SPIP	Level	3 Skor 3,476

## 4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

### 4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Selain mempedomani dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026, penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024, juga perlu memperhatikan dokumen perencanaan tahunan nasional (RKP) tahun 2024. Berdasarkan hasil Konsultasi Publik RKP Tahun 2024, didapatkan informasi dari hasil evaluasi pembangunan nasional tahun 2022 bahwa permasalahan yang dihadapi adalah berkaitan dengan tingkat kemiskinan, rasio gini, indeks pembangunan manusia dan emisi gas rumah kaca.

Tabel IV.2  
Capaian Indikator Sasaran RKP Tahun 2022

No	Indikator Sasaran Pembangunan	Target 2022 <sup>*)</sup>	Capaian 2022
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2-5,5	5,31
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5-9,0	9,57 (Sept 2022)
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka/TPT (%)	5,5-6,3	5,86 (Agustus 2022)
4.	Rasio Gini (nilai)	0,376-0,378	0,381 (Sept 2022)
5.	Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai)	73,41-73,46	72,91
6.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK (%)	26,87	26,87 (Estimasi)
7.	Nilai Tukar Petani/NTP (nilai)	103-105	107,33 (Jan-Des 2022)
8.	Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai)	104-106	106,45 (Jan-Des 2022)

<sup>\*)</sup>Target 2022 bersumber dari Perpres Nomor 115/2021 tentang Pemutakhiran RKP 2022

Adapun beberapa strategi yang telah dan kedepannya dapat terus dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menyelesaikan permasalahan pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, melalui strategi :
  - (1) Pemulihan daya beli dan usaha; dan
  - (2) Diversifikasi ekonomi;
2. Menekan jumlah penduduk miskin, melalui strategi :
  - (1) Penurunan beban pengeluaran; dan
  - (2) Peningkatan pendapatan penduduk miskin dan rentan;
3. Menekan tingkat pengangguran, melalui upaya :

- (1) Penciptaan kesempatan kerja baru sebagai upaya penumbuhan investasi padat pekerja, penguatan konsumsi masyarakat, dan pengembangan UMKM;
  - (2) Peningkatan keahlian tenaga kerja melalui reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi;
  - (3) Penguatan sistem informasi pasar kerja yang kredibel sebagai dasar intervensi kebijakan ketenagakerjaan; dan
  - (4) Penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekerja;
4. Menurunkan tingkat ketimpangan, melalui strategi :
- (1) Memperkuat afirmasi kelompok 40 persen terbawah melalui reformasi sistem perlindungan sosial yang meliputi pengembangan registrasi sosial ekonomi; peningkatan akurasi penargetan; integrasi dan penyederhanaan program; serta penyaluran secara digital, cepat, dan responsif kebencanaan;
  - (2) Penguatan kelembagaan pelatihan vokasi;
  - (3) Peningkatan peran UMKM;
  - (4) Penguatan kebijakan fiskal untuk redistribusi yang merata;
5. Meningkatkan indeks pembangunan manusia, melalui strategi :
- (1) Bantuan sosial dan subsidi kepada masyarakat kelompok berpenghasilan rendah serta insentif kepada dunia usaha dan penganggur;
  - (2) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada percepatan penurunan kematian ibu dan bayi, perbaikan gizi masyarakat, penguatan upaya *promotif* dan *preventif*, serta penguatan kapasitas sistem kesehatan di seluruh wilayah;
  - (3) Peningkatan pemerataan layanan Pendidikan berkualitas melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran termasuk pembelajaran jarak jauh dan pemanfaatan teknologi dalam Pendidikan, afirmasi akses di semua jenjang pendidikan, pelaksanaan wajib belajar 12 tahun;
6. Menurunkan emisi gas rumah kaca, melalui upaya :
- (1) Pelaksanaan transisi dari kegiatan perekonomian yang intensif karbon menjadi kegiatan perekonomian yang lebih ramah lingkungan serta meminimalkan dampak terhadap peningkatan laju emisi GRK; dan

- (2) Peningkatan aksi pembangunan rendah karbon yang memiliki kontribusi signifikan dan berdampak langsung pada penurunan emisi, utamanya pada sektor lahan dan energi;
7. Menjaga nilai tukar petani, melalui kebijakan :
- (1) Jaminan ketersediaan *input* pertanian;
  - (2) Pembentukan korporasi petani dan nelayan;
  - (3) Kawasan sentra produksi pangan (*food estate*);
  - (4) Pengembangan sentra produksi pangan berbasis pertanian digital;
  - (5) Efisiensi distribusi pangan melalui penguatan konektivitas produksi (jalan usaha tani) dan sistem logistik pangan;
  - (6) Percepatan transformasi *platform e-commerce* pertanian/rantai pasok *online*;
  - (7) Pengolahan primer produksi pangan dan pertanian;
8. Meningkatkan nilai tukar nelayan, melalui kebijakan :
- (1) Peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana pelaku usaha perikanan serta digitalisasi usaha kelautan dan perikanan;
  - (2) Penguatan rantai pasok hasil perikanan;
  - (3) Pengembangan sentra produksi kelautan dan perikanan melalui pengembangan kampung-kampung perikanan;
  - (4) Penguatan kelembagaan pelaku usaha perikanan;
  - (5) Perlindungan bagi pelaku usaha perikanan, serta pendampingan dan penyuluhan.

Tema RKP tahun 2024 mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan fokus pembangunan Nasional yang dijabarkan melalui Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2024 sebagai berikut:

- Prioritas 1: Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan.
- Prioritas 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- Prioritas 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- Prioritas 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

- Prioritas 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- Prioritas 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- Prioritas 7: Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam mewujudkan pencapaian sasaran dan tema RKP 2024 telah ditetapkan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Sedangkan target sasaran nasional pada RKP tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel IV.3  
Indikator Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024

No	Sasaran	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,7
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,0-5,7
4	Rasio Gini (Indeks)	0,374-0,377
5	Indeks Pembangunan Manusia	73,99-74,02
6	Penurunan Emisi GRK (%)	27,27
7	Nilai Tukar Petani/NTP	105-108
8	Nilai Tukar Nelayan/NTN	107-110

*Sumber: Rancangan Sasaran RKP 2024*

Selanjutnya besaran target pembangunan Kalimantan Timur pada RKP 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.4  
Target RKP Tahun 2024 untuk Kalimantan Timur

No	Sasaran	Target 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1-5,6
2	Tingkat Kemiskinan (%)	3,5-4,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,7-5,4

Sumber: Rancangan Awal RKP 2024, 2023

Penetapan target makro Kalimantan Timur dalam RKP 2024 merupakan target dengan *range* angka yang optimis, oleh karena itu dalam pencapaian target makro tersebut perlu didorong terutama oleh adanya pengembangan komoditas unggulan pertanian dalam arti luas seperti sawit, karet, lada, pala, cengkeh, kelapa, perikanan tangkap, perikanan budidaya serta perbaikan harga komoditas minyak, gas bumi serta batubara di pasar internasional. Selain itu pula, dorongan untuk melakukan hilirisasi komoditas pertanian, perkebunan dan pertambangan juga terus dilakukan dan ditambah lagi kaitannya dengan proses pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur juga merupakan bagian dari faktor pendorong pencapaian target pembangunan yang ditetapkan.

#### 4.2.2 Isu Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2024

Isu strategis merupakan persoalan pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Secara metodologis, isu ini disusun berdasarkan analisis situasi capaian pembangunan dan memiliki dampak luas terhadap suatu pembangunan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka Panjang.

Perumusan isu strategis Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi tahun 2023, arah kebijakan dari RPD dan arah kebijakan RKP. Proses penyusunan isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.5  
Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
<p>1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan</p>	<p>1. Peningkatan perluasan akses jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus</p> <p>2. Peningkatan mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus</p> <p>3. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai terutama pada daerah tertinggal dan perbatasan</p> <p>4. Optimalisasi <i>Boarding School</i></p> <p>5. Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa di semua jenjang pendidikan terutama kepada siswa yang kurang mampu</p> <p>6. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>7. Peningkatan literasi dan numerasi</p> <p>8. Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar</p>	<p>1. Belum terpenuhi USB untuk wilayah yang telah perhitungkan dengan banyak jumlah penduduk usia sekolah di wilayah tersebut dan ketersediaan sekolah dasar di wilayah tersebut</p> <p>2. Belum terpenuhi salah satu indikator pemenuhan standar pelayanan minimal untuk sekolah menengah yaitu pemenuhan ruang kelas untuk sekolah yang kekurangan ruang kelas baru sehingga ketimpangan antara jumlah rombel dan ruang kelas dapat terpenuhi</p> <p>3. Keterbatasan SDM, yakni:</p> <p>1) Belum semua Puskesmas memiliki tenaga profesi gizi</p> <p>2) Belum semua Tenaga Pelaksana Gizi (TPG) Puskesmas terlatih dalam Tata Laksana Gizi Buruk, Konselor ASI &amp; MP-ASI dan PMBA, dan Pemantauan Pertumbuhan Balita</p>	<p>1. Relatif tingginya tingkat kemiskinan</p> <p>2. Masih adanya ketimpangan pendapatan</p> <p>3. Potensi Penurunan Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>4. Masih rendahnya reformasi birokrasi</p>	<p>Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)</p>

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
	<p>9. Percepatan perbaikan gizi masyarakat</p> <p>10. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi</p> <p>11. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta</p> <p>12. pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat</p> <p>13. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan</p> <p>14. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen fasyankes maupun fasilitasnya</p> <p>15. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat</p> <p>16. Penguatan Sistem Kesehatan dan pembiayaan kesehatan</p> <p>17. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan</p> <p>18. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja</p> <p>19. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri</p>	<p>4. Keterbatasan sarana dan alat bantu kerja TPG Puskesmas:</p> <p>1) Masih banyak dijumpai TPG Puskesmas tidak memiliki ruang kerja, meja dan kursi kerja</p> <p>2) Belum semua TPG Puskesmas/Puskesmas memiliki alat bantu kerja untuk media KIE (buku panduan, <i>food model</i> &amp; lembar balik, konseling kit, dll)</p> <p>5. Keterbatasan obat dan logistik program perbaikan gizi:</p> <p>1) Belum semua kabupaten/kota mampu memenuhi kewajibannya untuk mencukupi ketersediaan obat dan logistik gizi seperti MP-ASI, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi ibu hamil KEK, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Anak Sekolah, Fe bagi Ibu Hamil maupun bagi Remaja Putri, Vitamin A biru (100.000 IU) dan Vitamin A merah (200.000 IU), Mineral Mix, Taburia, Iodium test, dll sehingga Provinsi yang awalnya berfungsi hanya sebagai <i>bufferstock</i></p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
	<p>20. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja</p> <p>21. Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan</p> <p>22. Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja</p> <p>23. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi</p> <p>24. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan</p> <p>25. Penguatan dan pengembangan kelompok masyarakat serta lembaga pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dan politik</p> <p>26. Peningkatan profesionalisme pekerja perempuan</p>	<p>mengalami kekurangan dalam pendistribusian obat</p> <p>6. Kematian Ibu penyebab terbesar adalah karena perdarahan, Usia ibu pada saat hamil, jarak kehamilan, penyakit yang diderita ibu pada saat kehamilan, nutrisi ibu selama hamil dan nifas.</p> <p>7. Penyebab kematian bayi terbesar disebabkan oleh bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram (BBLR) dan Asfeksia. BBLR dan Asfeksia dapat disebabkan karena nutrisi ibu hamil yang kurang baik selama kehamilan.</p> <p>8. Masih cukup tingginya kematian akibat penyakit menular dan tidak menular</p> <p>9. Belum optimalnya sosialisasi dan aksi pencegahan penyakit</p> <p>10. Pola hidup masyarakat yang belum menerapkan hidup bersih dan sehat, antara lain kurang aktivitas fisik, kurang mengonsumsi buah dan sayur, sering minum alkohol, merokok,</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>dan buang air besar di sembarang tempat.</p> <p>11. Jumlah rumah sakit yang ada di wilayah IKN masih kurang.</p> <p>12. Masih kurangnya anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana yang diinginkan.</p> <p>13. Minat dokter spesialis yang mendaftar di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan masih kurang</p> <p>14. Belum adanya ruang perawatan khusus ibu dan anak</p> <p>15. Realisasi TW III masih rendah karena terhambat belum terkumpulnya semua sertifikat hasil pelatihan yang sudah dilaksanakan di semua bidang</p> <p>16. Anggaran yang kurang di APBD sehingga dibantu dengan dana BLUD.</p> <p>17. Adanya pandemi COVID - 19 yang berdampak pelaksanaan Bimtek dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai tidak dapat tercapai sesuai target.</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>18. Penilaian kinerja pegawai belum optimal</p> <p>19. Pembayaran tunai masih menggunakan perhitungan <i>fee for service</i> dan untuk BPJS menyesuaikan</p> <p>20. Masih adanya usulan kebutuhan yang belum diakomodir oleh karena alokasi anggaran yang tidak mencukupi</p> <p>21. Tingginya permintaan diluar perencanaan (bersifat Cito)</p> <p>22. Pelaksanaan sistem <i>Inventory</i> belum maksimal</p> <p>23. Kurang optimalnya sistem evaluasi dan pelaporan kinerja sesuai rencana aksi dari unit /bidang/ instalasi sehingga proses kompilasi data terhambat</p> <p>24. Belum ada sistem aplikasi yang terintegrasi mulai proses pengusulan perencanaan sampai proses evaluasi realisasi capaian kinerja</p> <p>25. Sumber Pendapatan RS tahun 2022 &gt; 75 % bersumber BPJS</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>26. Tim Case mix di internal RS belum optimal karena tergantung laporan dari unit / instalasi</p> <p>27. Regulasi tentang tarif belum <i>update</i></p> <p>28. <i>Monev</i> KSO alat kesehatan belum optimal</p> <p>29. Kurang optimalnya penghitungan unit <i>cost</i> di RS</p> <p>30. Kepatuhan klinisi terhadap penggunaan obat Fornas dan Forkit masih rendah</p> <p>31. Sistem pendaftaran <i>online</i> yang belum semua terintegrasi</p> <p>32. Tingginya jumlah kunjungan pasien poliklinik dan rujukan pasien ke RS</p> <p>33. RS belum mengoptimalkan sistem e- Rekam Medik</p> <p>34. Kompetensi dan <i>soft skill</i> petugas pemberi layanan kesehatan yang kurang</p> <p>35. Keterbatasan anggaran untuk pengadaan alat kesehatan dan penunjangnya</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>36. Belum optimalnya kerja sama operasional alat dengan pihak ketiga</p> <p>37. Banyak alat yang rusak karena utilitas yang tinggi sebagai RS Rujukan Nasional dan kurangnya <i>maintenance</i></p> <p>38. Lemahnya perencanaan yang dilakukan dari unit/ instalasi</p> <p>39. Beban anggaran untuk pemeliharaan sarana, prasarana dan peralatan canggih yang tinggi</p> <p>40. Evaluasi tingkat utilisasi alat yang kurang optimal</p> <p>41. Jadwal kalibrasi alat menyesuaikan dengan jadwal dari pusat</p> <p>42. Belum adanya regulasi yang mendukung pelaksanaan kontrak <i>service</i> alat kedokteran canggih</p> <p>43. Kurangnya anggaran untuk pelatihan bagi SDM dengan target 20 jam /tahun/orang</p> <p>44. Masih ada usulan pelatihan dari instalasi dan unit yang belum terakomodir</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>45. Pemanfaatan tenaga terlatih yang belum optimal</p> <p>46. Supervisi DPJP/Provider layanan terhadap anak didik masih lemah</p> <p>47. Lemahnya integrasi pelayanan dan institusi pendidikan</p> <p>48. Kurang optimalnya dukungan dari institusi kesehatan terhadap penyelenggaraan pendidikan di RS</p> <p>49. Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kerja sama belum optimal</p> <p>50. Pelaksanaan rekrutmen kerja sama perlu <i>update</i> sesuai aturan / regulasi</p> <p>51. Kompetensi petugas dalam membangun jejaring belum optimal</p> <p>52. Ketersediaan sarana pendukung PKRS</p> <p>53. melaksanakan sosialisasi tentang program pengurangan angka pengangguran kepada perusahaan dan pencari kerja. Melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi. Melaksanakan</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>seminar terkait keminatan terkait keminatan dan persiapan untuk pencari kerja terhadap pasar kerja</p> <p>54. Kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan di Provinsi Kalimantan Timur mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dalam tahapan pembangunan.</p> <p>55. Kurangnya komitmen Kepala Daerah dan para pengambil kebijakan dalam implementasi PUG bidang politik, hukum, sosial-budaya, dan ekonomi, meliputi penerapan kuota perempuan 30% di legislatif, harmonisasi peraturan yang bias gender, perlindungan anak, perlindungan perempuan, serta pengembangan UMKM, UPPKS, dll.</p> <p>56. Lembaga PUG belum berperan sesuai tugas fungsi</p> <p>57. Tugas kewenangan DKP3A dalam meningkatkan keberhasilan</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>program pendapatan perempuan tidak secara langsung, namun di tentukan oleh komitmen lintas sektor lainnya</p> <p>58. Perhitungan Data Korban Kekerasan melalui <i>online</i> (SIMFONI PPA) belum sesuai dengan fakta lapangan</p> <p>59. Belum optimalnya fungsi koordinasi Forkomda. PATBM, PUSPA bagi perlindungan perempuan dan anak.</p> <p>60. Belum terbentuknya sistem informasi data gender dan anak (data pilah) yang aktif</p> <p>61. Masih kurangnya peluang usaha sesuai dengan tuntutan zaman bagi pemuda Kaltim dalam mendukung IKN</p> <p>62. Perilaku generasi muda yang menjurus kepada pengguna/pengedar NAPZA dan Kriminal Remaja</p> <p>63. Masih Kurangnya kesadaran, pemberdayaan dan pengembangan (kepemimpinan,</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>kewirausahaan dan kepeloporan) pemuda</p> <p>64. Masih lemahnya kualitas SDM yang menangani ke Olahraga sehingga beberapa prestasi atlet pada <i>event-event</i> Olahraga seperti PON dan Seagames cenderung menurun dari tahun ke tahun</p> <p>65. Kurangnya pengetahuan masyarakat arti pentingnya olahraga bagi Kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup</p> <p>66. Pembina, Pengurus, pelatih dan Insan Olahraga kurang Profesional baik ditingkat Provinsi, Kab/Kota serta Klub Cabor</p> <p>67. Terbatasnya ruangan baca pagi pengunjung <i>onsite</i></p> <p>68. Daya tampung gedung yang semakin sempit dengan adanya penambahan koleksi terbaru sehingga ruang baca bagi pengunjung menjadi terbatas</p> <p>69. Kondisi Gedung perpustakaan yang sering terdampak banjir</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>manakala hujan, sehingga dipandang perlu untuk relokasi gedung perpustakaan yang lebih representatif</p>		
<p>2. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem</p> <p>3. Penguatan Daya Saing Usaha</p> <p>4. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan</p> <p>5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas</p> <p>6. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara</p>	<p>1. Peningkatan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, dan non-agro yang terintegrasi hulu-hilir</p> <p>2. Peningkatan Strategi Promosi dan kegiatan Promosi di Kawasan industri</p> <p>3. Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investor di Kawasan industri</p> <p>4. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital</p> <p>5. Peningkatan SDM UKM/IKM untuk tumbuh menjadi eksportir</p> <p>6. Peningkatan dukungan kemudahan pengurusan ekspor dan kemudahan memperoleh pinjaman bagi UKM/IKM</p> <p>7. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang</p>	<p>1. Kualitas jaringan jalan provinsi belum optimal yang ditunjukkan dengan masih tingginya tingkat kerusakan jalan</p> <p>2. Masih banyak kendaraan yang melebihi kapasitas jalan</p> <p>3. Kelengkapan fasilitas jalan belum memadai</p> <p>4. Kelas Jalan belum sesuai dengan peruntukan</p> <p>5. Masih terdapat daerah minim aksesibilitas dan konektivitas</p> <p>6. Sistem jaringan jalan belum tertata dengan baik</p> <p>7. Belum optimalnya sinkronisasi fungsi jalan</p> <p>8. Belum lengkapnya bukti syah kepemilikan lahan</p> <p>9. Masih tingginya tingkat kerusakan jalan</p> <p>10. Belum terdapat fasilitas keselamatan jalan di beberapa ruas jalan</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan Transformasi Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif</li> <li>• Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur</li> </ul>

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
	<p>didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata</p> <p>8. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor kehutanan</p> <p>9. Pemberian akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan dan peningkatan kapasitas usaha kelompok masyarakat, serta peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan.</p> <p>10. Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Perkebunan</p> <p>11. Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan</p> <p>12. Peningkatan produksi dan produktivitas ternak</p> <p>13. Penguatan kelembagaan peternakan</p> <p>14. Peningkatan produksi perikanan</p> <p>15. Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perikanan</p> <p>16. Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura</p>	<p>11. Regulasi terkait kewenangan pemasangan fasilitas jalan</p> <p>12. Koordinasi antar <i>stakeholders</i> belum maksimal</p> <p>13. Geometrik Jalan yang belum sesuai</p> <p>14. Keterampilan Pengemudi yang belum memadai</p> <p>15. Kondisi kendaraan yang tidak layak</p> <p>16. Prasarana transportasi seperti terminal dan pelabuhan belum memadai</p> <p>17. Sarana dan prasarana transportasi belum optimal</p> <p>18. Regulasi terkait pembangunan dan pengelolaan prasarana transportasi belum terlaksana dengan baik</p> <p>19. Minat masyarakat untuk menggunakan transportasi massal masih rendah</p> <p>20. Belum terbangunnya jaringan irigasi teknis</p> <p>21. Ketersediaan lahan untuk pembangunan jaringan irigasi belum memadai</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
	<p>17. Penguatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan petani tanaman pangan dan hortikultura melalui pemanfaatan teknologi dalam usaha pertanian</p> <p>18. Peningkatan iklim usaha dan investasi</p> <p>19. Peningkatan Kualitas pelaksanaan investasi berbasis Online Single System (OSS)</p> <p>20. Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar</p> <p>21. Peningkatan keberfungsian sosial PPKS</p> <p>22. Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan</p> <p>23. Peningkatan kualitas SDM dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial</p> <p>24. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi</p> <p>25. Peningkatan Daya Saing UMKM</p>	<p>22. Belum terbangunnya bendung/embung</p> <p>23. Terbatasnya sumber air baku</p> <p>24. Belum sinkronnya strategi dan arah kebijakan pembangunan antara sektor pertanian dan pekerjaan umum (pengairan)</p> <p>25. Kurangnya data dan informasi lahan pertanian eksisting</p> <p>26. Masih rendahnya koordinasi antar pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam pemenuhan jaringan irigasi</p> <p>27. Masih rendahnya koordinasi antar pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam melaksanakan kegiatan OP</p> <p>28. Belum terbangunnya pengendali banjir</p> <p>29. Masalah sosial dan lahan</p> <p>30. Masih rendahnya implementasi dokumen pola dan rencana pengelolaan DAS</p> <p>31. Belum optimalnya sistem pengendali banjir</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
	<p>26. Pemberdayaan perempuan kepala keluarga untuk kemandirian berusaha</p> <p>27. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</p> <p>28. Fasilitasi Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kemandirian desa</p> <p>29. Peningkatan penataan permukiman kumuh dan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak</p> <p>30. Peningkatan Pelayanan Jalan Provinsi</p> <p>31. Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan provinsi</p> <p>32. Pembangunan Jalan pada kawasan pertumbuhan ekonomi</p> <p>33. Peningkatan pelayanan terminal tipe B</p> <p>34. Pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi untuk meningkatkan ketersediaan air</p>	<p>32. Pendangkalan dan penyempitan sungai serta bangunan pengendali</p> <p>33. Sistem drainase dan sarana pendukungnya yang belum berfungsi baik</p> <p>34. Masih rendahnya koordinasi antar pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam melaksanakan kegiatan OP</p> <p>35. Masih rendahnya infrastruktur penanganan pantai kritis</p> <p>36. Belum optimalnya penanganan pantai kritis</p> <p>37. Belum terbangunnya infrastruktur penanganan pantai kritis</p> <p>38. Terjadinya pergeseran garis pantai akibat abrasi</p> <p>39. Belum selesainya RTRWN</p> <p>40. Belum selesainya RTRWP</p> <p>41. Belum selesainya RTRWK/K dan RDTR</p> <p>42. Belum optimal sinkronisasi dokumen perencanaan tata ruang</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
	<p>35. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengendali banjir</p> <p>36. Peningkatan pemenuhan akses air minum dan sanitasi</p> <p>37. Peningkatan kualitas dan cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)</p> <p>38. Perluasan jaringan layanan moda menuju simpul utama dan kawasan perbatasan, terluar, dan terpencil</p> <p>39. Penguatan distribusi barang khususnya komoditi barang ekspor-impor pada pelabuhan</p> <p>40. Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik</p> <p>41. Sinkronisasi dokumen perencanaan tata ruang</p> <p>42. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah</p> <p>43. Pengimplementasian kebijakan satu peta</p>	<p>43. RTR belum sepenuhnya menjadi acuan pembangunan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah</p> <p>44. Terdapat beberapa dinamika pembangunan dan perubahan kebijakan</p> <p>45. Masih terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pemanfaatan ruang</p> <p>46. Belum memiliki kelembagaan pengelolaan SPAM Regional</p> <p>47. Terdapat kabupaten/kota yang kekurangan sumber suplai air baku yang handal untuk air minum, baik dari sisi kuantitas, kontinuitas, dan kualitas</p> <p>48. Belum tersedianya prasarana yang memberikan layanan air minum curah lintas Kab/Kota</p> <p>49. Keterbatasan kewenangan pemerintah provinsi untuk mencapai akses universal (100%) air minum layak</p> <p>50. Kondisi geografis dan pemusatan penduduk yang sporadis menyebabkan penyediaan</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>layanan air minum dengan sistem regional tidak efisien untuk dilakukan</p> <p>51. Penanganan air minum masih difokuskan untuk akses layak universal</p> <p>52. Tingkat pelayanan air limbah terpusat sangat rendah</p> <p>53. Belum tersedianya prasarana pengolahan air limbah domestik skala regional</p> <p>54. Pengelolaan air limbah domestik skala regional di Kaltim hanya mampu menangani 110 Desa/kelurahan dari 841 Desa/kelurahan.</p> <p>55. Belum memadainya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan terpadu (pada sumber, Tempat Penampungan Sementara/TPS, Tempat Pemrosesan Akhir/TPA, dan pengangkutan dari hulu ke hilir)</p> <p>56. Capaian akses penanganan sampah domestik baru mencapai 71,68%</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>57. Belum tersedia pengelolaan persampahan yang berorientasi 3R (dari hulu ke hilir).</p> <p>58. Perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan serta belum ada kesadaran dalam mengurangi dan memilah sampah atau <i>Reuse, Reduce</i> dan <i>Recycle</i> (3R);</p> <p>59. Masih terdapat kawasan kumuh yang perlu perhatian Pemerintah Provinsi</p> <p>60. Sebagian besar rumah di kawasan kumuh berada di kawasan bantaran sungai - biasanya lahan merupakan milik pemerintah - warganya tidak memiliki sertifikat</p> <p>61. <i>Update</i> SK Kumuh terjadi ditengah tahun pelaksanaan jangka menengah daerah sehingga mengganggu perhitungan capaian</p> <p>62. Penanganan belum tepat sasaran - pelaksanaan penanganan kumuh bukan merupakan bagian dari aspek kumuh yang</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>dapat mengurangi skor kekumuhan</p> <p>63. Penguasaan lahan telah lebih dahulu daripada penetapan rencana tata ruang</p> <p>64. Penguasaan lahan oleh masyarakat tanpa bukti kepemilikan yang syah</p> <p>65. Ketidakjelasan kriteria penentuan luasan untuk klasifikasi kewenangan</p> <p>66. Proses Pendataan yang belum sempurna</p> <p>67. Keterbatasan finansial warga untuk membeli atau membangun rumah yang layak huni</p> <p>68. Penerapan SPM Perumahan dapat dipenuhi pasca terjadinya bencana (setelah ada penetapan bencana provinsi). Hanya bisa dilakukan tahap-tahap sebelumnya</p> <p>69. Masih terdapat warga yang tinggal di wilayah rawan bencana</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>70. Terdapat warga yang berpotensi terkena relokasi akibat program pemerintah provinsi</p> <p>71. Belum tersedianya data detail terkait rencana penanganan rumah untuk korban bencana tingkat provinsi</p> <p>72. Belum tersedianya data detail terkait rencana penanganan rumah untuk warga yang terkena relokasi program pemerintah</p> <p>73. Rencana perpindahan Ibukota Negara menuju Kalimantan Timur secara langsung berdampak bagi penambahan penduduk sehingga akan memunculkan permasalahan baru yaitu bertambahnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</p> <p>74. Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi Kaltim</p> <p>75. Terdapat <i>Blank Spot</i> di beberapa Kabupaten yang ada di Kalimantan Timur hal ini</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>menyebabkan keterlambatan dalam meng-update data pada daerah yang bersangkutan.</p> <p>76. Belum Optimalnya Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur dalam proses perencanaan dan Implementasi penanganan Program-program Kesejahteraan Sosial</p> <p>77. Belum meratanya kualitas pembangunan wilayah perdesaan</p> <p>78. Masih terbatasnya pengembangan ekonomi perdesaan bumdes</p> <p>79. Kompetensi SDA desa dan anggota BPD rata-rata masih rendah, jumlah perangkat sebagian desa belum terpenuhi, prasarana dan sarana pemdes dan kelurahan belum memadai</p> <p>80. Masih terbatasnya kemampuan memfasilitasi pelatihan bagi lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat</p> <p>81. Masih terbatasnya potensi desa pada pembangunan kawasan</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>perdesaan, masih terbatasnya pengembangan lembaga masyarakat seperti BKAD dan BUMADES</p> <p>82. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim</p> <p>83. Belum optimalnya kinerja kelembagaan koperasi</p> <p>84. Rendahnya Kualitas SDM Koperasi</p> <p>85. Lemahnya sistem pengawasan koperasi</p> <p>86. Minimnya pelaku UKM dalam pemanfaatan pemasaran digital</p> <p>87. Menurunnya aktivitas ekonomi UKM semasa Pandemi COVID-19</p> <p>88. Rendahnya daya saing produk UKM</p> <p>89. Kurangnya informasi permodalan UKM dalam menjalankan usahanya</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>90. Belum terintegrasinya Promosi Investasi yang dilakukan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota</p> <p>91. Belum optimal layanan yang diberikan karena masih terbatasnya SDM</p> <p>92. Masih kurangnya ketersediaan informasi detail tentang peluang investasi</p> <p>93. Belum optimalnya komitmen perizinan</p> <p>94. Belum efektifnya pengawasan perizinan penanaman modal</p> <p>95. Terbatasnya prasarana saluran irigasi</p> <p>96. Supply ketersediaan benih udang/ikan yang dihasilkan oleh UPTD Balai</p> <p>97. Benih Udang/Ikan belum optimal</p> <p>98. Rendahnya kesiapan dalam menanggulangi hama dan penyakit</p> <p>99. Belum optimalnya penyediaan fasilitas kolam dan air yang baik</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>100. Bahan baku pakan dan kestabilan harga, serta tingginya harga pakan</p> <p>101. Struktur armada penangkapan ikan yang masih didominasi oleh kapal berukuran kecil</p> <p>102. Penyaluran BBM subsidi untuk nelayan masih belum optimal</p> <p>103. Sulitnya mendapatkan data kapal dan</p> <p>104. data operasional yang valid</p> <p>105. Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan sektor kelautan</p> <p>106. dan perikanan</p> <p>107. Sistem promosi yang belum berinovasi dan modern</p> <p>108. Masih banyaknya Usaha Kecil Menengah (UKM) hasil perikanan yang</p> <p>109. belum memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)</p> <p>110. Minimnya kerja sama bidang usaha perikanan</p> <p>111. Inovasi peningkatan produk hasil perikanan belum berkembang</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>112. Mutu produk hasil perikanan yang masih rendah</p> <p>113. Tenaga pendamping perikanan belum diberdayakan secara optimal</p> <p>114. Tindak lanjut hasil koordinasi lintas sektoral untuk pengembangan sektor pariwisata belum optimal</p> <p>115. Belum maksimalnya kerja sama dan sinergitas antara <i>stakeholder</i> pariwisata (mitra kerja, kab/kota, dll)</p> <p>116. Belum dimaksimalkannya potensi pelaku ekonomi kreatif sebagai bagian dari atraksi yang bisa dinikmati wisatawan.</p> <p>117. Belum optimalnya data sub sektor ekonomi kreatif.</p> <p>118. Belum tersedianya pusat kegiatan kreatif tingkat Provinsi</p> <p>119. Belum optimalnya perlindungan terhadap hasil karya pelaku ekraf</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>120. Belum optimalnya pengembangan sub sektor ekraf.</p> <p>121. Belum fokus pada nilai kekhasan daerah dalam pengembangan potensi ekraf.</p> <p>122. Belum terbangunnya sebuah destinasi wisata unggulan yang siap jual secara utuh serta Belum dibangun secara maksimal ketersediaan sarpras pendukung untuk kenyamanan wisatawan seperti infrastruktur dasar Jalan lingkungan, jaringan air minum, dan listrik, juga permasalahan utiliti dasar seperti telekomunikasi, toilet, pedestrian, pengelolaan limbah/ sampah. Amenitas lainnya yang belum diintegrasikan adalah sarana kesehatan, perbankan, pasar dan lain-lain</p> <p>123. Kurangnya kapasitas pelaku ekonomi kreatif didalam pengembangan usaha serta</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>belum optimalnya kemitraan untuk pengembangan kapasitas SDM Pariwisata dan ekraf</p> <p>124. Teknologi pertanian yang belum dilakukan secara modern</p> <p>125. Alih fungsi lahan pertanian</p> <p>126. terbatasnya jalan usaha tani dan jalan produksi</p> <p>127. kurangnya jaringan irigasi</p> <p>128. Ketersediaan bibit ternak lokal masih kurang</p> <p>129. manajemen perkawinan ternak belum optimal</p> <p>130. Keterbatasan lahan usaha peternakan</p> <p>131. Penataan kawasan peternakan belum optimal</p> <p>132. Ketersediaan pakan ternak berkualitas masih kurang</p> <p>133. Hilirisasi dan industrialisasi produk peternakan masih rendah</p> <p>134. Manajemen pemasaran produk peternakan belum optimal</p> <p>135. Keterbatasan permodalan</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>136. Infrastruktur jalan di areal perkebunan yang tidak memadai</p> <p>137. Kesulitan dalam mendapatkan saprodi</p> <p>138. Penggunaan benih yang illegitim</p> <p>139. Praktik budidaya yang tidak tepat</p> <p>140. Kurangnya pendampingan dari tenaga penyuluh untuk mendampingi pekebun</p> <p>141. Masih banyak pekebun yang belum bermitra dengan PBS</p> <p>142. Tidak kontinu dan tidak padunya proses fasilitasi dan pendampingan kegiatan hulu hilir usaha perkebunan</p> <p>143. Rendahnya kualitas olahan hasil</p> <p>144. perkebunan dan produk olahan yang dihasilkan tidak berorientasi pasar</p> <p>145. Rantai pemasaran produk perkebunan yang panjang</p> <p>146. Belum terpenuhinya alat dan mesin pengolahan hasil</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>perkebunan sehingga dalam mengolah hasil perkebunan masih menggunakan alat dan mesin manual/ sederhana</p> <p>147. Kurangnya sosialisasi dan</p> <p>148. pengenalan produk-produk olahan dan pemasaran komoditi perkebunan kepada petani pekebun yang ada di Kabupaten/ Kota</p> <p>149. Kawasan agro industri dan infrastruktur pendukungnya belum dikembangkan dengan baik</p> <p>150. Terbatasnya Ekspor Komoditi dan Produk Non Migas Non Batubara</p> <p>151. Belum Optimalnya Pemanfaatan/Peluang Ekspor Langsung di Kalimantan Timur</p> <p>152. Terbatasnya Jangkauan Pemasaran Komoditi dan Produk Ekspor</p> <p>153. Minimnya Produksi dan Sarana Distribusi Bahan Pokok</p> <p>154. Belum Optimalnya Fasilitasi Sistem Distribusi Perdagangan</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		155. Belum Optimalnya Kerja sama Perdagangan 156. Belum memadainya infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang termasuk konektivitas antar wilayah 157. Terbatasnya sumber daya manusia industri 158. Kelembagaan industri belum efektif 159. Minimnya pembinaan pengembangan 160. wirausaha industri kecil mikro.		
7. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi	1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan 2. Pengendalian pencemaran air 3. Pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut 4. Pengendalian pencemaran udara 5. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lahan dan hutan 6. Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	1. Belum optimalnya penyusunan kajian dan implementasi RPPLH dan KLHS 2. Belum jelasnya teknis kajian dampak lingkungan hidup. 3. Masih rendahnya pengetahuan, kesadaran dan partisipasi para pihak terhadap upaya pemeliharaan lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Kualitas lingkungan hidup</li> </ul>

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
	<ul style="list-style-type: none"> <li>7. Pemeliharaan dan Perlindungan Wilayah-Wilayah Penyedia Jasa LH</li> <li>8. Penurunan Deforestasi dan Degradasi Hutan</li> <li>9. Pengelolaan Hutan Lestari Berkelanjutan</li> <li>10. Peningkatan Peranan Konservasi Hutan</li> <li>11. Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI)</li> <li>12. Rehabilitasi Kawasan Hutan (Regenerasi/tanpa penebangan)</li> <li>13. Rehabilitasi Hutan Produksi dan Lahan (Dengan Rotasi)</li> <li>14. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan</li> <li>15. Peningkatan pengelolaan DAS</li> <li>16. Peningkatan pemanfaatan biomassa perkebunan</li> <li>17. Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha perkebunan</li> <li>18. Pemanfaatan limbah industri pertanian dan kehutanan sebagai sumber energi secara terintegrasi dengan industrinya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4. Minimnya Pendanaan untuk program kegiatan prioritas</li> <li>5. Perubahan pada Metode Perhitungan IKLH dan validasi Nilai IKLH</li> <li>6. Jumlah Pengawas LH dengan izin usaha yang diawasi belum sebanding (kekurangan SDM)</li> <li>7. Jumlah dana untuk kegiatan pengawasan tidak sebanding dengan target yang wajib diawasi</li> <li>8. Belum optimalnya kegiatan penanganan sampah di wilayah lintas kabupaten/kota serta pesisir dan laut</li> <li>9. Masih terbatasnya ketersediaan data pengelolaan B3 dan Limbah B3 serta kurangnya fasilitas pengelolaan Limbah B3</li> <li>10. Belum tersedianya prasarana dan sarana penanganan sampah di lintas kab/kota</li> <li>11. Belum ditetapkannya lokasi TPA/TPST regional</li> <li>12. Terbatasnya kewenangan Provinsi dalam Penanganan Sampah</li> </ul>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
	<p>19. Pengembangan dan pemanfaatan biodiesel sebagai upaya untuk mengurangi emisi GRK dan meningkatkan ekonomi masyarakat.</p> <p>20. Pengembangan energi surya mencakup pemanfaatan PLTS di perdesaan dan perkotaan</p> <p>21. Pengembangan infrastruktur EBT</p> <p>22. Peningkatan kerja sama dalam pengelolaan EBT</p> <p>23. Peningkatan edukasi kepada para pihak terutama masyarakat untuk penerapan EBT</p>	<p>khususnya penyediaan sarana dan prasarana</p> <p>13. Tidak terserapnya anggaran secara maksimal, karena kendala teknis administrasi penganggaran (seperti Dana POKIR)</p> <p>14. Belum ditetapkannya lokasi rencana pembangunan insinerator</p> <p>15. Masih pada tahap proses penyusunan Peraturan Gubernur sebagai instrumen untuk dasar pengukuran merkuri.</p> <p>16. Belum maksimalnya frekuensi dan titik pemantauan lingkungan</p> <p>17. Belum adanya penetapan alokasi beban pencemar pada badan air</p> <p>18. Belum adanya penetapan wilayah perlindungan dan pengelolaan mutu udara</p> <p>19. Masih tingginya tingkat kerusakan lahan, danau dan gambut</p> <p>20. Panjangnya Alur Proses Mekanisme dalam Pemulihan Kerusakan Lingkungan</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>21. Perubahan metode perhitungan IKLH dan validasi nilai IKLH</p> <p>22. Kurangnya Koordinasi antara Pemerintah Pusat, Daerah dan kabupaten/kota, terkait data lingkungan</p> <p>23. Tidak sinkronnya data antara OPD terkait</p> <p>24. Minimnya pendanaan untuk program kegiatan prioritas</p> <p>25. Panjangnya alur proses mekanisme dalam pemulihan kerusakan lingkungan</p> <p>26. Adanya aturan yang tidak selaras</p> <p>27. Meningkatnya pengaduan masyarakat terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan</p> <p>28. Meningkatnya pelaku usaha yang harus diawasi</p> <p>29. Kurangnya pemahaman lembaga masyarakat, dunia pendidikan, pelaku usaha, pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lh</p> <p>30. Adanya aturan yang tidak selaras</p> <p>31. Sarana dan prasarana penunjang (kendaraan lapangan medan</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>berat, APD, peralatan sampling in situ, drone, handy talky, dll) untuk pelaksanaan verifikasi lapangan tidak/kurang memadai.</p> <p>32. Jumlah SDM masih kurang</p> <p>33. Kualitas SDM perlu ditingkatkan</p> <p>34. Kurangnya Tenaga Anggota Personil di Lapangan dan Ketersediaannya Sarana dan Prasarana</p> <p>35. Kurangnya Jumlah Tenaga PPNS dan Kurang Berminatnya ASN Sarjana S1 Kurang Berminat Menjadi PPNS</p> <p>36. PPNS masih belum optimal dalam menjalankan tugasnya</p> <p>37. Belum aktif dalam menghimpun laporan kebencanaan kebakaran</p> <p>38. Kurang diresponnya Permintaan Data Daerah Rawan Bencana Kebakaran</p> <p>39. Rendahnya tata kelola dan fasilitasi hubungan kerja sama antar Lembaga, Mitra dan Masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>hutan dan lahan di wilayah provinsi</p> <p>40. Rendahnya Penanggulangan pada Tingkat Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Pelayanan Kedaruratan dan Logistik serta pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p> <p>41. Rendahnya kualitas SDM aparatur</p> <p>42. Minimnya Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p> <p>43. Rendahnya tata kelola dan fasilitasi hubungan kerja sama antar Lembaga, Mitra dan Masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi</p> <p>44. Rendahnya Penanggulangan karhutla pada Tingkat Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Pemadaman, dan penanganan Pasca Karhutla</p> <p>45. Rendahnya kualitas maupun Kuantitas SDM aparatur</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>46. Minimnya Sarana dan Prasarana Karhutla</p> <p>47. Rendahnya Sistem Pengawasan terhadap penyelenggaraan Penanggulangan Karhutla</p> <p>48. Rendahnya Tingkat penyidikan kejadian karhutla</p> <p>49. Kendala dalam pemerataan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik.</p> <p>50. Kendala masyarakat tidak mampu dalam membiayai pemasangan instalasi dan penyambungan listrik PLN.</p> <p>51. Belum optimalnya pembinaan, Pengawasan dan kerja sama Pemerintah, PLN dan Swasta dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.</p> <p>52. Teknologi pemanfaatan limbah ternak untuk diolah menjadi biogas masih relatif agak tinggi dari segi biaya</p> <p>53. Pengetahuan masyarakat terkait pemanfaatan limbah ternak untuk diolah menjadi biogas masih terbatas</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>54. Sebagian hewan ternak tidak dikandangkan</p> <p>55. Belum tersedianya informasi kehutanan berbasis data di tingkat tapak</p> <p>56. Belum optimalnya inovasi, diversifikasi dan dukungan regulasi terhadap produk dari kawasan hutan</p> <p>57. kurangnya pengawasan terhadap pemegang izin usaha di kawasan hutan produksi baik hulu dan hilir serta terhadap penatausahaan hasil hutan</p> <p>58. Curah hujan cukup tinggi sepanjang tahun, yang berakibat kepada terganggunya kegiatan produksi kayu.</p> <p>59. Biaya operasional produksi kayu yang meningkat karena naiknya harga BBM, diikuti dengan kenaikan biaya <i>sparepart</i> dan biaya perawatan kendaraan, sementara harga jual produksi kayu bulat tidak naik signifikan, malah cenderung turun pada</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>beberapa bulan menjelang akhir tahun 2022.</p> <p>60. Lesunya permintaan pasar dunia (ekspor) terhadap produk-produk olahan kayu terutama dari negara Eropa pada beberapa bulan terakhir (yang sedang menghadapi musim gugur di bulan September hingga November).</p> <p>61. Belum optimalnya kegiatan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan</p> <p>62. Masih tingginya luas kebakaran hutan dan lahan</p> <p>63. Masih kurangnya kawasan bernilai konservasi tinggi</p> <p>64. Jumlah personil Polisi Kehutanan, Masyarakat Mitra Polhut dan Masyarakat Peduli Api masih belum memadai.</p> <p>65. Belum optimalnya kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</p> <p>66. Belum optimalnya kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>67. Belum optimalnya pengelolaan perbenihan tanaman hutan yang berkualitas</p> <p>68. Penanaman yang dilakukan mitra kerja tidak dilakukan berbarengan, sehingga pelaporan tidak bersamaan</p> <p>69. Rendahnya kapasitas dan kompetensi petugas/penyuluh kehutanan</p> <p>70. Belum optimalnya kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan/atau Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pada Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), atau Kemitraan di dalam dan sekitar kawasan hutan</p> <p>71. Belum optimalnya peran Kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan/atau Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pada Hutan Hak dan Hutan Adat di dalam dan sekitar kawasan hutan.</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		72. Tata Waktu Penerbitan SK Persetujuan dari KLHK Yang belum Terukur 73. Lokasi PIAPS Relatif Jauh Dari Pemukiman		
8. Pelaksanaan Pemilu 2024	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung dengan IT 2. Perubahan <i>Mindset</i> dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi 3. Deregulasi Kebijakan 4. Penyederhanaan Organisasi 5. Perbaikan Tata Laksana 6. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur 7. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan 8. Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran 9. Implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah 10. Peningkatan kinerja perangkat daerah dan aparatur 11. Penguatan Pengawasan	1. Masih terdapat inkonsistensi perencanaan dan penganggaran 2. Belum terintegrasinya program kegiatan antar sektor/bidang pembangunan baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota 3. Perencanaan yang dilakukan masih belum berdasarkan pada hasil evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya 4. Keterbatasan data Bidang kominformasi/TIK yang dibutuhkan untuk proses analisis perencanaan pembangunan TIK 5. Kualitas data belum lengkap, akurat dan valid 6. Keterbatasan SDM analisis data dan informasi		Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
	<p>12. Optimalisasi kerja sama daerah yang sinergi dengan pembangunan IKN</p>	<p>7. Proses pembaharuan data pada aplikasi yang kurang cepat</p> <p>8. Belum terintegrasinya aplikasi sistem perencanaan dengan sistem monitoring dan evaluasi secara <i>online</i> karena aplikasi yang ada belum efektif untuk mendukung pengendalian dan evaluasi</p> <p>9. Masalah ada perbedaan persepsi terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintahan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020</p> <p>10. Belum maksimalnya koordinasi dalam rangka pencapaian sasaran Bidang Kesejahteraan Rakyat di Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota</p> <p>11. Belum tersedianya data dan informasi yang terpadu di bidang kesejahteraan rakyat dengan baik.</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>12. Kerja sama belum dianggap sektor yang strategis dalam pembangunan, terlihat dari terbatasnya anggaran Bagian Kerja sama dan Sumber Daya Aparatur yang menangani kurang sesuai pendidikannya, dan belum dibekali dengan Diklat dan Bimtek yang mumpuni.</p> <p>13. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam menelaah Produk Hukum.</p> <p>14. Konsep atau Draft Produk Hukum yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Perundang-Undangan</p> <p>15. Kurangnya Pemahaman Perangkat Daerah dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah.</p> <p>16. Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya.</p> <p>17. Belum diterapkannya kebijakan pengadaan barang dan jasa</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>18. Belum ditaatinya kode etik pengadaan barang dan jasa</p> <p>19. Belum di terapkannya prinsip pengadaan barang dan jasa</p> <p>20. Rendahnya kualitas data dan informasi terkait program dan kegiatan Perangkat Daerah</p> <p>21. Rendahnya kualitas data dan informasi terkait program dan kegiatan Perangkat Daerah</p> <p>22. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi untuk perbaikan kinerja</p> <p>23. Belum Optimalnya Penerapan</p> <p>24. SAKIP, khususnya Penerapan <i>Cascading</i> dan Rencana Aksi Pada Setda</p> <p>25. Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) belum optimal</p> <p>26. Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan serta Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) belum optimal</p> <p>27. Pelayanan yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan sebenarnya</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>sudah sesuai dengan prosedur yang ada, akan tetapi kadang-kadang di lapangan masih ditemui beberapa kendala misalnya bahan untuk rapat anggota dewan masih menunggu dari instansi lain, sehingga pelayanan juga agak terhambat</p> <p>28. Pelayanan pada masa reses, sosper dan sosbang masih belum optimal</p> <p>29. Minimnya pemahaman SDM terkait prosedur administrasi keuangan</p> <p>30. Kegiatan anggota DPRD belum diinformasikan kepada media cetak maupun media elektronik sehingga masyarakat bisa mengetahui kegiatan anggota DPRD</p> <p>31. Belum optimalnya Perencanaan,</p> <p>32. Pengembangan dan Sistem layanan Informasi Pendapatan</p> <p>33. Tidak tertagihnya Piutang Pajak Daerah</p> <p>34. Belum optimalnya penerimaan retribusi daerah, bagi hasil pajak</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>dan bukan pajak serta penerimaan lain-lain</p> <p>35. Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pendapatan daerah</p> <p>36. Belum optimalnya pelaksanaan kajian hukum dan perundang - undangan berkenaan dengan pendapatan daerah</p> <p>37. Peraturan Daerah/ Peraturan Kepala Daerah serta peraturan teknis pendukung lainnya.</p> <p>38. Riset dan inovasi daerah berfokus pada konsep <i>science based policy</i> untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah dengan memberdayakan tuisi Litbangirap inovek.</p> <p>39. Terciptanya ekosistem riset dan inovasi daerah yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan strategis (BRIN, Kemendagri, Kemendikbudristek, Kemenkumham, Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang Kab/Kota, Badan Usaha, Lembaga Masyarakat,</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>Penyandang Dana Riset/Yayasan, Mahasiswa, Pelajar, dll.)</p> <p>40. Tersedianya Rencana Induk (Rinduk) Kelitbangan/ Pemajuan Iptek di Kalimantan Timur.</p> <p>41. Terwujudnya sistem informasi riset dan inovasi daerah berbasis teknologi yang terpadu (amanat Perpres 78/2021).</p> <p>42. Terwujudnya sumber daya manusia (SDM) Iptek/riset dan inovasi daerah melalui kolaborasi dan sinergi antar Periset dari berbagai lembaga riset, baik pemerintah, swasta, maupun luar negeri.</p> <p>43. Adanya peta jalan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan untuk lembaga riset yang ada di Kab/Kota.</p> <p>44. Terbentuk Sentra HAKI di Balitbangda/BRIDA Prov. Kaltim.</p> <p>45. Adanya skema pendanaan riset dan inovasi daerah yang optimal.</p> <p>46. PPKM akibat pandemi COVID-19 membatasi pelayanan</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>47. Sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan belum dilaksanakan secara benar</p> <p>48. Kompetensi SDM pelaksana masih kurang</p> <p>49. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan</p> <p>50. Penetapan kawasan di TMII sebagai Green Zone sehingga diperlukan kendaraan listrik di lingkungan TMII yang akan berdampak pada jumlah kunjungan</p> <p>51. Belum tersedianya informasi yang akurat terkait IKN</p> <p>52. Masih kurangnya koordinasi dengan <i>stakeholder</i></p> <p>53. Pedoman Pelaksanaan SPIP yang berubah, sehingga harus di Sosialisasikan Kembali</p> <p>54. Masih adanya temuan hasil pengawasan baik dari internal dan eksternal</p> <p>55. Belum optimalnya penerapan kebijakan dan Standar Operasional pengendalian Internal</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>56. Belum optimalnya pendokumentasian pengendalian internal secara rapi, terstruktur, rutin dan konsisten</p> <p>57. Belum optimalnya pelaksanaan evaluasi atas efektivitas pengendalian secara periodik</p> <p>58. Penguatan monitoring dan evaluasi SPIP, Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Penanganan Laporan gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, penanganan pengaduan, PMRB, Survei Penilaian Integritas, <i>Wistle Blowing</i> Sistem, <i>Probitiy</i> Audit, LHPKN dan LHKASN</p> <p>59. Penguatan dan peningkatan kapabilitas APIP, penyusunan kebijakan dan prosedur serta Program Kerja Pengawasan Tahunan yang berkualitas dan berbasis risiko</p> <p>60. Peran Inspektorat Daerah selaku <i>Quality Assurance</i> (QA) dan <i>Advisory</i> belum berjalan sebagaimana yang diharapkan,</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>dan perlu adanya sosialisasi dan monev/ pendampingan terkait reformasi birokrasi yang terus ditingkatkan serta perlunya komitmen perangkat daerah.</p> <p>61. Penguatan kegiatan pemeriksaan berkala dan tujuan tertentu, revidasi atas dokumen perencanaan dan keuangan serta lainnya, evaluasi, monitoring hasil pengawasan dan kegiatan tertentu, pemutakhiran data hasil pengawasan.</p> <p>62. Penguatan penerapan rencana aksi daerah dan implementasi pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta peningkatan kegiatan asistensi/ bimbingan teknis/ diklat dan layanan konsultasi</p> <p>63. Penguatan kegiatan pelatihan kantor sendiri, peningkatan kemampuan teknis aparat pengawasan dan komparasi implementasi kebijakan pengawasan melalui diklat fungsional, substantif dan profesi.</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		<p>64. Jumlah SDM Pengawasan / Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD belum sebanding dengan tugas pengawasan baik tugas rutin maupun mandatori</p> <p>65. Masih terdapat tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum selesai dan berlarut-larut penyelesaiannya dan belum adanya penyelesaian melalui majelis TP/TGR serta kurangnya komitmen perangkat daerah</p> <p>66. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan berdemokrasi</p> <p>67. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap etika dan budaya politik demokrasi</p> <p>68. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan.</p> <p>69. Melemahnya semangat kebersamaan dan menurunnya kepedulian sosial.</p>		

Arah Kebijakan RKP 2024	Arah Kebijakan RPD 2024 - 2026	Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Bidang Urusan	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi Kinerja 2022	Isu Strategis Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024
		70.Meningkatnya simbolisme agama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. 71.Meningkatnya tindak kekerasan dan disharmoni sosial dalam masyarakat		

Sumber perumusan isu strategis:

1. Arah kebijakan RKP Tahun 2024
2. Arah kebijakan RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026
3. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
4. Permasalahan pembangunan daerah (hasil evaluasi RKPD)

Berdasarkan Tabel IV.5 di atas, maka 5 (lima) isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM);
2. Percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
3. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

Adapun penjelasan terhadap masing-masing isu strategis adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

- a. Pemerataan pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Membangun sumber daya manusia di wilayah Kalimantan Timur adalah bagaimana memperkuat kualitas sumber daya manusia yang mampu mendukung proses transformasi ekonomi wilayah Kalimantan Timur menuju ekonomi berkelanjutan serta didukung pengetahuan dan inovasi. Posisi strategis Kalimantan Timur sebagai daerah asal IKN dan menjadi mitra pembangunan IKN memberikan peluang sekaligus tantangan bagi SDM di Kalimantan Timur. Merespons kondisi tersebut, pembangunan daerah untuk 3 (tiga) tahun kedepan diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas SDM.

Terdapat beberapa hal yang menjadi prioritas dalam pembangunan SDM, antara lain sistem pendidikan dan sistem kesehatan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Perbaikan sistem pendidikan, utamanya revitalisasi sistem pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi perlu terus menjadi perhatian. Selain itu, penataan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga pengajar juga perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Sementara itu, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan diarahkan selain untuk peningkatan layanan yang menjangkau masyarakat sampai ke pelosok, juga diharapkan lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan.

b. Peningkatan Daya saing tenaga kerja

Perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, penambahan penduduk dan persaingan ekonomi menuntut SDM Kalimantan Timur yang terampil dan unggul agar memiliki daya saing yang tinggi. Penguatan SDM menuju manusia unggul memiliki korelasi yang erat dengan peningkatan produktivitas kerja. Kolaborasi antara pemerintah dan industri perlu didorong mulai dari perancangan program dan desain kurikulum, standar pelatihan hingga penyelenggaraan pelatihan kerja, sehingga kebijakan *link and match* dapat benar-benar berjalan. Dengan demikian, dapat dihasilkan tenaga kerja yang berdaya saing dan dapat memenuhi kebutuhan dunia kerja. Lebih lanjut, dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, diharapkan tenaga kerja di Kalimantan Timur dapat mengembangkan usaha dan mandiri, bahkan diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru.

c. Peningkatan daya saing perempuan

Ketimpangan gender di Kalimantan Timur masih terjadi. Hal ini tergambar dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang masih rendah. Secara khusus bila membahas peran perempuan dalam pembangunan, maka indikator IDG Kalimantan Timur masih rendah bila dibandingkan daerah lain di Pulau Kalimantan dan berada di bawah IDG nasional. Hal ini menunjukkan Kaltim masih terjadi ketimpangan/ketidaksetaraan gender pada partisipasi perempuan dalam pembangunan. Untuk itu perlu perhatian yang besar untuk peningkatan kualitas hidup perempuan sehingga dapat berdaya dan produktif.

2. Percepatan Transformasi Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

a. Diversifikasi ekonomi

Tantangan pembangunan ekonomi wilayah Kalimantan Timur ke depan adalah membangun keterkaitan hulu dan hilir dari komoditas-komoditas unggulan yang dapat menjadi basis perekonomian Kalimantan Timur masa mendatang. Transformasi ekonomi menuju keseimbangan permintaan antara dan permintaan akhir merupakan salah satu upaya yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian wilayah Kalimantan Timur.

Transformasi dari ekonomi berbasis SDA tak terbaharukan menjadi ekonomi berbasis SDA terbaharukan merupakan tantangan utama yang perlu

disiapkan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur dalam jangka menengah dan panjang. Proses menipisnya stok SDA tak terbaharukan merupakan hukum alam yang tidak dapat dicegah, sehingga transformasi menjadi suatu keharusan guna menjamin keberlanjutan pembangunan wilayah Kalimantan Timur. Sektor non migas memiliki tingkat pertumbuhan rata-rata yang lebih tinggi dari sektor migas. Kondisi ini mencerminkan bahwa sektor-sektor non pertambangan yang saat ini belum dimaksimalkan memiliki perilaku pertumbuhan alami yang menjanjikan.

Kalimantan Timur berfokus pada pertambangan batubara yang merupakan sektor primer sebesar 76%, yang seharusnya sektor sekunder (manufaktur) dan tersier (jasa) harus lebih ditingkatkan dengan adanya inovasi hasil sektor tersebut. Diperlukan otoritas pengawasan pada tingkat daerah untuk mengurangi degradasi lingkungan hidup akibat aktivitas pertambangan. Pemerintah bersama dengan pelaku pembangunan lainnya perlu melakukan kolaborasi sektor perkebunan dan peternakan untuk memperkuat produktivitas daerah. Berbagai upaya untuk pengembangan sektor-sektor unggulan non migas dan tambang perlu ditempuh, seperti pendekatan industri teknologi bersih melalui penerapan transformasi digital dan industrialisasi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan secara berkelanjutan; pembangunan rendah karbon melalui ekonomi sirkular; industri hijau; peningkatan ekowisata dan pariwisata dan penggunaan bahan kimia dan produk kimia dan energi rendah karbon.

#### b. Peningkatan Keberdayaan ekonomi masyarakat

Masalah kesejahteraan sosial tidak terlepas dari masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Provinsi Kalimantan Timur dihadapkan dengan masalah kemiskinan dengan akar masalah yang sebagian berbeda-beda pada setiap daerah kabupaten/kota. Penanganan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem menjadi perhatian pemerintah Kalimantan Timur. Berbagai upaya telah dilakukan dan masih terus dilaksanakan, antara lain upaya untuk meningkatkan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk kemandirian, meningkatkan kualitas SDM dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial, serta penataan permukiman kumuh dan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak.

Pemerintah daerah juga terus berusaha untuk meningkatkan dan menguatkan partisipasi UMKM dan koperasi. Peningkatan daya saing UMKM

dan koperasi diharapkan dapat membangkitkan perekonomian masyarakat serta membuka lapangan kerja. Pengembangan usaha UMKM dan koperasi diarahkan juga untuk mengolah produk-produk lokal hasil pertanian dalam arti luas, kelautan dan perikanan, serta unggulan lainnya diluar non migas dan tambang.

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur

Pengembangan perekonomian daerah membutuhkan dukungan infrastruktur yang andal. Pembangunan Kalimantan Timur beberapa tahun diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan mutu layanan infrastruktur dasar maupun infrastruktur yang mendukung perekonomian daerah. Infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, persampahan, telekomunikasi dan listrik diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan penerapan standar pelayanan minimal (SPM). Selain itu, infrastruktur juga diarahkan ke kawasan-kawasan strategis yang mampu membangkitkan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan masyarakat Kalimantan Timur.

3. Peningkatan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur

Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu wilayah yang berdekatan dengan Ibukota Negara Nusantara memiliki posisi strategis sebagai penggerak perekonomian negara. Perlu ketersediaan infrastruktur dasar termasuk infrastruktur yang mendukung perekonomian, yang terkoneksi dan terintegrasi sehingga dapat mendukung pembangunan daerah dan IKN.

Masalah utama yang ditemui adalah ketersediaan infrastruktur yang belum merata. Selain itu, kondisi infrastruktur yang sebagian tidak dalam kondisi baik, menyebabkan pelayanan tidak optimal. Terjadi kerusakan pada beberapa ruas jalan yang disebabkan faktor *Over Dimension* dan *Over Load* di beberapa ruas jalan sehingga perlu penanganan serius dengan membuat jaringan jalan khusus untuk moda transportasi pertambangan dan perkebunan sawit dan penegakan hukum terkait penggunaan jalan.

4. Peningkatan Kualitas lingkungan hidup

a. Peningkatan kualitas air, air laut, udara dan tutupan lahan

Pembangunan Kalimantan Timur selain untuk mengejar pertumbuhan, juga tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ditengah upaya pemerintah bersama masyarakat

dan dunia usaha membangun Kalimantan Timur, komitmen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup juga terus dilakukan.

Upaya menjaga kualitas lingkungan hidup yang dipengaruhi oleh kualitas air, air laut, udara, dan tutupan lahan diharapkan dapat mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Beberapa potensi yang mempengaruhi upaya menjaga kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Timur antara lain industri petrokimia, migas, batubara, pengolahan kayu, perkebunan, permukiman, pertambangan, peternakan, jumlah kendaraan, limbah padat, sarana transportasi, beban limbah cair dan limbah B3 dari sarana penginapan dan rumah sakit, keterbatasan fasilitas buang air besar dan timbulan sampah.

#### b. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau ditopang oleh pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim merupakan suatu keharusan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Provinsi Kalimantan timur bersama berbagai pihak termasuk masyarakat untuk mewujudkan pembangunan rendah karbon. Program Pengurangan Emisi GRK: Program Pengurangan Emisi (*Emission Reduction/ER program*) dari deforestasi dan degradasi hutan di Kalimantan Timur yang telah berlangsung sejak 2019-2024, dirancang bersama oleh Pemerintah Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/KLHK) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Program ini merupakan program berbasis kinerja dibawah skema Fasilitas Kemitraan Karbon Hutan (*Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund/FCPF-Carbon Fund*) yang dikelola oleh Bank Dunia. FCPF merupakan kemitraan global pemerintah, bisnis, masyarakat sipil, dan organisasi Masyarakat Adat yang berfokus pada pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi stok karbon hutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon hutan di negara berkembang. ER Program di Kalimantan Timur merupakan salah satu contoh penerapan nilai ekonomi karbon untuk skema RBPs (pembayaran berbasis kinerja).

Kedepan, pembangunan Provinsi Kalimantan Timur memberikan penekanan yang besar pada penurunan emisi GRK dan intensitas emisi. Penurunan emisi GRK secara khusus diprioritaskan pada sektor kehutanan dan lahan, sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah. Penurunan emisi deforestasi dan degradasi hutan, pembangunan hutan tanaman, *sustainable management of forest*, dan rehabilitasi hutan merupakan beberapa aksi yang dapat dilakukan untuk melaksanakan pembangunan rendah karbon, sekaligus

mendukung pencapaian target NDC. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah, akademisi, pihak swasta, mitra pemerintah maupun penggiat dan aktivis lingkungan hidup untuk dapat mewujudkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Kalimantan Timur.

### c. Penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT)

Potensi EBT seperti panas bumi, air, bioenergi, sinar matahari dan angin/bayu sangat melimpah di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia seluas 120 juta hektar memiliki potensi sumber biomassa, energi air, dan panas bumi yang sangat besar. Dari data proyeksi penyediaan energi yang dimuat dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kalimantan Timur, bauran energi primer Provinsi Kalimantan Timur dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu batubara, minyak bumi, gas bumi, dan EBT.

Beberapa penyebab harga EBT belum kompetitif yaitu adanya subsidi untuk BBM dan listrik serta masih mahal biaya dari sebagian besar teknologi EBT. Akibatnya hingga tahun 2015 EBT masih kalah bersaing dengan energi fosil. Hal ini menyebabkan pengembangan dan pemanfaatan EBT belum optimal dan mengakibatkan ketergantungan yang besar pada energi fosil. Salah satu upaya untuk meningkatkan pemanfaatan EBT adalah dengan mengalihkan subsidi yang semula dialokasikan untuk energi fosil menjadi subsidi untuk EBT.

Pencapaian target program RUED Kalimantan Timur diprioritaskan untuk meningkatkan peran energi baru terbarukan dalam bauran energi. Bauran energi dari EBT ditargetkan mendekati sebesar 12,39% tahun 2025 dan sebesar 28,72% tahun 2050. Pencapaian bauran EBT meliputi kontribusi dari program kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah dan swasta.

## 5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 44 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2025 sebagai salah satu bentuk komitmen dalam penerapan reformasi birokrasi. Dalam dokumen tersebut, terdapat tiga sasaran reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu: 1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel; 2. Birokrasi yang Kapabel; dan 3. Pelayanan Publik yang Prima.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem

penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek yakni kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan sumber daya manusia aparatur. Bagi Pemerintah Daerah, reformasi birokrasi merupakan faktor yang mendukung pembenahan birokrasi di daerah. Pelaksanaan reformasi birokrasi diharapkan mampu menciptakan birokrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Berbagai upaya telah dan terus dilakukan untuk penataan organisasi untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan memberikan pelayanan publik yang prima. Penerapan *e-Government* dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Timur saat ini sudah sebagian besar berbasis TIK. Adanya beberapa sistem informasi dan integrasi mampu menghasilkan Nilai Indeks SPBE yang meningkat dari tahun ke tahun. Adanya keterbukaan informasi pelayanan publik melalui Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) merupakan langkah awal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyampaikan jenis-jenis pelayanan dan kinerja Perangkat daerahnya.

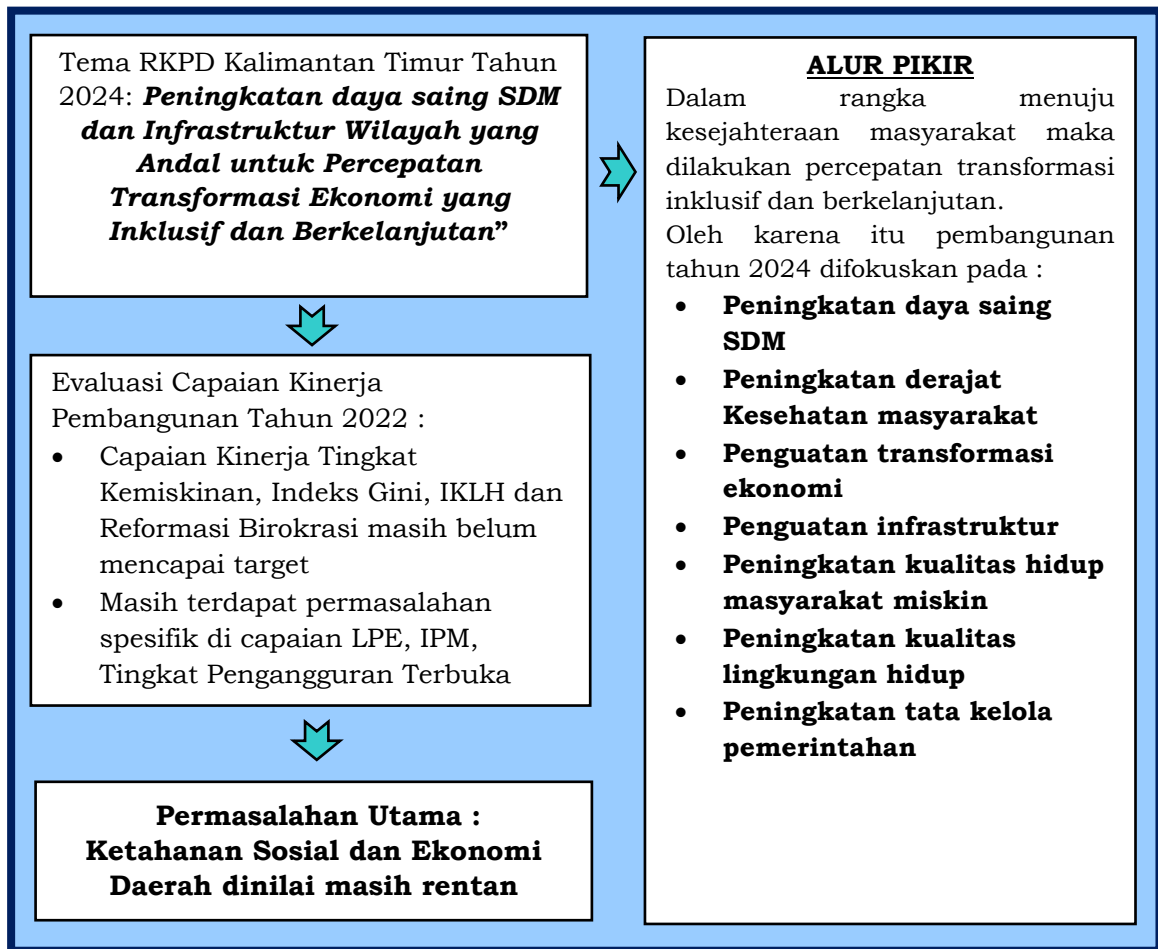
Lebih lanjut, dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur telah berkomitmen untuk mempercepat pembentukan MPP secara bertahap. Dengan adanya MPP maka pelayanan bagi masyarakat dari pemerintah pusat dan daerah akan terintegrasi dalam satu tempat sehingga memberikan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan. Selain itu, juga dapat berimplikasi dalam meningkatkan daya saing dengan memberikan kemudahan berusaha.

#### 4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan RKPD Kalimantan Timur Tahun 2024

Dengan memperhatikan hasil analisa terhadap arah kebijakan RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026, arah kebijakan RKP tahun 2024, isu strategis serta permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan tahun 2024, maka tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 adalah “Peningkatan daya saing SDM dan Infrastruktur Wilayah yang Andal untuk percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”.

Tema RKPD tahun 2024 menggambarkan fokus pelaksanaan pembangunan dengan tetap menerapkan prinsip inklusifitas. Pembangunan difokuskan pada upaya-upaya strategis dan taktis untuk mencapai tujuan dan sasaran RKPD. Dengan dicapainya tujuan dan sasaran pembangunan, maka diharapkan dapat tidak saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum dan daya saing Kalimantan Timur.

Tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 menekankan pada kata kunci peningkatan daya saing SDM, infrastruktur wilayah yang andal, percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. 4 (empat) hal tersebut menjadi perhatian utama untuk pembangunan tahun pertama periode RPD dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan yaitu masih tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, kualitas lingkungan hidup serta rendahnya Reformasi Birokrasi. Upaya yang harus dilakukan dalam peningkatan daya saing SDM, infrastruktur wilayah yang andal, percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan adalah penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan produktivitas komoditas unggulan dan industri pengolahan, serta pemenuhan tenaga kerja yang berdaya saing, yang didukung dengan peningkatan dan pemerataan layanan infrastruktur, kemandirian birokrasi, dan pelestarian lingkungan.



Gambar IV.2  
Kerangka Pikir Perumusan Prioritas RKPDP Kalimantan Timur Tahun 2024

Prioritas Pembangunan pada RKPDP merupakan Prioritas Pembangunan yang bersifat Tematik yang ditujukan pada pencapaian sasaran utama pada tema RKPDP Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024, dimana RKPDP ini juga perlu memperhatikan upaya pencapaian tujuan pembangunan pada RPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan. Dengan memahami isu strategis dan permasalahan pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur serta memperhatikan tema pembangunan daerah tahun 2024, maka Prioritas Pembangunan RKPDP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
3. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan;

4. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem;
6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik;
8. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama;

Perumusan prioritas pembangunan disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan RPD dan permasalahan pembangunan daerah. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.6  
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Arah Kebijakan  
RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026

No	Prioritas Pembangunan RKPD 2024	Arah Kebijakan RPD untuk Tahun 2024
1.	Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan perluasan akses jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus</li> <li>b. Peningkatan mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus</li> <li>c. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai terutama pada daerah tertinggal dan perbatasan</li> <li>d. Optimalisasi <i>Boarding School</i></li> <li>e. Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa di semua jenjang pendidikan terutama kepada siswa yang kurang mampu</li> <li>f. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>g. Peningkatan literasi dan numerasi</li> <li>h. Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar</li> <li>i. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja</li> <li>j. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri</li> <li>k. Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja</li> <li>l. Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan</li> <li>m. Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja</li> <li>n. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi</li> </ol>

No	Prioritas Pembangunan RKPD 2024	Arah Kebijakan RPD untuk Tahun 2024
		<ul style="list-style-type: none"> <li>o. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan</li> <li>p. Penguatan dan pengembangan kelompok masyarakat serta lembaga pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dan politik</li> <li>q. Peningkatan profesionalisme pekerja perempuan</li> </ul>
2.	<p>Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Percepatan perbaikan gizi masyarakat</li> <li>b. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi</li> <li>c. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta</li> <li>d. pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat</li> <li>e. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan</li> <li>f. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen fasyankes maupun fasilitasnya</li> <li>g. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat</li> <li>h. Penguatan Sistem Kesehatan dan pembiayaan kesehatan</li> <li>i. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan</li> </ul>
3.	<p>Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan industrialisasi berbasis pengolahan komoditas pertanian, kehutanan, perikanan, dan non-agro yang terintegrasi hulu-hilir</li> <li>b. Peningkatan Strategi Promosi dan kegiatan Promosi di Kawasan industri</li> <li>c. Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investor di Kawasan industri</li> <li>d. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital</li> <li>e. Peningkatan SDM UKM/IKM untuk tumbuh menjadi eksportir</li> <li>f. Peningkatan dukungan kemudahan pengurusan ekspor dan kemudahan memperoleh pinjaman bagi UKM/IKM</li> <li>g. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata yang didukung penguatan rantai pasok dan ekosistem pariwisata</li> <li>h. Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor kehutanan</li> <li>i. Pemberian akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan dan peningkatan kapasitas usaha kelompok masyarakat, serta peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan.</li> <li>j. Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Perkebunan</li> </ul>

No	Prioritas Pembangunan RKPD 2024	Arah Kebijakan RPD untuk Tahun 2024
		<ul style="list-style-type: none"> <li>k. Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan</li> <li>l. Peningkatan produksi dan produktivitas ternak</li> <li>m. Penguatan kelembagaan peternakan</li> <li>n. Peningkatan produksi perikanan</li> <li>o. Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perikanan</li> <li>p. Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura</li> <li>q. Penguatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan petani tanaman pangan dan hortikultura melalui pemanfaatan teknologi dalam usaha pertanian</li> <li>r. Peningkatan iklim usaha dan investasi</li> <li>s. Peningkatan Kualitas pelaksanaan investasi berbasis <i>Online Single System</i> (OSS)</li> </ul>
4.	Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Pelayanan Jalan Provinsi</li> <li>b. Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan provinsi</li> <li>c. Pembangunan Jalan pada kawasan pertumbuhan ekonomi</li> <li>d. Peningkatan pelayanan terminal tipe B</li> <li>e. Pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi untuk meningkatkan ketersediaan air</li> <li>f. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengendali banjir</li> <li>g. Peningkatan pemenuhan akses air minum dan sanitasi</li> <li>h. Peningkatan kualitas dan cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)</li> <li>i. Perluasan jaringan layanan moda menuju simpul utama dan kawasan perbatasan, terluar, dan terpencil</li> <li>j. Penguatan distribusi barang khususnya komoditi barang ekspor-impor pada pelabuhan</li> <li>k. Peningkatan ketersediaan daya dan jaringan energi listrik</li> <li>l. Sinkronisasi dokumen perencanaan tata ruang</li> <li>m. Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah</li> <li>n. Pengimplementasian kebijakan satu peta</li> </ul>
5.	Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar</li> <li>b. Peningkatan keberfungsian sosial PPKS</li> <li>c. Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan</li> </ul>

No	Prioritas Pembangunan RKPD 2024	Arah Kebijakan RPD untuk Tahun 2024
		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Peningkatan kualitas SDM dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial</li> <li>e. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi</li> <li>f. Peningkatan Daya Saing UMKM</li> <li>g. Pemberdayaan perempuan kepala keluarga untuk kemandirian berusaha</li> <li>h. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</li> <li>i. Fasilitasi Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kemandirian desa</li> <li>j. Peningkatan penataan permukiman kumuh dan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak</li> </ul>
6.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan</li> <li>b. Pengendalian pencemaran air</li> <li>c. Pengendalian pencemaran dan kerusakan pesisir dan laut</li> <li>d. Pengendalian pencemaran udara</li> <li>e. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lahan dan hutan</li> <li>f. Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan</li> <li>g. Pemeliharaan dan Perlindungan Wilayah-Wilayah Penyedia Jasa LH</li> <li>h. Penurunan Deforestasi dan Degradasi Hutan</li> <li>i. Pengelolaan Hutan Lestari Berkelanjutan</li> <li>j. Peningkatan Peranan Konservasi Hutan</li> <li>k. Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI)</li> <li>l. Rehabilitasi Kawasan Hutan (Regenerasi/tanpa penebangan)</li> <li>m. Rehabilitasi Hutan Produksi dan Lahan (Dengan Rotasi)</li> <li>n. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan</li> <li>o. Peningkatan pengelolaan DAS</li> <li>p. Peningkatan pemanfaatan biomassa perkebunan</li> <li>q. Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di usaha perkebunan</li> <li>r. Pemanfaatan limbah industri pertanian dan kehutanan sebagai sumber energi secara terintegrasi dengan industrinya</li> <li>s. Pengembangan dan pemanfaatan biodiesel sebagai upaya untuk mengurangi emisi GRK dan meningkatkan ekonomi masyarakat.</li> <li>t. Pengembangan energi surya mencakup pemanfaatan PLTS di perdesaan dan perkotaan</li> <li>u. Pengembangan infrastruktur EBT</li> <li>v. Peningkatan kerja sama dalam pengelolaan EBT</li> <li>w. Peningkatan edukasi kepada para pihak terutama masyarakat untuk penerapan EBT</li> </ul>

No	Prioritas Pembangunan RKPD 2024	Arah Kebijakan RPD untuk Tahun 2024
7.	Peningkatan tata Kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang didukung dengan IT</li> <li>b. Perubahan <i>Mindset</i> dan Budaya Kinerja di Lingkungan Organisasi</li> <li>c. Deregulasi Kebijakan</li> <li>d. Penyederhanaan Organisasi</li> <li>e. Perbaikan Tata Laksana</li> <li>f. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur</li> <li>g. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan</li> <li>h. Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran</li> <li>i. Implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah</li> <li>j. Peningkatan kinerja perangkat daerah dan aparatur</li> <li>k. Penguatan Pengawasan</li> </ul>
8.	Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Optimalisasi kerja sama daerah yang sinergi dengan pembangunan IKN</li> </ul>

Tabel IV.7  
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan berdasarkan Urusan	Prioritas Pembangunan RKPD 2024
1.	Peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum optimalnya pemenuhan pelayanan dasar pada SPM di bidang Pendidikan Menengah dan Khusus serta kebudayaan</li> <li>b. Masih rendahnya kesempatan kerja dan penempatan kerja bagi para pencari kerja</li> <li>c. Belum optimalnya kualitas hubungan industrial</li> <li>d. Belum optimalnya penerapan norma ketenagakerjaan dan norma K3 di tempat kerja</li> <li>e. Belum optimalnya pengembangan di kawasan transmigrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) PP-1: Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja</li> <li>2) PP-8: Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama</li> </ul>

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan berdasarkan Urusan	Prioritas Pembangunan RKPD 2024
		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Belum optimalnya kesetaraan gender</li> <li>g. Belum maksimalnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan di Kab/Kota</li> <li>h. Masih rendahnya peran pemuda dalam pembangunan dan prestasi olahraga</li> <li>i. Masih rendahnya pelayanan perpustakaan</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Status gizi dan kesehatan ibu dan anak belum optimal</li> <li>b. Akses dan mutu pelayanan kesehatan yang belum memenuhi standar</li> <li>c. Masih tingginya beban penyakit menular dan penyakit tidak menular</li> <li>d. Belum meratanya distribusi tenaga kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) PP-2: Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya</li> <li>2) PP-8: Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum maksimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</li> <li>b. Tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak</li> <li>c. Belum optimalnya KIE pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga</li> </ul>	<p>PP-5: Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem</p>
2.	Percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rendahnya kontribusi koperasi dan UKM terhadap perekonomian daerah</li> <li>b. Belum optimalnya realisasi nilai investasi pada sektor sekunder dan tersier</li> <li>c. Lambatnya transformasi ekonomi menuju</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) PP-3: Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan</li> <li>2) PP-8: Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan</li> </ul>

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan berdasarkan Urusan	Prioritas Pembangunan RKPD 2024
		<p>pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan</p> <p>d. Masih rendahnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah</p> <p>e. Belum optimal pemenuhan pangan dalam mendukung IKN</p> <p>f. Belum terwujudnya diversifikasi ekonomi sub sektor kehutanan</p> <p>g. Belum optimalnya ekspor non migas dan batubara</p> <p>h. Belum optimalnya pembangunan industri berbasis komoditi unggulan</p> <p>i. Belum optimalnya pendapatan asli daerah</p>	<p>mengoptimalkan kerja sama</p>
3.	<p>Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur</p>	<p>a. Belum optimalnya pemerataan dan pengembangan pelayanan infrastruktur dasar</p> <p>b. Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman</p> <p>c. Belum optimalnya pemerataan dan pengembangan pelayanan infrastruktur perhubungan</p> <p>d. Belum meratanya infrastruktur ketenagalistrikan</p> <p>e. Belum optimalnya peningkatan pembangkit listrik dengan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)</p>	<p>1) PP-4: Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar</p> <p>2) PP-8: Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama</p>
4.	<p>Peningkatan kualitas lingkungan hidup</p>	<p>a. Rendahnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dan tingginya tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan (GALKARHUTLA)</p>	<p>PP-6: Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan</p>

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan berdasarkan Urusan	Prioritas Pembangunan RKPD 2024
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Terjadinya penurunan kualitas air, air laut, udara dan lahan</li> <li>c. Belum tersedianya hasil evaluasi zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi</li> <li>d. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan</li> <li>e. Belum terwujudnya penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan</li> </ul>	
5.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belum optimalnya pelayanan trantibumlinmas</li> <li>b. Belum optimalnya pengelolaan desa secara menyeluruh</li> <li>c. Transformasi digital pemerintahan dan pelayanan publik belum optimal</li> <li>d. Tata kelola keamanan informasi yang belum optimal</li> <li>e. Belum optimalnya layanan informasi publik</li> <li>f. Penyediaan data statistik sektoral dilingkungan pemda yang belum berkualitas</li> <li>g. Belum optimalnya fungsi koordinasi, integrasi, sinkronisasi simplikasi dalam perumusan pelaksanaan kebijakan daerah dan penyelenggaraan pemerintah</li> <li>h. Belum optimalnya pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi</li> </ul>	PP-7: Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik

No	Isu Strategis	Permasalahan Pembangunan berdasarkan Urusan	Prioritas Pembangunan RKPD 2024
		i. Belum optimalnya capaian sasaran pembangunan daerah j. Belum optimalnya Laporan Akuntabilitas Keuangan Daerah yang mencapai WTP k. Implementasi penyelenggaraan Sistem Merit yang belum berjalan secara optimal l. Masih rendahnya profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia/ aparaturnya m. Hasil kelitbang belum optimal dimanfaatkan oleh perangkat daerah maupun masyarakat n. Belum berkembangnya inovasi daerah o. Belum optimalnya pengawasan internal pemerintah daerah	

Untuk mendukung prioritas pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, maka disusun strategi dan arah kebijakan tahunan yang mengacu pada RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 yang dapat dilihat pada tabel IV.8.

Tabel IV.8  
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan RKPD  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1: Mewujudkan SDM Berdaya Saing		
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat	Peningkatan akses dan mutu pendidikan	1 Peningkatan perluasan akses jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus
		2 Peningkatan mutu satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus
		3 Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai terutama pada daerah tertinggal dan perbatasan

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>4 Optimalisasi <i>Boarding School</i></p> <p>5 Pemberian bantuan biaya pendidikan kepada siswa di semua jenjang pendidikan terutama kepada siswa yang kurang mampu</p> <p>6 Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan</p> <p>7 Peningkatan literasi dan numerasi</p> <p>8 Peningkatan kualitas layanan pendidikan vokasi/kejuruan selaras kebutuhan pasar</p>
<p>Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</p>	<p>Peningkatan akses dan mutu kesehatan</p>	<p>1 Percepatan perbaikan gizi masyarakat</p> <p>2 Peningkatan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi</p> <p>3 Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat</p> <p>4 Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan</p> <p>5 Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen fasyankes maupun fasilitasnya</p> <p>6 Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat</p> <p>7 Penguatan Sistem Kesehatan dan pembiayaan kesehatan</p> <p>8 Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan</p>
<p>Sasaran 3: Menurunnya tingkat pengangguran</p>	<p>Peningkatan mutu dan daya saing tenaga kerja</p>	<p>1 Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja</p> <p>2 Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri</p> <p>3 Penyelenggaraan pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja</p>
	<p>Perluasan kesempatan kerja</p>	<p>1 Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja</p>
<p>Sasaran 4: Meningkatnya daya saing perempuan</p>	<p>Penerapan kesetaraan gender dalam pembangunan</p>	<p>1 Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan mengenai kesetaraan gender dan peran perempuan dalam pembangunan</p> <p>2 Penguatan dan pengembangan kelompok masyarakat serta lembaga</p>

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
			pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dan politik
		3	Peningkatan profesionalisme pekerja perempuan
<b>Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas</b>			
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi	Pengembangan ekspor komoditas non migas dan batubara	1	Peningkatan Daya Saing UKM
		2	Peningkatan Pemasaran Produk UKM
		3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kawasan Industri
		4	Pengembangan Hilirisasi Komoditi Hulu Agro, Aneka dan Pangan
		5	Peningkatan Kapasitas SDM yang Berdaya Saing
		6	Pengembangan Destinasi Pariwisata Prov. Kaltim
		7	Peningkatan Pemasaran Pariwisata Daerah
		8	Peningkatan Amenitas, Aksesibilitas dan Atraksi Pariwisata Daerah
Peningkatan daya saing investasi di sektor non migas dan batubara		1	Peningkatan Kualitas pelaksanaan investasi berbasis <i>Online Single System</i> (OSS)
		2	Peningkatan Strategi Promosi dan kegiatan Promosi di Kawasan industri
		3	Penyediaan fasilitas/insentif daerah pada investor di Kawasan industri
Meningkatkan ketersediaan pangan melalui pemantauan pasokan pangan dan cadangan Pangan		1	Menjamin ketersediaan pangan melalui analisis dan informasi pasokan pangan yang akurat dan <i>update</i>
		2	Meningkatkan sumber pangan dan gizi yang berkualitas melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan lahan sekitar tempat tinggal
Penanganan Daerah Rawan Pangan		1	Pemetaan Rawan Pangan melalui sistem kewaspadaan pangan dan gizi
		2	Penyaluran bantuan pangan pada daerah rawan pangan / terdampak bencana
Peningkatan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal		1	Meningkatkan panganekaragaman konsumsi pangan yang beragam , bergizi, seimbang, aman (B2SA) berbasis pangan lokal

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Perkebunan	1 Revitalisasi lahan perkebunan yang tidak produktif
		2 Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan
		3 Memperbanyak penggunaan benih perkebunan unggul bersertifikat
		4 Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Produk Perkebunan
	Peningkatan produksi dan produktivitas ternak	1 Optimalisasi reproduksi ternak
		2 Meningkatkan produksi dan produktivitas pakan ternak
		3 Meningkatkan kesehatan hewan dan pengawasan lalu lintas hewan ternak
		4 Pengembangan dan Penguatan kelembagaan peternakan
	Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan	1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan
		2 Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perikanan
	Peningkatan produksi dan produktivitas serta nilai tambah komoditas sub sektor tanaman pangan dan hortikultura	1 Revitalisasi lahan pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
		2 Memperbanyak penggunaan benih TPH unggul bersertifikat
		3 Penguatan kapasitas kelembagaan dan keterampilan petani tanaman pangan dan hortikultura melalui pemanfaatan teknologi dalam usaha pertanian
	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas sub sektor kehutanan	1 Peningkatan produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu
Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan ekonomi masyarakat miskin	Peningkatan Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan	1 Peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam pemenuhan kebutuhan dasar
		2 Peningkatan keberfungsian sosial PMKS
		3 Peningkatan kemandirian sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan
		4 Peningkatan kualitas SDM dan lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial
		5 Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Menengah (UMKM) dan koperasi
		6 Fasilitasi Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kemandirian desa
		7 Perbaiki rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin/rentan miskin
	Peningkatan lapangan usaha produktif bagi masyarakat miskin	1 Pemberian bantuan sarana pertanian dan perikanan bagi masyarakat miskin terutama di daerah tertinggal dan perbatasan
		2 Pelatihan dan penyuluhan pertanian dan perikanan bagi masyarakat miskin
		3 Pemberian Akses Legal Pengelolaan Hutan kepada Masyarakat di dalam dan sekitar Kawasan Hutan
		4 Pelatihan dan stimulus permodalan untuk gabungan kelompok usaha mikro/keompok usaha bersama (KUBE)
		5 Subsidi ongkos angkut pemasaran produk untuk daerah tertinggal dan perbatasan
		1 Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting
		2 Pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar	Optimalisasi penyelenggaraan jalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1 Peningkatan dan pemeliharaan pelayanan jalan provinsi
		2 Pembangunan ruas jalan baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi
	Peningkatan infrastruktur sumber daya air	1 Pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi untuk meningkatkan pendayagunaan air
		2 Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air
	Optimalisasi penyelenggaraan penataan ruang	1 Sinkronisasi dokumen perencanaan tata ruang
		2 Optimalisasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah
	3 Pengimplementasian kebijakan satu peta	

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
	Pemenuhan kebutuhan infrastruktur air minum	1	Pembangunan sistem penyediaan air minum skala regional
	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh	1	Revitalisasi, penanganan, dan penyediaan infrastruktur di permukiman kumuh kewenangan provinsi
	Peningkatan layanan infrastruktur perhubungan	1	Peningkatan pelayanan terminal tipe B
		2	Penyediaan perlengkapan keselamatan jalan
Peningkatan pemerataan ketersediaan listrik 24 jam	1	Peningkatan ketersediaan jaringan tegangan rendah dan distribusi listrik	
<b>Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup</b>			
Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan	Menjaga kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	1	Menjaga kualitas lingkungan melalui pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan
		2	Menjaga kualitas lingkungan melalui penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan
		3	Menjaga kualitas lingkungan melalui pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan
Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan	Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan	1	Peningkatan pengelolaan pemanfaatan hutan secara berkelanjutan
	Optimalisasi perlindungan hutan dan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting (KBEP) dan konservasi provinsi	1	Meningkatkan upaya pengelolaan TAHURA provinsi
		2	Meningkatkan upaya perlindungan tumbuhan dan satwa liar
		3	Optimalisasi pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan dengan melibatkan masyarakat
	Optimalisasi penyelenggaraan Rehabilitasi hutan dan lahan serta belum optimalnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS	1	Optimalisasi Pengelolaan DAS terpadu multipihak
		2	Optimalisasi penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan
Optimalisasi penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat hutan	1	Pemberian akses legal pengelolaan hutan kepada masyarakat di dalam dan sekitar hutan serta peningkatan kapasitas kelompok usaha masyarakat berbasis perhutanan sosial	

Tujuan dan Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Peningkatan cakupan desa yang memanfaatkan energi baru terbarukan	1	Percepatan pembangunan pembangkit listrik pada Desa belum berlistrik PLN dengan menggunakan energi baru terbarukan
	Peningkatan ketersediaan daya listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan	1	Peningkatan penyediaan sarana pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan
<b>Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi</b>			
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK	Peningkatan pemenuhan dan penerapan standar pelayanan publik	1	Penyusunan standar pelayanan publik sesuai dengan ketentuan
		2	Pelaksanaan layanan publik sesuai standar, operasional dan prosedur
		3	Perbaiki budaya kerja di lingkungan pemerintahan
	Optimalisasi pengelolaan administrasi pemerintah dan layanan publik berbasis teknologi informasi	1	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi
		2	Peningkatan pengelolaan <i>e-Government</i>
		3	Implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah
	Optimalisasi penerapan sistem Merit	1	Pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan jabatan
		2	Peningkatan kualitas penilaian dan evaluasi kinerja ASN
	Pengembangan kompetensi ASN	1	Peningkatan pelatihan ASN berbasis kompetensi
		2	Peningkatan sertifikasi kompetensi ASN
	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1	Peningkatan kualitas perencanaan anggaran berbasis kinerja
		2	Peningkatan kualitas perencanaan dan penjenjangan kinerja
		3	Peningkatan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja
	Optimalisasi pelaksanaan pengendalian intern pemerintah	1	Peningkatan kapabilitas APIP
		2	Peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
3		Peningkatan pembangunan zona integritas	

Prioritas pembangunan daerah dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, indikator kinerja tujuan dan sasaran, program prioritas, indikator kinerja untuk masing-masing program prioritas, target kinerja program serta pagu anggaran program prioritas dapat ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel IV.9  
Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Sasaran dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
Tujuan 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing						
Sasaran 1: Meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-Rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus	67,69%	2.270.669.787.645	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PP-1
		Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	88,48%			
		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK	100%			
		Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	94,87%			
		Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	87,49%			
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus	100%			
		Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	79%			
		Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	94%			
		Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	60,34%			
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana	100%	17.576.846.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	PP-1
Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kesakitan	10,8 rasio	176.814.368.000	Dinas Kesehatan	PP-2

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
4	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase lulusan pelatihan kerja yang dimagangkan dan bekerja	65%	3.443.647.800	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PP-1
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
5	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	57,64%	21.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-1
Sasaran 4: Meningkatnya daya saing perempuan						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
6	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER & PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	400 Orang	4.906.959.000	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PP-1
Tujuan 2: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas						
Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
7	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	1%	55.635.043.182	Dinas Kehutanan	PP-3
		Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47%			
		Produksi hasil hutan kayu	4420000 m3/tahun			
		Produksi hasil hutan bukan kayu	850 ton			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
8	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UKM potensial ekspor	20 UKM	1.347.190.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UKM yang masuk pasar digital	5%	6.998.165.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	PP-3
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>						
10	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru	67 jenis	1.570.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	PP-3
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>						
11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan industri pengolahan non migas dan non batubara	5,20%	9.520.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	PP-3
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>						
12	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)	30,00%	10.673.000.000	Dinas Pariwisata	PP-3
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>						
13	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti	100%	2.750.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PP-3
		Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu	100%			
14	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara	11 Minat	2.600.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PP-3
15	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan	2 Dokumen IPRO	2.700.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PP-3
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>						
16	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Luas kebun yang dibangun (Ha)	50702 Ha	600.000.000	Dinas Perkebunan	PP-3

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
17	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan sarana perkebunan	25,36%	20.852.056.400	Dinas Perkebunan	PP-3
18	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya	11,15%	5.026.179.200	Dinas Perkebunan	PP-3
		Persentase kelembagaan petani yang kapasitasnya meningkat	26,50%			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
19	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan	97.6 Skor	3.909.764.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-3
		Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi	86.3 Skor			
20	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rawan pangan	0%	4.200.000.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-3
		Jumlah kecamatan yang meningkat status ketahanan pangannya	1 Kecamatan			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
21	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana pertanian tanaman pangan	41,39%	3.800.000.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-3
		Tingkat pemenuhan prasarana pertanian hortikultura	34%			
22	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan sarana pertanian tanaman pangan	35,50%	24.519.950.500	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-3
		Tingkat pemenuhan sarana pertanian hortikultura	39,29%			
23	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase sumber daya manusia pertanian yang meningkat kapasitasnya	77%	2.849.500.000	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	PP-3

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>						
24	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Tingkat pemenuhan prasarana peternakan	99,54 Skor	1.300.734.098	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP-3
25	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis	96,21 Skor	37.304.182.274	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP-3
		Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan	87,53 Skor			
26	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ	91,79 Skor	10.089.966.422	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP-3
		Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner	95,11 Skor			
		Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	98,68 Skor	1.780.474.210		
27	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan	99,74 Skor	4.023.794.539	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PP-3
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>						
28	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	190000 Ton	30.167.174.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	PP-3
29	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	200000 Ton	10.937.395.361	Dinas Kelautan dan Perikanan	PP-3
30	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produk olahan hasil perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan	7 Produk Olahan	4.164.364.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	PP-3

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
Sasaran 6: Meningkatnya keberdayaan masyarakat miskin						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
31	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	12936 Orang	21.777.911.886	Dinas Sosial	PP-5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
32	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal	25,00%	8.104.662.300	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	PP-5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
33	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	108,10 Ha	178.238.293.600	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-5
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
34	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Disparitas harga barang pokok dan barang penting	16%	1.245.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	PP-5
		Persentase kinerja realisasi pupuk	85%			
Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar						
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
35	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	Persentase layanan lalu lintas jalan provinsi dan AKDP	82%	14.192.000.000	Dinas Perhubungan	PP-4
		Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan	0,006 Angka			
		Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi	175 Kejadian			

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>						
36	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Rasio kemandapan jalan provinsi	82,09%	1.169.877.261.683	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4
		Penambahan Ruas Jalan Baru	1 ruas			
37	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)	9460 Ha	317.066.477.680	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4
		Pengurangan luas genangan banjir perkotaan	70 Ha			
		Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih	94 Lt/detik			
		Panjang pantai kritis yang ditangani	2,8 Km			
38	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase panjang drainase yang berfungsi baik	11,15%	43.650.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4
39	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota	57,65%	165.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4
40	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat	57,64%	21.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4
40	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Skoring penyelenggaraan penataan ruang	83,20 Skor	13.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>						
41	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi	108,10 Ha	178.238.293.600	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	PP-4
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>						
42	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase kelurahan/desa yang teraliri listrik 24 jam	92,97%	45.162.580.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PP-4
		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	100,00%			
		Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	250 kWp			
		Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN	34,10%			
<b>Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup</b>						
<b>Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan</b>						
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>						
43	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Pencemaran	≤5 (Tercemar Ringan) Indeks	9.202.247.305	Dinas Lingkungan Hidup	PP-6
		Indeks Standar Pencemar Udara	48 (baik) Indeks			
<b>Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan</b>						
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>						
44	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	Persentase Luas kerusakan kawasan hutan	1%	55.635.043.182	Dinas Kehutanan	PP-6
		Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	0,47%			

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
		Produksi hasil hutan kayu	4420000 m3/tahun			
		Produksi hasil hutan bukan kayu	850 ton			
45	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Luas kawasan bernilai ekosistem penting dan konservasi provinsi yang dikelola	610540.98 Hektar	5.826.687.000	Dinas Kehutanan	PP-6
46	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola	10.104 Ha	3.728.275.000	Dinas Kehutanan	PP-6
47	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat	20.000 Ha	35.924.564.841	Dinas Kehutanan	PP-6
		Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Kelompok			
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>						
48	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)	100%	6.915.440.100	Dinas Perkebunan	PP-6
<b>Sasaran 10: Meningkatkan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan</b>						
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>						
49	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Persentase desa yang dibangun PLTS pada desa belum berlistrik PLN	34,10%	45.162.580.000	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	PP-6
		Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT	250,00 kWp			
		Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani	100%			
		Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam	92,97%			
50	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi	243.246, 516 Ton	49.004.873.000		PP-6

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
			CO2e/Tahun			
		Persentase Instansi Pemerintah Daerah Yang Menerapkan Kebijakan Bauran Energi	43,76%		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
		Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Bauran Energi	33,56%			
Tujuan 4: Mewujudkan Reformasi Birokrasi						
Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK						
KEPEGAWAIAN						
51	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks NSPK Manajemen ASN	90 indeks	25.023.390.800	Badan Kepegawaian Daerah	PP-7
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
52	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	86 Persen	26.500.000.000	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PP-7
SEKRETARIAT DAERAH						
53	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan)	1 PD	5.400.000.000	Biro Organisasi	PP-7
		Indeks Kelembagaan	72 Indeks			
		Indeks Kematangan Organisasi	44 Indeks			
		Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya >80 (B)	86%			
		Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK)	40%			

No	Program Prioritas	Indikator	2024		PD Pengampu Utama	Dukungan Terhadap Prioritas Pembangunan Daerah
			Target	Rp		
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						
54	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik	80%	23.600.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	PP-7
<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>						
55	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase penyelenggaraan pengawasan internal pemda provinsi dan kab/kota	100%	16.870.000.000	Inspektorat	PP-7

Dalam upaya penyelesaian permasalahan maupun isu strategis pembangunan daerah, pelaksanaan program pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Timur tidak hanya melibatkan Perangkat Daerah namun juga dari *stakeholders* lainnya diluar Perangkat Daerah yakni dengan melakukan kerja sama dengan Badan Usaha atau swasta. Dalam mensinergikan program pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan perusahaan-perusahaan yang berada dalam wilayah Kalimantan Timur telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut dijelaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan dibidang usaha dan/atau jasa wajib melaksanakan TJSL dan PKBL. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2021 terdapat 2 (dua) program prioritas yaitu Program Rumah Layak Huni dan Program Pangan untuk Penghijauan dimana Program tersebut sudah dibentuk Badan Pengelolanya masing-masing yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan arahan pelaksanaan program prioritas tahunan kepada masyarakat.
2. Melakukan validasi dan menyepakati rencana program dan kegiatan yang diusulkan Perusahaan, serta menyinergikan dengan program pembangunan daerah.
3. Melakukan identifikasi lokasi dan calon penerima bantuan
4. Mengusulkan rencana program dan kegiatan.
5. Melakukan penilaian terhadap perusahaan pelaksana.
6. Mengusulkan pemberian penghargaan pelaksana program prioritas terbaik oleh Gubernur
7. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan kepada Perusahaan.
8. Membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan terkait program Rumah Layak Huni dan Program Pangan untuk Penghijauan.

Selanjutnya, pelaksanaan program pembangunan melalui program-program prioritas Kalimantan Timur tahun 2024 juga dilaksanakan untuk

mendukung pencapaian sasaran pada Prioritas Nasional, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendukung Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut:
  - a. Program Pengelolaan Hutan
  - b. Program Pengembangan UMKM
  - c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah dan Usaha Mikro
  - d. Program Pengembangan Ekspor
  - e. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
  - f. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program
  - g. Pelayanan Penanaman Modal
  - h. Program Promosi Penanaman Modal
  - i. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  - j. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
  - k. Program Penyuluhan Pertanian
  - l. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
  - m. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
  - n. Program Penyuluhan Pertanian
  - o. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - p. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
  - q. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
  - r. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
2. Untuk mendukung Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, maka program prioritas daerah yang dilakukan melalui Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
3. Untuk mendukung Prioritas Nasional 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
  - a. Program Pengelolaan Pendidikan
  - b. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
  - c. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
  - d. Program Penempatan Tenaga Kerja

- e. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
  - f. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
4. Untuk mendukung Prioritas Nasional 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
5. Untuk mendukung Prioritas Nasional 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
  - b. Program Penyelenggaraan Jalan
  - c. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
  - d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
  - e. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
  - f. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
  - g. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum (PSU)
  - h. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
6. Untuk mendukung Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
- a. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  - b. Program Pengelolaan Hutan
  - c. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
  - d. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)
  - e. Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
  - f. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
  - g. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
  - h. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
7. Untuk mendukung Prioritas Nasional 7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik, maka program prioritas daerah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Program Kepegawaian
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
- c. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
- d. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- e. Program Penataan Organisasi
- f. Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- g. Program Penyelenggaraan Pengawasan

#### 4.2.4 Sinkronisasi dan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2024

Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 telah selaras dengan kebijakan Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD Tahun 2024-2026), mendukung Prioritas Pembangunan Nasional seperti yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan kebijakan pembangunan nasional disajikan dalam tabel-tabel berikut.

Tabel IV.10  
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2024 dengan  
Prioritas Nasional RKP Tahun 2024

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2024
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan</li> <li>b. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar</li> </ol>
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar</li> <li>b. Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama</li> </ol>
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja</li> </ol>

No	Prioritas Nasional RKP Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2024
		b. Peningkatan derajat Kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya c. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik

Tabel IV.11

Persandingan antara Sasaran Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2024 dengan Sasaran Prioritas Nasional RKP Tahun 2024

Sasaran PN RKP 2024		Sasaran RKPD 2024
PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan		
1.	Terwujudnya transisi energi dan peningkatan kualitas sumber daya ekonomi sebagai pendukung pembangunan yang berkelanjutan	Sasaran 10: Meningkatnya Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan
2.	Terwujudnya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui upaya revitalisasi industri dan penguatan daya saing usaha, dan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi
PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan		

Sasaran PN RKP 2024		Sasaran RKPD 2024
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI)	Sasaran 5: Terwujudnya Diversifikasi Ekonomi Sasaran 6: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin
2.	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	-
PN 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing		
1.	Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK
2.	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Sasaran 6: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin
3.	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	Sasaran 1: Meningkatnya Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat Sasaran 2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
4.	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	Sasaran 4: Meningkatnya Daya Saing Perempuan
5.	Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	Sasaran 6: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin
6.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	Sasaran 3: Menurunnya Tingkat Pengangguran
PN 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		
1.	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	Sasaran 1: Meningkatnya Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat
2.	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	Sasaran 1: Meningkatnya Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat
3.	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	Sasaran 6: Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Miskin
4.	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK
5.	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	Sasaran 4: Meningkatnya Daya Saing Perempuan
6.	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	Sasaran 1: Meningkatnya Pemerataan Taraf Pendidikan Masyarakat
PN 5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		

Sasaran PN RKP 2024		Sasaran RKPD 2024
1.	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Sasaran 7: Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar
2.	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	Sasaran 7: Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar
3.	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	Sasaran 7: Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar
4.	Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	Sasaran 7: Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar
		Sasaran 10: Meningkatkan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan
5.	Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	Sasaran 7: Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur untuk Mendukung Perekonomian dan Pemenuhan Infrastruktur Dasar
PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim		
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan
2.	Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim	Sasaran 8: Terjaganya Kualitas Air, Air Laut, Udara dan Lahan
3.	Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline	Sasaran 9: Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Kehutanan dan Penggunaan Lahan
PN 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		
1.	Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara secara Optimal	Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK
2.	Optimalnya Kebijakan Luar Negeri	Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK
3.	Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap	Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK

Sasaran PN RKP 2024		Sasaran RKPD 2024
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK
5.	Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	Sasaran 11: Terwujudnya Birokrasi yang Profesional, Akuntabel, serta Berorientasi Pelayanan Publik yang Didukung ASN BerAKHLAK

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs). Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mempersiapkan program-program pembangunan daerah Tahun 2024 agar target-target pada indikator TPB/SDGs baik nasional maupun daerah dapat tercapai secara optimal. Berikut program-program pembangunan yang mendukung kebijakan pengarusutamaan TPB/SDGs:

Tabel IV.12  
Persandingan Program Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2024 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pengarusutamaan ( <i>Mainstreaming</i> )	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)	
<p>Goal 1 Tanpa Kemiskinan</p> <p>Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.</p> <p>Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan</p> <p>Target 1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro</p> <p>Target 1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi</li> <li>• Program Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti</li> <li>• Program Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti</li> <li>• Program Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti</li> <li>• Program Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti</li> <li>• Program Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi</li> </ul>

Pengarusutamaan ( <i>Mainstreaming</i> )	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
<p>kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi</li> <li>• Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi</li> <li>• Program Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</li> <li>• Program Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</li> <li>• Program Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</li> <li>• Program Penanggulangan Bencana Program Perencanaan Tenaga Kerja</li> <li>• Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</li> </ul>
<p>Goal 2 Tanpa Kelaparan                      Target 2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.                      Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.                      Target 2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan <i>input</i> lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan non-pertanian.                      Target 2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</li> <li>• Program Penanganan Kerawanan Pangan</li> <li>• Program Pengawasan Keamanan Pangan</li> <li>• Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> <li>• Program Penyediaan dan Pengembangan prasarana Pertanian</li> <li>• Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</li> </ul>

Pengarusutamaan ( <i>Mainstreaming</i> )	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
<p>berkelanjutan dan menerapkan praktik pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.</p> <p>Target 2.5 Pada tahun 2021, mengelola keragaman genetik benih tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pertanian</p>	
<p>Goal 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera</p> <p>Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup</p> <p>Target 3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.</p> <p>Target 3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.</p> <p>Target 3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.</p> <p>Target 3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.</p> <p>Target 3.8 Pada tahun 2030, mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</li> <li>• Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</li> <li>• Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman</li> <li>• Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</li> <li>• Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</li> <li>• Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</li> </ul>

Pengarusutamaan ( <i>Mainstreaming</i> )	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
<p>risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.</p> <p>Target 3.a Memperkuat pelaksanaan The Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.</p> <p>Target 3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.</p>	
<p>Goal 4 Pendidikan Berkualitas</p> <p>Target 4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.</p> <p>Target 4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan prasekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.</p> <p>Target 4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.</p> <p>Target 4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Pendidikan</li> <li>• Program Pengembangan Kurikulum</li> <li>• Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan</li> </ul>

Pengarusutamaan ( <i>Mainstreaming</i> )	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
<p>penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.</p> <p>Target 4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.</p>	
<p>Goal 5 Kesetaraan Gender</p> <p>Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.</p> <p>Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.</p> <p>Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.</p> <p>Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</li> <li>• Program Perlindungan Perempuan</li> <li>• Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</li> <li>• Program Perlindungan Khusus Anak</li> </ul>
<p>Goal 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak</p> <p>Target 6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua</p> <p>Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan</p> <p>Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.</p> <p>Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</li> <li>• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>• Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah</li> <li>• Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional</li> </ul>

Pengarusutamaan ( <i>Mainstreaming</i> )	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
<p>mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita</p>	
<p>Goal 7 Energi Bersih dan Terjangkau                      Target 7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.                      Target 7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.                      Target 7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Energi Terbarukan (EBT)</li> <li>• Program Pengelolaan Ketenagalistrikan</li> </ul>
<p>Goal 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi                      Target 8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.                      Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.                      Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan                      Target 8.6 Pada tahun 2021, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.                      Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.                      Target 8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penempatan Tenaga Kerja</li> <li>• Program Hubungan Industrial</li> <li>• Program Pengawasan Ketenagakerjaan</li> <li>• Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</li> <li>• Program Promosi Penanaman Modal</li> <li>• Program Pelayanan Penanaman Modal</li> <li>• Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</li> <li>• Program Pemasaran Pariwisata</li> <li>• Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)</li> </ul>
<p>Goal 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur                      Target 9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penyelenggaraan Jalan</li> <li>• Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</li> <li>• Program Pengelolaan Pelayaran</li> </ul>

Pengarusutamaan ( <i>Mainstreaming</i> )	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
<p>kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.</p> <p>Target 9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.</p> <p>Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.</p> <p>Target 9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2021.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Perkeretaapian</li> <li>• Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</li> <li>• Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</li> <li>• Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</li> </ul>
<p>Goal 10 Berkurangnya Kesenjangan</p> <p>Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.</p> <p>Target 10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</li> <li>• Program Penataan Desa</li> <li>• Program Peningkatan Kerja sama Desa</li> <li>• Program Administrasi Pemerintahan Desa</li> <li>• Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</li> </ul>
<p>Goal 11 Kota dan Pemukiman Berkelanjutan</p> <p>Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.</p> <p>Target 11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.</p> <p>Target 11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan</p> <p>Target 11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</li> <li>• Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</li> <li>• Program Pengembangan Perumahan</li> <li>• Program Kawasan Pemukiman</li> <li>• Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)</li> <li>• Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi</li> <li>• Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</li> </ul>

Pengarusutamaan ( <i>Mainstreaming</i> )	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
<p>perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.</p>	
<p>Goal 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab                      Target 12.4 Pada tahun 2021 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.                      Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.                      Target 12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)</li> <li>• Program Pengelolaan Persampahan</li> </ul>
<p>Goal 13 Penanganan Perubahan Iklim                      Target 13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.                      Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penanggulangan Bencana</li> <li>• Program Penanganan Bencana</li> <li>• Program Perencanaan Lingkungan Hidup</li> <li>• Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</li> <li>• Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</li> <li>• Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)</li> <li>• Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</li> </ul>
<p>Goal 14 Ekosistem Lautan                      Target 14.2 Pada tahun 2021, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</li> <li>• Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</li> </ul>

Pengarusutamaan ( <i>Mainstreaming</i> )	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
<p>berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.</p> <p>Target 14.5 Pada tahun 2021, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.</p> <p>Target 14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (<i>small-scale artisanal fishers</i>) terhadap sumber daya laut dan pasar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> <li>• Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</li> <li>• Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> </ul>
<p>Goal 15 Ekosistem Daratan</p> <p>Target 15.1 Pada tahun 2021, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.</p> <p>Target 15.3 Pada tahun 2021, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.</p> <p>Target 15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Target 15.9 Pada tahun 2021, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.</p> <p>Target 15.a Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengelolaan Hutan</li> <li>• Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya</li> <li>• Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</li> <li>• Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)</li> </ul>
<p>Goal 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</li> </ul>

Pengarusutamaan ( <i>Mainstreaming</i> )	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
<p>Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.</p> <p>Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.</p> <p>Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.</p> <p>Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</li> <li>• Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</li> </ul>
<p>Goal 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan</p> <p>Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.</p> <p>Target 17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan pembangunan (Official Development Assistance-ODA), termasuk komitmen dari banyak negara maju untuk mencapai target 0.7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan pembangunan (ODA/GNI) bagi negara berkembang dan 0,15 sampai 0,20 persen ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari oDA/GNI untuk negara kurang berkembang.</p> <p>Target 17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.</p> <p>Target 17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai, dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.</p> <p>Target 17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yang mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.</p> <p>Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengembangan Ekspor</li> <li>• Program Perekonomian dan Pembangunan</li> <li>• Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</li> </ul>

Pengarusutamaan ( <i>Mainstreaming</i> )	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
<p>triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitas teknologi global.</p> <p>Target 17.7 Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yang menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi yang disetujui bersama.</p> <p>Target 17.8 Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>Target 17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan Triangular.</p> <p>Target 17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda</p> <p>Target 17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.</p> <p>Target 17.12 Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan World Trade Organization termasuk dengan menjamin bahwa penetapan aturan keaslian (rules of origin) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut</p>	

Pengarusutamaan ( <i>Mainstreaming</i> )	Program Prioritas/Program Pembangunan Daerah Tahun 2024
<p>transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar.</p> <p>Target 17.13 Meningkatkan stabilitas makroekonomi global, termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.</p> <p>Target 17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Target 17.15 menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan</p> <p>Target 17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.</p> <p>Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerja sama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerja sama.</p> <p>Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografi dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.</p> <p>Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.</p>	

Tabel IV.13

Tingkat Dukungan Program Pembangunan Daerah Terhadap Masing-Masing Kegiatan Prioritas pada  
Prioritas Nasional Tahun 2024

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah
PN-01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP-01 - Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	01 - Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan	3.29.5 Program Pengelolaan Energi Terbarukan
		02 - Peningkatan Pasokan Bahan Bakar Nabati	
		03 - Peningkatan Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi	
		04 - Peningkatan Pemenuhan Energi Domestik	3.29.5 Program Pengelolaan Energi Terbarukan
		05 - Pengembangan Industri Pendukung EBT	3.29.6 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
	PP-02 - Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	01 - Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (Kumulatif)	3.28.4 Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
		02 - Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	3.28.3 Program Pengelolaan Hutan
		03 - Penyediaan Air untuk Pertanian	1.3.2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
		04 - Penyediaan Air Baku untuk Kawasan Prioritas	1.3.3 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		05 - Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau	3.28.6 Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)
PP-03 - Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	01 - Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	3.27.2 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	
	02 - Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok	3.27.3 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah
		03 - Peningkatan Produktivitas, Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Perikanan dan Kepastian Pasar	3.25.3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		04 - Peningkatan Keberlanjutan Produktivitas Sumber Daya Pertanian, dan Digitalisasi Pertanian	2.9.3 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		05 - Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional	3.25.4 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			3.27.7 Program Penyuluhan Pertanian
			3.25.6 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
	PP-04 - Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan dan Kelautan	01 - Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir serta Pengelolaan Ruang Laut	3.25.2 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
		02 - Peningkatan Ekosistem Kelautan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	3.25.3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
		03 - Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standardisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan	3.25.4 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		04 - Peningkatan Fasilitasi Usaha, Pembiayaan, dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan dan Perikanan Skala Kecil serta Akses terhadap Pengelolaan Sumber Daya	3.25.5 Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan
		05 - Peningkatan SDM dan Riset Kemaritiman dan Kelautan Serta Database Kelautan dan Perikanan	3.25.6 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
			3.27.7 Program Penyuluhan Pertanian
	PP-05 - Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	01 - Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	2.17.7 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
		02 - Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Pembiayaan Bagi Wirausaha	2.17.8 Program Pengembangan Umkm
		03 - Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi	2.17.3 Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah
			2.17.5 Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
			2.17.6 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
		04 - Peningkatan Penciptaan Start-Up dan Peluang Usaha	2.17.7 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
		05 - Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial	2.17.8 Program Pengembangan Umkm
	PP-06 - Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	01 - Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	3.31.2 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		02 - Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri Terutama di Luar Jawa	
		03 - Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	3.26.2 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			3.26.3 Program Pemasaran Pariwisata
		04 - Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital	3.26.4 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
			3.26.5 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		05 - Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	2.18.2 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			2.18.5 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
		06 - Pengembangan Industri Halal	3.31.2 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
	3.31.3 Program Pengendalian Izin Usaha Industri		

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah
	PP-07 - Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	01 - Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa	3.30.5 Program Pengembangan Ekspor
		02 - Peningkatan Akses dan Pendalaman Pasar Ekspor	
		03 - Pengelolaan Impor	
		04 - Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif	3.30.7 Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
		05 - Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global	3.30.2 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
		06 - Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif	3.26.3 Program Pemasaran Pariwisata
		07 - Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi	
	PP-08 - Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	01 - Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan	5.2.2 Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		02 - Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0	3.31.4 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		03 - Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga	3.30.4 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
		04 - Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata	2.17.7 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
			3.26.5 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
	06 - Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	2.16.2 Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah	
			2.16.3 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
PN-02 - Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	PP-01 - Pembangunan Wilayah Sumatera	03 - Pengembangan Kawasan Perkotaan	-	
		04 - Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	-	
		05 - Kelembagaan dan Keuangan Daerah	-	
	PP-02 - Pembangunan Wilayah Jawa-Bali	03 - Pengembangan Kawasan Perkotaan	-	
		04 - Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	-	
		05 - Kelembagaan dan Keuangan Daerah	-	
	PP-03 - Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	01 - Pengembangan Kawasan Strategis	-	
		04 - Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	-	
		05 - Kelembagaan dan Keuangan Daerah	-	
	PP-04 - Pembangunan Wilayah Kalimantan	03 - Pengembangan Kawasan Perkotaan		1.3.8 Program Penataan Bangunan Gedung
				1.3.9 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
		04 - Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi		2.13.3 Program Peningkatan Kerja Sama Desa
				2.13.4 Program Administrasi Pemerintahan Desa
		05 - Kelembagaan dan Keuangan Daerah		2.13.5 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 4.1.2 Program Penataan Organisasi
	PP-05 - Pembangunan Wilayah Sulawesi	03 - Pengembangan Kawasan Perkotaan	-	
04 - Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi		-		
05 - Kelembagaan dan Keuangan Daerah		-		

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah
	PP-06 - Pembangunan Wilayah Maluku	04 - Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	-
		05 - Kelembagaan dan Keuangan Daerah	-
	PP-07 - Pembangunan Wilayah Papua	02 - Pengembangan Sektor Unggulan	-
		03 - Pengembangan Kawasan Perkotaan	-
		04 - Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	-
	05 - Kelembagaan dan Keuangan Daerah		
PN-03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	PP-01 - Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	01 - Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	2.12.2 Program Pendaftaran Penduduk
		02 - Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan	2.12.4 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
		03 - Pendampingan dan Layanan Terpadu	
		04 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	
	PP-02 - Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	01 - Sistem Jaminan Sosial Nasional	1.6.2 Program Pemberdayaan Sosial
		02 - Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran	1.6.5 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		04 - Kesejahteraan Sosial	
	PP-03 - Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	01 - Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi	1.2.2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		02 - Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	1.2.5 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
		03 - Peningkatan Pengendalian Penyakit	
		04 - Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	
		05 - Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	
	PP-04 - Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	01 - Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	1.1.2 Program Pengelolaan Pendidikan
02 - Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun		1.1.4 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah	
		03 - Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.1.3 Program Pengembangan Kurikulum	
		04 - Penjaminan Mutu Pendidikan		
		05 - Peningkatan Tata Kelola Pendidikan		
	PP-05 - Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	01 - Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	2.8.6 Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	
			2.8.7 Program Perlindungan Khusus Anak	
			2.8.2 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	
			2.19.2 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
	PP-06 - Pengentasan Kemiskinan	02 - Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	1.6.2 Program Pemberdayaan Sosial	
			03 - Reforma Agraria	1.3.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			04 - Perhutanan Sosial	3.28.5 Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
	PP-07 - Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	01 - Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri	1.1.2 Program Pengelolaan Pendidikan	
			2.7.3 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	
			1.1.2 Program Pengelolaan Pendidikan	
			2.16.3 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
			5.5.2 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	
03 - Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi	2.19.3 Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan			
	04 - Prestasi Olahraga			
PN-04 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	PP-01 - Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan	01 - Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai	1.1.2 Program Pengelolaan Pendidikan	
			1.1.3 Program Pengembangan Kurikulum	

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah
	Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti	
		03 - Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas dan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter	8.1.5 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
		04 - Penguatan Pusat-Pusat Perubahan Gerakan Revolusi Mental	8.1.5 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
		05 - Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila	8.1.2 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
		06 - Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme	8.1.2 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
PP-02 - Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Memengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	01 - Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal	2.22.2 Program Pengembangan Kebudayaan	
	02 - Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat	2.22.5 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	
	03 - Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif		
	04 - Pengembangan Diplomasi Budaya untuk Memperkuat Pengaruh Indonesia dalam Perkembangan Peradaban Dunia		
	05 - Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan		
PP-03 - Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial	01 - Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk Memantapkan Persaudaraan dan Kebersamaan di Kalangan Umat Beragama	8.1.4 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah
		02 - Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	1.5.2 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		03 - Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya	
		04 - Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	
		05 - Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan	
	PP-04 - Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	01 - Peningkatan Budaya Literasi	2.23.2 Program Pembinaan Perpustakaan
		02 - Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Aksara Daerah, serta Sastra	
		04 - Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi	
PN-05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	PP-01 - Infrastruktur Pelayanan Dasar	01 - Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau	1.4.2 Program Pengembangan Perumahan
			1.4.3 Program Kawasan Permukiman
			1.4.5 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)
		02 - Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	1.3.3 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			1.3.5 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		03 - Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	1.3.2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
		04 - Keselamatan dan Keamanan Transportasi	2.15.2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
	05 - Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	1.5.3 Program Penanggulangan Bencana	
	06 - Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi	1.3.2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	
	PP-02 - Infrastruktur Ekonomi	01 - Konektivitas Jalan	1.3.10 Program Penyelenggaraan Jalan
02 - Konektivitas Kereta Api		2.15.5 Program Pengelolaan Perkeretaapian	
03 - Konektivitas Laut		2.15.3 Program Pengelolaan Pelayaran	

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah	
		04 - Konektivitas Udara		
		05 - Konektivitas Darat	2.15.2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) 1.3.10 Program Penyelenggaraan Jalan	
	PP-03 - Infrastruktur Perkotaan	01 - Transportasi Perkotaan		1.3.10 Program Penyelenggaraan Jalan
				2.15.2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
		02 - Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan	2.16.3 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
		04 - Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan	1.4.2 Program Pengembangan Perumahan	
			1.4.3 Program Kawasan Permukiman 1.4.5 Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	
	PP-04 - Energi dan Ketenagalistrikan	01 - Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan	3.29.6 Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	
		02 - Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan		
		03 - Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik		
	PP-05 - Transformasi Digital	01 - Penuntasan Infrastruktur TIK	2.16.3 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
		02 - Pemanfaatan Infrastruktur TIK		
		03 - Fasilitas Pendukung Transformasi Digital		
	PN-06 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	PP-01 - Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	01 - Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2.11.3 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
02 - Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				
03 - Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup				
04 - Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup			2.11.10 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	

Prioritas Nasional	Program Prioritas Nasional	Kegiatan Prioritas Nasional	Program Pembangunan Daerah
	PP-02 - Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	01 - Penanggulangan Bencana	1.5.3 Program Penanggulangan Bencana
		02 - Peningkatan Ketahanan Iklim	
	PP-03 - Pembangunan Rendah Karbon	01 - Pembangunan Energi Berkelanjutan	3.29.5 Program Pengelolaan Energi Terbarukan
		02 - Pemulihan Lahan Berkelanjutan	3.28.3 Program Pengelolaan Hutan
		04 - Pengembangan Industri Hijau	3.28.3 Program Pengelolaan Hutan
	05 - Rendah Karbon Pesisir dan Laut	3.25.2 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	
PN-07 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	PP-01 - Konsolidasi Demokrasi	01 - Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	8.1.3 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		02 - Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	
		03 - Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	
	PP-02 - Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	01 - Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	
		02 - Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional	
	PP-03 - Penegakan Hukum Nasional	01 - Penataan Regulasi	
		04 - Peningkatan Akses terhadap Keadilan	
	PP-05 - Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	01 - Penguatan Keamanan Dalam Negeri	8.1.6 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
		03 - Penguatan Keamanan Laut	
		04 - Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1.5.2 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
05 - Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber			

#### 4.3 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang antara lain diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagai masukan dalam rencana pembangunan daerah tahun 2024 meliputi aspek umum, bidang infrastruktur dan kesenjangan wilayah serta Pemilu 2024.

Tabel IV.14  
Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

No.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
1.	<p>Umum</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Tersirat harapan masyarakat untuk mendapatkan program pemerintah mendorong pembangunan secara luas yang lebih merata, berkesinambungan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;</li><li>b. Pemerintah Provinsi diharapkan terus meningkatkan Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Kabupaten/Kota serta mempermudah tata cara usulan masyarakat untuk mendapatkan program dari Pemerintah Provinsi.</li></ul>
2.	<p>Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Infrastruktur dasar dan konektivitas yang ada belum sepenuhnya merata dan terintegrasi. Sebagai contoh, konektivitas wilayah tengah yang belum sepenuhnya terintegrasi menjadi penghambat dalam mendorong pengembangan ekonomi dan penyediaan layanan dasar, terutama di Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu;</li><li>b. Kondisi Jalan Samarinda ke Kutai Barat yang merupakan Jalan Negara dinilai tidak layak bila berlarut-larut tidak ditangani kita khawatir berdampak pada memicu inflasi daerah dan masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok.</li></ul>

No.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD
3.	<p>Kesenjangan Wilayah</p> <p>Kesenjangan antar wilayah di Kalimantan Timur sangat tinggi dimana distribusi ekonomi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa hampir 80 persen perekonomian dikontribusikan oleh 5 Kabupaten/Kota yaitu Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur, sedangkan Kabupaten lainnya memberikan kontribusi sangat kecil. Hal ini menjadi catatan penting agar Pemerintah Provinsi fokus mendorong pemerataan pembangunan di setiap wilayah.</p>
4.	<p>Pemilu 2024</p> <p>Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 menjadi hal penting untuk disikapi oleh Pemerintah Provinsi dan semua elemen masyarakat tetap menjaga stabilitas politik agar iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi tetap kondusif.</p>

Menindaklanjuti pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur, maka Pemerintah Provinsi melakukan pencermatan dan penelaahan dalam rangka mengakomodir pokok-pokok pikiran tersebut. Sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Oleh karena itu, DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yakni menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kalimantan Timur sebagaimana dijelaskan diatas telah ditelaah dan diinternalisasi kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 dengan memperhatikan keselarasan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 yang telah disesuaikan dengan kewenangan dan kedudukan Pemerintahan Daerah.

Terhadap pandangan DPRD yang meminta agar program pemerintah dapat mendorong pembangunan secara luas yang lebih merata, berkesinambungan, dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi telah merumuskan 8 (delapan) prioritas pembangunan yang selanjutnya diturunkan kedalam 38 strategi dan 108 arah kebijakan yang seluruhnya bertujuan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan. Selain itu, untuk mendorong perluasan dan pemerataan pembangunan, telah dirumuskan arah kebijakan pembangunan untuk masing-masing kabupaten/kota dalam rangka menyelesaikan permasalahan pembangunan di masing-masing wilayah. Upaya mendorong pembangunan ini juga dipertegas melalui akomodasi terhadap usulan Aspirasi Pokir DPRD yang telah diakomodir sebanyak 288 usulan.

Selanjutnya, terhadap pandangan DPRD berkaitan dengan upaya peningkatan Bantuan Keuangan, Pemerintah Provinsi telah merencanakan peningkatan alokasi Bantuan Keuangan dari yang sebelumnya di Tahun 2023 sebesar Rp1.197.500.000.000 menjadi Rp1.386.548.752.677 di tahun 2024. Usulan Bantuan Keuangan ini terdiri dari Bantuan Keuangan Umum kepada Kabupaten/Kota sebanyak 1282 usulan dan Bantuan Keuangan Spesifik. Sementara itu untuk pandangan DPRD terhadap kemudahan tata cara pengusulan aspirasi masyarakat kepada DPRD, telah diupayakan melalui pemanfaatan aplikasi SIPD-RI secara penuh dalam penyampaian usulan aspirasi masyarakat, dimana terdapat 2.359 usulan yang diajukan oleh masyarakat melalui aplikasi SIPD-RI dalam penyusunan RKPD Tahun 2024.

Selaras dengan perhatian DPRD Provinsi Kalimantan Timur terhadap pembangunan infrastruktur, Pemerintah Provinsi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk bidang ini. Peningkatan aksesibilitas barang dan jasa memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial suatu wilayah. Infrastruktur yang baik, terutama dari pusat produksi menuju *outlet* akan meningkatkan daya saing produk. Aksesibilitas juga memegang peranan penting untuk menjamin keterjangkauan pasokan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat, serta menekan inflasi sehingga harga barang dan jasa dapat dikendalikan. Berdasarkan hal tersebut diatas,

Pemerintah Provinsi telah merumuskan rencana pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dengan didukung ketersediaan anggaran yang mencukupi. Selanjutnya berkenaan dengan infrastruktur yang bukan kewenangan daerah, termasuk di dalamnya ruas jalan nasional menuju Kutai Barat dan Mahakam Ulu, Pemerintah Provinsi telah mengusulkannya melalui forum-forum koordinasi pembangunan di tingkat pusat dan daerah seperti Rakortekrenbang, Rakor Gubernur, dan Musrenbangnas Tahun 2023. Sedangkan untuk infrastruktur jalan yang bersifat non-status, telah dilakukan penanganan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Kesenjangan wilayah merupakan isu strategis yang juga mendapat perhatian pemerintah provinsi. Capaian penurunan kesenjangan wilayah di Kalimantan Timur dapat diukur dari penurunan Indeks Williamson yang semakin membaik dari 0,487 di Tahun 2018 menjadi 0,448 di Tahun 2021. Upaya untuk mendorong peningkatan PDRB di Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara, Berau, Kutai Barat dan Mahakam Ulu juga terus dilakukan melalui program/kegiatan yang mengarah pada dukungan terhadap pengembangan dan peningkatan produktifitas sektor-sektor ekonomi potensial. Beberapa wilayah di Kalimantan Timur telah menjadi Pusat kegiatan Nasional diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Pusat Kegiatan Wilayah. Demikian juga Pusat Kegiatan Wilayah diharapkan dapat memacu pertumbuhan di Pusat Kegiatan Lokal. Pembangunan IKN di Kalimantan Timur diharapkan juga mampu secara signifikan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah-wilayah di sekitarnya.

Kesiapan dalam penyelenggaraan Pemilu di Tahun 2024 menjadi perhatian serius dari Pemerintah Daerah. Ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu di Tahun 2024 telah dialokasikan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Berdasarkan surat edaran tersebut, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mengalokasikan ketersediaan anggaran kebutuhan penyelenggaraan Pemilu sebesar 40% di

Tahun 2023 dan 60% di Tahun 2024. Selain itu, Pemerintah Provinsi akan terus berupaya untuk menjaga stabilitas politik, diantaranya melalui peningkatan penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat secara berkesinambungan dan komprehensif, penguatan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, serta peningkatan akses dan kualitas informasi publik.

#### 4.4.1 Penyampaian Usulan Aspirasi Langsung (Masyarakat) dan Aspirasi Reses (Pokir)

Usulan *list* aspirasi langsung (kabupaten/kota dan masyarakat) dan aspirasi reses (pokok-pokok pikiran DPRD) yang disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui tautan (<https://kaltimprov.sipd.kemendagri.go.id/daerah>) adalah sebanyak 2.871 usulan yang terdiri dari aspirasi langsung (kabupaten/kota dan masyarakat) sebanyak 2.359 usulan dan aspirasi reses (pokok-pokok pikiran DPRD) sebanyak 512 usulan. Usulan tersebut disampaikan dengan mempedomani Kamus Usulan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan prioritas pembangunan daerah dan program prioritas di tahun 2024. Adapun rincian jumlah usulan yang disampaikan melalui Menu Aspirasi dalam aplikasi SIPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.15

Jumlah Usulan Aspirasi Langsung (Masyarakat) Berdasarkan Kabupaten/Kota

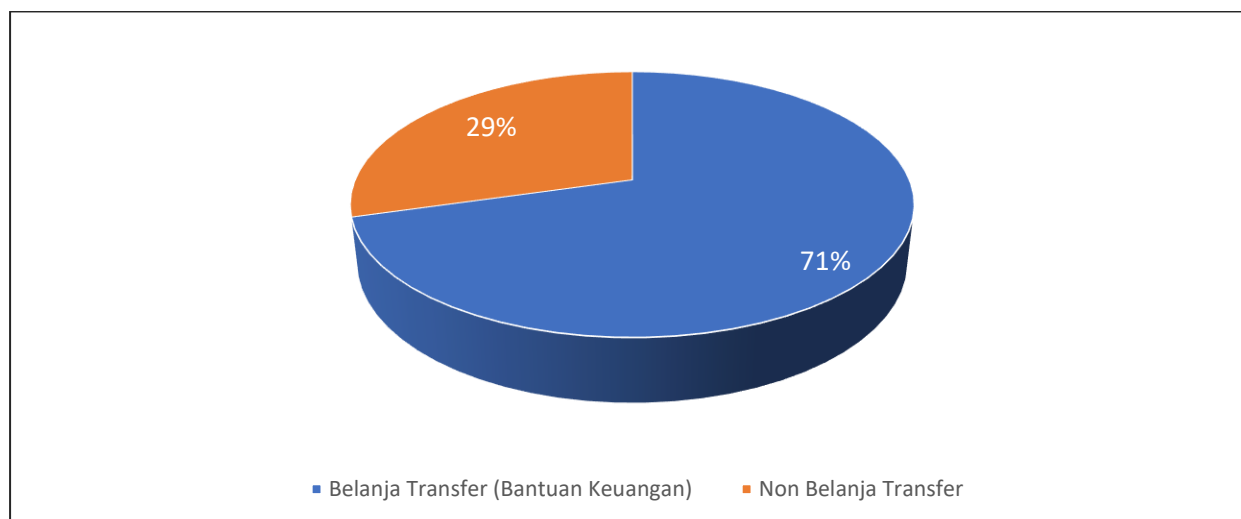
No	Kab/Kota	Usulan
1	Balikpapan	155
2	Berau	169
3	Bontang	95
4	Kutai Barat	249
5	Kutai Kartanegara	172
6	Kutai Timur	162
7	Mahakam Ulu	82
8	Paser	515
9	Penajam Paser Utara	176
10	Samarinda	584
Total		2359

Tabel IV.16  
Jumlah Usulan Aspirasi Reses (Pokir) Berdasarkan Fraksi DPRD

No	Fraksi	Usulan
1	Demokrat-Nasdem	36
2	Gerindra	81
3	Golkar	80
4	PAN	159
5	PDI-P	68
6	PKB	3
7	PKS	3
8	PPP	82
Total		512

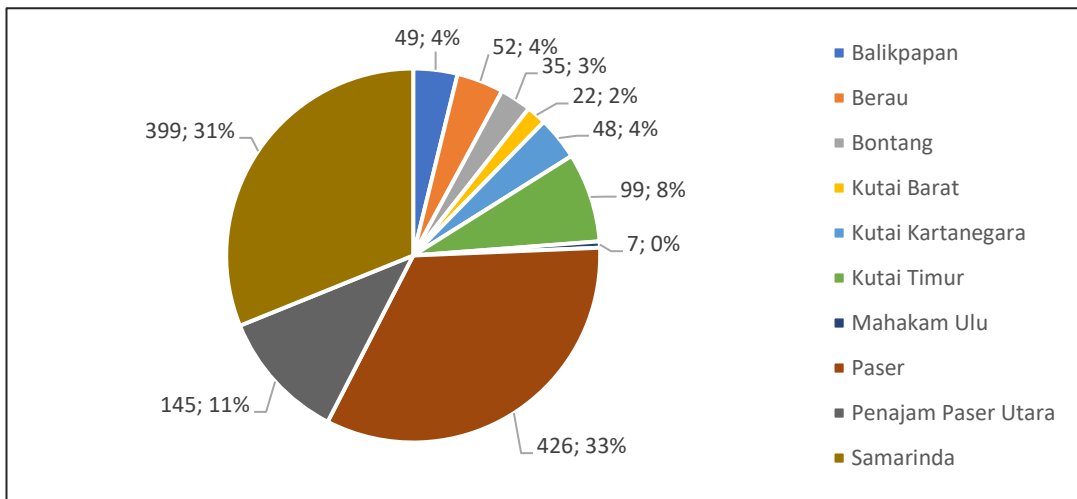
#### 4.4.2 Akomodasi Usulan Aspirasi Langsung

Dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, telah dilakukan proses verifikasi terhadap 2.359 usulan aspirasi langsung yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota maupun dari Lembaga/Institusi/Organisasi melalui aplikasi SIPD. Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat 1.817 usulan aspirasi langsung yang disetujui. Usulan aspirasi langsung yang telah lolos proses verifikasi berdasarkan jenis belanjanya dapat dilihat pada gambar berikut.



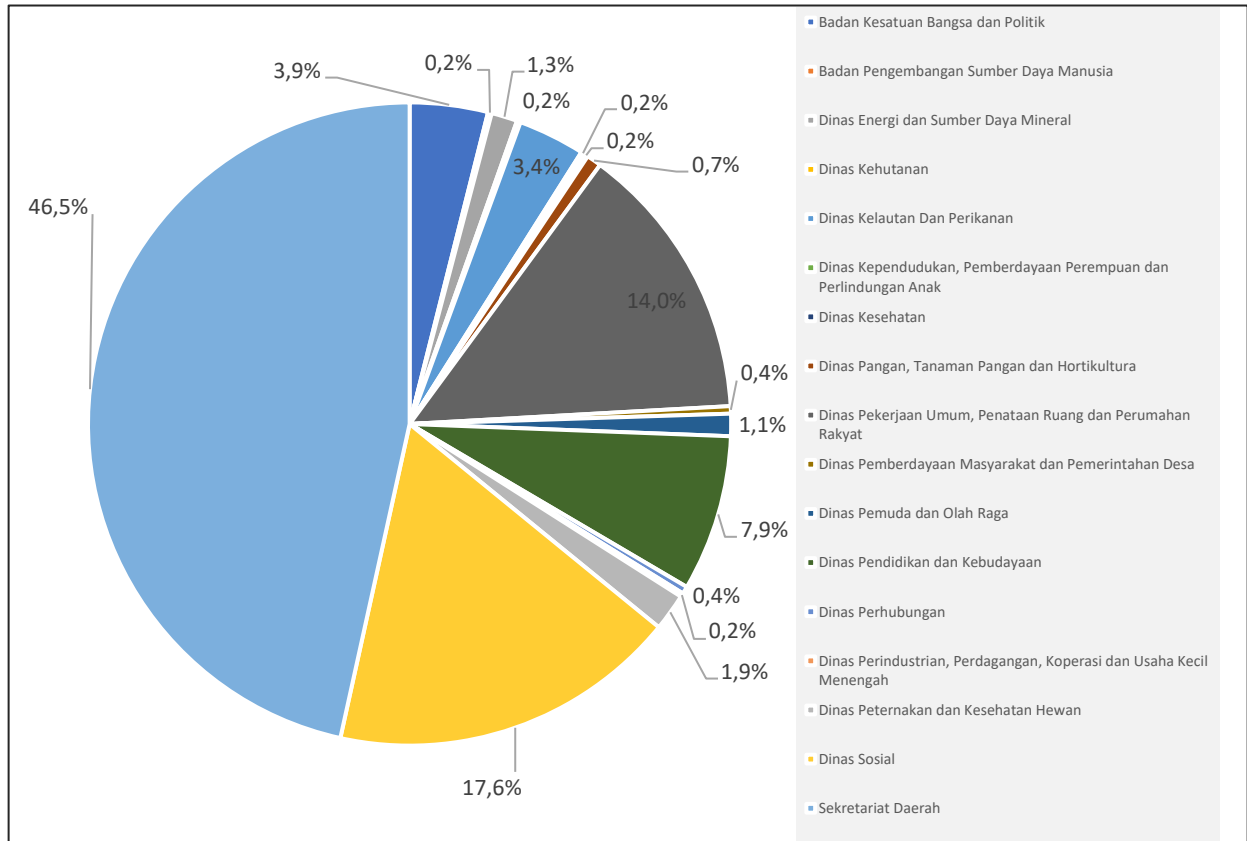
Gambar IV.3  
Usulan Aspirasi Langsung yang Lolos Verifikasi Berdasarkan Jenis Belanja (Belanja Non Transfer dan Belanja Transfer)

Sebagian besar usulan aspirasi langsung yang disetujui adalah berjenis belanja transfer, yakni sebanyak 1.282 usulan. Hal ini berbanding lurus dengan kuantitas usulan yang disampaikan yang didominasi oleh usulan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota. Meskipun berjenis belanja transfer, namun usulan yang disetujui dinilai dapat menunjang pencapaian target dan sasaran pembangunan provinsi. Pola pendanaan terhadap usulan yang berjenis belanja transfer ini adalah melalui mekanisme Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota yang nilainya telah dirumuskan di dalam kerangka pendanaan. Adapun pemetaan terhadap usulan aspirasi langsung yang berjenis belanja transfer berdasarkan kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar IV.4  
Usulan Aspirasi Langsung Berjenis Belanja Transfer yang Lolos Verifikasi Berdasarkan Kabupaten/Kota

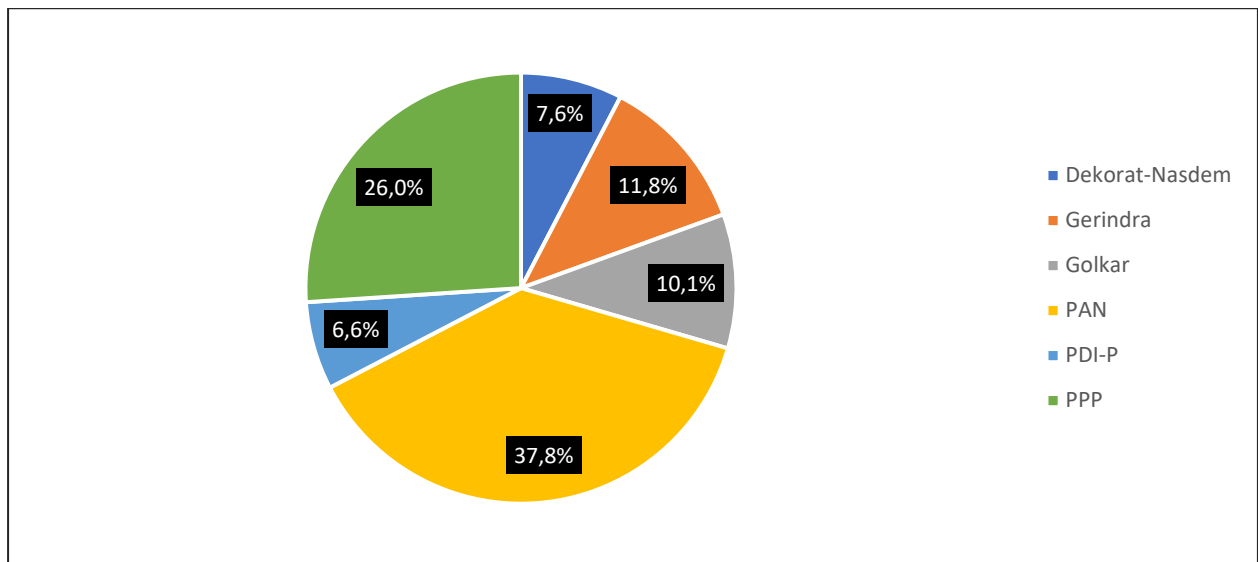
Selain dari kewenangan kabupaten/kota, terdapat pula usulan aspirasi langsung yang ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi merupakan kewenangan provinsi atau bersifat hibah, yakni total sebanyak 535 usulan. Sebagai informasi, bahwa usulan aspirasi langsung yang menjadi kewenangan provinsi secara umum juga telah dibahas di dalam forum Rakortekrenbang dan Musrenbang. Adapun pemetaan terhadap usulan aspirasi langsung yang berjenis belanja non transfer berdasarkan tujuan Perangkat Daerahnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar IV.5  
Usulan Aspirasi Langsung Berjenis Belanja Non Transfer yang Lolos Verifikasi Berdasarkan Perangkat Daerah Tujuan

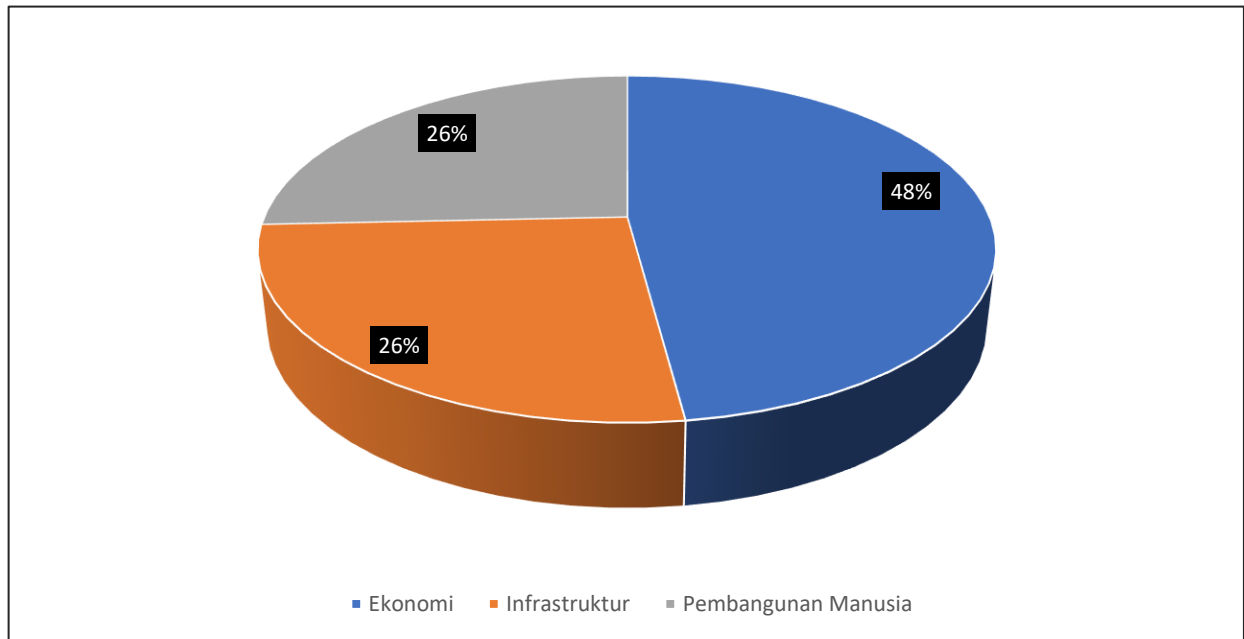
#### 4.4.3 Akomodasi Usulan Aspirasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD

Dalam penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, telah dilakukan proses verifikasi terhadap 512 usulan aspirasi pokir yang disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil reses melalui aplikasi SIPD. Berdasarkan hasil validasi dan verifikasi, terdapat 288 usulan yang disetujui. Usulan aspirasi pokir DPRD yang telah lolos proses validasi dan verifikasi berdasarkan fraksi dapat dilihat pada gambar berikut.



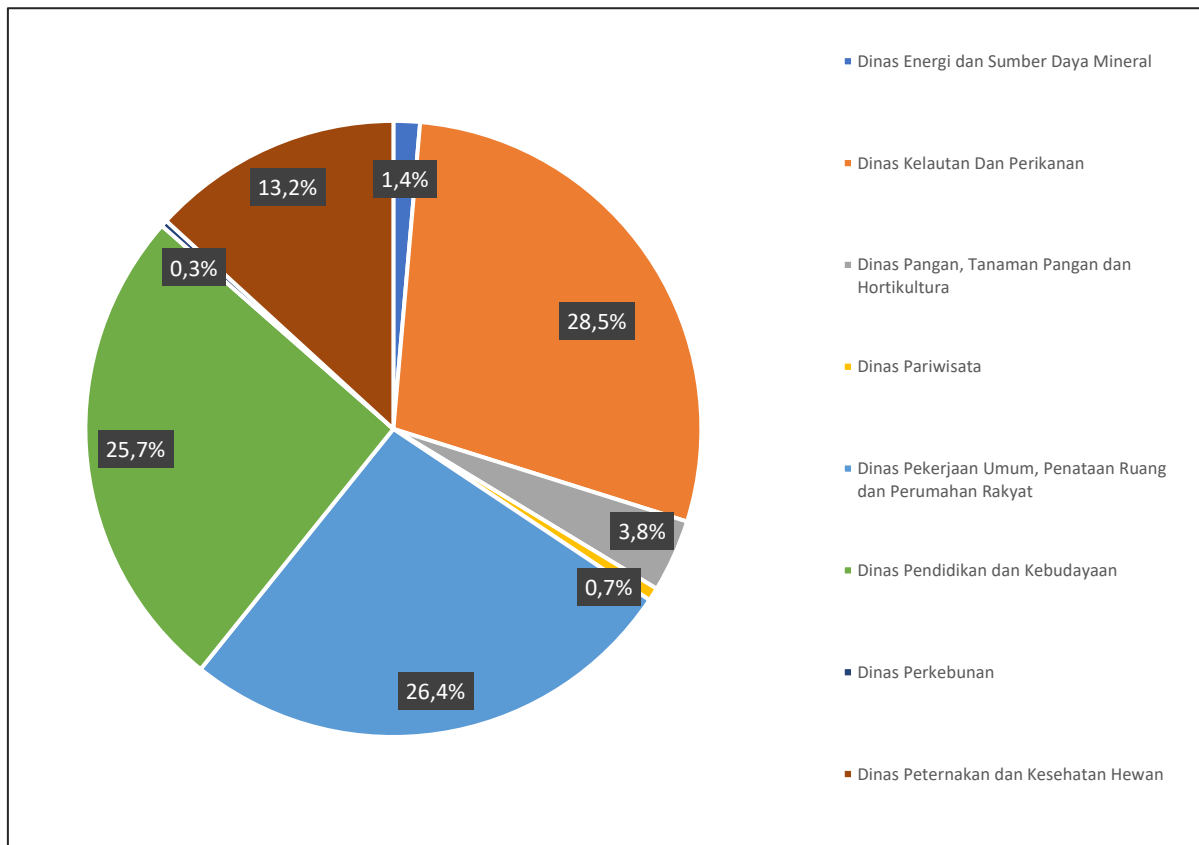
Gambar IV.6  
Usulan Aspirasi Pokir DPRD yang Lolos Validasi dan Verifikasi  
Berdasarkan Fraksi

Usulan aspirasi pokir DPRD yang disetujui adalah pada kegiatan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Selaras dengan tema pembangunan daerah yang menekankan pada peningkatan produktivitas dalam rangka penguatan ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial, usulan pokir DPRD yang disetujui lebih dominan kuantitasnya pada bidang urusan perekonomian, bidang urusan pembangunan manusia dan bidang infrastruktur. Adapun pembagian usulan aspirasi pokir DPRD yang disetujui berdasarkan bidang urusannya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar IV.7  
Usulan Aspirasi Pokir DPRD yang Lolos Validasi dan Verifikasi Berdasarkan Bidang Urusan

Jika dilihat secara lebih rinci, secara kuantitas proporsi usulan aspirasi pokir DPRD yang telah disetujui di dalam tahap penyusunan RKPD paling banyak ditujukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan untuk usulan aspirasi pokir DPRD di bidang infrastruktur, hanya difokuskan pada ruas Jalan Provinsi yang dinilai memiliki daya ungkit paling besar untuk mendukung aksesibilitas jalur dari sentra produksi menuju pusat pemasaran. Adapun usulan aspirasi pokir DPRD yang telah lolos proses validasi dan verifikasi berdasarkan Perangkat Daerah tujuannya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar IV.8  
Usulan Aspirasi Pokir DPRD yang Lolos Validasi dan Verifikasi  
Berdasarkan Perangkat Daerah Tujuan

Seluruh usulan aspirasi yang telah lolos proses validasi dan verifikasi (usulan aspirasi langsung dan aspirasi pokir DPRD) kemudian di sinkronisasi dan di internalisasi ke dalam masing-masing rencana Sub Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di Tahun 2024. Adapun informasi terhadap usulan-usulan aspirasi yang telah disetujui di dalam proses penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat di dalam aplikasi SIPD.

#### 4.4 Inovasi Pembangunan Daerah

Selain program/kegiatan yang diuraikan pada sub bab sebelumnya, dalam rangka percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah dan prioritas yang telah diuraikan, dikembangkan pula program-program inovasi. Beberapa program inovasi yang dikembangkan di Kalimantan Timur antara lain sebagai berikut:

#### 4.4.1 Pelajar Penting (Peduli Stunting)

Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2022 berdasarkan hasil survei SSGI Kementerian Kesehatan mencapai 23,90 persen mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 22,80 persen. Rata-rata prevalensi stunting menurut kabupaten/kota pada tahun 2022 masih tinggi yaitu diatas 20 persen, kecuali Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Balikpapan yang masing-masing mencapai 14,80 persen dan 19,60 persen. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, target prevalensi stunting pada tahun 2024 sebesar 14 persen. Hal ini menjadi tantangan Provinsi Kalimantan Timur dalam menurunkan angka prevalensi stunting di Kalimantan Timur untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam menjawab tantangan tersebut Gubernur Provinsi Kalimantan Timur menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 463/K159/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Timur. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi anggota tim dengan tugas melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran di tingkat provinsi dengan memanfaatkan sistem pengumpulan dan pelaporan data yang telah ada, dan mengelola pengetahuan untuk mendorong inovasi dalam berbagai aspek percepatan penurunan stunting yang dilakukan melalui :

1. Pemantauan dan evaluasi di tingkat provinsi dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan Stunting;
2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko Stunting di tingkat Provinsi;
3. Memfasilitasi audit Stunting di tingkat Provinsi;
4. Menyusun pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Tim Pengarah TPPS Provinsi dan TPPS Pusat; dan
5. Mendorongkan inovasi dalam kegiatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat Provinsi.

Berdasarkan tugas diatas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur perlu mengoptimalkan percepatan pembelajaran mengenai stunting di Sekolah Menengah Atas (SMA)/ sederajat, mengelola pengetahuan untuk mendorong inovasi dalam berbagai aspek untuk percepatan penurunan stunting dikarenakan sekolah memiliki peran penting dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting yang artinya memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan dan melakukan berbagai upaya dalam mendukung percepatan penurunan stunting, salah satunya melalui peningkatan jumlah Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) SMA/Sederajat yang didalamnya terdapat pengetahuan stunting dikarenakan sebagian besar pelajar SMA/Sederajat belum mengetahui mengenai stunting, pencegahan dan penanganan stunting. Informasi yang mereka dapatkan agar dapat diteruskan kepada lingkungan di sekitarnya dan juga untuk diri mereka sendiri karena pelajar adalah calon pengantin dengan menerapkan pola hidup sehat sejak dini untuk pencegahan stunting. Dengan adanya inovasi Pelajar Penting (Peduli Stunting) di Provinsi Kalimantan Timur melalui Sosialisasi Edukasi mengenai stunting dikalangan pelajar SMA/SMK/SLB, Pembentukan komunitas pelajar peduli stunting (pelajar penting) di SMA/SMK/SLB, Peningkatan jumlah SSK SMA/SMK/SLB sederajat diharapkan stunting bisa menurun atau bahkan tidak ada stunting di Provinsi Kalimantan Timur.



Gambar IV.9  
*Launching Pelajar Penting Peduli Stunting*

Dalam pelaksanaan inovasi pelajar peduli stunting telah dilaksanakan sosialisasi SSK dan Pelajar Peduli Stunting di 126 sekolah dengan jumlah peserta sebanyak 52.769 peserta, Gerakan Nasional Aksi Bergizi, Senam

bersama Pelajar Peduli Stunting yang berasal dari 72 sekolah dan Sosialisasi SSK, Pelajar Peduli Stunting dan Aksi Gizi dalam aksi perubahan Pelajar Peduli Stunting yang diikuti oleh 170 sekolah dengan jumlah peserta sebanyak 88.479 peserta.



Gambar IV.10  
Penyuluhan Makanan Bergizi Pelajar Peduli Stunting

SMA Negeri 2 Kota Balikpapan memperoleh penghargaan terbaik 1 Nasional dalam kategori inovasi terbaik yaitu Komunitas Pelajar Penting dalam acara Apresiasi Pelaksanaan SSK Paripurna terbaik tahun 2022 yang

diselenggarakan oleh BKKBN RI pada tanggal 17 November 2022 selain itu pada acara tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur juga memperoleh penghargaan terbaik 1 Nasional sebagai Pengelola Program SSK Wilayah Provinsi.



Gambar IV.11  
Penghargaan Pelajar Peduli Stunting

#### 4.4.2 Aksi Mandiri Energi Terbarukan (AMET)

Amanat Perda Provinsi Kaltim No 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yaitu mencapai Bauran Energi Baru Terbarukan sebagai energi primer sebesar 12,39% pada tahun 2025 untuk semua sektor, ternyata berjalan lambat dimana Bauran Energi Terbarukan pada konsumsi Energi Primer Provinsi Kaltim tahun 2020 baru mencapai 4,80%, yang seharusnya lebih besar dari 5%, pada tahun 2021 mencapai 6,53 %, sementara target 2022 sebesar 7,34 %, dengan kenaikan rata-rata 1,27 % per tahun maka dipastikan pada tahun 2025 tidak akan mencapai target sebagaimana yang diharapkan dalam RUED-P Kaltim. Sehingga dibutuhkan terobosan inovasi untuk mempercepat pertumbuhan penggunaan energi terbarukan sebagai energi primer.

Ada banyak sektor usaha di Kaltim yang memiliki dan menguasai potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) seperti kehutanan (biomassa), perkebunan (biomassa, biogas, tenaga surya), industri (limbah panas dan organik, tenaga surya), pengelolaan sampah (biomassa dan biogas, tenaga surya), properti

(tenaga surya), tambang (tenaga surya dan *methane*), pertanian (biomassa). Sektor-sektor tersebut banyak yang masih belum memanfaatkan EBT secara maksimal dengan berbagai argumentasi seperti kurangnya infrastruktur EBT yang tersedia, mahal biaya investasi infrastruktur EBT sehingga tidak ekonomis dan mengakibatkan biaya produksi EBT menjadi mahal, tidak adanya *demand* terhadap EBT sehingga tidak dapat dipasarkan, banyaknya regulasi yang cenderung menghambat investasi produksi dan pemasaran EBT, kendala teknologi untuk mengatasi sifat EBT yang *intermittent*, dan teknologi mesin atau peralatan yang dipasarkan di Indonesia belum bisa mengonsumsi EBT secara penuh. Karena banyaknya permasalahan tersebut, maka pelaku usaha hanya melakukan pengelolaan EBT untuk memenuhi jawaban terhadap kritikan besarnya emisi Gas Rumah Kaca yang terjadi akibat aktivitas mereka. Dengan kata lain pengelolaan EBT masih bersifat *Business As Usual*, tanpa ada terobosan atau percepatan sebagaimana potensi yang tersedia, pada satu sisi potensi EBT di Badan Usaha tersedia namun di sisi lain masih mengonsumsi energi fosil juga dalam jumlah besar.

Dihadapkan dengan kondisi diatas, EBT harus diterobos melalui program yang dapat membuka simpul produksi dan penggunaan EBT. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mendorong Badan Usaha yang memiliki potensi EBT agar memproduksi dan menggunakan EBT untuk menggantikan energi fosil secara terintegrasi dan bertahap dalam kegiatan usahanya. Inovasi dimaksud dinamai Aksi Mandiri Energi Terbarukan (AMET).

Aksi Mandiri Energi Terbarukan (AMET) mendukung Pergub Kaltim Nomor 5 Tahun 2023 tentang Peningkatan Program Energi Baru dan Terbarukan dalam rangka meningkatkan kemandirian energi di Provinsi Kalimantan Timur. AMET direncanakan akan dilakukan pada berbagai *stakeholders* yang memiliki dan/atau menguasai potensi EBT serta mengonsumsi energi untuk aktivitas produksi. *Stakeholders* yang dimaksud merupakan Badan Usaha (batubara, perkebunan dan minyak sawit, energi terbarukan), penyedia jasa angkutan di lokasi operasi tambang dan perkebunan sawit (termasuk UMKM), produsen teknologi energi terbarukan (BioCNG, biogas

*converter*, panel surya, *gas engine*, dll), PLN, tenaga kerja dan calon tenaga kerja, dan masyarakat lokal di sekitar tambang dan perkebunan sawit.

Prinsip dasar pelaksanaan Program AMET adalah mengajak *stakeholders* yang memiliki potensi EBT untuk membuat MOU atau perjanjian kinerja dengan pihak Pemerintah Provinsi Kaltim, tentang besaran pemanfaatan EBT untuk menggantikan konsumsi energi fosil di internal perusahaan (produksi sendiri dan pakai sendiri) dalam periode waktu yang disepakati sebagai kinerja. Besaran yang disepakati dapat berbeda antar Badan Usaha, tergantung kemampuan investasi dan komitmennya terhadap lingkungan.



Gambar IV.12

Logo Aksi Mandiri Energi Terbarukan (AMET)

Kaltim merupakan daerah pertama yang menerapkan produksi *biomethane* menggunakan BioCNG (PT DSNG) dan memiliki peluang meningkatkan pemanfaatannya melalui konversi diesel untuk operasional perkebunan (bahan bakar truk angkutan buah dan CPO, mesin pabrik, listrik untuk karyawan dan perkantoran), dan di luar operasional perkebunan (PLTD milik desa dan PLN, angkutan batubara). Selain itu, Kaltim termasuk pelopor dalam peningkatan pemanfaatan energi terbarukan di operasi tambang, seperti PLTS di PT IMM yang merupakan PLTS terbesar se-Kalimantan pada tahun

2020. Oleh karena itu, AMET diharapkan mempercepat proses Transisi Energi Terbarukan yang didorong dengan dukungan komitmen Badan Usaha dalam memanfaatkan energi yang dimiliki, sehingga menurunkan biaya konsumsi energi fosil, serta memberikan penghematan bagi Badan Usaha dalam proses produksi, sehingga akan mempercepat tercapainya target Bauran Energi Baru Terbarukan di Kaltim.

AMET juga diharapkan memicu munculnya berbagai inovasi turunan maupun terobosan teknologi produksi atau pemanfaatan EBT, ketahanan energi, industri hijau, dan pembangunan infrastruktur EBT oleh pihak swasta. Selain itu, AMET juga mendukung penurunan emisi GRK hasil dari konversi diesel menjadi *biomethane*.

#### 4.4.3 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PINANDU)

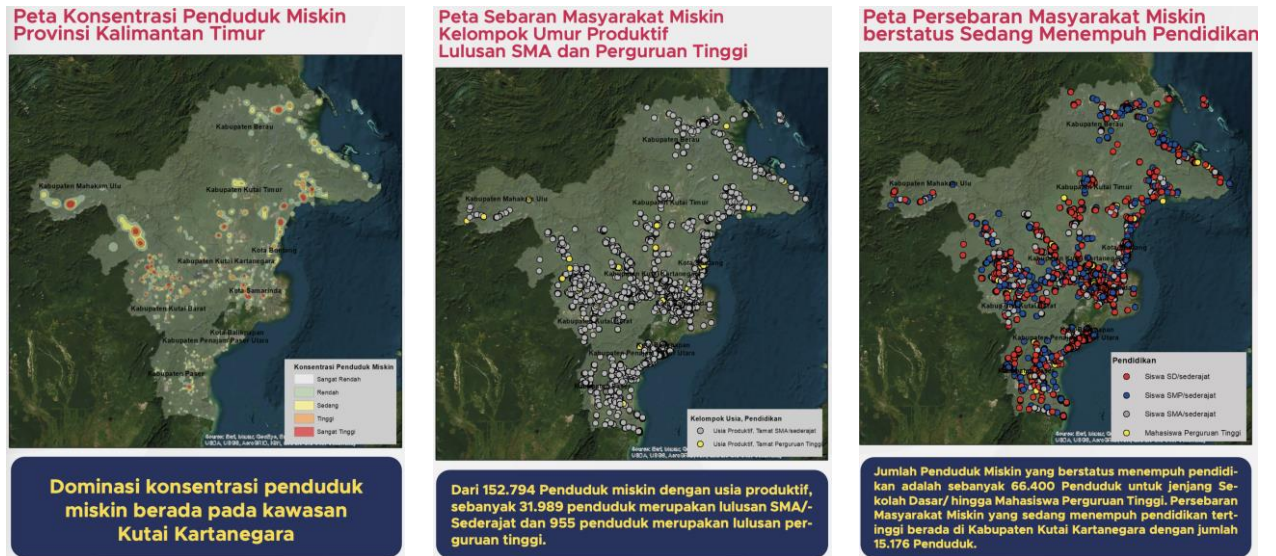
Pengentasan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia Indonesia tahun 2024, yang diamanahkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Upaya menekan angka kemiskinan di seluruh provinsi sesuai dengan instruksi presiden ditujukan kepada seluruh pemangku kepentingan dari tingkat nasional sampai pada tingkat desa/kelurahan, untuk selanjutnya penanganan kemiskinan dapat dilakukan sesuai kondisi karakteristik kemiskinan di masing-masing wilayah. Gubernur dalam instruksi presiden memiliki tugas mengoordinasikan penyiapan dan pemutakhiran data sasaran keluarga miskin ekstrem dalam mewujudkan target 0 Persen Angka Kemiskinan.

Paradigma yang berkembang selama ini adalah masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan apabila mendapatkan bantuan yang cukup. Namun nyatanya bantuan saja tidak cukup, masyarakat miskin perlu juga meningkatkan taraf hidupnya untuk pemenuhan kebutuhan secara jangka panjang dan tidak hanya bergantung pada bantuan. Maka, selain melalui bantuan salah satunya diperlukan juga strategi peningkatan pendapatan agar masyarakat miskin keluar dari kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Timur harus dilaksanakan secara holistik, komprehensif, efektif, terpadu dan terkoordinasi serta berdasarkan data *by name by address* (BNBA). Dalam hal ini pengetahuan terkait data dan informasi diketahui sampai tingkat pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Penanggulangan kemiskinan saat ini akan dilakukan dengan memuat analisis berupa pemetaan karakteristik data kemiskinan, untuk mendapatkan Lokus Prioritas serta penguatan koordinasi pelaksanaan program lintas sektor. Untuk selanjutnya pemerintah provinsi membuat konsep yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di seluruh wilayah penanganan di Kalimantan Timur. Langkah pelaksanaan dimulai dari Pemetaan Karakteristik Masyarakat Miskin di Provinsi Kalimantan Timur sebagai dasar *input* data dan kebijakan Koordinasi Terpadu. Pemetaan Karakteristik Masyarakat Miskin di Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari (1) Identifikasi Persebaran Penduduk Miskin di Kalimantan Timur dan (2) Identifikasi Karakteristik Kemiskinan Daerah di Kalimantan Timur.

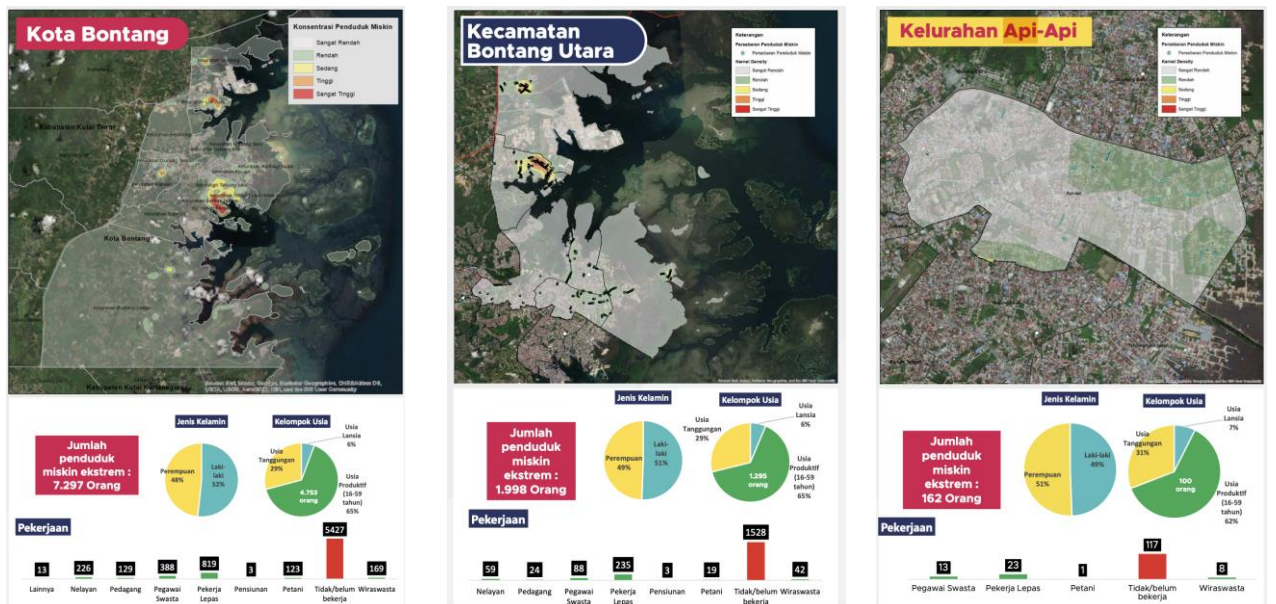
Data yang digunakan bersumber dari data P3KE yaitu data penduduk miskin ekstrem di suatu daerah berdasarkan nominal pengeluaran masyarakat dengan mengacu pada *Purchasing Power Parity* (PPP). Data kemiskinan ekstrem merupakan gambaran kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar antara lain makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, serta akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Data P3KE berisi data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap (RT/Dusun/RW/desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang sudah divalidasi NIK oleh DUKCAPIL. Pemetaan Karakteristik Masyarakat Miskin Provinsi Kalimantan Timur dirinci sampai tingkat desa/kelurahan pada setiap wilayah kabupaten dan kota. Pentahapan dimulai dari pemindahan data P3KE menjadi data spasial dan rekapitulasi data kedalam infografis, sebagai berikut :

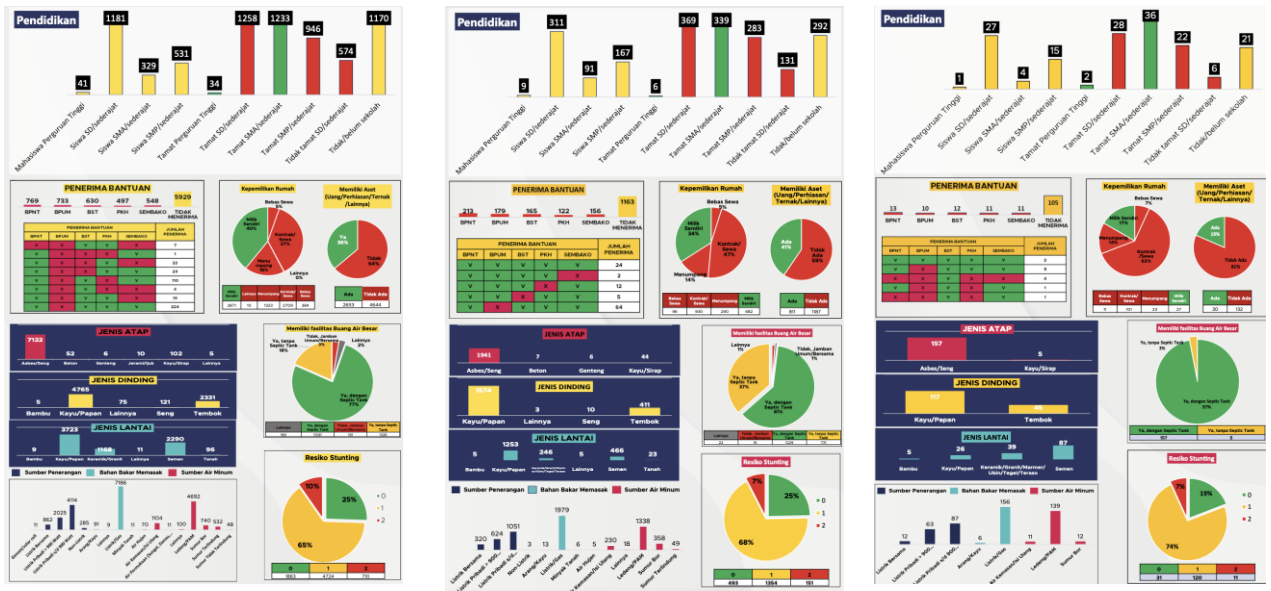
## 1. Data Spasial P3KE



Data berikut merupakan penggambaran persebaran individu yang ditampilkan dalam Peta Konsentrasi Penduduk Miskin, kemudian detail informasi Sebaran Masyarakat Miskin Penerima Bantuan, Tanpa Kepemilikan Rumah, Kelompok Usia Produktif, berstatus Sedang Menempuh Pendidikan, sampai kepada Fasilitas BAB *Non Septic Tank*.

## 2. Infografis P3KE





Data berikut merupakan penggambaran infografis karakteristik kemiskinan sampai tingkat kelurahan/desa. Pada penjelasan ini menampilkan contoh Kota Bontang, Kecamatan Bontang Utara lalu Kelurahan Api-api, yang akan direplikasi ke seluruh kabupaten kota di Kalimantan Timur. Dengan penjelasan berupa konsentrasi penduduk miskin yang akan dimunculkan pada 103 Kecamatan, 197 kelurahan, dan 841 Desa di Kalimantan Timur. Pendekatan Wilayah memunculkan prioritas penanganan kemiskinan berdasarkan kantong-kantong kemiskinan sampai tingkat desa/kelurahan menjadi beberapa Prioritas Wilayah Penanggulangan Kemiskinan, yaitu:

- a. Prioritas Wilayah Bidang Ketenagakerjaan, bersumber dari data penduduk miskin dengan kelompok usia produktif dan belum bekerja;
- b. Prioritas Wilayah Bidang Pendidikan, bersumber dari data penduduk miskin yang sedang menempuh Pendidikan dan/atau yang memiliki ijazah Pendidikan;
- c. Prioritas Wilayah Bidang Sosial, bersumber dari data penduduk miskin yang belum/tidak menerima bantuan langsung;
- d. Prioritas Wilayah Bidang Infrastruktur Dasar, bersumber dari data kondisi tempat tinggal, kepemilikan, dan fasilitas BAB.
- e. Prioritas Wilayah Bidang Kesehatan (terutama Stunting), bersumber dari data keluarga miskin rawan stunting.

Intervensi Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan 3 aspek yaitu :

1. Peningkatan Kualitas dan kuantitas yang tepat sasaran terkait pemberian bantuan langsung permukiman, sandang dan modal/stimulan ekonomi sosial berupa bantuan langsung seperti BPNT, BPUM, BST, PKH, dan Sembako.
2. Kebutuhan dasar berupa tempat tinggal, sumber penerangan/energi listrik, bahan bakar memasak, sumber air minum dan fasilitas buang air besar;
3. Akses untuk meningkatkan kualitas individu berupa:
  - a. Akses pendidikan, pelatihan keterampilan sertifikat, pemagangan/penempatan kerja.
  - b. Kerjasama dengan lembaga ekonomi tingkat desa dan kelurahan (BUMDes, UMKM, kelompok masyarakat (Gapoktan, Pokdarwis, KUBE)).

Konsep pemaparan detail data kemiskinan akan menjadi dasar dalam penentuan arahan penanggulangan kemiskinan terpadu oleh pemerintah provinsi maupun kota/kabupaten. Padanan data selanjutnya akan disesuaikan dengan persebaran UMKM, BUMDes, CSR, BLKI, Penerima Rumah Layak Huni, sampai persebaran fasilitas pendidikan dan fasilitas Kesehatan. Hasil ini akan menjadi '*handbook*' data dan informasi bagi seluruh *stakeholder* terkait penanganan kemiskinan yang terpadu terutama untuk diketahui oleh seluruh Walikota, Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa serta TKPK Provinsi dan TKPD Kab Kota. Untuk kemudian disinergikan dengan:

1. Konsolidasi Data Informasi Kemiskinan Kabupaten dan Kota dengan tujuan verifikasi dan validasi data kemiskinan keluarga dan individu;
2. Rapat Koordinasi TKPK Provinsi, TKPK Kabupaten dan TKPK Kota berdasarkan amanah Peraturan Presiden No. 15 tahun 2010 tentang Percepatan penanggulangan kemiskinan yang mendelegasikan pembentukan tugas pokok dan fungsi TKPK di daerah.

## BAB V

### ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA





#### 5.1 Indikator Makro Kabupaten/Kota Tahun 2024

Capaian kinerja pembangunan daerah kabupaten/kota tahun 2022 telah dilakukan evaluasi seperti capaian indikator makro pembangunan yang terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase Penduduk Miskin, Indeks Gini dan PDRB per Kapita. Selanjutnya, hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tersebut menjadi pertimbangan dalam menetapkan target indikator makro pembangunan daerah kabupaten/kota pada tahun 2024.

##### 5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

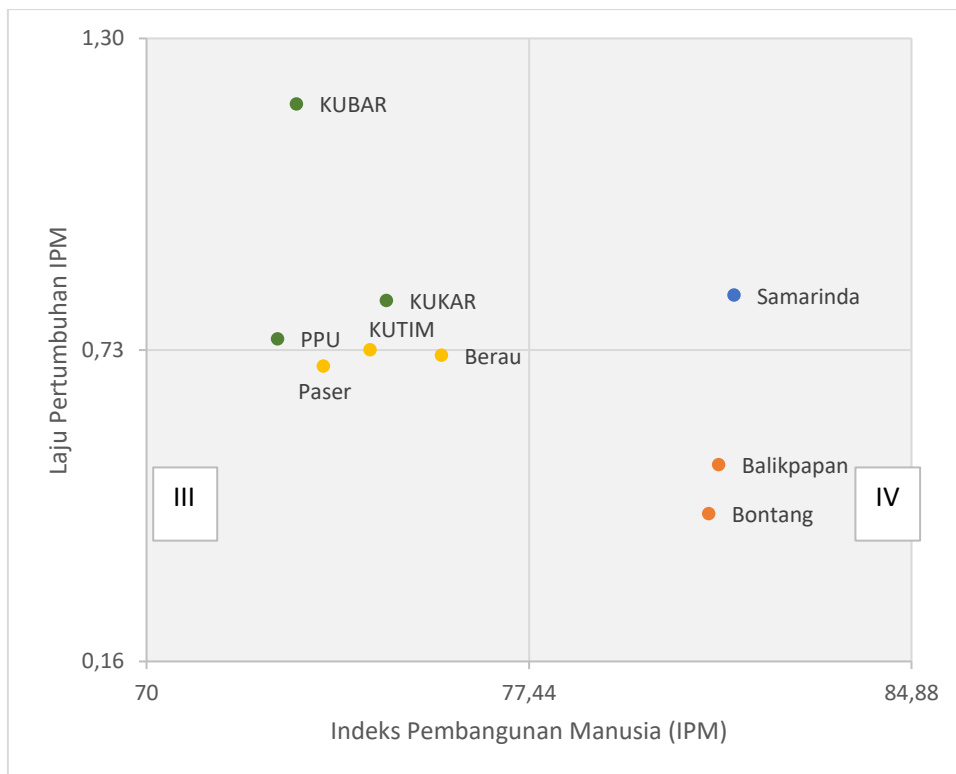
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM Kabupaten/Kota Tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2021, maka capaian IPM Kabupaten/Kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel V.1  
Kategori Capaian IPM Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM lebih rendah dan Progres Pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM dan Progres Pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM dan Progres Pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian IPM lebih tinggi dan Progres Pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023

- Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten dengan capaian IPM lebih rendah dan progres pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Timur.
- Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kota dengan capaian IPM dan progres pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Samarinda.
- Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian IPM dan progres pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Paser dan Kabupaten Berau.
- Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kota dengan capaian IPM lebih tinggi dan progres pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Balikpapan dan Kota Bontang.



Gambar V.1  
Analisis Kuadran Capaian IPM dan Progres Pertumbuhan IPM  
Kabupaten/Kota Tahun 2022  
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Provinsi

Kalimantan Timur tahun 2022 mencapai 77,44 meningkat 0,56 poin dibandingkan capaian tahun 2021 yang mencapai 76,88. Perbaikan kemajuan pembangunan manusia Kalimantan Timur pada tahun 2022 ditandai oleh peningkatan angka IPM sebesar 0,73 persen, setelah sebelumnya sempat tumbuh sebesar 0,84 persen pada tahun 2021. Peningkatan IPM tahun 2022 disebabkan oleh peningkatan yang terjadi disemua komponen penyusunnya. Berbeda dengan kondisi pada tahun 2020, di mana pandemi COVID-19 telah menyebabkan kinerja pembangunan manusia Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan yang disebabkan oleh turunnya nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita yang disesuaikan naik 3,31 persen dibanding tahun 2021.

Sebagai upaya dalam meningkatkan pemerataan pembangunan dalam aspek pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur perlu upaya yang sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tujuan pembangunan mewujudkan SDM berdaya saing dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2024 sebesar 78,32 dengan kategori “Tinggi”. Adapun upaya yang dilakukan adalah pemerataan kualitas pelayanan pendidikan pada semua jenjang melalui penyediaan infrastruktur pendidik, peningkatan kualifikasi pendidik/tenaga kependidikan serta pemberian beasiswa.

Tabel V.2  
Penetapan Target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota  
Tahun 2024





No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	72,04	72,93	73,44	73,77	74,00
2	KUBAR	71,19	72,07	72,92	72,86	73,42
3	KUKAR	73,59	74,06	74,67	74,91	75,51
4	KUTIM	73,00	73,81	74,35	75,10	75,64
5	Berau	74,71	75,20	75,74	75,50	76,53
6	PPU	71,41	72,01	72,55	72,50	73,30
7	MAHULU	67,09	67,95	68,75	68,70	70,80
8	Balikpapan	80,01	80,71	81,13	81,00	81,60
9	Samarinda	80,11	76,88	81,43	82,14	82,77
10	Bontang	80,02	80,59	80,94	81,20	81,53
Kalimantan Timur		76,24	76,88	77,44	77,75	78,32

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023

### 5.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu negara/daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara/ daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian LPE kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2021, maka capaian LPE non batubara kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel V.3  
Kategori Capaian LPE Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE lebih rendah dan Rata-rata LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE dan Rata-rata LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE dan Rata-rata LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian LPE lebih tinggi dan Rata-rata LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi

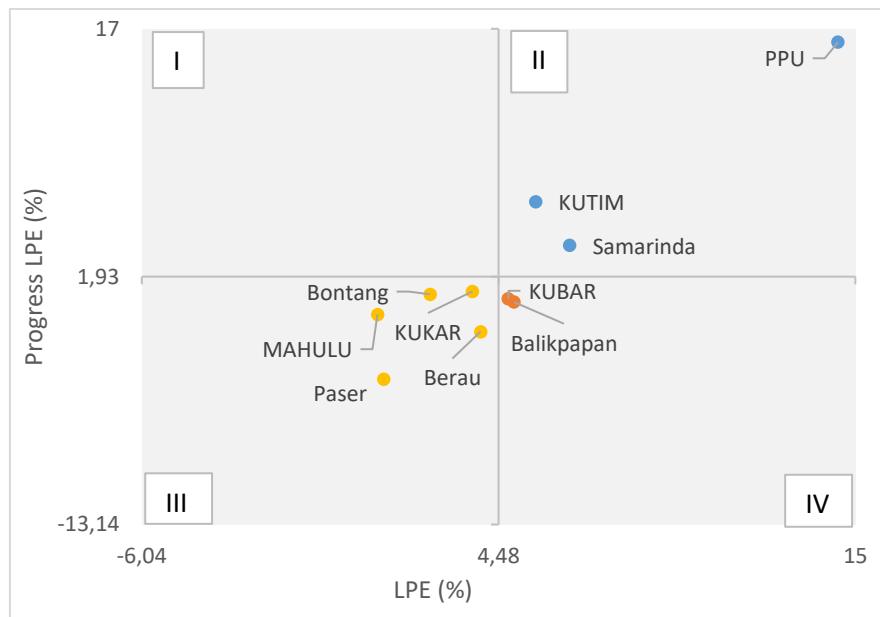
Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023

Kuadran I. Pada kelompok ini tidak ada kabupaten/kota dengan capaian LPE lebih rendah dan rata-rata LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi.

Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan rata-rata LPE lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 5 (lima) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan rata-rata LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Bontang, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Berau.

Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian LPE lebih tinggi dan rata-rata LPE lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat.



Gambar V.2

Analisis Kuadran Capaian dan Rata-Rata LPE Kabupaten/Kota Tahun 2022

(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023)

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2022 tidak terlepas dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur tahun 2022 merupakan agregat dari pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Timur. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kalimantan Timur menggambarkan bahwa produksi dan kinerja perekonomian wilayah kabupaten/kota di Kalimantan Timur, terutama pada daerah yang memiliki peranan besar terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Dari 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur terdapat 3 kabupaten yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun 2021. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara, dari -1,69 persen menjadi 14,49 persen.

Dalam rangka memacu pemerataan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, upaya yang dilakukan yakni mendorong peningkatan kualitas infrastruktur yang mendukung tumbuh dan menguatnya sektor perekonomian di Kabupaten/Kota, menjaga iklim investasi daerah dan serta mendorong munculnya hilirisasi industri. Adapun target perekonomian Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota Tahun 2024 ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi ekonomi daerah.

Tabel V.4  
Penetapan Target Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	-2,86	5,41	1,09	3,50-4,50	3,96
2	KUBAR	-2,87	4,18	4,77	4,24	4,55
3	KUKAR	-4,21	2,67	3,71	3,00-3,50	3,50-4,00
4	KUTIM	-3,08	-1,01	5,58	2,10	5,00
5	Berau	-3,32	5,36	3,95	3,79	4,29
6	PPU	-2,34	-1,69	14,49	1,82+1	14,42
7	MAHULU	-0,23	1,27	0,91	2,49	3,40
8	Balikpapan	-0,93	4,56	4,94	4,60	5,04
9	Samarinda	-0,99	2,78	6,58	6,73	6,42
10	Bontang	-2,74	1,60	2,46	2,50	2,65
Kalimantan Timur		-2,90	2,55	4,48	3+1	4,10 – 4,90

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023

### 5.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menggambarkan jumlah pengangguran dalam angkatan kerja. Angka TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2021, maka capaian kinerja TPT kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel dibawah ini.

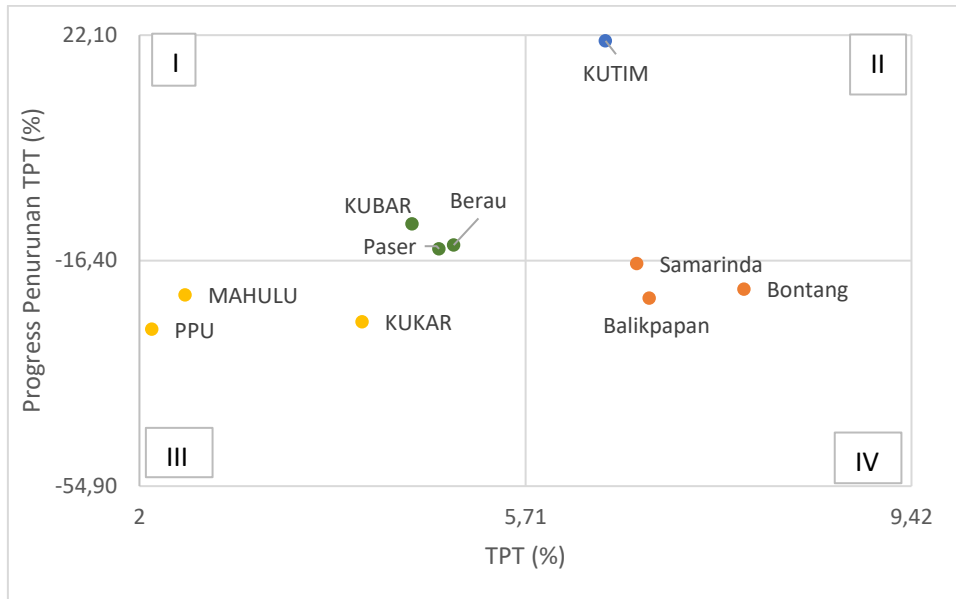
Tabel V.5  
Kategori Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I	●	Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT lebih rendah dan Progres pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi

Kuadran	Simbol	Interpretasi
II	●	Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT dan Progres pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi
III	●	Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT dan Progres pertumbuhan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi
IV	●	Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian TPT lebih tinggi dan Progres pertumbuhan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023

- Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian TPT lebih rendah dan progres pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Berau.
- Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian TPT dan progres pertumbuhan TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kutai Timur.
- Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten dengan capaian TPT dan progres pertumbuhan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kota dengan capaian TPT lebih tinggi dan progres pertumbuhan TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Samarinda, Kota Balikpapan dan Kota Bontang.



Gambar V.3

Analisis Kuadran Capaian dan Progres Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2022

(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023)

Pada umumnya, permasalahan masih cukup tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Timur disebabkan oleh tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang belum diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Daya serap pasar tenaga kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang ada.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor juga dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing sehingga angkatan kerja dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten akan menjadikan Kalimantan Timur sebagai provinsi yang berdaya saing tinggi. Penyelarasan target TPT Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 diselaraskan dengan target Kabupaten/Kota, sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai.

Tabel V.6

Penetapan Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	4,52	5,77	4,88	4,50	4,63
2	KUBAR	4,97	5,14	4,62	4,46	4,31
3	KUKAR	5,70	5,66	4,14	5,30	3,90
4	KUTIM	5,45	5,35	6,48	5,00	5,56

No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2020	2021	2022	2023	2024
5	Berau	5,08	5,82	5,02	4,73	4,62
6	PPU	6,22	2,95	2,12	2,95	2,05
7	MAHULU	3,49	3,14	2,44	2,90	2,00
8	Balikpapan	9,00	8,94	6,90	8,46	6,53
9	Samarinda	8,26	8,16	6,78	5,39	4,72
10	Bontang	9,46	9,92	7,81	7,65	7,35
Kalimantan Timur		6,87	6,83	5,71	5,44	5,46





Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023

#### 5.1.4 Persentase Penduduk Miskin

Persentase Penduduk Miskin menunjukkan kelompok masyarakat dengan pengeluaran per kapita sebulannya berada dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2021, maka capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini :

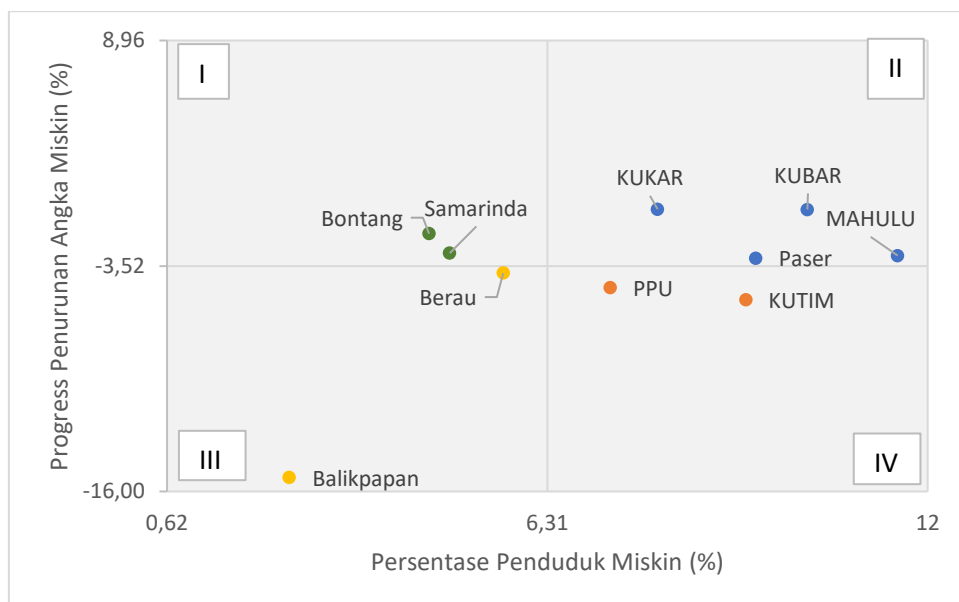
Tabel V.7

Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin lebih rendah dan Progres pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin dan Progres pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin dan Progres pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian persentase penduduk miskin lebih tinggi dan Progres pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023

- Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kota dengan capaian persentase penduduk miskin lebih rendah dan progres pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Bontang dan Kota Samarinda.
- Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten dengan capaian persentase penduduk miskin dan progres pertumbuhan angka miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Paser dan Kabupaten Mahakam Ulu.
- Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian persentase penduduk miskin dan progres pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Balikpapan dan Kabupaten Berau.
- Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten dengan capaian persentase penduduk miskin lebih tinggi dan progres pertumbuhan angka miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Timur.



Gambar V.4

Analisis Kuadran Capaian dan Progres Pertumbuhan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2022  
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023)

Persentase penduduk miskin di Kalimantan Timur pada tahun 2022 mengalami penurunan dari jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin. Penurunan ini terjadi merupakan efek dari mulai berkurangnya pandemi Covid-19 yang masuk ke Kalimantan Timur dan pulihnya perekonomian. Permasalahan kemiskinan umumnya dialami oleh kabupaten dengan karakteristik wilayah didominasi perdesaan. Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur fokus mengurangi tingkat kemiskinan melalui program-program peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat.

Sebagai upaya menurunkan jumlah penduduk miskin di Kalimantan Timur tahun 2024, penentuan target ditentukan dengan mensinergikan target Kabupaten/Kota tahun 2024 dengan analisis yang mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang diperkirakan akan semakin kondusif seiring dengan progres transisi pandemi COVID-19 menuju fase endemi.

Tabel V.8  
Penetapan Target Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Tahun 2024





No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	9,23	9,73	9,43	8,80	9,09
2	KUBAR	9,29	10,04	10,20	9,11	9,06
3	KUKAR	7,31	7,99	7,96	7,64	7,50
4	KUTIM	9,55	9,81	9,28	9,25	8,72
5	Berau	5,19	5,88	5,65	5,01	5,32
6	PPU	7,36	7,61	7,25	6,50	6,76
7	MAHULU	11,44	11,90	11,55	10,50	10,00
8	Balikpapan	2,57	2,89	2,45	2,39	2,31
9	Samarinda	4,76	4,99	4,85	4,68	4,50
10	Bontang	4,38	4,62	4,54	4,03	4,25
Kalimantan Timur		6,10	6,54	6,31	5,90	5,78

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023

#### 5.1.5 Indeks Gini

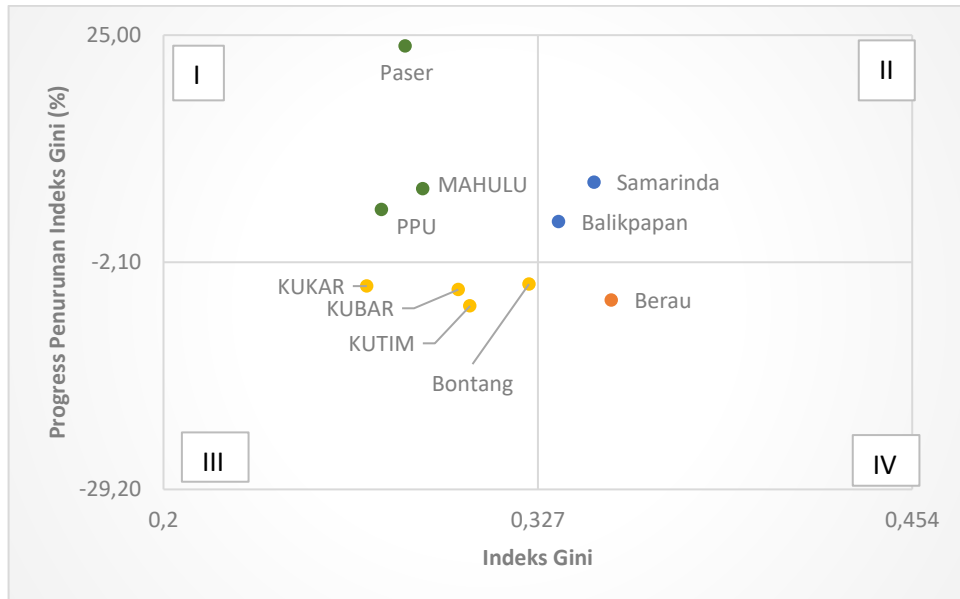
Indeks Gini yang tinggi menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Indeks Gini kabupaten/kota tahun 2022 dibandingkan capaian tahun 2021, maka capaian Indeks Gini kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel V.9  
Kategori Capaian Indeks Gini Kabupaten/Kota

Kuadran	Simbol	Interpretasi
I		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini lebih rendah dan Progres pertumbuhan Indeks Gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi
II		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini dan Progres pertumbuhan Indeks Gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi
III		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini dan Progres pertumbuhan Indeks Gini lebih rendah dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok Kabupaten/Kota dengan capaian Indeks Gini lebih tinggi dan Progres pertumbuhan Indeks Gini lebih rendah dibanding capaian provinsi

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2022

- Kuadran I. Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian Indeks Gini lebih rendah dan progres pertumbuhan Indeks Gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Mahakam Ulu dan Kota Balikpapan.
- Kuadran II. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten dengan capaian Indeks Gini dan progres pertumbuhan Indeks Gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten tersebut adalah Kabupaten Berau.
- Kuadran III. Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) kabupaten/kota dengan capaian Indeks Gini dan progres pertumbuhan Indeks Gini lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Samarinda.
- Kuadran IV. Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kota dengan capaian persentase Indeks Gini lebih tinggi dan progres pertumbuhan Indeks Gini lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kota tersebut adalah Kota Bontang.



Gambar V.5  
Analisis Kuadran Capaian dan Progres Pertumbuhan Indeks Gini  
Kabupaten/Kota Tahun 2022  
(Sumber : BPS. Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023)

Indeks Gini daerah perkotaan jauh lebih tinggi dari daerah perdesaan. Tercatat, pada tahun 2022 ketimpangan perkotaan mencapai 0,334 sedangkan untuk daerah perdesaan 0,283. Rendahnya Indeks Gini di daerah perdesaan tidak serta merta dapat menggeneralisasi bahwa kesejahteraan di daerah perdesaan lebih baik. Hal ini lebih menggambarkan keberagaman pekerjaan di daerah perkotaan yang lebih tinggi dibandingkan perdesaan, yang mengakibatkan *gap* antar lapisan penduduk di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan.

Guna pemerataan pendapatan pada masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan langkah bersama untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diharapkan mampu memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya dan tidak didominasi oleh golongan tertentu. Penentuan target indeks gini tahun 2024 dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang berpengaruh terhadap penurunan target indeks gini.

Tabel V.10  
Penetapan Target Indeks Gini Kabupaten/Kota Tahun 2024

No	KAB/KOTA	Realisasi			Target	
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Paser	0,290	0,288	0,282	0,270	0,280
2	KUBAR	0,338	0,317	0,300	0,333	0,299
3	KUKAR	0,294	0,283	0,269	0,260- 0,280	0,268
4	KUTIM	0,325	0,328	0,304	0,330	0,330
5	Berau	0,300	0,377	0,352	0,305	0,344
6	PPU	0,292	0,263	0,274	0,263	0,260
7	MAHULU	0,259	0,270	0,288	0,237	0,229
8	Balikpapan	0,311	0,325	0,334	0,300	0,320
9	Samarinda	0,324	0,322	0,345	0,345	0,327
10	Bontang	0,405	0,340	0,324	0,320	0,320
Kalimantan Timur		0,328	0,331	0,327	0,308	0,316

Sumber : Diolah BAPPEDA Prov KALTIM, 2023

## 5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota

Hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan di tahun 2022 menunjukkan bahwa masih terdapat 4 (empat) permasalahan utama pembangunan yang harus diselesaikan, yakni tingkat kemiskinan, indeks gini, kualitas lingkungan dan indeks reformasi birokrasi. Permasalahan tingkat kemiskinan dilihat dari daerah tempat tinggal menunjukkan bahwa penduduk miskin lebih banyak di daerah pedesaan dibandingkan daerah perkotaan, terutama di wilayah kabupaten yakni wilayah Kabupaten Mahulu dengan tingkat kemiskinan sebesar 11,55 persen, Kabupaten Kutai Barat sebesar 10,20 persen, dan Kabupaten Paser sebesar 9,43 persen. Indeks gini yang merupakan pengukuran dari tingkat ketimpangan pendapatan apabila dilihat berdasarkan tempat tinggal mengalami sedikit penurunan di daerah perkotaan maupun daerah pedesaan. Selanjutnya untuk permasalahan kualitas lingkungan hidup yang diukur melalui IKLH menunjukkan bahwa masih perlu upaya lebih terhadap perbaikan kualitas lingkungan dan udara. Sementara itu, Indeks Reformasi Birokrasi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya

Berdasarkan pertimbangan ke empat permasalahan tersebut, maka perlu strategi dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan kabupaten/kota yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang inklusif dan berkelanjutan, dalam upaya

pengentasan kemiskinan, yang berdampak positif pada pengurangan kesenjangan antar wilayah. Hal ini sejalan dengan tema RKPD Tahun 2024, yaitu *“Peningkatan daya saing SDM dan Infrastruktur Wilayah yang Andal untuk Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan serta Menjaga Stabilitas Politik dan Keamanan”*, yang menekankan pada peningkatan daya saing SDM dan Infrastruktur Wilayah untuk mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan dan Menjaga stabilitas politik dan keamanan dalam rangka mendukung pembangunan wilayah kabupaten/kota. Adapun arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota beserta lokasi khusus pelaksanaannya dengan mempertimbangkan permasalahan pembangunan, target sasaran pembangunan daerah, serta sektor potensial di masing-masing kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

Tabel V.11  
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
1	Paser	Peningkatan layanan pendidikan	1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)	SMAN 2 Tanah Grogot Kec.Tanah Grogot Kelurahan Janju, SMKN 1 Tanah Grogot Kec,Tanah Grogot Kelurahan Tanah Paser, SMKN 3 Tanah Grogot Kec.Tanah Grogot Kelurahan Tepian Batang
			2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)	SMAN 2 Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kelurahan Janju
			3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB	SMAN 2 Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kelurahan Janju
			4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB	SMAN 2 Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kelurahan Janju, SMKN 1 Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kelurahan Tanah Paser, SMKN 2 Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kelurahan Tepian Batang, SMKN 3 Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kelurahan Tepian Batang, SMKN 4 Tanah Grogot Kec. Tanah Grogot Kelurahan Tepian Batang
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah	Kecamatan Tanah Grogot, Kelurahan Tepian Batang
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah	SMAN 2 Tanah Grogot
			2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan	BLKI Balikpapan (cakupan wilayah peserta pelatihan sampai Kabupaten Paser)
		Peningkatan Peran BUMDes Aktif dan Berbadan Hukum	Pelatihan dan Pendampingan bagi BUMDes	
		Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan	Pendampingan mencapai legalitas kewirausahaan	Kec. Tanah Grogot, Kec. Kuaro, Kec. Paser Belengkong

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Kuaro & Muara Samu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Tanah Grogot & Paser Belengkong Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : Batu Sopang, Desa Senaken, Kec. Paser Belengkong, Tanah Grogot, Desa Padang Pengrapat, Desa Putang Kec. Long Kali, Kec. Kuaro, Desa Janju Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) : Kec. Long Ikis Korban Bencana : semua Kecamatan
		Pengembangan kawasan pariwisata	Pengembangan destinasi pariwisata Kawasan Gunung Embun	Desa Luan, Kec. Muara Samu
		Peningkatan produksi komoditi unggulan perkebunan	Kawasan Perkebunan Berbasis Korporasi Petani (komoditi kelapa sawit)	Kec. Long ikis/Kuaro
		Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan	Intensifikasi : Karet : Desa Tempakan Kec. Batu Engau, Desa Busui Kec. Batu Sopang, Desa Mendik Makmur Kec. Long Kali Kelapa Sawit : Desa Krayan Makmu Kec. Long Ikis Ekstensifikasi/Perluasan : Kelapa Sawit : Desa Tebru Pasir Damai Kec. Batu Engau
		Peningkatan produksi sektor peternakan	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)	Kuaro, Long Ikis, Long Kali, Paser Belengkong, Tanah Grogot
		Peningkatan produktivitas TPH	Pengembangan Kawasan Tanaman Hortikultura (pisang)	Padang Pangrapat
		Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan ANKT di usaha perkebunan	Kab. Paser

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Udang, Rumput Laut, Bandeng, Kepiting, dan Rajungan)	Kab. Paser
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM	Kec. Tanah Grogot
		Peningkatan produksi / hilirisasi produk potensial daerah	Pembangunan Rumah Produksi Bersama	Desa Kersik Bura Kec. Paser Belengkong, Desa Lomu Kec. Batu Engau
		Peningkatan layanan infrastruktur	1. Pemeliharaan Jalan Provinsi	Ruas Jalan Janju - Jone - Pondong Baru dan Ruas Jalan Prioritas Provinsi
			2. Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi rawa	DIR. Suliliran
			3. Evaluasi Rencana Tata Ruang	Kab. Paser
			4. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Paser
			5. Koordinasi dan upaya peningkatan akses layanan air minum skala regional	Longkali
			6. Penanganan Prasarana, Sarana, & Utilitas di permukiman untuk menunjang fungsi hunian	Paser Belengkong
			7. Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Tanah Grogot
		Pengelolaan lingkungan hidup	1. Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Kab. Paser
			2. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Kab. Paser
			3. Pengendalian KARHUTLA	Kab. Paser
			4. Rehabilitasi diluar kawasan hutan	Kab. Paser
			5. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER	Kab. Paser

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
			6. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air laut dan udara <i>ambien passive sampler</i>	Pemantauan Kualitas Air Sungai: Sungai Kasungai (Titik Hulu dan Titik Hilir) Pemantauan Kualitas Udara Ambien: Transportasi (Terminal Km. 7), Perkantoran (Kantor Bupati Paser), Pemukiman (Kanto Desa Tapis), Industri (Kantor Desa Long Pinang) Pemantauan Kualitas Air Laut: Titik Pelabuhan Pondong
			7. Pemantauan dan penanganan sampah laut	Kab. Paser
			8. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup	Kab. Paser
2	Kutai Barat	Peningkatan layanan pendidikan	1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)	SMAN 4 Sendawar Kecamatan Barong Tongkok Kelurahan Muara Asa, SMAN 1 Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kelurahan Linggang Bigung, SMAN 1 Siluq Ngurai Kecamatan Siluq Ngurai Kelurahan Muhur
			2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)	SMAN 4 Sendawar Kecamatan Barong Tongkok Kelurahan Muara Asa, SMAN 1 Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kelurahan Linggang Bigung, SMAN 1 Siluq Ngurai Kecamatan Siluq Ngurai Kelurahan Muhur
			3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB	SMAN 4 Sendawar Kecamatan Barong Tongkok Kelurahan Muara Asa, SMAN 1 Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kelurahan Linggang Bigung, SMAN 1 Siluq Ngurai Kecamatan Siluq Ngurai Kelurahan Muhur

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
			4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB	SMAN 4 Sendawar Kecamatan Barong Tongkok Kelurahan Muara Asa, SMAN 1 Linggang Bigung Kecamatan Linggang Bigung Kelurahan Linggang Bigung, SMAN 1 Siluq Ngurai Kecamatan Siluq Ngurai Kelurahan Muhur, SMKN 3 Sendawar Kecamatan Barong Tongkok Kelurahan Ngenyan Asa, SMK Kesehatan Kartini Kecamatan Melak Kelurahan Melak Ulu, SMKN 1 Bongan Kecamatan Kecamatan Bongan Kelurahan Bukit Harapan, SMKN 1 Sendawar Kecamatan Melak Kelurahan Melak Ulu
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah	Kecamatan Barong Tongkok, Kelurahan Barong Tongkok
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah	SMAN 4 Sendawar, SMAN 1 Linggang Bigung, SMAN 1 Siluq Ngurai
			2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan	BLKI Balikpapan (cakupan wilayah peserta pelatihan sampai Kabupaten Kutai Barat)
		Peningkatan Peran BUMDes Aktif dan Berbadan Hukum	Pelatihan dan Pendampingan bagi BUMDes	
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Siluq Ngurai & Muara Lawa Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Melak & Barong Tongkok Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : Kel. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok, Melak Ulu Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) : Kec. Damai Korban Bencana : semua Kecamatan
		Pengembangan Kawasan Strategi Pariwisata Provinsi	Destinasi ekowisata berkelas dunia yang mendorong ekonomi kerakyatan (Pengembangan Danau Kaskade)	Danau Jempang (Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang)

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan	<p>Intensifikasi :</p> <p>Kelapa Sawit : Kec. Bongan dan Kec. Jempang                      Karet : Kampung Tering lama Ulu Kec. Tering, Kampung Tering, Kamp. Baru, Kamp. Sekolaq Joleq                      Kec. Sekolaq Darat.                      Kakao :Kec. Tering (Kamp. Muara Mujan dan Kamp. Tering Lama)                      Kelapa : Kecamatan Jempang, Kecamatan Bongan</p> <p>Peremajaan                      Kec.Barong Tongkok (karet)</p> <p>Ekstensifikasi/Perluasan :</p> <p>Kelapa Sawit : Kamp.Lendian Permai Kec. Siluq Ngurai, Kec. Damai.                      Karet : Kec. Sekolaq Darat (Kamp.Sekolaq Darat, Kampung Sekolaq Muliaq, dan Kampung Sekolaq Joleq)                      Kakao : Kec. Nyuatan                      Kopi : Kec. Tering, Kampung Linggang Melapeh Kec. Linggang Bigung</p>
		Peningkatan produksi sektor peternakan	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)	Barong Tongkok, Linggang Bigung, Sekolaq Darat, Tering
		Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan ANKT di usaha perkebunan	Kab. Kutai Barat
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM	Kec. Barong Tongkok
		Peningkatan layanan infrastruktur	1. Pembangunan Jalan menuju Kab. Mahulu	Ruas Jalan Tering - Batas Mahulu
			2. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Kutai Barat

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
			3. Revitalisasi/penanganan Kawasan Kumuh	Besiq, Damai Kota, Cempedes
			4. Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi rawa	DIR. Resak
			5. Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang	Kab. Kutai Barat
			6. Pembenahan/penanganan Prasarana, Sarana, & Utilitas (PSU) permukiman untuk menunjang fungsi hunian	Barong Tongkok
			7. Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Barong Tongkok
		Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	1. Pembangunan PLTS Komunal 1 lokasi di Kubar	Anan Jaya
			2. Revitalisasi PLTS 1 lokasi di Kubar	Kendesiq
		Pengelolaan lingkungan hidup	1. Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Kab. Kutai Barat
			2. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Kab. Kutai Barat
			3. Pengendalian KARHUTLA	Kab. Kutai Barat
			4. Rehabilitasi diluar kawasan hutan	Kab. Kutai Barat
			5. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER	Kab. Kutai Barat
			6. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air danau dan udara <i>ambien passive sampler</i>	Pemantauan Kualitas Air Sungai: Sungai Mahakam Titik Tering Pemantauan Kualitas Udara Ambien: Transportasi (Jl. Perkantoran No.III Persimpangan Lampu Merah Bussiness Center, Kutai Barat), Perkantoran (Area Perkantoran Dinas Lingkungan Hidup Kubar), Pemukiman (Kantor Kecamatan Sekolaq Darat), Industri (Pabrik Tahu Kp. Sumber Sari)

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
			7. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup	Kab. Kutai Barat
3	Kutai Kartanegara	Peningkatan layanan pendidikan	1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa) 2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin) 3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB 4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB	SMAN 3 Loa Kulu Kecamatan Loa Kulu Kelurahan Sungai Payang, SMAN 3 Kota Bangun Kec. Kota Bangun Kelurahan Kedang Ipil, SMAN 3 Muara Muntai Kec. Muara Muntai Kelurahan Jantur Selatan SMAN 3 Loa Kulu Kecamatan Loa Kulu Kelurahan Sungai Payang, SMAN 3 Kota Bangun Kec. Kota Bangun Kelurahan Kedang Ipil, SMAN 3 Muara Muntai Kec. Muara Muntai Kelurahan Jantur Selatan SMAN 3 Loa Kulu Kecamatan Loa Kulu Kelurahan Sungai Payang, SMAN 3 Kota Bangun Kec. Kota Bangun Kelurahan Kedang Ipil, SMAN 3 Muara Muntai Kec. Muara Muntai Kelurahan Jantur Selatan SMAN 3 Loa Kulu Kecamatan Loa Kulu Kelurahan Sungai Payang, SMAN 3 Kota Bangun Kec. Kota Bangun Kelurahan Kedang Ipil, SMAN 3 Muara Muntai Kec. Muara Muntai Kelurahan Jantur Selatan
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah	Kecamatan Tenggarong, Kelurahan Melayu
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah	SMAN 3 Loa Kulu, SMAN 3 Kota Bangun, SMAN 3 Muara Muntai
			2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan	BLKI Bontang (cakupan wilayah peserta pelatihan sampai Kabupaten Kutai Kartanegara)
		Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan	Pendampingan mencapai legalitas kewirausahaan	Kec. Tenggarong, Kec. Tenggarong Seberang, Kec. Loa Kulu
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Muara Badak & Marangkayu

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
			Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Tenggarong & Tenggarong Seberang Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : Bukit Raya Kec. Tenggarong Seberang, Kel. Muara Jawa Kec. Muara Jaya, Desa Kota bangun III, Kel. Sungai Merdeka Kec. Samboja, Desa Loh Sumber Loa Kulu, Kel. Melayu Kec. Tenggarong, Desa Anggana Kec. Anggana, Desa Gn. Pegat Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) : Maluhu, Desa Loh Sumber Loa Kulu Korban Bencana : semua Kecamatan
		Pengembangan Kawasan Strategi Pariwisata Provinsi	Destinasi ekowisata berkelas dunia yang mendorong ekonomi kerakyatan (Pengembangan Danau Kaskade)	Danau semayang (Kecamatan Kenohan)-Danau Melintang (Kecamatan Muara Wis)
		Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan	Intensifikasi : Kelapa Sawit : Kec. muara Leka, Desa Mekar Jaya Kec. Sebulu, Desa Teluk Muda Kec. Kenohan Karet : Poktan Tunas Harapan Kakao : Desa. Sumber Sari Kec. Kota Bangun Kelapa : Kel. Muara Jawa Ilir Lada: Desa Batuah  Ekstensifikasi/Perluasan : Kelapa Sawit : Desa Prian Kec. Muara Muntai, Desa Santan Ilir Kec. Marang Kayu, Desa Tuana Tua Kec. Kenohan Karet : Desa jembayan Dalam Kec. Loa Kulu Kopi : Kamp. Kopi Luwak kecamatan Marangkayu
		Peningkatan produksi sektor peternakan	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)	Kota Bangun, Loa Kulu, Marang Kayu, Muara Amuntai, Muara Kaman, Muara wis, Semboja, Tenggarong, Tenggarong Seberang

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Peningkatan produktivitas TPH	Pengembangan Kawasan Tanaman Hortikultura (pisang)	Benamang
		Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan ANKT di usaha perkebunan	Kab. Kutai Kertanegara
		Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Udang, Rumput Laut, Bandeng, Kepiting, dan Rajungan)	Kab. Kutai Kertanegara
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM	Kec. Tenggarong Kota
		Peningkatan produksi / hilirisasi produk potensial daerah	Pembangunan Rumah Produksi Bersama	Desa Tuana Tuha Kec Kenohan
		Peningkatan layanan infrastruktur	1. Pemeliharaan Jalan Provinsi	Ruas Jalan Patung Lembuswana - Sebulu dan Ruas Jalan yang mendukung perekonomian
			2. Rekonstruksi Jalan Provinsi	
			3. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Kutai Kartanegara
			4. Peningkatan layanan suplai air minum skala regional	Sekitar Marangkayu & Muara Badak
			5. Revitalisasi/penanganan kawasan kumuh	Muara Badak
			6. Pembangunan jaringan distribusi listrik	Desa Prangat baru, kec. marang kayu, kab Kukar
			7. Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi permukaan	DI. Sungai Buluh
			8. Pengendalian banjir	Perkuatan Tebing Sungai Sebuntal Marangkayu
			9. Koordinasi dan penyiapan <i>readiness criteria</i> pengelolaan air limbah domestik skala regional	Loa Janan, Perbatasan dengan Kutim, Bontang
			10. Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Tenggarong

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)	
		Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	1. Pembangunan instalasi biogas	Kab. Kutai Kartanegara	
		Pengelolaan lingkungan hidup	1. Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Kab. Kutai Kartanegara	
			2. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Kab. Kutai Kartanegara	
			3. Pengendalian KARHUTLA	Kab. Kutai Kartanegara	
			4. Rehabilitasi diluar kawasan hutan	Kab. Kutai Kartanegara	
			5. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER	Kab. Kutai Kartanegara	
			6. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air danau, air laut dan udara <i>ambien passive sampler</i>	Pemantauan Kualitas Air Sungai: Sungai Mahakam (Titik Anggana, Bloro, Kumala), Sungai Kedang Kepala (Titik Desa Kedang Kepala dan Desa Siran), Sungai Belayan (Titik Desa Sebelimbingan dan Muara Sungai Belayan), Sungai Santan (Titik Jembatan Marangkayu Santan Ulu dan Jembatan Santan Tengah)	
				Pemantauan Kualitas Udara Ambien: Transportasi (Simpang 3 Jam Bentong, Jl. Mulawarman, Kukar), Perkantoran (Dinas Perikanan Tenggarong), Pemukiman (Kampung Mangkurawang, Kukar), Industri (Industry Ready Mix, Kec. Tenggarong)	
				Pemantauan Kualitas Air Laut: Titik Pantai Pemedas, Pantai Tanah Merah, Pantai Mutiara Indah, Pantai Samboja, Pantai Keresik, Tanjung Sembilang	
			7. Pemantauan dan penanganan sampah laut	Kab. Kutai Kartanegara	
			8. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup	Kab. Kutai Kartanegara	

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
4	Kutai Timur	Peningkatan layanan pendidikan	1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)	SMAN 2 Sandaran Kec.Sandaran Kelurahan Susuk Luar, SMKN 1 Rantau Pulung Kec. Rantau Pulung Kelurahan Margo Mulyo, SMKN 1 Sangkulirang Kec. Sangkulirang Kelurahan Kerayaan
			2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)	SMAN 2 Sandaran Kec. Sandaran Kelurahan Susuk Luar
			3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB	SMAN 2 Sandaran Kec. Sandaran Kelurahan Susuk Luar
			4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB	SMAN 2 Sandaran Sandaran Kec. Sandaran Kelurahan Susuk Luar, SMKN 1 Muara Wahau Kec. Muara Wahau Kelurahan Karya Bakti, SMKN 1 Sangkulirang Kec. Sangkulirang Kelurahan Kerayaan, SMKN 1 Telen Kec. Telen Kelurahan Muara Pantun, SMKN 2 Bengalon Kec. Bengalon Kelurahan Tepian Indah, SMKN 2 Sangkulirang Kec. Sangkulirang Kelurahan Mandu Pantai Sejahtera, SMKN 1 Bengalon Kec. Bengalon Kelurahan Sepaso Barat, SMKN 1 Kongbeng Kec. Kongbeng Kelurahan Marga Mulia, SMKN 1 Muara Bengkal Kec. Muara Bengkal Kelurahan Muara Bengkal Ulu, SMKN 1 Sangata Utara Kec.Sangatta Utara, SMKN 2 Sangata Utara Kec.Sangatta Utara Kelurahan Sanggatta Utara, SMKN 1 Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kelurahan Bukit Makmur
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah	Kecamatan Sangatta Utara, Kelurahan Teluk Lingga
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah	SMAN 2 Sandaran
			2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan	BLKI Bontang (cakupan wilayah peserta pelatihan sampai Kabupaten Kutai Timur)

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Peningkatan Peran BUMDes Aktif dan Berbadan Hukum	Pelatihan dan Pendampingan bagi Bumdes	
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Teluk Pandan & Sanggatta Selatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Sangatta Selatan & Sangatta Utara Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : Simpang Tiga Bontang-Sanggatta, Teluk Lingga, Dea Miau Baru, Kec. Sangatta Selatan Korban Bencana : semua Kecamatan
		Pengembangan Kawasan Strategi Pariwisata Provinsi (KSPP) 2	Pengembangan Destinasi, SDM dan Promosi	Karst Sangkulirang - Mangkalihat (Kecamatan Sangkulirang)
		Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan	Intensifikasi : Kelapa Sawit : Kec. Sangkulirang Karet : Kec. Long Mesangat Kakao : Kec. Kaubun Aren : Kecamatan Kaliorang  Peremajaan Karet : Kec. Long Mesangat Kakao : Kecamatan Busang  Ekstensifikasi/Perluasan : Kelapa Sawit : Kecamatan Karang Kakao : Lada : Kec. Batu Ampar
		Peningkatan produksi sektor peternakan	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)	Kaliorang, Kaubun, Kongbeng, Muara Wahau, Sangkulirang

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Udang, Rumput Laut, Bandeng, Kepiting, dan Rajungan)	Udang dan Bandeng : Kec. Kaliorang (Desa Selangkau); Kec. Bengalon (Desa Muara Bengalon), Kec. Sangatta Selatan (Desa Teluk Singkama, Desa Sangkima dan Kel. Singa Geweh)
		Peningkatan produktivitas TPH	Pengembangan Kawasan Tanaman Hortikultura (pisang)	Rumput Laut : Kec. Sangatta Selatan (Desa Teluk Singkama Kaibun, Kaliorang, Bengalon, Ma. Ancalong
		Peningkatan pemanfaatan biomassa perkebunan	Pemanfaatan limbah sawit menjadi bioenergi	Kec. Muara Wahau
		Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan ANKT di usaha perkebunan	Kab. Kutai Timur
		Pengembangan hilirisasi industri	Dukungan Pengembangan KEK MBTK	Kec. Kaliorang
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM	Sangatta
		Peningkatan produksi / hilirisasi produk potensial daerah	Pembangunan Rumah Produksi Bersama	Sangatta
		Peningkatan layanan infrastruktur	1. Rekonstruksi Jalan Provinsi	Ruas Jalan Kaliorang - Talisayan
			2. Pembangunan Jalan dan Jembatan yang mendukung perekonomian	Akses jalan dan jembatan Nibung
			3. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Kutai Timur
			4. Pembangunan infrastruktur dalam KEK MBTK	
			5. Pengendalian banjir	Normalisasi Sungai Sangatta
			6. Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang	Kab. Kutai Timur
			7. Koordinasi dan upaya peningkatan akses layanan air minum skala regional	Kec. Teluk Pandan

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
			8. Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Kutai Timur
		Pengelolaan lingkungan hidup	1. Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Kab. Kutai Timur
			2. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Kab. Kutai Timur
			3. Pengendalian KARHUTLA	Kab. Kutai Timur
			4. Rehabilitasi diluar kawasan hutan	Kab. Kutai Timur
			5. Pengelolaan KBEP Karst Mangkalihat Ulu	Kab. Kutai Timur
			6. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER	Kab. Kutai Timur
			7. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air danau, air laut dan udara <i>ambien passive sampler</i>	Pemantauan Kualitas Air Sungai: Sungai Bontang Titik Jembatan Jl. Poros Bontang-Samarinda Km. 8 Kutai Timur
				Pemantauan Kualitas Udara Ambien: Transportasi (Jl. A. Wahab Syahrane, Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kab. Kutim, Kutai Timur), Perkantoran (Kantor PDAM Unit Perkantoran Bukit Pelangi), Pemukiman (Permukiman Jln. D.I. Panjaitan), Industri (Simpang Security Gate Pelangi)
				Pemantauan Kualitas Air Laut: Titik Pantai Kenyamukan, Pantai Teluk Lombok, dan Pantai Teluk Kaba
			8. Pemantauan dan penanganan sampah laut	Kab. Kutai Timur
			9. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup	Kab. Kutai Timur

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
5	Berau	Peningkatan layanan pendidikan	1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)	SMAN 11 Berau Kecamatan Talisayan Kelurahan Eka Sapta, SMAN 13 Berau Kecamatan Talisayan Kelurahan Campur Sari, SMAN 3 Berau Kelurahan Talisayan Kecamatan Talisayan, SMKN 6 Berau Kec.Teluk Bayur Kelurahan Desa Labanan
			2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)	SMAN 11 Berau Kecamatan Talisayan Kelurahan Eka Sapta, SMAN 13 Berau Kecamatan Talisayan Kelurahan Campur Sari, SMAN 3 Berau Kelurahan Talisayan Kecamatan Talisayan
			3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB	SMAN 11 Berau Kecamatan Talisayan Kelurahan Eka Sapta, SMAN 13 Berau Kecamatan Talisayan Kelurahan Campur Sari, SMAN 3 Berau Kelurahan Talisayan Kecamatan Talisayan
			4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB	SMAN 11 Berau Kecamatan Talisayan Kelurahan Eka Sapta, SMAN 13 Berau Kecamatan Talisayan Kelurahan Campur Sari, SMAN 3 Berau Kelurahan Talisayan Kecamatan Talisayan, SMKN 7 Berau Kecamatan Tabalar, SMKN 8 Berau Kecamatan Talisayan Desa Bumi Jaya, SMKS Insan Cemerlang Kec.Tanjung Redeb Kelurahan Tanjung Redeb , SMKN 3 Berau Kecamatan Pulau Derawan Kelurahan Tanjung Batu, SMKN 2 Berau Kecamatan Tanjung Redeb Kelurahan Sungai Bedungun, SMKN 1 Berau Kecamatan Tanjung Redeb Kelurahan Tanjung Redeb, SMKN 6 Berau Kecamatan Gunung Tabur Kelurahan Merancang Ulu, SMKS Sehat Persada Kecamatan Tanjung Redeb Kelurahan Gunung Panjang
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah	Kecamatan Tanjung Redeb, Kelurahan Karang Ambon
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah	SMAN 11 Berau, SMAN 13 Berau, SMAN 3 Berau

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
			2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan	BLKI Bontang (cakupan wilayah peserta pelatihan sampai Kota Berau)
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Tabalar & Talisayan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Tanjung Redeb & Gunung Tabur Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : Sambaliung, Talisayan, Kec. Teluk Bayur, Kel. Karang Ambun Korban Bencana : semua Kecamatan
		Pengembangan Kawasan Strategi Pariwisata Provinsi (KSPP) 1	Pengembangan Destinasi, SDM dan Promosi	Kaniungan - Biduk-biduk (Kecamatan Biduk Biduk), Maratua (Kecamatan Maratua) dan sekitarnya
		Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan	Intensifikasi : Kakao : Kampung. Gn. Tabur Lada : Kec. Gunung Tabur Kelapa : Kampung Tubaan, Kecamatan Biduk-Biduk Pala : Kampung Teluk Sumbang, Kampung Batu-Batu  Peremajaan Kakao : Kec. Kelay Kelapa : Kec. Biduk-biduk  Ekstensifikasi/Perluasan : Kakao Kec. Sambaliung
		Peningkatan produksi sektor peternakan	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)	Biduk Biduk, Gunung Tabur, Sambaliung, Talisayan, Teluk Bayur

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Udang, Rumput Laut, Bandeng, Kepiting, dan Rajungan)	Udang dan Bandeng : Kec. Sambaliung (Desa Kampung Suaran); Kep. Derawan (Desa Kasai dan Desa Pegat Tumbuk)  Rajungan : Kep. Derawan (Desa Tanjung Batu)  Kepiting : Kec. Batu Putih (Kampung Batu Putih); Kep. Derawan (Desa Tabalar)
		Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan ANKT di usaha perkebunan	Kab. Berau
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM	Kec. Tanjung Redeb
		Peningkatan produksi / hilirisasi produk potensial daerah	Pembangunan Rumah Produksi Bersama	Kec. Tanjung Redeb
		Peningkatan layanan infrastruktur	1. Rekonstruksi Jalan Provinsi	Ruas Jalan Tanjung Redeb - Talisayan
	2. Pemeliharaan Jalan Provinsi			
	3. Penanganan Rumah tidak layak huni		Berau	
	4. Pembangunan pengaman pantai		Pantai Talisayan - Dumaring, Pantai Biduk-biduk, Pantai Balikukup, Pantai Kaniungan, Pantai Biduk-biduk Kamp. Giring-giring	
	5. Peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi permukaan		DI. Biatan, DI. Labanan, DI. Merancang, DI. Semurut - Buyung buyung	
	6. Revitalisasi/penanganan kawasan kumuh		Kec. Teluk Bayur, Kec. Sambaliung	
	7. Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli		Tanjung Redeb	

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)	
		Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	1. Pembangunan PLTS Komunal	Kab. Berau (Desa Mapulu)	
		Pengelolaan lingkungan hidup	1. Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Kab. Berau	
			2. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Kab. Berau	
			3. Pengendalian KARHUTLA	Kab. Berau	
			4. Rehabilitasi diluar kawasan hutan	Kab. Berau	
			5. Pengelolaan KBEP Karst Mangkalihat Pesisir	Kab. Berau	
			6. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER	Kab. Berau	
			7. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air danau, air laut dan udara <i>ambien passive sampler</i>	Pemantauan Kualitas Air Sungai: Sungai Segah (Titik Hulu PT. BBE, Hilir Berau Coal, Jembatan Gunung Tabur, Kerator Gunung Tabur), Sungai Kelay (Titik Kantor Bupati dan Keraton Sambaliung)	
					Pemantauan Kualitas Udara Ambien: Transportasi (Perempatan Jl. H. Isa 2 APT. Pranoto, Berau), Perkantoran (Kantor DPMPTSP, Berau), Pemukiman (Perum Korpri, Jl. Murjani 3), Industri (PLTU Berau)
					Pemantauan Kualitas Air Laut: Titik Pulau Derawan dan Pulau Panjang
		8. Pemantauan dan penanganan sampah laut	Kab. Berau		
		9. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup	Kab. Berau		

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
6	PPU	Peningkatan layanan pendidikan	1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)	SMAN 1 PPU Kecamatan Penajam Kelurahan Penajam, SMK Inne Dongwha Kec Penajam Kelurahan Gresik , SMKN 1 Penajam Paser Utara Kelurahan Bukit Raya Kecamatan Sepaku, SMKN 4 Penajam Paser Utara Kelurahan Kecamatan Waru Kelurahan Sesulu
			2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)	SMAN 1 PPU Kecamatan Penajam Kelurahan Penajam
			3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB	SMAN 1 PPU Kecamatan Penajam Kelurahan Penajam
			4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB	SMAN 1 PPU SMAN 1 PPU Kecamatan Penajam Kelurahan Penajam, SMKN 1 Penajam Paser Utara Kelurahan Bukit Raya Kecamatan Sepaku, SMKN 2 PPU Penajam Kelurahan Nipah Nipah, SMKN 3 PPU Kecamatan Babulu Kelurahan Babulu Darat, SMKN 4 PPU Kecamatan Babulu Kelurahan Babulu Darat, SMKN 5 PPU Kecamatan Sepaku Kelurahan Binuang, SMK Inne Dongwha Kec Penajam Kelurahan Gresik
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah	Kecamatan Penajam, Kelurahan Penajam
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah	SMAN 1 PPU
			2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan	BLKI Balikpapan (cakupan wilayah peserta pelatihan sampai Kabupaten PPU)
		Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan	Pendampingan mencapai legalitas kewirausahaan	Kec. Penajam, Kec. Petung
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Penajam & Sepaku Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Penajam & Sepaku Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : Kel.

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
				Nenang Kec. Penajam, Kel. Petung Kec. Penajam, Desa Girimukti, Kel. Gunung Seteleng, Desa Rawa Mulia Kec. Babulu Korban Bencana : semua Kecamatan
		Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan	Intensifikasi : Kelapa Sawit : Desa argomulyo, Poktan Sri Rejeki A Lada : Poktan Sumber Urip, Poktan Sumber Wangi, Poktan Dewi Sri A Kelapa : Kelurahan Pejala  Ekstensifikasi/Perluasan : Kelapa Sawit : Poktan Suka Maju
		Peningkatan produksi TPH	Pengembangan komoditi tanaman pangan	Kab. Penajam Paser Utara (Kec. Penajam (Desa Sidorejo), Kec. Babulu Desa. Gunung Mulia, Desa Sumber Sari)
		Peningkatan produksi sektor peternakan	Pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT)	Babulu, Penajam, Sepaku, Waru
		Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Udang, Rumput Laut, Bandeng, Kepiting, dan Rajungan)	Udang : Kec. Penajam (Desa Sesumpu)  Rumput Laut : Kec. Penajam (Desa Sungai Parit, Desa Api-api, Desa Waru)  Kepiting : Kec. Penajam (Desa Janabora)  Bandeng : Kec. Penajam (Desa Babulu Laut)
		Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan ANKT di usaha perkebunan	Kab. Penajam Paser Utara

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Pengembangan hilirisasi industri	Dukungan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Buluminung	Kec. Penajam
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM	Kec. Penajam
		Peningkatan layanan infrastruktur	1. Pemeliharaan Jalan Provinsi	Ruas Jalan Prioritas Provinsi (mendukung KSP KI Buluminung)
			2. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	PPU
			3. Pembangunan pengaman pantai	Pantai Tanjung Jumlai
			4. Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang	Kab. PPU
			5. Koordinasi dan upaya peningkatan akses layanan air minum & air limbah skala regional	Babulu, daerah berbatasan dengan IKN & Balikpapan
			6. Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Penajam
		Pengelolaan lingkungan hidup	1. Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Kab. PPU
			2. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Kab. PPU
			3. Pengendalian KARHUTLA	Kab. PPU
			4. Rehabilitasi diluar kawasan hutan	Kab. PPU
			5. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER	Kab. PPU
				Pemantauan Kualitas Air Sungai: Sungai Sepaku (Titik Nursery Suring dan Titik Jembatan Sei Sepaku)

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
			<p>6. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air danau, air laut dan udara <i>ambien passive sampler</i></p> <p>8. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup</p>	<p>Pemantauan Kualitas Udara Ambien: Transportasi (Jl. Propinsi Km 46, Babulu Darat, PPU), Perkantoran (Kantor Camat Babulu), Pemukiman (Jl. Sumber Agung Labangka Barat, PPU) Industri (PT. Sumber Bunga Sawit Lestari)</p> <p>Pemantauan Kualitas Air Laut: Titik Pantai Tanjung Jumlai, Pantai Corong dan Pelabuhan TPI Api-api</p> <p>Kab. PPU</p>
7	Mahakam Ulu	<p>Peningkatan layanan pendidikan</p> <p>Peningkatan layanan kesehatan</p>	<p>1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)</p> <p>2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)</p> <p>3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB</p> <p>4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB</p> <p>5. Optimalisasi <i>Boarding School</i></p> <p>6. Pemberian tambahan insentif bagi seluruh tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan di daerah pedalaman dan 3T (GTK)</p> <p>Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah</p>	<p>SMAN 1 Long Bagun Kecamatan Long Bagun Kelurahan Ujoh Bilang, SMAN 1 Long Pahangai Kecamatan Long Pahangai Kelurahan Long Pahangai I</p> <p>SMAN 1 Long Bagun Kecamatan Long Bagun Kelurahan Ujoh Bilang, SMAN 1 Long Pahangai Kecamatan Long Pahangai Kelurahan Long Pahangai I</p> <p>SMAN 1 Long Bagun Kecamatan Long Bagun Kelurahan Ujoh Bilang, SMAN 1 Long Pahangai Kecamatan Long Pahangai Kelurahan Long Pahangai I</p> <p>SMAN 1 Long Bagun Kecamatan Long Bagun Kelurahan Ujoh Bilang, SMAN 1 Long Pahangai Kecamatan Long Pahangai Kelurahan Long Pahangai I</p> <p>SMAN 1 Long Bagun Kecamatan Long Bagun Kelurahan Ujoh Bilang, SMAN 1 Long Pahangai Kecamatan Long Pahangai Kelurahan Long Pahangai I</p> <p>SMAN 1 Long Bagun Kecamatan Long Bagun Kelurahan Ujoh Bilang, SMAN 1 Long Pahangai Kecamatan Long Pahangai Kelurahan Long Pahangai I</p> <p>Kecamatan Long Bagun, Kampung Ujoh Bilang</p>

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah	BLKI Balikpapan (cakupan wilayah peserta pelatihan sampai Kabupaten Mahakam Ulu)
			2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan	BLKI Bontang: Desa Long Apari, Kec. Long Apari
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Long Bagun & Ujoh Bilang Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Long Bagun & Ujoh Bilang Korban bencana : semua kecamatan
		Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan	Ekstensifikasi/Perluasan : Kakao : Poktan Mambes II 20, Poktan Mambes III 20, Poktan Mambes IV 20, Poktan Maju Makmur 10
		Pengelolaan Areal dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) di Usaha Perkebunan	Perlindungan ANKT di usaha perkebunan	Kab. Mahakam Ulu
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM	Ujoh Bilang
		Peningkatan layanan infrastruktur	1. Pembangunan Jalan Perbatasan 2. Pembangunan Jembatan Perbatasan 3. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni 4. Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Ruas Jalan Batas Kubar - Long Bagun - Long Pahangai Kab. Mahakam Ulu Mahakam Ulu
		Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Pembangunan PLTS Komunal	Batuk Kelo Kab. Mahakam Ulu
		Pengelolaan lingkungan hidup	1. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) 2. Pengendalian KARHUTLA 3. Rehabilitasi diluar kawasan hutan	Kab. Mahakam Ulu Kab. Mahakam Ulu Kab. Mahakam Ulu

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
			4. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER	Kab. Mahakam Ulu
			5. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, dan udara <i>ambien passive sampler</i>	Pemantauan Kualitas Air Sungai: Sungai Boh titik Muara Sungai Boh, Sungai Mahakam (Titik Nyan, Batu Kelu, Long Bagun) Pemantauan Kualitas Udara Ambien: Transportasi (Jl. Kudci Simpang Tiga Pelabuhan Ujoh Bilang), Perkantoran (Jl. Cempedak), Pemukiman (Jl. Likur Ulo Simpang Empat Kantor Kampung Long Bagun Ulu), Industri (Jl. Poros Long Melaham-Ujoh Bilang)
			6. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup	Kab. Mahakam Ulu
8	Balikpapan	Peningkatan layanan pendidikan	1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)	SMAN 8 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Barat Kelurahan Margo Mulyo, SMAN 4 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Sepinggian, SMAN 6 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara Kelurahan Batu Ampar, SMKN 7 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Timur Kelurahan Lemaru, SMK Adzkiya Balikpapan Kecamatan Balikpapan Timur Kelurahan Lemaru, SMKS Muhammadiyah 1 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Tengah Kelurahan Sumber Rejo
			2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)	SMAN 8 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Barat Kelurahan Margo Mulyo, SMAN 4 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Sepinggian, SMAN 6 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara Kelurahan Batu Ampar

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
			3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB	SMAN 8 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Barat Kelurahan Margo Mulyo, SMAN 4 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Sepinggán, SMAN 6 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara Kelurahan Batu Ampar
			4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB	SMAN 8 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Barat Kelurahan Margo Mulyo, SMAN 4 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Sepinggán, SMAN 6 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara Kelurahan Batu Ampar, SMKN 5 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Timur Kelurahan Lemaru, SMKN 6 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara Kelurahan Graha Indah, SMKN 1 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Sepinggán Raya, SMKN 4 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan Kelurahan Gunung Bahagia, SMKN 5 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Timur Kelurahan Lemaru, SMKS Muhammadiyah 1 Balikpapan Kecamatan Balikpapan Tengah Kelurahan Sumber Rejo, SMKN 3 Balikpapan, SMKN 2 Balikpapan Kecamatan Balikpapan utara Kelurahan Gunung Sam
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprás Fasyankes Tingkat Pertama di daerah	Kecamatan Balikpapan Kota, Kelurahan Klandasan Ulu
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah	SMAN 8 Balikpapan, SMAN 4 Balikpapan, SMAN 6 Balikpapan BLKI Balikpapan: Kelurahan Sepinggán Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan
			2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan	BLKI Balikpapan (cakupan wilayah peserta pelatihan di Kota Balikpapan)
		Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan	Pendampingan mencapai legalitas kewirausahaan	Kec. Balikpapan Kota, Kec. Balikpapan Tengah

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Balikpapan Selatan & Balikpapan Kota Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Balikpapan Tengah & Balikpapan Barat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : Batu Ampar, Kel. Balikpapan Tengah Kec. Balikpapan Barat, Kel. Sumber Rejo, Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan, Kel. Manggar Kec. Balikpapan Timur, Kel. Teritip Kec. Balikpapan Timur, Kel. Gunung Samarinda Baru Kec. Balikpapan Utara, Baru Tengah, Kel. Karang Joang, Kel. Damai Kec. Balikpapan Kota, Gunung Sari Ulu Kec. Balikpapan Tengah Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) : Kel. Sepinggian Kec. Balikpapan Selatan Korban Bencana : semua Kecamatan
		Pengembangan hilirisasi industri	Dukungan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Kariangau	Kel. Kariangau
		Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan	Intensifikasi : Lada : Kel. Karang Joang (Poktan Harapan Sejahtera), Kelurahan Teritip (Poktan Agri Sejahtera dan Poktan Jalan Beimbai), Kelurahan Karang Joang (Poktan Bunga Salak) , Kelurahan Lamaru (Poktan Mentari Jaya Baru)
		Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Rumput Laut dan Kepiting)	Rumput Laut : Pokdakan Sumber Laut Berjaya, Pokdakan Nestapa  Kepiting : Pokdakan Soka Teritip Kaltim dan Pokdakan Mina Barokah)
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM	Balikpapan

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Peningkatan layanan infrastruktur	1. Pemeliharaan Jalan Provinsi	Ruas Jalan Prioritas Provinsi (mendukung KSP KI Kariangau)
			2. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Balikpapan
			3. Revitalisasi/penanganan Kawasan Kumuh	Klandasan Ilir
			4. Pembangunan pengaman pantai	Pantai Manggar
			5. Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang	Kota Balikpapan
			6. Koordinasi dan upaya peningkatan suplai air curah untuk air minum skala regional	Kota Balikpapan (daerah berbatasan dengan PPU)
			7. Pembenahan/penanganan Prasarana, Sarana, & Utilitas (PSU) permukiman untuk menunjang fungsi hunian	-Permukiman Mentarang -Kel. Manggar
			8. Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Balikpapan
			9. Pengendalian banjir	Drainase Sekunder Depsos Bawah
		Pemanfaatan energi baru dan terbarukan	Pembangunan PLTS Atap Balikpapan 32 kWp	Kota Balikpapan
		Pengelolaan lingkungan hidup	1. Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah DAS	Kota Balikpapan
			2. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Kota Balikpapan
			3. Pengendalian KARHUTLA	Kota Balikpapan
			4. Rehabilitasi diluar kawasan hutan	Kota Balikpapan
			5. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER	Kota Balikpapan
				Pemantauan Kualitas Air Sungai: Manggar Besar (Titik Sungai 28 dan Titik Pos PON 1)

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
			<p>6. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air laut, udara <i>ambien passive sampler</i></p> <p>7. Pelaksanaan uji emisi kendaraan roda 4</p> <p>8. Pemantauan dan penanganan sampah laut</p> <p>9. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup</p>	<p>Pemantauan Kualitas Udara Ambien: Transportasi (Jl. Marsma Iswahyudi Depan Kantor BMKG Kota Balikpapan), Perkantoran (Area Perkantoran PT. Telkom, Jl. A Yani Kota Balikpapan), Pemukiman (Perum. Korpri Jln. Klauss Reppe Km.7 Rusunawa Balikpapan), Industri (Kawasan Industri Km. 13 Karangjoang PT. Komatsu Remanufacturing Asia Balikpapan)</p> <p>Pemantauan Kualitas Air Laut: Titik Mangrove Pendopo Teritip, Benua Patra, Plaza Balikpapan, Balikpapan Super Blok, Batakan, Perumahan Auri, Pantai Lamaru.</p> <p>Kota Balikpapan</p> <p>Kota Balikpapan</p> <p>Kota Balikpapan</p>
9	Samarinda	Peningkatan layanan pendidikan	1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)	SMAN 16 Samarinda Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Gunung Kelua, SMKN 10 Samarinda Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Tanah Merah, SMKN 11 Samarinda Kecamatan Palaran Kelurahan Simoang Pasir, SMKN 15 Samarinda Kecamatan Sungai Kunjang Kelurahan Lok Bahu, SMKN 20 Samarinda Kecamatan Sambutan Kelurahan Sungai Kapih, SMKN 8 Samarinda Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Harapan Baru, SMKN 14 Samarinda Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Tani Aman, SMKN 18 Samarinda Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Lempake, SMKN 9 Samarinda Kecamatan Samarinda Ulu

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
				Kelurahan Dadi Mulya, SMKN 12 Samarinda Kecamatan Sungai Kunjang Kelurahan Loa Buah, SMKS Cendana DDI Samarinda Kecamatan Sungai Kunjang Kelurahan Teluk Lerong ulu, SMKS Miftahul Ulum Samarinda Kecamatan Sambutan Kelurahan Sambutan, SMKNS Terpadu Madina Samarinda Kecamatan Sungai Pinang Kelurahan Mugirejo
			2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)	SMAN 16 Samarinda Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Gunung Kelua
			3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB	SMAN 16 Samarinda Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Gunung Kelua
			4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB	SMAN 16 Samarinda Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Gunung Kelua, SMKN 8 Samarinda Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Harapan Baru, SMKN 7 Samarinda, SMKN 10 Samarinda Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Tanah Merah, SMKN 11 Samarinda Kecamatan Palaran Kelurahan Simoang Pasir, SMKN 15 Samarinda Kecamatan Sungai Kunjang Kelurahan Lok Bahu, SMKN 2 Samarinda Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Air Hitam, SMN 14 Samarinda Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan Tani Aman, SMKN 5 Samarinda Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Selatan, SMKS Cendana DDI Samarinda Kecamatan Sungai Kunjang Kelurahan Teluk Lerong ulu, SMKN 9 Samarinda Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Dadi Mulya, SMKN 17 Samarinda Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Air Hitam, SMKS Kesehatan Samarinda, SMKN 19 Samarinda Kecamatan Palaran Kelurahan Rawa Makmur, SMKN 6 Samarinda Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Utara, SMKN 8 Samarinda Kecamatan Loa Janan Ilir Kelurahan

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
				Harapan Baru, SMKN Pelayaran Kecamatan Samarinda Utara Kelurahan Sempaja Utara, SMKN 1 Samarinda Kecamatan Samarinda Ulu Kelurahan Dadi Mulya, SMKS Miftahul Ulum Samarinda Kecamatan Sambutan Kelurahan Sambutan
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah	Kecamatan Samarinda Kota, Kelurahan Bugis
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah	SMAN 16 Samarinda
			2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan	BLKI Balikpapan (cakupan wilayah peserta pelatihan sampai Kota Samarinda)
		Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan	Pendampingan mencapai legalitas kewirausahaan	Kec. Samarinda Kota, Kec. Sungai Pinang, Kec. Samarinda Ilir, Kec. Samarinda Ulu
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Palaran & Loa Janan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Samarinda Kota & Sungai Pinang Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : Kel. Teluk Lerong, Kel. Sidodadi, Kel. Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu, Kel. Selili, Kel. Sungai Pinang Dalam Kec. Sungai Pinang, Kel. Sambutan Kec. Sambutan, Kel. Sempaja Selatan Kec. Samarinda Utara, Kel. Simpang Pasir Kec. Palaran, Kel. Lempake Kec. samarinda Utara, Kel. Sempaja Utara Kec. samarinda Utara Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) : Kel. Sempaja Barat Kec. Samarinda samarinda Utara, Kec. Sungai Pinang, Kel. Teluk Lerong Kec. Samarinda Ulu Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (LKS-PD) :

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
				Kec. Sungai Pinang, Sungai Kunjang Korban Bencana : semua Kecamatan
		Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pengembangan Destinasi dan Promosi Kampung Ketupat	Samarinda Seberang (Kecamatan Samarinda Seberang)
		Peningkatan produktivitas komoditi unggulan perkebunan	Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan	Intensifikasi : Kelapa Sawit : Poktan Subur Makmur Kel. Bentuas Karet : Kec. Bentuas (Poktan Tani Maju), Kec. Bukit Pinang (Poktan Tani Melati), Poktan Rawa Bakung, Poktan Pinang Raya)
		Peningkatan sistem distribusi perdagangan	Pengembangan pusat distribusi barang bahan pokok ( <i>food station</i> )	Samarinda Kota
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM	Samarinda Kota
		Peningkatan layanan infrastruktur	1. Revitalisasi Terminal Tipe B	Terminal Tipe B Sungai Kunjang
			2. Pembangunan Jalan yang mendukung perekonomian	Akses Menuju Bandara APT Pranoto
			3. Pemeliharaan jalan Provinsi	Ruas Jalan Prioritas Provinsi (mendukung KSP Kawasan Perdagangan dan Jasa)
			4. Pemberian bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi keluarga pra sejahtera	Kota Samarinda
			5. Revitalisasi/penanganan kawasan kumuh	Karang Mumus II (Temindung Permai, Sempaja Selatan) dan Sungai Kapih (Selili, Sungai Kapih)
			6. Pengendalian banjir	Normalisasi Sungai Karang Mumus, Normalisasi Sungai Sub Sistem Karang Asam Besar, Normalisasi Sungai Sub Sistem Karang Asam Kecil,
			7. Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang	Kota Samarinda

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
			8. Penyiapan <i>readiness criteria</i> sistem pengelolaan limbah domestik terpusat skala regional	Kota Samarinda
			9. Pembenahan/penanganan Prasarana, Sarana, & Utilitas (PSU) permukiman untuk menunjang fungsi hunian	Kota Samarinda
			10. Penyediaan Drainase Perkotaan	Rapak Dalam, Loa Jalan
		Pengelolaan lingkungan hidup	1. Rehabilitasi diluar kawasan hutan	Kota Samarinda
			2. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER	Kota Samarinda
			3. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, udara <i>ambien passive sampler</i>	Pemantauan Kualitas Air Sungai: Sungai Mahakam (Titik Kalamur, Titik Depan Kantor Gubernur, Titik Palaran), Sungai Karang Mumus (Titik Pampang Dalam dan Titik Jembatan Desa Pampang)
				Pemantau Kualitas Udara Ambien: Transportasi (Taman Simpang Empat Jl. Basuki Rahmat, Samarinda), Perkantoran (Pertokoan Merak Square, Samarinda), Pemukiman (Jl. Mt. Haryono Perumahan Rawasari 1, Samarinda), Industri (Pt. Saga Trade Murni Jl. Sultan Alimudin, Samarinda)
			4. Pelaksanaan uji emisi kendaraan roda 4	Kota Samarinda
			5. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup	Kota Samarinda
10	Bontang	Peningkatan layanan pendidikan	1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)	SMAN 2 Bontang Kecamatan Bontang Selatan Kelurahan Tanjung Laut
			2. Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)	SMAN 2 Bontang Kecamatan Bontang Selatan Kelurahan Tanjung Laut

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
			3. Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB	SMAN 2 Bontang Kecamatan Bontang Selatan Kelurahan Tanjung Laut
			4. Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB	SMAN 2 Bontang Kecamatan Bontang Selatan Kelurahan Tanjung Laut, SMKN 1 Bontang Kecamatan Bontang Utara Kelurahan Gunung Elai, SMKN 2 Bontang Kecamatan Bontang Selatan Kelurahan Tanjung Laut Indah, SMKN 3 Bontang Kecamatan Bontang Barat Kelurahan Gunung Telihan, SMKN 4 Bontang Kecamatan Bontang Selatan Kelurahan Bontang Lestari
		Peningkatan layanan kesehatan	Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama di daerah	Kecamatan Bontang Selatan, Kelurahan Bontang Lestari
		Peningkatan kompetensi tenaga kerja	1. Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah	SMAN 2 Bontang BLKI Bontang :Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang
			2. Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan	BLKI Bontang (cakupan wilayah peserta pelatihan di Kota Bontang)
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan di BLKI Bontang	1. Pembangunan Workshop Las Air	BLKI Bontang (cakupan wilayah peserta pelatihan di Kalimantan Timur)
		Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin	Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial	Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) : Bontang Selatan & Bontang Utara Kelompok Usaha Bersama (KUBE) : Bontang Selatan & Bontang Utara Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) : Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat, Bontang Selatan, Tanjung Laut, Loktuan Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKS-LU) : Api-api Korban Bencana : semua Kecamatan

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
		Peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Udang, Rumput Laut, Bandeng, Kepiting, dan Rajungan)	Kecamatan Bontang Selatan (Kamp Tihi-Tihi) dan Bontang Utara (Kampung Gusung). Keramba Jaring Apung: Melahing dan Bontang Baru (Ikan Kerapu dan Ikan Putih)
		Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM	Pelatihan Koperasi dan UKM	Kel. Bontang Lestari
		Peningkatan layanan infrastruktur	1. Pemeliharaan Jalan Provinsi	Ruas Jalan Prioritas Provinsi (mendukung KSP KI Bontang)
			2. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Kota Bontang
			3. Revitalisasi/penanganan kawasan kumuh	Kampung Pesisir Kampung Kuala Tanjung Limau
			4. Penyediaan air baku	Long Storage Sungai Bontang
			5. Pengendalian banjir	Normalisasi Sungai Bontang
			6. Koordinasi peningkatan akses layanan air minum/peningkatan suplai air curah untuk air minum skala regional	-Kec. Bontang lestari -Kec. Bontang Barat
			7. Pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli	Bontang
		Pengelolaan lingkungan hidup	1. Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Kota Bontang
			2. Pengendalian KARHUTLA	Kota Bontang
			3. Rehabilitasi diluar kawasan hutan	Kota Bontang
			4. Pemantauan terhadap kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan melalui PROPER	Kota Bontang
				Pemantauan Kualitas Air Sungai: Titik Jembatan Jl. Soekarno-Hatta Bontang

NO	KABUPATEN/KOTA	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS (KEC/KEL/DESA/LOKASI PASTI)
			<p>5. Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air sungai, air laut dan udara <i>ambien passive sampler</i></p>	<p>Pemantauan Kualitas Udara Ambien: Transportasi (Halaman Ruko PT. Badak Ngl, Bontang), Perkantoran (Halaman Kantor DPMPSTSP), Pemukiman (Perumahan Mulawarman Residence, Kel. Bontang Baru, Bontang), Industri (Kawasan PT. Blackbear Reasource Indonesia, Bontang)</p> <p>Pemantauan Kualitas Air Laut: Titik Pelabuhan Tanjung Laut, Pelabuhan Lok Tuan, Pantai Bontang Koala dan Wisata Mangrove BSD</p>
			<p>6. Pemantauan dan penanganan sampah laut</p>	<p>Kota Bontang</p>
			<p>7. Melaksanakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan atas perizinan dan peraturan perundangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup</p>	<p>Kota Bontang</p>

## BAB VI

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 ini berisikan program dan kegiatan prioritas Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 beserta pendanaannya yang mengimplementasikan penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur secara sinergis. Pelaksanaan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya memiliki fokus/tema pembangunan yang berbeda. Strategi tahunan ini diterapkan dengan harapan agar pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dapat dilaksanakan secara optimal, maksimal, serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Tema yang diusung pada pelaksanaan pembangunan periode tahun 2024 adalah “*Peningkatan daya saing SDM dan Infrastruktur Wilayah yang Andal untuk percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan*”.

Guna merealisasikan fokus/tema pembangunan yang telah dicanangkan, rencana pembangunan daerah harus merumuskan program dan kegiatan prioritas daerah sebagai *ultimate job* dari pelaksanaan pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan ini merupakan tindakan untuk mencapai visi dan misi gubernur, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), serta penyelenggaraan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu, penyusunan program dan kegiatan pembangunan ini melibatkan *stakeholders* yang bersangkutan karena subyek pelaksana program dan kegiatan adalah unsur-unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki kepentingan di dalamnya dengan tetap melibatkan masyarakat secara aktif.

Agar hasil pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat menunjukkan capaian kinerja masing-masing prioritas daerah maka dalam setiap arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus memberikan arahan dalam penentuan program dan kegiatan yang tepat. Apabila capaian kinerja suatu program atau kegiatan yang telah direncanakan tidak memberikan peningkatan *outcome* yang positif, pada periode selanjutnya harus dilakukan evaluasi serta kajian ulang atas perencanaan program dan kegiatan prioritas yang tidak tepat sasaran.

Perencanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 merujuk pada program prioritas

dalam dokumen RPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 sehingga alur dokumen RKPD mampu selaras dan tidak tumpang tindih dengan RPD. Perencanaan pada dokumen RKPD Tahun 2024, sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah (PD) provinsi maupun kabupaten/kota. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Provinsi Kalimantan Timur. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis PD, termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

#### 6.1 Pagu Indikatif Perangkat Daerah

Penyusunan kerangka pendanaan daerah pada Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 disusun dengan mempertimbangkan realisasi belanja perangkat daerah pada tahun 2022 dan rencana belanja yang ditetapkan pada APBD Tahun 2023. Berdasarkan pendekatan tersebut, rencana belanja perangkat daerah dalam RKPD tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp20.000.000.000.000,- dengan rincian pembagian pagu indikatif per-Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel VI.1  
Pagu Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Perangkat daerah	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.807.276.000.000
2	Dinas Kesehatan	386.854.734.166
3	RSUD A. Wahab Syahrani di Samarinda	793.148.894.568
4	RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan	455.521.548.709
5	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	110.357.067.000
6	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	3.288.991.956.192
7	Satuan Polisi Pamong Praja	30.800.000.000
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.929.067.000
9	Dinas Sosial	198.423.857.886
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	116.201.958.000

No	Perangkat daerah	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)
11	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40.126.422.000
12	Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	126.979.360.500
13	Dinas Lingkungan Hidup	51.612.247.000
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	48.805.199.000
15	Dinas Perhubungan	55.161.000.000
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	85.609.692.000
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31.306.262.000
17	Dinas Pemuda dan Olah Raga	386.891.117.000
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	44.446.499.000
19	Dinas Kelautan Dan Perikanan	117.687.397.000
20	Dinas Pariwisata	47.173.373.920
21	Dinas Perkebunan	78.729.186.000
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	104.349.621.963
23	Dinas Kehutanan	635.877.369.862
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	131.097.953.000
25	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	109.496.634.110
26	Sekretariat Daerah	522.887.409.100
27	Sekretariat DPRD	355.000.000.000
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	71.541.155.000
29	Badan Pendapatan Daerah	315.603.991.000
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6.941.021.945.655
31	Badan Kepegawaian Daerah	55.870.486.952
32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	66.550.000.000
33	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	31.000.000.000
34	Badan Penghubung Provinsi	22.500.000.000
35	Inspektorat	68.000.000.000
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	413.170.594.417
	Jumlah	20.175.000.000.000

RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 akan menyajikan daftar program dan kegiatan yang meliputi nama program dan kegiatan prioritas, indikator kinerja program (*outcome*), target setiap program dan kegiatan prioritas, pendanaan yang dibutuhkan, serta instansi/dinas/PD penanggungjawab program dan kegiatan prioritas. Prioritas Pembangunan menitikberatkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial) dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar (meliputi urusan: Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan). Kemudian, Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi 8 urusan, yaitu Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.

## 6.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan Perangkat Daerah

Data dan informasi rencana kerja Perangkat Daerah pada tahap rancangan awal telah di-*input* melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hal ini dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah melalui tautan <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/dashboard/pusat> Pengambilan data bersumber dari Menu “Renja” pada aplikasi SIPD di tahap Penetapan RKPD, dimana untuk indikator dan target kinerja Program dan Kegiatan yang tercantum di dalamnya berasal dari Menu “RPJMD” dan Menu “RENSTRA” yang didasarkan pada Perubahan RPJMD dan Perubahan RENSTRA Perangkat Daerah.

Tabel VI.2  
Program Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	2					3	4	5	6	7	8
						Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			3.610.886.023.926		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			3.588.946.379.276		
	1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			3.588.946.379.276		
1	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	90 indeks 100 %	1.288.978.185.130		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	9.718.816.206		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	5.142.827.206	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	239 Dokumen	1.296.432.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
											- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	0 1	0 1	1.0 1	000 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	239 Dokumen	1.295.435.900		- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0 1	0 1	1.0 1	000 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	239 Dokumen	298.105.500		- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0 1	0 1	1.0 1	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	239 Dokumen	497.460.700		- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0 1	0 1	1.0 1	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	239 Laporan	598.851.000		- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	0	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	239 Laporan	589.703.400	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	1.156.210.545.396		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/ Bulan	1.149.487.297.396	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	2.807.886.600	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	561.786.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	50 Dokumen	235.482.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	3.118.092.400	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	1.515.993.229		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	1.515.993.229	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	25.789.576.870		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	600.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	10.000.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1000 Orang	9.430.361.870	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1000 Orang	5.759.215.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	11.760.390.670		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	109.967.550	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	9.656.013.890	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	500 Paket	648.396.320	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket	109.964.910	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.236.048.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Data Aset	100 %	73.743.018.140		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	108 Unit	51.287.381.700	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	0	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	5.999.970.350	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	0	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	3.375.562.410	- Kota Samarinda, Samarinda Kota, Pelabuhan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	0	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	13.080.103.680	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	8.275.549.930		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	38.469.640	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7.739.844.430	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	497.235.860	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.964.294.689		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	75 Unit	889.409.480	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	369.268.680	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	540.641.279	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	0	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	164.975.250	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
2	0	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus</b> <b>Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus</b> <b>Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus</b>	<b>88,48 %</b> <b>87,49 %</b> <b>100 %</b> <b>100 %</b> <b>94,87 %</b>	<b>2.270.669.787.645</b>		<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
						<b>Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK</b> <b>Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus</b> <b>Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK</b> <b>Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus</b> <b>Tingkat Penyerapan Lulusan SMK</b> <b>Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus</b>	<b>79 %</b> <b>60,34 %</b> <b>94 %</b> <b>67,69 %</b>				
	1	0 1	0 2	1.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 89,98 % 99,27 % 85,51 % 73,27 % 58,88 %	1.331.905.462.625		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0 1	0 2	1.0 1	000 1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit	54.640.400.100	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0 1	0 2	1.0 1	000 3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	4.844.790.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0 1	0 2	1.0 1	001 0	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	7 Ruang	5.045.144.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0 1	0 2	1.0 1	001 3	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	5.579.700.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0 1	0 2	1.0 1	001 4	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	10 Unit	44.142.121.585	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0 1	0 2	1.0 1	001 9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	17 Ruang	7.885.042.640	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0 1	0 2	1.0 1	002 0	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	346.744.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	0	0	1.0	002	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Jumlah Laboratorium Komputer yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	379.044.520	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	0	0	1.0	002	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	236.709.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	0	0	1.0	003	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	70 Paket	43.754.352.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	0	0	1.0	003	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	50 Paket	2.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	0	0	1.0	004	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	15 Unit	2.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	0	0	1.0	004	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	100 Paket	1.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	0	0	1.0	004	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	76871 Peserta didik	220.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	0	0	1.0	004	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	219 Paket	31.955.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	0	0	1.0	004	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	5000 Peserta Didik	11.162.570.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	0	0	1.0	005	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	3800 Orang	2.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	0	0	1.0	005	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	500 Orang	6.218.428.300	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	0	0	1.0	005	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	143 Satuan Pendidikan	4.649.886.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
1	0	0	1.0	005	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	229 Satuan Pendidikan	732.934.578.400	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	005	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	235 Orang	27.654.500.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	005	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	500 Orang	2.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	005	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	100 Konten Digital	2.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	005	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	300 Orang	2.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	006	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	10 Dokumen	6.337.430.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	006	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Dokumen	1.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	006	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	2.526.072.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	006	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	8 Unit	26.185.138.590	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	007	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	45 Ruang	36.261.037.200	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	007	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	197.352.520	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	007	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	100 Ruang	40.118.703.770	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	0	0	1.0	007	3	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	4 Unit	282.460.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	0	0	1.0	007	8	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	235 Satuan Pendidikan	4.568.257.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	0	0	1.0			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 59,91 % 82,10 % 71,48 % 25000 orang 69,31 % 56,66 %	859.933.833.398		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	0	0	1.0	000	1	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	5 Unit	52.198.244.400	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	0	0	1.0	000	4	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	20 Ruang	25.447.000.400	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	0	0	1.0	000	5	Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	4 Ruang	28.598.103.900	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	0	0	1.0	000	6	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	5 Ruang	2.040.676.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	0	0	1.0	000	7	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	2 Ruang	3.534.933.400	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	0	0	1.0	001	0	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	21 Unit	48.680.963.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	0	0	1.0	001	8	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang	639.948.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	0	0	1.0	002	8	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	50 Paket	45.306.348.750	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	003	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	20 Paket	2.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	003	Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	10 Unit	2.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	003	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	150 Paket	80.618.645.725	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	003	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta didik	1.154.976.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	003	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	100 Paket	1.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	004	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	25000 Peserta Didik	34.068.917.750	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	004	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	3100 Orang	2.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	004	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 Orang	3.250.096.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	004	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	120 Satuan Pendidikan	2.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	004	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	221 Satuan Pendidikan	404.694.106.658	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	004	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	221 Orang	26.506.600.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	005	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	400 Orang	2.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	005	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	80 Konten Digital	2.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
	1	0	0	1.0			Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
	1	0	0	1.0	005	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang	1.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	005	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	87 Dokumen	2.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	005	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Dokumen	1.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	006	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	7 Unit	19.294.666.360	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	006	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	5 Ruang	1.653.400.360	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	006	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	116 Ruang	46.587.062.400	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	006	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	22 Ruang	3.206.112.320	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	007	Penyelenggaraan Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	219 Satuan Pendidikan	15.453.031.975	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Inklusivitas SDLB Indeks Iklim Inklusivitas SMALB Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB	100 % 100 % 67,87 % 77,36 % 68,74 % 81,73 % 80,29 % 82,62 % 77,21 % 73,68 % 72,39 % 66,96 % 65,12 % 72,56 % 69,61 % 58,49 % 64,54 %	78.830.491.622		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.				
	1	0	0	1.0	000	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13 Unit	25.455.295.974	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	001	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	5 Unit	1.711.740.800	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	003	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	15 Ruang	2.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	003	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	15 Paket	1.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	003	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	2.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	004	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	411.787.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	004	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2581 Peserta Didik	2.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	004	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	100 Paket	1.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	004	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	4.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	004	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	240 Orang	2.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	005	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	1.503.423.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	005	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	10 Satuan Pendidikan	1.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	005	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	34 Satuan Pendidikan	1.454.685.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	005	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	34 Orang	3.258.500.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	005	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang	2.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	005	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	50 Konten Digital	2.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	005	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	80 Orang	1.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	006	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	11 Dokumen	2.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	006	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	15 Unit	8.458.814.048	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	007	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	36 Ruang	14.576.244.800	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	<b>Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus</b>	<b>100 %</b>	<b>11.721.560.000</b>		<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>
	1	0	0	1.0		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Menengah	90 %	8.221.560.000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	000	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkatkan Kompetensinya	219 Orang	6.283.600.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	000	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	5 Dokumen	1.937.960.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Khusus	90 %	3.500.000.000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	000	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	12 Dokumen	1.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkatkan Kompetensinya	70 Orang	2.500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4	1	0	0			<b>PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	<b>Persentase Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang memiliki Ijazah diploma dan sarjana (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>17.576.846.500</b>		<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>
	1	0	0	1.0		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Memiliki Ijazah Diploma dan Sarjana	100 %	17.576.846.500		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	000	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	25 Dokumen	10.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	0	0	1.0	000	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1 Laporan	7.576.846.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>21.939.644.650</b>		
	2	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>			<b>21.939.644.650</b>		
5	2	2	0			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Presentase Kebudayaan yang dikembangkan</b>	<b>86 %</b>	<b>8.628.175.290</b>		<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>
	2	2	0	1.0		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi	60 %	4.428.175.290		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.0	000	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	50 Objek	4.428.175.290	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.0		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	70 %	4.200.000.000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.0	000	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	116 Sertifikat	4.200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
6	2	2	0			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan</b>	<b>66 %</b>	<b>6.400.000.000</b>		<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>
	2	2	0	1.0		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	65 % 70 %	6.400.000.000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.0	000	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	400 Orang	1.700.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.0	000	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi	50 Sertifikat	1.200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.0	000	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Lembaga	3.500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
7	2	2	0			<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>	<b>Persentase Lembaga Sejarah yang Dibina Provinsi</b>	<b>77 %</b>	<b>845.339.660</b>		<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>
	2	2	0	1.0		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Sejarah yang diakses masyarakat	75 %	845.339.660		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.0	000	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	100 Dokumen	845.339.660	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
8	2	2	0			<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	<b>Jumlah Cagar Budaya yang dikelola dan Dilestarikan</b>	<b>62 %</b>	<b>3.200.000.000</b>		<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>
	2	2	0	1.0		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Objek Benda dan Tak Benda yang ditetapkan	70 %	1.800.000.000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.0	000	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	12 Objek	1.800.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.0		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan	55 %	1.400.000.000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.0	000	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	40 Objek	600.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	2	0	1.0	000	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	220 Orang	800.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
9	2	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	<b>Persentase Pengelolaan Permuseuman</b>	<b>47 %</b>	<b>2.866.129.700</b>		<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>
	2	2	0	1.0		Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	47 %	2.866.129.700		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	2	0	1.0	000	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	2.866.129.700	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
						<b>UPTD Taman Budaya</b>			<b>13.163.233.482</b>		
	1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>6.818.893.482</b>		
	1	0	1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>			<b>6.818.893.482</b>		
10	1	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti</b> <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>	<b>100 %</b> <b>90 Indeks</b>	<b>6.818.893.482</b>		<b>UPTD TAMAN BUDAYA</b>
	1	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.120.090.000		UPTD TAMAN BUDAYA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	38.490.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	160.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
	1	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan	911.600.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
	1	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	1.289.000.000		UPTD TAMAN BUDAYA
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	1.289.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
	1	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	2.706.366.482		UPTD TAMAN BUDAYA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10 Laporan	8.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	0	0	1.0	000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	170.005.160	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
1	0	0	1.0	000	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.528.361.322	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
1	0	0	1.0			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.703.437.000		UPTD TAMAN BUDAYA
1	0	0	1.0	000	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	203.437.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
1	0	0	1.0	001	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	1.500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
2						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>6.279.040.000</b>		
2	2	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>			<b>6.279.040.000</b>		
11	2	2	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti</b>	<b>90 indeks 100 %</b>	<b>179.040.000</b>		<b>UPTD TAMAN BUDAYA</b>
2	2	0	1.0			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	179.040.000		UPTD TAMAN BUDAYA
2	2	0	1.0	000	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	179.040.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
12	2	2	0			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>	<b>Presentase Kebudayaan yang dikembangkan</b>	<b>86 %</b>	<b>4.400.000.000</b>		<b>UPTD TAMAN BUDAYA</b>
2	2	0	1.0			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Kebudayaan yang dibina dan difasilitasi	60 %	2.000.000.000		UPTD TAMAN BUDAYA
2	2	0	1.0	000	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	12 Objek	2.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
2	2	0	1.0			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelestari yang diapresiasi	70 %	2.400.000.000		UPTD TAMAN BUDAYA
2	2	0	1.0	000	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	12 Objek	2.400.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								
13	2	2	0			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	<b>Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan</b>	<b>66 %</b>			<b>UPTD TAMAN BUDAYA</b>
	2	2	0	1.0		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesenian yang ditingkatkan Kapasitasnya Jumlah Pelaku Seni yang tersertifikasi	60 % 70 %	1.700.000.000		UPTD TAMAN BUDAYA
	2	2	0	1.0	000	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	2800 Orang	1.700.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
	X					<b>NON URUSAN</b>			<b>65.300.000</b>		
	X	X				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>			<b>65.300.000</b>		
14	X	X	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>	<b>100 % 90 indeks</b>	<b>65.300.000</b>		<b>UPTD TAMAN BUDAYA</b>
	X	X	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	65.300.000		UPTD TAMAN BUDAYA
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Laporan	65.300.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN BUDAYA
						<b>UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan</b>			<b>62.330.562.566</b>		
	1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>62.330.562.566</b>		
	1	0				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>			<b>62.330.562.566</b>		
15	1	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti</b>	<b>90 indeks 100 %</b>	<b>58.639.528.866</b>		<b>UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN</b>
	1	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	186.840.000		UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	186.840.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	77.754.600		UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	0	0	1.0	000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	30 Paket	77.754.600	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
1	0	0	1.0			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	22.809.509.306		UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
1	0	0	1.0	000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	16.972.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
1	0	0	1.0	000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	18.909.184.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
1	0	0	1.0	000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	80.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
1	0	0	1.0	000		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1.939.200	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
1	0	0	1.0	000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.801.413.606	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
1	0	0	1.0			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	100.000.000		UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
1	0	0	1.0	000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
1	0	0	1.0			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	35.305.572.960		UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
1	0	0	1.0	000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											INFORMASI PENDIDIKAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	33.536.552.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1.759.020.960	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	159.852.000		UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	57.252.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	27.600.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	0	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
16	1	0	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus</b> <b>Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK</b> <b>Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus</b> <b>Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus</b> <b>Tingkat Penyerapan Lulusan SMK</b> <b>Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus</b> <b>Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus</b> <b>Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus</b> <b>Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK</b>	<b>67,69 %</b> <b>79 %</b> <b>87,49 %</b> <b>88,48 %</b> <b>94 %</b> <b>100 %</b> <b>60,34 %</b> <b>94,87 %</b> <b>100 %</b>	<b>3.691.033.700</b>		<b>UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN</b>

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
	1	0 1	0 2	1.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMA Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Kebinekaan SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 62,55 % 82,44 % 74,44 % 72,20 % 59,81 %	2.560.278.500		UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	0 1	0 2	1.0 1	005 1	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	130 Orang	2.560.278.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	0 1	0 2	1.0 3		Pengelolaan Pendidikan Khusus	APK SLB Indeks Iklim Inklusivitas SDLB Indeks Iklim Inklusivitas SMALB Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Meningkatnya Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMALB Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 67,87 % 77,36 % 68,74 % 81,73 % 82,62 % 77,21 % 72,39 % 73,68 % 80,29 % 66,96 % 65,12 % 72,56 % 69,61 % 58,49 % 64,54 %	1.130.755.200		UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
	1	0 1	0 2	1.0 3	007 1	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	240 Satuan Pendidikan	1.130.755.200	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENDIDIKAN
						<b>UPTD Museum Negeri Mulawarman</b>			<b>8.331.499.827</b>		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>2.161.499.827</b>		
	1	0	1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>			<b>2.161.499.827</b>		
17	1	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti</b>	<b>90 Indeks 100 %</b>	<b>2.161.499.827</b>		<b>UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN</b>
	1	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	218.280.000		UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	218.280.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	1	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	25.000.000		UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	25.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	1	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	135.000.000		UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	65.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	70.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	1	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.783.219.827		UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.783.219.827	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>6.170.000.000</b>		
	2	2	2			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>			<b>6.170.000.000</b>		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
18	2	2	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</b> <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>	<b>100 %</b> <b>90 Indeks</b>	<b>3.862.000.000</b>		<b>UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN</b>
	2	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.015.000.000		UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	2.675.000.000		UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	500.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	500.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.665.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	172.000.000		UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	172.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
19	2	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>	<b>Persentase Pengelolaan Permuseuman</b>	<b>47 %</b>	<b>2.308.000.000</b>		<b>UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN</b>
	2	2	0	1.0		Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah Museum yang difasilitasi	47 %	2.308.000.000		UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
	2	2	0	1.0	000	1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan	1 Unit	554.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	2	0	1.0	000	2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	50 Orang	500.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	2	0	1.0	000	3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1 Unit	988.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
	2	2	0	1.0	000	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	1 Unit	266.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD MUSEUM NEGERI MULAWARMAN
							<b>Dinas Pendidikan Wilayah I</b>			<b>14.790.517.438</b>		
	<b>1</b>						<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>14.790.517.438</b>		
	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>			<b>14.790.517.438</b>		
<b>20</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>	<b>100 % 90 Indeks</b>	<b>6.091.941.838</b>		<b>DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I</b>
	1	0	0	1.0			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	2.169.100.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	0	0	1.0	000	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	227 Laporan	2.169.100.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	0	0	1.0			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	2.842.880.809		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	0	0	1.0	001	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	85 Unit	2.842.880.809	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	0	0	1.0			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	920.573.029		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	0	0	1.0	000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	177.331.200	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	130 Laporan	743.241.829	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	159.388.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	159.388.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
21	1	0	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	94 % 100 % 87,49 % 67,69 % 88,48 % 94,87 % 60,34 % 100 % 79 %	8.698.575.600		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	0	0	1.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMA Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Kebinekaan SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 62,55 % 82,44 % 74,44 % 72,2 % 59,81 %	4.024.620.400		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	0	0	1.0	004	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	192 Peserta Didik	1.827.800.400	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	0	0	1.0	005	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	2.196.820.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
	1	0 1	0 2	1.0 2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 59,91 % 82,1 % 71,48 % 25000 Orang 69,31 % 56,66 %	4.391.614.400		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	0 1	0 2	1.0 2	004 1	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	258 Peserta Didik	2.194.794.400	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	0 1	0 2	1.0 2	004 3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	200 Orang	2.196.820.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
	1	0 1	0 2	1.0 3		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Inklusivitas SDLB Indeks Iklim Inklusivitas SMALB Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 67,87 % 77,36 % 68,74 % 81,73 % 80,29 % 82,62 % 77,21 % 73,68 % 72,39 % 66,96 % 65,12 % 72,56 % 69,61 % 58,49 % 64,54 %	282.340.800		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	004	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	18 Peserta Didik	282.340.800	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH I
						<b>Dinas Pendidikan Wilayah II</b>			<b>8.873.464.200</b>		
	1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>8.873.464.200</b>		
	1	0	1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>			<b>8.873.464.200</b>		
22	1	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>	<b>100 % 90 Indeks</b>	<b>2.293.187.100</b>		<b>DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II</b>
	1	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	2.288.187.100		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	73.658.400	- Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.214.528.700	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	5.000.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	0	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
23	1	0	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan</b>	<b>100 % 94 % 94 % 100 % 100 % 94,87 % 67,69 % 88,48 % 79 % 60,34 % 87,49 % 67,69 % 100 % 79 %</b>	<b>6.580.277.100</b>		<b>DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II</b>

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus ndeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Rata-rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	60,34 % 88,48 % 87,49 % 94,87 % 67,69 undefined 88,48 undefined 94,87 undefined 100 undefined 79 undefined 60,34 undefined 100 undefined 87,49 undefined 94 undefined			
	1	0	0	1.0	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMA Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Indeks Kebinekaan SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMA	100 % 100 % 100 % 62,55 % 89,98 % 82,44 % 99,27 % 85,51 % 74,44 % 72,2 % 59,81 %	3.154.119.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	73,27 % 58,88 %			
	1	0 1	0 2	1.0 1	004 9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	1.504.794.800	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	0 1	0 2	1.0 1	005 1	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	1.649.324.200	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	0 1	0 2	1.0 2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 59,91 % 82,1 % 71,48 % 25000 Orang 69,31 % 56,66 %	2.880.000.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	0 1	0 2	1.0 2	004 1	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	1.280.000.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	0 1	0 2	1.0 2	004 3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang	1.600.000.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
	1	0 1	0 2	1.0 3		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Inklusivitas SDLB Indeks Iklim Inklusivitas SMALB Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan	100 % 100 % 67,87 % 77,36 % 68,74 % 81,73 % 80,29 % 82,62 % 77,21 % 73,68 % 72,39 % 66,96 %	546.158.100		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	65,12 % 72,56 % 69,61 % 58,49 % 64,54 %			
	1	0	0	1.0	004	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik	546.158.100	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH II
						<b>Dinas Pendidikan Wilayah III</b>			<b>8.981.824.320</b>		
	1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>8.891.824.320</b>		
	1	0	1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>			<b>8.891.824.320</b>		
24	1	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</b>	<b>90 Indeks 100 %</b>	<b>2.366.000.000</b>		<b>DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III</b>
	1	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	85.000.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	85.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	350.000.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	50.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang	300.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	820.000.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	20.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	800.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	1.035.000.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	85.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	650.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	76.000.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	0	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	76.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
25	1	0	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Tingkat Penyerapan Lulusan SMK</b> <b>Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK</b> <b>Rata-Rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus</b> <b>Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus</b> <b>Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus</b> <b>Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus</b> <b>Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK</b> <b>Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus</b> <b>Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus</b>	<b>94 %</b> <b>100 %</b> <b>67,69 %</b> <b>87,49 %</b> <b>88,48 %</b> <b>60,34 %</b> <b>79 %</b> <b>100 %</b> <b>94,87 %</b>	<b>6.525.824.320</b>		<b>DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III</b>
	1	0	0	1.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK	100 % 100 % 100 %	2.950.824.320		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	89,98 % 99,27 % 85,51 % 73,27 % 58,88 %			
	1	0 1	0 2	1.0 1	004 9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	1.500.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	0 1	0 2	1.0 1	005 1	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	1.300.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	0 1	0 2	1.0 1	005 2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	34 Satuan Pendidikan	150.824.320	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	0 1	0 2	1.0 2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 59,91 % 82,1 % 82,10 % 71,48 % 25000 orang 25000 Orang 69,31 % 56,66 %	3.300.000.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	0 1	0 2	1.0 2	004 1	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	300 Peserta Didik	1.200.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	0 1	0 2	1.0 2	004 3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	1.400.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	0 1	0 2	1.0 2	004 5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	35 Satuan Pendidikan	700.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
	1	0 1	0 2	1.0 3		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Inklusivitas SDLB Indeks Iklim Inklusivitas SMALB Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 67,87 % 77,36 % 68,74 % 81,73 % 80,29 % 82,62 % 77,21 % 73,68 % 72,39 % 66,96 % 65,12 % 72,56 % 69,61 % 58,49 % 64,54 %	275.000.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	0 1	0 2	1.0 3	004 8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	125.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	1	0 1	0 2	1.0 3	005 0	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	300 Orang	150.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
	2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>90.000.000</b>		
	2	2 2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</b>			<b>90.000.000</b>		
26	2	2 2	0 1			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>	<b>100 % 90 Indeks</b>	<b>90.000.000</b>		<b>DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III</b>
	2	2 2	0 1	1.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	90.000.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	90.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
						<b>Dinas Pendidikan Wilayah IV</b>			<b>10.945.403.612</b>		
	1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>10.945.403.612</b>		
	1	0	1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>			<b>10.945.403.612</b>		
27	1	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</b>	<b>90 Indeks 100 %</b>	<b>6.645.403.612</b>		<b>DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV</b>
	1	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.010.000.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	10.000.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.000.000.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	4.640.403.612		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000.403.612	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	0	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	3.640.000.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	895.000.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	25.000.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	800.000.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	100.000.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	100.000.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
28	1	0	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Tingkat Penyerapan Lulusan SMK</b> <b>Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK</b> <b>Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus</b> <b>Rata-Rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus</b> <b>Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK</b> <b>Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus</b> <b>Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus</b> <b>Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus</b> <b>Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus</b>	<b>94 %</b> <b>100 %</b> <b>60,34 %</b> <b>67,69 %</b> <b>79 %</b> <b>100 %</b> <b>87,49 %</b> <b>94,87 %</b> <b>88,48 %</b>	<b>4.300.000.000</b>		<b>DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV</b>
	1	0	0	1.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 89,98 % 99,27 % 85,51 % 73,27 % 58,88 %	2.200.000.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	0	0	1.0	004	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	700.000.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	005	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	1.500.000.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	0	0	1.0		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 59,91 % 82,10 % 71,48 % 25000 orang 69,31 % 56,66 %	2.100.000.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	0	0	1.0	004	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	50 Peserta Didik	600.000.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
	1	0	0	1.0	004	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	1.500.000.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH IV
						<b>Dinas Pendidikan Wilayah V</b>			<b>17.041.245.000</b>		
	1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>17.041.245.000</b>		
	1	0				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>			<b>17.041.245.000</b>		
29	1	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti</b>	<b>90 Indeks 100 %</b>	<b>13.641.245.000</b>		<b>DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V</b>
	1	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	100.000.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	60.000.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket	60.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.000.000.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	1.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	11.637.245.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	10 Unit	120.245.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	0	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	11.517.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	754.000.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	154.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	550.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	90.000.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 Unit	90.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
30	1	0	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	<b>Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan</b>	<b>100 % 94 % 94,87 % 88,48 % 87,49 %</b>	<b>3.400.000.000</b>		<b>DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V</b>

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
						<b>Khusus</b> Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus	100 % 67,69 % 79 % 60,34 %				
	1	0 1	0 2	1.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional SMA	100 % 100 % 100 % 89,98 % 99,27 % 85,51 % 73,27 % 58,88 % %	1.700.000.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	0 1	0 2	1.0 1	004 9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	0 1	0 2	1.0 1	005 1	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	1.200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	0 1	0 2	1.0 2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 59,91 % 82,10 % 71,48 % 25000 orang 69,31 % 56,66 %	1.700.000.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	004	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	250 Peserta Didik	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
	1	0	0	1.0	004	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	400 Orang	1.200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH V
						<b>Dinas Pendidikan Wilayah VI</b>			<b>10.471.859.479</b>		
	1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>10.471.859.479</b>		
	1	0				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>			<b>10.471.859.479</b>		
31	1	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>	<b>100 % 90 Indeks</b>	<b>3.961.339.479</b>		<b>DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI</b>
	1	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	150.000.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	150.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penunjang Kinerja Pegawai	100 %	1.530.000.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	20.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	10.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.500.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor	100 %	20.000.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	0	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
	1	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	2.111.339.479		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.339.479	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.500.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	600.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	150.000.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	150.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
32	1	0	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK Rata-rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Tingkat Penyerapan Lulusan SMK Rata-rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Khusus Rata-Rata Literasi SMA,SMK dan Pendidikan Khusus Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK Indeks Keamanan SMA, SMK dan Pendidikan	94 % 100 % 100 % 67,69 % 88,48 % 87,49 % 79 % 100 % 94 % 60,34 % 94,87 % 100 % 67,69 % 79 % 87,49 % 94,87 % 88,48 % 60,34 %	6.510.520.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
						<b>Khusus</b> <b>Indeks Kebinekaan SMA, SMK dan Pendidikan Khusus</b> <b>Indeks Inklusivitas SMA, SMK dan Pendidikan Khusus</b> <b>Rata-Rata Numerasi SMA, SMK dan Pendidikan Khusus</b>					
	1	0 1	0 2	1.0 1		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Angka Kelulusan SMA APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMA Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Keamanan SMA Indeks Iklim Kebinekaan SMA Indeks Inklusivitas SMA Indeks Kebinekaan SMA Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional Rerata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	100 % 100 % 100 % 62,55 % 89,98 % 82,44 % 99,27 % 85,51 % 74,44 % 72,2 % 59,81 % 73,27 % 58,88 %	2.700.000.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	0 1	0 2	1.0 1	004 9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	800 Peserta Didik	1.000.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	0 1	0 2	1.0 1	005 1	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	700 Orang	1.000.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	0 1	0 2	1.0 1	005 2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	20 Satuan Pendidikan	700.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	0 1	0 2	1.0 2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Angka Kelulusan SMK APK SMA/SMK APM SMA/SMK Indeks Iklim Inklusivitas SMK Indeks Iklim Keamanan SMK Indeks Kebinekaan SMK Jumlah siswa yang tersertifikasi oleh Lembaga Profesi Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan	100 % 100 % 100 % 59,91 % 82,10 % 71,48 % 25000 orang 69,31 % 56,66 %	3.210.520.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Asesmen Nasional Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional				
	1	0 1	0 2	1.0 2	004 1	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	500 Peserta Didik	1.000.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	0 1	0 2	1.0 2	004 3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	700 Orang	1.280.520.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	0 1	0 2	1.0 2	004 5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan	930.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	0 1	0 2	1.0 3		Pengelolaan Pendidikan Khusus	Angka Kelulusan SLB APK SLB Indeks Iklim Inklusivitas SDLB Indeks Iklim Inklusivitas SMALB Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB Indeks Iklim Keamanan SDLB Indeks Iklim Keamanan SMALB Indeks Iklim Keamanan SMPLB Indeks Iklim Kebinekaan SDLB Indeks Iklim Kebinekaan SMALB Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB Rata-rata kompetensi Literasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional. Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional.	100 % 100 % 67,87 % 77,36 % 68,74 % 81,73 % 80,29 % 82,62 % 77,21 % 73,68 % 72,39 % 66,96 % 65,12 % 72,56 % 69,61 % 58,49 % 64,54 %	600.000.000		DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	0 1	0 2	1.0 3	004 8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik	300.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI
	1	0 1	0 2	1.0 3	005 0	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	300.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						SMKN Pelayaran Kalimantan Samarinda			5.116.454.740		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.116.454.740		
	1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			5.116.454.740		
33	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	90 Indeks 100 %	5.116.454.740		SMKN PELAYARAN KALIMANTAN SAMARINDA
	1	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	5.116.454.740		SMKN PELAYARAN KALIMANTAN SAMARINDA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.116.454.740	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SMKN PELAYARAN KALIMANTAN SAMARINDA
						SMK-SPP Negeri Samarinda			8.466.787.410		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			8.466.787.410		
	1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			8.466.787.410		
34	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	90 Indeks 100 %	8.466.787.410		SMK-SPP NEGERI SAMARINDA
	1	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	8.466.787.410		SMK-SPP NEGERI SAMARINDA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	8.466.787.410	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SMK-SPP NEGERI SAMARINDA
						SMAN Khusus Olahragawan			27.877.124.000		
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			27.877.124.000		
	1	0	1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			27.877.124.000		
35	1	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindalanjuti	90 Indeks 100 %	27.877.124.000		SMAN KHUSUS OLAHRAGAWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pelaksanaan penyediaan jasa penunjang	100 %	27.877.124.000		SMAN KHUSUS OLAHRAGAWAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	27.877.124.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SMAN KHUSUS OLAHRAGAWAN
						<b>Dinas Kesehatan</b>			<b>261.132.665.000</b>		
	1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>261.132.665.000</b>		
	1	0	2			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>			<b>261.132.665.000</b>		
36	1	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti</b>	<b>80 % 100 %</b>	<b>73.778.665.000</b>		<b>DINAS KESEHATAN</b>
	1	0	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.625.000.000		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	950.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	200.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	475.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	0	0	1.0	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	52.667.415.000		DINAS KESEHATAN
1	0	0	1.0	2	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	185 Orang/ Bulan	52.027.415.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS KESEHATAN
1	0	0	1.0	2	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	400.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
1	0	0	1.0	2	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
1	0	0	1.0	2	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	20.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
1	0	0	1.0	2	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	50.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
1	0	0	1.0	2	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	150.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
1	0	0	1.0	5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	640.000.000		DINAS KESEHATAN
1	0	0	1.0	5	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	320.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS KESEHATAN
1	0	0	1.0	5	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	320.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS KESEHATAN
1	0	0	1.0	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	4.620.000.000		DINAS KESEHATAN
1	0	0	1.0	6	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	40.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS KESEHATAN
1	0	0	1.0	6	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.000.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS KESEHATAN
1	0	0	1.0	6	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	50.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS KESEHATAN
1	0	0	1.0	6	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	30.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS KESEHATAN
1	0	0	1.0	6	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.500.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	6.146.250.000		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	17 Unit	6.146.250.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	7.130.000.000		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.710.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.400.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	950.000.000		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	38 Unit	325.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	200.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	90 Unit	425.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	DINAS KESEHATAN
37	1	0	0			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Angka Kesakitan</b>	<b>10,8 Rasio</b>	<b>176.814.368.000</b>		<b>DINAS KESEHATAN</b>
	1	0	0	1.0		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi Sarana Prasana Alat Kesehatan minimal 60%	10 %	26.861.138.000		DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0 2	0 2	1.0 1	000 4	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	4.000.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	1.0 1	000 6	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	3 Layanan	1.685.100.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	1.0 1	000 7	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang Dilakukan Pengembangan	20 Unit	600.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	1.0 1	001 0	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	1 Unit	6.000.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
											<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> </ul>	
	1	0	0	1.0	001	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	26 Unit	516.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> </ul>	DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	1.0	002	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	6 Unit	842.550.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> </ul>	DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	1.0	002	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	2 Dokumen	2.729.154.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> </ul>	DINAS KESEHATAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0 2	0 2	1.0 1	002 7	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	2 Paket	10.488.334.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	1.0 2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase terlaksananya layanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %	143.447.930.000		DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	1.0 2	000 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	2096543 Orang	1.000.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	1.0 2	000 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	185 Orang	4.000.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	1.0 2	000 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	6.500.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> </ul>	
	1	0	0	1.0	000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	3.500.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> </ul>	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	3.117.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> </ul>	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	10.870.200.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> </ul>	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
											- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	0 2	0 2	1.0 2	000 7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	2.246.800.000		- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	1.0 2	000 8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	2.246.800.000		- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	1.0 2	000 9	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1.348.080.000		- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	1.0 2	001 0	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	5 Dokumen	5.055.300.000		- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	1	0 2	0 2	1.0 2	001 1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	25.101.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	1.0 2	001 2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen	750.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	1.0 2	001 3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1 Dokumen	2.000.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	1	0	0	1.0	001			Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	001	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	70.000.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.0	001	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	700.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.0	001	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	3.370.200.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.0	002	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	2 Dokumen	700.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	1	0 2	0 2	1.0 2	002 3	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	3 Unit	842.550.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	1.0 2	002 5	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	10 Paket	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	1.0 3		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase keterisian data (kelengkapan dan ketepatan) Sistem Informasi Kesehatan	90 %	1.450.000.000		DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 2	1.0 3	000 2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	1.450.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
	1	0	0	1.0		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase RS yang mencapai akreditasi Paripurna	60 %	5.055.300.000		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	1 Unit	1.685.100.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	5 Unit	1.685.100.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	20 Unit	1.685.100.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
38	1	0	0			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya</b>	<b>35 %</b>	<b>7.425.500.000</b>		<b>DINAS KESEHATAN</b>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Provinsi dan Kab/Kota	1 Dokumen	1.341.924.000		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	1610 Orang	1.341.924.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.0		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kab/kota yang melakukan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Teknis SDM kesehatan	2 KabKota	6.083.576.000		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat Kesehatan	600 Orang	5.700.526.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	383.050.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
39	1	0	0		<b>PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN</b>	<b>Persentase sarana farmasi dan alat kesehatan yang memiliki izin operasional sesuai standar</b>	<b>100 %</b>	<b>1.092.012.000</b>		<b>DINAS KESEHATAN</b>	
	1	0	0	1.0	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Persentase pengawasan dan pembinaan PBF Cabang dan Cabang PAK dalam pemenuhan ketentuan perizinan	100 %	798.080.000		DINAS KESEHATAN	
	1	0	0	1.0	000 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	55 Sarana	798.080.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.0		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Persentase pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dalam penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	100 %	293.932.000		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000 1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	3 Sarana	293.932.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
40	1	0	0		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>	<b>Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan</b>	<b>60 %</b>	<b>2.022.120.000</b>		<b>DINAS KESEHATAN</b>	
	1	0	0	1.0		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor	60 %	404.424.000		DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000 1	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	404.424.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0	0	1.0		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan	60 %	1.011.060.000		DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah				
	1	0 2	0 5	1.0 2	000 1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	505.530.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 5	1.0 2	000 2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	505.530.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 5	1.0 3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Kabupaten/Kota yang di fasilitasi dalam Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	60 %	606.636.000		DINAS KESEHATAN
	1	0 2	0 5	1.0 3	000 1	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	606.636.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						<b>UPTD Balai Latihan Kesehatan</b>			<b>15.089.326.700</b>		
	<b>1</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>15.089.326.700</b>		
	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>			<b>15.089.326.700</b>		
41	1	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b> <b>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</b>	<b>80 %</b> <b>100 %</b>	<b>11.451.336.500</b>		<b>UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN</b>
	1	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	277.440.000		UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	277.440.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	883.358.000		UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	140.704.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	742.654.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi umum	12 Bulan	3.016.074.360		UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	54.631.200	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket	1.370.504.450	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10 Paket	592.075.200	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	245.103.510	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	753.760.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kebutuhan barang milik daerah yang terpenuhi	90 %	1.904.697.600		UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1.436.504.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	77 Paket	468.193.600	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang	12 Bulan	3.644.473.400		UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	854.725.400	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.777.748.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	1.725.293.140		UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	63.652.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	245 Unit	261.299.295	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	0	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	1.400.341.845	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
42	1	0	0			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya</b>	<b>35 %</b>	<b>3.637.990.200</b>		<b>UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN</b>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat	1000 Orang	3.637.990.200		UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	2000 Orang	3.637.990.200	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	UPTD BALAI LATIHAN KESEHATAN
						<b>UPTD Rumah Sakit Mata Prov. Kaltim</b>			<b>30.011.925.000</b>		
	1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>30.011.925.000</b>		
	1	0				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>			<b>30.011.925.000</b>		
43	1	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti</b>	<b>80 % 100 %</b>	<b>24.511.925.000</b>		<b>UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM</b>
	1	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi keuangan (RS. Mata Prov.Kaltim)	98 %	839.214.624		UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	839.214.624	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (RS.Mata Prov.Kaltim)	80 %	1.490.943.000		UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	390 Orang	1.490.943.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RS.Mata Prov.Kaltim)	98 %	6.122.642.216		UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	93.111.200	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket	4.829.531.016	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.200.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (RS.Mata Prov.Kaltim)	1 Paket	2.000.000.000		UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1.700.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	300.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (RS.Mata Prov.Kaltim)	12 Bulan	8.541.392.160		UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.517.613.600	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.023.778.560	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik (RS.Mata Prov.Kaltim)	100 %	1.517.733.000		UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	272.413.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	245.320.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	0	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.000.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	0	0	1.1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (RS.Mata Prov.Kaltim)	98 %	4.000.000.000		UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	0	0	1.1	000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	4.000.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
44	1	0	0			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Angka Kesakitan</b>	<b>10.8 %</b>	<b>5.500.000.000</b>		<b>UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM</b>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Capaian Realisasi Pelayanan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan. UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi (RS.Mata Prov.Kaltim)	98 %	5.500.000.000		UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	0	0	1.0	000	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	500.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	0	0	1.0	001	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	10 Unit	4.732.998.300	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
	1	0	0	1.0	001	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	50 Unit	267.001.700	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD RUMAH SAKIT MATA PROV. KALTIM
						<b>UPTD Laboratorium Kesehatan</b>			<b>32.122.778.461</b>		
	1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>32.122.778.461</b>		
	1	0				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>			<b>32.122.778.461</b>		
45	1	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>	<b>100 % 80 Indeks</b>	<b>10.916.142.480</b>		<b>UPTD LABORATORIUM KESEHATAN</b>
	1	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	3.516.142.480		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	960.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.556.142.480	- Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	400.000.000		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	400.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1	0	0	1.1		Peningkatan Pelayanan BLUD	"Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan"	1 Unit Kerja	7.000.000.000		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.1	000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	7.000.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
46	1	0	0			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Angka Kesakitan</b>	<b>10,8 %</b>	<b>21.206.635.981</b>		<b>UPTD LABORATORIUM KESEHATAN</b>
	1	0	0	1.0		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Bulan Tersedianya Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alkes Sesuai Standar Laboratorium	12 Bulan	21.206.635.981		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1	0	0	1.0	001	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	8 Unit	21.033.027.461	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
	1	0	0	1.0	001	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	150 Unit	173.608.520	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN
						<b>Rumah Sakit Umum Daerah KORPRI</b>			<b>48.498.039.005</b>		
	1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>48.498.039.005</b>		
	1	0				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>			<b>48.498.039.005</b>		
47	1	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (RSUD KORPRI)</b> <b>Presentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (RSUD KORPRI)</b>	<b>80 %</b> <b>100 %</b>	<b>33.165.610.225</b>		<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI</b>
	1	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi keuangan (RSUD KORPRI)	100 %	126.720.000		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	126.720.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (RSUD KORPRI)	100 %	2.360.600.854		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	7 Paket	151.446.354	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	145 Orang	2.209.154.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Capaian Penyelenggaraan Administrasi Umum di Rumah Sakit (RSUD KORPRI)	100 %	2.556.047.338		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	39.977.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	388.081.752	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	346.928.376	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	456.426.600	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	238.133.110	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.086.500.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Yang Terpenuhi (RSUD KORPRI)	100 %	10.690.811.401		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	4.916.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	3.948.030.801	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	1.826.780.600	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Laporan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (RSUD KORPRI)	100 %	13.727.496.200		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	844.837.800	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.882.658.400	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan secara rutin/berkala (RSUD KORPRI)	100 %	568.934.432		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	368.354.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	200.580.432	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	0	0	1.1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian Realisasi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (RSUD KORPRI)	80 %	3.135.000.000		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	0	0	1.1	000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	3.135.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
48	1	0	0			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Unit/Instalasi layanan Rumah Sakit yang memenuhi standar (UPTD RS Korpri)</b>	<b>75 %</b>	<b>15.332.428.780</b>		<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI</b>
	1	0	0	1.0		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan/penunjang pada unit/instalasi sesuai standar (RSUD KORPRI)	90 %	12.652.127.980		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	0	0	1.0	001	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	401 Unit	9.394.684.780	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	0	0	1.0	001	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	450 Unit	304.637.700	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	0	0	1.0	002	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	1 Unit	1.000.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	002	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	7 Paket	1.952.805.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	0	0	1.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan (RSUD KORPRI)	100 %	1.780.550.800		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	0	0	1.0	000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12 Dokumen	1.500.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	0	0	1.0	002	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	280.550.800	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	0	0	1.0		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi (RSUD KORPRI)	95 %	899.750.000		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
	1	0	0	1.0	000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12 Dokumen	899.750.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KORPRI
						<b>RSUD A. Wahab Sjahrnie di Samarinda</b>			<b>793.148.894.568</b>		
	1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>793.148.894.568</b>		
	1	0				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>			<b>793.148.894.568</b>		
49	1	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>	<b>100 % 80 Indeks</b>	<b>731.654.674.812</b>		<b>RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA</b>
	1	0	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit	56 Dokumen	552.000.000		RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	0	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	189.160.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	0	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38 Laporan	362.840.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Rumah Sakit	85 %	210.033.268.832		RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1100 Orang/ Bulan	209.298.808.832	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	339.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	21 Laporan	395.460.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	0	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Rumah Sakit	20 Dokumen	7.170.000		RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	0	0	1.0	000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	7.170.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Penunjang Administrasi Kepegawaian yang di penuhi Rumah Sakit	43 Kegiatan	1.124.220.000		RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1.086.300.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	0	0	1.0	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1580 Orang	37.920.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Ketersediaan Penunjang Kegiatan Administrasi Umum yang di fasilitasi	133 Paket	3.820.532.000		RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1332 Paket	1.341.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	450.860.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	282 Laporan	2.028.672.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Ketersediaan dari Pengadaan Barang dan Penunjang milik Rumah Sakit	93 Unit	4.820.562.980		RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	861.270.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Paket	608.446.200	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	219 Unit	3.150.846.780	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Penunjang Milik Rumah Sakit yang dilakukan pemeliharaan	75 Unit	1.296.921.000		RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit	279.921.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	567.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	450.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	0	0	1.1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Realisasi Target Anggaran Pendapatan dari layanan BLUD	88 %	510.000.000.000		RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	0	0	1.1	000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	510.000.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
50	1	0	0			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS</b>	<b>88 %</b>	<b>58.128.600.656</b>		<b>RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA</b>
	1	0	0	1.0		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai ASPAK/Tingkat Kelengkapan Data Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA)	90 Nilai	56.905.530.148		RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	0	0	1.0	000	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	21.600.362.400	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	0	0	1.0	001	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	391 Unit	33.699.017.748	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	001	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	4589 Unit	1.606.150.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	0	0	1.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Angka Kunjungan Rawat Jalan yang Terlayani	100 %	519.235.000		RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	0	0	1.0	002	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	15 Dokumen	519.235.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	0	0	1.0		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Layanan RS Terintegrasi Secara Sistem	50 %	703.835.508		RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	0	0	1.0	000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	3 Dokumen	703.835.508	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
51	1	0	0			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang dilatih dan ditingkatkan kompetensinya</b>	<b>65 %</b>	<b>3.365.619.100</b>		<b>RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA</b>
	1	0	0	1.0		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase peningkatan kompetensi karyawan melalui pelatihan 20 JPL/Thn di RS	60 %	3.365.619.100		RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
	1	0	0	1.0	000	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	734 Orang	3.365.619.100	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	RSUD A. WAHAB SJAHRANIE DI SAMARINDA
						<b>RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan</b>			<b>455.521.548.709</b>		
	1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>455.521.548.709</b>		
	1	0				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>			<b>455.521.548.709</b>		
52	1	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks kualitas layanan kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti</b>	<b>70 Indeks 100 %</b>	<b>429.018.866.512</b>		<b>RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN</b>
	1	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN.	14 Bulan	117.018.866.512		RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIBOWO DI BALIKPAPAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	670 Orang/ Bulan	117.018.866.512	- Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RSUD DR. KANUJOSO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN
	1	0	0	1.1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja	312.000.000.000		RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN
	1	0	0	1.1	000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	22 Unit Kerja	312.000.000.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN
53	1	0	0			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit</b>	<b>88 %</b>	<b>26.402.682.197</b>		<b>RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN</b>
	1	0	0	1.0		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	95 Unit	26.402.682.197		RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN
	1	0	0	1.0	001	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	93 Unit	24.902.682.197	- Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN
	1	0	0	1.0	001	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	2 Unit	1.500.000.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN
54	1	0	0			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya</b>	<b>60 %</b>	<b>100.000.000</b>		<b>RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN</b>
	1	0	0	1.0		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	60 %	100.000.000		RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN
	1	0	0	1.0	000	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	5 Orang	100.000.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah	RSUD DR. KANUJOSO DJATIWIOWO DI BALIKPAPAN
						<b>Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam</b>			<b>110.357.067.000</b>		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			110.357.067.000		
	1	0 2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			110.357.067.000		
55	1	0 2	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 82 Indeks	84.283.791.288		RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	0 2	0 1	1.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi sesuai dengan waktu yang ditetapkan	100 %	108.200.000		RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	0 2	0 1	1.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	58.800.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	0 2	0 1	1.0 1	000 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	49.400.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	0 2	0 1	1.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tepat Waktu	100 %	41.805.589.788		RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	0 2	0 1	1.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4732 Orang/ Bulan	41.419.309.788	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	0 2	0 1	1.0 2	000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	222.480.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	0 2	0 1	1.0 2	000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	31 Dokumen	163.800.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	0 2	0 1	1.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Rumah Sakit	58 Dokumen	946.474.600		RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	0	0	1.0	000	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	31 Paket	151.252.500	- Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
1	0	0	1.0	000	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23 Paket	478.864.200	- Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
1	0	0	1.0	000	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	18 Paket	67.957.900	- Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
1	0	0	1.0	000	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34 Laporan	248.400.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
1	0	0	1.0		7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketepatan Pengadaan sesuai perencanaan	100 %	2.150.930.100		RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
1	0	0	1.0	000	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit	1.710.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
1	0	0	1.0	000	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	9 Paket	45.760.100	- Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
1	0	0	1.0	000	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	395.170.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
1	0	0	1.0		8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Nilai Survei Kepuasan Pegawai Terhadap Kenyamanan Ditempat Kerja	78,2 %	16.847.403.800		RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
1	0	0	1.0	000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	15.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
1	0	0	1.0	000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	2.041.624.200	- Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan	14.790.779.600	- Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Pada RSJD AHM Yang Berfungsi Dengan Baik	72.19 %	425.193.000		RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	26.831.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	398.362.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	0	0	1.1		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pendapatan Hasil Pelayanan Terhadap Target BLUD	100 %	22.000.000.000		RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	0	0	1.1	000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	15 Unit Kerja	22.000.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
56	1	0	0			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS (RS AHM)</b>	<b>93,73 %</b>	<b>24.911.195.712</b>		<b>RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM</b>
	1	0	0	1.0		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Nilai Aspak	94,8 %	23.445.803.114		RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	0	0	1.0	000	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit	6.582.120.000	- Kota Samarinda, Sambutan, Sungai Kapih	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	0	0	1.0	000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	227 Unit	16.114.686.783	- Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	0	0	1.0	001	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	16.470.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	0	0	1.0	001	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	917 Unit	309.861.161	- Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	0	0	1.0	001	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	345 Unit	198.061.200	- Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	0	0	1.0	002	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	25 Paket	224.603.970	- Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	0	0	1.0		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Angka Kunjungan Rawat Jalan	26102 Orang	724.589.335		RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	0	0	1.0	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	9 Dokumen	724.589.335	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	0	0	1.0		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Jumlah Modul Sistem Informasi Yang Terintegrasi	100 %	740.803.263		RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
	1	0	0	1.0	000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	4 Dokumen	740.803.263	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
57	1	0	0			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>	<b>Persentase SDM Kesehatan Yang Ditingkatkan Kompetensinya (RSJD Atma Husada Mahakam)</b>	<b>92,5 %</b>	<b>1.162.080.000</b>		<b>RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM</b>
	1	0	0	1.0		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Diklat Dan Atau Penelitian Yang Dilaksanakan	84 Laporan	1.162.080.000		RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	202 Orang	1.162.080.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Samarinda Ilir, Sungai Dama	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM
						<b>UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah II</b>			<b>69.479.242.500</b>		
	1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>69.479.242.500</b>		
	1	0				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			<b>69.479.242.500</b>		
58	1	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 72,20 indeks	8.979.242.500		<b>UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II</b>
	1	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	419.200.000		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	343.200.000	- Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	18.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	10.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	36.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	12.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	80.000.000		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	12.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	18.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	904.900.000		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	234.900.000	- Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	20.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen	50.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	36 Orang	250.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	36 Orang	350.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	884.466.745		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	12.500.000	- Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	250.500.000	- Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	92.850.000	- Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	37.096.745	- Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	11.520.000	- Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	450.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	15.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	15.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	985.220.000		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	985.220.000	- Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.699.683.346		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	268.202.946	- Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.419.480.400	- Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	3.005.772.409		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	450.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	38 Unit	1.056.172.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34 Unit	49.599.909	- Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	15 Unit	15.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.435.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Purwajaya - Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
59	1	0	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha) Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Panjang pantai kritis yang ditangani Pengurangan luas genangan banjir perkotaan</b>	<b>9460 Ha 94 Lt/detik 2,8 Km 70 Ha</b>	<b>5.500.000.000</b>		<b>UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II</b>
	1	0	0	1.0		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur air baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani	6 Unit 5480 meter	500.000.000		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	010	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit	500.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Hitam	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	1940 meter	5.000.000.000		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0	001	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	20 KM	5.000.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
60	1	0	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Persentase Panjang Drainase yang ditangani</b>	<b>11,15 %</b>	<b>6.000.000.000</b>		<b>UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II</b>
	1	0	0	1.0		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik	1469 meter	6.000.000.000		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	0	0	1.0	001	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	9 Sistem Drainase Perkotaan	6.000.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
61	1	0	1			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Rasio Kemantapan Jalan Provinsi Penambahan Ruas Jalan Baru</b>	<b>82,09 %</b> <b>1 Ruas Jalan</b>	<b>49.000.000.000</b>		<b>UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II</b>

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
	1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	754,55 Km	49.000.000.000		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	10	1.01	0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	30 Jembatan	9.660.700.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	4,5 KM	29.714.228.981	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
	1	03	10	1.01	0033	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	10 KM	9.625.070.519	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH II
						<b>UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi</b>			<b>6.093.993.000</b>		
	1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>6.093.993.000</b>		
	1	03				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			<b>6.093.993.000</b>		
62	1	03	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti</b>	<b>72,20 indeks 100 %</b>	<b>5.618.696.200</b>		<b>UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI</b>
	1	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	220.840.000		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	03	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	120.840.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											BAHAN KONSTRUKSI
	1	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	25.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	0	0	1.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	25.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	30.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	0	0	1.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	20.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	0	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	65.000.000		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	0	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	25.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	0	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	20.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	0	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	317.856.200		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	227.856.200	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	0	0	1.0	000		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
1	0	0	1.0	000		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	25.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
1	0	0	1.0	000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	40.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
1	0	0	1.0			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	1.715.000.000		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
1	0	0	1.0	000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
1	0	0	1.0	000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	40.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
1	0	0	1.0	000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	200.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
1	0	0	1.0	000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
1	0	0	1.0	000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
1	0	0	1.0	000		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	130.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
1	0	0	1.0	000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											BAHAN KONSTRUKSI
	1	0	0	1.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000	- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	0	0	1.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	25.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	600.000.000		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	500.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	2.225.000.000		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	300.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.900.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	475.000.000		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	225.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	88 Unit	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
63	1	0	1			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Cakupan Pengujian Standar Mutu Konstruksi (Lab)</b>	<b>45,21 %</b>	<b>475.296.800</b>		<b>UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI</b>
	1	0	1	1.0		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD	3 Laporan	475.296.800		UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
	1	0	1	1.0	000	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	3 Bangunan Konstruksi	475.296.800	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI
						<b>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat</b>			<b>3.100.623.720.692</b>		
	1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>3.100.623.720.692</b>		
	1	0				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			<b>2.750.751.674.862</b>		
64	1	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti</b> <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>	<b>100 %</b> <b>72,20 indeks</b>	<b>88.249.321.176</b>		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>
	1	0	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	83 %	1.600.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	54.893.293.845		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.452,00 Orang/Bulan	52.474.605.845	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen	2.018.688.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	300.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	1.550.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	850.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Umum	100 %	3.006.925.631		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	700.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	276.925.631	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	200 Paket	250.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	280.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	800.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	500.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	600.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	21.510.742.700		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.885.206.295	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	18.525.536.405	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi dengan Baik	100 %	4.788.359.000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	500.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	1.000.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	200.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	400.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	2.688.359.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
65	1	0	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha) Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Panjang pantai kritis yang ditangani</b>	<b>9460 Ha 70 Ha 94 Lt/detik 2,8 Km</b>	<b>317.066.477.680</b>		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>
	1	0	0	1.0		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Infrastruktur Air Baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani Pantai Kritis yang ditangani	6 unit 5480 meter 7 Lokasi	226.916.477.680		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	007	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Lembaga	277.289.700	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	007	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	5.48 KM	56.900.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	008	Pembangunan Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	0,2 KM	6.550.000.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	008	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	349.956.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	009	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	6 Lembaga	6.855.736.980	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	009	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	2.68 KM	83.500.000.000	- Kab. Berau, Batu Putih, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Tanjung Tengah	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	010	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	758.995.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	011	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	5 Titik	20.550.000.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo - Kota Bontang, Bontang Utara, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	012	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	15 Dokumen	28.800.000.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
											- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PERUMAHAN RAKYAT
	1	0 3	0 2	1.0 1	012 2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	14 Dokumen	6.824.500.000		- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Biduk-Biduk, Teluk Sumbang - Kab. Berau, Batu Putih, Balikpapan - Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0 3	0 2	1.0 1	012 3	Pembangunan Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	1 Unit	15.550.000.000		- Kota Bontang, Bontang Utara, Bontang Kuala	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0 3	0 2	1.0 2		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	1940 meter	90.150.000.000			DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0 3	0 2	1.0 2	001 4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.78 KM	81.350.000.000		- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0 3	0 2	1.0 2	001 6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	0.16 KM	4.400.000.000		- Kab. Kutai Barat, Bongan, Resak - Kab. Paser, Paser Belengkong, Suliliran Baru	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0 3	0 2	1.0 2	003 2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	8 Dokumen	4.400.000.000		- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
66	1	0	0		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>	<b>Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Curah Lintas Kabupaten/Kota</b>	<b>57,65 %</b>	<b>165.500.000.000</b>		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>
	1	0	0	1.0	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah komponen infrastruktur SPAM Regional yang ditangani	3 Unit	165.500.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	001 Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10 Kabupaten/Kota	800.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	001 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	7 Dokumen	8.220.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	001 Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	70 Liter/Detik	156.030.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	002 Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	5 Kabupaten/Kota	450.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
67	1	0	0		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>	<b>Persentase Kesiapan/Daya Dukung Infrastruktur Persampahan Dalam Penanganan Sampah Domestik</b>	<b>17,50 %</b>	<b>1.000.000.000</b>		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
	1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah dokumen kesiapan infrastruktur pengelolaan persampahan regional	1 Dokumen	1.000.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	04	1.01	0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	25 Orang	550.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	04	1.01	0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	450.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
68	1	03	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>	<b>Persentase Kesiapan Infrastruktur Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota</b>	<b>32,50 %</b>	<b>3.500.000.000</b>		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>
	1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Jumlah dokumen kriteria kesiapan pengolahan air limbah domestik regional	2 Dokumen	3.500.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	05	1.01	0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	25 Orang	1.250.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	05	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	3 Dokumen	2.250.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
69	1	0	0		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Persentase Panjang Drainase yang ditangani</b>	<b>11,15 %</b>	<b>43.650.000.000</b>		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>	
	1	0	0	1.0	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Panjang Drainase yang Berfungsi Baik	1469 meter	43.650.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	0	0	1.0	0007	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	6 Sistem Drainase Perkotaan	41.000.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	6 Dokumen	2.650.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
70	1	0	0		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN</b>	<b>Persentase penanganan infrastruktur permukiman di kawasan strategis provinsi</b>	<b>50 %</b>	<b>30.000.000.000</b>		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>	
	1	0	0	1.0	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah permukiman di KSP dan sekitarnya yang ditingkatkan penyediaan infrastruktur	4 Kawasan	30.000.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	0	0	1.0	0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	4 Unit	30.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
71	1	0	0		<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase Jumlah Gedung Untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Ditangani</b>	<b>59,77 %</b>	<b>861.908.614.323</b>		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>	
	1	0	0	1.0	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	15 Unit	861.908.614.323		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT	
	1	0	0	1.0	001 2	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	50 Orang	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	001 3	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	5 Rumah Negara	274.999.627	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	001 5	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	25 Bangunan Gedung Negara	274.999.628	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	001 6	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	68 Bangunan Gedung	819.858.615.068	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	001 7	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	2 Lisensi	400.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	001	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	2 Kabupaten/Kota	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	001	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	68 Dokumen	40.400.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
72	1	0	0			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>Persentase jumlah kawasan yang ditata</b>	<b>50 %</b>	<b>40.000.000.000</b>		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>
	1	0	0	1.0		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan yang selesai di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	3 Kawasan	40.000.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	3 Kawasan	30.700.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	2 Dokumen	1.600.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	001	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan	4 Dokumen	7.500.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan				PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	001	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan	10 kabupaten/kota	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
73	1	0	1			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Rasio Kemantapan Jalan Provinsi Penambahan Ruas Jalan Baru</b>	<b>82,09 % 1 Ruas Jalan</b>	<b>1.164.877.261.683</b>		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>
	1	0	1	1.0		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan baru yang terbangun Panjang jalan dengan kondisi mantap	26 km 754,55 km	1.164.877.261.683		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.0	002	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	895 KM	40.000.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.0	003	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	57,6 KM	742.654.361.683	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.0	003	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	6 Jembatan	68.900.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	1	1.0	004	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	7 KM	37.822.900.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.0	004	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	25 Dokumen	22.600.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.0	004	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	14.5 KM	248.500.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.0	004	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	895 KM	2.900.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.0	004	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen	1.500.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
74	1	0	1			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>	<b>Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Bersertifikat</b>	<b>57,64 %</b>	<b>21.500.000.000</b>		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM,</b>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											<b>PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>
	1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli yang bersertifikat	1500 orang	14.680.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	1.01	0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	96 Orang	1.280.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	1.01	0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	1.01	0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	1500 Orang	6.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	1.01	0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	8 Lembaga	1.200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	1.01	0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	1 Dokumen	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	11	1.01	0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	1500 Orang	5.700.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.0	001	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	500 Orang	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.0	001	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	1 Lembaga	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.0		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan yang disediakan	1 Layanan	750.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.0	000	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1 Layanan Informasi	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.0	000	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	1 Perangkat Pendukung	250.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.0	000	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.0	000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	60 Orang	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.0		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	3 Laporan	6.070.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.0	000	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	130 Paket Pekerjaan	1.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.0	000	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	20 Bangunan Konstruksi	500.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.0	000	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	11 Lembaga	2.300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.0	000	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	100 Badan Usaha	750.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.0	000	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	1.520.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
75	1	0	1			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>Skoring penyelenggaraan penataan ruang</b>	<b>83,20 Skor</b>	<b>13.500.000.000</b>		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM,</b>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											<b>PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>
	1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Skor Kegiatan Penetapan RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	13,24 Skor	2.200.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	1.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	1 Dokumen	1.800.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	1.01	0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100 Orang	400.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	27,65 %	2.350.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	1.02	0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	1 Laporan	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	1.02	0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	25 Orang	350.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	1	1.0	000	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.0	000	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	1 Laporan	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.0	001	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	4 Berita Acara	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.0		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	26,5 %	4.600.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.0	000	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	6 Layanan	600.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.0	000	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	2 Laporan	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	1	1.0	000	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	6 Layanan	350.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	03	12	1.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	5 Dokumen	1.250.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	1.03	0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	2 Dokumen	1.900.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Skor Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	15,81 %	4.350.000.000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	1.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1.400.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	1.04	0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	1 Kasus	800.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	1.04	0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1 Dokumen	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	1.04	0011	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	1 Dokumen	1.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								
	1	03	12	1.04	0012	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Jumlah dokumen penyelesaian sengketa penataan ruang	1 Berita Acara	350.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	03	12	1.04	0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			<b>349.872.045.830</b>		
76	1	04	02			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Persentase penyelenggaraan SPM perumahan	<b>33,32 %</b>	<b>3.860.830.230</b>		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>
	1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program yang Terbangun	0 unit	2.099.123.830		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	02	1.01	0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	2 Dokumen	2.099.123.830	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	02	1.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4 Laporan	1.761.706.400		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	04	02	1.04	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	2 Laporan	1.761.706.400	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
77	1	0	0			<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	<b>Pengurangan Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi</b>	<b>108,10 Ha</b>	<b>178.238.293.600</b>		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>
	1	0	0	1.0		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas kawasan kumuh kewenangan provinsi yang ditangani	88,96 Ha	178.238.293.600		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	1000 Unit Rumah	29.301.156.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	5 Laporan	2.171.200.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	001	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	35 Ha	146.765.937.600	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
78	1	0	0			<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>	<b>Persentase penanganan PSU permukiman</b>	<b>22,40 %</b>	<b>167.772.922.000</b>		<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>
	1	0	0	1.0		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	Jumlah lokasi permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Menunjang Fungsi Permukiman	15 Lokasi	167.772.922.000		DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	8 Dokumen	2.437.510.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
	1	0	0	1.0	000	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	15 Lokasi	165.335.412.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT
						<b>UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah I</b>			<b>50.000.000.000</b>		
	1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>50.000.000.000</b>		
	1	0	3			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			<b>50.000.000.000</b>		
79	1	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti</b>	<b>72,20 indeks 100 %</b>	<b>5.553.568.000</b>		<b>UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I</b>
	1	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	287.480.000		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	282.480.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan	1 Laporan	5.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	20.000.000		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	5.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	354.977.500		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	22.977.500	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	189.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	138.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	944.188.473		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	25.197.473	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	161.277.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	34.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	9.600.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	704.114.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	572.000.000		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	40.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	420.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	33 Unit	112.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	2.000.000.000		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	180.808.080	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.809.191.920	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi baik	100 %	1.374.922.027		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	158.902.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	17 Unit	607.400.027	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76 Unit	85.120.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	5.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	518.500.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
80	1	0	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi (Ha)</b> <b>Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih</b> <b>Pengurangan luas genangan banjir perkotaan</b> <b>Panjang pantai kritis yang ditangani</b>	<b>9460 Ha</b> <b>94,70 %</b> <b>70 %</b> <b>2,8 Km</b>	<b>7.500.000.000</b>		<b>UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I</b>
	1	0	0	1.0		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Infrastruktur air baku yang ditangani Panjang segmen sungai yang ditangani	6 Unit 5480 meter	2.000.000.000		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota					PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0	0078	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	2 Unit	500.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0	0099	Rehabilitasi Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	1,25 KM	1.000.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0	0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,5 KM	500.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	1940 meter	5.500.000.000		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	787,944 KM	5.500.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
81	1	0	0			<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>	<b>Persentase jumlah gedung untuk kepentingan strategis provinsi yang ditangani</b>	<b>59,77 %</b>	<b>550.000.000</b>		<b>UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I</b>
	1	0	0	1.0		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung yang selesai dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai	1 unit	550.000.000		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	0	1.0	0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	1 Bangunan Gedung	550.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
82	1	0	1			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Rasio Kemantapan Jalan Provinsi Penambahan Ruas Jalan Baru</b>	<b>82,09 % 1 Ruas Jalan</b>	<b>36.396.432.000</b>		<b>UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I</b>
	1	0	1	1.0		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	754,55 km	36.396.432.000		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	1	1.0	002	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	6 Jembatan	2.000.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	1	1.0	003	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	5 KM	7.000.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
	1	0	1	1.0	003	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	20 KM	27.396.432.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH I
						<b>UPTD Pemeliharaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Wilayah III</b>			<b>62.795.000.000</b>		
	1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>62.795.000.000</b>		
	1	0				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			<b>62.795.000.000</b>		
83	1	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti</b>	<b>72,20 indeks 100 %</b>	<b>6.795.000.000</b>		<b>UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III</b>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapatkan Layanan Administrasi Keuangan Tepat Waktu	100 %	473.340.000		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	383.340.000	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Sungai Bedungun - Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	25.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	25.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	25.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	15.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dilakukan penatausahaan	100 %	32.500.000		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	12.500.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	100 %	222.887.000		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	140.112.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Tanjung Redeb - Kab. Berau, Gunung Tabur, Gunung Tabur	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	5.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	27.775.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	45.000.000	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb - Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	983.536.008		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	34.680.500	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb - Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.742.200	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb - Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	61.392.500	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb - Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	52.515.808	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb - Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	57.008.000	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb - Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	47.000	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb - Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	708.950.000	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb - Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	14.200.000	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb - Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	5.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	100 %	40.200.000		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	40.200.000	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb - Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	3.533.250.600		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	21.169.200	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb - Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	226.689.000	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb - Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.385.200	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb - Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.284.007.200	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb - Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	100 %	1.509.286.392		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	47 Unit	100.300.000	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb - Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	26 Unit	802.947.300	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb - Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	65 Unit	64.475.100	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb - Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit	499.299.000	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb - Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	42.264.992	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb - Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Singa Gembara	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
84	1	0	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>	<b>Luas sawah yang terlayani jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi kewenangan provinsi Penambahan kapasitas air baku untuk air bersih Pengurangan luas genangan banjir perkotaan Panjang pantai kritis yang ditangani</b>	<b>9460 Ha 94 Lt/detik 70 Ha 2,8 Km</b>	<b>7.000.000.000</b>		<b>UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III</b>
	1	0	0	1.0		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Jaringan Irigasi berfungsi Baik	1940 meter	7.000.000.000		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	0	1.0	001	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.3 KM	2.000.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	1	0	0	1.0	002			Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	002	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	32 KM	5.000.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
85	1	0	1			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>Rasio Kemantapan Jalan Provinsi Penambahan Ruas Jalan Baru</b>	<b>82,09 %</b> <b>1 Ruas Jalan</b>	<b>49.000.000.000</b>		<b>UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III</b>
	1	0	1	1.0		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Panjang jalan dengan kondisi mantap	754,55 km	49.000.000.000		UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	1	1.0	002	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	20 Jembatan	2.000.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	1	1.0	003	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	1.8 KM	15.000.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
	1	0	1	1.0	003	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	37 KM	32.000.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM WILAYAH III
						Satuan Polisi Pamong Praja			30.800.000.000		
	1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			30.800.000.000		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	5			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			<b>30.800.000.000</b>		
86	1	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>	<b>100 persen 90 persen</b>	<b>24.454.739.100</b>		<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>
	1	0	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 persen	1.211.315.800		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	301.696.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	12.965.000	- Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	12.965.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 Laporan	96.224.800	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	787.465.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100 Persen	14.016.195.928		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	71 Orang/ Bulan	13.411.663.928	- Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	349.800.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	149.980.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Dokumen	104.752.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 persen	772.214.100		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	669.189.100	- Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	21.650.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	81.375.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi baik	100 Persen			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.360.184.450	- Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.842.400	- Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	165.810.472	- Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	32.887.000	- Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD	100 Persen	1.150.644.578	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	788.553.400	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	650.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 Persen	138.553.400	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.559.009.422	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	261.627.182	- Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 Persen	5.297.382.240	- Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	747.266.000	- Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	60.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	408.762.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	29.860.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
87	1	0	0			<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan</b>	<b>100 persen</b>	<b>248.644.000</b>	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>
									<b>5.743.810.900</b>		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
	1	0	0	1.0		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan trantibum dalam Kat/Kota yang ditangani Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	4 Kasus 120 orang	4.417.846.700		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	001	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	2 Dokumen	377.050.900	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	001	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	2 Laporan	42.018.200	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	001	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2 Laporan	1.847.594.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	001	Pencegahan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	4 laporan	1.298.778.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	001	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti pelatihan teknis Satuan Polisi Pamong Praja	120 Orang	852.405.600	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakan	4 Perda dan Perkada	1.205.914.200		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	000	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	440.993.100	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	000	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 Laporan	239.984.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	000	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	4 Laporan	364.910.550	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokuman	160.026.050	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Polisi Pamongpraja yang memiliki kualitas PPNS	1 orang	120.050.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	000	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	1 Laporan	120.050.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
88	1	0	0			<b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>	<b>Penurunan Jumlah Kejadian Kebakaran</b>	<b>296 Jumlah</b>	<b>601.450.000</b>		<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>
	1	0	0	1.0		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Jumlah Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran dan Non Kebakaran	4 Dokumen	601.450.000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	000	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	1 Dokumen	151.400.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	5 Dokumen	184.850.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	001	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	1 Dokuman	170.650.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	0	0	1.0	002	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	94.550.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
						<b>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</b>			<b>28.929.067.000</b>		
	1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>28.929.067.000</b>		
	1	0				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			<b>28.929.067.000</b>		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
89	1	0	0		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</b>	<b>85 Indeks 80 %</b>	<b>21.147.867.000</b>		<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>
	1	0	0	1.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	1 Dokumen 6 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Laporan 3 Laporan	1.682.813.500		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	338.799.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	76.430.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	75.760.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.620.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.540.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	620.114.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	564.550.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian atau verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Dokumen 12 Dokumen 3 Dokumen 45 Orang / Bulan	11.399.723.165		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	10.600.723.165	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	305.280.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	162.500.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	149.300.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	63.640.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	62.380.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	55.900.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
											N BENCANA DAERAH	
	1	0	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	100 %		25.800.000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		2.400.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		21.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		2.400.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang 1 Paket 2 Orang		340.410.575		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		25.750.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen		2.400.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen		2.400.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		112.212.775	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang		197.647.800	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
										N BENCANA DAERAH	
	1	0	0	1.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Dokumen 145 Laporan 21 Paket 10 Paket	1.527.293.700		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.481.400	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	195.390.100	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket	278.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	70.287.200	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145 Laporan	945.600.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen	21.335.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	7.200.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit 4 Unit	1.854.802.000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	1.362.192.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	492.610.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan 12 Laporan	3.500.644.760		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.590.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	610.168.200	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.888.886.560	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	44 Unit 172 Unit 1 Unit	816.379.300		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	44 Unit	477.619.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit	82.700.800	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	3.117.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											N BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	252.942.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
90	1	0	0			<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>	<b>Presentase Penanganan Pra Bencana</b>	<b>100 %</b>	<b>7.781.200.000</b>		<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>
	1	0	0	1.0		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	100 %	200.000.000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	20 Orang	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	12 Laporan 30 Orang 100 %	2.325.235.000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	001	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	1 Dokumen	154.035.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	001	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan	400.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	001	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	12 Dokumen	720.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	001	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	001	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang meningkatkan kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	20 Orang	351.200.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	001	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparaturnya di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	400 Orang	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	002	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	60 Unit	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	20 Orang 10 Laporan 10 Laporan	1.720.000.000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	000	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	10 Laporan	620.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	20 Laporan	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	800 Orang	800.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	3.535.965.000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	60 Keluarga	230.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	000	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	5 Dokumen	2.208.800.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	001	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	1 Dokumen	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	001	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Jumlah Dokumen yang dilegalikan	1 Dokumen	100.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	001	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	1 Dokumen	100.000.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1	0	0	1.0	002	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	10 kabupaten/kota	597.165.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
						<b>Dinas Sosial</b>			<b>113.922.398.886</b>		
	1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>113.906.398.886</b>		
	1	0				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>			<b>113.906.398.886</b>		
91	1	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti</b>	<b>82 % 100 %</b>	<b>49.855.680.431</b>		<b>DINAS SOSIAL</b>
	1	0	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan / Dokumen Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Lap)	5 Laporan	1.837.074.750		DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	0	0	1.0	000	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1.142.633.500	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0	000	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	65.600.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0	000	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	65.600.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0	000	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	302.327.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0	000	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	260.913.750	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial Prov. Kaltim	6 Laporan	30.787.904.239		DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0	000	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165 Orang/ Bulan	30.069.825.739	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0	000	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	387.120.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0	000	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	44.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0	000	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	17.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0	000	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	174.639.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0	000	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	95.319.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi BMD	1 Laporan	14.000.000		DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0	000	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	14.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	4 Kegiatan	1.017.485.000		DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0	000	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	655.044.000	- Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0	000	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	164.565.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0	000	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	136.342.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	0	0	1.0	000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	61.533.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Dinas Sosial Prov. Kaltim	5 Laporan	3.354.754.100		DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0	000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	211.481.800	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0	000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	796.162.800	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0	000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	380.687.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0	000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.825.859.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0	001		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	90.562.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0	001		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	5.150.554.400		DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0	000		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	4.481.892.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0	000		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	44.524.400	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0	000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	624.138.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	5.225.964.360		DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0	000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	79.416.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0	000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	510.139.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0	000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.636.409.360	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Sosial Prov. Kaltim	4 Laporan	2.467.943.582		DINAS SOSIAL
1	0	0	1.0	000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	80.196.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit	853.396.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	122.100.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	977.352.582	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	384.899.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
92	1	0	0			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>PERSENTASE LEMBAGA SOSIAL/MITRA SOSIAL YANG DIBERDAYAKAN</b>	<b>36 %</b>	<b>6.207.432.500</b>		<b>DINAS SOSIAL</b>
	1	0	0	1.0		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Rekomendasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Rekomendasi	275.400.000		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	15 Dokumen	275.400.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.0		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan	4 PSKS	5.932.032.500		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.0	000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	40 Orang	3.244.350.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.0	000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi yang Meningkatkan Kapasitasnya	105 Orang	1.851.250.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.0	000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	10 Keluarga	458.132.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	237 Lembaga	378.300.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
93	1	0	0			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase PMKS Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti</b>	<b>100 %</b>	<b>22.395.939.579</b>		<b>DINAS SOSIAL</b>
	1	0	0	1.0		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang diberikan pelayanan, rehabilitasi dan rehabilitasi sosial	30 Orang	867.217.170		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	30 Orang	688.375.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	30 Orang	139.285.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	30 Orang	9.984.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.0	000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	30 Orang	25.573.170	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.0	000	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	30 Orang	4.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.0		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang di berikan pelayanan, rehabilitasi serta bantuan sosial	7700 Orang	21.528.722.409		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	7630 Orang	16.078.640.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.0	001	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	70 Orang	434.910.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.0	001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	15 Dokumen	5.015.172.409	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
94	1	0	0			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>Jumlah Keluarga Miskin Yang Mendapat Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP)</b>	<b>12.936 Orang</b>	<b>21.777.911.886</b>		<b>DINAS SOSIAL</b>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Pengangkatan Anak Antar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal	18 Orang	364.815.500		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.0	000	Pengangkatan Anak antar WNI	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	15 Orang	322.815.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.0	000	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	3 Orang	42.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.0		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengentasan Kemiskinan dan Penanganan Kemiskinan Kewenangan Provinsi	12918 Orang	21.413.096.386		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.0	000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	12.418 Keluarga	16.367.800.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.0	000	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	3 Keluarga	2.527.796.386	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.0	000	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	500 Orang	2.517.500.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
95	1	0	0			<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase penanganan korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi</b>	<b>100 %</b>	<b>13.030.201.500</b>		<b>DINAS SOSIAL</b>
	1	0	0	1.0		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pasca bencana	17.870 Orang	13.030.201.500		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	17870 Orang	7.021.970.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	1000 Orang	798.200.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	1000 Unit	2.968.916.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.0	000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	900 Orang	904.165.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.0	000	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	600 Orang	1.336.949.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
96	1	0	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang dikelola dengan baik</b>	<b>1 Lokasi</b>	<b>639.232.990</b>		<b>DINAS SOSIAL</b>
	1	0	0	1.0		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Lokasi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Lokasi	639.232.990		DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.0	000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dokumen	298.232.990	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam	185.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	1	0	0	1.0	000	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan	156.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Kota, Bugis	DINAS SOSIAL
	X					<b>NON URUSAN</b>			<b>16.000.000</b>		
	X	X	X			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>			<b>16.000.000</b>		
97	X	X	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Dinas Sosial) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti</b>	<b>82 % 100 %</b>	<b>16.000.000</b>		<b>DINAS SOSIAL</b>
	X	X	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi BMD	1 Laporan	16.000.000		DINAS SOSIAL
	X	X	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	8.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
	X	X	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen	8.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS SOSIAL
						<b>UPTD Panti Sosial Tresna Werdha Nirwana Puri</b>			<b>12.994.421.060</b>		
	1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>12.994.421.060</b>		
	1	0	6			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>			<b>12.994.421.060</b>		
98	1	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS LANJUT USIA) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti</b>	<b>82 % 100 %</b>	<b>7.838.308.380</b>		<b>UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI</b>
	1	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	2.542.402.480		UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan Dokumen	2.542.402.480	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Kegiatan	150.688.800		UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	150.688.800	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.590.944.900		UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.059.100	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	993.473.200	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	35.212.600	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	517.200.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11 Paket	801.978.000		UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	565.199.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	305 Unit	236.779.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	394.218.800		UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	386.462.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	7.756.800	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	312 Unit	2.358.075.400		UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	180.935.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	2.177.140.400	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
99	1	0	0			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase PMKS Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>5.156.112.680</b>		<b>UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI</b>
	1	0	0	1.0		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSTW-NP)	126 Orang	5.156.112.680		UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	126 Orang	2.929.155.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	126 Orang	366.616.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	126 Orang	223.688.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	0	0	1.0	000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	126 Orang	222.282.280	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	0	0	1.0	000	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	126 Orang	1.340.869.400	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
	1	0	0	1.0	001	Pemulasaraan	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	126 Orang	73.502.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA NIRWANA PURI
						<b>UPTD Panti Sosial Perlindungan Anak Dharma</b>			<b>23.451.415.000</b>		
	1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>23.451.415.000</b>		
	1	0				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>			<b>23.451.415.000</b>		
100	1	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK BALITA TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti</b>	<b>82 % 100 %</b>	<b>20.798.565.200</b>		<b>UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA</b>
	1	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Kegiatan Administrasi Keuangan Dinas Sosial (UPTD.PSPAD)	1 Laporan	1.474.967.920		UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.474.967.920	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan Pakaian kepegawaian perangkat daerah	2 kegiatan	85.914.000		UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	85.914.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Laporan	508.514.200		UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.675.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	232.005.200	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	9.130.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	256.704.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah tersedianya Barang Milik Daerah	1 kegiatan	6.391.836.600		UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	22.262.200	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	6.369.574.400	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan tersedianya Jasa Pelayanan Umum Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	2 Laporan	348.858.800		UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	346.858.800	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah	73 Unit	11.988.473.680		UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	235.402.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	71.900.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	11.681.171.680	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
<b>10</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase PMKS Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti</b>	<b>100 %</b>	<b>2.652.849.800</b>		<b>UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA</b>
	1	0	0	1.0		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	jumlah anak terlantar yang dibina, di layani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD. PSPAD)	80 Orang	2.652.849.800		UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1.641.405.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	646.142.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	218.658.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	0	0	1.0	000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	76.300.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
	1	0	0	1.0	000	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	70.344.800	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK DHARMA
						<b>UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Harapan</b>			<b>8.651.908.000</b>		
	<b>1</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>8.651.908.000</b>		
	<b>1</b>	<b>0</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>			<b>8.651.908.000</b>		
102	1	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS ANAK TERLANTAR) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti</b>	<b>82 % 100 %</b>	<b>5.623.043.200</b>		<b>UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN</b>
	1	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	1.633.568.000		UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.633.568.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	164.653.000		UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	164.653.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya fasilitasi pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik setiap bulannya	4 Kegiatan	1.196.579.200		UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.573.900	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	629.438.300	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.367.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	520.200.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Operasional	2 unit	321.835.200		UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	69.840.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	251.995.200	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	3 Laporan	309.786.800		UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.556.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	210.806.800	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	92.424.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Gedung Kantor setiap bulannya	32 unit	1.996.621.000		UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	140.446.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	73.145.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1.783.030.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
103	1	0	0			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase PMKS Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>3.028.864.800</b>		<b>UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN</b>

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
	1	0	0	1.0		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Jumlah Anak Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSAAH)	80 orang	3.028.864.800		UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanaan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	80 Orang	1.730.566.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	80 Orang	626.680.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	80 Orang	375.843.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	0	0	1.0	000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	80 Orang	138.255.800	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
	1	0	0	1.0	000	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	80 Orang	157.520.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN
						<b>UPTD Panti Sosial Bina Remaja</b>			<b>14.950.429.940</b>		
	1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>14.950.429.940</b>		
	1	0				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>			<b>14.950.429.940</b>		
104	1	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS REMAJA, ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti</b>	<b>82 % 100 %</b>	<b>11.418.196.240</b>		<b>UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA</b>
	1	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	1.344.868.720		UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Laporan Dokumen	1.344.868.720	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan Pakaian dan Pendidikan dan Pelatihan kepegawaian perangkat daerah	1 Paket	142.412.000		UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	37 Stel / Paket Paket	142.412.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
	1	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	1.071.539.709		UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	63.790.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket Paket	520.750.709	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	110.013.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	376.986.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bangunan penunjang yang disediakan	2 Unit	2.731.925.411		UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	0	0	1.0	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	2.731.925.411	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, surat menyurat dan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang Disediakan	2 Laporan	174.999.200		UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan Laporan	12.758.200	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	162.241.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	59 Unit	5.952.451.200		UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit Unit	89.002.800	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit Unit	86.480.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit Unit	509.187.960	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	0	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit Unit	5.267.779.940	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
105	1	0	0			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase peningkatan PMKS Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang terpenuhi kebutuhannya didalam Panti</b>	<b>100 %</b>	<b>3.532.233.700</b>		<b>UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA</b>
	1	0	0	1.0		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	Jumlah Anak, Remaja Terlantar yang dibina, dilayani, dilindungi dan di rehabilitasi oleh Dinas Sosial (UPTD PSBR)	105 Orang	3.532.233.700		UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	105 Orang	1.181.701.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	105 Orang Orang	421.224.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	105 Orang Orang	58.435.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	0	0	1.0	000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	105 Orang Orang	1.557.015.200	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
	1	0	0	1.0	001	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	105 Orang Orang	313.858.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL BINA REMAJA
						<b>UPTD Panti Sosial Karya Wanita Harapan Mulia</b>			<b>24.453.285.000</b>		
	1					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>24.453.285.000</b>		
	1	0				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>			<b>24.453.285.000</b>		
106	1	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (UPTD PMKS GELANDANGAN DAN PENGEMIS) Presentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti</b>	<b>82 %</b> <b>100 %</b>	<b>23.703.078.280</b>		<b>UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA</b>
	1	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Pembayaran Gaji, Tunjangan, Honorarium ASN dan NON ASN	1 Laporan	679.775.680		UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
1	0	0	1.0	000	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	679.775.680	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
1	0	0	1.0			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dalam menunjang akuntabilitas daerah	4 Kegiatan	177.729.600		UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
1	0	0	1.0	000	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.239.200	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
1	0	0	1.0	000	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.088.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
1	0	0	1.0	000	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	2.402.400	- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
1	0	0	1.0	000	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	147.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
1	0	0	1.0			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang disusun pada kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	22.658.103.000		UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
1	0	0	1.0	000	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	22.658.103.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
1	0	0	1.0			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	89.531.800		UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
1	0	0	1.0	000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	89.531.800	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	1	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Gedung Kantor yang dipelihara setiap bulannya	31 Unit	97.938.200		UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	50.998.700	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	38.588.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	8.351.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
<b>107</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase PMKS Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam Panti (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>750.206.720</b>		<b>UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA</b>
	1	0	0	1.0		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah PMKS Lainnya di Luar HIV/AIDS yang dibina, dilayani, dilindungi dan direhabilitasi oleh Dinas Sosial	35 Orang	750.206.720		UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	0	0	1.0	000	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	35 Orang	396.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	0	0	1.0	000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	35 Orang	315.316.720	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	0	0	1.0	000	Akses Kelayakan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	35 Orang	5.340.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA
	1	0	0	1.0	001	Pemulangan ke Daerah Asal	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	10 Orang	33.550.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	UPTD PANTI SOSIAL KARYA WANITA HARAPAN MULIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
						<b>Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</b>			<b>59.229.451.000</b>		
	2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>57.729.451.000</b>		
	2	07				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>			<b>57.729.451.000</b>		
108	2	07	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Sekretariat Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti</b>	<b>82 indeks 100 Persen</b>	<b>43.587.438.250</b>		<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>
	2	07	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	10 Dokumen	2.449.905.100		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.936.649.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	177.780.200	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	335.475.400	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Laporan	33.305.884.810		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	190 Orang/ Bulan	32.444.637.810	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	500.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	07	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	27.490.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
2	0	0	1.0	000	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	310.032.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	0	0	1.0	000	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	23.725.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	0	0	1.0			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	440.000.000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	0	0	1.0	000	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	190 Paket	190.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	0	0	1.0	000	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	0	0	1.0	000	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	150.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	0	0	1.0	001	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	50.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	0	0	1.0			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.919.094.700		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	0	0	1.0	000	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	20.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	0	0	1.0	000	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	0	0	1.0	000	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	314.094.700	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	0	0	1.0	000	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	55.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	0	0	1.0	000	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10 Dokumen	30.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	850.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	150.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	195.000.000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	70.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	75.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	4.226.183.640		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.000.000	- Kota Bontang, Bontang Selatan, Bontang Lestari	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	481.905.800	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	70.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.668.277.840	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1.051.370.000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	55.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	196.370.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	50.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	650.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
10	2	0	0			<b>PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Menyusun Rencana Tenaga Kerja</b>	<b>30 Persen</b>	<b>1.000.000.000</b>		<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>
	2	0	0	1.0		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Difasilitasi	7 Dokumen	1.000.000.000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	7 Dokumen	750.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	000	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	30 Orang	250.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
11	2	0	0			<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang dimagangkan dan bekerja</b>	<b>65 Persen</b>	<b>3.443.647.800</b>		<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>
	2	0	0	1.0		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Yang Bekerja	59 Orang	3.160.924.000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	320 Orang	3.090.924.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	0	0	1.0	000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	15 Lembaga	70.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Laporan LPK Yang Terakreditasi	10 Laporan	70.000.000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	000	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	10 LPK	70.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	Jumlah Laporan Perusahaan Menengah yang ditingkatkan Produktivitasnya	1 Laporan	100.000.000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	20 Perusahaan	100.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan hasil Pengukuran Produktivitas tingkat Daerah Provinsi	1 Laporan	112.723.800		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	000	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen	112.723.800	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
111	2	0	0			<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan</b>	<b>27,10 Persen</b>	<b>2.525.764.900</b>		<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>
	2	0	0	1.0		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencari Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan	180 Orang	702.744.000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	240 Orang	70.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Sungai Pinang, Temindung Permai	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	180 Orang	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	000	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	10000 Orang	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	000	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	160 Orang	382.744.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	0	0	1.0		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang mendapatkan izin	15 Lembaga	50.000.000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	000	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	15 Lembaga	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Event Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2 Event	1.700.980.900		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	000	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihilangkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	45.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	50000 Orang	198.228.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	000	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	220 Orang	1.457.752.900	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang diterbitkan Notifikasinya	20 Orang	72.040.000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	20 Orang	72.040.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
11 2	2	0	0			<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase perusahaan lintas kabupaten/kota yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ( PP/PKB, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan</b>	<b>65 Persen</b>	<b>3.172.600.050</b>		<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>
	2	0	0	1.0		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Keputusan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diterbitkan	100 SK	670.658.300		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	000	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	40 Perusahaan	377.842.400	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
2	0	0	1.0	000	2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	40 Perusahaan	202.922.100	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	0	0	1.0	000	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan	89.893.800	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	0	0	1.0			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dilakukan Pembinaan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	40 Perusahaan	1.200.516.950		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	0	0	1.0	000	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1 Perkara	684.501.350	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	0	0	1.0	000	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	10 Perkara	127.309.800	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	0	0	1.0	000	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	10 Asosiasi dan Serikat Pekerja	189.509.800	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	0	0	1.0	000	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	7 Lembaga	199.196.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	0	0	1.0			Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Jumlah Surat Keputusan Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota	10 Surat Keputusan	1.301.424.800		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	0	0	1.0	000	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan	634.079.700	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	000	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	9 Surat Keputusan	517.345.100	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	000	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	10000 Orang	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
113	2	0	0			<b>PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN</b>	<b>Persentase Perusahaan yang diperiksa dan diawasi</b>	<b>17,64 Persen</b>	<b>4.000.000.000</b>		<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>
	2	0	0	1.0		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Jumlah Perusahaan yang diperiksa dan diawasi	3800 Perusahaan	4.000.000.000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	000	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	320 Perusahaan	1.950.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	000	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	1 Kasus	600.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	2	0	0	1.0	000	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	520 Perusahaan	1.450.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>1.500.000.000</b>		
	3	3	2			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI</b>			<b>1.500.000.000</b>		
114	3	3	0			<b>PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Jumlah pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi</b>	<b>1 Kawasan Transmigrasi</b>	<b>477.054.000</b>		<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	3	0	1.0		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Pencadangan Tanah Yang Ditetapkan	1 Dokumen	477.054.000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	3	0	1.0	000	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen	100.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	3	0	1.0	000	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	119.196.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	3	0	1.0	000	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	10947.55 Hektar	180.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	3	0	1.0	000	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	77.858.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
<b>11</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>			<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Jumlah Rencana Kawasan Transmigrasi ( RKT ) Lintas Kab/Kota Dalam Satu Provinsi</b>	<b>1 Kawasan Transmigrasi</b>	<b>545.791.300</b>		<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>
	3	3	0	1.0		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	1 Dokumen	545.791.300		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	3	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan	128.598.000	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	3	0	1.0	000	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 Dokumen	10.000.000	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	3	0	1.0	000	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	5 Kepala Keluarga	10.000.000	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	3	0	1.0	000	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	40 Orang	100.000.000	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	3	0	1.0	001	Pelayanan Kesehatan Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	10 KK	100.000.000	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	3	0	1.0	001	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	1 Lokasi	197.193.300	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
116	3	3	0			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>Persentase Transmigran Yang Ditingkatkan Keterampilannya Berdasarkan Penempatan di Dalam Kawasannya</b>	<b>100 Persen</b>	<b>477.154.700</b>		<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>
	3	3	0	1.0		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pegaturan, Pembinaan, Bantuan, Fasilitasi, Mediasi, Advokasi, Pelayanan, Bimbingan, Pendampingan dan Pelatihan	1 Dokumen	477.154.700		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	3	0	1.0	000	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	60 Kepala Keluarga	327.154.700	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	3	3	0	1.0	000	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 Satuan Permukiman	150.000.000	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
						<b>UPTD Balai Latihan Kerja Industri Balikpapan</b>			<b>29.266.509.000</b>		
	2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>29.266.509.000</b>		
	2	0	7			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>			<b>29.266.509.000</b>		
117	2	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>	<b>100 persen 82 Indeks</b>	<b>5.473.509.000</b>		<b>UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN</b>
	2	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	557.000.000		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	407.000.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan	1 Laporan	150.000.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang	UPTD BALAI LATIHAN KERJA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
						Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				INDUSTRI BALIKPAPAN	
	2	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	30.000.000		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	24 Paket	30.000.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	1.462.486.400		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.556.500	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	488.869.400	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	20.000.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	350.060.500	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	95.000.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	500.000.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	860.000.000		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	0	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	70.000.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	0	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	500.000.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	0	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	290.000.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1.909.139.100		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	390.641.500	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	304.350.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.209.147.600	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	654.883.500		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	55.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Bontang Lestari	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	49.883.500	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Bontang Lestari	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	150.000.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	0	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	0	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300.000.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
118	2	0	0			<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja</b>	<b>75 Persen</b>	<b>23.793.000.000</b>		<b>UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN</b>
	2	0	0	1.0		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten	75 Persen	23.793.000.000		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	0	0	1.0	000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	1040 Orang	21.900.000.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	0	0	1.0	000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	15 Lembaga	250.000.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
	2	0	0	1.0	000	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	5 Unit	1.643.000.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BALIKPAPAN
						<b>UPTD Balai Latihan Kerja Industri Bontang</b>			<b>27.705.998.000</b>		
	2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>27.705.998.000</b>		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
	2	0	7			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA</b>			<b>27.705.998.000</b>			
119	2	0	7	0	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Keluhan Pengguna yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>	<b>100 persen 82 Indeks</b>	<b>6.748.881.500</b>		<b>UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG</b>	
	2	0	7	0	1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	1 Dokumen	1.142.940.000		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG	
	2	0	7	0	1.0 2	000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.142.940.000	- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	0	7	0	1.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	81.800.000		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG	
	2	0	7	0	1.0 5	000 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	20 Paket	81.800.000	- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	0	7	0	1.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengadministrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	847.733.100		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG	
	2	0	7	0	1.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	99.274.100	- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	0	7	0	1.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	40.795.000	- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	0	7	0	1.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	40.244.000	- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	0	7	0	1.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	17.420.000	- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	650.000.000	- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	3.092.408.850		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	22.000.000	- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	423.600.000	- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	853.868.850	- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.792.940.000	- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1.583.999.550		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	54.000.000	- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	30.000.000	- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	200.000.000	- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	549.699.550	- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											INDUSTRI BONTANG
	2	0	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	380.000.000	- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	0	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	370.300.000	- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
120	2	0	0			<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang bekerja</b>	<b>75 Persen</b>	<b>20.957.116.500</b>		<b>UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG</b>
	2	0	0	1.0		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Persentase Lulusan Pelatihan Kerja Yang Kompeten	75 Persen	20.957.116.500		UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	0	0	1.0	000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	512 Orang	8.061.045.250	- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	0	0	1.0	000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	15 Lembaga	239.367.500	- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
	2	0	0	1.0	000	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	15 Unit	12.656.703.750	- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI BONTANG
						<b>Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>			<b>40.126.422.000</b>		
	2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>40.126.422.000</b>		
	2	0				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			<b>34.061.446.000</b>		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
121	2	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Pelayanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna yang ditindaklanjuti</b>	<b>82 indeks 100 %</b>	<b>21.150.193.400</b>		<b>DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>
	2	0	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.50 %	756.190.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	150.000.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	145.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	15.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	171.190.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	245.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	94 %	11.125.697.400		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	11.025.697.400	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	45.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	35.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	20.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	80 orang	1.150.000.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	216.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	85 Orang	784.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kantor yang berfungsi dengan baik	111 unit	2.740.604.600		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	210.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	150.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	15.604.600	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	300.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	1.900.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	150.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	32 unit	900.000.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	300.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	0	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	600.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 jenis jasa	3.378.769.200		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	10.885.200	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	608.884.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.659.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang berfungsi dengan baik	86 unit	1.098.932.200		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2	0	0	1.0	000			Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	10.203.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	260.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	828.729.200	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
12 2	2	0	0			<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan</b>	<b>400 orang</b>	<b>4.906.959.000</b>		<b>DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>
	2	0	0	1.0		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Penguatan kelembagaan PUG kewenangan Provinsi	10 lembaga	1.106.373.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG tingkat provinsi	1 Laporan	350.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM tingkat Provinsi yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	1 Dokumen	178.257.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
2	0	0	1.0	000		Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Provinsi	130 Orang	578.116.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	0	0	1.0			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi masyarakat menuju LPLPP	1 lembaga	791.514.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	0	0	1.0	000		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pengelola organisasi masyarakat/profesi/dunia usaha/media tingkat provinsi yg mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	430 Orang	433.257.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	0	0	1.0	000		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah organisasi masyarakat/ profesi/ dunia usaha/ media tingkat provinsi yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	10 Lembaga	358.257.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	0	0	1.0			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan kepala keluarga (PEKA) didampingi untuk peningkatan kapasitas dalam kewirausahaan	400 orang	3.009.072.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	0	0	1.0	000		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk & Pusat Pembelajaran Perempuan & (PUTARAN) yang terstandarisasi tingkat Provinsi	1 Lembaga	285.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	0	0	1.0	000		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum pd LPLPP Tingkat Provinsi	300 Orang	2.375.815.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	0	0	1.0	000	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di provinsi	1 Unit	348.257.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
123	2	0	0			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani</b>	<b>23,46,50 %</b>	<b>2.006.925.600</b>		<b>DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>
	2	0	0	1.0		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan	10 lembaga	1.217.537.600		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	3 Dokumen	817.537.600	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	10 Perangkat Daerah	400.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	75 %	789.388.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat	30 Orang	250.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2	0	0	1.0	000			Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	40 Layanan	539.388.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
124	2	0	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>Persentase Capaian Data Gender dan anak</b> <b>Persentase Capaian Data Gender dan anak</b>	<b>75 %</b> <b>75 %</b>	<b>1.068.365.000</b>		<b>DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>
	2	0	0	1.0		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	20 data	1.068.365.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	2 Dokumen	718.365.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	2 Dokumen	350.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
125	2	0	0			<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>Predikat kabupaten/ kota layak anak</b>	<b>90 %</b>	<b>2.522.040.000</b>		<b>DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>
	2	0	0	1.0		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mendapatkan Penguatan pelembagaan PHA	10 lembaga	1.389.890.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	600.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	umlah perangkat daerah yang mempunyai dokumen pembangunan daerah yang responsif hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi	30 perangkat daerah	789.890.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga layanan yang mendapatkan penguatan dalam peningkatan kualitas hidup anak	10 lembaga	1.132.150.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	882.150.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	1 Kegiatan	250.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
126	2	0	0			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak</b>	<b>4,07 %</b>	<b>2.406.963.000</b>		<b>DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>
	2	0	0	1.0		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang mendapatkan Pelatihan	1 lembaga	700.000.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	700.000.000	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah layanan pengaduan masyarakat bagi anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus	75 laporan	589.388.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan Kewenangan Provinsi	30 Orang	250.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan Kewenangan Provinsi	30 Orang	339.388.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak	1 Dokumen	1.117.575.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	0	0	1.0	000	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1.117.575.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>			<b>3.058.118.000</b>		
127	2	1	0			<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	70 %	2.050.000.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											<b>PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>
	2	1 2	0 2	1.0 2		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Dokumen fasilitasi layanan pendaftaran penduduk	1 Dokumen	1.600.000.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1 2	0 2	1.0 2	000 1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	1.550.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1 2	0 2	1.0 2	000 2	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1 2	0 2	1.0 3		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah dokumen peningkatan kapasitas layanan Pendaftaran Penduduk	1 Dokumen	450.000.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1 2	0 2	1.0 3	000 1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1 2	0 2	1.0 3	000 2	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
<b>12 8</b>	<b>2</b>	<b>1 2</b>	<b>0 3</b>			<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil</b>	<b>100 %</b>	<b>458.118.000</b>		<b>DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN</b>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											<b>PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>
	2	1 2	0 3	1.0 2		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah dokumen penyelenggaraan pencatatan sipil	2 Dokumen	250.000.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1 2	0 3	1.0 2	000 1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1 2	0 3	1.0 2	000 2	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1 2	0 3	1.0 3		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	2 Dokumen	208.118.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1 2	0 3	1.0 3	000 1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1 2	0 3	1.0 3	000 2	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	108.118.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
12 9	2	1 2	0 4			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Publikasi data kependudukan skala provinsi</b>	<b>2 kali</b>	<b>550.000.000</b>		<b>DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN</b>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											<b>PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>
	2	1 2	0 4	1.0 2		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan	27 %	350.000.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1 2	0 4	1.0 2	000 1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1 2	0 4	1.0 2	000 2	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1 2	0 4	1.0 2	000 5	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1 2	0 4	1.0 3		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah dokumen Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	200.000.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1 2	0 4	1.0 3	000 1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1 2	0 4	1.0 3	000 2	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi	50 Orang	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>			<b>3.006.858.000</b>		
130	2	1	0			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	angka kelahiran total	2.10 %	600.000.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.0		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	5 sektor	600.000.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.0	0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	1 Laporan	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.0	0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	1 Laporan	300.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
131	2	1	0			<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	67,98 %	1.500.000.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.0		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Ratio akseptor KB	0.76 %	1.500.000.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2	1	0	1.0	000			Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	1	0	1.0	000	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	1 Dokumen	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.0	001	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Daerah	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.0	001	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Mitra Kerja	1 Daerah	1.200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
13 2	2	1	0			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>	<b>Indeks pembangunan keluarga (iBangga)</b>	<b>63,46 %</b>	<b>906.858.000</b>		<b>DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>
	2	1	0	1.0		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4 organisasi	600.000.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.0	000	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.0	000	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	1 Organisasi	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	1	0	1.0		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Organisasi Pemberdayaan dan Peningkatan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga	30 %	306.858.000		DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2	1	0	1.0	000	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga	1 Laporan	306.858.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEPENDUDUKAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						<b>Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>			<b>100.729.360.500</b>		
	2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>9.434.764.000</b>		
	2	0	9			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>			<b>9.434.764.000</b>		
133	2	0	0			<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi</b>	<b>97.6 Skor 86.3 Skor</b>	<b>3.909.764.000</b>		<b>DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>
	2	0	0	1.0		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Informasi Sistem Laporan Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan	12 Laporan	1.234.764.000		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.0	000	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	634.764.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1 Laporan	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.0	000	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	1 Laporan	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	0	0	1.0	001	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.0	001	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan	75.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.0	001	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen	75.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.0		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Persentase Cadangan Pangan Yang Tersedia	88,83 %	500.000.000		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang Terpelihara	300 Ton	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.0	000	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	100 Ton	250.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.0	000	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.0		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	Media Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	3 Media	2.175.000.000		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.0	000	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	8 Dokumen	855.562.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	4 Laporan	668.920.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	650.517.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
134	2	0	0			<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>Persentase Daerah Rawan Pangan Jumlah Kecamatan yang Meningkatkan Status Ketahanan Pangnya</b>	<b>0 % 1 Kecamatan</b>	<b>4.200.000.000</b>		<b>DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>
	2	0	0	1.0		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	FSVA	1 Laporan	300.000.000		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.0	000	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	2 Dokumen	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.0		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	Wilayah Rawan Pangan Yang Ditangani	10 Kecamatan	3.900.000.000		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen	3.250.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan	400.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.0	000	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen	250.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
135	2	0	0			<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan</b>	<b>85 %</b>	<b>1.325.000.000</b>		<b>DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>
	2	0	0	1.0		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi, Sertifikat dan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar	16 Dokumen	1.325.000.000		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	0	0	1.0	000	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	11 Sertifikat	157.800.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.0	000	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	4 Dokumen	130.247.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.0	000	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	581.012.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.0	001	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	340.002.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	2	0	0	1.0	001	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	115.937.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>91.294.596.500</b>		
	3	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>			<b>91.294.596.500</b>		
136	3	2	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>	<b>100 % 82 Indeks</b>	<b>62.974.646.000</b>		<b>DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>
	3	2	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	90 %	1.139.136.000		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	800.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	8.800.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	8.800.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	93.960.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	227.576.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	91,25 %	54.466.185.680		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/ Bulan	53.700.185.680	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	450.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	6.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	10.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	45,5 %	92.250.000		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	5.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	40.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	47.250.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	85 %	285.000.000		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	15.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	20.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	1.135.000.000		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	25.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	20.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 Dokumen	25.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177 Laporan	830.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	85.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	90 %	1.969.220.000		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	1.669.220.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	80 Unit	300.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	90 %	2.970.854.320		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	35.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	470.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.465.854.320	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	917.000.000		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	175.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit	375.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	15.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	52.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
137	3	2	0			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Tanaman Pangan</b> <b>Tingkat Pemenuhan Sarana Pertanian Hortikultura</b>	<b>35,5 %</b> <b>39,29 %</b>	<b>24.519.950.500</b>		<b>DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>
	3	2	0	1.0		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Hortikultura Jumlah Luas Lahan yang Difasilitasi Sarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan	839 Ha 12645 Ha	24.519.950.500		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								
	3	2	0	1.0	000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	2 Laporan	20.876.289.070	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	2 Dokumen	2.151.098.750	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	1 laporan	1.492.562.680	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
138	3	2	0			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Hortikultura</b> <b>Tingkat Pemenuhan Prasarana Pertanian Tanaman Pangan</b>	<b>34 %</b> <b>41,39 %</b>	<b>3.800.000.000</b>		<b>DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>
	3	2	0	1.0		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Hortikultura Jumlah Prasarana Pertanian Tanaman Pangan	2 Unit 6 Unit	3.800.000.000		DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 Dokumen	1.200.773.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	2 Dokumen	133.002.600	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	2 Dokumen	133.321.600	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	2 Laporan	352.512.450	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	001	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Luas kawasan pertanian yang dimanfaatkan	2 Ha	1.048.830.850	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	001	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	1 Dokumen	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	002	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit	431.559.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
						<b>UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>			<b>3.250.000.000</b>		
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>3.250.000.000</b>		
	3	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>			<b>3.250.000.000</b>		
139	3	2	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</b>	<b>81,5 Indeks 100 %</b>	<b>1.950.000.000</b>		<b>UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	91,25 %	81.000.000		UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	81.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	85 %	156.120.000		UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	156.120.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	151.400.000		UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	3.500.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	3.500.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	16.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan	122.400.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	001 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	6.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	90 %	90.000.000		UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	32 Unit	90.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	90 %	1.101.824.160		UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	162.992.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	934.832.160	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	369.655.840		UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	66.614.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	70.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	233.041.840	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
140	3	2	0			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Tersertifikasi</b>	<b>98 %</b>	<b>1.300.000.000</b>		<b>UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>
	3	2	0	1.0		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah Produsen Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Diterbitkan Sertifikat Kompetensi/Rekomendasi	195 Sertifikat Kompetensi	1.237.474.962		UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	90 Sertifikat	526.506.640	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	90 laporan	710.968.322	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Varietas Daerah yang Dinilai	3 Varietas	62.525.038		UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	62.525.038	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
						<b>UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>			<b>6.000.000.000</b>		
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>6.000.000.000</b>		
	3	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>			<b>6.000.000.000</b>		
14 1	3	2	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</b>	<b>81,5 Indeks 100 %</b>	<b>3.302.250.000</b>		<b>UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	88 %	85.000.000		UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	85.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	83,80 %	290.000.000		UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	90.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	81,05 %	666.250.000		UPTD PROTEKSI TANAMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	75.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	12.150.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.100.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	542.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	80 %	150.000.000		UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	88,80 %	1.625.000.000		UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	170.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.450.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	88,50 %	486.000.000		UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	86.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	400.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
14 2	3	2	0			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pupuk</b>	<b>32 %</b>	<b>495.000.000</b>		<b>UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>
	3	2	0	1.0		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Kios Pupuk dan Pestisida yang diawasi	40 Kios	220.000.000		UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	40 Laporan	220.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Teknologi	7 Laporan	275.000.000		UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	3 Laporan	275.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
14 3	3	2	0			<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Rasio Luas Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT</b>	<b>75,8 %</b>	<b>2.202.750.000</b>		<b>UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>
	3	2	0	1.0		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah Luasan Penanganan Pengendalian OPT dan DPI	15050 Ha	2.202.750.000		UPTD PROTEKSI TANAMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	15000 Ha	2.042.750.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	50 Ha	160.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
						<b>UPTD Balai Benih Induk Tanaman Pangan dan Hortikultura</b>			<b>6.200.000.000</b>		
	<b>3</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>6.200.000.000</b>		
	<b>3</b>	<b>2</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>			<b>6.200.000.000</b>		
14 4	3	2	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</b>	<b>81,5 Indeks 100 %</b>	<b>4.200.000.000</b>		<b>UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	115.680.000		UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	115.680.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 %	295.900.000		UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	61.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	234.900.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	342.500.000		UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	10.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	2.500.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	320.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	430.000.000		UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	330.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	2.440.920.000		UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	228.920.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	9.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	575.000.000		UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	30.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	250.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	95.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
145	3	2	0			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase Pemenuhan Benih Sumber Tanaman Pangan</b> <b>Persentase Pemenuhan Benih Sumber dan Sebar Hortikultura</b>	<b>11,55 %</b> <b>30,33 %</b>	<b>2.000.000.000</b>		<b>UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA</b>
	3	2	0	1.0		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Luas Lahan Yang Menggunakan Benih Bersertifikat	935 Ha	2.000.000.000		UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	000	Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	20000 Batang	1.300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PANGAN DAN HORTIKULTURA
	3	2	0	1.0	001	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	1 Ton	700.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH INDUK TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
						<b>UPTD Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian</b>			<b>10.800.000.000</b>		
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>10.800.000.000</b>		
	3	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>			<b>10.800.000.000</b>		
146	3	2	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</b>	<b>81,5 Indeks 100 %</b>	<b>7.950.500.000</b>		<b>UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN</b>
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	90 %	88.560.000		UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	88.560.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	203.523.600		UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.323.600	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	187.200.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	90 %	2.567.360.810		UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.746.170.000	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	2	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	821.190.810	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 %	1.687.814.390		UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.958.550	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	169.438.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	34.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.468.417.840	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	3.403.241.200		UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	121.877.200	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3.281.364.000	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
147	3	2	0			<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya</b>	<b>77 %</b>	<b>2.849.500.000</b>		<b>UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN</b>
	3	2	0	1.0		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian ASN dan Swadaya yang Mengikuti Pelatihan	270 Orang	2.183.590.000		UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	2	0	1.0	000	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	17 Unit	785.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	270 Orang	1.398.590.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	2	0	1.0		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penerapan Penyuluhan Pertanian	7 Laporan	425.000.000		UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								
	3	2	0	1.0	000	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3 Dokumen	265.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	2	0	1.0	000	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	6 Kelompok	160.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	2	0	1.0		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Kelembagaan Korporasi Petani dan Sekolah Lapang yang Meningkatkan kapasitasnya	9 Unit	240.910.000		UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	2	0	1.0	000	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	4 Unit	170.910.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
	3	2	0	1.0	000	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	1 Unit	70.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
						<b>Dinas Lingkungan Hidup</b>			<b>51.612.247.000</b>		
	2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>51.612.247.000</b>		
	2	1	1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>			<b>51.612.247.000</b>		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
148	2	1	0	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	88,0 Indeks 100 Persen 100 Persen 88,0 Indeks	28.120.000.000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian Presentase perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan yang diselesaikan	100 Persen 100 Persen	1.500.000.000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	500.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	600.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan	100 Persen	15.700.000.000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	831 Orang/ Bulan	14.500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	1.200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada SKPD yang telah ditatausahakan	100 Persen	50.000.000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	100 Persen	700.000.000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	1	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	230 Paket	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administasi umum	100 Persen	2.700.000.000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	700.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	250.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	5.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	1.745.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang diadakan	100 Persen	820.000.000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	820.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 Persen	6.000.000.000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	1.700.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4.300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	84 Persen	650.000.000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	450.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
	2	1	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	200.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
149	2	1	0			<b>PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase kebijakan perencanaan lingkungan hidup yang direkomendasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan dan wilayah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2.660.000.000</b>		<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>
	2	1	0	1.0		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase pelaksanaan perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap dokumen perencanaan LH	100 Persen	1.585.155.000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen	675.155.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	000	Penyusunan RPPLH Provinsi	jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	1 Dokuman	231.663.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	000	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	1 Dokuman	678.336.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Persentase penyelenggaraan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup Strategis	100 Persen	1.074.845.000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen	953.845.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	000	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	1 Dokumen	121.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
150	2	1	0			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Indeks Standar Pencemar Udara Indeks Pencemaran</b>	<b>48 (baik) Indeks ≤5 (Tercemar Ringan) Indeks</b>	<b>9.202.247.305</b>		<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>
	2	1	0	1.0		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	5 Dokumen	6.428.109.750		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	216 Dokumen	2.400.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	4.028.109.750	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan beban pencemar	4 Persen	1.540.000.000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	000	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 Laporan	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	000	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	275 Lokasi	1.340.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Kerusakan Lingkungan	40 Persen	1.234.137.555		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	3 Kegiatan	784.137.555	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	9 Kegiatan	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	001	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
15 1	2	1	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>Luas kawasan yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di dalam kawasan hutan ataupun diluar kawasan hutan yang dikelola</b>	<b>532 Ha</b>	<b>850.000.000</b>		<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>
	2	1	0	1.0		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Jumlah koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan keanekaragaman hayati provinsi	4 Laporan	850.000.000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	450.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	000	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	60 Orang	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								
	2	1	0	1.0	000	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	532,143 Unit	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
15	2	1	0			<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>Persentase limbah B3 yang dikumpulkan oleh pengumpul limbah (dari total limbah B3 yang dihasilkan)</b>	<b>51,5 Persen</b>	<b>700.000.000</b>		<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>
	2	1	0	1.0		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengumpulan limbah B3 sesuai peraturan oleh pelaku usaha	24 Usaha	700.000.000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4 Dokumen	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	7 Dokumen	400.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
15	2	1	0			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>Persentase pengawasan terhadap izin dan/atau persetujuan lingkungan yang diterbitkan pemerintah provinsi</b>	<b>40 Persen</b>	<b>2.380.000.000</b>		<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>
	2	1	0	1.0		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan kegiatan usaha dan atau kegiatan yang telah dilakukan pengawasan dan pembinaan	4 Laporan	2.380.000.000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	48 Dokumen	800.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	000	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	35 Orang	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	20 Badan Usaha	1.430.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					
154	2	1	0			<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Jumlah Kelompok masyarakat/lembaga yang meningkat kualitasnya terkait lingkungan hidup	110 Kelompok	2.000.000.000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah laporan bimbingan teknis, pembinaan dan pendampingan lembaga /lembaga terkait lingkungan hidup	3 Laporan	2.000.000.000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	000	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	163 Dokumen	2.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
155	2	1	0			<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan pada masyarakat/ lembaga pendidikan/dunia usaha dari hasil pembinaan	84,42 Persen	850.000.000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Laporan hasil pemberian pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi	2 Dokumen	850.000.000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	0	1.0	000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	60 Entitas	850.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
156	2	1	1			<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase pengaduan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kewenangan provinsi yang diselesaikan	100 Persen	2.400.000.000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	1	1.0		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan di bidang PPLH yang ditindaklanjuti	100 Persen	2.400.000.000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	1	1.0	000	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	10 Perkara	350.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	1	1.0	000	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	8 Perkara	850.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	1	1	1.0	000	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	20 Pengaduan	1.200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
15	2	1	1			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>Persentase Pengelolaan Sampah</b>	<b>88 Persen</b>	<b>2.449.999.695</b>		<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>
	2	1	1	1.0		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Capaian penanganan sampah di kab/kota se-Kaltim	71 Persen	2.449.999.695		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	1	1.0	000	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	1	1	1.0	001	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	3 Dokuman	2.149.999.695	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						<b>Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa</b>			<b>48.805.199.000</b>		
	2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>48.805.199.000</b>		
	2	1	3			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			<b>48.805.199.000</b>		
15	2	1	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Presentase Keluhan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Pelayanan Kesekertariatan</b>	<b>100 % 82 Indeks</b>	<b>24.616.235.441</b>		<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA</b>
	2	1	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	1.292.241.000		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	250.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	150.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	125.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	175.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	592.241.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	35 Orang	9.854.968.200		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ Bulan	8.852.980.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	357.360.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	62.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	200.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	70.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	35.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	270.998.200	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	6.630.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Yang Diselesaikan Tepat Waktu	1 Dokumen	80.500.000		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	35.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	20.500.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	25 Orang	945.000.000		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	120.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	600.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	75.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitas pelayanan kantor yang berfungsi dengan baik	150 buah	3.229.276.241		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	65.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	120.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	135.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	750.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	150.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.869.276.241	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	65.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	75.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 unit	2.941.854.354		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	28.427.177	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	28.427.177	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	2.250.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	635.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 jenis	4.392.395.646		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	925.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.000.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.461.395.646	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	20 unit	1.880.000.000		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	120.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	650.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	700.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	50.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	360.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
159	2	1	0			<b>PROGRAM PENATAAN DESA</b>	<b>Presentase Desa Yang Difasilitasi Penataan Desanya</b>	<b>1,31 %</b>	<b>700.000.000</b>		<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA</b>
	2	1	0	1.0		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah Desa yang difasilitasi penataan desanya	11 Desa	700.000.000		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	1 Dokumen	200.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1 Dokumen	500.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
160	2	1	0			<b>PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA</b>	<b>Presentase peningkatan status desa yang menjadi maju</b>	<b>2,38 %</b>	<b>4.719.658.694</b>		<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA</b>
	2	1	0	1.0		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya fasilitasi kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan provinsi	10 Kab/Kota	4.719.658.694		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3.838.658.694	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	1 Dokumen	291.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	590.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEMERINTAHAN DESA
161	2	13	04			<b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Presentase Desa Yang Mampu Menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan Desa Secara Optimal</b>	<b>25 %</b>	<b>8.104.662.300</b>		<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA</b>
	2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mampu menyelenggarakan pemerintahan desa secara optimal	212 Desa	8.104.662.300		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	04	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	1 Dokumen	54.772.800	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	04	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	2 Dokumen	1.517.749.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	04	1.01	0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen	700.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	04	1.01	0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	250.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	13	04	1.01	0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	167 Orang	75.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEMERINTAHAN DESA
	2	1 3	0 4	1.0 1	000 8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	500.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1 3	0 4	1.0 1	001 0	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	45 Orang	700.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1 3	0 4	1.0 1	001 1	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	45 Orang	425.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1 3	0 4	1.0 1	001 5	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	3 Dokumen	3.182.140.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1 3	0 4	1.0 1	001 6	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	1 Dokumen	700.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
16 2	2	1 3	0 5			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>	<b>Presentase desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat</b>	<b>2,75 %</b>	<b>10.664.642.565</b>		<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA</b>
	2	1 3	0 5	1.0 1		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah	desa dan kelurahan yang mampu mendayagunakan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, masyarakat hukum adat dan kelompok masyarakat	23 desa	10.664.642.565		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota					PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	1.734.083.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen	2.042.014.328	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	30 Lembaga	767.540.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	3 Unit	1.367.011.737	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1.925.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	150.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	1	0	1.0	000	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen	150.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan	2.203.993.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	001	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30 Keluarga	175.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
	2	1	0	1.0	001	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	30 Keluarga	150.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
						<b>Dinas Perhubungan</b>			<b>43.612.000.000</b>		
	2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>43.612.000.000</b>		
	2	1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>			<b>43.612.000.000</b>		
163	2	1	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti</b>	<b>70 Indeks 100 %</b>	<b>24.945.000.000</b>		<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>
	2	1	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	84 %	1.032.000.000		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	400.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	128.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	50.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
2	1	0	1.0	000	Koordniasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	154.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN	
5	1	1	6								
2	1	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	300.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN	
5	1	1	7								
2	1	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	93 %	15.530.000.000		DINAS PERHUBUNGAN	
5	1	2									
2	1	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/ Bulan	14.600.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN	
5	1	2	1								
2	1	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	681.600.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN	
5	1	2	2								
2	1	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	68.400.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN	
5	1	2	3								
2	1	0	1.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	60.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN	
5	1	2	6								
2	1	0	1.0	000	Koordniasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	60.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN	
5	1	2	7								
2	1	0	1.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	60.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN	
5	1	2	8								
2	1	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD Yang Berfungsi Dengan Baik	91 %	95.000.000		DINAS PERHUBUNGAN	
5	1	3									
2	1	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN	
5	1	3	1								
2	1	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	5.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN	
5	1	3	2								
2	1	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan	40.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN	
5	1	3	6								
2	1	0	1.0		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Kepatuhan Wajib Retribusi Daerah	100 %	65.000.000		DINAS PERHUBUNGAN	
5	1	4									
2	1	0	1.0	000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	9 Laporan	65.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN	
5	1	4	7								
2	1	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 %	320.000.000		DINAS PERHUBUNGAN	
5	1	5									
2	1	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	10.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN	
5	1	5	3								
2	1	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	70.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN	
5	1	5	5								

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi				
2	1	0	1.0	000	5	1	5	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	240.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
2	1	0	1.0		5	1	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	91 %	2.116.000.000		DINAS PERHUBUNGAN
2	1	0	1.0	000	5	1	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	50.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
2	1	0	1.0	000	5	1	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket	300.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
2	1	0	1.0	000	5	1	6	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	150.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
2	1	0	1.0	000	5	1	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.466.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
2	1	0	1.0	001	5	1	6	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	50.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
2	1	0	1.0	001	5	1	6	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
2	1	0	1.0		5	1	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	65 %	352.000.000		DINAS PERHUBUNGAN
2	1	0	1.0	000	5	1	7	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	352.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
2	1	0	1.0		5	1	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %	4.627.000.000		DINAS PERHUBUNGAN
2	1	0	1.0	000	5	1	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
2	1	0	1.0	000	5	1	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	992.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
2	1	0	1.0	000	5	1	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.610.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	1	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	66 %	808.000.000		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	120.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	180.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	8.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	413 Unit	500.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
164	2	1	0			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP</b>	<b>0,006 Angka 175 Kejadian 82 %</b>	<b>14.192.000.000</b>		<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>
	2	1	0	1.0		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Ruas Jalan Provinsi yang Dipasang Fasilitas Keselamatan Jalan	80 %	9.300.000.000		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	2317 Unit	9.300.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.0		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun	53 %	850.000.000		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	1 Dokumen	850.000.000	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.0		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Rekomendasi MRLJ Jaringan Jalan Provinsi yang Dipatuhi	4 Dokumen	900.000.000		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.0	000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	10 Laporan	400.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	2	1	0	1.0	000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	4 Laporan	500.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.0		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Prasarana yang Laik Fungsi dan Sarana yang Laik Uji	78 %	960.000.000		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.0	000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	2 Laporan	220.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.0	000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	10 Laporan	650.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.0	001	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	9 Laporan	90.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.0		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Umum Orang/Barang AKDP yang Tersedia	15 Unit	375.000.000		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.0	000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa	4 Laporan	75.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi			- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	15 Unit	300.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.0		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perencanaan Multimoda yang Tersedia	1 Dokumen	850.000.000		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.0	000	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	750.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.0	000	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.1		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Orang Dalam Trayek yang Patuh Perizinan	Unit 100	635.000.000		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.1	000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	100 Unit	300.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> </ul>	
	2	1	0	1.1	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	4 Laporan	335.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> </ul>	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.1		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Angkutan Taksi yang Patuh Perizinan	300 Unit	322.000.000		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.1	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	4 Laporan	172.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> </ul>	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.1	000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	300 Unit	150.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> </ul>	DINAS PERHUBUNGAN
165	2	1	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>Rasio Konektivitas Angkutan Laut &amp; SDP</b>	<b>0,96 Angka</b>	<b>3.375.000.000</b>		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.0		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang	Jumlah Angkutan Sungai Danau yang Patuh Perizinan	100 Unit	350.000.000		DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan					
	2	1	0	1.0	000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	100 Unit	200.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	1 Laporan	150.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.0		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Sungai Danau yang Tersedia	2 Dokumen	900.000.000		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	2 Dokumen	900.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.0		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Badan Usaha Pelayaran yang Patuh Perzinan	60 Badan Usaha	275.000.000		DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	1	0	1.0	000	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	60 Dokumen	125.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	2 Laporan	150.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.0		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Perencanaan/Pembangunan Fasilitas Pelabuhan	3 Unit	1.850.000.000		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.0	000	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	2 Unit	1.850.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
166	2	1	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN</b>	<b>Persentase Kebijakan Penetapan Jaringan Perkeretaapian</b>	<b>40 %</b>	<b>1.100.000.000</b>		<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>
	2	1	0	1.0		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	Persentase Ketersediaan Rencana Perkeretaapian	50 %	1.100.000.000		DINAS PERHUBUNGAN
	2	1	0	1.0	000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	1.000.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	2	1	0	1.0	000	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	1 Dokumen	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERHUBUNGAN
						<b>UPTD Terminal</b>			<b>11.549.000.000</b>		
	2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>11.549.000.000</b>		
	2	1	5			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>			<b>11.549.000.000</b>		
167	2	1	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti</b>	<b>70 Indeks 100 %</b>	<b>4.321.443.960</b>		<b>UPTD TERMINAL</b>
	2	1	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana Kantor Yang Berfungsi Dengan Baik	60 %	663.368.600		UPTD TERMINAL
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	25.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	158.368.600	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	80.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL
	2	1	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	400.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL
	2	1	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	50 %	60.000.000		UPTD TERMINAL
	2	1	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	60.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL
	2	1	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	100 %	3.438.075.360		UPTD TERMINAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	9.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	126.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.303.075.360	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL
	2	1	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	30 %	160.000.000		UPTD TERMINAL
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	35.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL
	2	1	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	77 Unit	125.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL
168	2	1	0			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Persentase Layanan Lalu Lintas Jalan Provinsi dan AKDP Rasio Kejadian Kecelakaan Tansportasi Per 1000 (Seribu) Keberangkatan Jumlah Kecelakaan di Ruas Jalan Provinsi</b>	<b>82 % 0,006 Angka 175 Kejadian</b>	<b>7.227.556.040</b>		<b>UPTD TERMINAL</b>
	2	1	0	1.0		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Persentase Ketersediaan Perencanaan dan Fasilitas Terminal Tipe B yang Terbangun	53 %	7.227.556.040		UPTD TERMINAL
	2	1	0	1.0	000	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2 Unit	5.527.556.040	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL
	2	1	0	1.0	000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	1 Unit	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL
	2	1	0	1.0	000	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	15 Orang	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL
	2	1	0	1.0	001	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 Unit	1.500.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TERMINAL
						<b>Dinas Komunikasi dan Informatika</b>			<b>85.609.692.000</b>		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>85.609.692.000</b>		
	2	1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			<b>78.209.692.000</b>		
169	2	1	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>	<b>100 Indeks</b>	<b>33.424.088.696</b>		<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>
	2	1	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang tepat waktu	100 Persen	1.180.000.000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	230.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	250.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan tepat waktu (orang)	100 Persen	13.525.000.000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/ Bulan	12.300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	825.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
2	1	0	1.0	000	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	0	1.0	000		0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
2	1	0	1.0			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 Persen	150.000.000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	0	1.0	000	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	0	1.0	000	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	0	1.0	000	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	0	1.0			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi (orang)	100 Persen	1.250.000.000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	0	1.0	000	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	350.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	0	1.0	000	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	0	1.0	000	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	0	1.0	000	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	0	1.0	001	0001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	0	1.0			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengadaan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 Persen	4.040.428.500		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	129.713.200	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	3.500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	290.715.300	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan fasilitas penunjang kegiatan kantor	100 Persen	6.494.263.500		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1.393.263.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit	5.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	5.184.396.696		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	20.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	600.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	564.396.696	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan gedung dan prasarana kantor	100 Persen	1.600.000.000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	600.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
170	2	1	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah</b>	<b>60 %</b>	<b>21.185.603.304</b>		<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>
	2	1	0	1.0		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase (%) Mitra Strategis yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas	80 %	21.185.603.304		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1 Dokumen	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	800.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1.500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	4.500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	1	0	1.0	000	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	5.300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	12 Layanan	1.500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dokumen	750.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis	1 Dokumen	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	001	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	30 Orang	350.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	001	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Dokumen	3.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	001	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	2.085.603.304	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	001	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	1 Unit	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
171	2	1	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pemerintah dan pelayanan publik</b>	<b>80 %</b>	<b>23.600.000.000</b>		<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>
	2	1	0	1.0		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	100 %	7.950.000.000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	1 Domain	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	750.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	1	0	1.0	000	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	7.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
2	1	0	1.0		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	persentase pengelolaan E-government yang telah ditetapkan di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kaltim	80 %	15.650.000.000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	0	1.0	000	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	1 Dokumen	1.250.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	0	1.0	000	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	800.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	0	1.0	000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Unit	6.100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	0	1.0	000	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	750.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	1 Dokumen	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	37 Perangkat Daerah	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	0	1.0	000	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	6 Unit	1.500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	0	1.0	000	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	0	1.0	000	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	250.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	0	1.0	001	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	3.100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	0	1.0	001	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	1 Dokumen	400.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	1	0	1.0	001	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	2	0			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>			<b>5.500.000.000</b>		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi			
17 2	2	2	0	2		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>Persentase ketersediaan daftar data pada portal satu data</b>	<b>80 %</b>	<b>5.500.000.000</b>		<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
	2	2	0	2	1.0	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Pengkinian Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Kalimantan Timur	80 %	5.500.000.000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	2	0	2	1.0	000 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	700.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	2	0	2	1.0	000 2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	8 Orang	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	2	0	2	1.0	000 3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1.100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	2	0	2	1.0	000 4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	37 Orang	1.500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	2	0	2	1.0	000 5	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	2 Unit	1.900.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	2	1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>			<b>1.900.000.000</b>		
17 3	2	2	0	2		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah</b>	<b>3 Tingkat</b>	<b>1.900.000.000</b>		<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
	2	2	0	2	1.0		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase PD yang menyelenggarakan kegiatan persandian untuk pengamanan informasi	100 %	1.600.000.000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	2	0	2	1.0	000 1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	1 Dokumen	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	2	0	2	1.0	000 2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	550.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	2	0	2	1.0	000 3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Berbasis Elektronik dan Non Elektronik					
	2	2	0	1.0	000	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	37 Perangkat Daerah	350.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	2	0	1.0		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Persentase PD yang terhubung dalam jaring Komunikasi Sandi	80 %	300.000.000		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2	2	0	1.0	000	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	37 Perangkat Daerah	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
						<b>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>			<b>31.306.262.000</b>		
	2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>31.306.262.000</b>		
	2	1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>			<b>31.306.262.000</b>		
174	2	1	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>	<b>91 Indeks</b>	<b>19.956.262.000</b>		<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>
	2	1	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 %	500.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	10.715.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/ Bulan	10.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	85 Dokumen	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1000 Dokumen	210.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	1	0	1.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	2.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah orang pengurusan dan inventarisir barang milik daerah	1 Orang	16.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24 Laporan	14.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	1	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	435.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	25.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	25.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	85.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan kegiatan administrasi umum yang terlaksana	439 Laporan	1.789.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	26.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	2	1	0	1.0	000			Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	15.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	310.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	20.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270 Laporan	1.368.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	33 Dokumen	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan belanja modal untuk sarana dan prasarana	87 Unit/Tahun	1.275.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	1	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	84 Unit	1.075.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan untuk kegiatan urusan administrasi perkantoran yang terlaksana	86 Laporan	4.426.262.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	450.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	346.262.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	3.620.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	800.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	29 Unit	350.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit	250.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
175	2	1	0			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Peluang Investasi Non Migas dan Non Batubara yang Siap Ditawarkan</b>	<b>2 Dokumen IPRO</b>	<b>2.700.000.000</b>		<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>
	2	1	0	1.0		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Potensi Investasi yang direncanakan	2 Potensi Investasi	2.700.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	1 Dokumen	700.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	2 Dokumen	2.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
176	2	1	0			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kepeminatan Investasi di Kalimantan Timur pada Sektor Non Migas dan Non Batubara</b>	<b>11 Minat</b>	<b>2.600.000.000</b>		<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>
	2	1	0	1.0		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Promosi	11 Kegiatan	2.600.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	6 Dokumen	1.500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	5 Dokumen	1.100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
177	2	1	0			<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Persentase Penyelesaian Perizinan yang Tepat Waktu</b>	<b>100 % 100 %</b>	<b>2.750.000.000</b>		<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>
	2	1	0	1.0		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perizinan dan non Perizinan yg diterbitkan	5000 Izin & Non Izin	2.750.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	7 Dokumen	550.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10 Pelaku Usaha	700.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	4 Kegiatan Usaha	1.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
178	2	1	0			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Realisasi Investasi PMA-PMDN pada Sektor Non Migas dan Batubara</b>	<b>100 %</b>	<b>2.700.000.000</b>		<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>
	2	1	0	1.0		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Pelaku Usaha yang melaporkan LKPM	1598 Laporan	2.700.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	7.788 Kegiatan usaha	1.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	105 Kegiatan usaha	1.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								
	2	1	0	1.0	000	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	400 Pelaku Usaha	700.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
179	2	1	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Pemenuhan Layanan Informasi yang Dibutuhkan oleh Pengguna Layanan</b>	<b>100 %</b>	<b>600.000.000</b>		<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>
	2	1	0	1.0		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Penyajian data terhadap informasi	200 Data	600.000.000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	1	0	1.0	000	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	6 Dokumen	600.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						<b>Dinas Pemuda dan Olah Raga</b>			<b>362.391.117.000</b>		
	2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>362.391.117.000</b>		
	2	1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>			<b>362.391.117.000</b>		
180	2	1	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>	<b>95 Persen</b>	<b>33.132.250.000</b>		<b>DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>
	2	1	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	635.000.000		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	400.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	25.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
2	1	0	1.0	000	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	60.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	0	1.0	000	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	0	1.0			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	95 %	16.451.000.000		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	0	1.0	000	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/ Bulan	15.500.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	0	1.0	000	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	480.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	0	1.0	000	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	40.500.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	0	1.0	000	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	30.500.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	0	1.0	000	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	400.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	0	1.0			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	95 %	150.000.000		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	0	1.0	000	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	30.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	0	1.0	000	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	20.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	0	1.0	000	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	0	1.0			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	95 Persen	960.000.000		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	0	1.0	000	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	600.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	0	1.0	000	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	20.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	0	1.0	000	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	260.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	0	1.0	001	000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	88 Orang	40.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
2	1	0	1.0	001	000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	88 Orang	40.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
2	1	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 Persen			DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	9	1	6					4.859.750.000		
2	1	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	9	1	6	1				50.000.000		
2	1	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	9	1	6	2				1.500.000.000		
2	1	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	9	1	6	3				50.000.000		
2	1	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	9	1	6	4				600.000.000		
2	1	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	9	1	6	5				200.000.000		
2	1	0	1.0	000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	9	1	6	7				100.000.000		
2	1	0	1.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	9	1	6	8				400.000.000		
2	1	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	9	1	6	9				1.700.000.000		
2	1	0	1.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	9	1	6	0				159.750.000		
2	1	0	1.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	9	1	6	1				100.000.000		
2	1	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	95 Persen			DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	9	1	7					3.684.500.000		
2	1	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit		- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	9	1	7	1				1.710.000.000		
2	1	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Utara	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	9	1	7	2				1.624.500.000		
2	1	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket		- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	9	1	7	5				200.000.000		
2	1	0	1.0	000	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	8 Unit		- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	9	1	7	7				150.000.000		
2	1	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 Persen			DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	9	1	8					3.500.000.000		
2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	9	1	8	2				500.000.000		
2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	9	1	8	4				3.000.000.000		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	1	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 Persen	2.892.000.000		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit	100.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	130.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.0	000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	150.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	150.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	512.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	50.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	800.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
181	2	1	0			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	<b>Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan</b>	<b>0.26 Persen 9.70 Persen</b>	<b>26.475.000.000</b>		<b>DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>
	2	1	0	1.0		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyadaran, Pemberdaya-an dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan di Provinsi Kalimantan Timur	5480 Orang	24.475.000.000		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	600 Orang	1.250.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.0	000	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	7 Unit	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi					
	2	1	0	1.0	001	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	20 Orang	750.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.0	001	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	4 Dokumen	2.275.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.0	001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	750 Persentase	1.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.0	001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	50 Orang	350.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.0	001	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	630 Orang	7.750.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.0	001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	3500 Orang	11.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.0		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pemuda yang terlibat dalam Organisasi Kepemudaan yang di fasilitasi dalam mengikuti kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	150 Organisasi	2.000.000.000		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	5 Persentase	500.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	100 Organisasi	1.500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
182	2	19	03		<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	<b>Peningkatan Prestasi Olahraga</b>	<b>135 Keping</b>	<b>295.783.867.000</b>		<b>DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>	
	2	19	03	1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Atlet Pelajar yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	24 Orang	5.000.000.000		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	2	19	03	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	1 Unit	4.500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	03	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	2 Dokumen	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Jumlah Atlet Daerah yang Mengikuti Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	765 Orang	10.590.297.400		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	03	1.02	0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	765 Orang	3.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	03	1.02	0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	2 Kegiatan	3.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	03	1.02	0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	9 Kegiatan	4.590.297.400	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional	Jumlah Atlet Olahraga Prestasi yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	630 Orang	11.500.000.000		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	03	1.03	0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	100 Orang	4.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	03	1.03	0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	2 Pelatda	3.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	19	03	1.03	0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	1 Dokumen	1.500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	1	0	1.0	000	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	430 Orang	3.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.0		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah insan olahraga yang mengikuti pembinaan dan pengembangan organisasi keolahragaan	150 Orang	268.693.569.600		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.0	000	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	5 Dokumen	267.693.569.600	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.0	000	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	4 Dokumen	1.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
183	2	1	0			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>	<b>Jumlah organisasi kepramukaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi</b>	<b>11 Organisasi</b>	<b>7.000.000.000</b>		<b>DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA</b>
	2	1	0	1.0		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Pramuka yang Terlibat dalam Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	4000 Orang	7.000.000.000		DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
	2	1	0	1.0	000	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	30 Laporan	7.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
						<b>UPTD Pengelolaan Prasarana Olahraga</b>			<b>24.500.000.000</b>		
	2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>24.500.000.000</b>		
	2	1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>			<b>24.500.000.000</b>		
184	2	1	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (UPTD PPO)</b>	<b>82 Persen</b>	<b>24.500.000.000</b>		<b>UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA</b>
	2	1	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	95 Persen	2.304.206.400		UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	410.101.800	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Sempaja Selatan	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.000.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	104.736.900	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PRASARANA OLAHRAGA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	80.367.700	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.500.000	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	1	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	688.500.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	1	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	95 Persen	140.000.000		UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	1	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	140.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	1	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	95 Persen	9.347.162.300		UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3.824.498.200	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	543.971.300	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.978.692.800	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	1	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 Persen	12.708.631.300		UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	105.969.200	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	18.706.300	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	1	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	3.500.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
	2	1	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	9.083.955.800	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENGELOLAAN PRASARANA OLAHRAGA
						<b>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah</b>			<b>44.446.499.000</b>		
	2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>44.446.499.000</b>		
	2	2	3			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>			<b>38.021.499.000</b>		
185	2	2	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti</b>	<b>80 Indek 95 %</b>	<b>31.121.499.000</b>		<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH</b>
	2	2	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran, dan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	17 Dokumen	950.000.000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	350.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Sidodadi	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	350.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	250.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	98 %	18.650.000.000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 Orang/ Bulan	18.000.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	450.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	82 %	100.000.000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	416.919.000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	84.378.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	182.541.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	150.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	3.551.840.000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	50.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.000.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	75.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	75.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen	51.840.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2.300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	5.227.740.000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	27.740.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	950.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	4.250.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	2.225.000.000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit	350.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.650.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	225.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
186	2	2	0			<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat (TGM)</b>	<b>35 Indek 46 Skor</b>	<b>6.900.000.000</b>		<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH</b>
	2	2	0	1.0		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina Sesuai dengan SNP Pendayagunaan Layanan Perpustakaan secara online dan Onsite Penyediaan Koleksi Bahan Pustaka dan Naskah Kuno Yang Dikembangkan dan Dilestarikan	60 Perpustakaan 230000 Orang 2600 Eksemplar	5.150.000.000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	30 Perpustakaan	1.200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	600 Eksemplar	1.050.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	2	0	1.0	000	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi	Jumlah Perpustakaan khusus yang Dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	5 Perpustakaan	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	60 Orang	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan	400.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	5 Perpustakaan	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	2800 Eksemplar	1.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	3 Perpustakaan	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	001	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	2 Dokumen	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	Penyelenggaraan Gerakan gemar membaca dalam mewujudkan masyarakat yang kreatif dan inovatif	10 Kegiatan	1.750.000.000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	5 Lokus	250.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	8 Perpustakaan	400.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	15 Orang	250.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	3 Perpustakaan	550.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	3 Orang	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>			<b>6.425.000.000</b>		
187	2	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>Jumlah OPD dan LKD yang Memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Kategori "Baik"</b>	<b>5 OPD/LKD</b>	<b>5.800.000.000</b>		<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH</b>
	2	2	0	1.0		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Tertib	70 %	3.550.000.000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	17 Laporan	3.450.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	2000 Arsip	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	2262 Arsip	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Arsip Statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	96 %	250.000.000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	100 Arsip	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	250 Arsip	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
											DAN KEARSIPAN DAERAH	
	2	2	0	1.0		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Prosentase Arsip Statis yang tersedia dalam SIKN	5 %		2.000.000.000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	1100 Pengguna		700.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	1 Laporan		1.300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
188	2	2	0			<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP</b>	<b>Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</b>	<b>76 %</b>		<b>625.000.000</b>		<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH</b>
	2	2	0	1.0		Pemusnahan Arsip dilindungi Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Penyusutan Arsip Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip	5000 Berkas		150.000.000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	5000 Arsip		75.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	2000 Berkas		75.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi	Penanggulangan dan Penanganan arsip akibat bencana	5 Kegiatan		80.000.000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	1000 Arsip		45.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	1000 Arsip		35.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang diselamatkan bagi perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan	13940 Arsip	105.000.000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	3 Daftar	35.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	2 Arsip	35.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	10 Arsip	35.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi	Jumlah Penilaian Arsip Statis dan alih media yang diautentifikasi	1250 Arsip	185.000.000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	250 Arsip	35.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1000 Arsip	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0		Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang	Penelusuran Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan hilang sesuai NSPK	1 Laporan	105.000.000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	10 Arsip	35.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	2	0	1.0	000	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	1000 Arsip	35.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
	2	2	0	1.0	000	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	5 Arsip	35.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
						<b>Dinas Kelautan Dan Perikanan</b>			<b>98.509.935.961</b>		
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>98.509.935.961</b>		
	3	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			<b>98.509.935.961</b>		
189	3	2	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</b> <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>	<b>100 %</b> <b>90.4 Indeks</b>	<b>42.694.213.600</b>		<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
	3	2	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	1.880.000.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	500.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	225.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	225.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	655.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
											- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	2	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	275.000.000		- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	25.150.000.000			DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123 Orang/ Bulan	23.350.000.000		- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	700.000.000		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	300.000.000		- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	300.000.000		- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	200.000.000		- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	2	0	1.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	20 %	315.000.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	90.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	90.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	135.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	964.820.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	394.820.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	135.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	135.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	300.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.344.643.600		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.500.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	195.908.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	25.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.891.235.600	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	1.300.000.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	400.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	900.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	9.428.750.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	28.750.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	2.500.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	6.900.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	1.311.000.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	550.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	161.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	500.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
190	3	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESIRIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>Persentase Luas Wilayah laut dan pesisir yang dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>72.97 %</b>	<b>7.247.502.000</b>		<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1 Kawasan	3.142.302.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	1 Dokumen	268.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	293030,78 Ha	2.395.302.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	5 Ha	372.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	30 Orang	107.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	6 Rekomendasi	2.090.000.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi	2 Rekomendasi	420.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	2 Rekomendasi	450.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	676.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	100.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	Jumlah Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut	1 Dokumen	444.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	2	0	1.0		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	14 Kelompok Masyarakat	2.015.200.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	60 Orang	937.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1 Kelompok	175.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	90 Orang	442.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	461.200.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
19 1	3	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap</b>	<b>190000 Ton</b>	<b>30.167.174.000</b>		<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	1 Kegiatan	19.458.174.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Dokumen	150.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	100 Unit	19.308.174.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	1 Kegiatan	4.599.000.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	1 Dokumen	120.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	25 Unit	4.479.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan	Jumlah Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	180 Rekomendasi	1.300.000.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT					
	3	2 5	0 3	1.0 3	000 2	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan	180 Rekomendasi	650.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2 5	0 3	1.0 3	000 3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	180 Dokumen	650.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2 5	0 3	1.0 5		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	810 Dokumen	1.760.000.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2 5	0 3	1.0 5	000 2	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Diterbitkan	810 Dokumen	1.760.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	6 Pelabuhan Perikanan	3.000.000.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	6 Unit	2.200.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	6 Layanan	800.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Pendaftaran Kapal Perikanan di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10 Rekomendasi	50.000.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	10 Rekomendasi	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
19 2	3	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya</b>	<b>200000 Ton</b>	<b>10.937.395.361</b>		<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
	3	2	0	1.0		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	3 Rekomendasi	200.000.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	3 Rekomendasi	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Lokasi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Lokasi	3.999.895.361		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	351.359.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	2 Unit	600.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3 Unit	1.818.536.361	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								
	3	2	0	1.0	000	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	80 Dokumen	780.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	70 Orang	450.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Pengembangan Budidaya Ikan Lokal Kalimantan Timur	1 Dokumen	6.737.500.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1.100.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	21 Unit	5.637.500.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
193	3	2	0			<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku</b>	<b>100 %</b>	<b>3.299.287.000</b>		<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
	3	2	0	1.0		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Persentase Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	100 %	2.098.104.180		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	3 Dokumen	835.516.680	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	153 Dokumen	652.282.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	13 Dokumen	371.055.000	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	18 Kelompok	239.250.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100 %	1.201.182.820		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	6 Dokumen	312.765.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	27 Dokumen	387.367.500	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya					
	3	2	0	1.0	000	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	65 Dokumen	501.050.320	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
<b>19</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan berkualitas (SNI) yang dipasarkan</b>	<b>7 Produk Olahan</b>	<b>4.164.364.000</b>		<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>
	3	2	0	1.0		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Kegiatan	1.341.000.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	11 Rekomendasi	70.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	3 Dokumen	1.271.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah UKM Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	10 UMKM	773.064.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan	15 Unit Usaha	773.064.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko			- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	2	0	1.0		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1 Lokasi	2.050.300.000		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitas	13 Unit Usaha	1.900.300.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi yang Diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dan Terkoneksi dari Hulu sampai Hilir	1 Dokumen	150.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
						<b>UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan</b>			<b>2.032.706.639</b>		
	<b>3</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>2.032.706.639</b>		
	<b>3</b>	<b>2</b>				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			<b>2.032.706.639</b>		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
195	3	2	0	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</b> <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>	<b>100 %</b> <b>90.4 Indeks</b>	<b>1.531.756.808</b>		<b>UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN</b>	
	3	2	0	1	1.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	69.480.000		UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
	3	2	0	1	1.0 2	000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	69.480.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	2	0	1	1.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	405.293.639		UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
	3	2	0	1	1.0 5	000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	405.293.639	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	2	0	1	1.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	412.535.175		UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
	3	2	0	1	1.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.505.125	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	2	0	1	1.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	31.200.750	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	2	0	1	1.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.035.800	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	2	0	1	1.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.129.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	2	0	1	1.0 6	000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	2.016.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	2	0	1	1.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	351.648.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	2	0	1	1.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	21.615.000		UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	
	3	2	0	1	1.0 7	001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	21.615.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	497.338.504		UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.070.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	121.185.384	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	372.083.120	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	125.494.490		UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	60.494.490	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	65.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
196	3	2	0			<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan</b>	<b>70 %</b>	<b>500.949.831</b>		<b>UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN</b>
	3	2	0	1.0		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Persentase hasil uji produk perikanan yang memenuhi standar keamanan pangan asal perikanan	70 %	500.949.831		UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN
	3	2	0	1.0	000	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	10 Unit Usaha	500.949.831	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						UPTD Balai Benih Udang Sentral Air Payau dan Air Laut Manggar			10.943.610.400		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			10.943.610.400		
	3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			10.943.610.400		
197	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 90.4 Indeks	5.949.324.550		UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	98.760.000		UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	2	0	1.0	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	98.760.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	91.873.000		UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	2	0	1.0	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	91.873.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	654.426.200		UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	2	0	1.0	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.146.950	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.156.150	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.741.500	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4.032.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	554.349.600	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	687.194.750		UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.237.550	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	272.322.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	412.635.200	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	4.417.070.600		UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	101.323.950	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	215.746.650	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.100.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
198	3	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut</b>	<b>1000000000 Ekor</b>	<b>4.994.285.850</b>		<b>UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR</b>
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut	1000000000 Ekor	4.994.285.850		UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2.220.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	2.774.285.850	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI BENIH UDANG SENTRAL AIR PAYAU DAN AIR LAUT MANGGAR
						<b>UPTD Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut Sebulu</b>			<b>6.201.144.000</b>		
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>6.201.144.000</b>		
	3	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			<b>6.201.144.000</b>		
199	3	2	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</b> <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>	<b>100 %</b> <b>90.4 Indeks</b>	<b>4.525.425.360</b>		<b>UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU</b>
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	99.280.000		UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	2	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	99.280.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 %	231.201.000		UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang	231.201.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	886.750.000		UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	45.500.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	196.750.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.500.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	25.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	564.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	599.000.000		UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	500.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	2	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	99.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	1.634.737.600		UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	182.400.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.451.337.600	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	100 %	1.074.456.760		UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	144.160.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	49.780.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	2	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	880.516.760	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
200	3	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar</b>	<b>4181000 Ekor</b>	<b>1.675.718.640</b>		<b>UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU</b>
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah Produksi Ketersediaan Benih Udang/Ikan Air Laut/Payau/Tawar (Ekor)	4181000 Ekor	1.675.718.640		UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2 Unit	638.839.500	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Unit	1.036.879.140	- Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	UPTD SENTRAL PEMBENIHAN AIR PAYAU DAN AIR LAUT SEBULU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Dinas Pariwisata			47.173.373.920		
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			47.173.373.920		
	3	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			47.173.373.920		
201	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks) Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti (%)	81 Indeks 100 %	19.354.263.920		DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	90 %	1.000.000.000		DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	82 %	9.256.920.000		DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/ Bulan	8.700.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	556.920.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	70 %	50.000.000		DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6 Dokumen	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	12 Laporan	3.929.530.000		DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	30.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	1.903.840.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	230.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	210.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98 Laporan	1.555.690.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	4.977.813.920		DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	310.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	1.230.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.437.813.920	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	140.000.000		DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	34 Unit	140.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
<b>202</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>			<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>Persentase Pengembangan Daya Tarik Wisata (%)</b>	<b>30 %</b>	<b>10.673.000.000</b>		<b>DINAS PARIWISATA</b>
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Daya Tarik Wisata yang dikelola (%)	33 %	3.100.000.000		DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	000	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	2 Lokasi	1.500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	000	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	4 Dokumen	1.600.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Kawasan Strategis yang dikelola	100 %	3.950.000.000		DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4 Unit	3.950.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Destinasi yang Dikelola	100 %	3.023.000.000		DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	3 Unit	1.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	001	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	170 Orang	1.673.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	001	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	350.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang diterbitkan	100 %	600.000.000		DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	000	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	1 Usaha	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	000	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	3 Unit Usaha	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	001	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
203	3	2	0			<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>Rata-rata lama Tinggal Wisatawan Mancanegara</b> <b>Rata-rata lama Tinggal Wisatawan Nusantara</b>	<b>2,70 Hari</b> <b>1,65 Hari</b>	<b>4.900.000.000</b>		<b>DINAS PARIWISATA</b>
	3	2	0	1.0		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri yang Terlaksana	100 %	4.900.000.000		DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	000	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	10 Dokumen	2.590.916.700	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	000	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	8 Dokumen	693.829.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	000	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5 Kegiatan	1.615.253.800	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
204	3	2	0			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	<b>Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang berkembang</b>	<b>75 %</b>	<b>6.746.110.000</b>		<b>DINAS PARIWISATA</b>
	3	2	0	1.0		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Persentase Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang Berfungsi dengan baik	50 %	3.776.110.000		DINAS PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	12 Laporan	1.276.110.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	000	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	14 Dokumen	2.500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	60 %	2.970.000.000		DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	001	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	10 Dokumen	1.970.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	001	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	1 Dokumen	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	001	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	4 Orang	125.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	001	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	2 Dokumen	70.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	001	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	1 Unit	655.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
205	3	2	0			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	<b>Persentase SDM Parekrif yang Tersertifikasi</b>	<b>33 %</b>	<b>5.500.000.000</b>		<b>DINAS PARIWISATA</b>
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	100 %	4.900.000.000		DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	000	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	60 Orang	1.340.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	000	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	5 Laporan	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	001	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	150 Orang	1.500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	001	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	140 Orang	1.460.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	001	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4 Laporan	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekraf yang berkembang Kapasitasnya	33 %	600.000.000		DINAS PARIWISATA
	3	2	0	1.0	000	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	80 Orang	600.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PARIWISATA
						<b>Dinas Perkebunan</b>			<b>65.483.601.900</b>		
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>65.483.601.900</b>		
	3	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>			<b>65.483.601.900</b>		
206	3	2	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>	<b>100 % 78,93 Skor</b>	<b>30.442.505.100</b>		<b>DINAS PERKEBUNAN</b>
	3	2	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	3.228.702.000		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	2.025.718.400	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	100.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	100.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	498.521.900	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	504.461.700	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	16.110.447.400		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/ Bulan	15.568.093.400	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	474.804.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15 Dokumen	10.550.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	1.225.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	28.350.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
3	2	0	1.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	27.425.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN	
3	2	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	75 %	65.750.000		DINAS PERKEBUNAN	
3	2	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	27.100.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN	
3	2	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6 Dokumen	29.500.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN	
3	2	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	9.150.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN	
3	2	0	1.0		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prosentase retribusi perkebunan	100 %	8.900.000		DINAS PERKEBUNAN	
3	2	0	1.0	000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	8.900.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN	
3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	35,71 %	654.050.000		DINAS PERKEBUNAN	
3	2	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	130.050.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN	
3	2	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	35.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN	
3	2	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	25.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN	
3	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	464.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN	
3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu	4 Unit	2.123.282.100		DINAS PERKEBUNAN	
3	2	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	50.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN	
3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	245.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN	
3	2	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	465.693.200	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN	
3	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	54.123.300	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN	
3	2	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	10.665.600	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN	
3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.297.800.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	13 Jenis	2.684.056.820		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	1.500.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	650.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	67 Unit	534.056.820	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	4.095.538.520		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	34.331.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	571.703.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	629.160.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.860.344.520	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	1.471.778.260		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	340.193.260	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	960.865.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	170.720.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
<b>207</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan</b>	<b>25,36 %</b>	<b>20.852.056.400</b>		<b>DINAS PERKEBUNAN</b>
	3	2	0	1.0		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Sarana Perkebunan Yang Diawasi	10 Jenis	20.852.056.400		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan	20.852.056.400	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> </ul>	
208	3	2	0			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Luas kebun yang dibangun</b>	<b>50702 Ha</b>	<b>600.000.000</b>		<b>DINAS PERKEBUNAN</b>
	3	2	0	1.0		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Perkebunan Yang Ditata	2 Jenis	600.000.000		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	400.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> </ul>	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen	200.000.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> </ul>	DINAS PERKEBUNAN
209	3	2	0			<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI)</b>	<b>100 %</b>	<b>6.915.440.100</b>		<b>DINAS PERKEBUNAN</b>
	3	2	0	1.0		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	200 Pelaku Usaha	6.915.440.100		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	122000 Ha	4.838.907.000	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> </ul>	DINAS PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> </ul>	
	3	2	0	1.0	000	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	725 Ha	2.076.533.100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> </ul>	DINAS PERKEBUNAN
210	3	2	0			<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)</b>	<b>40.59 %</b>	<b>1.647.421.100</b>		<b>DINAS PERKEBUNAN</b>
	3	2	0	1.0		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina dan dimitrakan	75 Pelaku Usaha	1.647.421.100		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	2 Laporan	1.647.421.100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> </ul>	DINAS PERKEBUNAN
211	3	2	0			<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya</b> <b>Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkatkan</b>	<b>11,15 %</b> <b>26,50 %</b>	<b>5.026.179.200</b>		<b>DINAS PERKEBUNAN</b>
	3	2	0	1.0		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN yang dilaksanakan	3 Kegiatan	1.074.912.500		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	60 Orang	1.074.912.500	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> </ul>	DINAS PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	2	0	1.0		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pekebun yang dikembangkan kompetensinya dan menerapkan inovasi pertanian	416 Orang	2.160.179.700		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000 1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	1.330.733.700	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000 2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	21 Kelompok	829.446.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan	18 Lembaga	1.791.087.000		DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000 5	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	1 Unit	1.120.166.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000 6	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	1 Unit	670.921.000	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERKEBUNAN
						<b>UPTD Pengawasan Benih Pekebunan</b>			<b>2.786.334.000</b>		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			2.786.334.000		
	3	2	7			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			2.786.334.000		
21 2	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti	85,87 Skor 100 %	1.731.871.000		UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	84.960.000		UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84.960.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	2	0	1.0		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan	100 %	5.000.000		UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000 7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	5.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	59 %	183.600.000		UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	183.600.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1 Unit	527.171.100		UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4.055.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	113.678.800	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											BENIH PEKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	51.936.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	7.744.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	7.756.800	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	342.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	2 Jenis	50.000.000		UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	2	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	50.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	667.823.900		UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	131.683.200	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	323.400.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	207.740.700	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	55 %	213.316.000		UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	24.406.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	149.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	2	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	39.910.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
213	3	2	0			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya</b>	<b>6000000 Benih</b>	<b>1.054.463.000</b>		<b>UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN</b>
	3	2	0	1.0		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih bersertifikat yang diedarkan	5000000 Benih	1.054.463.000		UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	150 Sertifikat	559.543.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 laporan	494.920.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGAWASAN BENIH PEKEBUNAN
						<b>UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan</b>			<b>3.337.721.100</b>		
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>3.337.721.100</b>		

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	3	2	0	1.0			Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0						
	7	1	2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>			<b>3.337.721.100</b>		
214	3	2	0	1.0	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti</b>	<b>79 Skor 100 %</b>	<b>1.822.937.800</b>		<b>UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN</b>
	3	2	0	1.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	84.960.000		UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84.960.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	3	2	0	1.0		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Retribusi Jasa Usaha Sewa Ruang, Operasional Laboratorium	100 %	2.000.000	
	3	2	0	1.0	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	2.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	35 %	93.960.000	
	3	2	0	1.0	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	93.960.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1 Unit	403.610.200	
	3	2	0	1.0						UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	9.081.300	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	55.611.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	39.088.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	21.151.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	274.800.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	14 Jenis	593.188.320		UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	383.097.600	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	210.090.720	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	521.213.280		UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5.200.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	178.912.800	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	129.360.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	207.740.480	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	65 %	124.006.000		UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	12.203.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10.203.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	101.600.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
215	3	2	0			<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)</b>	55 %	1.514.783.300		<b>UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN</b>
	3	2	0	1.0		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi pengendalian OPT	26 Pelaku Usaha	1.514.783.300		UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	1040 Ha	1.514.783.300	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN
						<b>UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan</b>			7.121.529.000		
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			7.121.529.000		
	3	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>			7.121.529.000		
216	3	2	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Presentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti</b>	80 Skor 100 %	2.621.529.000		<b>UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN</b>
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	84.960.000		UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	84.960.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prosentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan	100 %	50.000.000		UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	50.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	40 %	77.067.000		UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	77.067.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu	1 Unit	388.734.000		UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	75.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	33.500.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	25.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	244.234.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah	4 Jenis	1.149.465.000		UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1.036.500.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	112.965.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah	4 Jenis	754.100.000		UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.800.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	102.500.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	258.720.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	388.080.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	60 %	117.203.000		UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	12.203.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	80.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	25.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
21	3	2	0			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat</b>	<b>95 %</b>	<b>4.500.000.000</b>		<b>UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN</b>
	3	2	0	1.0		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Jumlah benih tanaman perkebunan yang disediakan	50000 Benih	4.500.000.000		UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3	2	0	1.0	000	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6	2 laporan	4.500.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
							tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga			- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
						<b>Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan</b>			<b>86.755.691.332</b>			
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>86.755.691.332</b>			
	3	2	7			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>			<b>86.755.691.332</b>			
218	3	2	0	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretarian Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti</b>	<b>93,30 Indeks 100 %</b>	<b>33.486.595.271</b>		<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>	
	3	2	0	1	1.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	90 %	2.736.374.702		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3	2	0	1	1.0	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	591.981.146	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1	1.0	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	84.568.735	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1	1.0	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	84.568.735	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	338.274.940	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Laporan	1.636.981.146	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	90 Skor	21.744.308.586		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/ Bulan	20.391.583.026	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	676.200.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	84.568.280	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	84.568.280	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	380.559.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	126.830.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	80 %	422.843.675		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	84.568.735	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	84.568.735	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	253.706.205	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	80 Score	549.696.778		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	84.568.735	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	84.568.735	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	126.853.103	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	253.706.205	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	80 %	1.437.668.497		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	42.284.368	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	338.274.940	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	84.568.735	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	42.284.368	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	930.256.086	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	80 %	872.843.674		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	788.274.940	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	84.568.734	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	4.665.750.170		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	84.568.735	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	422.843.675	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.158.337.760	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	1.057.109.189		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	49 Unit	177.594.344	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	180 Unit	380.559.308	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit	160.680.597	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	338.274.940	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
219	3	2	0			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Agribisnis</b> <b>Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan pakan, perbibitan dan produksi peternakan</b>	<b>96,21 Skor</b> <b>87,53 Skor</b>	<b>37.304.182.274</b>		<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>
	3	2	0	1.0		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Keluarga Miskin terfasilitasi Jumlah nilai pengeluaran komoditas ternak Jumlah produksi pupuk asal KOHE Persentase pemanfaatan Jumlah Biogas Persentase Kapasitas usaha pengolahan hasil peternakan	625 KK 860 Rupiah 385000 Ton 30 % 25 %	3.911.835.245		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4 Laporan	2.811.101.147	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> </ul>	
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen	1.100.734.098	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> </ul>	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah bibit sapi ber-SKLB Jumlah usaha ternak (aneka ternal/plasma nuthfa) Penurunan jumlah DOC kualitasnya dibawah Standar Persentase Akseptor IB dari Indukan Persentase Calving Rate Pertumbuhan Upgrade Closed house	175 Ekor 108 Unit Usaha 1,95 % 12,5 % 61 % 50 %	4.489.264.312		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	1.583.728.186	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> </ul>	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	3 laporan	2.905.536.126	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> </ul>	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> </ul>	
	3	2	0	1.0		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengolahan Pakan, bank pakan Luasan HPT	18 Unit 1150 Ha	4.096.082.064		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	2 laporan	1.907.447.130	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> </ul>	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	1 Dokumen	2.188.634.934	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> </ul>	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	Persentase unit usaha yang mengedarkan obat hewan bermutu/ berkhasiat/aman	29.58 %	660.440.458		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	1 Laporan	660.440.458	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua</li> </ul>	DINAS PETERNAKAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Pengadaan Ternak	2700 Indukan/Bibit	24.146.560.195		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	2220 Ekor	24.146.560.195	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
220	3	2	0			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Tingkat pemenuhan prasarana peternakan</b>	<b>99,54 Skor</b>	<b>1.300.734.098</b>		<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>
	3	2	0	1.0		Penataan Prasarana Pertanian	Jumlah Investasi di Bidang Peternakan Jumlah Nilai Akses pembiayaan Luas kawasan pemanfaatan untuk peternakan	3 Unit 107 Milyar Rupiah, Milyar 134 Ha	1.300.734.098		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen	1.300.734.098	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
											- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
221	3	2	0			<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	<b>Tingkat pengendalian wilayah dari PHMSZ</b> <b>Tingkat pengendalian kesehatan masyarakat veteriner</b>	<b>91,79 Skor</b> <b>95,11 Skor</b>	<b>10.089.966.422</b>		<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>	
	3	2	0	1.0		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah tidak terjadi kasus PHMSZ (cakupan 103 kecamatan di KALTIM,absolut) Persentase pelayanan kesehatan hewan Persentase wilayah (103 Kecamatan) yang terkendali dari zoonosis Tingkat kesembuhan GANGREP	64 Kecamatan 43,5 % 20 % 76,5 %	4.990.000.912		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3	2	0	1.0	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	1.479.073.905	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3	2	0	1.0	0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	30 Wilayah	412.775.287	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
	3	2	0	1.0	0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12 Laporan	2.602.821.376	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> </ul>
	3	2	0	1.0	000	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis	50 Orang	495.330.344	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> </ul>	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesehatan hewan untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan Persentase penurunan resiko masuknya PHMSZ	72 % 3,2 %	1.651.101.146		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	12 Laporan	1.320.880.917	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> </ul>	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	2 Laporan	330.220.229	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> <li>- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa</li> </ul>	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	jumlah konsumsi pangan asal ternak balita potensi stunting Jumlah zona/kompartemen bebas kasus PHMSZ Persentase mutu dan keamanan pangan segar asal hewan yang memenuhi persyaratan (ASUH)	27,5 gram per hari 23 Unit 81 % 24,48 % 1,32 %	2.953.534.020		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Persentase penurunan pemotongan ternak sapi betina produktif Persentase unit usaha yang menerapkan kesrawan				
	3	2	0	1.0	000	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	8 Unit	419.692.414	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	2 Laporan	462.308.321	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	5 Unit Usaha	165.110.115	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	10 Unit Usaha	346.731.241	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								
	3	2	0	1.0	000	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	30 Unit Usaha	825.550.573	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	100 Orang	387.410.115	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan	1 Produk	346.731.241	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0		Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase kepatuhan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis kesmavet untuk pemasukan dan/atau pengeluaran produk hewan	58 %	495.330.344		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	50 Dokumen	495.330.344	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa
22 2	3	2	0			<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>Tingkat peran aktif pelaku usaha dalam usaha peternakan</b>	<b>99,35 Skor</b>	<b>550.418.728</b>		<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>
	3	2	0	1.0		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peran swasta dalam usaha bidang peternakan Persentase PKS usaha Peternakan yang diberikan advice	114 Unit 32,90 %	550.418.728		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000 2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	395 Dokumen	110.073.403	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000 5	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	2 Laporan	440.345.325	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
22 3	3	2	0			<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Peningkatan Kapasitas SDM dan kelembagaan peternakan</b>	<b>99,74 Skor</b>	<b>4.023.794.539</b>		<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>
	3	2	0	1.0		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Jumlah pembudidaya unggas Persentase jumlah peternak milenial Rasio SD komoditas/ produk peternakan	49215 RTUP 75 % 1,154 Rasio	1.712.253.041		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000 1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3 Dokumen	385.256.934	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	192 Kelompok	1.326.996.107	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	Jumlah Desa Korporasi Ternak	8 Unit	2.311.541.498		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	9 Unit	1.541.027.665	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3	2	0	1.0	000	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	8 Unit	770.513.833	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
						<b>UPTD Pembibitan dan Hijauan Pakan Ternak</b>			<b>13.272.900.371</b>		
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>13.272.900.371</b>		
	3	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>			<b>13.272.900.371</b>		
22 4	3	2	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase keluhan pengguna layanan yang di tindak lanjuti Indeks kualitas layanan kesekretariatan	100 % 93,30 Indeks	11.025.041.001		<b>UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK</b>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi anggaran	90 Score	150.960.000		UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	150.960.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Api-api	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	2	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	80 Score	141.063.293		UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	21.013.293	- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Api-api	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	2	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	20.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Api-api	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	2	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	100.050.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Api-api	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	80 Score	80.888.200		UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	44.440.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Api-api	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	36.448.200	- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Api-api	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	80 %	499.043.300		UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	14.366.800	- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Api-api	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	129.208.500	- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Api-api	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	11.268.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Api-api	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	344.200.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	80 %	87.771.100		UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	87.771.100	- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Api-api	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	1.953.094.860		UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	2.502.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Api-api	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	104.545.580	- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Api-api	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.846.047.280	- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Api-api	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	8.112.220.248		UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	10.343.500	- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Api-api	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	352.283.100	- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Api-api	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	7.749.593.648	- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Api-api	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
225	3	2	0			<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Tingkat Kemanfaatan Sarana terhadap capaian kinerja teknis kegiatan Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak</b>	<b>88.54 Skor</b>	<b>2.247.859.370</b>		<b>UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK</b>
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	angka kelahiran Angka kematian ternak Calving Interval Jumlah PAD Jumlah Populasi Ternak/Hewan	25,50 % 2,13 % 17,01 Bulan 113000000 Rupiah 133,7 ST	2.247.859.370		UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Jumlah Produksi Hijauan Pakan Ternak dan pakan tambahan Jumlah produksi pupuk	1.500 Ton 10 Ton			
	3	2	0	1.0	000	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	12 Laporan	997.137.670	- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Api-api	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
	3	2	0	1.0	000	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	12 Laporan	1.250.721.700	- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Api-api	UPTD PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
						<b>UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>			<b>4.321.030.260</b>		
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>4.321.030.260</b>		
	3	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>			<b>4.321.030.260</b>		
22 6	3	2	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang di Tindak Lanjuti Indek Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 93.30 Skor	2.540.556.050		<b>UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Pemenuhan Administrasi Realisasi Anggaran	90 Score	114.840.000		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	114.840.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	2	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan administrasi BMD	80 Score	77.333.600		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											MASYARAKAT VETERINER
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	31.610.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	2	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	21.625.600	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	2	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	24.098.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Pengelolaan kepegawaian	80 Score	209.545.000		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	66.400.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	143.145.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											MASYARAKAT VETERINER
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan administrasi umum	80 %	540.396.270		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	2	0	1.0	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	2	0	1.0	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	216.445.600	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	2	0	1.0	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	25.072.270	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	2	0	1.0	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	2	0	1.0	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	285.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	MASYARAKAT VETERINER
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	80 %	175.042.000		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	73.340.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	101.702.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	1.127.684.680		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	5.994.300	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	189.715.900	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	931.974.480	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	295.714.500		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	8.407.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	205.005.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	63.882.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	18.420.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
227	3	27	04			<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Tingkat Layanan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat	98,68 Skor	1.780.474.210		<b>UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>
	3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Peningkatan Jumlah PAD Peningkatan Kepuasan pelanggan Peningkatan Ruang lingkup pengujian	1900000000 Rupiah 84 Score 39 Absolut	1.780.474.210		UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
	3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	400 Dokumen	1.780.474.210	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
						<b>Dinas Kehutanan</b>			<b>228.606.821.910</b>		
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>228.606.821.910</b>		
	3	28				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>			<b>228.606.821.910</b>		
228	3	28	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 81 Indeks	127.492.251.887		<b>DINAS KEHUTANAN</b>
	3	28	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, evaluasi dan Pelaporan yang diselesaikan	100 %	3.313.200.000		DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	700.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	400.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	567.800.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	700.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	945.400.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	103.230.900.887		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	550 Orang/ Bulan	99.911.995.887	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	699.720.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	583.398.600	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	453.648.625	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	753.939.175	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	828.198.600	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	948.151.000		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	458.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	390.151.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	1.155.355.300		DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
3	2	0	1.0	000	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	650.995.100	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
3	2	0	1.0	000	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	40.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
3	2	0	1.0	000	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	329.426.200	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
3	2	0	1.0	001	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Orang	134.934.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
3	2	0	1.0			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	5.083.568.950		DINAS KEHUTANAN
3	2	0	1.0	000	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	26.082.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
3	2	0	1.0	000	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	94.351.200	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
3	2	0	1.0	000	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	56.017.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
3	2	0	1.0	000	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	91.529.700	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
3	2	0	1.0	000	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	11.635.200	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
3	2	0	1.0	000	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3.806.004.350	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
3	2	0	1.0	001	000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	201.038.300	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
3	2	0	1.0	001	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	6 Dokumen	796.910.200	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
3	2	0	1.0			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	4.906.861.090		DINAS KEHUTANAN
3	2	0	1.0	000	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	4.906.861.090	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
3	2	0	1.0			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	3.790.200.640		DINAS KEHUTANAN
3	2	0	1.0	000	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.560.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
3	2	0	1.0	000	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	877.739.600	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
3	2	0	1.0	000	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	194.916.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.711.985.040	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	5.064.014.020		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	291.092.400	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	64 Unit	704.154.200	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	140 Unit	127.400.700	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	50.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	3.891.366.720	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
22 9	3	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan</b>	<b>4420000 m3/tahun 850 ton 0,47 % 1 %</b>	<b>55.635.043.182</b>		<b>DINAS KEHUTANAN</b>
	3	2	0	1.0		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	20 Dokumen	1.298.128.971		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	1.298.128.971	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407,17 Hektar	10.651.796.000		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	4 Dokumen	2.157.264.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	239.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	5.403.736.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi					
	3	2	0	1.0	000	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	50 Dokumen	2.851.796.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	250 Hektare	14.962.798.000		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	550.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	548 Ha	10.473.173.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	100 Unit	1.200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	20 Laporan	2.739.625.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Hektar	20.980.065.411		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	Jumlah Operasi Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan	6 Operasi	2.935.342.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	5.904.589.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	7 Laporan	12.140.134.411	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	16499 M3	4.220.630.000		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Unit Managemen yang Melaksanakan Tertib Pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) Skala Usaha Kecil dan Menengah	48 Unit Managemen	1.671.960.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	28 Dokumen	774.080.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui	Jumlah Permohonan PBPHH Kayu Skala Kecil dan Menengah yang Dilayani	13 Unit Managemen	1.774.590.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik					
	3	2	0	1.0		Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih/Bibit terdaftar; Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	101 Jumlah SK	3.521.624.800		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	25 Unit Usaha	1.257.422.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	0002	Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	20 Sertifikat	900.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	80 Laporan	1.364.202.800	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
230	3	2	0			<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	<b>Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola</b>	<b>610540.98 Hektar</b>	<b>5.826.687.000</b>		<b>DINAS KEHUTANAN</b>
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	545675 Hektar	5.826.687.000		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	450 Orang	1.739.530.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	100000 Ha	4.087.157.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
231	3	2	0			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>20000 Hektar 20 Kelompok</b>	<b>35.924.564.841</b>		<b>DINAS KEHUTANAN</b>
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	17 kelompok	35.924.564.841		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	124 Orang	18.923.556.191	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	90 Kelompok	4.150.760.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20000 Ha	12.850.248.650	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
232	3	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	<b>Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola</b>	<b>10104 Hektar</b>	<b>3.728.275.000</b>		<b>DINAS KEHUTANAN</b>
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	3.728.275.000		DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan DAS yang Ditetapkan	1 Dokumen	650.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	6 Dokumen	850.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
	3	2	0	1.0	000	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	300 Orang	1.928.275.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1 Lembaga	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS KEHUTANAN
						<b>UPTD Taman Hutan Raya Bukit Soeharto</b>			<b>25.102.560.500</b>		
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>25.102.560.500</b>		
	3	2	8			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>			<b>25.102.560.500</b>		
233	3	2	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan	100 % 81 -	7.582.146.000		<b>UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO</b>
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	175.692.000		UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	175.692.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	747.681.500		UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	247.681.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	538.538.300		UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	24.157.750	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	40.622.050	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12.889.250	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	26.557.250	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.312.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	430.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	1.760.000.000		UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	700.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	150.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	2	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	910.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	933.147.380		UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	216.158.800	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	716.988.580	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	3.427.086.820		UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	62 Unit	174.199.300	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	80.421.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3.172.466.520	- Kota Samarinda, Samarinda Kota, Sungai Pinang Luar - Kab. Kutai Kartanegara, Samboja Barat, Bukit Merdeka - Kab. Kutai Kartanegara, Kute Siantan, Bukit Merdeka	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
234	3	2	0		<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi</b> <b>1). Produksi hasil hutan kayu</b> <b>2). Produksi hasil hutan bukan kayu</b> <b>4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan</b>	<b>0,47 %</b> <b>4420000 m3/tahun</b> <b>850 Ton</b> <b>1 %</b>	<b>4.305.473.800</b>		<b>UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO</b>	
	3	2	0	1.0	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen 1	700.000.000		UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO	
	3	2	0	1.0	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	700.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179,13 hektare	3.605.473.800		UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	2	0	1.0	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	3.605.473.800	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
235	3	2	0		<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	<b>Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola</b>	<b>610540.98 Ha</b>	<b>11.023.874.000</b>		<b>UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO</b>	
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas Kawasan Tahura Provinsi yang dikelola	64815 Ha	9.736.212.800		UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	2	0	1.0	0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Operasi Kegiatan Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	12 Operasi	2.922.707.800	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	2	0	1.0	0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	250 Ha	6.000.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	2	0	1.0	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	3 Desa	813.505.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	100 Ha	1.287.661.200		UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	120 Orang	587.661.200	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	2	0	1.0	000	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	100 Ha	700.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
23	3	2	0			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat</b>	<b>20000 Ha 20 Kelompok</b>	<b>2.191.066.700</b>		<b>UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO</b>
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	2.191.066.700		UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	2	0	1.0	000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	691.066.700	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
	3	2	0	1.0	000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	20 Ha	1.500.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD TAMAN HUTAN RAYA BUKIT SOEHARTO
						<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Barat</b>			<b>20.221.900.967</b>		
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>20.221.900.967</b>		
	3	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>			<b>20.221.900.967</b>		
23	3	2	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</b>	<b>81 Indeks 100 %</b>	<b>4.662.642.200</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT</b>
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan Daerah	100 %	152.880.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	152.880.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan	100 %	186.363.500		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	41.353.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	145.010.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	1.444.495.640		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	8.087.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	85.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.343.408.640	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	133.059.200		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	133.059.200	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	541.829.240		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	120.039.800	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	409.789.440	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	2.204.014.620		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	150.328.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	45.900.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	20.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.987.786.620	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
23 8	3	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	4420000 m3/tahun 1 % 850 Ton 0,47 %	12.873.289.767		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	5.240.713.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 Unit	5.240.713.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	692.750.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBBH Di Kawasan Hutan Produksi	22 Dokumen	692.750.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.834.450.900		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0	000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	67 Ha	3.442.150.900	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0	000	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	2 Laporan	392.300.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	3.105.375.867		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0	000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	50 Ha	800.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	1.122.960.967	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1.182.414.900	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
239	3	2	0		<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>20000 Hektare 20 Kelompok</b>	<b>2.685.969.000</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT</b>	
	3	2	0	1.0	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	2.685.969.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT	
	3	2	0	1.0	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	351.499.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	993.509.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
	3	2	0	1.0	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Ha	1.340.961.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU BARAT
						<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bongan</b>		<b>20.447.585.200</b>			
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>		<b>20.447.585.200</b>			
	3	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>		<b>20.447.585.200</b>			
240	3	2	0		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</b>	<b>81 Indeks 100 %</b>	<b>5.282.271.100</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN</b>	
	3	2	0	1.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	148.800.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN	
	3	2	0	1.0	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148.800.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	207.382.500		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	117.382.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	90.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	2.523.729.940		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	14.999.300	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket	1.370.326.500	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	35.484.290	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	39.995.050	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen	7.756.800	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	105 Laporan	1.055.168.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.279.655.160		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	184.637.400	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.080.017.760	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	1.122.703.500		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit	501.650.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit	43.897.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	577.156.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
24 1	3	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>1). Produksi hasil hutan kayu 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu</b>	<b>4420000 m3/tahun 0,47 % 1 % 850 Ton</b>	<b>13.088.176.100</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN</b>
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	2.283.976.100		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	21 Unit	2.283.976.100	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	180.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)					HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	180.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407,17 Ha	1.150.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	4 Dokumen	650.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	500.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	1200 Ha	3.720.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	320.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Bongon, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0	000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	122 Ha	3.400.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Bongon, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170,18 Ha	4.754.200.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0	000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	335746 Ha	685.200.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	200.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	50 Laporan	3.869.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	5153407 m3	1.000.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0	000	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	1.000.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Sotek	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
24	3	2	0			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>20000 Ha 20 Kelompok</b>	<b>2.077.138.000</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN</b>
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	2.077.138.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0	000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	4 Orang	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0	000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	620.991.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
	3	2	0	1.0	000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1600 Ha	1.356.147.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BONGAN
						<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Meratus</b>			<b>23.605.859.750</b>		
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>23.605.859.750</b>		
	3	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>			<b>23.605.859.750</b>		
24	3	2	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</b>	<b>81 Indeks 100 %</b>	<b>4.994.329.300</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS</b>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	548.800.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	148.800.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	400.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	170.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0	000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	170.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	40.044.200		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	40.044.200	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	1.314.368.100		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.876.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	250.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	27.999.200	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	1.015.492.900	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	193.281.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	193.281.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	920.445.440		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	10.680.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	709.765.440	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	1.807.390.560		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	46 Unit	1.057.390.560	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit	150.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	600.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
24 4	3	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi</b> <b>1). Produksi hasil hutan kayu</b> <b>2). Produksi hasil hutan bukan kayu</b> <b>4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan</b>	<b>0,47 %</b> <b>4420000 m3/tahun</b> <b>850 Ton</b> <b>1 %</b>	<b>17.035.580.450</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS</b>
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	5.485.354.550		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	35 Unit	5.485.354.550	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	1.250.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	1.250.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 hektar	1.078.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	450.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	3 Dokumen	628.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektare	5.600.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	350.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0	000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	208 Ha	5.250.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 hektare	3.622.225.900		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0	000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	150 Ha	550.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Bongan, Muara Gusik - Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	1.120.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Bongan, Muara Gusik - Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau - Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Laporan	1.952.225.900	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Bongan, Muara Gusik - Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau - Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
24	3	2	0			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>20.000 hektare 20 Kelompok</b>	<b>1.575.950.000</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS</b>
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	7 Kelompok	1.575.950.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0	000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	650.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0	000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	725.950.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Bongan, Muara Gusik - Kab. Penajam Paser Utara, Sepaku, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
	3	2	0	1.0	000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Ha	200.000.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Bongan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MERATUS
						<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kendilo</b>			<b>19.978.815.550</b>		
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>19.978.815.550</b>		
	3	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>			<b>19.978.815.550</b>		
24	3	2	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</b>	<b>81 Indeks 100 %</b>	<b>5.425.434.000</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO</b>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	148.800.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	148.800.000	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	201.100.500		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	55.389.000	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	10 Dokumen	43.200.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	22.200.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7 Orang	80.311.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	1.095.467.820		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.698.000	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	117.335.000	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	216.234.500	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	36.261.120	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	1.939.200	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	668.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	1.750.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	250.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	1.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.199.615.680		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	276.049.600	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	923.566.080	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	1.030.450.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	30.450.000	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	500.000.000	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
24 7	3	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu</b>	<b>1 % 0,47 % 4420000 m3/tahun 850 Ton</b>	<b>12.451.155.650</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO</b>
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	6.097.751.650		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	6 Unit	6.097.751.650	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	151.404.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	151.404.000	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407,17 Hektar	750.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	500.000.000	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	250.000.000	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.902.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	70.000.000	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0	000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	3.832.000.000	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179,13 Hektar	1.550.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0	000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	100 Ha	250.000.000	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	450.000.000	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	20 Laporan	850.000.000	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
248	3	2	0			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>20000 Hektar 20 Kelompok</b>	<b>2.102.225.900</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO</b>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 Kelompok	2.102.225.900		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0	000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	200.000.000	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0	000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	10 Kelompok	550.000.000	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
	3	2	0	1.0	000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Ha	1.352.225.900	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KENDILO
						<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Santan</b>			<b>28.614.773.450</b>		
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>28.614.773.450</b>		
	3	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>			<b>28.614.773.450</b>		
249	3	2	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</b>	<b>81 Indeks 100 %</b>	<b>4.673.473.500</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN</b>
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan Daerah	100 %	176.040.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	176.040.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	630.052.300		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	296.935.600	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	333.116.700	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	1.066.237.360		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.226.600	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	417.646.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	12.300.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.024.260	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	557.040.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	1.191.316.800		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	9 Unit	1.191.316.800	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.218.575.840		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	126.398.400	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	29.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.063.177.440	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	391.251.200		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56 Unit	326.698.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	63 Unit	64.553.200	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
250	3	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1). Produksi hasil hutan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi	4420000 m3/tahun 1 % 850 Ton 0,47 %	22.694.254.250		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	4.559.719.650		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	1 Unit	4.559.719.650	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	369.480.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	369.480.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
											HUTAN PRODUKSI SANTAN	
	3	2	0	1.0		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407.17 Ha		178.050.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	11 Dokumen		178.050.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha		3.903.391.600		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0	000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	115 Ha		3.903.391.600	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Ha		3.732.383.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0	000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	267068 Ha		542.528.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen		841.963.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan		2.347.892.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	550 Hektare		9.951.230.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0	000	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen		9.951.230.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
25 1	3	2	0		<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>20000 Hektar 20 Kelompok</b>	<b>1.247.045.700</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN</b>	
	3	2	0	1.0	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1 Kelompok	1.247.045.700		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN	
	3	2	0	1.0	000 2	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	266.477.500	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
	3	2	0	1.0	000 3	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	980.568.200	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Bontang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SANTAN
						<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Sub Das Belayan</b>		<b>21.788.787.800</b>			
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>		<b>21.788.787.800</b>			
	3	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>		<b>21.788.787.800</b>			
25 2	3	2	0		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>	<b>100 % 81 Indeks</b>	<b>5.077.380.000</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN</b>	
	3	2	0	1.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	141.240.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN	
	3	2	0	1.0	000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	141.240.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	200.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	200.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	736.978.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	366.818.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	370.160.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	1.553.197.080		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	773.957.580	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	4.536.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	43.103.500	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	731.600.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.597.063.920		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	125.534.400	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.471.529.520	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	848.901.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	376.191.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	241.140.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	231.570.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
253	3	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 1). Produksi hasil hutan kayu</b>	<b>0,47 % 850 Ton 1 % 4420000 m3/tahun</b>	<b>14.447.805.900</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN</b>
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	5.807.808.900		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	4 Unit	5.807.808.900	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	509.140.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	509.140.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 hektare	736.340.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	394.340.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	4 Dokumen	342.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektare	1.848.781.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	200.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	1.648.781.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 hektare	3.372.096.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	997384.08 Ha	372.096.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	500.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	3 Laporan	2.500.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	100 hektar	2.173.640.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0	000	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	2 Unit Managemen	2.173.640.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
254	3	2	0			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>20.000 hektare 20 kelompok</b>	<b>2.263.601.900</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN</b>
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 kelompok	2.263.601.900		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0	000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	8 Orang	400.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0	000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	600.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
	3	2	0	1.0	000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1.263.601.900	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI SUB DAS BELAYAN
						<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon</b>			<b>21.212.593.300</b>		
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>21.212.593.300</b>		
	3	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>			<b>21.212.593.300</b>		
255	3	2	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</b>	<b>81 Indeks 100 %</b>	<b>4.922.702.720</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON</b>
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan Daerah	100 %	259.200.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	139.200.000	- Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	120.000.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan	100 %	448.800.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	83.880.000	- Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	58 Orang	364.920.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	932.673.630		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.766.100	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	111.345.300	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	38.356.230	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	774.206.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	1.409.724.210		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	337.278.500	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16 Unit	211.175.710	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	861.270.000	- Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	867.124.880		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	252.886.800	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	614.238.080	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	1.005.180.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	614.479.400	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	99 Unit	80.700.600	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	310.000.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
256	3	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 1). Produksi hasil hutan kayu 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi</b>	<b>1 % 850 Ton 4420000 m3/tahun 0,47 %</b>	<b>15.086.116.880</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON</b>
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	4.731.924.600		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	4 Unit	4.731.924.600	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	336.637.500		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	336.637.500	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407,17 Ha	473.453.080		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	5 Dokumen	473.453.080	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	1.200 Ha	5.922.750.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	60.000.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	405 Ha	5.862.750.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170,18 Ha	3.621.351.700		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0	000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	641969 Ha	1.015.262.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	612.535.500	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	6 Laporan	1.993.554.200	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
257	3	2	0			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>20.000 Ha 20 Kelompok</b>	<b>1.203.773.700</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON</b>
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	1.203.773.700		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0	000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	3 Orang	83.400.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0	000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	692.792.500	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
	3	2	0	1.0	000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	427.581.200	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BENGALON
						<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Batu Ayau</b>			<b>17.836.349.400</b>		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			17.836.349.400		
	3	2	8			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			17.836.349.400		
258	3	2	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	81 Indeks 100 %	4.604.786.800		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan Daerah	100 %	306.240.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	152.160.000	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	26.640.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Laporan	127.440.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	132.821.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	17.885.000	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	7 Laporan	64.536.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	50.400.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	509.668.500		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	67.099.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	14 Dokumen	95.280.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	182.400.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	164.889.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	984.674.340		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	26.140.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	121.411.240	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	25.164.100	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	14.159.000	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	797.800.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	515.275.400		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	293.350.400	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	221.925.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.561.831.060		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.500.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	175.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	8.158.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.364.172.560	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	594.276.500		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	379.636.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	15.350.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	85 Unit	57.850.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	90.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	51.440.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
259	3	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>2). Produksi hasil hutan bukan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi hasil hutan kayu</b>	<b>850 Ton 1 % 0,47 % 4420000 m3/tahun</b>	<b>12.458.022.600</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU</b>
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.310.131.100		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	2 Dokumen	244.080.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	293.283.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	10 Unit	2.550.768.100	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	2 Dokumen	222.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	343.965.600		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	343.965.600	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	1.156.420.300		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	318.333.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	194.196.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	10 Dokumen	643.891.300	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektar	5.815.886.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	204.052.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	80 Ha	5.209.954.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	15 Laporan	401.880.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 hektar	1.831.619.600		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1500 Ha	465.783.600	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	13 Dokumen	590.596.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	29 Laporan	775.240.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
260	3	2	0			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>20000 hektar 20 Kelompok</b>	<b>773.540.000</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU</b>
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	kelompok 4	773.540.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	8 Orang	199.800.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
										- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	
	3	2	0	1.0	000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	6 Kelompok	296.790.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
	3	2	0	1.0	000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2000 Ha	276.950.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BATU AYAU
						<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Utara</b>			<b>16.885.915.000</b>		
	<b>3</b>					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>16.885.915.000</b>		
	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>8</b>			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>			<b>16.885.915.000</b>		
<b>26</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</b>	<b>81 Indeks 100 %</b>	<b>4.776.756.840</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA</b>
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan Daerah	100 %	312.060.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	122.160.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	189.900.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	129.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	129.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	369.741.200		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	108.241.200	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	42 Orang	261.500.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	2.152.142.400		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	54.682.200	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	41.776.200	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	43.106.400	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	52.377.600	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	51.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.909.200.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
											HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA	
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %		363.078.800		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		252.265.800	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit		110.813.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %		997.366.440		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		8.030.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		108.459.200	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		880.877.240	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %		453.368.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit		327.598.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit		47.900.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	77.870.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
26 2	3	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan</b> <b>3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi</b> <b>1). Produksi Hasil Hutan Kayu</b> <b>2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu</b>	<b>1 %</b> <b>0,47 %</b> <b>4420000 M3/Tahun</b> <b>850 Ton</b>	<b>10.374.837.160</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA</b>
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	2.055.098.600		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	7 Unit	2.055.098.600	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen	192.270.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	192.270.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	496.200.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	115.560.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	7 Dokumen	380.640.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	4.486.398.200		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	145.660.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0	000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	95 Ha	3.940.738.200	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0	000	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan	Jumlah Bangunan Sipil Teknis yang Terbangun	3 Unit	400.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	3.054.030.360		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0	000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	44126 Ha	857.555.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	447.995.360	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	70 Laporan	1.748.480.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	1 M3	90.840.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0	000	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	7 Dokumen	90.840.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
263	3	2	0			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	20.000 Hektar 20 Kelompok	1.734.321.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	1.734.321.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0	000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	102.261.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0	000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	487.880.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
	3	2	0	1.0	000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	600 Ha	1.144.180.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU UTARA
						<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Tengah</b>			<b>16.828.710.000</b>		
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>16.828.710.000</b>		
	3	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>			<b>16.828.710.000</b>		
264	3	2	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	81 Indeks 100 %	4.679.624.200		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah	100 %	312.960.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	139.200.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	173.760.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	117.960.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	117.960.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	247.832.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	95.165.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang	152.667.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	726.902.100		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	55.246.300	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	39.915.800	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	631.740.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	441.518.700		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	129.703.300	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	41 Unit	311.815.400	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	940.021.600		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.970.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	108.973.600	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	819.078.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	1.892.429.800		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	437.492.800	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	1.454.937.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
265	3	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 1). Produksi Hasil Hutan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu</b>	<b>1 % 0,47 % 4420000 M3/Tahun 850 Ton</b>	<b>10.805.900.900</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH</b>
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	4.487.144.900		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	5 Unit	4.487.144.900	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen	293.328.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	293.328.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	579.508.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	196.468.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	383.040.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	3.435.110.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0	000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	120 Ha	3.435.110.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	2.010.810.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0	000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	300 Ha	346.260.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	572.298.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1.092.252.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
26	3	2	0			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>20.000 Hektar 20 Kelompok</b>	<b>1.343.184.900</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH</b>
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	1.343.184.900		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0	000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	656.222.900	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
	3	2	0	1.0	000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	10000 Ha	686.962.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU TENGAH
						<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Berau Pantai</b>			<b>17.599.466.600</b>		
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>17.599.466.600</b>		
	3	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>			<b>17.599.466.600</b>		
26	3	2	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</b>	<b>81 Indeks 100 %</b>	<b>4.612.418.200</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI</b>
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan Daerah	100 %	124.800.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	124.800.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	246.092.500		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	62.614.500	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	183.478.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	699.095.820		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	41.877.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	42.818.820	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	614.400.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	2.451.027.400		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	83.400.500	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	86.895.900	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	2.280.731.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	802.956.080		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.950.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	102.180.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Laporan	73.010.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	620.816.080	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	288.446.400		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	218.846.400	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	69.600.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
268	3	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>1). Produksi hasil hutan kayu 2). Produksi hasil hutan bukan kayu 4). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 3). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi</b>	<b>4420000 m3/tahun 850 Ton 1 % 0,47 %</b>	<b>9.867.122.400</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI</b>
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	1.348.247.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	20 Unit	1.348.247.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 dokumen	420.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	420.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	846.820.400		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	6 Dokumen	628.420.400	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	6 Dokumen	218.400.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	3.541.689.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	186.150.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	3.355.539.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	3.710.366.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0	0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	158000 Ha	210.174.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	1.666.012.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	1.834.180.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
269	3	2	0			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya</b> <b>1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat</b>	<b>20 Kelompok</b> <b>20.000 Hektar</b>	<b>3.119.926.000</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI</b>
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	6 kelompok	3.119.926.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0	000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	15 Orang	190.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0	000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	174.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
	3	2	0	1.0	000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2833 Ha	2.755.926.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI BERAU PANTAI
						<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Manubar</b>			<b>16.663.626.500</b>		
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>16.663.626.500</b>		
	3	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>			<b>16.663.626.500</b>		
270	3	2	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</b> <b>1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>	<b>100 %</b> <b>81 Indeks</b>	<b>4.022.028.500</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR</b>
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	137.160.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	137.160.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	259.224.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	82.224.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	177.000.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.826.807.764		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	24.747.600	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	66.817.164	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	22.333.100	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.409.900	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	33.000.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1.669.500.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
											HUTAN PRODUKSI MANUBAR	
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %		374.991.036		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket		329.058.400	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit		45.932.636	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %		950.745.200		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		150.781.200	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		799.964.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %		473.100.500		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit		334.086.500	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit		139.014.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
27 1	3	2	0	3		<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan	850 Ton 4420000 M3/Tahun 1 % 0,47 %		11.492.214.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							<b>4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi</b>				
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	2.743.612.800		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 Unit	2.743.612.800	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	2	0	1.0		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	861.934.500		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	4 Dokumen	861.934.500	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Ha	3.739.246.900		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	81.526.900	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	2	0	1.0	000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	3.657.720.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179.13 Ha	4.147.419.800		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	4 Dokumen	1.317.554.500	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	2.829.865.300	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
27 2	3	2	0			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>20000 Hektar 20 Kelompok</b>	<b>1.149.384.000</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR</b>
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	1.149.384.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	2	0	1.0	000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	890.620.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
	3	2	0	1.0	000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	30 Ha	258.764.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MANUBAR
						<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Kelinjau</b>			<b>20.455.218.800</b>		
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>20.455.218.800</b>		
	3	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>			<b>20.455.218.800</b>		
27 3	3	2	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</b>	<b>81 Indeks 100 %</b>	<b>3.125.009.000</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU</b>
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	180.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	180.000.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	204.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	84.000.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	120.000.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.046.009.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	400.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	50.000.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	596.009.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	300.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Paket	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	200.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	950.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	300.000.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	650.000.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	445.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit	250.000.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	195.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
27 4	3	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan</b>	<b>850 Ton 0,47 % 4420000 M3/Tahun 1 %</b>	<b>14.660.209.800</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU</b>
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1.709.598.600		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	8 Unit	1.709.598.600	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	560.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	560.000.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407,17 Ha	650.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	200.000.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	250.000.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	200.000.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	100 Ha	9.215.611.200		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0	000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	9.215.611.200	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170,18 Ha	2.375.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0	000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	237500 Ha	375.000.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	1 Dokumen	200.000.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	42 Laporan	1.800.000.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	4500 M3	150.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0	000	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen	150.000.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
275	3	2	0		<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>20000 Ha 20 Kelompok</b>	<b>2.670.000.000</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU</b>	
	3	2	0	1.0	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 Kelompok	2.670.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU	
	3	2	0	1.0	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	5 Orang	450.000.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	370.000.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
	3	2	0	1.0	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1.850.000.000	- Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI KELINJAU
						<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Delta Mahakam</b>		<b>21.635.361.622</b>			
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>		<b>21.635.361.622</b>			
	3	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>		<b>21.635.361.622</b>			
276	3	2	0		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</b>	<b>81 Indeks 100 %</b>	<b>5.697.595.000</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM</b>	
	3	2	0	1.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan Daerah	100 %	200.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM	
	3	2	0	1.0	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	200.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	492.595.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	192.595.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	785.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	65.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket	70.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	600.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	1.300.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket	600.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	700.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.480.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	180.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.300.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	1.440.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	140.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	450.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	850.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
27 7	3	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>2). Produksi Hasil Hutan Kayu</b> <b>1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu</b> <b>4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi</b> <b>3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan</b>	<b>4420000 M3/Tahun</b> <b>850 Ton</b> <b>0,47 %</b> <b>1 %</b>	<b>9.880.000.000</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM</b>
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	2.150.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	60 Unit	2.150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	400.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)					HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	400.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 hektare	200.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	2.200.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	100.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0	000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	100 Ha	2.100.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 Hektar	2.430.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	2 Dokumen	600.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	4 Laporan	1.830.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	5153407 hektare	2.500.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	1 Unit Managemen	2.500.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
27	3	2	0			<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	<b>Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola</b>	<b>610540,98 hektare</b>	<b>100.000.000</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM</b>
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas KBEP yang dikelola	50 hektare	100.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0	000	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	50 Ha	100.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
27	3	2	0			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>20000 Hektar 20 Kelompok</b>	<b>5.957.766.622</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM</b>
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	1 Kelompok	5.957.766.622		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0	000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	30 Orang	750.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
	3	2	0	1.0	000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	5.207.766.622	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DELTA MAHAKAM
						<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Damai</b>			<b>18.569.313.000</b>		
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>18.569.313.000</b>		
	3	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>			<b>18.569.313.000</b>		
28	3	2	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>indeks kualitas layanan kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</b>	<b>81 indeks 100 %</b>	<b>4.953.654.000</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI</b>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	247.920.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	148.800.000	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	99.120.000	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	99.120.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	99.120.000	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	459.750.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	105.750.000	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	354.000.000	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	1.238.474.320		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	11.766.400	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	94.810.920	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	34 Paket	120.819.000	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	50.556.000	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	960.522.000	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	1.024.060.500		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	700.000.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	324.060.500	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.034.493.500		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	13.336.000	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	103.356.000	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	917.801.500	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	849.835.680		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	502.532.000	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	347.303.680	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
281	3	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi 3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi Hasil Hutan Kayu</b>	<b>850 Ton 0,47 % 1 % 4420000 M3/Tahun</b>	<b>9.625.678.280</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI</b>
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	3.220.943.500		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0	000	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	7 Unit	500.000.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	6 Unit	2.720.943.500	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	389.504.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	389.504.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	605.867.500		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	107.997.500	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	4 Dokumen	497.870.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	2.150.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0	000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	115 Ha	1.900.000.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0	000	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	250.000.000	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 hektar	3.059.363.280		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0	000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	554253 Ha	250.000.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	10 Dokumen	1.040.000.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	1.769.363.280	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	Jumlah hasil izin usaha industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas izin 6.000m3 per tahun yang aktif	1 M3	200.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0	000	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan PBPH (Kayu	15 Dokumen	200.000.000	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	dan/atau HHBK) untuk Skala Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi Kewenangan Provinsi				HUTAN PRODUKSI DAMAI
28 2	3	2	0			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>20000 Hektar 20 Kelompok</b>	<b>3.989.980.720</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI</b>
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	4 kelompok	3.989.980.720		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0	000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	20 Orang	702.930.000	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0	000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	659.274.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
	3	2	0	1.0	000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	200 Ha	2.627.776.720	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAMAI
						<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Mook Manor Bulatn</b>			<b>17.814.510.000</b>		
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>17.814.510.000</b>		
	3	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>			<b>17.814.510.000</b>		
28 3	3	2	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</b>	<b>81 indeks 100 %</b>	<b>5.064.142.500</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN</b>
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	578.256.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	139.200.000	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	439.056.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	76.200.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	76.200.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	389.367.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	42.621.000	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	141.504.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	205.242.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	2.026.747.420		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	9.579.100	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	888.866.090	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	84.673.510	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	27.066.720	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.016.562.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	698.200.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	698.200.000	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	861.949.680		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	81.500.000	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	780.449.680	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	433.422.400		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	409.472.400	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 Unit	23.950.000	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
284	3	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi</b> <b>1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu</b> <b>2). Produksi Hasil Hutan Kayu</b> <b>3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan</b>	<b>0,47 %</b> <b>850 Ton</b> <b>4420000 M3/Tahun</b> <b>1 %</b>	<b>10.634.959.500</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN</b>
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	4.133.409.500		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0	000	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	270.000.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	2 Unit	3.633.409.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen	230.000.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	450.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	450.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 Hektar	900.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	1 Dokumen	500.000.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	400.000.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 Hektar	3.378.802.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	250.000.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	120 Ha	3.128.802.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 Hektar	1.772.748.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0	000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	410738.46 Ha	250.000.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	3 Dokumen	340.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	5 Laporan	1.182.748.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
285	3	2	0			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>20000 Hektar 20 Kelompok</b>	<b>2.115.408.000</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN</b>
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	5 Kelompok	2.115.408.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0	000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	4 Orang	196.508.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	5 Kelompok	610.675.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
	3	2	0	1.0	000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1.308.225.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI MOOK MANOR BULATN
						<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Telake</b>			<b>20.102.978.838</b>		
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>20.102.978.838</b>		
	3	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>			<b>20.102.978.838</b>		
286	3	2	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti	81 Indeks 100 %	9.293.574.400		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan Daerah	100 %	355.720.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	148.800.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	206.920.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	93.920.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	93.920.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	276.631.400		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	32.797.400	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	93.920.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang	149.914.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	409.649.806		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10.000.300	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	44.631.800	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	34.517.706	- Kab. Paser, Kuaro, Kuaro - Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	18.580.000	- Kab. Paser, Kuaro, Kuaro - Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	1.920.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.000.000	- Kab. Paser, Kuaro, Kuaro - Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	6.093.274.700		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	494.890.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	295.783.800	- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	1.799.162.500	- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.503.438.400	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.262.322.654		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	167.502.200	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	1.094.820.454	- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	802.055.840		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	213.708.500	- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	20.190.300	- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
											HUTAN PRODUKSI TELAKE	
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	568.157.040		- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
287	3	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan 2). Produksi Hasil Hutan Kayu 1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu 4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi</b>	<b>1 % 4420000 M3/Tahun 850 Ton 0,47 %</b>	<b>9.288.264.938</b>			<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE</b>
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	1.900.933.438			UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lindung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	358.200.000		- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	10 Unit	1.542.733.438		- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	200.744.000			UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	200.744.000		- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5153407 Hektar	691.603.000			UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	2 Dokumen	519.279.000		- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	2 Dokumen	172.324.000		- Kab. Paser, Kuaru, Kuaru - Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi					HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektare	3.876.827.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	2 Dokumen	152.240.000	- Kab. Paser, Kuaro, Kuaro - Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	3.498.467.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	4 Laporan	226.120.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Waru, Waru	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7929179 hektare	2.314.103.500		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	249.964.69 Ha	301.134.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	8 Dokumen	320.600.500	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	1.692.369.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Luas PBPHH Bukan Kayu yang dikelola	18 hektare	304.054.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	000	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	Jumlah Unit Managemen PBPH HHBK Skala Kecil dan Menengah Beroperasi	2 Unit Managemen	304.054.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								
288	3	2	0		<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>20000 hektare 20 kelompok</b>	<b>1.521.139.500</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE</b>	
	3	2	0	1.0	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 Kelompok	1.521.139.500		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE	
	3	2	0	1.0	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	10 Orang	103.574.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	3 Kelompok	150.747.000	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
	3	2	0	1.0	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	2000 Ha	1.266.818.500	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI TELAKE
						<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Balikpapan</b>		<b>23.690.482.525</b>			
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>		<b>23.690.482.525</b>			
	3	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>		<b>23.690.482.525</b>			
289	3	2	0		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</b>	<b>81 Indeks 100 %</b>	<b>5.531.913.742</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN</b>	
	3	2	0	1.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	355.230.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN	
	3	2	0	1.0	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	155.230.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	200.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan	100 %	550.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	200 Paket	200.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	350.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	1.950.000.582		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket	20.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	1.000.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	25.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	25.000.582	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	880.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	500.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	500.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	1.226.683.160		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	263.121.600	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	75.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	873.561.560	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	950.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41 Unit	400.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	100.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	450.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
290	3	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi</b> <b>3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan</b>	<b>0,47 %</b> <b>1 %</b> <b>4420000 M3/Tahun</b> <b>850 Ton</b>	<b>16.902.568.783</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN</b>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							<b>2). Produksi Hasil Hutan Kayu</b> <b>1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu</b>				
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 dokumen	14.107.568.783		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0	000	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	1 Unit	425.500.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	20 Unit	13.682.068.783	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	20 Dokumen	800.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	800.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407,17 hektare	150.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen	150.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektar	254.616.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0	000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	254.616.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.497.170,18 hektare	1.295.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kawasan Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	100000 Ha	498.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12 Dokumen	250.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	12 Laporan	547.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0		Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah SK Pengada dan Pengedar Benih/Bibit terdaftar; Sertifikat Sumber Benih dan Laporan	105 jumlah SK	295.384.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0	000	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar	Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Perorangan dan Badan Usaha Non Perhutani) Kegiatan Usaha Pengadaan dan Pengedaran Benih, Pengadaan dan Pengedaran Bibit, Serta Pengadaan dan Pengedaran Benih dan Bibit Dalam Provinsi	1 Unit Usaha	295.384.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
29 1	3	2	0			<b>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</b>	<b>Luas Kawasan Bernilai Ekosistem Penting dan Konservasi Provinsi yang dikelola</b>	<b>610540,98 hektar</b>	<b>100.000.000</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN</b>
	3	2	0	1.0		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah spesies tumbuhan dan satwa yang dilindungi	1 spesies	100.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0	000	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	1 Laporan	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
29 2	3	2	0			<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>1). Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2). Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>20000 Hektar 20.000 Kelompok</b>	<b>595.000.000</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN</b>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	90 kelompok	595.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0	000	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	2 Kelompok	347.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0	000	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1500 Ha	248.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
29	3	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</b>	<b>1). Luas DAS dan Sub DAS yang dikelola</b>	<b>10.104 hektare</b>	<b>561.000.000</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN</b>
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah DAS yang dikelola	1 DAS	561.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
	3	2	0	1.0	000	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah Dokumen Sinkronisasi dan Koordinasi Optimalisasi DAS	2 Dokumen	561.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BALIKPAPAN
						<b>UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batu Rook</b>			<b>18.215.739.150</b>		
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>18.215.739.150</b>		
	3	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN</b>			<b>18.215.739.150</b>		
29	3	2	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</b>	<b>81 Indeks 100 %</b>	<b>4.123.854.000</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK</b>
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penatausahaan Keuangan	100 %	524.672.600		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	146.760.000	- Kab. Kutai Barat, Melak, Melak Ulu	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	377.912.600	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Pada SKPD yang telah Ditatausahakan	100 %	361.112.600		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	361.112.600	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Kepegawaian	100 %	842.355.800		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	59.564.700	- Kab. Kutai Barat, Melak, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	2 Dokumen	350.851.100	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	431.940.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum	100 %	986.388.275		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.497.600	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	145.860.575	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	48.372.600	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	42.717.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	728.940.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Barang Milik Daerah yang Di adakan	100 %	295.272.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	252.672.000	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	42.600.000	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pelayanan Jasa Kantor	100 %	772.012.471		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	72.910.551	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	699.101.920	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Sarana dan Prasarana Kantor yang Berfungsi Dengan Baik	100 %	342.040.254		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	250.846.174	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	18.680.000	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	72.514.080	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
295	3	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>4). Persentase luas lahan yang direhabilitasi terhadap luas lahan yang dapat di rehabilitasi</b> <b>2). Produksi Hasil Hutan Kayu</b> <b>3). Persentase luas kerusakan kawasan hutan</b> <b>1). Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu</b>	<b>0,47 %</b> <b>4420000 M3/Tahun</b> <b>1 %</b> <b>850 Ton</b>	<b>11.348.236.950</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK</b>
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Tata Hutan yang disusun	1 Dokumen	2.773.436.950		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0	000	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	2 Unit	700.000.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah Sarana Prasarana Operasionalisasi Resor dan Kantor Resor Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Terbangun	30 Unit	2.073.436.950	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	1 Dokumen	800.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	2 Dokumen	800.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	Luas Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	5.153.407 hektar	3.275.800.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	3 Dokumen	2.125.800.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	3 Dokumen	1.150.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas rehabilitasi di luar kawasan hutan negara yang ditanam dan dipelihara	50 hektar	2.500.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen	150.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0	000	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	50 Ha	2.050.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0	000	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	1 Laporan	300.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas Kerusakan Kawasan Hutan	7.929.179 hektar	1.999.000.000		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0	000	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan	Luas Hutan yang Dilakukan Patroli Pengamanan Hutan	1000 Ha	299.000.000	- Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	6 Dokumen	700.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	10 Laporan	1.000.000.000	- Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
296	3	2	0		<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</b>	<b>1) Luas kawasan hutan yang dikelola masyarakat 2) Jumlah kelompok usaha masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya</b>	<b>20000 Hektar 20 Kelompok</b>	<b>2.743.648.200</b>		<b>UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK</b>	
	3	2	0	1.0	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Jumlah kelompok yang mendapatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat	3 kelompok	2.743.648.200		UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK	
	3	2	0	1.0	0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	2 Orang	400.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	4 Kelompok	1.223.648.200	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
	3	2	0	1.0	0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Luas Kawasan yang Disiapkan untuk Perhutanan Sosial	1000 Ha	1.120.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Long Apari, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Long Pahangai, Semua Kel/Desa	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATU ROOK
						<b>Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral</b>			<b>131.097.953.000</b>		
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>131.097.953.000</b>		
	3	2				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>			<b>131.097.953.000</b>		
297	3	2	0		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layananan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</b>	<b>84,20 Indeks 100 %</b>	<b>31.160.500.000</b>		<b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>	
	3	2	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	100 Persen	1.560.000.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	500.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	10.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	20.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	1.000.000.000	- Kab. Berau, Kelay, Long Duhung - Kab. Berau, Kelay, Long Lamcin - Kab. Berau, Sambaliung, Long Lanuk - Kab. Berau, Maratua, Teluk Alulu - Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Menamang Kanan - Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Menamang Kiri - Kab. Kutai Barat, Long Iram, Ujoh Halang - Kab. Kutai Timur, Sandaran, Tadoan - Kab. Kutai Timur, Sandaran, Sandaran - Kab. Paser, Muara Komam, Swan Slutung	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	85 Persen	16.679.500.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/ Bulan	16.000.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	600.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	1.500.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.500.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan	4 Laporan	75.000.000	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Tanjung Redeb - Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			- Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar - Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.500.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 Persen	12.000.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	10.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	54,79 Persen	372.000.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	150.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	1.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40 Orang	220.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Pelayanan Administrasi Kantor yang tercapai	5 Unit	2.772.000.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	30.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	70.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	30.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	25.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	7.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	75.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	2.500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	15.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	15 Unit	130.000.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	65.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	65.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan jasa kegiatan kantor	12 Laporan	5.175.000.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	25.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	250.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	4.900.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	4.460.000.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	350.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	100.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit	10.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	4.000.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
29	3	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN</b>	<b>Persentase zona konservasi air tanah yang terpetakan</b>	<b>45,38 %</b>	<b>3.020.000.000</b>		<b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>
	3	2	0	1.0		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah cekungan air tanah yang dievaluasi	3 CAT	2.895.000.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen	1.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	3 Dokumen	95.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	16 Laporan	1.800.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Data Jumlah Pajak Air Tanah setiap Kabupaten/Kota	1 Dokumen	125.000.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	1 Dokumen	125.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
29	3	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	<b>Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi Yang Tidak Melanggar Perda</b>	<b>100 %</b>	<b>2.750.000.000</b>		<b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
	3	2	0	1.0		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 Peta	750.000.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Berkumpul dan Terolah	1 Dokumen	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	250.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batuan	1 Dokumen	1.000.000.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	40 Laporan	1.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Acuan Mineral Bukan Logam dan Batuan Wilayah Provinsi	1 Dokumen	1.000.000.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Berkumpul dan Terolah	20 Dokumen	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	1 Dokumen	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	20 Laporan	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
300	3	2	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN</b>	<b>Persentase Perusahaan yang menerapkan bauran energi</b> <b>Jumlah reduksi CO2e dari bidang energi</b> <b>Presentase instansi pemerintah daerah yang menerapkan kebijakan bauran energi</b>	<b>33,56 %</b> <b>243246,516 Ton CO2e/Tahun</b> <b>43,76 %</b>	<b>49.004.873.000</b>		<b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>
	3	2	0	1.0		Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Dokumen Kajian dalam rangka Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Dokumen	100.000.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	1 Dokumen	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0		Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan Pengelolaan Penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi	1 Laporan	2.125.000.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa	jumlah dokumen data potensi biomassa	1 Dokumen	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	3 Laporan	300.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas	Jumlah dokumen data potensi biogas	1 Dokumen	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	1 Laporan	1.625.000.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Long Ikis, Semua Kel/Desa - Kab. Paser, Long Kali, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0		Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	1 Laporan	450.000.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	1 Laporan	450.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	1 Laporan	45.679.873.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	2 laporan	50.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan	2.450.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	1 Laporan	200.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT	Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi	1 Unit	5.000.000.000	- Kab. Kutai Barat, Siluq Ngurai, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1 Dokumen	800.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	243 unit	36.879.873.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	001	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	1 Dokumen	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0		Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	150.000.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan dan pemutakhiran data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah dokumen data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Dokumen	50.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	1 Laporan	100.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi					
	3	2	0	1.0		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah dokumen pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	1 Dokumen	300.000.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	10 Unit	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	0003	Perencanaan kegiatan konservasi energi	Jumlah rencana kegiatan konservasi energi	1 Dokumen	100.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.1		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	1 Laporan	200.000.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.1	0002	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	10 laporan	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.1	0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	1 Laporan	50.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
<b>301</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1.0</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN</b>	<b>Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Ketenagalistrikan yang tertangani</b> <b>Pertambahan daya listrik yang bersumber dari EBT</b> <b>Persentase Kelurahan/Desa yang teraliri listrik 24 Jam</b> <b>Persentase Desa yang dibangun PLTS pada Desa belum berlistrik PLN</b>	<b>100 %</b> <b>250 kWp</b> <b>92,97 %</b> <b>34,10 %</b>	<b>45.162.580.000</b>		<b>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>
	3	2	0	1.0		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Operasi (IO)	40 Perusahaan	1.000.000.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	10 Dokumen	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	2	0	1.0	000	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	40 Laporan	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah perusahaan yang mendapat rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)	20 Perusahaan	500.000.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	20 Dokumen	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Data Verifikasi Kategori Masyarakat Tidak Mampu Daerah Terpencil dan Pedesaan Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Dokumen 3 Lokasi	43.662.580.000		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Laporan	1.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1 Laporan	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	3	2	0	1.0	000	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	4 Unit	42.362.580.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
						<b>Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah</b>			<b>95.880.000.000</b>		
	2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>75.380.000.000</b>		
	2	1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>			<b>75.380.000.000</b>		
30 2	2	1	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</b>	<b>88.5 indeks 100 %</b>	<b>64.000.660.000</b>		<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,</b>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yg ditetapkan tepat waktu	29 Dokumen	1.566.945.160		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	731.715.710	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	148.500.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	65.450.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11 Laporan	446.379.450	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	174.900.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	75 Dokumen	17.127.480.000		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan	16.050.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	498.360.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	15.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	265.200.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	173.520.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14 Laporan	75.400.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Administrasi barang milik daerah	18 Dokumen	245.800.000		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	67.200.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 Laporan	15.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	63.600.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	189 orang	2.149.005.000		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	224.800.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	286.335.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	755.950.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	61.200.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen	158.640.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	662.080.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	3.402.630.540		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	75.020.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	171.957.400	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	53.660.000	- Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	314.562.600	- Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	581.125.140	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	23.270.400	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	59.410.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.883.625.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	190.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 paket	31.651.363.400		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	150 Unit	833.435.400	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	5 Unit	205.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	29.801.160.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	119.056.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	92.712.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60 kegiatan	4.829.381.500		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.722.300	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	1.139.400.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3.685.259.200	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	200 Unit	3.028.054.400		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	40.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	437.340.400	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	105 Unit	238.960.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	160 Unit	171.500.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	49.920.000	- Kota Samarinda, Sungai Kunjang, Karang Anyar	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	1.335.600.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	661.438.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha	93.296.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
30	2	1	0			<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi Binaan Provinsi yang Sehat</b>	<b>31 %</b>	<b>1.068.670.000</b>		<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>
	2	1	0	1.0		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Provinsi	54 %	534.335.000		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	25 Unit Usaha	534.335.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Provinsi	20 %	534.335.000		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi					KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	25 Unit Usaha	534.335.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
30	2	1	0			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>	<b>Persentase Koperasi Modern binaan provinsi</b>	<b>34 %</b>	<b>1.965.315.000</b>		<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>
	2	1	0	1.0		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	persentase koperasi provinsi yang mengalami perkembangan usaha	59,65 %	1.965.315.000		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	30 Unit Usaha	384.220.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	30 Unit Usaha	1.581.095.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
30	2	1	0			<b>PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>	<b>Persentase UKM yang Masuk Pasar Digital</b>	<b>5 %</b>	<b>6.998.165.000</b>		<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>
	2	1	0	1.0		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan,	Persentase jumlah usaha kecil yang bermitra	7,5 %	6.998.165.000		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan					KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	115 Unit Usaha	5.598.180.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	150 Orang	549.985.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	3500 Unit Usaha	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	150 Unit Usaha	350.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
30	2	1	0			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>	<b>Jumlah UKM Potensial Ekspor</b>	<b>20 UKM</b>	<b>1.347.190.000</b>		<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>
6	2	1	0	1.0		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	Jumlah UKM yang di fasilitasi	455 UKM	1.347.190.000		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	1	0	1.0	000	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	40 Unit Usaha	862.600.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	2	1	0	1.0	000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	258 Orang	484.590.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>20.500.000.000</b>		
	3	3	0			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>			<b>9.800.000.000</b>		
307	3	3	0			<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu persentase ketaatan pelaku usaha dalam tertib niaga persentase surat rekomendasi yang tepat waktu	100 % 80 % 100 %	406.798.600		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0		Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar	jumlah pelaku usaha yang diawasi yang sesuai ketentuan jumlah rekomendasi yang tepat waktu (%)	9 pelaku usaha 100 %	250.000.000		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0	000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	1 Dokumen	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0	000	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	3 Laporan	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang	Jumlah Eksportir yang Aktif Menggunakan SKA	260 Eksportir	156.798.600		DINAS PERINDUSTRIAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)					PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	3800 Dokumen	156.798.600	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
308	3	3	0			<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>	<b>Persentase Terbentuknya Food Station / Pusat Distribusi Pangan</b>	<b>10 %</b>	<b>500.000.000</b>		<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>
	3	3	0	1.0		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas	jumlah kegiatan fasilitasi pembentukan Food Station	6 kegiatan	500.000.000		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0	000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	5 Unit	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
309	3	3	0			<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING</b>	<b>Disparitas Harga Barang Pokok dan Barang Penting Persentase kinerja realisasi pupuk</b>	<b>16 % 85 %</b>	<b>1.245.000.000</b>		<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>
	3	3	0	1.0		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	persentase laporan harga harian melalui sistem informasi kemendag	100 %	420.000.000		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	3	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	240 Laporan	320.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	48 laporan	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	persentase komoditi bapokting yang di pantau	80 %	575.000.000		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0	000	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan	375.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0	000	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	14 Laporan	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	10 Laporan	250.000.000		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0	000	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	5 Laporan	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	5 Laporan	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
310	3	3	0			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>	<b>Produk Daerah yang masuk pasar ekspor dan atau negara tujuan baru</b>	<b>67 jenis</b>	<b>1.570.000.000</b>		<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>
	3	3	0	1.0		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	jumlah pelaku usaha yang didampingi untuk menjadi eksportir	10 Pelaku Usaha	1.570.000.000		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0	000	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 Pelaku Usaha	700.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0	000	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	4 Pelaku Usaha	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0	000	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pelaku Usaha	260.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0	000	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	20 Produk	410.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											USAHA KECIL MENENGAH
311	3	3	0	6		<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan`</b>	<b>77 %</b>	<b>5.000.000.000</b>		<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>
	3	3	0	1.0		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	jumlah konsumen dan pelaku usaha yang tereduksi	1000 orang	3.669.145.260		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0	000	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	3 BPSK	1.819.145.260	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0	000	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	1 LPKSM	450.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	25 Pengaduan	1.400.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Barang dan Jasa yang Sesuai Ketentuan	5 %	1.330.854.740		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0	000	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani	3 Kasus	1.330.854.740	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											USAHA KECIL MENENGAH
312	3	30	07			<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>	<b>Persentase produk UMKM binaan yang terserap di pasar dalam negeri</b>	<b>75 %</b>	<b>1.078.201.400</b>		<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>
	3	30	07	1.01		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas pengembangan produk	25 %	278.384.300		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	07	1.01	0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	6 UMKM	278.384.300	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	07	1.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang	13.51 %	349.817.100		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	07	1.02	0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	10 UMKM	349.817.100	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	jumlah yang di sosialisasi	800 orang	450.000.000		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	30	07	1.03	0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	7 Laporan	450.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	1			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>			<b>10.700.000.000</b>		
313	3	3	0			<b>PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>	<b>Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas dan Non Batubara</b>	<b>5.20 %</b>	<b>9.520.000.000</b>		<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>
	3	3	0	1.0		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah pelaksanaan rencana pembangunan industri provinsi	5 Dokumen	9.520.000.000		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	2.850.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	120.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	10 Dokumen	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	3	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7 Dokumen	6.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0	000	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0	000	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Laporan	60.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0	000	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Rekomendasi	60.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0	000	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Rekomendasi	80.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
<b>31</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>	<b>Persentase Pengendalian Perijinan Berusaha Sektor Industri</b>	<b>5 %</b>	<b>680.000.000</b>		<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>
<b>4</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1.0</b>		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Presentase jumlah hasil pemantauan	25 %	680.000.000		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								
	3	3	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	480.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0	000	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	-	-	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
315	3	3	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>	<b>Persentase Jumlah Industri yang Terdaftar di SIINas</b>	<b>18.69 %</b>	<b>500.000.000</b>		<b>DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH</b>
	3	3	0	1.0		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUJ, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Informasi Industri yang Tersedia Kewenangan Provinsi Berbasis SIINAS	3 industri	500.000.000		DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0	000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0	000	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 Dokumen	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
	3	3	0	1.0	000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan	2 Dokumen	250.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas				KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
						<b>UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang</b>			<b>4.800.000.000</b>		
	3					<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>			<b>4.800.000.000</b>		
	3	30				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>			<b>4.800.000.000</b>		
316	3	30	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</b> <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>	<b>100 %</b> <b>88.5 indeks</b>	<b>3.002.800.000</b>		<b>UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG</b>
	3	30	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	13 Dokumen	88.540.000		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	13 Dokumen	88.540.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah	5 dokumen	100.000.000		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	20.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	20.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	20.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	30	01	1.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	20.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	3	0	1.0	000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	20.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	3	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	20 Orang	206.000.000		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	3	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	26.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	3	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	180.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	3	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Dokumen	595.414.320		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	3	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	12.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	3	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	43.500.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	3	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	57.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	3	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket	46.581.200	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	3	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.133.120	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	3	0	1.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	19.200.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	3	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	415.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	3	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10 paket	70.000.000		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	3	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	70.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	3	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38 kegiatan	1.690.631.680		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	3	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	3	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	14 Laporan	189.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	3	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.491.631.680	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	3	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	58 Unit	252.214.000		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	3	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	75.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	3	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	135.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	3	3	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	42.214.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
317	3	3	0			<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	<b>Mutu layanan UPTD BPSMB Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku</b>	<b>(A) 82 % 73 %</b>	<b>1.797.200.000</b>		<b>UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG</b>
	3	3	0	1.0		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	jumlah IKM yang mendapatkan pendampingan GMP jumlah keluhan pelanggan jumlah laporan mutu akreditasi persentase capaian penerbitan sertifikat layanan	12 IKM 2 % 11 laporan 100 %	1.797.200.000		UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	3	0	1.0	000	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	2400 Sertifikat	789.100.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	3	0	1.0	000	Pengembangan Layanan Pengujian	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	165 laporan	528.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	3	0	1.0	000	Pemantauan Mutu Produk	Jumlah produk potensial yang dipantau	5 Produk	133.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
	3	3	0	1.0	000	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	1 Sertifikat	347.100.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
						<b>UPTD Pelatihan Koperasi</b>			<b>8.816.634.110</b>		
	2					<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>8.816.634.110</b>		
	2	1				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>			<b>8.816.634.110</b>		
318	2	1	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</b>	<b>88.5 indeks 100 %</b>	<b>3.500.000.000</b>		<b>UPTD PELATIHAN KOPERASI</b>
	2	1	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen administrasi keuangan tiap tahun	13 Dokumen	90.000.000		UPTD PELATIHAN KOPERASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
2	7	1	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	90.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
2	7	1	0	1.0		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	jumlah Dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan perangkat Daerah	5 Dokumen	100.000.000		UPTD PELATIHAN KOPERASI
2	7	1	0	1.0	000	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen	20.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
2	7	1	0	1.0	000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	12 Dokumen	20.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
2	7	1	0	1.0	000	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan	20.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
2	7	1	0	1.0	000	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	12 Dokumen	20.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
2	7	1	0	1.0	000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	20.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
2	7	1	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	"umlah SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	12 orang	145.000.000		UPTD PELATIHAN KOPERASI
2	7	1	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	31 Paket	60.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
2	7	1	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	85.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
2	7	1	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Dokumen	492.000.000		UPTD PELATIHAN KOPERASI
2	7	1	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
2	7	1	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Paket	70.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
2	7	1	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	30.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
2	7	1	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	25.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
2	7	1	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	40.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
2	7	1	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
2	7	1	0	1.0	000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	24 Paket	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
2	7	1	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
2	7	1	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 paket	400.000.000		UPTD PELATIHAN KOPERASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	1	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	150.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	1	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	250.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	1	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Dokumen	1.470.000.000		UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	5.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	220.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	45.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.200.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	1	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	12 Bulan	803.000.000		UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	15.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	30.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	1	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	15 Unit	25.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	1	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	33.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	1	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	450.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
	2	1	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	250.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
319	2	1	0	1.0		<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>	<b>Persentase koperasi dan UKM yang mengikuti pelatihan</b>	<b>2.34 %</b>	<b>5.316.634.110</b>		<b>UPTD PELATIHAN KOPERASI</b>
	2	1	0	1.0		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pelatihan Jumlah UKM yang Mengikuti Pelatihan	210 Koperasi 450 orang	5.316.634.110		UPTD PELATIHAN KOPERASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	2	1	0	1.0	000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	660 Orang	5.316.634.110	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Mahakam Ulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Kutai Barat, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PELATIHAN KOPERASI
						<b>Biro Umum</b>			<b>228.986.724.000</b>		
	4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>228.986.724.000</b>		
	4	0	1			<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			<b>228.986.724.000</b>		
320	4	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Umum</b>	<b>84 Indeks</b>	<b>228.986.724.000</b>		<b>BIRO UMUM</b>
	4	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Dengan Baik	100 %	82.450.665.774		BIRO UMUM
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	373 Orang/ Bulan	80.932.238.274	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.518.427.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	0	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Sekretariat Daerah	100 %	1.165.320.000		BIRO UMUM
	4	0	0	1.0	000	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	522.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	0	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	643.320.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Umum	100 %	3.241.204.800		BIRO UMUM
	4	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	9 Paket	1.021.980.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	0	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	1.331.568.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	125 Orang	887.656.800	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Pada Biro Umum	100 %	35.589.731.747		BIRO UMUM
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	270.249.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	497.466.100	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	385 Paket	15.413.575.197	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
4	0	0	1.0	000	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	14 Paket	733.290.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
4	0	0	1.0	000	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	1.265.361.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
4	0	0	1.0	000	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1920 Laporan	16.937.196.650	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
4	0	0	1.0	001	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	210.828.800	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
4	0	0	1.0	001	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	261.764.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
4	0	0	1.0			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	23.080.078.849		BIRO UMUM
4	0	0	1.0	000	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	20 Unit	8.440.470.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
4	0	0	1.0	000	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20 Unit	7.630.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
4	0	0	1.0	001	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	150 Unit	7.009.608.849	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
4	0	0	1.0			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	26.808.206.440		BIRO UMUM
4	0	0	1.0	000	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	83.700.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
4	0	0	1.0	000	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	9.774.001.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
4	0	0	1.0	000	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.659.168.400	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
4	0	0	1.0	000	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.291.337.040	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
4	0	0	1.0			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	23.989.971.045		BIRO UMUM
4	0	0	1.0	000	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	200 Unit	7.241.459.200	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
4	0	0	1.0	000	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	447 Unit	856.184.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
4	0	0	1.0	000	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit	15.660.077.845	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	0	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	325 Unit	232.250.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	0	0	1.1		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	15.361.172.645		BIRO UMUM
	4	0	0	1.1	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	125.126.116	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	0	0	1.1	000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket	94.738.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	0	0	1.1	000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	435.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	0	0	1.1	000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Orang/ Bulan	14.706.308.529	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	0	0	1.1		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Tersedianya Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 %	17.300.372.700		BIRO UMUM
	4	0	0	1.1	000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	17 Paket	7.534.010.900	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	0	0	1.1	000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	8 Paket	2.640.703.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
	4	0	0	1.1	000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	28 Paket	7.125.658.300	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO UMUM
						<b>Biro Administrasi Pimpinan</b>			<b>18.170.682.000</b>		
	4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>18.170.682.000</b>		
	4	0				<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			<b>18.170.682.000</b>		
321	4	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</b> <b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Administrasi Pimpinan</b>	<b>100 %</b> <b>100 Indeks</b>	<b>18.170.682.000</b>		<b>BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN</b>
	4	0	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	849.152.500		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	0	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	563.940.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	0	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	285.212.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	514.441.000		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	514.441.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	434.507.900		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	0	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	309.668.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	124.839.900	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	1.702.754.287		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	150 Paket	282.099.853	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket	82.882.800	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	12.049.491	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	1.325.722.143	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan	90 %	621.716.450		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha				
	4	0	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	621.716.450	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	1.909.113.700		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.489.220	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.879.624.480	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha	90 %	61.406.550		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	51.019.750	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	10.386.800	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	0	0	1.1		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan, Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi Pimpinan	100 %	9.727.598.013		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	0	0	1.1	000	Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen	558.383.600	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	0	0	1.1	000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan	4.648.067.213	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	0	0	1.1	000	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan	4.521.147.200	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	0	0	1.1		Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Penyiapan Bahan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan	100 %	2.349.991.600		BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	0	0	1.1	000	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	4 Laporan	1.445.160.800	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	0	0	1.1	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Laporan	600.880.800	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
	4	0	0	1.1	000	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	2 Laporan	303.950.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
						<b>Biro Hukum</b>			<b>6.752.178.000</b>		
	4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>6.752.178.000</b>		
	4	0				<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			<b>6.752.178.000</b>		
32 2	4	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan pada Biro Hukum</b>	<b>85 %</b>	<b>1.952.178.000</b>		<b>BIRO HUKUM</b>
	4	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan Keuangan SKPD yang Baik	100 %	103.920.000		BIRO HUKUM
	4	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	103.920.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
	4	0	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	7.680.000		BIRO HUKUM
	4	0	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	7.680.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
	4	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Pada Biro Hukum	100 %	25.000.000		BIRO HUKUM
	4	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	25.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
	4	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	1.034.085.556		BIRO HUKUM
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	129.130.100	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	15 Paket	20.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
	4	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	884.955.456	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	134.693.884		BIRO HUKUM
	4	0	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	134.693.884	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
	4	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Sekretariat Daerah	100 %	626.798.560		BIRO HUKUM
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	621.798.560	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
	4	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	20.000.000		BIRO HUKUM
	4	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	20.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
32	4	0	0			<b>PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM</b>	<b>Persentase rancangan Produk Hukum yang difasilitasi dan bantuan hukum serta Pendokumentasian Produk Hukum</b>	<b>100 %</b>	<b>4.800.000.000</b>		<b>BIRO HUKUM</b>
	4	0	0	1.0		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Persentase penyusunan Produk Hukum Daerah	100 %	2.900.000.000		BIRO HUKUM
	4	0	0	1.0	000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	10 Dokumen	865.284.280	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
	4	0	0	1.0	000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	750 Dokumen	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
	4	0	0	1.0	000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	700 Dokumen	734.715.720	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
	4	0	0	1.0	000	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	350 Dokumen	1.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
	4	0	0	1.0		Fasilitasi Bantuan Hukum	Persentase Penanganan Non Litigasi, HAM dan Litigasi Kepada Unsur Unsur Pemerintah Di Prov. Kaltim Yang Diselesaikan Di Setiap Tingkat Peradilan	100 %	1.900.000.000		BIRO HUKUM
	4	0	0	1.0	000	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	10 Kasus	1.250.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
	4	0	0	1.0	000	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	25 Kasus	650.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO HUKUM
						<b>Biro Organisasi</b>			<b>7.488.046.000</b>		
	4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>7.488.046.000</b>		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	0	1			<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			<b>7.488.046.000</b>		
<b>324</b>	4	0	0	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Organisasi</b>	<b>82 Indeks</b>	<b>2.088.046.000</b>		<b>BIRO ORGANISASI</b>
	4	0	0	1	1.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	100 %	115.440.200		BIRO ORGANISASI
	4	0	0	1	1.0	0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	115.440.200	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	0	0	1	1.0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	10.230.000		BIRO ORGANISASI
	4	0	0	1	1.0	0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	10.230.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	0	0	1	1.0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	100 %	85.217.500		BIRO ORGANISASI
	4	0	0	1	1.0	0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	60.217.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	0	0	1	1.0	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	25.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	0	0	1	1.0	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	1.185.674.800		BIRO ORGANISASI
	4	0	0	1	1.0	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	37.473.800	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	0	0	1	1.0	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	278.350.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	0	0	1	1.0	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	16.500.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	0	0	1	1.0	0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	47.700.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	0	0	1	1.0	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	707.250.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	0	0	1	1.0	0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	98.401.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	0	0	1	1.0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah	100 %	191.559.000		BIRO ORGANISASI
	4	0	0	1	1.0	0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	191.559.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	0	0	1	1.0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	419.330.500		BIRO ORGANISASI
	4	0	0	1	1.0	0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	418.330.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	80.594.000		BIRO ORGANISASI
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	61.812.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	18.782.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
325	4	0	0			<b>PROGRAM PENATAAN ORGANISASI</b>	<b>Jumlah Perangkat Daerah Klaster Utama yang mendapat Nilai AKIP predikat minimal A (Memuaskan) Indeks Kelembagaan Indeks Kematangan Organisasi Persentase Perangkat Daerah Nilai SAKIP nya memperoleh Predikat Minimal BB (SANGAT BAIK) Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat yang nilainya &gt;80 (B)</b>	<b>1 PD 72 Indeks 44 Indeks 40 % 86 %</b>	<b>5.400.000.000</b>		<b>BIRO ORGANISASI</b>
	4	0	0	1.0		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Indeks Kematangan Organisasi Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Penilaian Mandiri Indeks Kelembagaan	100 % 100 %	2.200.000.000		BIRO ORGANISASI
	4	0	0	1.0	000	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	2 Dokumen	750.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	0	0	1.0	000	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	700.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	0	0	1.0	000	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	2 Dokumen	750.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	0	0	1.0		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Laporan Rencana Aksi SAKIP Pertriwulan Persentase Perangkat Daerah yang menyampaikan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100 % 90 %	3.200.000.000		BIRO ORGANISASI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	0	0	1.0	000	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	900.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	0	0	1.0	000	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	3 Dokumen	900.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	0	0	1.0	000	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	1 Laporan	300.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	0	0	1.0	000	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	3 Dokumen	500.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
	4	0	0	1.0	000	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	3 Dokumen	600.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ORGANISASI
						<b>Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>			<b>13.008.264.000</b>		
	4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>13.008.264.000</b>		
	4	0	1			<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			<b>13.008.264.000</b>		
326	4	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	<b>85 %</b>	<b>4.179.414.720</b>		<b>BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>
	4	0	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 %	48.700.000		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	24.350.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	24.350.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	95 %	151.800.000		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen	151.800.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	100 %	79.891.500		BIRO PEMERINTAHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											DAN OTONOMI DAERAH
	4	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	79.891.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	2.530.000.000		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	80.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	50.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	2.400.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Unit pengadaan barang milik Daerah yang terealisasi	100 %	499.690.500		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	0	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	499.690.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	799.832.720		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	442 Laporan	8.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	791.832.720	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik	100 %	69.500.000		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	9.500.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	60.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
327	4	0	0			<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>	<b>Persentase LPPD yang di laporkan Persentase Perumusan Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Persentase Kerja Sama daerah yang difasilitasi</b>	<b>100 % 100 % 100 %</b>	<b>8.828.849.280</b>		<b>BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH</b>
	4	0	0	1.0		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi dibidang Pemerintahan	100 %	2.863.504.480		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	0	0	1.0	000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	3 Dokumen	2.277.983.960	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	0	0	1.0	000	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	3 Dokumen	585.520.520	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	0	0	1.0		Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi di Bidang Pelaksanaan Otonomi Daerah	95 %	3.865.344.800		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	0	0	1.0	000	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	3 Dokumen	800.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	0	0	1.0	000	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	4 Dokumen	2.300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	0	0	1.0	000	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	3 Laporan	765.344.800	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											DAN OTONOMI DAERAH
	4	0	0	1.0		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Usulan kerjasama yang ditindaklanjuti	100 %	2.100.000.000		BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	0	0	1.0	000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30 Dokumen	962.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	0	0	1.0	000	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	20 Dokumen	464.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
	4	0	0	1.0	000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	3 Laporan	674.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
						<b>Biro Kesejahteraan Rakyat</b>			<b>197.117.957.600</b>		
	4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>197.117.957.600</b>		
	4	0				<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			<b>197.117.957.600</b>		
328	4	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>100 Indeks</b>	<b>2.505.746.000</b>		<b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>
	4	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	93 %	321.000.000		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	302.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	19.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu	100 %	37.000.000		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	37.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Administrasi Umum	12 bulan	1.105.266.000		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	150.266.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	57.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	898.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Palaksanaan Jasa Penunjang	12 bulan	922.480.000		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	20.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12.480.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	890.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	120.000.000		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	85.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	35.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
329	4	0	0			<b>PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>Persentase bahan perumusan kebijakan di bidang kesra yang difasilitasi</b> <b>Persentase lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang difasilitasi</b>	<b>100 %</b> <b>100 %</b>	<b>194.612.211.600</b>		<b>BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>
	4	0	0	1.0		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase bahan koordinasi lembaga Bina Spiritual dan Sarana prasarana keagamaan yang disiapkan	100 %	180.155.940.000		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	0	0	1.0	000	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	100 Unit	39.175.540.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	0	0	1.0	000	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	10 Lembaga	140.980.400.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	0	0	1.0		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Persentase penyelesaian bahan rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	100 %	10.017.550.000		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	0	0	1.0	000	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	12 Dokumen	8.617.550.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	0	0	1.0	000	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	12 Dokumen	700.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	0	0	1.0	000	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	12 Dokumen	700.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	0	0	1.0		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase penyelesaian bahan rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	100 %	4.438.721.600		BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	12 Dokumen	1.892.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	12 Dokumen	1.896.721.600	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	12 Dokumen	650.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						<b>Biro Perekonomian</b>			<b>17.441.481.000</b>		
	4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>17.441.481.000</b>		
	4	0	1			<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			<b>17.441.481.000</b>		
<b>330</b>	4	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Perekonomian</b>	<b>81 Indeks</b>	<b>2.495.711.527</b>		<b>BIRO PEREKONOMIAN</b>
	4	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan	95 %	126.054.000		BIRO PEREKONOMIAN
	4	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Dokumen	126.054.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	100 %	70.667.500		BIRO PEREKONOMIAN
	4	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	41 Paket	20.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	0	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	18.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	32.667.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum pada Perangkat Daerah	100 %	1.123.183.362		BIRO PEREKONOMIAN
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	50 Paket	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket	45.300.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	18.016.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen	7.756.800	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	1.002.110.562	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	234.275.200		BIRO PEREKONOMIAN
	4	0	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	36.075.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	0	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	198.200.200	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	842.112.465		BIRO PEREKONOMIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	4.200.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	837.912.465	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik	100 %	99.419.000		BIRO PEREKONOMIAN
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	53.709.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	18.250.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	27.460.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
<b>33</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase Perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian yang difasilitasi Persentase Realisasi Pendapatan Daerah dari Hasil Kebijakan Bidang Perekonomian</b>	<b>100 %</b>	<b>14.945.769.473</b>		<b>BIRO PEREKONOMIAN</b>
	4	0	0	1.0		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Terlaksananya Koordinasi Kebijakan Bidang Ekonomi Makro dan Mikro	100 %	1.595.000.000		BIRO PEREKONOMIAN
	4	0	0	1.0	000	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	2 Dokumen	1.200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	0	0	1.0	000	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	2 Dokumen	395.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	0	0	1.0		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	100 %	11.542.769.473		BIRO PEREKONOMIAN
	4	0	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	6 Dokumen	10.744.369.473	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	0	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	400.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	0	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	2 Dokumen	398.400.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	0	0	1.0		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Terlaksananya Koordinasi Dalam Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	100 %	1.808.000.000		BIRO PEREKONOMIAN
	4	0	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan	10 Dokumen	1.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha				
	4	0	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1 Dokumen	363.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
	4	0	0	1.0	000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1 Dokumen	445.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PEREKONOMIAN
						<b>Biro Administrasi Pembangunan</b>			<b>15.830.000.000</b>		
	4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>15.830.000.000</b>		
	4	0	1			<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			<b>15.830.000.000</b>		
33	4	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Biro Administrasi Pembangunan</b>	<b>85 Indeks</b>	<b>6.310.000.000</b>		<b>BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>
	4	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	260.000.000		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	260.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	145.377.520		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	80.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	1.0	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	15.377.520	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	80 %	3.546.000.000		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	36.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	3.500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Biro Adbang	90 %	570.000.000		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	570.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	1.631.105.480		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	208.359.800	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.420.745.680	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (Biro Administrasi Pembangunan)	85 %	157.517.000		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	11.499.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	126.018.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
333	4	0	0			<b>PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>	<b>Persentase Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah oleh Perangkat Daerah</b>	<b>80 %</b>	<b>9.520.000.000</b>		<b>BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN</b>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	0	0	1.0		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80 %	5.666.000.000		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	1.0	000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	4 Laporan	1.012.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	1.0	000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	4 Laporan	612.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	1.0	000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	6 Laporan	4.042.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	1.0		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	80 %	3.854.000.000		BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	1.0	000	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	1 Dokumen	830.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	1.0	000	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1 Laporan	1.500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4	0	0	1.0	000	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	1 Dokumen	1.524.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
						<b>Biro Pengadaan Barang dan Jasa</b>			<b>18.092.076.500</b>		
	4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>18.092.076.500</b>		
	4	0				<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>			<b>18.092.076.500</b>		
33 4	4	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Biro Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>71 Indeks</b>	<b>10.428.174.600</b>		<b>BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>
	4	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase realisasi anggaran yang dilaksanakan	85 %	3.034.283.000		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	3.033.278.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.005.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase SDM Aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	50 %	322.220.000		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	71.040.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	185.780.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	0	0	1.0	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	65.400.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan	80 %	785.000.000		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	90.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	45.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan	650.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase prasarana kantor yang terpenuhi	85 %	803.845.465		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	0	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit	803.845.465	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningatnya pelayanan Administarsi Umum	80 %	2.422.128.135		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.222.400	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	82.470.700	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.334.435.035	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 %	3.060.698.000		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	13.499.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	13.499.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	3.033.700.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
33	4	0	0			<b>PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>	<b>Persentase transaksi e-purchasing terhadap pengadaan melalui penyedia Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)</b>	<b>30 % 3 Level</b>	<b>7.663.901.900</b>		<b>BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>
	4	0	0	1.0		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Proses yang dilaksanakan	4 Variabel	2.375.962.000		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	0	0	1.0	000	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	517.852.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	879.570.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	0	0	1.0	000	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	978.540.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	0	0	1.0		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Variabel Domian Sistem Informasi yang dilaksanakan	1 Variabel	2.733.982.900		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	0	0	1.0	000	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan	1.284.267.900	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	0	0	1.0	000	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	755.300.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	0	0	1.0	000	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan	694.415.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	0	0	1.0		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Variabel Domain Kelembagaan dan SDM yang dilaksanakan	4 Variabel	2.553.957.000		BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	0	0	1.0	000	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah O+A2922:I2929rang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	250 Orang	894.522.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	0	0	1.0	000	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	971.875.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
	4	0	0	1.0	000	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	687.560.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
						<b>Sekretariat DPRD</b>			<b>355.000.000.000</b>		
	4					<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>355.000.000.000</b>		
	4	0				<b>SEKRETARIAT DPRD</b>			<b>355.000.000.000</b>		
33	4	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks kualitas layanan kesekretariatan</b>	<b>85 Indeks</b>	<b>157.185.405.334</b>		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>
	4	0	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	1.462.737.448		SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	336.828.748	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	261.061.200	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	60.330.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	389.563.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	414.954.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100 %	15.749.846.719		SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	980 Orang/ Bulan	13.675.554.669	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
4	0	0	1.0	000	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.040.204.200	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0	000	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	286.452.250	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0	000	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	376.051.200	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0	000	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	371.584.400	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase barang milik daerah pada perangkat daerah yang dipelihara	100 %	1.105.384.400		SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0	000	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	138.660.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0	000	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	843.124.400	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0	000	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	123.600.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	1.742.467.000		SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0	000	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	300 Unit	66.100.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0	000	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	195.200.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0	000	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen	300.528.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0	000	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	61.050.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0	000	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	326.230.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0	000	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	41 Orang	347.650.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0	001	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	291.575.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0	001	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	154.134.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %	4.822.445.400		SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket	199.735.100	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.289.250.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	1.750.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	296.677.300	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	478.335.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	5.200.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	570.912.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 Dokumen	232.335.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	28.929.375.500		SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	2.908.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4 Unit	2.263.800.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	1.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	70 Unit	5.957.575.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	16.800.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	100 %	20.806.714.800		SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	74.360.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.075.760.800	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	105.120.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	14.551.474.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	9.072.179.300		SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	10 Unit	745.898.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	75 Unit	1.765.034.200	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit	9.750.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1396 Unit	2.548.407.900	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	1.802.822.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	60.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	1.760.267.200	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	180.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.1		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	100 %	54.672.559.567		SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.1	000	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	770 Orang/ Bulan	52.413.607.567	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.1	000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket	1.645.460.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.1	000	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	55 Orang	613.492.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.1		Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD	100 %	18.821.695.200		SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.1	000	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	4 Dokumen	860.155.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.1	000	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan	195.108.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	0	0	1.1	000	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	11.718.312.200	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.1	000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket	6.048.120.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
33 7	4	0	0			<b>PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>	<b>Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Persidangan dan Penyusunan Perundang-undangan</b> <b>Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Penyusunan Anggaran dan Penyelenggaraan Pengawasan</b> <b>Indeks Kepuasan DPRD terhadap layanan Umum dan Keuangan</b> <b>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</b>	<b>83 Indeks</b> <b>83 Indeks</b> <b>83 Indeks</b> <b>100 %</b>	<b>197.814.594.666</b>		<b>SEKRETARIAT DPRD</b>
	4	0	0	1.0		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	100 %	40.981.684.300		SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	5.552.540.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	10 Dokumen	493.859.200	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	3 Dokumen	656.509.100	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3 Dokumen	592.536.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen	271.580.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	66000 Orang	33.414.660.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase rapat pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi	100 %	8.098.774.000		SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1.183.880.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1.183.360.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	2.559.526.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen	2.390.240.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
4	0	0	1.0	000		Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	235.036.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0	000		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	546.732.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase kegiatan pengawasan oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	21.458.819.000		SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0	000		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	3.556.442.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0	000		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	4.676.931.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0	000		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	3.064.131.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0	000		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	3.769.731.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0	000		Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen	411.360.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0	000		Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen	4.139.712.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0	000		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1.840.512.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0			Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota Dewan yang difasilitasi dalam peningkatan kapaitas	100 %	52.105.394.641		SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0	000		Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1 Dokumen	1.146.420.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0	000		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	9 Dokumen	4.411.780.041	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0	000		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	20 Orang	1.040.520.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0	000		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang	520.260.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0	000		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen	33.346.760.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0	000		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen	1.613.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0	000		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	12 Dokumen	10.026.654.600	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0			Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penghimpunan aspirasi masyarakat oleh DPRD yang difasilitasi	100 %	28.446.418.000		SEKRETARIAT DPRD
4	0	0	1.0	000		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	48 Laporan	4.418.400.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	4	0	0	1.0	000	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen	1.010.570.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen	23.017.448.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang difasilitasi	100 %	1.870.919.000		SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen	317.536.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan	1.553.383.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase kerjasama daerah yang dibahas	100 %	1.420.554.000		SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	4 Dokumen	431.686.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 Dokumen	988.868.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase pelaksanaan tugas DPRD yang difasilitasi	100 %	43.432.031.725		SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	28.443.185.525	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan	59.400.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	6 Dokumen	5.670.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	393.743.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
	4	0	0	1.0	000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	4 Dokumen	8.865.703.200	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SEKRETARIAT DPRD
						<b>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			<b>71.541.155.000</b>		
	5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>71.541.155.000</b>		
	5	0	1			<b>PERENCANAAN</b>			<b>71.541.155.000</b>		
338	5	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>	<b>100 % 80 Indeks</b>	<b>39.317.496.900</b>		<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
	5	0	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	97 %	1.499.953.000		BADAN PERENCANAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1.000.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	48.332.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	48.905.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	167.190.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	235.526.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	16.395.921.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan	15.300.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1.060.921.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	10.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	10.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	10.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang diselesaikan tepat waktu	7 Dokumen	275.000.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	15.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	150.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	100.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	10.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100 %	1.875.181.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	700.181.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	50.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	50.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	25.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang	1.000.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang disediakan tepat waktu	96 %	3.075.058.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	22 Paket	100.035.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	182.595.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	100.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	521.219.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	187.368.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	60.116.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	50.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	250.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	123.725.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	3.860.000.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	200.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.500.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit	135.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2.000.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	25.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100 %	7.388.046.000		BADAN PERENCANAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	15.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.612.311.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	5.760.735.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	4.948.337.900		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	107.497.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	833.360.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	272.412.500	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	328.154.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	45.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.770.240.400	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	591.674.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Dadi Mulya	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
339	5	0	0			<b>PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Level Pemerintahan Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah yang Ditindaklanjuti Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Antar Periode Perencanaan</b>	<b>100 % 100 % 100 %</b>	<b>16.085.713.100</b>		<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
	5	0	0	1.0		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen rencana pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	3 Dokumen	6.700.000.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	1.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	590.000.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	750.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Kota, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	4.360.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah analisis data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	115 Data dan Informasi	1.800.000.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	800.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	80 Orang	450.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	40 Orang	400.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi yang Dianalisis	3 Dokumen	7.585.713.100		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	5.205.644.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	1.463.733.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	3 Dokumen	916.336.100	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
<b>340</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	<b>Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Perangkat Daerah Antar Periode Perencanaan Tingkat Kesesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b> <b>100 %</b>	<b>16.137.945.000</b>		<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>
	5	0	0	1.0		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPd, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	4.810.000.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	4 Dokumen	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Laporan	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	10 Laporan	610.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	4 Dokumen	1.100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	600.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	10 Laporan	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPJ, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	7.827.945.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJ)	4 Dokumen	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	180.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9 Laporan	315.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	4 Laporan	1.010.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	400.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	130.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	201.790.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	5 Laporan	5.091.155.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase keselarasan program/kegiatan lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan dalam dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, RENSTRA & RENJA PD)	100 %	3.500.000.000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	1.100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	1.100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	800.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
						<b>Badan Pendapatan Daerah</b>			<b>264.418.320.000</b>		
	5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>264.418.320.000</b>		
	5	0				<b>KEUANGAN</b>			<b>264.418.320.000</b>		
341	5	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indek kualitas layanan Kesekretariatan Persentase Realisasi Retribusi Daerah</b>	<b>75 Indek 100 Persen</b>	<b>248.947.960.700</b>		<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>
	5	0	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	799.012.500		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	220.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	128.645.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	17.545.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	314.985.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	117.837.500	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	164.388.444.410		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	309 Orang/ Bulan	163.645.404.520	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	415 Dokumen	515.520.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	70.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	19 Laporan	157.519.890	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	100 Persen	304.964.000		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	10 Dokumen	175.164.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 Laporan	129.800.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan retribusi daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan retribusi daerah Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	7 Dokumen 3 Dokumen 14,08 Milyar Rupiah	2.074.616.500		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen	464.244.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Dokumen	372.212.500	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Laporan	465.740.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	3 Laporan	281.820.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	3 Dokumen	254.100.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	236.500.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	1.792.348.800		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	563.200.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen	207.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	10 Dokumen	300.548.800	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	360.800.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	360.800.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	8.083.004.500		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	110.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1.100.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4.476.884.500	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	21.120.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	63 Laporan	2.200.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	175.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	59.117.339.000		BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	500.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	375.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	197 Unit	4.950.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	49.522.339.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	3.770.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	10.365.133.790		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.870.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	8.484.133.790	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	2.023.097.200		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	416.891.200	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	150 Unit	756.206.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	850.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
34 2	5	0 2	0 2			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	Persentase Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Persentase tercapainya target dana perimbangan dan dana transfer lainnya Persentase Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah Persentase Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen	1.485.000.000		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0 2	0 2	1.0 3		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Realisasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jumlah Realisasi Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	244,444 Milyar Rupiah 951,308 Milyar Rupiah 13,861 Milyar Rupiah	385.000.000		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0 2	0 2	1.0 3	000 5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	4 Dokumen	385.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0 2	0 2	1.0 5		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah realisasi Penerimaan Transfer	7,048 Triliun Rupiah	1.100.000.000		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0 2	0 2	1.0 5	001 0	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan	1.100.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
34 3	5	0 2	0 4			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase tercapainya target Pajak Daerah</b> <b>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</b>	100 Persen 100 Persen	13.985.359.300		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0 2	0 4	1.0 1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen pengendalian, evaluasi, pengawasan dan pembinaan serta penyuluhan dan penyebarluasan pajak daerah Jumlah dokumen perencanaan pendapatan pajak daerah Jumlah Pelayanan berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM Jumlah realisasi Pajak Daerah Jumlah sistem elektronifikasi yang dikembangkan dan dibuat	22 Dokumen 3 Dokumen 2 Predikat 8,3 Triliun Rupiah 2 Aplikasi	13.985.359.300		BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0 2	0 4	1.0 1	000 1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	746.577.700	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	719.070.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	9 Laporan	575.740.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	13 Laporan	880.305.800	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	3 Dokumen Ketetapan	1.100.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	2 Laporan	7.400.800.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4 Dokumen	271.700.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	4 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	163.240.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	9 Laporan	925.760.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan	321.860.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	20 Laporan	880.305.800	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Air Putih	BADAN PENDAPATAN DAERAH
						<b>UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Samarinda</b>			<b>8.969.793.000</b>		
	5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>8.798.509.250</b>		
	5	0				<b>KEUANGAN</b>			<b>8.798.509.250</b>		
344	5	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda)</b>	<b>75 Indek 100 Persen</b>	<b>8.130.131.650</b>		<b>UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA</b>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	58.080.608		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	58.080.608	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	85 Persen	100.680.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	95 Dokumen	100.680.000	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	0	0	1.0		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	69.484.800		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	0	0	1.0	000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	19.958.400	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	0	0	1.0	000	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	19.958.400	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	0	0	1.0	000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	29.568.000	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	29.040.000		UPTD PENDAPATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	29.040.000	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	612.343.424		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.610.460	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	282.362.740	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	57.372.304	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.133.120	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	262.864.800	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	484.540.760		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV.

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KALTIM DI SAMARINDA
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	104.729.700	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	379.811.060	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	6.450.870.258		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.300.000	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.112.829.630	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5.334.740.628	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	325.091.800		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	150.000.280	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	175.091.520	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
34	5	0	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Samarinda (UPTD PPRD Samarinda)</b> <b>Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda</b>	<b>100 Persen</b> <b>100 Persen</b>	<b>668.377.600</b>		<b>UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA</b>
	5	0	0	1.0		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Samarinda	undefined undefined	668.377.600		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	0	0	1.0	000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	167.590.000	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	0	0	1.0	000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	184.706.400	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	5	0	0	1.0	001	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	84 Dokumen SSPD	316.081.200	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
	X					<b>NON URUSAN</b>			<b>171.283.750</b>		
	X	X	X			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>			<b>171.283.750</b>		
34	X	X	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Samarinda)</b> <b>Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Samarinda)</b>	<b>75 Indek</b> <b>100 Persen</b>	<b>171.283.750</b>		<b>UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA</b>
	X	X	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	171.283.750		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV.

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KALTIM DI SAMARINDA
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	171.283.750	- Kota Samarinda, Samarinda Utara, Sempaja Selatan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI SAMARINDA
						<b>UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Kartanegara</b>			<b>7.611.884.000</b>		
	5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>7.611.884.000</b>		
	5	0				<b>KEUANGAN</b>			<b>7.611.884.000</b>		
347	5	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kukar) Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kukar)</b>	<b>100 Persen 75 Indek</b>	<b>7.023.116.040</b>		<b>UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA</b>
	5	0	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	23.100.974		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	23.100.974	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	100.920.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	73 Dokumen	100.920.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	0	0	1.0		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	76.560.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV.

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	0	0	1.0	000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	28.380.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	0	0	1.0	000	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	19.140.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	0	0	1.0	000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	29.040.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	38.280.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	38.280.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	937.115.850		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.657.200	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	613.001.620	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	27.305.190	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.266.240	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan	285.885.600	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	231.462.550		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	70.631.660	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	160.830.890	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	4.981.178.406		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.780.910	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.174.925.620	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	3.803.471.876	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	634.498.260		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	432.012.680	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61 Unit	92.012.580	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	110.473.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
348	5	0	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kukar (UPTD PPRD Kukar)</b> <b>Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar</b>	<b>100 Persen</b> <b>100 Persen</b>	<b>588.767.960</b>		<b>UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA</b>
	5	0	0	1.0		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kukar	422,078 Milyar Rupiah	588.767.960		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	0	0	1.0	000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	174.405.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV.

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	0	0	1.0	000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	62.700.000	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
	5	0	0	1.0	001	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	75 Dokumen SSPD	351.662.960	- Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI KARTANEGARA
						<b>UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Timur</b>			<b>4.610.993.000</b>		
	5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>4.610.993.000</b>		
	5	0				<b>KEUANGAN</b>			<b>4.610.993.000</b>		
349	5	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kutim) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kutim)</b>	<b>75 Indek 100 Persen</b>	<b>4.347.158.000</b>		<b>UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR</b>
	5	0	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	45.650.086		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	45.650.086	- Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	89.760.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	62 Dokumen	89.760.000	- Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV.

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	0	0	1.0		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	170.236.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	0	0	1.0	000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	66.440.000	- Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	0	0	1.0	000	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	50.996.000	- Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	0	0	1.0	000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	52.800.000	- Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	48.180.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	48.180.000	- Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	473.140.250		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.304.500	- Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	159.183.750	- Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	34.854.600	- Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	11.021.120	- Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23 Laporan	243.776.280	- Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	undefined undefined	413.222.150		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	107.876.560	- Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	305.345.590	- Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	2.492.434.824		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.500.000	- Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	806.570.160	- Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.680.364.664	- Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	614.534.690		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	308.542.850	- Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	54 Unit	139.616.840	- Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	166.375.000	- Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
350	5	0	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Kutim (UPTD PPRD Kutim)</b> <b>Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim</b>	<b>100 Persen</b> <b>100 Persen</b>	<b>263.835.000</b>		<b>UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR</b>
	5	0	0	1.0		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kutim	302,437 Milyar Rupiah	263.835.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV.

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	0	0	1.0	000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	147.015.000	- Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	0	0	1.0	000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	36.025.000	- Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
	5	0	0	1.0	001	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	271 Dokumen SSPD	80.795.000	- Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Teluk Lingga	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI TIMUR
						<b>UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Kutai Barat</b>			<b>4.764.541.000</b>		
	5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>4.764.541.000</b>		
	5	0				<b>KEUANGAN</b>			<b>4.764.541.000</b>		
35 1	5	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Kubar) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Kubar)</b>	<b>75 Indek 100 Persen</b>	<b>4.297.274.200</b>		<b>UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT</b>
	5	0	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	33.440.865		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	33.440.865	- Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	89.760.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV.

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	92 Dokumen	89.760.000	- Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	0	0	1.0		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	100 Persen	89.760.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	0	0	1.0	000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	41.580.000	- Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	0	0	1.0	000	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	19.800.000	- Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	0	0	1.0	000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	28.380.000	- Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	46.200.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	46.200.000	- Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	475.351.360		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.600.000	- Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	165.946.000	- Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.242.990	- Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.910.720	- Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19 Laporan	276.651.650	- Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	247.148.300		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	74.699.000	- Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	172.449.300	- Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	2.815.941.219		UPTD PENDAPATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.500.000	- Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	633.546.763	- Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	2.176.894.456	- Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	499.672.456		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	252.999.656	- Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	57 Unit	81.895.000	- Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	164.777.800	- Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
35 2	5	0	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar</b> <b>Persentase keluhan pengguna layanan yang</b>	<b>100 Persen</b> <b>100 Persen</b>	<b>467.266.800</b>		<b>UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV.</b>

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
						<b>ditindaklanjuti di Wilayah Kubar (UPTD PPRD Kubar)</b>				<b>KALTIM DI KUTAI BARAT</b>	
	5	0	0	1.0		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Kubar	120,931 Milyar Rupiah	467.266.800		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	0	0	1.0	000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	192.368.000	- Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	0	0	1.0	000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	82.412.000	- Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
	5	0	0	1.0	001	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	760 Dokumen SSPD	192.486.800	- Kab. Kutai Barat, Barong Tongkok, Sendawar	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI KUTAI BARAT
						<b>UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Balikpapan</b>			<b>7.315.790.000</b>		
	5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>7.315.790.000</b>		
	5	0				<b>KEUANGAN</b>			<b>7.315.790.000</b>		
35	5	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Balikpapan)</b> <b>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Balikpapan)</b>	<b>100 Persen</b> <b>75 Indek</b>	<b>6.963.163.000</b>		<b>UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN</b>
	5	0	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	19.672.204		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	19.672.204	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV.

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	100 Persen	111.120.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	86 Dokumen	111.120.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	0	0	1.0		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	100 Persen	45.540.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	0	0	1.0	000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	25.740.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	0	0	1.0	000	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	10.560.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	0	0	1.0	000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	9.240.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	22.440.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	22.440.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	736.709.820		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.440.500	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	191.151.620	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.102.500	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	11.000.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	508.015.200	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	494.932.020		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	55.000.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	439.932.020	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD PENDAPATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	4.475.934.736		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.650.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.313.239.400	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	3.161.045.336	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	1.056.814.220		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	485.023.220	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	114 Unit	132.561.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	439.230.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV.

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
										KALTIM DI BALIKPAPAN	
354	5	02	04		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan</b> <b>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Balikpapan (UPTD PPRD Balikpapan)</b>	<b>100 Persen</b> <b>100 Persen</b>	<b>352.627.000</b>		<b>UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN</b>	
	5	02	04	1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Balikpapan	100 Persen	352.627.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN	
	5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	42.867.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	82.830.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
	5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	103 Dokumen SSPD	226.930.000	- Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BALIKPAPAN
					<b>UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Bontang</b>			<b>4.426.852.000</b>			
	5				<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>654.280.000</b>			
	5	02			<b>KEUANGAN</b>			<b>654.280.000</b>			
355	5	02	01		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang)</b> <b>Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang)</b>	<b>75 Indek</b> <b>100 Persen</b>	<b>147.000.000</b>		<b>UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG</b>	
	5	02	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	98.400.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV.	

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KALTIM DI BONTANG
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41 Dokumen	98.400.000	- Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	48.600.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	48.600.000	- Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
35	5	0	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Bontang (UPTD PPRD Bontang)</b> <b>Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang</b>	<b>100 Persen</b> <b>75 Indek</b>	<b>507.280.000</b>		<b>UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG</b>
	5	0	0	1.0		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Bontang	100 Persen	507.280.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	0	0	1.0	000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	9 Laporan	91.580.000	- Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	0	0	1.0	000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	6 Laporan	197.640.000	- Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	5	0	0	1.0	001	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	2000 Dokumen SSPD	218.060.000	- Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	X					<b>NON URUSAN</b>			<b>3.772.572.000</b>		
	X	X				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>			<b>3.772.572.000</b>		
357	X	X	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Bontang) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Bontang)	75 Indeks 100 Persen	3.772.572.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	X	X	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	26.472.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	X	X	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	26.472.000	- Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	X	X	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	45.208.800		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	X	X	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	5 Dokumen	16.900.000	- Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	X	X	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	5 Laporan	9.764.000	- Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	X	X	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	5 Laporan	18.544.800	- Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	X	X	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	864.122.595		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV.

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	X	X	0	1.0	000						KALTIM DI BONTANG
	X	X	1	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.244.000	- Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	343.242.545	- Kota Bontang, Bontang Utara, Lok Tuan	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24.469.650	- Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.878.400	- Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	X	X	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	486.288.000	- Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	X	X	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	229.108.189		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	X	X	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	23.013.945	- Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	X	X	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	206.094.244	- Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	X	X	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	2.118.092.416		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	- Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	326.425.376	- Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.788.667.040	- Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	X	X	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	489.568.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	272.378.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	X	X	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58 Unit	42.600.000	- Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
	X	X	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	174.590.000	- Kota Bontang, Bontang Utara, Gunung Elai	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BONTANG
						<b>UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Penajam Paser Utara</b>			<b>4.406.423.000</b>		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			684.017.800		
	5	0				KEUANGAN			684.017.800		
35	5	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU)	75 Indeks 100 Persen	156.900.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	100.800.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75 Dokumen	100.800.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	56.100.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 Orang	56.100.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
35	5	0	0			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah PPU (UPTD PPRD PPU)	100 Persen 100 Persen	527.117.800		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	0	0	1.0		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Penajam	100 Persen	527.117.800		UPTD PENDAPATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	0	0	1.0	000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	122.320.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	0	0	1.0	000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	121.190.800	- Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	5	0	0	1.0	001	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggahnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	1272 Dokumen SSPD	283.607.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	X					<b>NON URUSAN</b>			<b>3.722.405.200</b>		
	X	X	X			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>			<b>3.722.405.200</b>		
360	X	X	X	0	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD PPU)</b> <b>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD PPU)</b>	<b>100 Persen</b> <b>75 Indek</b>	<b>3.722.405.200</b>		<b>UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA</b>
	X	X	X	0	1.0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	28.512.827		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	X	X	X	0	1.0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	28.512.827	- Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PENAJAM PASER UTARA
	X	X	0	1.0		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	42.372.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	X	X	0	1.0	000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	14.124.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	X	X	0	1.0	000	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	14.124.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	X	X	0	1.0	000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	14.124.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	X	X	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	788.118.043		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.786.870	- Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	370.895.633	- Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.441.300	- Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	PENAJAM PASER UTARA
	X	X	1	6	5						UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	4.266.240	- Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	X	X	1	6	6						UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	X	X	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	376.728.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	X	X	1	6	9						UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	X	X	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	76.802.440		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	X	X	1	7							UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	X	X	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	6.022.060	- Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	X	X	1	7	5						UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	X	X	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	70.780.380	- Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	X	X	1	7	6						UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	X	X	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	2.276.070.200		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI
	X	X	1	8							UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	10.367.500	- Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	PENAJAM PASER UTARA
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	434.047.153	- Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.831.655.547	- Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	X	X	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	510.529.690		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	246.723.180	- Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	X	X	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	66.180.510	- Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PENAJAM PASER UTARA
	X	X	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	197.626.000	- Kab. Penajam Paser Utara, Penajam, Nenang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PENAJAM PASER UTARA
						<b>UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Paser</b>			<b>4.506.687.000</b>		
	5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>728.482.000</b>		
	5	0				<b>KEUANGAN</b>			<b>728.482.000</b>		
36	5	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser) Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser)</b>	<b>75 Indeks 100 Persen</b>	<b>155.580.000</b>		<b>UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER</b>
	5	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	100.800.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	72 Dokumen	100.800.000	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	0	0	1.0		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	100 Persen	9.240.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	0	0	1.0	000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	9.240.000	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	45.540.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	45.540.000	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
36	5	0	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Paser (UPTD PPRD Paser)</b>	<b>75 Indeks 100 Persen</b>	<b>572.902.000</b>		<b>UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER</b>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Paser	172,533 Milyar Rupiah	572.902.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	0	0	1.0	000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	181.260.000	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	0	0	1.0	000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	104.265.000	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	5	0	0	1.0	001	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	106 Dokumen SSPD	287.377.000	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	X					<b>NON URUSAN</b>			<b>3.778.205.000</b>		
	X	X	X			<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>			<b>3.778.205.000</b>		
363	X	X	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Paser)</b> <b>Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Paser)</b>	<b>75 Indeks</b> <b>100 Persen</b>	<b>3.778.205.000</b>		<b>UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER</b>
	X	X	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	22.880.882		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	X	X	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	22.880.882	- Kab. Paser, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	X	X	0	1.0		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	100 Persen	18.480.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	X	X	0	1.0	000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	9.240.000	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	X	X	0	1.0	000	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	9.240.000	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	X	X	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	985.619.800		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	17.821.100	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	331.123.980	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	113.919.080	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	2.279.640	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	X	X	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	520.476.000	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	X	X	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	77.657.250		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	X	X	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	22.657.250	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	X	X	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	55.000.000	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	X	X	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	2.210.458.048		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.456.880	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	666.144.380	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.538.856.788	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	X	X	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	463.109.020		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	181.300.790	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	X	X	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	112 Unit	67.308.230	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
	X	X	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	214.500.000	- Kab. Paser, Tanah Grogot, Tanah Grogot	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI PASER
						<b>UPTD Pendapatan Daerah Prov. Kaltim di Berau</b>			<b>4.572.708.000</b>		
	5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>739.231.200</b>		
	5	0	2			<b>KEUANGAN</b>			<b>739.231.200</b>		
364	5	0	0	1		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau)</b> <b>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)</b>	<b>100 Persen</b> <b>75 Indek</b>	<b>271.740.000</b>		<b>UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU</b>
	5	0	0	1.0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	90.240.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	116 Dokumen	90.240.000	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	100 Persen	44.000.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	44.000.000	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	137.500.000		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	137.500.000	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
36 5	5	0	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Persentase tercapainya target penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti di Wilayah Berau (UPTD PPRD Berau)</b>	<b>75 Indek 100 Persen</b>	<b>467.491.200</b>		<b>UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU</b>
	5	0	0	1.0		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan AP Wil. Berau	170,154 Milyar Rupiah	467.491.200		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	0	0	1.0	000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	192.500.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	0	0	1.0	000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan	82.500.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	5	0	0	1.0	001	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertangguhnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	598 Dokumen SSPD	192.491.200	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	X					<b>NON URUSAN</b>			<b>3.833.476.800</b>		
	X	X				<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>			<b>3.833.476.800</b>		
366	X	X	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks kualitas layanan kesekretariatan (UPTD PPRD Berau)</b> <b>Persentase Realisasi Retribusi Daerah (UPTD PPRD Berau)</b>	<b>75 Indeks</b> <b>100 Persen</b>	<b>3.833.476.800</b>		<b>UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU</b>
	X	X	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang diselesaikan tepat waktu	100 Persen	45.620.050		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	X	X	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	45.620.050	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	X	X	0	1.0		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah realisasi penerimaan retribusi daerah	14,08 Milyar Rupiah	109.982.400		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	X	X	0	1.0	000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	1 Dokumen	43.989.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	X	X	0	1.0	000	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	4 Laporan	32.993.400	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	X	X	0	1.0	000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	33.000.000	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	X	X	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase sarana prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 Persen	431.752.640		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.597.800	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gunung Panjang	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	90.548.480	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	3.732.960	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	X	X	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	330.873.400	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	X	X	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 Persen	512.679.420		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	X	X	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	77.077.660	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	X	X	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	435.601.760	- Kab. Berau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	X	X	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 Persen	2.174.609.510		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	17.590.760	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	359.878.310	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	1.797.140.440	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	X	X	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan berfungsi dengan baik	100 Persen	558.832.780		UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi								
	X	X	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	195.405.980	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	X	X	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	96 Unit	82.478.000	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
	X	X	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	280.948.800	- Kab. Berau, Tanjung Redeb, Gayam	UPTD PENDAPATAN DAERAH PROV. KALTIM DI BERAU
						<b>Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>			<b>6.941.021.945.655</b>		
	5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>6.941.021.945.655</b>		
	5	0	2			<b>KEUANGAN</b>			<b>6.941.021.945.655</b>		
367	5	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti</b>	<b>82 Indeks 100% %</b>	<b>70.756.985.354</b>		<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>
	5	0	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	880.357.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	303.572.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	91.071.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	39.030.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	95.408.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	47.704.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	151.786.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	151.786.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi Keuangan	100 %	37.286.006.354		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/ Bulan	34.724.398.354	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	400 Dokumen	2.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400 Dokumen	242.858.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	52.041.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	65.051.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	121.429.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	47.704.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	32.525.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Administrasi BMD pada SKPD	100 %	433.675.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	433.675.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Keselarasan Dokumen Administrasi Kepegawaian	85 %	910.716.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	130.102.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	65.051.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	140 Orang	585.461.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140 Orang	130.102.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tingkat Pelayanan Administrasi Umum di Lingkup BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	100 %	5.182.417.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	108.418.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.301.026.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	1.301.026.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	216.837.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan	303.572.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	867.350.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	1.084.188.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat Penyediaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	1.227.555.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	793.880.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	433.675.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	12.260.204.000		BADAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	43.367.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	216.837.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya BMD di Lingkungan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur	100 %	12.576.055.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	86.735.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	650.513.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	433.675.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	11.405.132.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
368	5	0	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Perda dan Pergub tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang ditetapkan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>6.864.125.911.301</b>		<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pedoman Kebijakan Keuangan Daerah	100 %	5.703.583.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	86.735.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	108.418.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	585.461.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	433.675.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	69.388.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	37 Dokumen	69.388.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2.143.112.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	95.408.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen	117.092.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	001	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	1.951.539.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	74 Orang	43.367.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Keselarasan Dokumen Rancangan Perda dan Perkada	100 %	520.409.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	20 Laporan	130.102.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	20 Laporan	130.102.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Laporan	173.470.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	3 Laporan	86.735.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Tingkat Keselarasan Laporan Perbendaharaan Daerah	100 %	3.927.306.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	138.776.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan	34.694.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	460 Dokumen	43.367.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	43.367.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	16 Dokumen	1.137.248.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	281.889.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12 Laporan	842.094.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	12 Dokumen	151.786.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta	12000 Dokumen	581.889.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	346.940.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang	325.256.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 %	3.840.569.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	4 Laporan	95.408.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	84 Dokumen	1.517.350.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	13 Laporan	60.714.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	48 Laporan	95.408.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	106 Dokumen	433.675.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	000	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	6 Dokumen	173.470.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	576 Dokumen	117.092.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	108.418.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	86.735.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	480 Orang	913.778.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	6 Lembaga	238.521.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	90 %	6.849.440.164.301		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	2 Laporan	91.071.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	10 Laporan	1.386.874.009.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	21 Laporan	669.575.084.301	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	16 Laporan	4.792.900.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Tingkat Keselarasan Sistem Informasi Bidang Keuangan Daerah	100 %	693.880.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	3 Dokumen	693.880.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
36 9	5	0	0			<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Persentase keseluruhan target temuan BPK s/d LKPD sebelumnya (t-1) yang ditindaklanjuti dan dinyatakan sesuai pada tahun ini (t-0)</b>	<b>40 %</b>	<b>6.139.049.000</b>		<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>
	5	0	0	1.0		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tingkat Keselarasan Antar Data Pengelolaan BMD	40 %	6.139.049.000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	368.624.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	65.051.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	86.735.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	303.572.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	346.940.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	216.837.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	2 Laporan	1.701.026.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3 Laporan	783.675.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	65.051.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	20 Dokumen	1.301.026.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	8 Laporan	260.205.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	336.735.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Orang	303.572.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						<b>Badan Kepegawaian Daerah</b>			<b>48.673.486.952</b>		
	5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>48.673.486.952</b>		
	5	0	3			<b>KEPEGAWAIAN</b>			<b>48.673.486.952</b>		
370	5	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks kepuasan layanan sekretariat Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti</b>	<b>85 Indeks 100 %</b>	<b>23.650.096.152</b>		<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>
	5	0	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	576.100.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	20.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	16.100.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	410.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	30.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	97% Orang	15.362.322.592		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/ Bulan	14.700.082.592	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	612.240.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	50.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	90 %	10.000.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	10.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	81% Orang	718.989.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	658.989.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	17 Orang	60.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	2.607.228.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket	1.270.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	30.994.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	1.306.234.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	2.684.456.560		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	22.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	988.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.674.456.560	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	90 %	1.691.000.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	391.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1.300.000.000	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
371	5	0	0			<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Indeks NSPK Manajemen ASN</b>	<b>90 Indeks</b>	<b>25.023.390.800</b>		<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH</b>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Kebutuhan ASN	85 %	5.107.500.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2 Dokumen	710.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	590.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	490.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	2.700.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	67.500.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	550.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan	85 %	1.633.667.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	2 Dokumen	530.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Laporan	356.674.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen	746.993.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memiliki kompetensi sesuai standar	40 %	6.941.119.800		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1 Dokumen	800.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	4 Dokumen	5.565.291.800	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	001	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	1 Laporan	228.150.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1 Dokumen	347.678.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang berkinerja baik	90 %	11.341.104.000		BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	130 Orang	10.311.104.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	350 Orang	190.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	1 Orang	320.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	120.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
						<b>UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai</b>			<b>7.197.000.000</b>		
	5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>7.197.000.000</b>		
	5	0				<b>KEPEGAWAIAN</b>			<b>7.197.000.000</b>		
37 2	5	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks kepuasan layanan kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang Ditindaklanjuti</b>	<b>85 Indeks 100 %</b>	<b>5.897.000.000</b>		<b>UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI</b>
	5	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat kompetensi	70% Orang	61.938.800		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	36.438.800	- Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Gunung Kelua	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	25.500.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	100 %	1.388.561.200		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	663.561.200	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	125.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	600.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan BMD	100 %	2.000.000.000		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5	0	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	2.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan jasa penunjang tepat waktu	100 %	1.181.000.000		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	321.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	857.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	95 %	1.265.500.000		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	65.500.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.200.000.000	- Kota Samarinda, Sungai Pinang, Sungai Pinang Dalam	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
373	5	0	0			<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Indeks NSPK Manajemen ASN</b>	<b>90 Indeks</b>	<b>1.300.000.000</b>		<b>UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI</b>
	5	0	0	1.0		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang telah dinilai kompetensinya	9 %	1.300.000.000		UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
	5	0	0	1.0	000	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen	1.300.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI
						<b>Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia</b>			<b>66.550.000.000</b>		
	5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>66.550.000.000</b>		
	5	0				<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>			<b>66.550.000.000</b>		
374	5	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b> <b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</b>	<b>88 Persen</b> <b>86 Persen</b>	<b>40.050.000.000</b>		<b>BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>
	5	0	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	82 Persen	1.040.040.000		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	650.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	125.040.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	265.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran	80 Persen	14.977.030.000		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 Orang/ Bulan	14.500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	432.850.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	44.180.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang berfungsi dengan baik	80 Persen	6.310.000		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	6.310.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Retribusi Daerah	80 Persen	45.210.000		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	45.210.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	80 Persen	707.553.800		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	89 Paket	200.839.800	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	506.714.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Sarana Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	80 Persen	2.170.825.300		BADAN PENGEMBANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	60.005.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	75.560.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket	316.505.800	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	24.040.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	1.536.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	8.774.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	149.940.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	80 Persen	3.813.426.200		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	120 Paket	1.467.394.300	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	55 Unit	2.346.031.900	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Tepat Waktu	80 Persen	3.522.584.890		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.709.200	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1.527.654.690	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.988.221.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang digunakan dan berfungsi baik	85 Persen	13.767.019.810		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	59.769.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	127.981.600	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	400.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	2.083.200.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	49 Unit	11.096.069.210	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
37 5	5	0	0			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti Pengembangan Kompetensi</b>	<b>86 Persen</b>	<b>26.500.000.000</b>		<b>BADAN PENGEMBANGAN</b>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											<b>SUMBER DAYA MANUSIA</b>
	5	0	0	1.0		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	87 Persen	7.950.000.000		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1490 Orang	7.950.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase SDM/Aparatur yang bersertifikasi Kompetensi Persentase SDM/Aparatur yang mengikuti perkembangan kompetensi Kepemimpinan/Pemerintahan, Daerah, Manajerial dan Fungsional	86 Persen 86 Persen	18.550.000.000		BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	000	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	5 Dokumen	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	000	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	3 Dokumen	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	130 Orang	900.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	000	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	53 Laporan	3.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	20 Dokumen	350.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											SUMBER DAYA MANUSIA
	5	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	7153 Orang	13.700.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
						<b>Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah</b>			<b>31.000.000.000</b>		
	5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>31.000.000.000</b>		
	5	0				<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>			<b>31.000.000.000</b>		
376	5	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti</b>	<b>83 Indeks 100 Persen</b>	<b>22.315.000.000</b>		<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>
	5	0	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program Kegiatan Yang Konsisten Dengan Target Yang di Tetapkan Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	80 %	1.625.000.000		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11 Dokumen	1.300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21 Laporan	75.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan	0,18 %	10.773.000.000		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	10.500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	10.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	10.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	3.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30 Laporan	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Menurunnya Temuan Audit Barang Milik Daerah	20 %	24.000.000		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	3.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	12.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang memiliki sertifikasi keahlian dan keterampilan	40 %	355.000.000		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	160.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	10.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	125.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	60.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentasi pelayanan umum berbasis elektronik	75 %	2.340.000.000		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	90.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	80.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.750.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	20.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	250.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Riset dan Inovasi	30 %	3.203.000.000		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	370.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	380.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1.802.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Riset dan Inovasi	100 %	3.290.000.000		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	30.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	400.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	60.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	2.800.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berfungsi baik	60 %	705.000.000		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	75.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	100.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	140.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	250.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
37	5	0	0			<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>Persentase Hasil Inovasi Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran</b> <b>Persentase Hasil Riset Yang Ditindaklanjuti Dalam Dokumen Anggaran</b>	<b>65 %</b> <b>70 %</b>	<b>8.685.000.000</b>		<b>BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>
	5	0	0	1.0		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	Persentase Hasil Riset bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang	2 %	1.371.000.000		BADAN PENELITIAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
						Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota				PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Laporan	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	2 Laporan	221.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	1 Laporan	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	4 Rekomendasi	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Hasil Riset bidang sosial dan kependudukan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	1.404.000.000		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	325.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	000	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1 Dokumen	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	354.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	250.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen	275.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Hasil Riset bidang ekonomi dan pembangunan yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	2 %	3.350.000.000		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	320.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	320.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	245.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	543.500.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	6 Dokumen	470.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
											PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1 Dokumen	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	320.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	125.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	245.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	245.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	001	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	166.500.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Hasil inovasi dan Pengembangan Iptek yang masuk dalam dokumen perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kab/Kota	11 %	2.560.000.000		BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	760.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	2 Laporan	200.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3 Laporan	1.150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	300.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5	0	0	1.0	000	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	150.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
						<b>Badan Penghubung Provinsi</b>			<b>22.500.000.000</b>		
	5					<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>22.500.000.000</b>		
	5	0				<b>PENGELOLAAN PENGHUBUNG</b>			<b>22.500.000.000</b>		
<b>37</b>	5	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>	<b>82,5 Poin</b>			<b>BADAN PENGHUBUNG PROVINSI</b>
<b>8</b>		7	1				<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b>	<b>82,5 Poin</b>	<b>17.564.456.601</b>		
	5	0	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang ditetapkan tepat waktu	100 %	521.660.700		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	166.187.400	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	64.220.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	64.220.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	55.220.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen	55.220.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	76.192.050	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	40.401.250	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu	100 %	3.549.097.700		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/ Bulan	2.965.137.700	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	24 Dokumen	237.960.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	149 Dokumen	180.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	2.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan	92.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	72.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	83.000.000		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	36.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	2.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	45.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	74,04 %	743.234.900		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	337.252.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33 Dokumen	144.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	25 Dokumen	27.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	77 Orang	234.982.400	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	100 %	1.557.983.901		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	103.686.975	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	521.580.526	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	88.200.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	103.622.900	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56 Laporan	649.053.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	91.840.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	965.509.500		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	35.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	249.800.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	102 Unit	680.709.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	5	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan	100 %	5.890.793.600		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	11.560.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	62 Laporan	1.827.582.800	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	37 Laporan	4.051.650.800	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	90 %	4.253.176.300		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	461.047.635	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	43 Unit	744.804.478	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	713 Unit	354.905.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	5 Unit	110.538.750	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit	2.503.880.437	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	78.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
379	5	0	0			<b>PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG</b>	<b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitas Promosi dan Informasi Yang Ditindaklanjuti</b> <b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitas Hubungan Antar Lembaga Yang Ditindaklanjuti</b> <b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan Mess Yang Ditindaklanjuti</b> <b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitas</b>	<b>100 %</b> <b>100 %</b> <b>100 %</b> <b>100 %</b> <b>100 %</b>	<b>4.935.543.399</b>		<b>BADAN PENGHUBUNG PROVINSI</b>

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							<b>Hubungan Antar Lembaga yang Ditindaklanjuti</b> <b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan Mess yang Ditindaklanjuti</b> <b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan Fasilitas Promosi dan Informasi yang Ditindaklanjuti</b>				
	5	0	0	1.0		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase Pelayanan Penghubung yang dilaksanakan	100 %	4.935.543.399		BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	2 Laporan	876.700.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	3 Laporan	824.844.410	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	2 Laporan	956.209.789	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	3 Laporan	1.728.024.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
	5	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	6 Laporan	549.765.200	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
						<b>Inspektorat</b>			<b>68.000.000.000</b>		
	6					<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>			<b>68.000.000.000</b>		
	6	0				<b>INSPEKTORAT DAERAH</b>			<b>68.000.000.000</b>		
<b>380</b>	6	0	0			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</b> <b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti</b>	<b>100 %</b> <b>100 %</b>	<b>47.430.000.000</b>		<b>INSPEKTORAT</b>
	6	0	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	2.050.000.000		INSPEKTORAT
	6	0	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	450.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	150.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	150.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
6	0	0	1.0	000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	350.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
6	0	0	1.0	000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	950.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
6	0	0	1.0			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah Sesuai SAP	100 %	18.466.000.000		INSPEKTORAT
6	0	0	1.0	000		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/ Bulan	17.566.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
6	0	0	1.0	000		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	650.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
6	0	0	1.0	000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	250.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
6	0	0	1.0			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang diadministrasikan dengan baik	100 %	100.000.000		INSPEKTORAT
6	0	0	1.0	000		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	100.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
6	0	0	1.0			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Pengawasan yang memiliki Standar Kompetensi Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang bersertifikat sesuai jenjangnya	100 % 100 %	8.550.000.000		INSPEKTORAT
6	0	0	1.0	000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	108 Paket	550.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
6	0	0	1.0	000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 Orang	7.500.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
6	0	0	1.0	001		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	110 Orang	500.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
6	0	0	1.0			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan	100 %	3.100.000.000		INSPEKTORAT
6	0	0	1.0	000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	150.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
6	0	0	1.0	000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	1.250.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
6	0	0	1.0	000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	150.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
6	0	0	1.0	000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	400.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	6	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	250.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	900.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana perangkat daerah	100 %	10.700.000.000		INSPEKTORAT
	6	0	0	1.0	000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	1.100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.0	000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	122 Paket	7.000.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.0	000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	550.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.0	001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	2.050.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pada perangkat daerah yang tersedia	100 %	3.364.000.000		INSPEKTORAT
	6	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	1.100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	150.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.100.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dipelihara dengan baik	100 %	1.100.000.000		INSPEKTORAT
	6	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	250.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	450.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	150.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	250.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
38 1	6	0	0			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pemda Provinsi dan Kab/Kota</b>	<b>100 %</b>	<b>16.870.000.000</b>		<b>INSPEKTORAT</b>
	6	0	0	1.0		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase identifikasi Manajemen Risiko pada perangkat daerah Persentase Laporan Keuangan Pemda dan Perangkat Daerah yang sesuai SAP Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Hasil Pemeriksaan APIP	100 % 100 % 75 %	6.520.000.000		INSPEKTORAT
	6	0	0	1.0	000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	82 Laporan	1.985.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.0	000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	850.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Samarinda Ulu, Jawa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.0	000	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30 Laporan	850.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.0	000	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	30 Laporan	1.985.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.0	000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen	850.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.0		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditindaklanjuti	100 % 100 %	10.350.000.000		INSPEKTORAT
	6	0	0	1.0	000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	12 Laporan	550.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.0	000	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	86 Laporan	9.800.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
38 2	6	0	0			<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase Pemenuhan Aksi Pencegahan Korupsi</b>	<b>83 %</b>	<b>3.700.000.000</b>		<b>INSPEKTORAT</b>
	6	0	0	1.0		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Aksi PPK yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah Persentase Hasil Penilaian Integritas Pemda yang tindaklanjuti Persentase Laporan Penerimaan Penolakan Gratifikasi yang ditangani Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat yang ditangani Persentase Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah yang Ditetapkan	100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	3.700.000.000		INSPEKTORAT

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
							sebagai ZI menuju WBK/WBBM Persentase Tingkat Kepatuhan Penyampaian Laporan LHKPN dan LHKASN				
	6	0	0	1.0	000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20 Perangkat Daerah	850.000.000	- Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
	6	0	0	1.0	000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20 Kegiatan	2.850.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	INSPEKTORAT
						<b>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>			<b>413.170.594.417</b>		
	<b>8</b>					<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>			<b>413.170.594.417</b>		
	<b>8</b>	<b>0</b>				<b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>			<b>413.170.594.417</b>		
<b>38</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti</b>	<b>78.63 Indeks 100 %</b>	<b>18.628.506.000</b>		<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>
	8	0	0	1.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu	100 %	984.145.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	452.845.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	14.940.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	3.590.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	3.590.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	509.180.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran	96.5 %	9.867.770.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	8	0	0	1.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/ Bulan	9.000.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	587.400.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	9.330.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1.795.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	267.450.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.795.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik	30 %	44.975.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	3.590.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1.795.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	37.795.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	1.795.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	33 %	548.209.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	222.794.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	8	0	0	1.0	000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	60 Dokumen	7.707.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	60 Dokumen	7.707.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	45 Orang	310.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum	95 %	4.847.459.800		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	75.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket	1.606.277.200	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	80.915.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	2.615.892.600	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	001	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen	469.375.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1.320.563.200		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	30.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	228.392.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1.062.171.200	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100 %	1.015.384.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	8	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	84.960.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	107.750.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	61 Unit	42.674.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	10 Unit	200.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	580.000.000	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
384	8	0	0			<b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>	<b>Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan</b>	<b>100 %</b>	<b>18.700.000.000</b>		<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>
	8	0	0	1.0		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	6 Dokumen	18.700.000.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10910 Orang	16.823.262.500	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	1.726.200.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	1 Dokumen	150.537.500	- Kota Samarinda, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode				Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
						Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara					
385	8	01	03			<b>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>	Persentase masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	1.30 %	363.467.088.417		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Peningkatan Kehidupan Masyarakat yang demokratis	4 Dokumen	363.467.088.417		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2148 Orang	362.811.888.417	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	03	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4 Laporan	655.200.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
386	8	01	04			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>	Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif	31.21 %	3.625.648.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	3 Dokumen	3.625.648.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	
	8	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1295 Orang	3.386.248.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	4 Laporan	239.400.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
387	8	0	0			<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>	<b>Persentase elemen masyarakat yang mendapatkan pembinaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan agama</b>	<b>100 %</b>	<b>2.049.352.000</b>		<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>
	8	0	0	1.0		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	4 Dokumen	2.049.352.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1070 Orang	1.847.752.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 Laporan	201.600.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
388	8	0	0			<b>PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL</b>	<b>Persentase potensi konflik sosial yang ditangani</b>	<b>100 %</b>	<b>6.700.000.000</b>		<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>
	8	0	0	1.0		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah rumusan kebijakan yang mendukung Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8 Dokumen	6.700.000.000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan			Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								Target 2024	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi		
	8	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2015 Orang	3.112.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4 Laporan	588.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8	0	0	1.0	000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen	3.000.000.000	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	<b>J U M L A H</b>									<b>20.175.000.000.000</b>		

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan gambaran hasil yang ingin dicapai dalam pembangunan yang tergambarkan dalam pencapaian indikator-indikator dari *impact* dan *outcome*. Indikator *impact* dan *outcome* ini dianggap mampu mewakili dan menggambarkan hasil capaian kinerja pembangunan yang dilakukan melalui berbagai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan pembangunan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan terhadap visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur beserta turunannya, yakni tujuan dan sasaran pembangunan. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan tahunan daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret pembangunan Provinsi Kalimantan Timur di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcome*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcome*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik *outcome* ataupun *output* pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah. Dalam perkembangannya, indikator kinerja harus mampu mengikuti perkembangan

dinamika global manajemen kinerja pemerintah daerah sehingga setiap permasalahan maupun pra kondisi pembangunan dapat dianalisis melalui capaian target indikator kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator kinerja daerah ini selanjutnya dirumuskan kedalam Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur yang digunakan sebagai ukuran utama pencapaian kinerja pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Pada subbab ini memuat beberapa indikator kinerja yang menjadi komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2024. Rincian masing-masing indikator kinerja disajikan sebagai berikut:

### 7.1. Indikator Kinerja Makro dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja makro dan indikator kinerja utama (IKU) memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai oleh pemerintah daerah dalam membangun Provinsi Kalimantan Timur. Indikator kinerja makro dapat diartikan sebagai indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Pencapaian indikator makro didorong oleh pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah dengan melibatkan peran seluruh pemangku kepentingan.

Tabel VII.1  
Indikator Kinerja Makro Daerah  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2022	Target 2024
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	77,44	78,32
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,71	5,46
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,48	4,10-4,90
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,31	5,78
5	Indeks Gini	Poin	0,327	0,316
6	Persentase Penurunan Emisi dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	Persen	70,73	31,05

Sumber: hasil proyeksi, 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur kinerja daerah pada tingkat tertinggi yang menggambarkan kinerja dampak (*impact*) atau *ultimate outcome*. Indikator kinerja tujuan dan sasaran menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.

Tabel VII.2  
Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama		Satuan	Capaian 2022	Target 2024
<b>INDIKATOR KINERJA TUJUAN</b>				
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	77,44	78,32
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,48	4,10-4,90
3	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,31	5,78
4	Indeks Gini	Indeks	0,327	0,316
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	74,46	75,00
6	Persentase Penurunan Emisi dari <i>Business As Usual</i> (BAU)	Persen	70,73	31,05
7	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,70 (B)	69,00 (B)
<b>INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS</b>				
8	Prevalensi Stunting	Persen	23,90	12,83
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,71	5,46
10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	66,84	67,31
11	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	6,74	7,74
12	Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT)	Persen	7,27	10,39

Sumber: hasil proyeksi, 2023

## 7.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebut juga Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) merupakan instrumen pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yang termasuk ke dalam Indikator Kinerja Urusan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Adapun Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) dimaksud antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel VII.3  
Indikator Kinerja Daerah (IKD)  
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Capaian 2022	Target 2024
1	2	3	4	5
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>			
01.01	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	92,31	100
01.02	Tingkat Partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	%	81,36	82,5
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>			
02.01	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan di Provinsi	%	1,73	1,86
02.02	Persentase RS rujukan Provinsi yang terakreditasi	%	72,88	100,00
02.03	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100
02.04	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	%	100	100
3	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>			
03.01	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	47,66	70,78
03.02	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Provinsi	%	15,08	65,29
03.03	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	57,86	61,22
03.04	Rasio kemantapan jalan provinsi	%	77,52	82,09
03.05	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	%	52,62	57,64
4	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>			
04.01	Persentase Luas kawasan kumuh 10 – 15 Ha yang ditangani	%	55,02	53,03
5	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>			
05.01	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100
05.02	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	72,73	100
05.03	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100
05.04	Persentase penanganan pra bencana	%	70	100
05.05	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Capaian 2022	Target 2024
1	2	3	4	5
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
06.01	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100
06.02	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti	%	95,97	100
06.03	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	64,97	100
06.04	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	100
06.05	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	%	100	100
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
07.01	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	60	90
07.02	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	51	50
07.03	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	7.512,81	07.00
07.04	Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	20,52	20
07.05	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	26,1	27.20.00
07.06	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	%	86,26	85,00,
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
08.01	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	11,38	14
08.02	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	%	1,07	02.00
08.03	Rasio kekerasan terhadap perempuan per 10.000 anak	%	2,46	23.46
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
09.01	Persentase Cadangan Pangan	%	70,52	88,83
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
10.01	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	%	74,46	75,00
10.02	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	%	96,34	97

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Capaian 2022	Target 2024
1	2	3	4	5
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
11.01	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	%	100	100
11.02	Pemanfaatan data kependudukan	%	26,47	38,23
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
12.01	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	68,52	59
12.02	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	%	92,25	6,27
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
13.01	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	02.18	2,04
13.02	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	55,5	67,98
13.03	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi ( <i>unmet need</i> )	%	29,7	7,54
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
14.01	Rasio konektivitas provinsi	Angka	0,816	0,846
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
15.01	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	68,42	100
15.02	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	%	53,66	55
15.03	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Provinsi	%	61,67	63
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
16.01	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	30,59	39
16.02	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	%	77,38	75
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
17.01	Persentase peningkatan investasi di provinsi	%	40,29	1
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
18.01	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,12	1,02
18.02	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	9,5	20,49
18.03	Peningkatan Prestasi Olahraga (Medali)	Medali	10	100
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
19.01	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100
19.02	Persentase OPD yang menggunakan data statistik	%	100	100

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Capaian 2022	Target 2024
1	2	3	4	5
	dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah			
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
20.01	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	38,76	53
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
21.01	Terlestariannya Cagar Budaya	%	59,92	62
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
22.01	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	skor	46,27	46
22.02	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	indeks	34,16	35
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
23.01	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	74,65	76
23.02	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	3,34	3,5
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
24.01.00	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton	339.631	370.000
24.02.00	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	%	59,09	100
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
25.01.00	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-7,53	11,82
25.02.00	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	%	67,47	62
25.03.00	Tingkat hunian akomodasi	%	1,67	1,65
25.04.00	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	0,82	0,83
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
26.01.00	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	3,63	3,67
26.02.00	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	83,67	-2,74
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			
27.01.00	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%	76,19	75
27.02.00	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	%	0,12	1
27.03.00	Persentase Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	%	80,86	89

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Capaian 2022	Target 2024
1	2	3	4	5
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
28.01.00	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	%	86,17	100
28.02.00	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	%	100	100
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
29.01.00	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	%	55,71	55,75
29.02.00	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	100	100
29.03.00	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	72,22	73
29.04.00	Tertib Usaha	%	100	100
29.05.00	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	92,67	85
29.06.00	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi Yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan	%	76,04	77
29.07.00	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	1,17	1,15
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
30.01.00	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	%	20,7	17
30.02.00	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	124,25	117
30.03.00	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	23,61	25
30.04.00	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	220	95
31	PERENCANAAN DAN KEUANGAN			
31.01.00	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	5,44	9,65
31.02.00	Rasio PAD	%	53,54	50,45
31.03.00	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer <i>expenditures</i> )	%	62,58	65,05
31.04.00	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP
31.05.00	<i>Budget execution</i> : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	15,57	100
31.06.00	<i>Revenue mobilization</i> : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	27,18	100
31.07.00	<i>Assets Management</i>	Aspek	4	4
31.08.00	<i>Cash Management</i> : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	54,01	15,49
32	PENGADAAN			
32.01.00	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	%	4,35	3,9

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Satuan	Capaian 2022	Target 2024
1	2	3	4	5
32.02.00	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	63	75
32.03.00	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	-	30
33	KEPEGAWAIAN			
33.01.00	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	157,53	90
33.02.00	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	17,53	86
33.03.00	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	18,27	86
34	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK			
34.01.00	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3	Level 3
34.02.00	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern (APIP)	Level	Level 3	Level 3

Sumber: hasil proyeksi, 2023

## BAB VIII

### P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun pertama Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026. Tema Pembangunan RKPD tahun 2024 adalah “Peningkatan daya saing SDM dan Infrastruktur Wilayah yang Andal untuk percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan”. Tema ini mengandung substansi pokok pembangunan tahun 2024 yaitu menguatkan daya saing SDM dan infrastruktur wilayah yang andal melalui percepatan transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Penyusunan RKPD tahun 2024, dilakukan melalui berbagai tahapan dan dibahas dalam forum koordinasi dan konsultasi, baik antar pemerintah kabupaten/kota, Perangkat Daerah, lembaga pemerintah non kementerian dan pemangku kepentingan lainnya, serta memperhatikan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Keberhasilan pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, tergantung pada kesesuaian asumsi-asumsi yang dibangun pada saat penyusunan RKPD tahun 2024 ini. Salah satu asumsi yang digunakan dalam proses penyusunan RKPD tahun 2024 ini adalah adanya kerjasama semua pelaku pembangunan dalam memberikan kontribusi sesuai peran serta kemauan untuk turut mengawal dan mengendalikan pelaksanaan semua rencana program/kegiatan yang telah direncanakan.

#### 8.1 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RKPD 2024 yang menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen ini antara lain :

1. RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi antar pelaku pembangunan untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan;

2. RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 merupakan pedoman penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024;
3. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 merupakan rencana kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang memerlukan peran serta aktif seluruh Pemangku Kepentingan untuk berkontribusi sesuai perannya masing-masing;
4. Setiap PD/Dinas/Instansi lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur wajib menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan mempedomani RKPD Tahun 2024 serta melakukan sinkronisasi, integrasi, dan sinergitas program/kegiatan terhadap kebijakan Renja K/L 2024 dan Renja Perangkat Daerah kabupaten/Kota tahun 2024;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024 wajib dilaksanakan oleh seluruh kepala perangkat daerah dan bupati/walikota dengan tujuan untuk: (1) memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan; (2) memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif, akuntabel dan partisipatif; serta (3) melakukan pelaporan atas perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan kepada gubernur dan masyarakat umum, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku
6. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif baik sebagai subyek maupun sebagai obyek pembangunan, dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024;
7. Gubernur melalui Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan RKPD berdasarkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah secara berkala, untuk selanjutnya menjadi bahan Perubahan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 (jika dilakukan perubahan);

8. Kepala Bappeda melakukan evaluasi hasil di akhir tahun pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 yang selanjutnya menjadi bahan bagi penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025;
9. RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahun 2024.

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

**BAPPEDA**  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jl. Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123,  
Telp : 0541 - 741044, <https://bappeda.kaltimprov.go.id>,